



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**PERATURAN  
WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 31 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BOGOR  
TAHUN 2020**





**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 31 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 27**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 27 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 28 Juni 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**



**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**

**NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 pada periode berkenaan yaitu periode tahapan ke-4 Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kota Bogor dengan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, serta berpedoman pada Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
- b. bahwa untuk menjamin agar RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor;
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bogor.

## **BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD, DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kedudukan RKPD merupakan:
  - a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  - b. penjabaran dari RPJMD Kota Bogor berpedoman kepada RKP yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, indikator pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
  - a. penyusunan Renja Perangkat Daerah;
  - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2020.
- (3) Tujuan Penetapan RKPD adalah untuk:
  - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
  - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
  - c. mewududkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
  - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **BAB III KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 3**

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2019**

#### **Pasal 4**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

#### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 2.1. Gambaran Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **BAB VII PENUTUP**

### **BAB V PERUBAHAN RKPD**

#### **Pasal 5**

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

### **BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana pembangunan;
- b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah;
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

### **BAB VII PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 9**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 Juni 2019

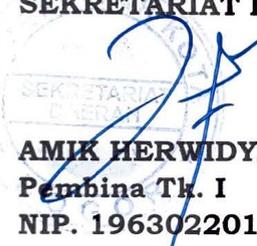
**WALI KOTA BOGOR,  
Ttd.  
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,  
Ttd.  
ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2019 NOMOR 27 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**

  
**AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196302201991092001

## **LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR**

**NOMOR : 31 Tahun 2019**  
**TANGGAL : 28 Juni 2019**  
**TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BOGOR TAHUN 2020**

### **BAB I**

#### **PEDAHULUAN**

##### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD ini selanjutnya menjadi acuan kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor pada periode 2019-2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan tahapan pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD. Mengingat penyusunan RKPD Kota Bogor tahun 2020 dilaksanakan pada saat RPJMD 2019-2024 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 147 menyebutkan bahwa :

- 1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 pada periode berkenaan yaitu periode tahapan ke -4 pembangunan jangka menengah Tahun 2019-2024, serta mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kota Bogor dengan pembangunan daerah propinsi Jawa Barat.
- 2) Selanjutnya RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diatas, menjadi bagian dari RPJMD Tahun 2019-2024 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- 3) Selain itu, RKPD Kota Bogor Tahun 2020 disusun berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024, RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020, Rancangan RKP Tahun 2020 serta program strategis nasional.
- 4) Dalam penyusunan RKPD , DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil

reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2005-2025 dan Rancangan Awal RPJMD 2019-2024 yang telah disampaikan kepada DPRD

- 5) Selain itu mengacu pada amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yaitu: penyusunan RKPD Tahun 2020 mengacu pada peraturan daerah mengenai Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2020 dilaksanakan dengan melalui pendekatan :

- 1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020, serta Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
- 2) Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang teridentifikasi pada saat reses DPRD. Musrenbang Tingkat Kelurahan dilaksanakan pada Bulan Desember Tahun 2018, dilanjutkan dengan musrenbang Kecamatan dan Forum perangkat Daerah yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat Kota yang dilaksanakan pada awal Maret 2019. Hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Kota Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2019;
- 3) Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan;

- 4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dan perencanaan pemenuhan janji-janji politis Kepala Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada target-target yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratis RPJMN Tahun 2019-2024 dan Rancangan Awal RKP Tahun 2020, RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020, dan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 serta Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
- 2) Hasil telaahan terhadap Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 melalui forum Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang kemudian disebut sebagai Forum Perangkat Daerah Musrenbang RKPD Tahun 2020.
- 3) Penyusunan RKPD merupakan hasil dari tahapan awal proses perencanaan yang bersifat partisipatif, yang dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan (dilaksanakan pada Bulan Desember 2018) dan Musrenbang Tingkat kecamatan (dilaksanakan Pada Bulan Februari 2019).
- 5) Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020 dibahas secara intensif melalui rangkaian pembahasan Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan pada Bulan Februari 2019), dan Pramusrenbang berupa sidang kelompok berdasarkan kelompok urusan Sosial Budaya, Pemerintahan, Fisik dan Infrastruktur, serta ekonomi (dilaksanakan pada Bulan Maret 2019). Dalam sidang kelompok sebagaimana dimaksud, Rancangan Renja yang disampaikan oleh Perangkat Daerah melalui mekanisme teknokratis sudah dipaduserasikan dengan usulan kegiatan yang bersifat partisipatif yaitu usulan kegiatan masyarakat dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan, usulan kegiatan yang bersifat top down, dan usulan kegiatan yang bersifat politis baik itu aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD maupun janji-janji politis kepala daerah dengan hasil penelaahan

pokok-pokok pikiran DPRD serta pendapat dari kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.

- 6) Selanjutnya hasil sidang kelompok dalam pra musrenbang tersebut yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota Bogor Tahun 2020 dan disampaikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam musrenbang tingkat Kota dan (dilaksanakan pada Bulan Maret 2019).
- 7) Penyusunan dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2020 berpijak kepada Rancangan RKPD yang telah disampaikan pada saat musrenbang tingkat kota, hasil Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Walikota Bogor tentang RKPD 2020. Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2020 didukung oleh sistem dan skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) Tahun 2020 serta dilakukan dengan pendekatan logical framework untuk fokus prioritas kegiatan yang disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) supaya disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

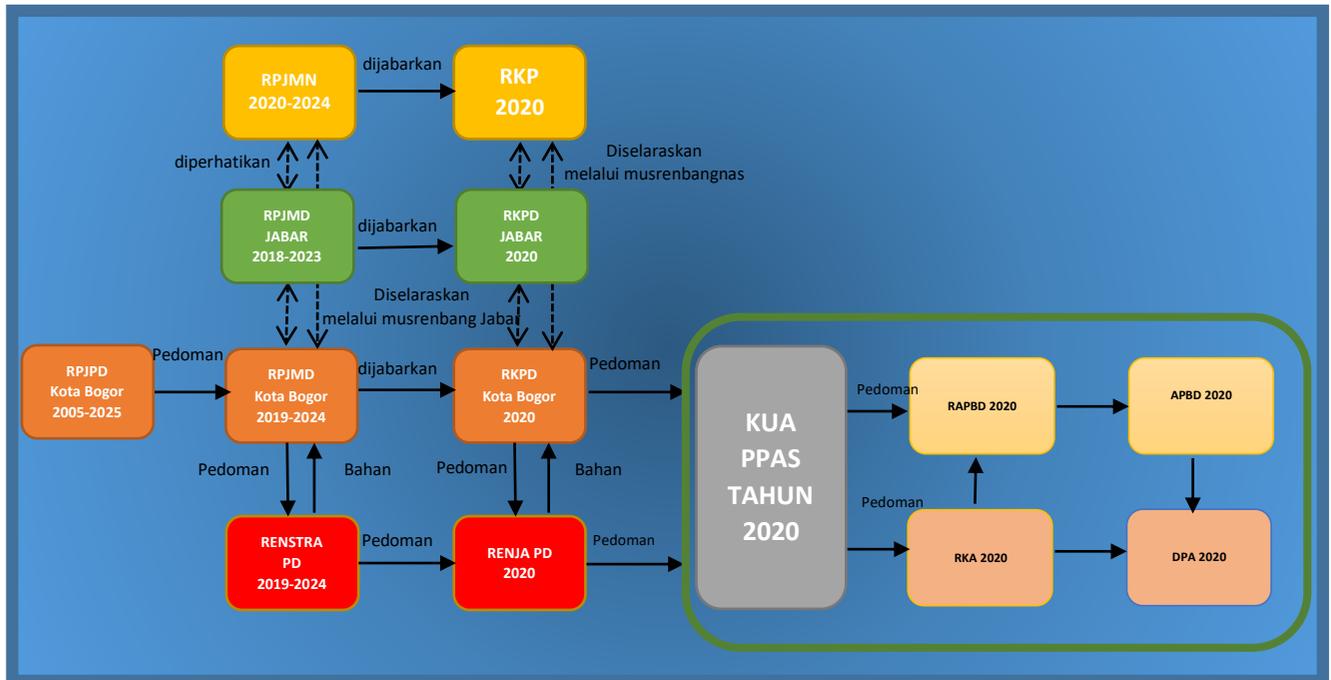
- 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah supaya disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bogor.
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2010 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah melalui eraturan daerah Nomor Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D).

### **I.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Hubungan Antar Dokumen Penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2020 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2020 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA Perangkat Daerah (PD), seperti digambarkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. : Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Pembangunan



RKPD Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok RPJPD; serta Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor dan akan menjadi tahun pertama RPJMD. RKPD Tahun 2020 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020.

#### I.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2020

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor Tahun 2020” sebagaimana telah dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Tahun 2020;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas serta pemangku kepentingan lainnya;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2019-2024**

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN.**

### 1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020 yang berisi pengertian ringkas RKPD, proses penyusunan RKPD, Kedudukan RKPD tahun Rencana dalam priode dokumen RPJMD, Keterkaitan antara dokumen RKPD dan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

### 2. Landasan Hukum Penyusunan RKPD

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020 baik yang berskala nasional, maupun lokal.

### 3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang relevan seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RKP, dan RKPD Propinsi Jawa Barat

### 4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020.

### 5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020 berkaitan dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

## **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

### 1. Gambaran Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran kondisi umum daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan sebagai berikut :

#### 1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi umum geografis kota Bogor, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

#### 1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indicator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terkait focus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, focus kesejahteraan social, focus seni budaya dan olahraga.

#### 1.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indicator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terkait fokus urusan pelayanan wajib dan urusan pelayanan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

#### 1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indicator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terkait focus kemampuan ekonomi daerah, focus fasilitas infrastruktur, focus iklim investasi dan focus sumberdaya manusia.

### 2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menelaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya.

Telaahan Hasil Evaluasi mencakup :

- 1.1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
  - 1.2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun ke-n
  - 1.3. Realisasi Program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
  - 1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan yang direncanakan
  - 1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah
  - 1.6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab itu.
3. Permasalahan Pembangunan Daerah
- Merumuskan secara umum permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dana tau tugas fungsi perangkat daerah. Identifikasi Permasalahan pembangunan daerah tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu :
- 3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
  - 3.2. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

### **BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

#### 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rancangan RKP (Nasional) Tahun 2020, Arah Kebijakan Ekonomi yang tertuang dalam RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020, dan Arah Kebijakan di bidang Ekonomi dalam Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2020. Arah Kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi misi Kepala daerah, serta permasalahan daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

## 2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan kebijakan yang akan dirumuskan oleh Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

### **BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

#### 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Hubungan visi misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang telah tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

#### 2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Menjelaskan prioritas pembangunan tahun 2020 yang dikaitkan dengan target kinerja pembangunan daerah tahun 2020 yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 2019-2024

### **BAB V. Rencana Kerjadan Pendanaan Daerah**

Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2018 dan target kinerja RPJMD tahun 2020.

### **BAB VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan mejadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun Rencana.

### **BAB VII. Penutup**

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

**2.1.1. KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH**

**A. LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI**

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 hektar yang terdiri dari enam kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 3.285 hektar dan terdiri dari 16 kelurahan sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 813 hektar dan terdiri dari 11 kelurahan. Untuk luas wilayah menurut kecamatan tersaji pada Tabel 2. 1.

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Darmaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

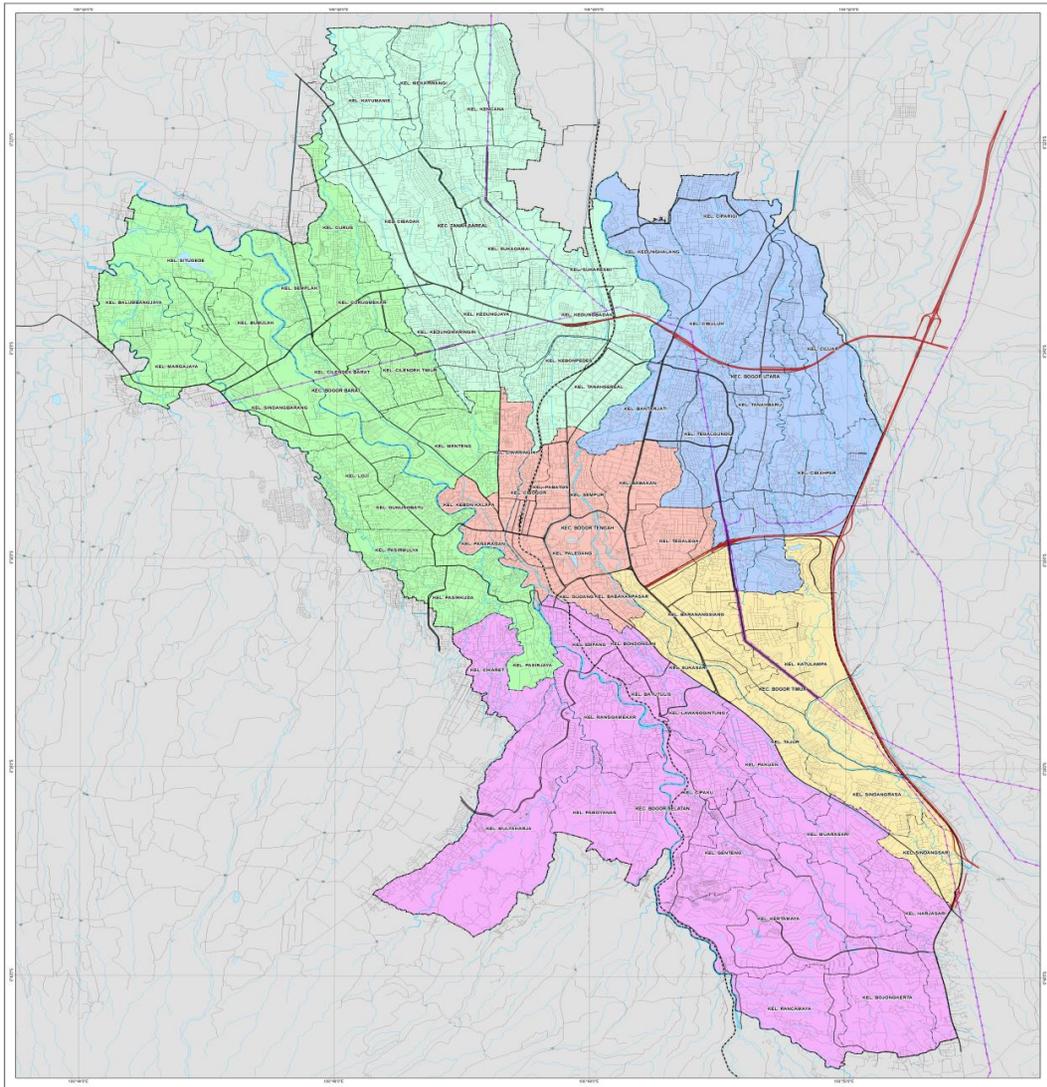
**Tabel 2. 1**

**Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS WILAYAH (HA)</b>
<b>1</b>	Bogor Selatan	3.081
<b>2</b>	Bogor Timur	1.015
<b>3</b>	Bogor Utara	1.772
<b>4</b>	Bogor Tengah	813
<b>5</b>	Bogor Barat	3.285
<b>6</b>	Tanah Sareal	1.884
	Jumlah	11.850

*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018*

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kota Bogor**



## **B. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFI**

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara  $106^{\circ}43'30''\text{BT}$  –  $106^{\circ}51'00''\text{BT}$  dan  $6^{\circ}30'30''\text{LS}$  –  $6^{\circ}41'00''\text{LS}$ . Kedudukan geografi Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan DKI Jakarta. Jarak Kota Bogor dengan Kota Jakarta kurang lebih 60 kilometer dan dengan Kota Bandung sekitar 120 kilometer. Hal ini menjadi potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Berdasarkan hasil foto udara diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah

### **C. TOPOGRAFI**

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0–2 persen, untuk luasan lahan datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2–15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15–25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25–40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat peka terhadap erosi, karena mempunyai kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam sehingga daerah tersebut sangat peka terhadap erosi.

### **D. GEOLOGI**

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar.

Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas aluvial.

### **E. HIDROLOGI**

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dalam mengalami penurunan dibanding tahun

2011. Demikian pula kapasitas air tanah dalam, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan.

Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor. Lahan di Kota Bogor hingga tahun 2012 masih banyak lahan tidak kritisnya yaitu sekitar 81,45 persen (9.651,98 ha). Sementara lahan kritisnya mencapai 1,82 persen (215,47 ha). Sisanya agak kritis 2,49 persen (295,07 ha) dan potensial kritis 14,24 persen (1.687,48 ha). Lahan kritis banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Semua Kelurahan di daerah tersebut mengandung lahan kritis kecuali Kelurahan Cikaret. Lahan potensial kritis selain di Kecamatan Bogor Selatan juga banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat.

Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang dan Situ Curug difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

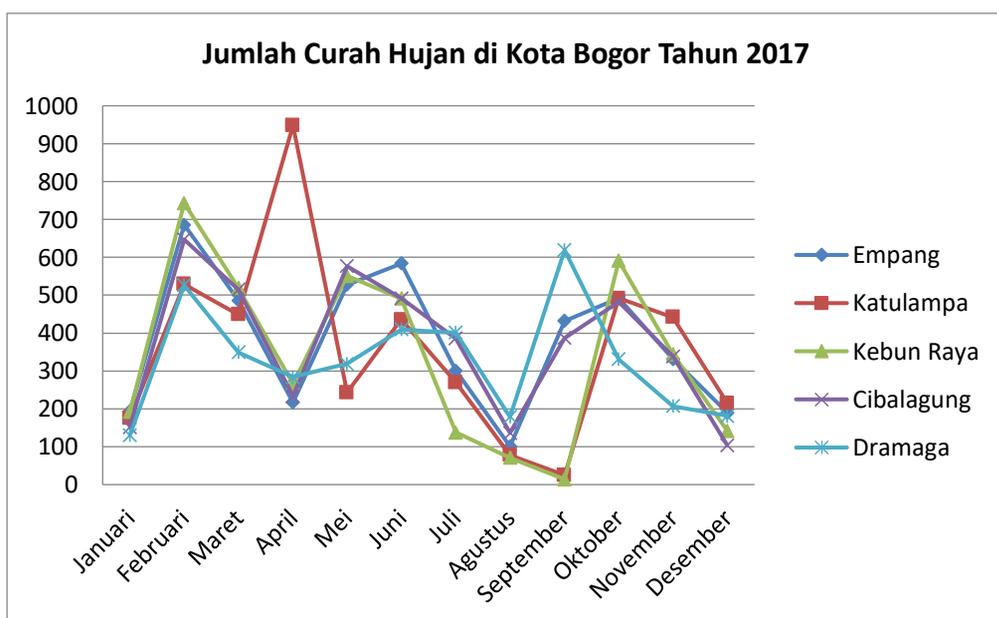
Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai luas pengaliran 185 kilometer persegi dan Sungai Ciliwung mempunyai luas pengaliran 211 kilometer persegi. Menurut hasil pengukuran debit tahun 2004, setiap satu kilometer persegi Sungai Cisadane memiliki debit 75,8 liter per detik dan setiap satu kilometer persegi Sungai Ciliwung memiliki debit 74,1 liter per detik.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri *e-coli* sedikit diatas kriteria yang disyaratkan.

## F. KLIMATOLOGI

Jumlah curah hujan di Kota Bogor pada tahun 2017, memperlihatkan Pos Hujan Empang dengan jumlah curah hujan terbesar yaitu 378,6. Menurut Stasiun Klimatologi, bulan September menjadi bulan dengan curah hujan terbesar pada tahun 2017 di Kota Bogor dengan Pos Hujan Empang terbesar yaitu 619. Sedangkan untuk curah hujan rata-rata dalam rentang tiga tahun terakhir, dari tahun 2012 sampai dengan 2017 mengalami naik turun yang berkisar antara 304,5 sampai 328,0.

**Grafik 2.1**



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018

Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan.

## G. PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Kota Bogor sebesar 1.358,88 hektar atau 11,467 persen lahan Kota Bogor sudah menjadi kawasan perumahan. Sedangkan sisanya dipergunakan antara lain untuk lahan pertanian kota seluas 3.107,70 hektar (26,22%), lahan industri seluas 98,81 hektar (0,83%), perdagangan dan jasa seluas

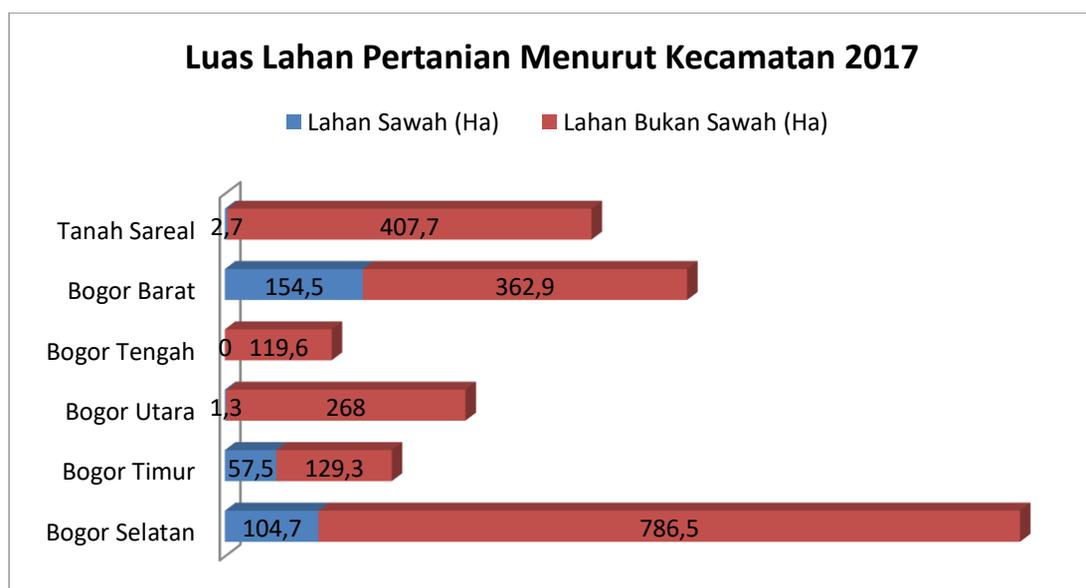
246,88 hektar (2,08%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 51,60 hektar (0,43%), kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,95 hektar (1,16%), danau/situ seluas 19,36 hektar (0,16%), sungai seluas 1,10 hektar serta sempadan sungai seluas 1,07 hektar.

Luas lahan sawah di enam kecamatan pada tahun 2017 yaitu 320,7 hektar luas lahan sawah dan luas bukan sawah yaitu 2.074 hektar. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luasan lahan sawah terbesar yaitu 154,5 hektar dan Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luasan lahan bukan sawah terbesar yaitu 786,5 hektar.

Jenis penggunaan lahan bukan sawah dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu: Tegal, Ditanami Pohon, Kolam, Tidak Diusahakan dan Lainnya. Pada tahun 2017, lahan tegal mempunyai luasan yang paling besar yaitu 1.648 hektar dan Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luas lahan bukan sawah terbesar di Kota Bogor.

**Grafik 2.2**

**Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan 2017**



*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018*

Kemampuan lahan di Kota Bogor terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

**a) Lahan yang tidak dapat dikembangkan (*restricted area*)**

Lahan yang tidak dapat dikembangkan adalah lahan yang sudah ditetapkan mempunyai fungsi perlindungan dan lahan yang ditetapkan tidak dapat dialihfungsikan ke penggunaan lain yang tidak sesuai. Secara umum lahan ini

adalah lahan perlindungan setempat, kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota. Lahan ini terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota, serta kawasan perlindungan setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada Pasal 60, bahwa kawasan perlindungan plasma nutfah adalah Kebun Raya Bogor. Wilayah Hutan Kota yang dapat dijadikan potensi RTH Kota Bogor kedepan adalah hutan-hutan penelitian yang notabene adalah milik departemen/kantor pusat yang sewaktu-waktu bisa dialihkan fungsinya menjadi fungsi komersial diantaranya: Hutan Penelitian Biotrop dan Kebun Penelitian IPB.0000

#### **Lahan yang dapat dikembangkan dengan persyaratan (*limited area*)**

Lahan yang dapat dikembangkan dengan persyaratan adalah lahan belum terbangun yang dapat dialihfungsikan untuk kegiatan perkotaan dengan persyaratan tertentu seperti pengaturan bangunan atau penggunaan teknologi tertentu. Di Kota Bogor lahan ini terdiri dari lahan resapan air dimana pembangunannya memerlukan pengaturan KDH dan/atau pemberlakuan aturan penyediaan sumur resapan.

#### **Lahan yang dapat dikembangkan (*developed area*)**

Lahan yang dapat dikembangkan adalah lahan terbangun atau lahan tidak terbangun yang dapat dialihfungsikan penggunaannya untuk keperluan aktivitas budidaya perkotaan, seperti perumahan dan prasarananya, industri, perdagangan dan jasa. Dalam kecenderungannya lahan tidak terbangun cenderung beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan prasarananya atau industri. Sedangkan kegiatan komersial perkotaan berupa perdagangan dan jasa cenderung berubah dari penggunaan lahan perumahan atau lahan terbangun lainnya.

### **2.1.2. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011

- 2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

- a) Wilayah Pengembangan (WP) A, dengan pusat WP di Kebun Raya dan sekitarnya;
- b) Wilayah Pengembangan (WP) B, dengan pusat WP di kawasan di Bubulak dan sekitarnya;
- c) Wilayah Pengembangan (WP) C, dengan pusat WP di kawasan di Yasmin dan Pasar TU Kemang;
- d) Wilayah Pengembangan (WP) D, dengan pusat WP di kawasan di BORR Kedunghalang, Sentul, dan Warung Jambu;
- e) Wilayah Pengembangan (WP) E, dengan pusat WP dikawasan Tajur R3, *Inner Ring Road*.

Dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka pembagian wilayah pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor**

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jml Penduduk (jiwa)	Keterangan
1	A	Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersil di sekitar Kebun Raya (Pusat Kota Lama)	- Pusat Kota - Sub-Pusat Kota (Pusat WP-A)	- Seluruh Kota - WP	296.180	
2	B	Daerah Bubulak - Sindang barang	- Subpusat Kota (Pusat WP-B)	- WP	216.065	Melayani penduduk perbatasan
3	C	Daerah Jasmin – Pasar TU Kemang	- Subpusat Kota (Pusat WP-C)	- WP	427.718	
4	D	Daerah warung Jambu-Jl. Adnawijaya	- Subpusat Kota (Pusat WP-D)	- WP	382.509	
5	E	Daerah Tajur &sekitar rencana akses toll Ciawi-Sukabumi-Inner Ring Road	- Subpusat Kota (Pusat WP-E)	- WP	353.554	Melayani penduduk perbatasan

Sumber : RT-RW Kota Bogor 2011- 2031

**Tabel 2.3**

**Arahan Pengembangan Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor**

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
<b>A</b>	Pengendalian, revitalisasi (pembangunan kembali) dan peremajaan kota ( <i>Urban Renewal</i> )	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional sepanjang koridor jalan utama	Jalan Pajajaran, Jalan Juanda, Jalan Suryakencana, Jalan Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Pahlawan
		Revitalisasi kawasan	Stasiun Kereta Api, Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani, Pasar Kebon Kembang, Kawasan Jembatan Merah, serta Kawasan Pasar Bogor dan sekitarnya
		Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur yang berlokasi pada bantaran sungai dengan mengembangkan perumahan vertikal KDB rendah	Bantaran Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cipakancilan
		Menjaga dan melindungi dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi dan nilai kawasan	Kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebarkan
		Pengendalian perubahan fungsi dan bentuk bangunan	Kawasan cagar budaya permukiman Taman Kencana dsk
<b>B</b>	Pengembangan yang terkendali	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional	Jalan Gunung Batu (Jl. Mayjen Ishak Djuarsa), Jalan Sindangbarang (Jl. Ibrahim Adjie), Jalan RE Abdullah, Jalan Aria Surialaga, Jalan Ciomas Raya dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh serta rencana jalan <i>inner ring road</i>

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
		Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU	Pusat WP B
		Perlindungan kawasan lindung dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi lindung kawasan	Situ gede dan hutan kota Cifor
		Mempertahankan luasan lahan pertanian kota	menyebarkan
		Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan agar tetap berkepadatan sedang dan rendah	menyebarkan
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Perumahan kepadatan tinggi (areal eksisting)
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebarkan
		Mempertahankan RTH pusat penelitian dan kebun percobaan	Kawasan pusat penelitian dan kebun percobaan
		Meremajakan TPU yang ada dengan <i>konsep rumputisasi</i> agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
<b>C</b>	Pengembangan baru yang terarah	Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	terutama di sepanjang Jalan Kemang-Kedunghalang (Jl. Sholeh Iskandar) dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh
		Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU	Pusat WP C
		Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan	Menyebarkan

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
		sedang serta mengupayakan pemaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya	
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebarkan
		Pembangunan infrastruktur kota baru disertai jalur hijau di sekitarnya	TPPAS dan TPU Kayu manis
		Mengembangkan kawasan stoplet Sukaresmi sebagai terminal multimoda yang terkait dengan pengembangan kegiatan komersial, fasilitas pelayanan dan hunian vertical (konsep TOD)	Kawasan stoplet Sukaresmi
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Perumahan kepadatan tinggi Kebon Pedes
		Mempertahankan RTH privat di lingkungan pabrik dengan pemberian insentif yang sesuai	Kawasan industri Pabrik ban <i>Good year</i>
		Menjaga dan melindungi dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sarana olahraga (SOR)	Kawasan sarana olah raga stadium Pajajaran RTH Sarana Olah raga
		Meremajakan TPU yang ada dengan <i>konsep rumputisasi</i> agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
<b>D</b>	Pengembangan baru terarah	Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	Jalan Pajajaran, Jalan Kedunghalang (Jalan KS. Tubun), Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
			Pemda, Jalan Pangeran Sogiri serta rencana jalan-jalan kolektor baru
		Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU	Pusat WP D
		Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pemaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya	Menyebarkan
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Menyebarkan , daerah eksisting
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebarkan
		Membatasi penambahan lokasi industri yang baru serta menata kawasan sekitarnya	Jalan Raya Pemda
		Meremajakan TPU yang ada dengan <i>konsep rumputisasi</i> agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
<b>E</b>	Pengembangan terbatas	Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	terutama di sepanjang Jalan Bogor-Ciawi (Jl.Raya Tajur), rencana jalan R3, rencana jalan <i>inner ring road</i> , Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret
		Membatasi perkembangan perumahan melalui penetapan kawasan	menyebarkan

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
		perumahan berkDB rendah	
		Melindungi kawasan resapan air	menyebarkan
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai dengan hirarki pelayanan	menyebarkan
		Mengembangkan ekowisata	Kelurahan Rancamaya, Kertamaya, Bojongkerta, Pamoyanan, Mulyaharja, Cipaku
		Mengembangkan sarana umum skala kota (Stadion skala Kota)	Sub WP E3
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berkDB rendah	Perumahan kepadatan tinggi di kelurahan Tajur dan Sukasari, Muarasari (di area eksiting)
		Membatasi penambahan lokasi industri yang baru serta menata kawasan sekitarnya	Kawasan industri yang ada
		Meremajakan TPU yang ada dengan <i>konsep rumputisasi</i> agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
		Mempertahankan lahan pertanian yang ada sebagai RTH kota	menyebarkan

Sumber : RTRW Kota Bogor 2011 - 2031

**Tabel 2.4**  
**Rencana Ruang Kegiatan Tematik pada Sub pusat Kota/ Pusat Wilayah Pelayanan (WP)**

Komponen Ruang	WP A	WP B	WP C	WP D	WP E
<b>Ruang kegiatan tematik</b>	Perdagangan jasa skala kota, perkantoran, RTH kota	Jasa akomodasi, perdagangan dan ecowisata	Sentra elektronik, pasar induk	Jasa akomodasi, perkantoran, wisata kuliner	Sentra otomotif, wisata belanja, MICE, jasa akomodasi, ecowisata

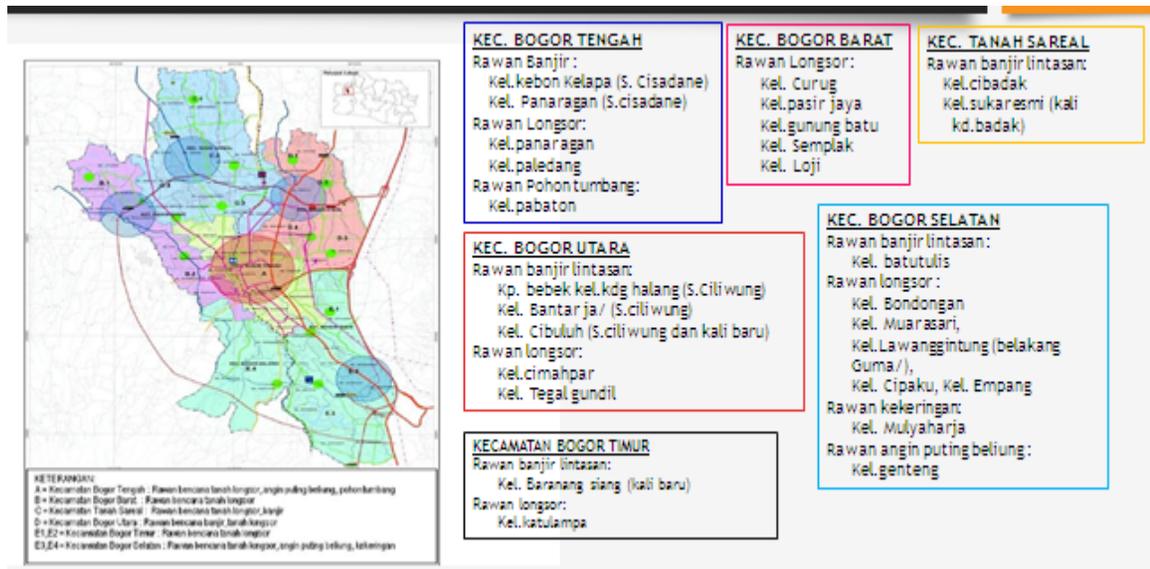
Sumber : Hasil Analisis, 2010

### 2.1.3. WILAYAH RAWAN BENCANA

Berdasarkan hasil pemutakhiran data daerah rawan bencana yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor telah terdeteksi daerah rawan bencana sebagai berikut:

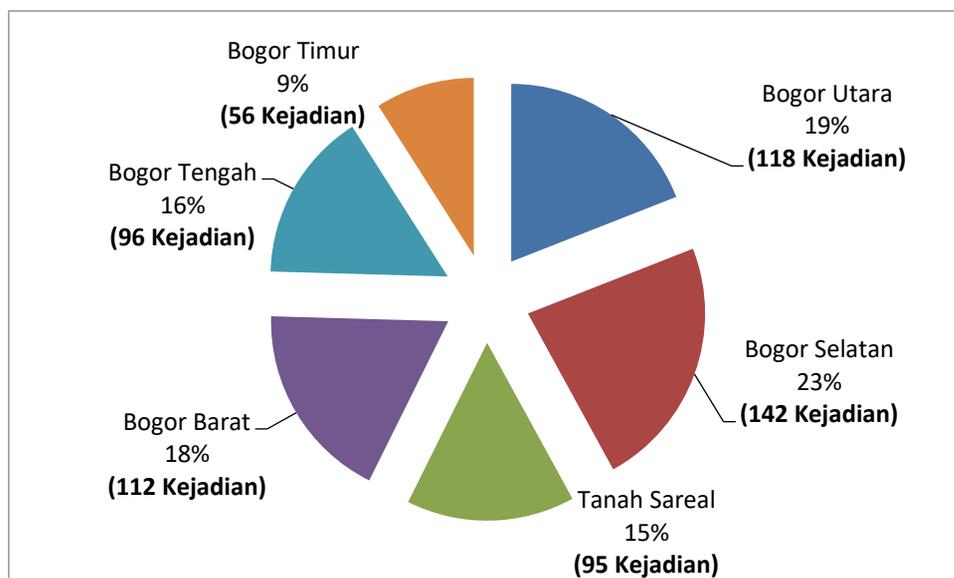
**Gambar 2.2**

#### Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kota Bogor



Kejadian Bencana Tahun 2018 sebanyak 619 Kejadian yang tersebar di setiap kecamatan sebagaimana tergambar dalam grafik berikut :

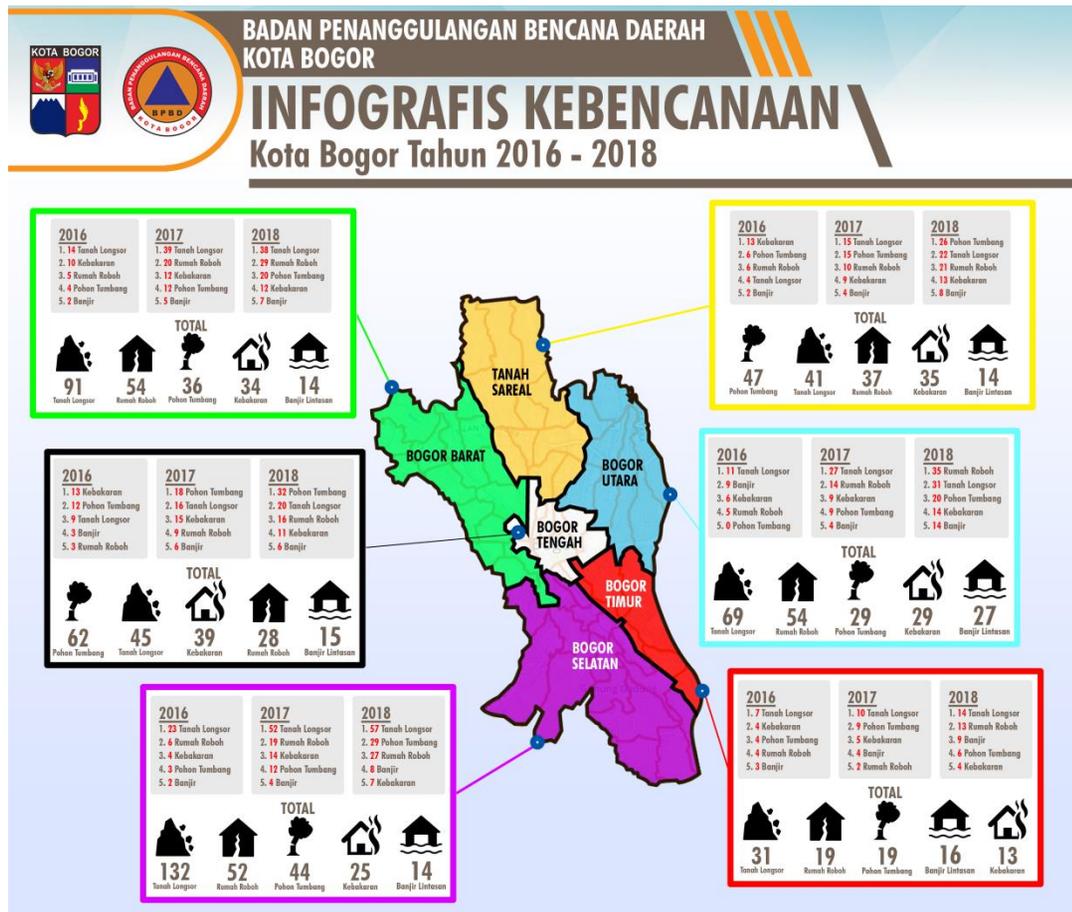
**Grafik 2.3**  
**Kejadian Bencana Kota Bogor Tahun 2018**



Sumber: Pusdalops - PB BPBD Kota Bogor 2018

Gambar 2.3

Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2016-2018

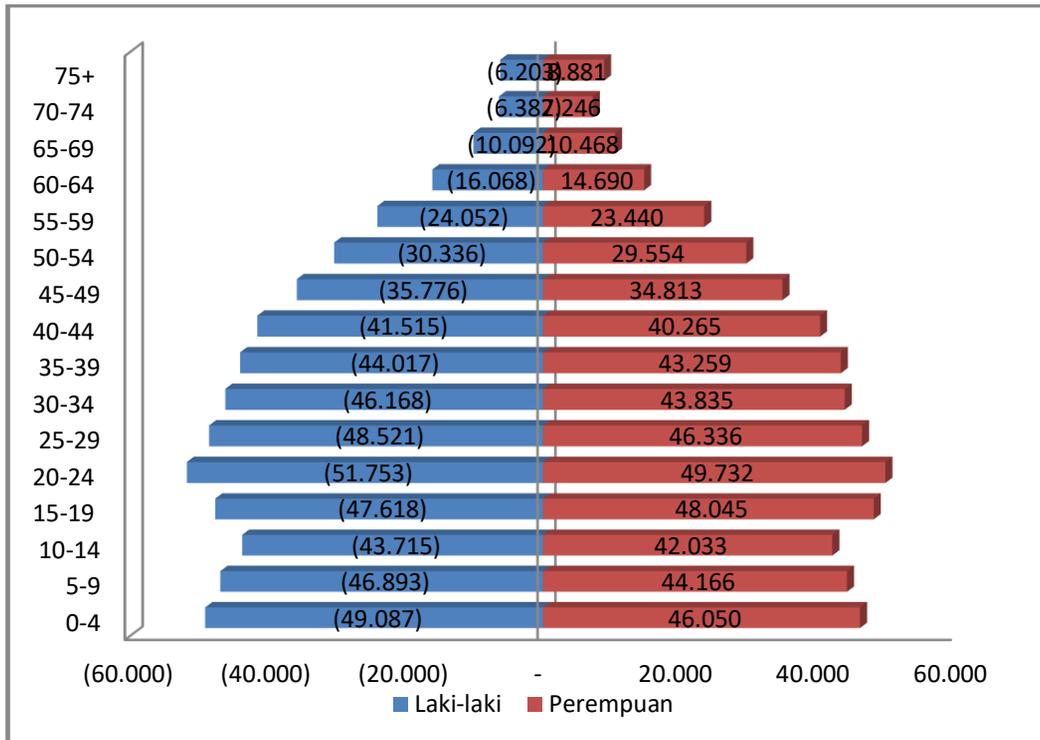


2.1.4. ASPEK DEMOGRAFI

Penduduk Kota Bogor pada tahun 2017 menurut BPS terdapat sebanyak 1.081.009 jiwa yang terdiri atas 548.196 orang laki-laki dan sebanyak 532.813 orang perempuan. Dengan luas wilayah 118,50 kilometer persegi, kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2017 mencapai 9.122 jiwa perkilometer persegi. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah penduduk 239.860 jiwa.

**Grafik 2.4**

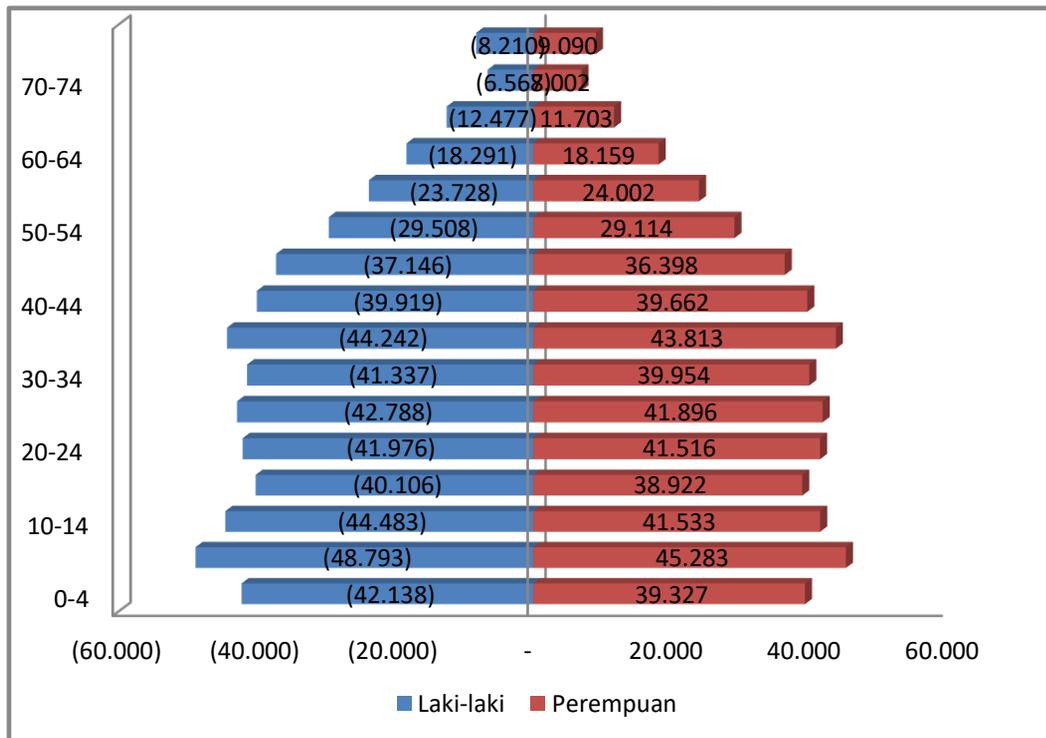
**Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2017**



Sumber ; BPS 2017

**Grafik 2.5**

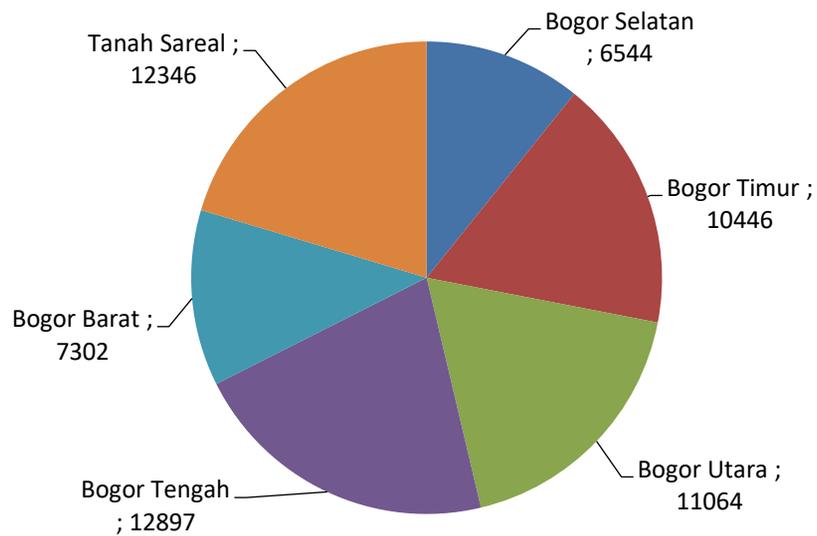
**Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor 2018**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, 2018

**Grafik 2.6**

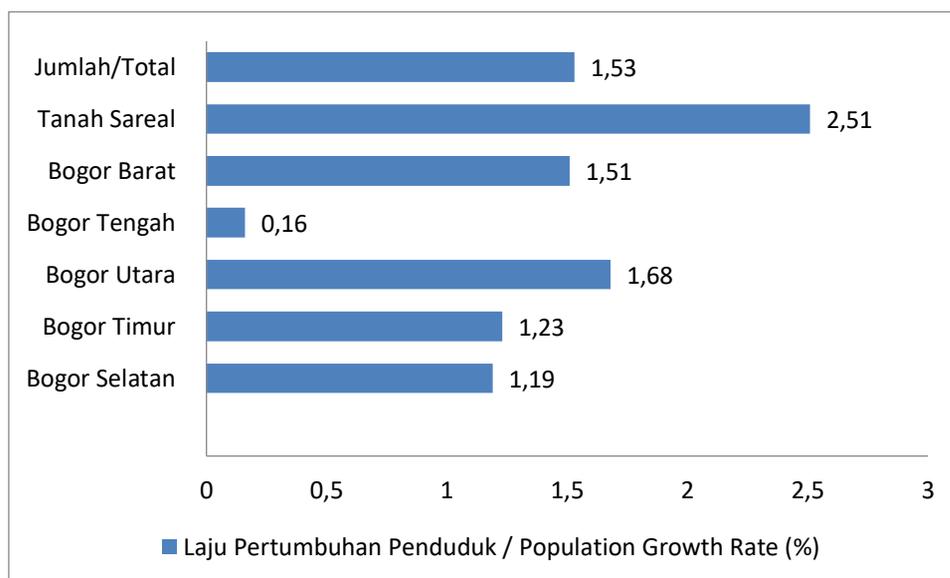
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor 2017

**Sumber : BPS Kota Bogor, 2018**

Tabel 2.5  
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor

<b>Kecamatan/ Subdistrict</b>	<b>Jumlah Penduduk (Orang)/ Population (Person)</b>			<b>Laju Pertumbuhan Penduduk / Population Growth Rate (%)</b>
	2010+	2016	2017	
<b>010 Bogor Selatan</b>	182.830	199.248	201.618	1,19
<b>020 Bogor Timur</b>	95.855	104.737	106.029	1,23
<b>030 Bogor Utara</b>	171.863	192.812	196.051	1,68
<b>040 Bogor Tengah</b>	102.115	104.982	104.853	0,16
<b>050 Bogor Barat</b>	212.812	236.302	239.860	1,51
<b>060 Tanah Sareal</b>	192.640	226.906	232.598	2,51
<b>Jumlah/ Total</b>	958.115	1.064.687	1.081.009	1,53

Sumber, BPS, Tahun 2018

**Grafik 2.7****Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk per kecamatan Kota Bogor 2017****Tabel 2.6****Proporsi Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Yang pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Bogor 2012-2016**

Umur Perkawinan Pertama/ <i>The Average age of first marriage</i>	Tahun/ Year				
	2012	2013	2014	2015	2016
≤ 16	32526	33372	31886	32312	31559
17 - 18	55104	56425	62350	64778	65086
19 - 20	64117	66589	68336	69289	71519
21 dan Lebih	123212	125429	126017	126142	131240
Jumlah/ Total	274959	281815	288589	292521	299404

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional 2012-2016

Di tahun 2016 jumlah kelahiran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kematian. Jumlah kelahiran yaitu 9.246 jiwa dengan laki-laki sebanyak 4.662 jiwa dan perempuan sebanyak 4.584 jiwa. Sedangkan untuk jumlah kematian, 4045 jiwa meninggal dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.278 jiwa dan perempuan sebanyak 1.767 jiwa. Kecamatan Bogor Barat menjadi kecamatan dengan jumlah kelahiran dan kematian

tertinggi di Kota Bogor. Untuk jumlah kelahiran dan kematian menurut kecamatan telah tersaji pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7 Jumlah Kelahiran dan Kematian di Kota Bogor**

KECAMATAN	LAHIR			MENINGGAL		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
<b>Bogor Selatan</b>	718	794	1.512	582	498	1080
<b>Bogor Timur</b>	536	575	1.111	318	238	556
<b>Bogor Utara</b>	980	794	1.774	281	242	523
<b>Bogor Tengah</b>	434	339	773	227	167	394
<b>Bogor Barat</b>	1.229	1.301	2.530	618	431	1.049
<b>Tanah Sareal</b>	765	781	1.546	252	191	443
<b>Jumlah</b>						
2016	<b>4.662</b>	<b>4.584</b>	<b>9.246</b>	<b>2.278</b>	<b>1.767</b>	<b>4.045</b>
2015	<b>4.815</b>	<b>4.360</b>	<b>9.175</b>	<b>2.239</b>	<b>1.682</b>	<b>3.921</b>
2014	<b>1.368</b>	<b>1.329</b>	<b>2.697</b>	<b>641</b>	<b>482</b>	<b>1.123</b>
2013	<b>4.772</b>	<b>4.317</b>	<b>9.089</b>	<b>2.203</b>	<b>1.635</b>	<b>3.838</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Kota Bogor Dalam Angka, 2018

Penduduk yang bekerja di Kota Bogor pada tahun 2017 menurut pendidikan terdapat sebanyak 73.339 berpendidikan SLTP, sebanyak 180.898 orang berpendidikan SLTA, dan sebanyak 76.989 orang berpendidikan Akademi dan Universitas. Lebih jelasnya mengenai distribusi angkatan kerja yang bekerja menurut tingkat pendidikan terdapat pada tabel 2.8

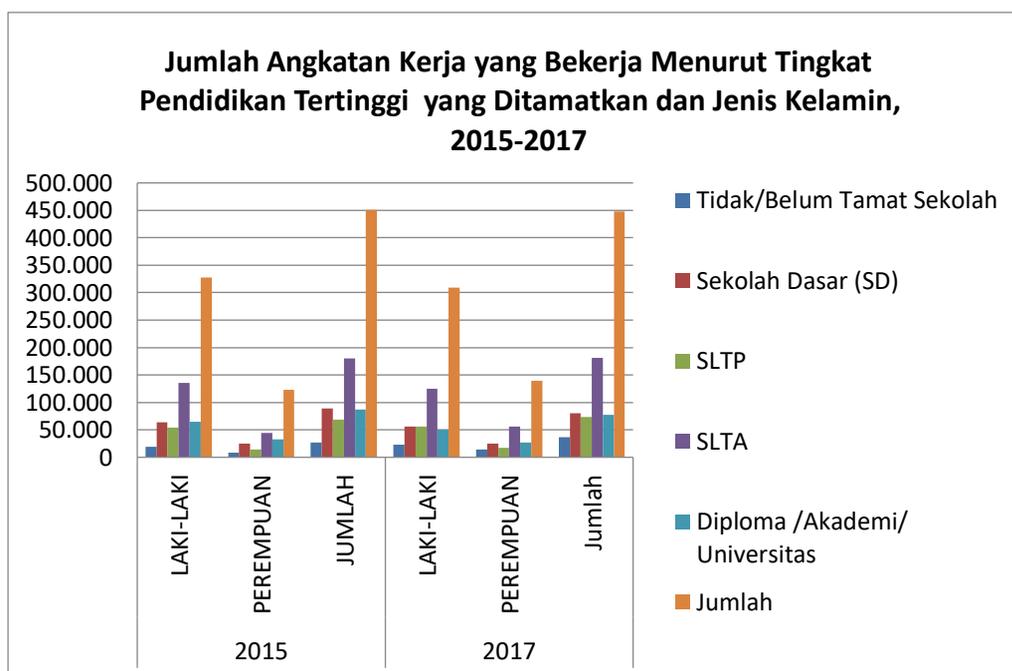
**Tabel 2.8**

**Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin 2015-2017**

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	2015			2017		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
<b>Tidak/Belum Tamat Sekolah</b>	19.029	7.985	27.014	22.540	14.415	36.955
<b>Sekolah Dasar (SD)</b>	64.096	24.932	89.028	55.627	24.578	80.205
<b>SLTP</b>	54.165	14.159	68.324	55.805	17.534	73.339
<b>SLTA</b>	135.975	43.961	179.936	125.203	55.695	180.898
<b>Diploma /Akademi/ Universitas</b>	64.288	32.335	86.623	49.673	27.316	76.989
<b>Jumlah</b>	327.553	123.372	450.925	308.848	139.538	448.386

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018

**Grafik 2.8**



Indikator-indikator ketenagakerjaan di Kota Bogor pada tahun 2017 memiliki lima perincian yang terdiri dari Penduduk Usia Kerja (PUK) sebesar 811.118 jiwa, angkatan kerja yang bekerja sebanyak 448.386 jiwa, angkatan kerja yang mencari pekerjaan sebanyak 47.438 jiwa, tingkat pengangguran di Kota Bogor sebanyak 9.57 persen, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 61.13 persen.

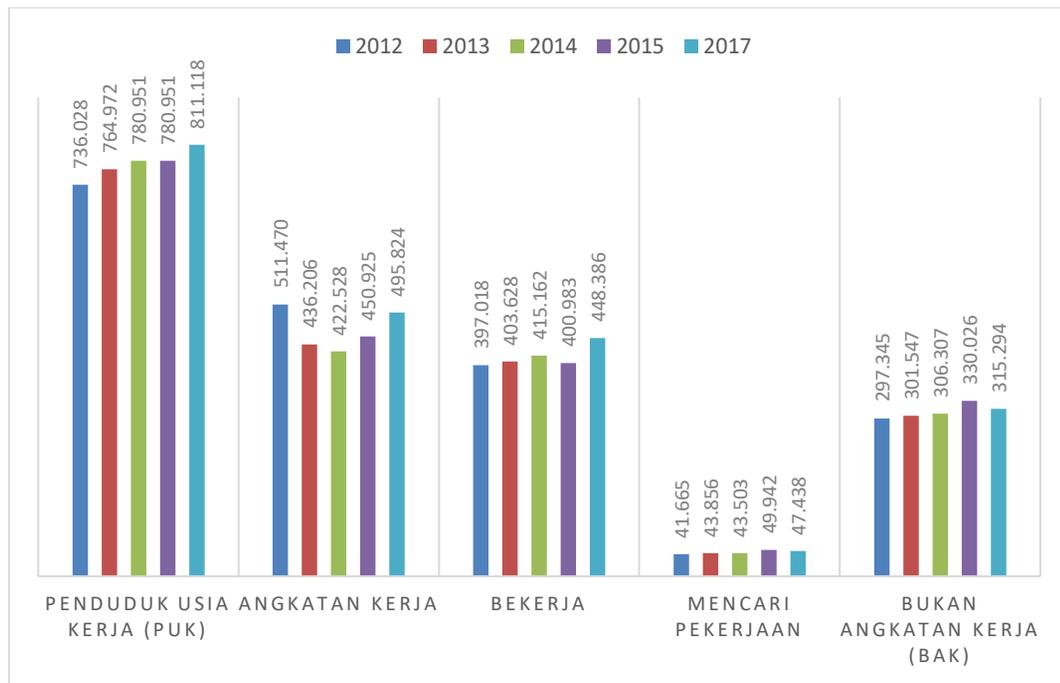
**Tabel. 2.9**

**Indikator-indikator Utama Ketenagakerjaan**

PERINCIAN	2012	2013	2014	2015	2017
<b>Penduduk Usia Kerja (PUK)</b>	736.028	764.972	780.951	780.951	811.118
<b>Angkatan Kerja</b>	511.470	436.206	422.528	450.925	495.824
<b>Bekerja</b>	397.018	403.628	415.162	400.983	448.386
<b>Mencari Pekerjaan</b>	41.665	43.856	43.503	49.942	47.438
<b>Bukan Angkatan Kerja (BAK)</b>	297.345	301.547	306.307	330.026	315.294
<b>Tingkat Pengangguran (%)</b>	9,50	9,80	9,48	11,08	9.57
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)</b>	59,60	59,74	59,96	57,74	61.13

Sumber: BPS Kota Bogor

**Grafik 2.9**  
**Indikator-indikator Utama Ketenagakerjaan**



Penduduk Kota Bogor pada tahun 2018 sebanyak 1.029.084 jiwa. Penganut agama Islam sebanyak 956.867. Sebanyak 40.791 jiwa menganut agama Protestan dan 21.799 jiwa menganut agama Katolik, 1103 jiwa penganut agama Hindu dan 8.117 jiwa penganut agama Konghucu dan 43 jiwa penganut kepercayaan. Jumlah penduduk di Kota Bogor menurut agama yang dianut telah disajikan pada tabel 2.10

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Pemeluk Agama di Kota Bogor**

*Sumber ; Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2018*

<b>N O</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>ISLAM</b>	<b>KRISTEN</b>	<b>KATHOLIK</b>	<b>HINDU</b>	<b>BUDHA</b>	<b>KONGHUCU</b>	<b>KEPERCAYAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	KOTA BOGOR SELATAN	182156	8308	4506	113	2216	102	14	197415
2	KOTA BOGOR TIMUR	90045	6200	4349	83	1447	34	0	102158
3	KOTA BOGOR TENGAH	92856	5433	3672	56	2396	80	4	104497
4	KOTA BOGOR BARAT	224771	5628	2698	274	708	69	8	234156
5	KOTA BOGOR UTARA	171408	8710	3345	357	746	42	14	184622
6	TANAH SAREAL	195631	6512	3229	220	604	37	3	206236
<b>TOTAL</b>		<b>956,867</b>	<b>40,791</b>	<b>21,799</b>	<b>1,103</b>	<b>8,117</b>	<b>364</b>	<b>43</b>	<b>1,029,084</b>

## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**

#### **A. PERTUMBUHAN PDRB**

Pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,61 dari tahun 2016 yaitu 6,12 pada tahun 2017 dan 6.73 dari tahun 2016. Dimana sebelumnya pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3 tahun sebelumnya. Penurunan ini secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global khususnya kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Barat, yang mengalami penurunan pula sebesar 0.37. Walau demikian bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat dan Nasional, Kota Bogor masih berada di atas keduanya.

Jika dilihat lebih dalam distribusi persentase PDRB, peningkatan dari tahun sebelumnya terdapat pada kategori konstruksi pada tahun 2017 mengalami peningkatan tertinggi 0,33 dibanding kategori yang lain di ikuti oleh kategori informasi dan komunikasi ( 0,28) dan transportasi dan pergudangan (0,16). Sedangkan kategori tertinggi pada tahun 2017 adalah adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,21 diikuti industry pengolahan 18,35 diikuti transportasi dan pergudangan 12,05, Jasa keuangan dan asuransi 0,15 serta jasa lainnya 0,14.

**Tabel 2.11**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor**  
**Tahun 2013-2017 (persen)**

Keterangan	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	231.4	241.6	254	269.2	280.3
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	4,838	5,393.10	5,998.60	6,538.50	7,064.80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,514.70	1,960.80	1,925.00	1,970.60	1,949.80
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	27.4	28.8	32	36	41
F	Konstruksi	2,964.50	3,280.10	3,647.80	3,937.70	4,409.40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,927.80	6,476.60	7,088.10	7,643.80	8,168,1
H	Transportasi dan Pergudangan	2,894.30	3,151.10	3,776.20	4,210.10	4,638.10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,170.30	1,294.50	1,421.40	1,586.00	1,750.00
J	Informasi dan Komunikasi	1,085.80	1,284.90	1,521.40	1,710.40	1,967.80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,085.30	1,975	2,142.60	2,475.20	2,748.40
L	Real Estate	580.00	653.30	716.30	782.80	846.50
M,N	Jasa Perusahaan	533.40	593.70	675.20	746.10	799.30
O	administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	787.90	881.00	955.90	1,019.00	1,080.90
P	Jasa Pendidikan	658.80	798.20	907.50	997.70	1,072.30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	269.80	318.10	374.10	425.80	490.50
R,S, T, U	Jasa Lainnya	765.90	816.70	925.90	1,051.90	1,198.80
<b>PDRB TOTAL</b>		<b>26,082.30</b>	<b>29,147.20</b>	<b>32,364.90</b>	<b>35,400.90</b>	<b>38,506.50</b>

Sumber : Kota Bogor dalam Angka 2018

Bila mengamati laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan , pada tahun 2017 kategori usaha bidang transportasi dan komunikasi mengalami peningkatan sebesar 1.04 yaitu 13.40 , diikuti kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11.77 dan jasa lainnya 9.69. Pertumbuhan ekonomi di pada kategori-kategori sektor ekonomi tersier yang cukup cepat mengindikasikan bahwa pembangunan perekonomian Kota Bogor semakin bertumpu pada sektor-sektor non produksi, terutama mengandalkan perekonomian pada kategori jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban.

Pembangunan kategori sektor jasa membutuhkan *skill* masyarakat

yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan sebagai prasyarat keberhasilan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor harus memberikan prioritas pembangunan yang tepat dalam mendorong potensi kategori sektor tersier sebagai sasaran pembangunan regional.

**Tabel 2.12**

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2013-2017**

Keterangan	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	216.32	220.69	225.14	230.15	233.03
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	4325,58	4,564.57	4,843.79	5,109.36	5,351.64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	980.51	1,025.05	898.23	903.13	831.95
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	23.92	25.94	27.36	28.52	29.5
F	Konstruksi	2,555.96	2,696.29	2,646.75	3,011.15	3,237.68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,114.43	5,367.11	5,650.09	5,972.86	6,306.05
H	Transportasi dan Pergudangan	2,496.95	2,637.72	2,893.36	3,133.22	3,366.50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,002.85	1,059.40	1,119.75	1,209.84	1,304.03
J	Informasi dan Komunikasi	1,070.49	1,270.61	1,506.67	1,692.96	1,919.82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,549.25	1,606.73	1,676.55	1,847.07	1,951.35
L	Real Estate	490.88	525.98	555.98	601.02	639.84
M,N	Jasa Perusahaan	456.80	477.36	516.83	560.21	590.80
O	administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	456.80	477.36	516.83	560.21	590.80
P	Jasa Pendidikan	626.87	643.23	660.73	675.93	683.61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	587.39	656.81	718.86	772.60	826.60
R,S, T, U	Jasa Lainnya	739.51	777.95	843.36	912.98	1,001.43
<b>PDRB TOTAL</b>		<b>22,484.67</b>	<b>23,835.31</b>	<b>25,298.60</b>	<b>27,002.25</b>	<b>28,654.97</b>

Sumber : Bogor Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan data yang dimiliki BPS, PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2017 telah mencapai Rp 38.506.500.000 atau meningkat 8,77% dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp 35.400.800.000 Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai

Rp 28.654.970,000 atau meningkat 6,12% dibanding pencapaian pada tahun 2016 sebesar Rp 27.002.250,000.

**Tabel 2.13**

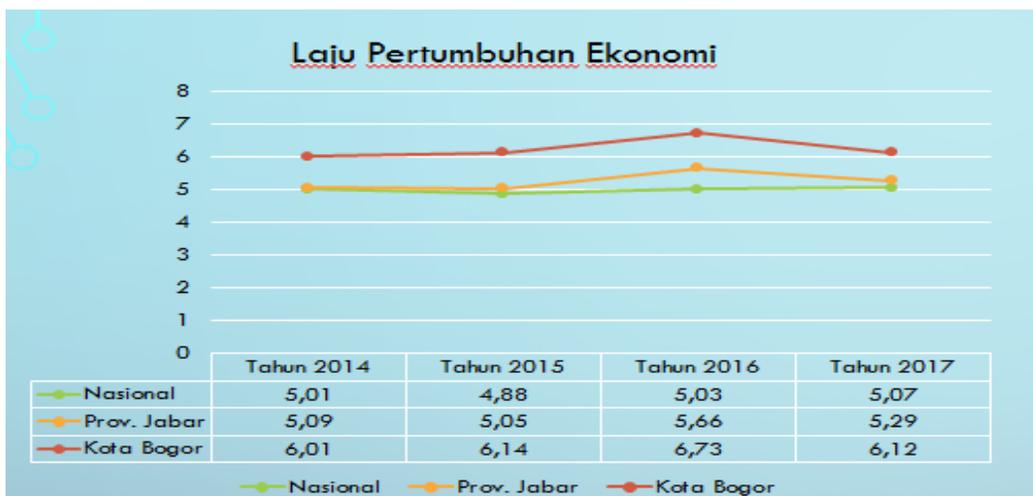
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2013-2017 (miliar Rupiah)**

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2013	26.082,3	22.484,67
2	2014	29.147,2	23.835,31
3	2015	32.364,9	25.298,60
4	2016*)	35.400,8	27.002,25
5	2017**)	38.506,5	28.654,97

\*) Angka Sementara \*\*) Angka sangat Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor kurun waktu tahun 2014 – 2016 mengalami perkembangan. Pada Tahun 2014 sebesar 6.01 kemudian naik lagi pada tahun 2015 menjadi 6.14, mengalami kenaikan lagi sebesar 0.59 menjadi 6.73 . tetapi terjadi plambatan pada tahun 2017 sebesar 0.61 menjadi 6.12. Apabila di bandingkan dengan laju partumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor masih berada d atas dengan selisih 0.83 pada tahun 2017 , dimana provinsi berada pada angka 5.29. Begitu juga bila di bandingkan dengan tingkat nasional yang berada pada angka 5.07 pada tahun 2017 ada selisih sebesar 1.05.

**Grafik. 2.10**

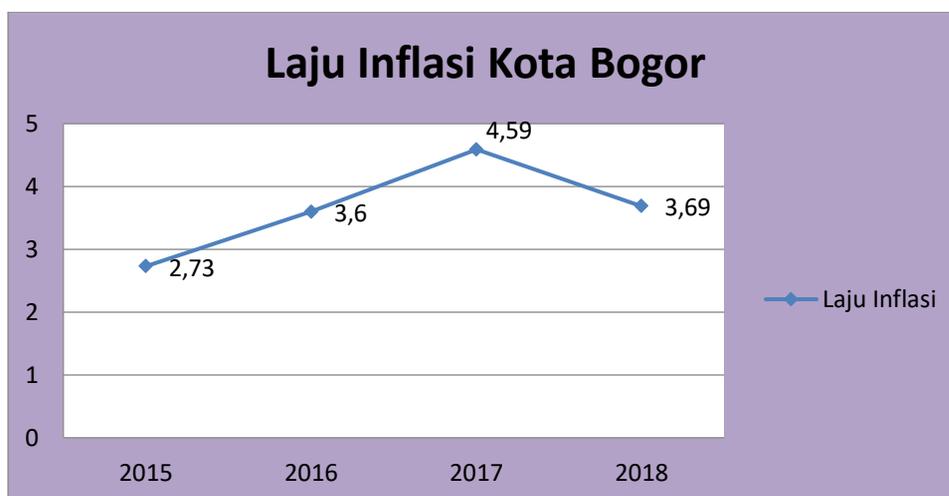


Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2018

### B. LAJU INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Selama periode 2015-2018, Kota Bogor mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat inflasi Kota Bogor pada posisi 2,75 %, mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu menjadi 3,6% dan 4,59. Dan mengalami penurunan sampai 0.9% pada tahun 2018 yaitu 3,69%.

**Grafik 2.11**



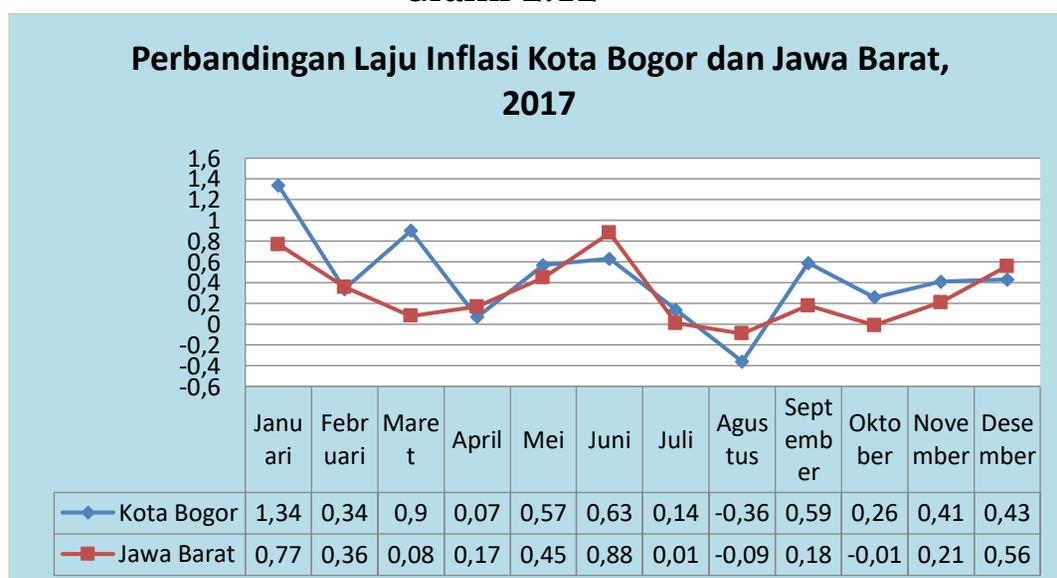
**SUMBER : BPS KOTA BOGOR**

**Tabel 2.14**  
**Perbandingan Laju Inflasi Kota Bogor dan Jawa Barat, 2017**

Bulan	Kota Bogor	Jawa Barat
Januari	1,34	0,77
Februari	0,34	0,36
Maret	0,9	0,08
April	0,07	0,17
Mei	0,57	0,45
Juni	0,63	0,88
Juli	0,14	0,01
Agustus	-0,36	-0,09
September	0,59	0,18
Oktober	0,26	-0,01
November	0,41	0,21
Desember	0,43	0,56

*BPS Kota Bogor, 2017*

**Grafik 2.12**



### **C. PDRB PER KAPITA**

Peningkatan di bidang Ekonomi juga terlihat dari pencapaian PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Bogor dimana Nilai PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 27,77 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 37,18 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi

**Tabel 2.15**  
**Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kota Bogor**  
**Tahun 2013-2017 (Rupiah)**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016*)	2017*)
1	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	25,75	28,28	30,88	33,25	35,62
2	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (2010)	22,20	23,12	24,14	25,36	26,51
3	Pertumbuhan PDRB per Kapita	4,16	4,19	4,40	5,05	4,52

*Sumber ; LKPJ AMJ Walikota Bogor 2015-2019*

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2017 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 35,62 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 6,12 persen.

**Tabel 2.15 a**  
**PDRB Per Kapita di Kota Bogor 2011 – 2017\*\***

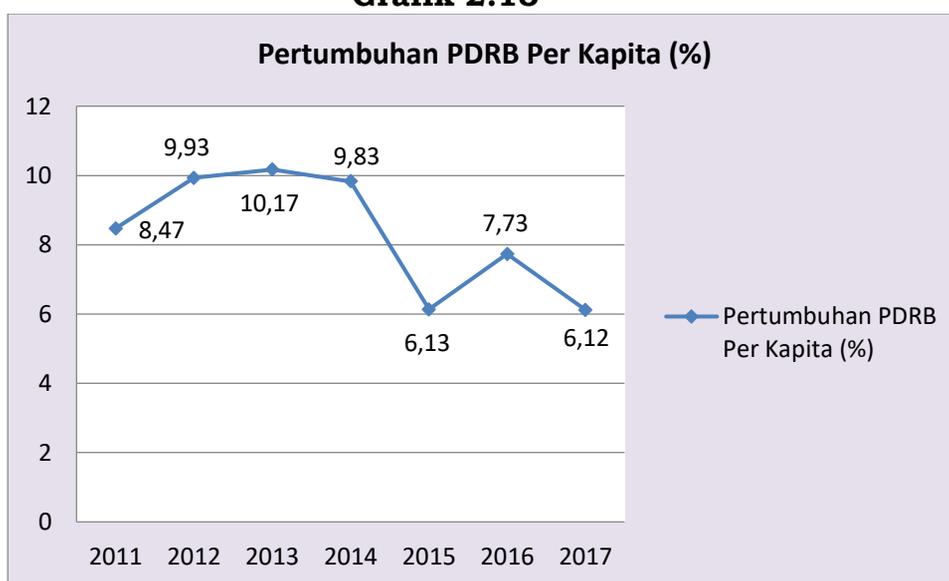
<b>Tahun</b>	<b>PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)</b>
2011	21,26	8,47
2012	23,27	9,93
2013	25,72	10,17
2014	28,23	9,83
2015*	30,88	6.13
2016**	33,25	7,73
2017	35,62	6,12

*Sumber : BPS Kota Bogor, 2017*

*Catatan : \*) Angka Sementara*

*\*\*\*) Angka Sangat Sementara*

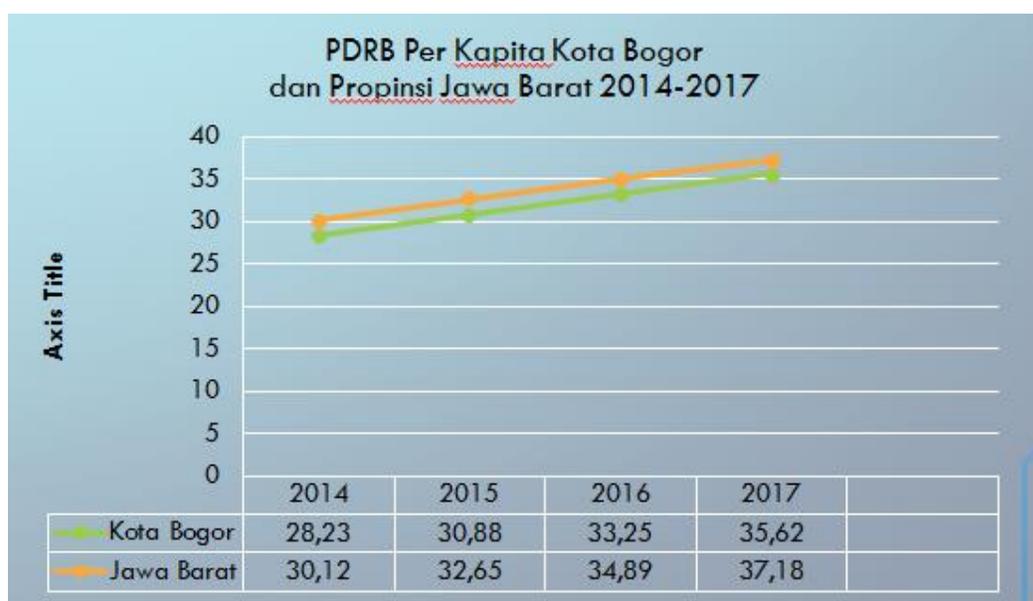
**Grafik 2.13**



Sumber : BPS Kota Bogor, 2018

Ditinjau dari nilai PDRB per kapita Kota Bogor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 berada pada posisi 9,83 lalu mengalami penurunan 3,7 menjadi 6,13 pada tahun 2015 dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2016 menjadi 7,73 lalu terjadi penurunan sebesar 1.61 pada tahun 2017 menjadi 6,12. Ini menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan.

**Grafik 2.14**



Sumber : BPS Kota Bogor, 2019

(\* data sementara, \*\* Data sangat sementara)

Apabila dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor berada di posisi di bawah angka Provinsi.

#### **D. INDEKS GINI**

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, *Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI*, 1995) :

- GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 0.4 < GR < 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebesar 0,431 artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan yang ditentukan dengan Koefisien Gini Rasio antara 0-1 (>0 dan <1), semakin rendah Koefisien Gini maka pendapatan suatu wilayah/ daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila Indeks Gini lebih besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan Indeks Gini dibawah 0,5 (tinggi > 0,5 dan rendah <0,5).

**Tabel 2.15 b**  
**Perkembangan Indeks Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2011-2017**

Wilayah Kabupaten Kota	Gini Rasio						2017
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kota Bogor	0.39	0.45	0.45	0.36	0.47	0.43	0.431

**Grafik 2.15**  
**Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2017**



*Sumber data : BPS Provinsi Jawa Barat 2018*

#### **E. TINGKAT KEMISKINAN**

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
- b. Angkatan Kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
- d. Kurangnya perhatian pemerintah, dimana pemerintah terkadang kurang peka terhadap permasalahan kemiskinan serta tidak memiliki program yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan.
- e. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) rumah tangga miskin dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:

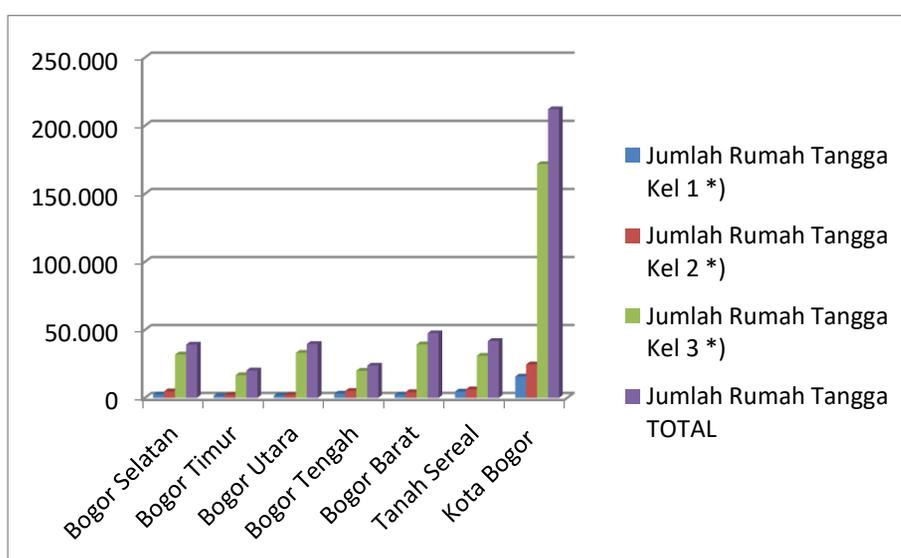
- Kelompok 1 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah di Indonesia/paling Miskin.
- Kelompok 2 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11 persen-20 persen terendah di Indonesia/hampir miskin.
- Kelompok 3 adalah rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21 persen-30 persen terendah di Indonesia/rentas miskin.

Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga miskin di Kota Bogor mencapai 212.085 rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah tangga miskin pada kelompok 1/paling miskin di Kota Bogor mencapai 15.657 rumah tangga. Pada kelompok 2/hampir miskin, jumlah rumah tangga miskin mencapai 24.556 rumah tangga, sedangkan penduduk yang masuk kelompok 3/rentan miskin sebanyak 171.872 rumah tangga.

**Tabel 2. 16****Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor**

NAMA KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA			TOTAL
	KEL 1 *)	KEL 2 *)	KEL 3 *)	
<b>Bogor Selatan</b>	2.510	4.781	31.906	39.197
<b>Bogor Timur</b>	1.469	2.102	16.643	20.214
<b>Bogor Utara</b>	1.652	2.117	33.103	39.585
<b>Bogor Tengah</b>	3.136	5.084	19.947	23.711
<b>Bogor Barat</b>	2.280	4.202	39.339	47.559
<b>Tanah Sereal</b>	4.610	6.270	30.939	41.819
<b>Kota Bogor</b>	15.657	24.556	171.872	212.085

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018

**Grafik 2.16****Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor**

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018

**Grafik 2.17**



*Sumber: BPS Kota Bogor, 2019*

Berdasarkan data di atas bahwa Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah yang mempunyai sebaran Rumah tangga Miskin terbanyak yaitu sebanyak 47.559 kk atau 22,42% dari total jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada di Kota Bogor. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik.

## **F. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2014-2017 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumberdaya manusia Kota Bogor yang ditandai dengan meningkatnya kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui IPM. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor mencapai 75,59 poin pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 73.1. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (harapan lama

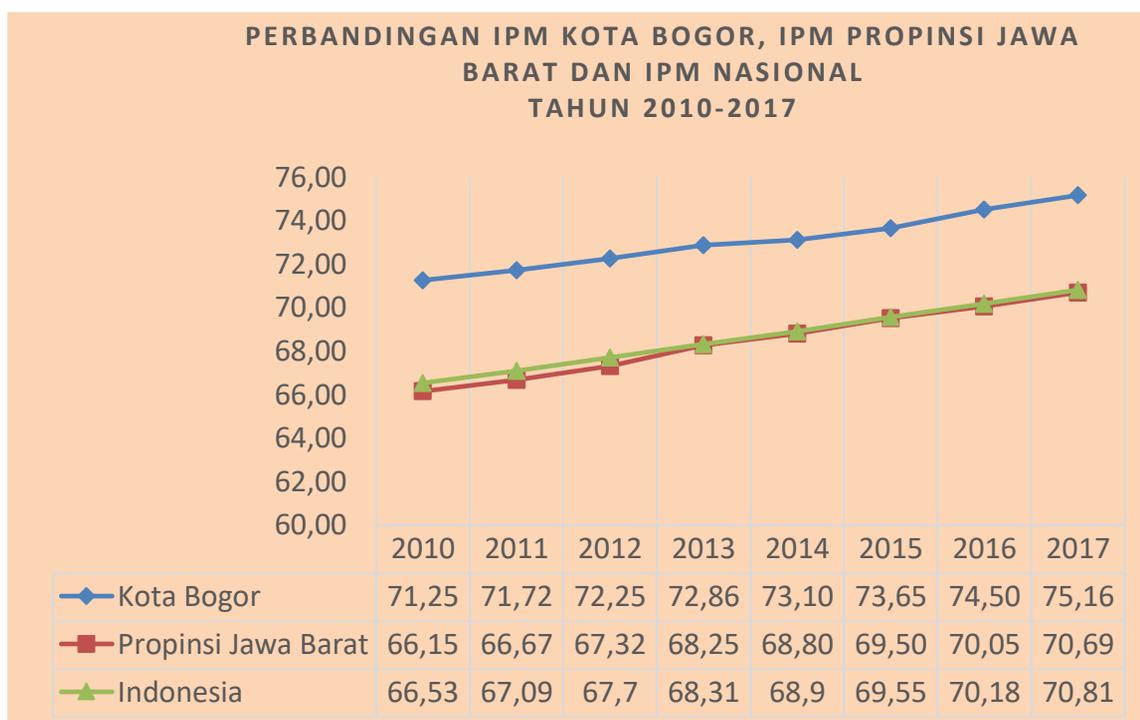
sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran per kapita per tahun). Angka IPM sebesar 75.59 di atas, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera. Realisasi komponen pembentuk IPM berdasarkan data BPS yaitu:

**Tabel 2.17**  
**Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat**  
**Kota Bogor Tahun 2014-2017**

No	Indikator	Realisasi Kinerja			
		2014	2015	2016	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)	73,1	73,65	74,5	75,16
	Komposit IPM terdiri dari:				
	a. Angka Harapan Hidup (AHH)	72,58	72,88	72,95	73,01
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,23	12,36	13,01	13,37
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,01	10,2	10,28	10,29
	d. Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu)	10.532	10.576	10.662	10.940

Sumber : Diolah dari Bogor Dalam Angka 2018

**Grafik 2.18**



Sumber: BPS 2017

**Tabel 2.18****Pertumbuhan IPM Kota Bogor Tahun 2010-2017**

<b>TAHUN</b>	<b>KOTA BOGOR</b>	<b>PROPINSI</b>	<b>NASIONAL</b>
2014	0,24	0,55	0,59
2015	0,55	0,7	0,65
2016	0,85	0,55	0,63
2017	0,66	0,64	0,63

Hasil Evaluasi terhadap perkembangan IPM Kota Bogor dari tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2014 kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor melambat cukup signifikan dan jauh dibawah pertumbuhan IPM Jabar dan IPM Nasional
- Tahun 2015-2016 kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor kembali meningkat cukup signifikan dan pada tahun 2016 pertumbuhan IPM Kota Bogor bahkan melebihi pertumbuhan IPM Jabar dan Nasional
- Pada tahun 2017 kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor kembali terjadi perlambatan walaupun masih sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Jabar dan IPM Nasional

**2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

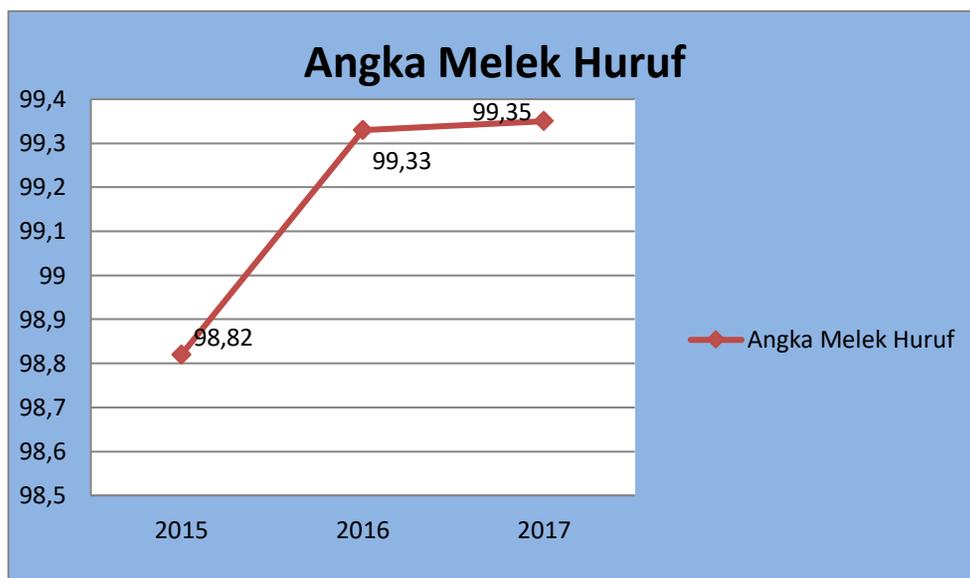
Analisis kinerja atas focus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja

**A. ANGKA MELEK HURUF**

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2014-2017. capaian angka melek huruf Kota Bogor selalu

mengalami trend peningkatan. Angka melek huruf di Kota Bogor pada tahun 2017 sebesar 99,35%.

**Grafik 2.19**



Sumber : BPS Kota Bogor, 2018

Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun cenderung tidak terlalu besar, hal ini disebabkan karena capaian kinerja sudah mendekati 100%. Walaupun demikian, di tahun 2017 masih ada masyarakat Kota Bogor yang buta huruf (0,8%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

## **B. RATA RATA LAMA SEKOLAH**

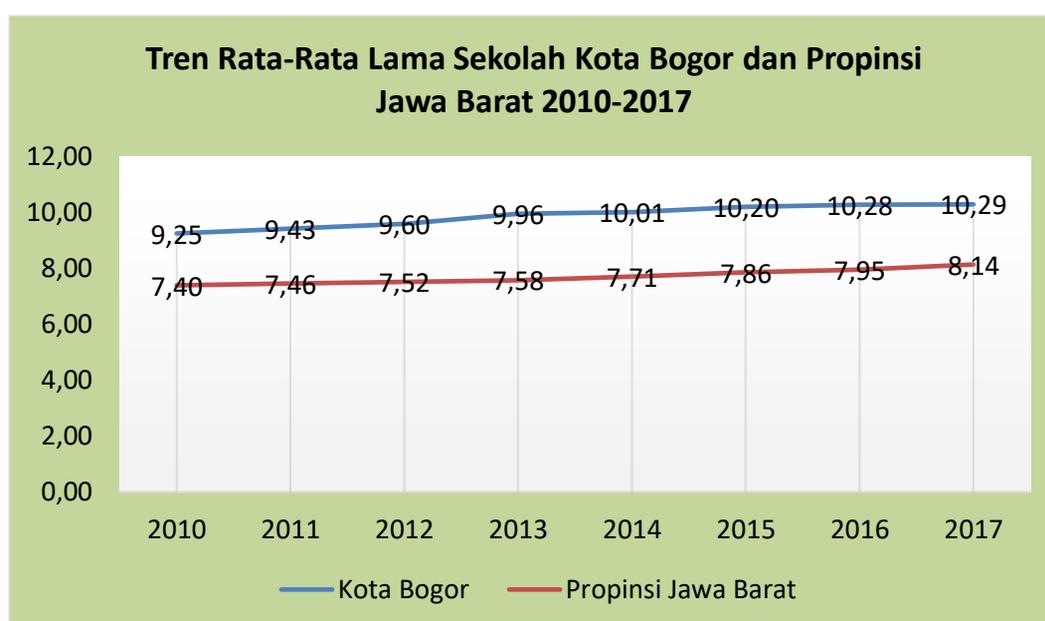
Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk

mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah. Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Rerata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan sudah melampaui wajib pendidikan dasar 9 tahun, walaupun belum sesuai dengan harapan untuk mencapai rata rata lama sekolah 12 tahun. Berikut adalah perkembangan rata-rata lama sekolah di kota Bogor dari tahun 2011-2017.

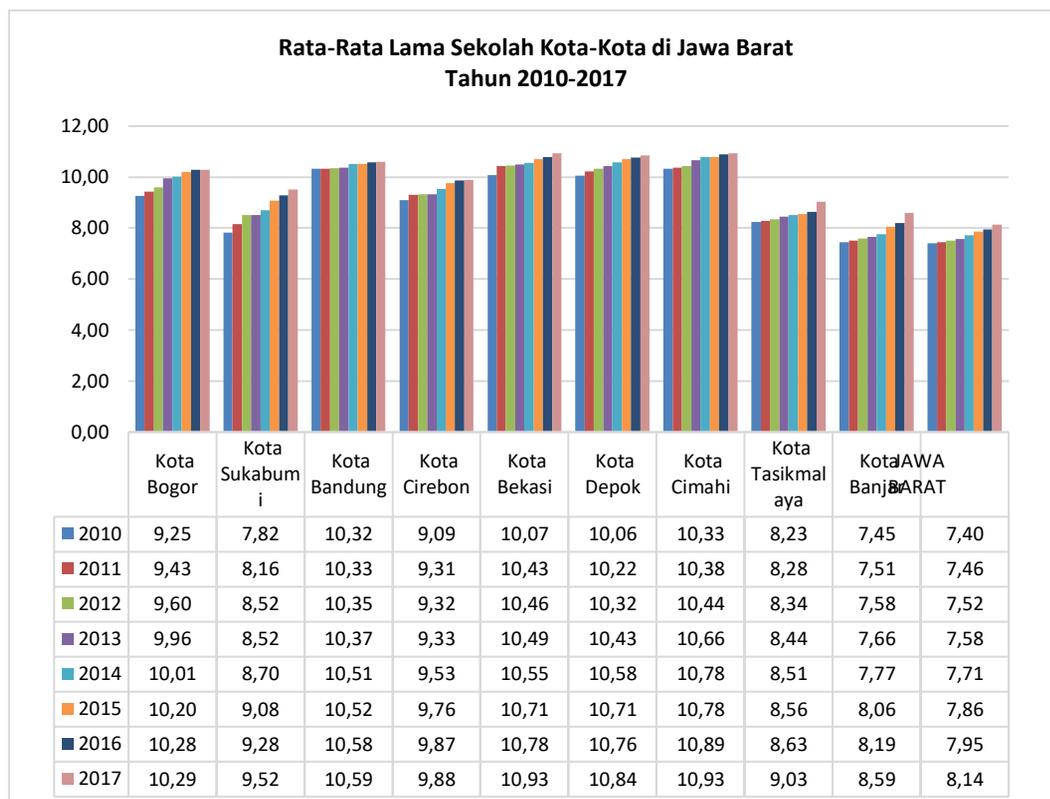
**Grafik 2.20**



Sumber : BPS Kota Bogor. 2018

Apabila dibandingkan dengan perkembangan rata rata lama sekolah di kabupaten/kota se Jawa Barat, Kota Bogor masih menduduki peringkat ke-5 di Jawa Barat dalam hal pencapaian rata-rata lama sekolah. Berikut ini adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kota Di Jawa Barat :

**Grafik 2.21**



*Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2018*

Mulai tahun 2016-2017 pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah Kota Bogor cenderung terjadi perlambatan sementara pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah di Jawa Barat cenderung meningkat lebih tinggi dibanding pertumbuhan RLS Kota Bogor.

Permasalahan perlambatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bogor dikarenakan oleh masih adanya penduduk berusia > 25 tahun yang tidak tamat SMP dan SMA. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu dilakukan oleh Kota Bogor adalah upaya untuk menekan Angka Putus Sekolah SMP dan SMA serta mengintensifikan program kejar paket A, paket B dan paket C melalui pengembangan PKBM di wilayah wilayah.

**Tabel 2.19**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama**  
**Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan**  
**Tertinggi yang Ditamatkan**  
**di Kota Bogor 2017**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah/Total
	Laki-laki/Male	Perempuan/ Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tdk/blm pernah sekolah/Tdk-Blm Tamat SD <i>No Schooling/Not Yet Completed Pri-</i>	22 540	14 415	36 955
Sekolah Dasar <i>Primary School</i>	55 627	24 578	80 205
Sekolah Dasar <i>Elementary School</i>	55 805	17 534	73 339
SLTP <i>Junior High School</i>	125 203	55 695	180 898
SLTA <i>Senior High School</i>	49 673	27 316	76 989
Diploma I/II/III/Akademi/Universitas <i>Diploma I/II/III/Academy/University</i>	308 848	139 538	448 386

Sumber : BPS Kota Bogor  
Source : BPS-Statistics of Bogor City

*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018*

### **C. ANGKA PARTISIPASI KASAR**

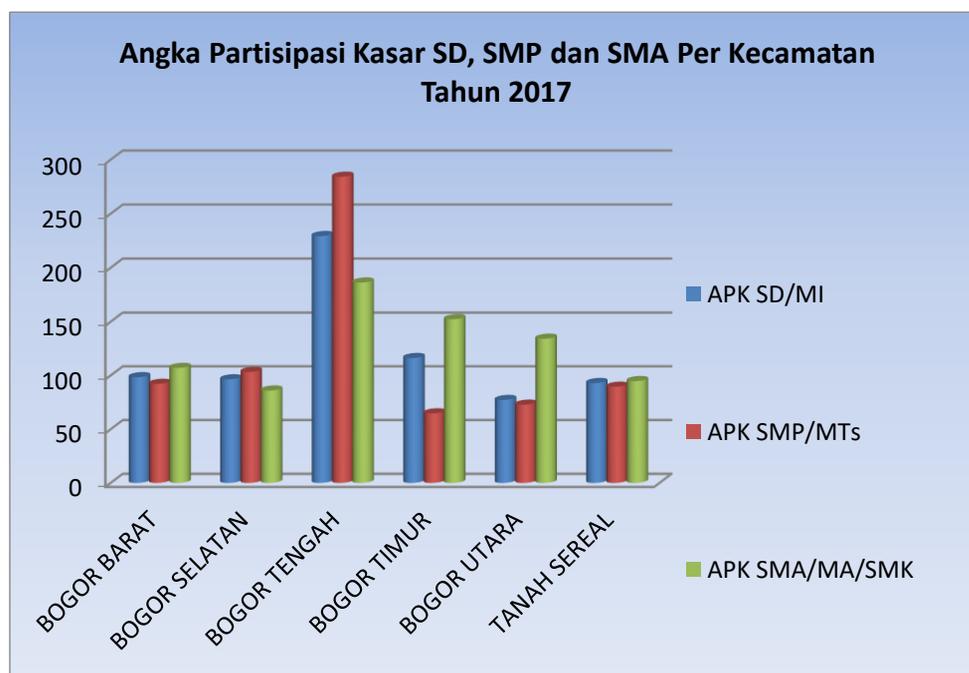
APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bogor Tahun 2017 menurut Kecamatan :

**Tabel 2.20**  
**Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Per Kecamatan**  
**Tahun 2017**

N O	KECAMATAN	APK SD/MI			APK SMP/MTs			APK SMA/MA/SMK		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	BOGOR BARAT	99.42	97.39	98.39	100.25	84.28	92.19	112.91	101.24	107.02
2	BOGOR SELATAN	102.20	90.74	96.41	104.71	101.83	103.26	94.82	77.28	85.96
3	BOGOR TENGAH	240.76	218.07	229.30	292.71	275.82	284.18	173.70	198.60	186.28
4	BOGOR TIMUR	123.03	109.56	116.23	64.87	64.63	64.74	145.97	158.57	152.33
5	BOGOR UTARA	80.03	74.38	77.18	70.34	75.22	72.80	145.00	123.62	134.20
6	TANAH SEREAL	97.37	88.66	92.97	93.15	86.00	89.54	86.81	102.56	94.77
	<b>TOTAL</b>	88.63	81.67	105.53	107.11	100.87	103.95	118.34	114.97	116.64

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor (2017)

**Grafik 2.22**



**Tabel 2.21**  
**Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor Tahun 2017**

No.	Uraian	2017
1.	Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI/Kejar Paket A	107.76
2	Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs/Kejar Paket B	86.82
3	Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/SMK/MA/Paket C	87.79

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor Dalam Angka 2018

#### D. ANGKA PARTISIPASI MURNI

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor pada tahun 2018 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 108.593% dari target 99,5 dan SMP/MTS mencapai 102.885% dari target 94,14 . Angka yang di capai sudah melampaui target, Dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK sebesar 88 %. Hal ini menunjukkan perlu masih adanya penduduk yang belum mengikuti jenjang pendidikan sehingga masih perlu dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan.

Catatan : jenjang pendidikan menengah SMA/SMK tahun 2018 menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.22**

**Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 Kota Bogor  
Tahun 2014 – 2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI/Kejar Paket A	99.44	103.98	98.30	95.44	108.05
2	Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs/Kejar Paket B	97.89	99.41	74.30	74.75	94.14
3	Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/SMK/MA/Paket C	73.75	103.99	78.6	61.21	88

*Sumber : Bogor Dalam Angka 2018 dan Dinas Pendidikan Kota Bogor*

#### E. ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) pada tahun 2015 di Kota Bogor sebesar 996,75 menggambarkan peluang bayi yang hidup usia di bawah satu tahun diantara 1.000 bayi yang lahir adalah sebanyak 996,75 bayi. Jika melihat dari cakupan kecamatan

di Kota Bogor, maka kecamatan dengan AKHB paling tinggi ditunjukkan pada Kecamatan Bogor Timur yakni sebesar 998,02 bayi setiap 1.000 bayi yang lahir. Pada umumnya setiap kecamatan di Kota Bogor harapan seorang bayi hidup cukup tinggi dengan AKHB berkisar antara 994,75 hingga 998,02 bayi.

**Tabel 2. 23**

**Jumlah Kematian Bayi, Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Bogor Tahun 2016**

KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN BAYI USIA <1 TAHUN TAHUN 2013	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP TAHUN 2017	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)	ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)	ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI (AKHB)
Bogor Barat	11	3.820	2,49	1	997,51
Bogor Timur	4	2.002	1,98	2	998,02
Bogor Utara	11	4.559	3,20	4	996,80
Bogor Selatan	14	1.812	3,71	4	996,29
Bogor Tengah	11	4.178	5,25	1	994,75
Tanah Sareal	11	4.144	2,89	1	997,11
Jumlah	62	20.515	19,52	13	996,75

Sumber : BPS Kota Bogor, 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2108
1	Angka kelangsungan hidup bayi	19.461	19.645	19.512	19.621

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor

**F. ANGKA USIA HARAPAN HIDUP**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan.

Peningkatan AHH di Kota Bogor cukup baik walaupun peningkatan dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan, untuk itu beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih diperhatikan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang akan datang.

**Grafik 2.23**

**Angka Harapan Hidup Kota-Kota di Jawa Barat  
Tahun 2010-2017**

AHH	Kota Bogor	Kota Sukabumi	Kota Bandung	Kota Cirebon	Kota Bekasi	Kota Depok	Kota Cimahi	Kota Tasikmalaya	Kota Banjar
2010	72,54	71,65	73,72	71,62	74,12	73,83	73,53	70,73	69,93
2011	72,55	71,69	73,74	71,66	74,13	73,87	73,54	70,81	70,03
2012	72,56	71,72	73,77	71,70	74,15	73,90	73,55	70,87	70,12
2013	72,57	71,75	73,79	71,75	74,17	73,94	73,56	70,93	70,20
2014	72,58	71,76	73,80	71,77	74,18	73,96	73,56	70,96	70,24
2015	72,88	71,86	73,82	71,79	74,48	73,98	73,58	71,26	70,26
2016	72,95	71,90	73,84	71,83	74,55	74,01	73,59	71,37	70,33
2017	73,01	71,95	73,86	71,86	74,63	74,04	73,61	71,48	70,39

**Grafik 2.24**



Sumber: BPS Jawa Barat 2017

Mulai tahun 2016-2017 pertumbuhan angka harapan hidup kota bogor cenderung terjadi perlambatan sementara pertumbuhan angka harapan hidup di jawa barat cenderung tetap. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh angka kematian ibu dan angka kematian bayi Permasalahan perlambatan angka harapan hidup di kota bogor dikarenakan oleh meningkatnya angka kematian bayi (AKB) atau infant mortality rate (imr) pada tahun 2017.

## G. PERSENTASE BALITA GIZI BURUK

Persentase jumlah balita yang menderita gizi buruk di Kota Bogor pada tahun 2017 adalah sebesar 0,07 persen, besarnya persentase ini menunjukkan adanya penurunan balita gizi buruk dari tahun 2015 yang

mencapai 0.35 . Penurunan persentase balita gizi buruk di Kota Bogor mengindikasikan adanya peningkatan kesehatan balita itu sendiri dan kesadaran ibu-ibu untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anaknya.

Adapun perkembangan kondisi balita gizi buruk di dalam kurun waktu tahun 2015-2017 disajikan dalam Grafik 2.25

**Grafik 2.25**



#### **H. PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN TERBUKA**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15 - 64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.24**  
**Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	57.74	57.74	61.13	62.27
2.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	11.03	10.03	6.5	9.28
3	Rasio penduduk yang bekerja	51.34	51.34	55.28	57.1
4	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	88.97	89.9	90.43	90.35

Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Bogor tidak mengalami kenaikan pada tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu 57.74 persen tetapi mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 menjadi 61.13 persen. Dan pada akhir 2018 mengalami kenaikan lagi sebanyak 1.14 menjadi 62.27 persen .

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor relatif fluktuatif sepanjang tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka 11.03 persen kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 10.03 persen. Kenaikan positif terjadi pada tahun 2017 sebanyak 3.53 persen menjadi 6.5 persen. Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 yaitu menjadi 9,28.

### 2.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Fokus seni budaya mencakup jumlah kelompok seni budaya, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olahraga. Capaian pembangunan seni dan budaya Kota Bogor Tahun 2018 disajikan dalam

Tabel berikut:

**Tabel 2.25**  
**Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2018 Kota Bogor**

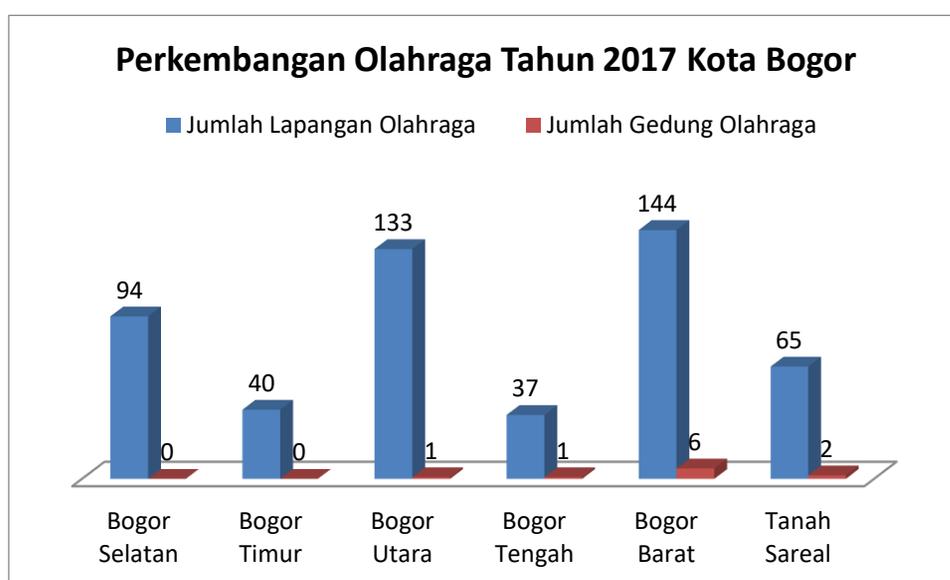
NO	KECAMATAN	JUMLAH SANGGAR SENI	JUMLAH GROUP KESENIAN	JUMLAH GEDUNG KESENIAN
1	Bogor Barat	13	4	0
2	Bogor Timur	8	2	0
3	Bogor Utara	4	1	0
4	Bogor Selatan	5	0	0
5	Bogor Tengah	5	1	1
6	Tanah Sareal	5	2	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Sumber: Data SIPD Bappeda 2018

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa jumlah grup kesenian (sanggar seni dan group kesenian) di Kota Bogor pada tahun 2018 sebanyak 50 grup jadi rasio jumlah grup kesenian adalah 0,50 grup kesenian per 10.000 penduduk. Angka rasio ini cukup kecil dan dapat dikatakan bahwa minat terhadap kesenian di Kota Bogor masih sangat kecil. Jumlah gedung kesenian di Kota Bogor tercatat hanya satu, yakni yang bertempat di Kecamatan Bogor Tengah, yaitu Gedung Kemuning Gading, sehingga jika dilihat dari jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk nilai rasionya adalah 0,01.

Untuk melihat capaian pembangunan olah raga Kota Bogor Tahun 2017 dapat dilihat dari Grafik 2.26.

**Grafik 2.26**



*Sumber: Data SIPD Bappeda 2017*

Jumlah gedung olahraga dan lapangan olah raga yang ada di Kota Bogor tercatat sebanyak 513 lapangan olah raga dan 10 gedung olah raga yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bogor. Maka rasio jumlah gedung olahraga dan lapangan per 10.000 penduduk maka di dapat nilai 5,23. Meskipun angka ini masih rendah bukan berarti mengindikasikan bahwa minat penduduk Kota Bogor kecil terhadap bidang olahraga, bisa saja banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraganya di luar (*outdoor*). Sama halnya dengan minimnya jumlah gedung olahraga di Kota Bogor, jumlah klub olahraga di Kota Bogor pun terbilang sangat sedikit yakni hanya tujuh klub olahraga, jika dihitung

rasio jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk maka hanya di dapati nilai 0,07.

### 2.3. ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah dapat mengukur tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan propinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

#### 2.3.1 PENGELUARAN PER KAPITA

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.26**  
**Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1.	pengeluaran per kapita (rupiah)	10488,49	10532,34	10532,34	10.662	10.940

*Sumber: LKPJ AMJ Walikota Bogor 2015 - 2019*

Pengeluaran per kapita di Kota Bogor cenderung naik setiap tahunnya akan tetapi kenaikannya tidak terlalu tinggi yaitu Rp. 86 dari tahun 2015 ke tahun 2016 dan Rp. 278 dari tahun 2016 ke 2017. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) oleh BPS, mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat.

### 2.3.2 PERSENTASE PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PER KAPITA

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di gunakan sebagai salah satu alat untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi untuk Kota Bogor pada tahun 2017 dapat di lihat dalam Tabel 2.27.

**Tabel 2.27**  
**Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017
1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	222.258	441.335		3.058.467
2	Aneka barang dan jasa	199.042	240.240		970.377
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	18.547	35.599		183.544
4	Barang tahan lama	15.512	49.791		368.344
5	Pajak, pungutan dan asuransi	20.089	47.788		232.353
6	Keperluan pesta, upacara dan kenduri	13.957	11.118		74.866
	Jumlah pengeluaran non pangan	489.404	825.871		3.583.436

*Sumber: BPS di olah oleh Bappeda*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengeluaran masyarakat Kota Bogor lebih tinggi pada konsumsi non pangan di bandingkan dengan konsumsi pangan.

### 2.3.3 ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI

Angka kriminalitas yang tertangani diperoleh dari jumlah kriminalitas yang ada di bagi jumlah penduduk pada tahun tersebut.

**Tabel 2.28**  
**Angka kriminalitas yang tertangani**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Angka kriminalitas yang tertangani	13.83	14.59	14.59	10,78

*Sumber : BPS, Kantor Kesbangpol*

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor fluktuatif, ada kenaikan pada tahun 2015 sampai tahun 2017, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017

#### **2.3.4 RASIO KETERGANTUNGAN**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

**Tabel 2.29**  
**Rasio Ketergantungan di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No	Uraian	2015	2016	2017
1.	Rasio ketergantungan (%)	43.51	43.51	42.28

*Sumber: BPS Diolah oleh Bappeda*

Rasio ketergantungan di Kota Bogor kurun waktu 2015-2017 berkisar antara 43.51 s/d 42.28. Pada tahun 2017 rasio ketergantungan total sebesar 42.28 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 sampe 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk nonproduktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah pendduk produktif (umur 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

Rasio Ketergantungan Muda merupakan perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Rasio Ketergantungan Muda mengalami penurunan pada selang waktu antara tahun 2014 sampai tahun 2015. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan muda sebesar 36,83; mengalami penurunan menjadi 22.54 pada tahun 2015; ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 36 orang dan 22 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun).

**Tabel 2.30**  
**Rasio Ketergantungan Muda Kota Bogor Tahun 2016-2017**

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	262708	271944
2	Jumlah Penduduk Usia > 65 tahun	60072	49272
3	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 tahun	741907	759793

4	Rasio Ketergantungan muda	35.41	35.79
5	Rasio ketergantungan tua	8.10	6.48

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Kota Bogor Dalam Angka 2017, 2018 , BPS Kota Bogor)

Rasio Ketergantungan Tua merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan tua mengalami kenaikan dalam selang waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2015. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan tua sebesar 5,04; mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 6.74; mengalami kenaikan 1,7%. ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 5 - 7 orang usia tidak produktif.

## **2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **2.4.1. FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAH WAJIB DASAR**

#### **A. PENDIDIKAN**

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

#### **➤ PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Angka pendidikan anak usia dini adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak dibandingkan dengan jumlah anak pada rentang usia 4-6 tahun. Dari Tabel 2.30 dapat dilihat bahwa angka pendidikan anak usia dini di Kota Bogor terus mengalami relatif naik, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Bogor menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap anak yang dimulai sedini mungkin. Berikut disajikan perkembangan angka pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Bogor. Persentase jumlah siswa PAUD/TK/RA terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di tahun 2015 sebesar 31,10%. Persentasenya terus naik di tahun 2016 dan 2017 berturut-turut sebesar 37,69% dan 41,42%. Sedangkan di tahun 2018 turun menjadi 38,51% .

**Tabel 2.31**  
**Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bogor**  
**Tahun 2015-2018**

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	31,10	37,69	41,42	38,51

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor

➤ **ANGKA PARTISIPASI KASAR**

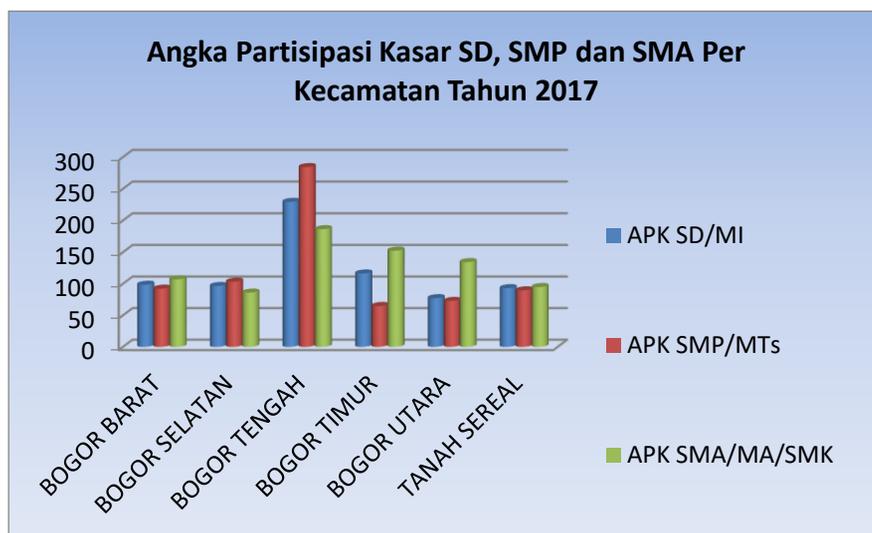
PK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bogor Tahun 2017 menurut Kecamatan :

**Tabel 2.32**  
**Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Per Kecamatan**  
**Tahun 2017**

N O	KECAMATAN	APK SD/MI			APK SMP/MTs			APK SMA/MA/SMK		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	BOGOR BARAT	99.42	97.39	98.39	100.25	84.28	92.19	112.91	101.24	107.02
2	BOGOR SELATAN	102.20	90.74	96.41	104.71	101.83	103.26	94.82	77.28	85.96
3	BOGOR TENGAH	240.76	218.07	229.30	292.71	275.82	284.18	173.70	198.60	186.28
4	BOGOR TIMUR	123.03	109.56	116.23	64.87	64.63	64.74	145.97	158.57	152.33
5	BOGOR UTARA	80.03	74.38	77.18	70.34	75.22	72.80	145.00	123.62	134.20
6	TANAH SEREAL	97.37	88.66	92.97	93.15	86.00	89.54	86.81	102.56	94.77
	<b>TOTAL</b>	88.63	81.67	105.53	107.11	100.87	103.95	118.34	114.97	116.64

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor (2017)

**Grafik 2.27**



**Tabel 2.33**

**Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor Tahun 2017**

No.	Uraian	2017
1.	Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI/Kejar Paket A	107.76
2	Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs/Kejar Paket B	86.82
3	Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/SMK/MA/Paket C	87.79

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor Dalam Angka 2018

➤ **ANGKA PARTISIPASI MURNI**

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor pada tahun 2018 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 108.593% dari target 99,5 dan SMP/MTS mencapai 102.885% dari target 94,14 . Angka yang di capai sudah melampaui target, Dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK sebesar 88 %. Hal ini menunjukkan perlu masih adanya penduduk yang belum mengikuti jenjang pendidikan sehingga masih perlu dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan.

Catatan : jenjang pendidikan menengah SMA/SMK tahun 2018 menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.34**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018**  
**Kota Bogor Tahun 2015 – 2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI/Kejar Paket A	103.98	98.30	95.44	108.05
2	Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs/Kejar Paket B	99.41	74.30	74.75	94.14
3	Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/SMK/MA/Paket C	103.99	78.6	61.21	88

*Sumber : Bogor Dalam Angka 2018 dan Dinas Pendidikan Kota Bogor*

➤ **ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH**

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bogor tertera pada Tabel 2.34.

**Tabel 2.35**  
**Perkembangan angka Partisipasi Sekolah Kota Bogor Tahun 2015 – 2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka Partisipasi SD/MI/Kejar Paket A	49,76	34,658	115,025	115,271
2	Angka Partisipasi SMP/MTs/Kejar Paket B	33,978	34,63,	33,604	30,929
3	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA/Paket C	31,126	31,973	31,574	31,261

*Sumber ; Dinas Pendidikan Kota Bogor*

Angka partisipasi sekolah pada tingkat sekolah dasar menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2015 nilai APS sebesar 49.76, pada tahun 2016 nilai APS sebesar 34,658 dan pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 115,025 begitu juga dengan tahun 2018 naik lagi menjadi 115.271. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk pada usia sekolah dasar mampu diserap oleh infrastruktur pendidikan dasar.

Angka partisipasi sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama menunjukkan pola yang fluktuatif . Pada tahun 2015 nilai APS sebesar 33.978 pada tahun 2016 nilai APS sebesar 34.63 dan turun pada tahun 2017 menjadi sebesar 33.604 kemudian mengalami turun lagi di tahun 2018 menjadi 31.261.

Angka partisipasi sekolah pada tingkat SMA cenderung pola yang relatif datar yaitu pada tahun 2015 sebesar 31.126 , tahun 2016 ada kenaikan sedikit menjadi sebesar 31.973. Ada penurunan kembali tahun 2017 menjadi sebesar 31.574 dan kembali menurun menjadi 31.261 di tahun 2018.

➤ **ANGKA PUTUS SEKOLAH**

Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/ tidaknya pembangunan di bidang pendidikan.

Data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Bogor cukup rendah, tidak mencapai 1%. Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan pada tahun tersebut Angka putus sekolah pada tingkat SD/MA berada pada angka rasio terkecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 2.36**

**Angka Putus Sekolah di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No .	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	0.06	0.06	0.06
2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0	0.13	0.08	0.08
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0.01	0.085	0.11	0.11

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor*

➤ **ANGKA KELULUSAN DAN ANGKA MELANJUTKAN**

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas diantara siswa, guru serta orang tua.

Jumlah kelulusan siswa di Kota Bogor per jenjang pendidikan dari tahun 2015 - 2018, baik SD/MI , SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA seluruhnya masih dalam angka yang memuaskan. Apabila dilihat lima tahun terakhir rata-rata angka kelulusan SD/MI ,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA seluruhnya berada dalam kisaran 90,6%-100%.

Pasca kelulusan, diharapkan para peserta didik dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan menggunakan rumus jumlah lulusan pada jenjang tertentu di bagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tertentu di kali 100, maka diperoleh angka kelulusan seperti dalam tabel berikut ;

**Tabel 2.37**

**PERKEMBANGAN ANGKA KELULUSAN DAN ANGKA MELANJUTKAN KOTA BOGOR TAHUN 2015 – 2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Angka kelulusan SD/MI/Kejar Paket A	100	98,2	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs/Kejar Paket B	100	90,6	100	100
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA/Paket C	100	91,4	100	100
4	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	164	115	110
5	Angka Melanjutkan SMP/Mtske SMA/MA	108	164	115	110

*Sumber; Dinas Pendidikan Kota Bogor*

➤ **RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH**

**Tabel 2.38**

**Perkembangan Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	28,85	34,64	34,86	33,14
2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah	31,12	31,97	31,57	31,26

*Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bogor*

Mengacu kepada tabel di atas bahwa secara umum rasio ketersediaan sekolah pada semua tingkatan menunjukkan masih jauh dari rasio ideal atau kurang memadai, artinya jumlah siswa di semua level sekolah dan rasio jumlah siswa dengan ruang kelas berlebihan.

➤ **RASIO GURU TERHADAP MURID**

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Rasio ini juga dapat mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru. Sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, bahwa setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kota Bogor masih dapat dikatakan ideal sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini ;

**Grafik 2.28**



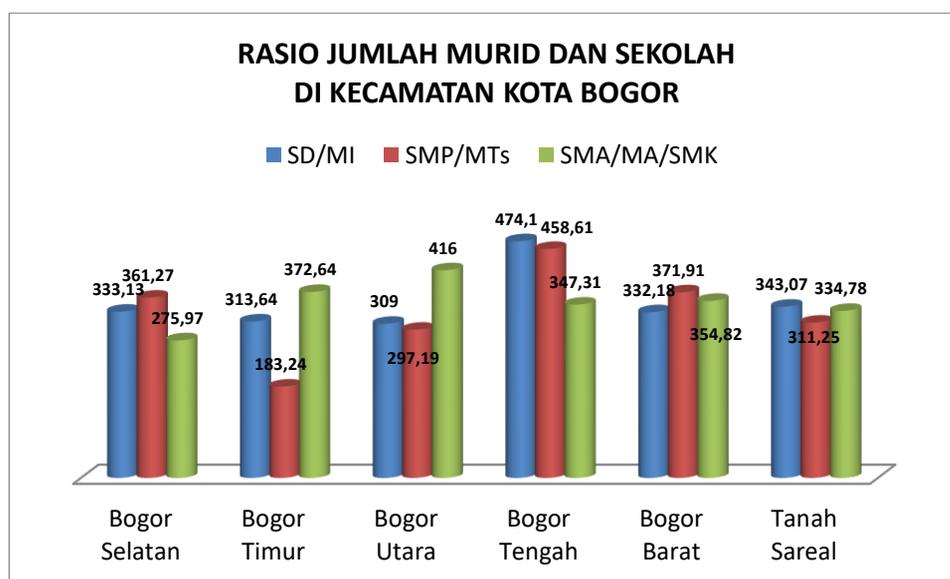
Sumber :Kota Bogor Dalam Angka 2018

Seperti tersaji grafik di atas , kecamatan yang memiliki rasio guru terhadap murid tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI yaitu Kecamatan Bogor Tengah dengan rasio 27,00; yang artinya satu guru mengajar 27 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio guru terhadap murid tertinggi terdapat di Kecamatan Tengah dengan rasio sebesar 19,00; Sedangkan untuk jenjang SLTA/Sederajat rasio guru terhadap murid tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Barat dengan rasio sebesar 19,00 angka ini mengartikan bahwa satu guru mengajar 19 siswa. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kota Bogor rasio guru dan murid berada pada kondisi ideal di atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

➤ **RASIO JUMLAH MURID DAN SEKOLAH**

Rasio jumlah murid dan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Data ini menggambarkan daya tampung sekolah. Kondisi daya tampung sekolah di Kota Bogor pada setiap Kecamatan pada tahun 2017 dapat tergambar dalam grafik di bawah ini ;

**Grafik 2.29**



Sumber data : Kota Bogor Dalam Angka 2018

Dari grafik di atas tergambar rasio jumlah murid dan sekolah tertinggi di Kota Bogor untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs terdapat di Kecamatan Bogor Tengah. Jenjang pendidikan SD/MI, 474,1; yang artinya satu sekolah SD/MI menampung 474 siswa. Jenjang pendidikan SMP/MTs dengan rasio sebesar 458,61 angka ini berarti satu sekolah SMP/MTs menampung 458 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA rasio jumlah murid dan sekolah terbesar di Kecamatan Bogor Utara dengan rasio sebesar 416 yang artinya satu sekolah SMA/MA menampung 416 siswa.

➤ **GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV**

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2018, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat sudah mencapai 87.87. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kota Bogor, akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kota Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2015 - 2018.

**Tabel 2.39**

<b>Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV</b>					
No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85	88,5	85	87,87

## B. KESEHATAN

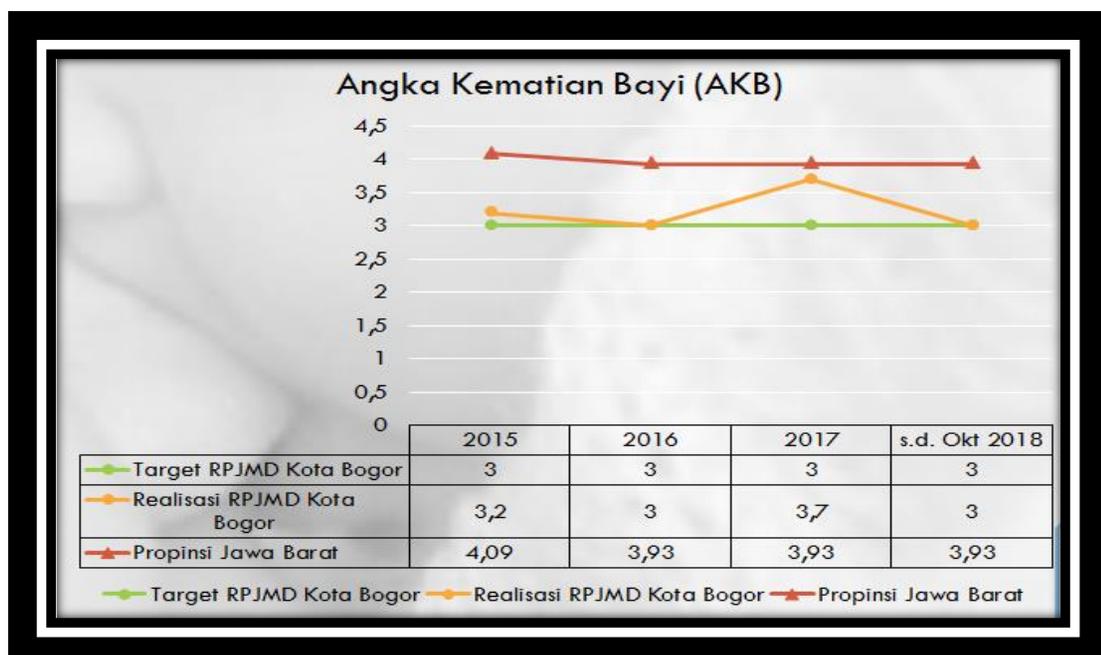
Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia. Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah Angka Harapan Hidup Saat lahir.

### ➤ ANGKA KEMATIAN BAYI

Salah satu indikator utama derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Pada Tahun 2018 , Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran di Kota Bogor mencapai 2.9. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat yaitu 3.39. Upaya Pemerintah Kota Bogor terus berupaya untuk menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam rangka meningkatkan kualitas derajat kesehatan Masyarakat. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 dalam menekan AKB dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 2.30**



*Sumber: Dinas Kesehatan, Januari 2019 dan Rancangan RPJMD Prop Jabar 2018-2023*

Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 di bidang kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah menurunkan angka kematian bayi mencapai 24 kasus per 1000 kelahiran hidup pada akhir tahun 2019. Sementara dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019, telah ditargetkan bahwa pada akhir tahun 2019, angka kematian bayi di Kota Bogor mencapai 3 kasus per 1000 kelahiran hidup. Target tersebut jauh melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

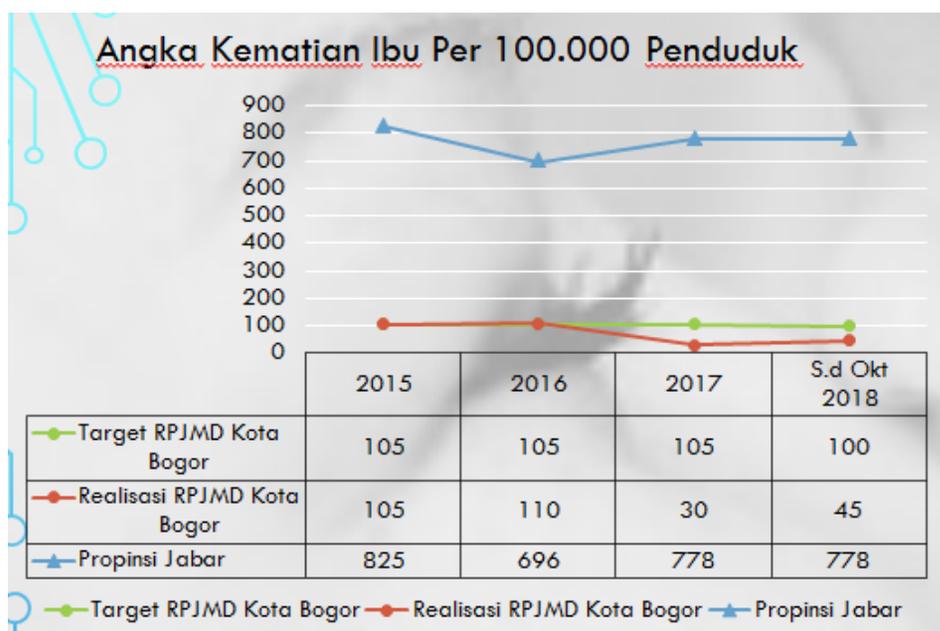
➤ **ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP IBU**

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, Ibu dan Anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan. Penilaian terhadap status kesehatan dan pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu menjadi salah satu tolok ukur yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang sangat berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan dan pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian Ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Berdasarkan survei demografi Kesehatan Indonesia, (SDKI), sampai dengan tahun 2012, Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi yaitu sebesar 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, untuk data di Kota Bogor pada Tahun 2018, Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 100 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan AKI di level nasional. Berikut ini adalah gambaran performa AKI di Indonesia berdasarkan hasil sensus demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012)

**Grafik 2.31**

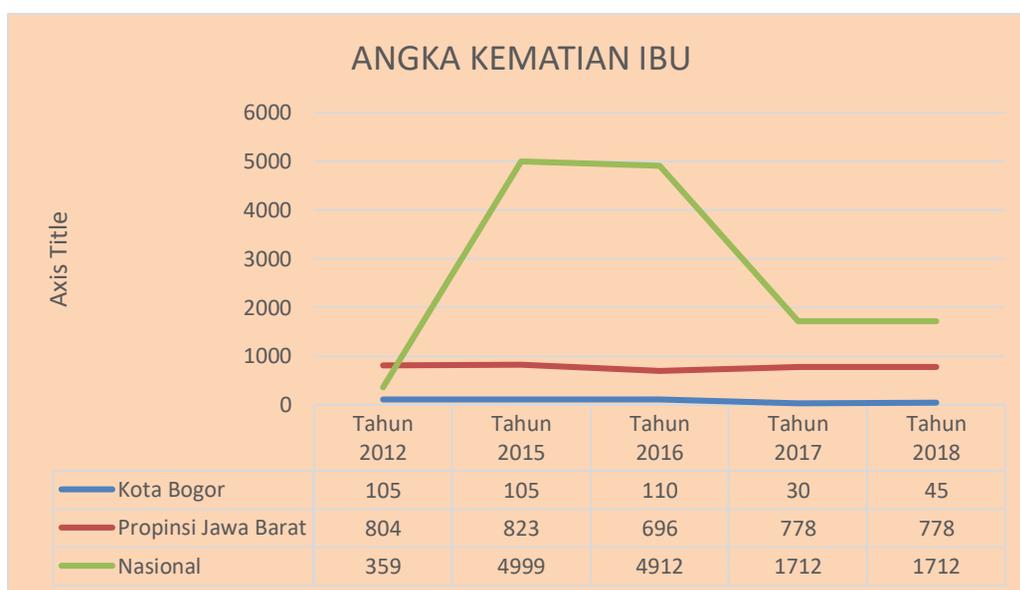


Sumber: Dinas Kesehatan, Januari 2019 dan Rancangan RPJMD Prop Jabar 2018-2023

Hasil Sensus Kependudukan tahun 2010 menunjukkan bahwa 90% kematian ibu terjadi saat atau segera setelah proses persalinan. Persentase tertinggi sejak satu dekade terakhir karena perdarahan. Walaupun aborsi hanya berkontribusi 1% terhadap kematian ibu, data sesungguhnya mungkin lebih tinggi, bisa mencapai 11% - 15%. Hal ini disebabkan banyaknya kasus aborsi tidak aman tercatat sebagai infeksi dan perdarahan akibat komplikasi persalinan.

**Grafik 2.32**

**Perbandingan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan nasional**



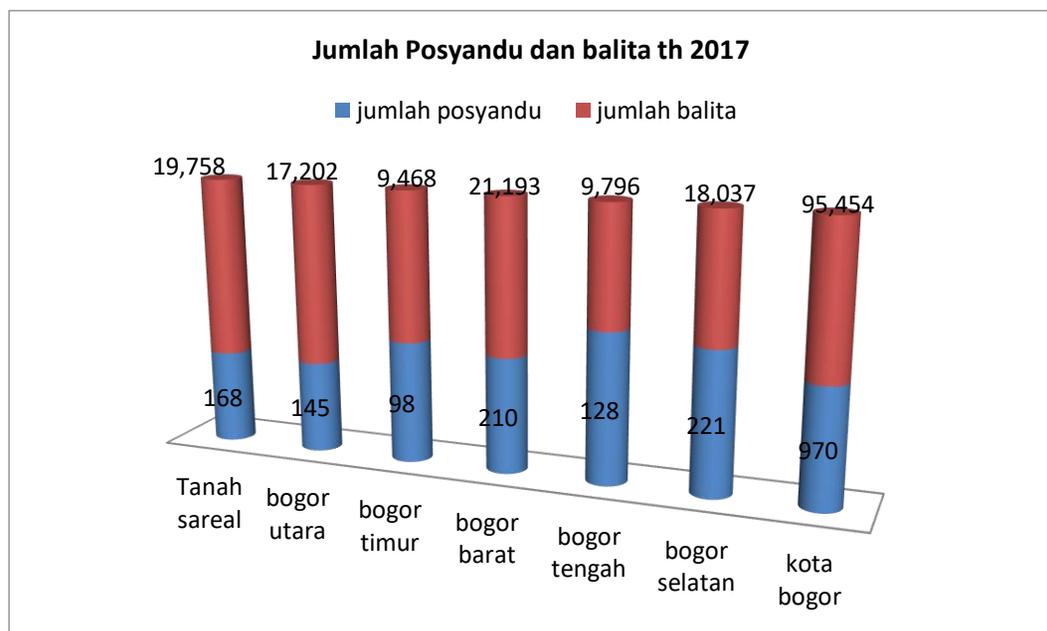
Sumber: Dinas Kesehatan, 2017

➤ **RASIO POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) PER SATUAN BALITA**

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Rasio ideal 1 unit poyandu untuk melayani balita adalah 75 – 100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka di lakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu.

**Grafik 2.33**



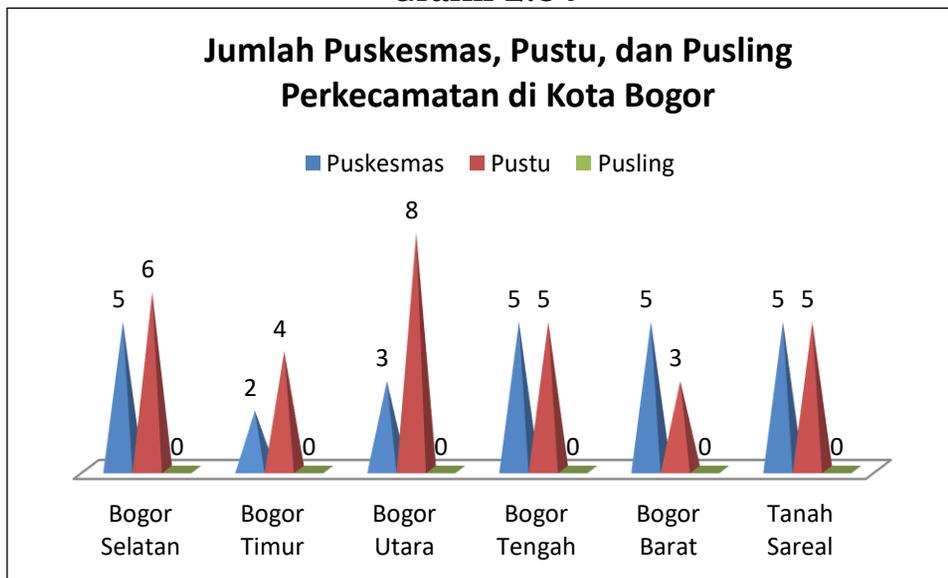
Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Kecamatan dengan rasio Posyandu per satuan balita tertinggi pada tahun 2017 terdapat pada Kecamatan Bogor Tengah dengan rasio sebesar 16,47 yang artinya 1.000 balita dapat dilayani Posyandu sebanyak 16 Posyandu. Kecamatan ini memiliki rasio posyandu per satuan balita tertinggi dikarenakan jumlah balita yang terdapat di Kecamatan Bogor Tengah merupakan jumlah balita paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya yang juga didukung oleh jumlah Posyandu yang memadai.

➤ **RASIO PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) DAN PUSKESMAS KELILING**

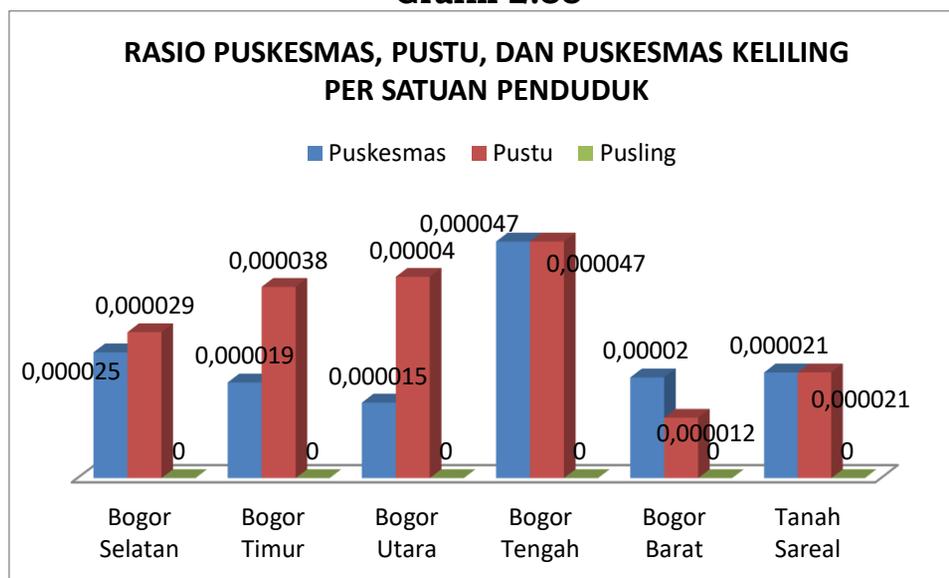
Puskesmas, Pustu dan puskesmas keliling merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

**Grafik 2.34**



*Sumber: Kota Bogor dalam Angka 2018*

**Grafik 2.35**



*Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018*

**Tabel 2.40**  
**Jumlah Puskesmas, Pustu dan Puskesmas Keliling di Kota Bogor**  
**Tahun 2017**

N o.	KEC.	JUMLAH PUSKESMAS	JUMLAH PUSTU	JUMLAH PUSKESMAS KELILING	JUMLAH PENDUDUK	RASIO PUSKESMAS PER SATUAN PENDUDUK	RASIO PUSTU PER SATUAN PENDUDUK	RASIO PUSKESMAS KELILING PER SATUAN PENDUDUK
1	BOGOR SELATAN	5	6	0	201.618	40.323,6	33.603,0	0
2	BOGOR TIMUR	2	4	0	106.209	53.104,5	26.552,2	0
3	BOGOR UTARA	3	8	0	196.051	65.350,3	24.506,4	0
4	BOGOR TENGAH	5	5	0	104.853	20.970,6	20.970,6	0
5	BOGOR BARAT	5	3	0	239.860	47.972,0	79.953,3	0
6	TANAH SAREAL	5	5	0	232.598	46.519,6	46.519,6	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>1.081.009</b>	<b>274.240,6</b>	<b>232.105,1</b>	<b>0</b>

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2018

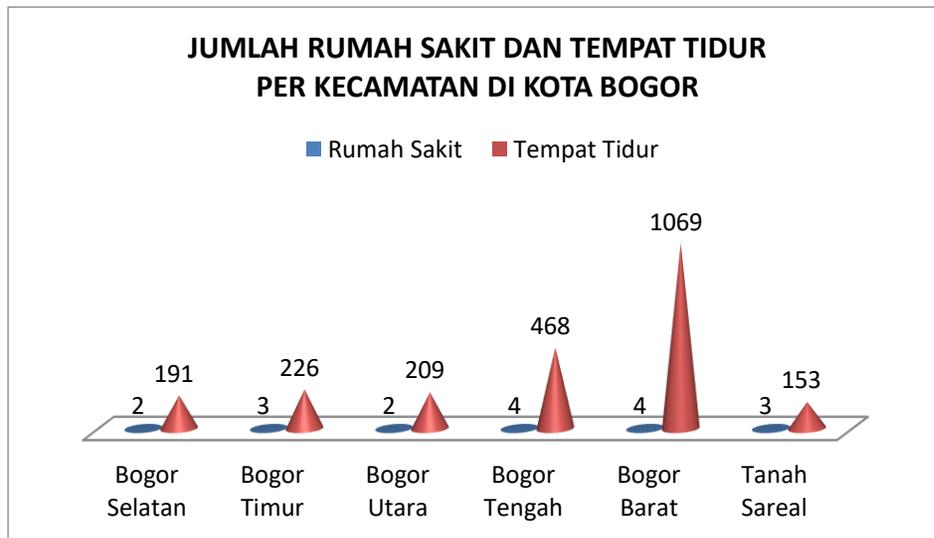
Dari data di atas, rasio puskesmas per satuan penduduk Kota Bogor pada waktu tahun 2017 adalah 274.240,6 artinya setiap puskesmas melayani sebanyak 274.240 jiwa. Apabila dijumlahkan puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling maka rasionya menjadi 58.683.632. Kecamatan yang rasio Puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling per satuan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Bogor Barat dengan rasio sebesar 25.848.22 artinya satu Puskesmas melayani sebanyak 25.848 jiwa. Apabila dibandingkan dengan wilayah kerja Puskesmas tanpa puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah Puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, maka dapat dikatakan jumlah Puskesmas yang ada di Kota Bogor belum memenuhi standar yang ada. Tetapi dengan adanya puskesmas pembantu dan puskesmas keliling menjadi memenuhi standar.

➤ **RASIO RUMAH SAKIT PER SATUAN PENDUDUK**

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah jumlah Rumah Sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas Rumah Sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi

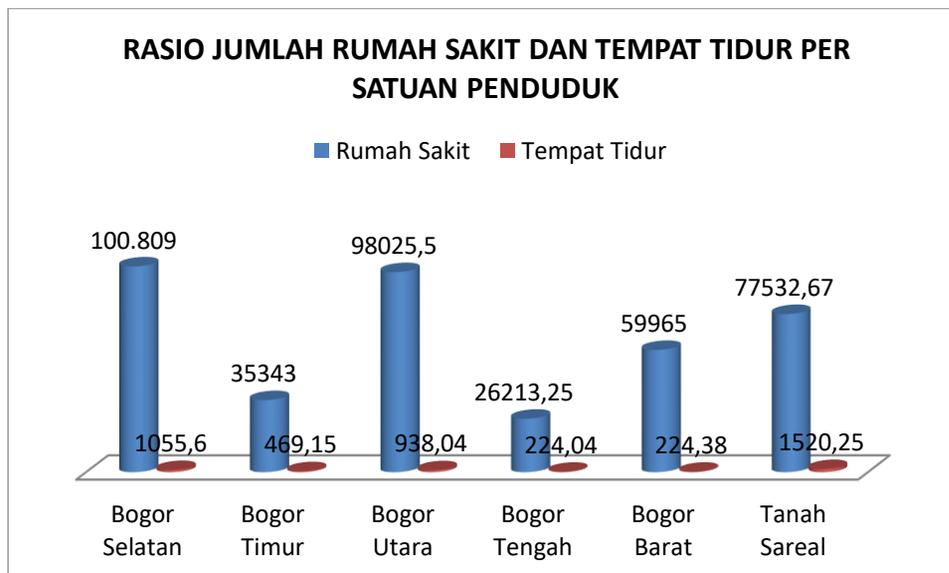
masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jumlah tempat tidur pada rumah sakit juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Gambaran jumlah tempat tidur dan rumah sakit dapat terlihat dalam grafik berikut :

**Grafik 2.36**



*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2018*

**Grafik 2.37**



*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2018*

Bila dilihat dari grafik di atas Kecamatan Bogor Barat mempunyai jumlah tempat tidur terbanyak ( 1069 bed ) dari 4 Rumah Sakit. Hal ini karena di Kecamatan Bogor Barat terdapat Rumah Sakit Umum Daerah

dan Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Sedangkan rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kecamatan Bogor Barat 58.158,58 artinya satu rumah sakit melayani 58.158 penduduk . Untuk Rasio rumah sakit per satuan penduduk yang tertinggi ada di Kecamatan Tanah Sareal yaitu 110,599 artinya satu rumah sakit melayani 110.599 penduduk, hal ini disebabkan di Kecamatan Tanah Sareal hanya mempunyai 2 rumah sakit dengan 64 tempat tidur.

Peningkatan jumlah rumah sakit setiap tahunnya diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang ada, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk semakin meningkat.

➤ **RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK**

Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Idealnya adalah satu berbanding 2.500 artinya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, ini sesuai dengan standar sistem pelayanan terpadu.

**Tabel 2.41**  
**Rasio Dokter Persatuan Penduduk**

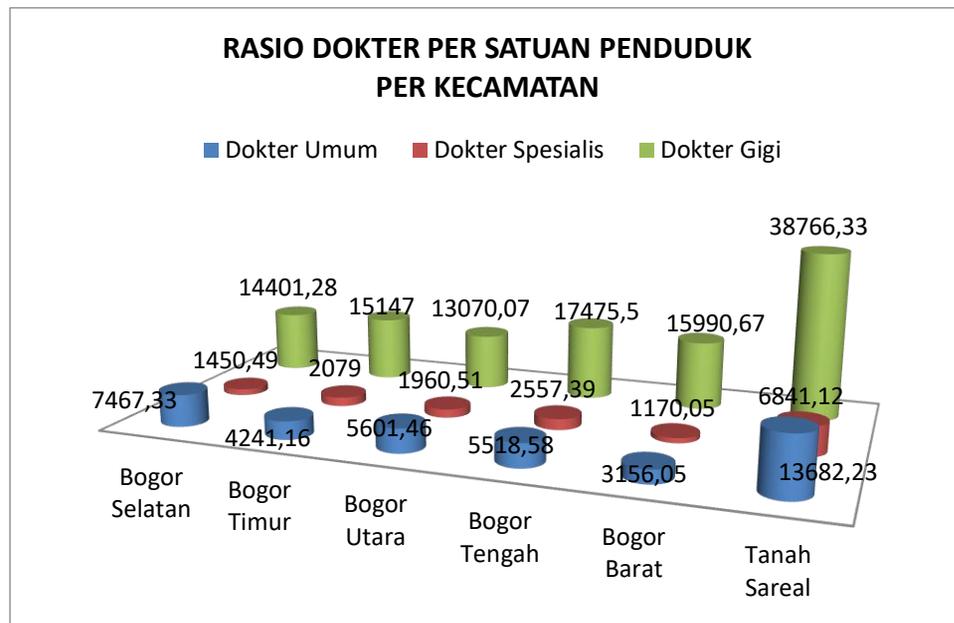
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	JUMLAH PENDUDUK	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009
<b>JUMLAH DOKTER PRAKTEK</b>					
<b>2</b>	DOKTER UMUM	602	821	272	199
<b>3</b>	DOKTER SPESIALIS	554	696	560	570
<b>4</b>	DOKTER GIGI	290	344	166	63
<b>RASIO</b>					
<b>5</b>	DOKTER UMUM	1.712	1.276	3.914	5.432
<b>6</b>	DOKTER SPESIALIS	1.861	1.506	1.901	1.896
<b>7</b>	DOKTER GIGI	3.554	3.046	6.413	17.158

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2018

Pada tabel di atas, Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 rasio dokter umum per satuan penduduk mencapai 3.914 artinya satu dokter melayani 3.914 jiwa. Berlanjut sampai tahun 2017 rasio dokter per satuan penduduk menjadi 5.432. Sedangkan rasio dokter spesialis per satuan penduduk juga sudah memenuhi standar karena pada tahun 2017 rasio nya mencapai 1.896 yang artinya satu dokter spesialis melayani 1.896 jiwa. Rasio dokter gigi per satuan penduduk adalah 17.158 artinya satu dokter gigi melayani 1 jiwa. Kondisi di atas menunjukkan bahwa rasio dokter per satuan penduduk di katakan sudah ideal.

Untuk melihat kondisi sebarannya per kecamatan dapat di lihat pada grafik berikut :

**Grafik 2.38**



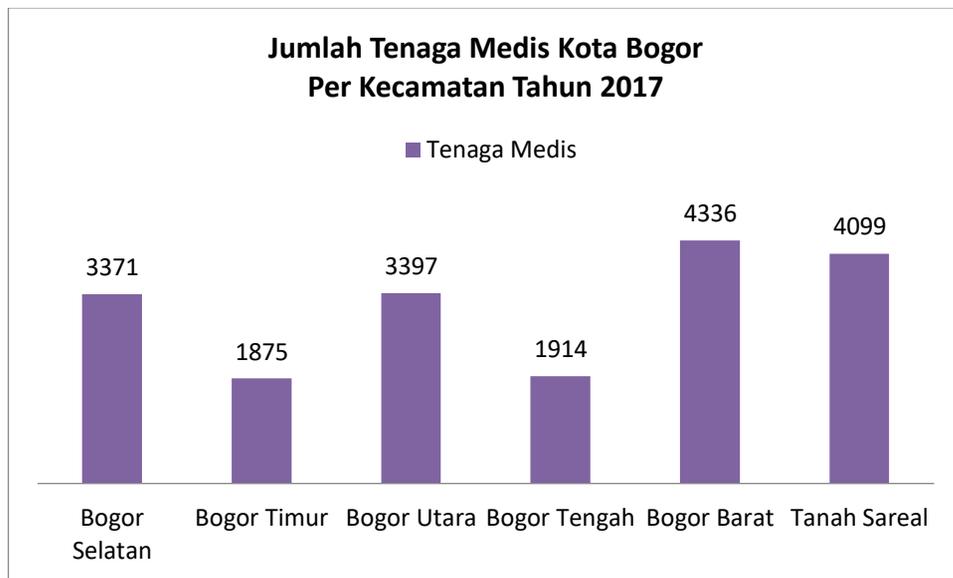
Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

Rasio Dokter Umum per satuan penduduk per Kecamatan sudah memenuhi standar pelayanan terpadu. Sedangkan rasio tertinggi untuk rasio dokter spesialis terdapat di kecamatan Bogor Selatan yaitu 3713 , sedangkan di Kecamatan Bogor Utara satu dokter melayani 15.071 jiwa. Rasio yang ideal untuk dokter terhadap penduduk, yaitu satu dokter melayani 2.500 penduduk sehingga sangat jelas bahwa rasio dokter per satuan penduduk di Kecamatan Bogor Utara tidak ideal. Hal ini terjadi dikarenakan Kecamatan Bogor Utara memiliki jumlah penduduk yang tinggi (180.847 jiwa) dengan tidak diimbangi oleh jumlah dokter yang memadai (12 dokter).

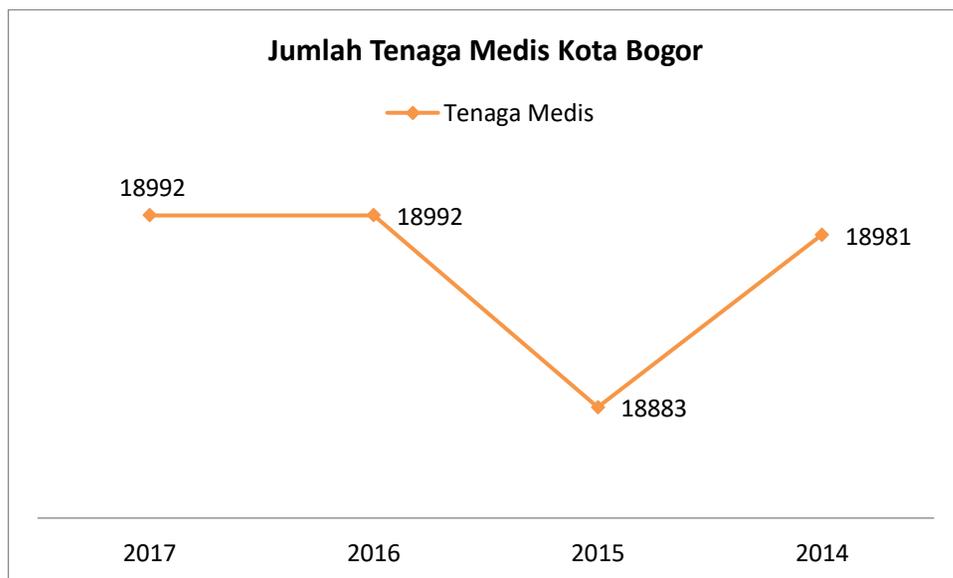
➤ **RASIO TENAGA MEDIS PER SATUAN PENDUDUK**

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

**Grafik 2.39**



**Grafik 2.40**



**C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi

infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Penjelasan nya sebagai berikut :

- a. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan  $\leq 6\%$ ), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
- b. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10%). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas.
- c. Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16%). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
- d. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadang kala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
- e. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan  $> 20\%$ ). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda empat, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

**Tabel 2.42**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	86.5%	88.75%	88.91%	89.16%

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor*

Proporsi kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik terjadi peningkatan setiap tahunnya.

➤ **PEMBANGUNAN ASPEK PELAYANAN UMUM URUSAN PEKERJAAN UMUM**

Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kota Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu juga yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi. Secara umum kinerja pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada Tabel 2.45.

**Tabel 2.43**  
**Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan**  
**Penataan Ruang di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
	<b>Pekerjaan Umum</b>				
1.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (%)	87.6	88.15	88.2	88.59
2.	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	61.32	61.71	61.83	66.44
3.	Persentasi rumah tinggal bersanitasi	66.8	66.8	72.1	67.21
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	2.78	5.48	7.22	11.01
6.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	23	89	37	74.19
7.	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik (%)	11.46	22.92	34.38	45.83

*Sumber: Dinas pekerjaan Umum dan Penataan ruang*

➤ **RASIO JARINGAN IRIGASI**

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap. Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya di Kota Bogor tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2.44**

**Rasio Jaringan Irigasi di Kota Tahun 2015-2018**

No	Irigasi	2015	2016	2017	2018
1.	Rasio Jaringan Irigasi	11.46	22.92	34.38	45.83

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Proporsi panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya di Kota Bogor mengalami kenaikan setiap tahunnya .

➤ **RASIO TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PER SATUAN PENDUDUK**

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

**Tabel 2.45****Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2015-2018**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	<b>Rasio pemakaman umum per satuan penduduk</b>	<b>11.59</b>	<b>11.41</b>	<b>11.24</b>	<b>11.71</b>

*Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor*

Rasio pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2015 di Kota Bogor sebesar 11.59 artinya jumlah daya tampung tempat pemakaman umum sebesar 11.59 per 1000 penduduk. Sebesar 11.71 per 1000 penduduk daya tampung tempat pemakaman umum untuk tahun 2018. Maksudnya pada tahun 2018 Kota Bogor hanya mampu menampung 11 sampai 12 orang dari 1000 penduduk.

➤ **RASIO TEMPAT BERIBADAH PER SATUAN PENDUDUK**

Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama.

**Tabel 2.46****Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0.0185	0.0183	0.018	0.018

*Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Bogor*

Pada tahun 2015 Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk sebesar 0.0185 dan menjadi 0.018 pada tahun 2018. Artinya di Kota Bogor tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah tempat ibadah.

➤ **LUASAN RTH PUBLIK SEBESAR 20% DARI LUAS WILAYAH KOTA/KAWASAN PERKOTAAN**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria :

- a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- c. didominasi komunitas tumbuhan

Luasan RTH publik yang tersedia di Kota Bogor tertera dalam Tabel 2.47

**Tabel 2.47**  
**Luasan RTH publik yang tersedia di Kota Bogor di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No.	URAIAN	2015	2016	2015	2017
1.	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Wilayah Perkotaan	1.66	1.67	1.69	1.72

*Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor*

➤ **RASIO BANGUNAN BER-IMB PER SATUAN**

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

**Tabel 2.48**  
**Perkembangan pengendalian Bangunan ber-IMB**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Kesesuaian Bangunan dengan IMB yang telah terbangun	90%	99.37%	98.90%	99.74%
2	Pencegahan Bangunan tidak Ber-IMB	72%	75.69%	88.83%	82.32%

*Sumber: LKPJ Walikota Bogor Tahun 2015,2016,2017,2018*

90% bangunan di Kota Bogor pada tahun 2015 sudah ber IMB terus mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 99.37 % bangunan dan naik kembali pada tahun 2017 sebesar 98.90% dan naik lagi pada tahun 2018 menjadi 99.74 %.

➤ **KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

**Tabel 2.49**  
**Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	90	99.77	98.9	99.74

Sumber: Bappeda Kota Bogor

Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah.

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin taat suatu daerah pada RTRW, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi.

#### **D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

##### ➤ **RASIO RUMAH LAYAK HUNI**

Rasio rumah layak huni mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2015- 2018. Ditahun 2015 mencapai 20,84 terus 20.73 di tahun 2016, 20,71 di tahun 2017 dan menjadi 17.28 di tahun 2018. Artinya di tahun 2018 penduduk Kota Bogor masih ada 17.28 rumah layak huni. Lebih lengkap kondisi rumah layah huni di Kota Bogor seperti dalam Tabel 2.50.

**Tabel 2.50**  
**Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018**

No.	URAIAN	2015	2015	2017	2018
1.	Rasio rumah layak huni	20.84	20.73	20.71	17.28
2	Rasio pemukiman layak huni	91.8	92.92	94.03	95.14
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	74.3	98.11	78.4	70.59
4	Cakupan layak huni yang terjangkau	89.69	92.5	44.84	76.61

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman

Dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018, rasio pemukiman layak huni terus meningkat. Yang pada tahun 2015 mencapai 91.8 menjadi 95.14 di tahun 2018. Sedangkan untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layak huni yang terjangkau sangat fluktuatif menjadi 70.59 dan 76.61 pada tahun 2017 dan 2018.

➤ **Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh**

Secara bertahap persentase lingkungan pemukiman kumuh terus berkurang dimulai tahun 2015 sebesar 1.1% dan tiga tahun terakhir sebesar 0.005%.

**Tabel 2.51**  
**Perkembangan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kota Bogor**  
**Tahun 2015-2018**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh (%)	1.1	0.005	0.005	<b>0.005</b>
2	Persentase luasan pemukiman kumuh di perkotaan	99.59	99.59	99.59	<b>99.59</b>
3	<b>Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan</b>	<b>1.15</b>	<b>1.13</b>	<b>1.11</b>	<b>1.09</b>

*Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor*

Persentasi luasan pemukiman kumuh di perkotaan tidak mengalami kenaikan, ini merupakan hal yang positif karena tidak terjadi perluasan baru. Sedangkan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mengalami penurunan yaitu dari 1.15 pada tahun 2015 menjadi 1.09 di tahun 2018.

**E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL**

➤ **TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 DAN PERSENTASE PENYELESAIAN PENEGAKAN PERDA**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum dalam Pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kabupaten Bogor telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan K3 dan penegakan perda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.52**  
**Penyelesaian Penegakan PERDA di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2017
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	68	68	68	<b>68</b>
1.	<b>Persentase Penegakan PERDA (%)</b>	<b>78</b>	<b>8856,75</b>	<b>88</b>	<b>90</b>

Sumber: Kasat Pol PP Kota Bogor

➤ **Penanganan Bencana**

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanggulangan Kebakaran. Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Pemadam Kebakaran saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kota Bogor tahun 2015-2017 sudah mencapai angka 95% dengan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) penanggulangan kebakaran rata-rata 18,6 menit (standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 adalah 15 menit). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Bogor selama kurun waktu tahun 2015-2017.

**Tabel 2.53**  
**Penanganan Bencana di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan pelayanan bencana	68%	68%	68%	68%

	kebakaran kota (%)				
2.	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	74	76	78	95

Sumber: Sat PolPP Kota Bogor

## F. SOSIAL

### ➤ Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Permasalahan bidang sosial terlihat dengan kecenderungan meningkatnya jumlah dan jenis Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial, seperti perdagangan manusia (*trafficking*), HIV, AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial masih terlihat rendah akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kota Bogor telah melakukan penanganan dan bantuan terhadap PMKS tahun 2015-2018 sebagai berikut :

**Tabel 2.54**  
**Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	43.09	44.33	72.74	91.45

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat sepanjang tahun yaitu 43.09 % tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 44.33 % kemudian meningkat lagi pada tahun 2017 dan 2018 yaitu menjadi 72.74 dan 91.45 Pada tahun 2017 naik menjadi 0,42 %.

## 2.4.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAH WAJIB NON DASAR

### A. TENAGA KERJA

#### ➤ Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja adalah jumlah sengketa yang terjadi per 1000 jumlah perusahaan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Adapun sengketa pengusaha-pekerja di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.55**

**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun  
di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	12	13	22	35

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor*

Angka sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2015 mencapai 12 kasus dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 35 kasus. Angka ini mengindikasikan masih ada hubungan yang tidak serasi antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja, semakin tidak harmonis hubungan antara pengusaha dan pekerja. Hal ini dapat berakibat buruk terhadap tingkat investasi. Oleh karena itu

semakin tinggi nilai indikator ini, semakin rendah kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan memelihara iklim yang kondusif bagi investasi, dan karenanya semakin rendah kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

## **B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

### **➤ PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PEMERINTAH**

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.56**

**Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah  
Dan DPRD Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2.14	2.20	2.17	2.2
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	17.78	17.78	17.78	17.78

*Sumber; DPMPPA Kota Bogor*

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Bogor mencapai 2.2% pada tahun 2018 di mana pada tahun 2015 hanya 2.14% artinya terjadi peningkatan sebesar 0.006 %

### **➤ RASIO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

**Tabel 2.57****Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	0.04	0.04	0.04	0.04

*Sumber: Dinas PP dan PA Kota Bogor*

Persentase kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bogor relatif sangat kecil hanya 0.04 selama 4 tahun terakhir.

➤ **PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN**

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Bogor mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 9.53 % lalu naik menjadi 9.82 pada tahun 2016 dan kembali naik menjadi 10.11 pada tahun 2017 dan kembali naik pada tahun 2018 yaitu 10.42%.

**Tabel 2.58****Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan  
di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018**

Uraian	2015	2016	2017	2018
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	9.53	9.82	10.11	10.42

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

**C. PANGAN**

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bogor. Ketersediaan pangan utama Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.59**  
**Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pangan utama	165.72	188.69	231.88	198.36
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2318	2394.6	2482.7	2512.8
		91.1	102.3	105.3	89.4
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	94.62	86.37	87.1	91.53

#### **D. PERTANAHAN**

##### ➤ **Persentase Luas Lahan Bersertifikat**

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

**Tabel 2.60**  
**Persentase Luas Lahan Bersertifikat**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	0.76	0.77	0.80	0.92

*Sumber: Badan Pertanahan Nasional*

Luas lahan bersertifikat di Kota Bogor terhadap jumlah luas wilayah mengalami terus peningkatan yang pada tahun 2015 sebesar 0,76% menjadi 0.92 pada tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 0.16 % dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018.

➤ **PENYELESAIAN KASUS TANAH NEGARA**

Perkembangan penyelesaian kasus tanah Negara di Kota Bogor mengalami peningkatan terhadap kasus yang terdaftar, lengkap terlihat dalam tabel berikut ;

**Tabel 2.61**  
**PENYELESAIAN KASUS TANAH DI KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2015 - 2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	Penyelesaian kasus tanah negara	13	16	24	24

*Sumber; BPKAD Kota Bogor*

➤ **PENYELESAIAN IZIN LOKASI**

Kondisi daerah Kota Bogor terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari penyelesaian permohonan izin lokasi. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui kemudahan investasi sebagai daya tarik investasi dalam mengundang investor. Semakin banyak penyelesaian permohonan izin lokasi menggambarkan semakin mudah dan menarik berinvestasi di suatu daerah. Berikut disajikan data persentase penyelesaian izin lokasi/permohonan di Kota Bogor selama kurun waktu tahun 2015-2017.

**Tabel 2.62****Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Penyelesaian izin lokasi (%)	77	88	33	33

*Sumber: BPKAD Kota Bogor*

Penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Bogor terus menurun dari tahun 2015 sebanyak 7 ijin lokasi dan di tahun 2018 sebanyak 3 lokasi.

**E. LINGKUNGAN HIDUP**➤ **HASIL PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR**

Perhitungan indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan yang terus dilakukan tidak saja oleh Pemerintah Kota Bogor namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara di Kota Bogor kepada masyarakat. Perkembangan Indeks kualitas air dan udara di Kota Bogor seperti terlihat dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.63****Perkembangan Indeks Kualitas Air dan Udara Di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Indeks kualitas air	50	27.33	34.44	49.67
2	Indeks Kualitas Udara	70.56	78.56	85.3	85.86

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor*

➤ **PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI**

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu

masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Adapun persentase penanganan sampah di Kota Bogor tertera pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.64**  
**Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	72.2	74	74.38	75.85

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor*

Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2015 persentase jumlah sampah yang ditangani 72.2 persen, pada tahun 2018 nilainya meningkat menjadi 75.85 persen.

## **F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

### ➤ **Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil**

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK dan Akte Kelahiran. Selama kurun waktu dari tahun 2015 – 2018 rata-ratarasio penduduk ber KTP dan rasio bayi berakte kelahiran mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan selama kurun waktu tahun 2015-2018.

**Tabel 2.65**  
**Rasio Penduduk ber-KTP dan Akte Kelahiran di Kota Bogor**  
**Tahun 2015-2018**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1	Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk	60	60	80	80
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	60	60	80	80

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*

#### **G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor bertujuan untuk memampukan kelurahan dalam melakukan tindakan bersama serbagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, masyarakat kelurahan atau pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya di kelurahan.

Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor dapat di lihat dari Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.66**  
**Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor**  
**Tahun 2015 – 2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rata rata jumlah kelompok binaan PKK	100	100	100	100
2	Persentase LSM Aktif	32	26	30	26
3	PKK aktif	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100

## H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pengendalian penduduk merupakan suatu pola perkembangan penduduk kearah pertumbuhan penduduk yang di inginkan yang ditempuh melalui kebijakan program Keluarga Berencana

### ➤ RATA RATA JUMLAH ANAK PER KELUARGA

Tujuan keluarga berencana adalah untuk menanamkan konsep NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) pada seluruh keluarga. NKKBS adalah salah satu slogan pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar lebih seimbang. Berdasarkan data dari Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana rata rata jumlah anak perkeluarga periode tahun 2015 sampai 2018 di Kota Bogor adalah 2 orang anak . Sedangkan tingkat laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang di rilis oleh Bapan Pusat Statistik sebesar 1,53 artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Perkembangan kesertaan masyarakat dalam program keluarga berencana dapat di lihat dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.67**

**Perkembangan Kesertaan masyarakat dalam program keluarga  
berencana  
Tahun 2015 - 2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Ratio akseptor KB	76.82	76.12	76.94	77.41
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	76.82	76.12	76.94	77.41
3	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	76.82	76.12	76.94	77.14

*Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

## I. PERHUBUNGAN

### ➤ JUMLAH PENUMPANG ANGKUTAN UMUM

Jumlah penumpang umum pada tahun 2015 sampai tahun 2018 menunjukkan data yang fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebagaimana tergambar dalam tabel ini:

**Tabel 2.68**  
**Perkembangan jumlah penumpang angkutan umum Kota Bogor**  
**Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah arus penumpang angkutan	5.135.040	6.395.868	2.521.440	6.920.640

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bogor*

### ➤ RASIO IZIN TRAYEK

Izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang atau pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin trayek yang dikeluarkan selama satu tahun terhadap jumlah penduduk. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Bogor umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

**Tabel 2.69**  
**Perkembangan Rasio Izin Trayek Kota Bogor**  
**Tahun 2015 – 2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Rasio izin Trayek	607	388	193	418

*Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor*

Data rasio izin trayek menunjukkan data yang fluktuatif. Cenderung pengurangan dari tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu dari 607 menjadi 388. Mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 193 tetapi ada kenaikan kembali pada tahun 2018.

➤ **JUMLAH UJI KIR ANGKUTAN UMUM**

Uji Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Uji Kir ini diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang diakibatkan asap kendaraan.

**Tabel 2.70**

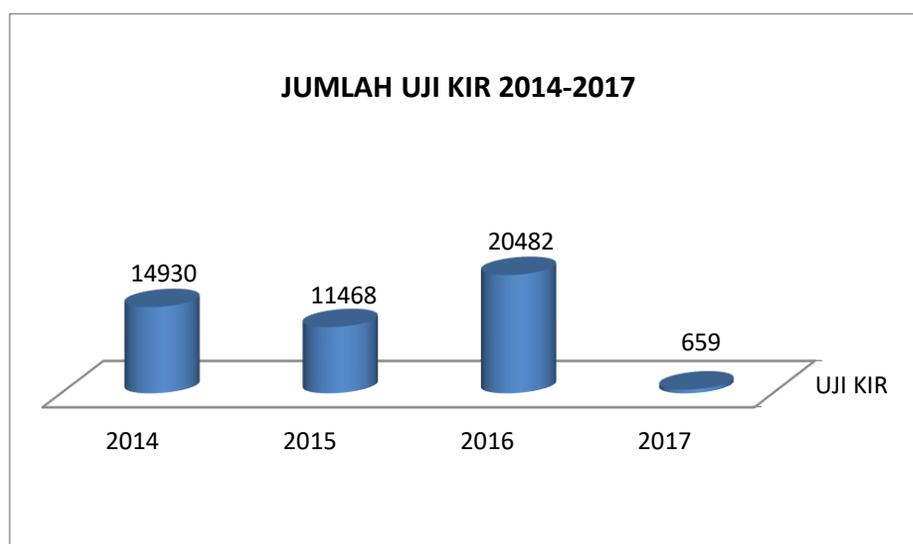
**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Bogor Tahun 2014-2017**

<b>N O</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	MOBIL PENUMPANG UMUM	5.499	4.649	6.732	0
<b>2</b>	MOBIL BUS	214	200	297	54
<b>3</b>	MOBIL BARANG	9.088	6.603	13.429	604
<b>4</b>	KERETA GANDENGAN	46	4	4	0
<b>5</b>	KERETA TEMPELAN	4	2	4	1
<b>6</b>	MOBIL KHUSUS	79	10	16	0
<b>JUMLAH</b>		<b>14.930</b>	<b>11.468</b>	<b>20.482</b>	<b>659</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor (Kota Bogor Dalam Angka 2018)

**Grafik 2.41**

**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Bogor Tahun 2014-2017**



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor (Kota Bogor Dalam Angka 2018)

Ada peningkatan Jumlah angkutan umum yang telah melakukan Uji Kir pada tahun 2016 sebanyak 20.482 unit kendaraan. Jumlah angkutan umum yang melakukan Uji Kir semakin meningkat mengindikasikan

semakin meningkatnya kesadaran para pemilik kendaraan umum terhadap kendaraannya yang berimbas terhadap kenyamanan penumpang angkutan umum.

➤ **Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum**

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang/barang yang terangkut dalam periode 1 (satu) tahun. Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk ke ibukota, kecamatan dan Kabupaten/Kota terdekat meliputi angkutan umum yang tersedia untuk melayani trayek dari desa ke ibukota kecamatan, kabupaten/kota atau kabupaten/kota lain terdekat.

Indikator ini mengukur jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Semakin tinggi jumlah orang yang diangkut, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan fasilitas angkutan umum, dan semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum terdokumentasinya data terkait jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor.

**Tabel 2.71**

**Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum  
di Kota Bogor Tahun 2015-2018**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	7.628.096	63.218.780	5.328.604	4.335.315

*Sumber ; Dinas Pehubungan Kota Bogor*

**J. KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

➤ **Ketersediaan SDM yang mempunyai kemampuan di bidang TIK**

Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan, karena dengan adanya skill para pegawai dan kualitas sumber daya dapat menggerakkan suatu pemerintahan dengan baik dan benar. Di era globalisasi seperti ini peranan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat penting dan berpengaruh salah satunya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dengan berkembang pesatnya dunia teknologi informasi dan komunikasi

sangat membantu dan memudahkan dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pemerintahan . Adanya teknologi informasi dan komunikasi ini juga akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan di dalam manajemen sumber daya manusia yang sebelumnya dilakukan tanpa dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Kesersediaan sumberdaya manusia di bidang TIK di Kota Bogor mulai tahun 2015 minimal 2 orang di setiap perangkat daerah.

## **K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

### ➤ **Persentase Koperasi Aktif**

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

**Tabel 2.72**  
**Perkembangan Koperasi di Kota Bogor Tahun 2014-2018**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Jumlah Koperasi	570	797	814	826	848
2	Jumlah koperasi aktif	353	395	472	498	528
3.	Persentase koperasi aktif (%)	47.06	49.56	57.98	60.2	62.26

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM 2018*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya perkembangan/pertumbuhan jumlah koperasi dan koperasi aktif.

### ➤ **Persentase UKM non BPR/LKM Aktif**

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

**Tabel 2.73**  
**Persentase UKM non BPR/LKM Aktif di Kota Bogor**  
**Tahun 2015-2018**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah UMKM yang produktif	25	25	35	40

*Sumber: Dinas koperasi dan UKM*

#### **L. PENANAMAN MODAL**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Capaian nilai realisasi investasi di Kota Bogor dapat di lihat dari Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.74**  
**Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**  
**Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
1	2014	2.805.642.264.788,-
2	2015	3.104.313.574.444,
3	2016	2.315.438.675.457,-
4	2017	2.947.851.998.320,-.
5	2018	3.103.415.375.522.83,-

*Sumber: DPMPTSP*

Tahun 2018 realisasi Investasi Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibanding Tahun 2017. realisasi investasi Kota Bogor tahun 2017 mengalami peningkatan 27% dari Tahun 2016, nilai

investasi Kota Bogor terbesar dalam kurun waktu 2014-2018 adalah tahun 2015 yang mencapai nilai 3.104.313.574.444,-.

#### **M. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Urusan kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berprestasi yaitu dengan memberikan pembinaan dan insentif dalam meningkatkan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.

Data Dinas Pemuda dan olah raga Kota Bogor persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Bogor mencapai 68% selama rentang tahun 2014 – 2018. Sedangkan jumlah cabang olah raga yang di bina sebanyak 42 cabang dengan cakupan pelatih yang bersertifikasi dan hasil pembinaan seperti dalam Tabel di bawah ini..

**Tabel 2.75**  
**Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bogor**  
**Tahun 2014-2018**

No	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)		68	68	68	68

*Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bogor 2018*

#### **N. KEBUDAYAAN**

Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya berwujud abstrak. Urusan kebudayaan ini bertujuan untuk menjadikan warisan budaya sebagai aset kota dan Sasaran urusan tersebut adalah

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya;
- b. Terpeliharanya kelestarian warisan budaya;
- c. Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya.

Indikator kebudayaan di Kota Bogor dapat dilihat tabel di bawah ini :

**Tabel 2.76****Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	53	75	63	32
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	0	14	14	14	14

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2018*

Penyelenggaraan festival seni dan budaya perkembangannya fluktuatif, meningkatnay kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya menggambarkan semakin besar sektor pariwisata berkembang di Kota Bogor.

**O. PERPUSTAKAAN**

Perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar cakrawala dalam kegiatan belajar mengajar.yang bisa meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Perkembangan perpustakaan di Kota Bogor dapat di lihat dari Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.77****Perkembangan Perpustakaan di Kota Bogor  
Tahun 2014 - 2015**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	37,000	49	45,011	74,623	25,421
2	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	44,320	47,620	44	13	68
3	rasio perpustakaan persatuan penduduk	11	11	11	11	11
4	Jumlah rata rata pengunjung perpustakaan/tahun	37,000	49,039	45,011	45,489	25,421
5	jumlah koleksi judul buku perpustakaan	44,320	32,000	34,438	35,397	37,017
6	Jumlah perpustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	4	4	4	4	4

*Sumber ; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor*

Jumlah pengunjung perpustakaan selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 fluktuatif, pada tahun 2017 terjadi jumlah pengunjung tertinggi yaitu 74.623 pengunjung, dan jumlah pengunjung terendah terjadi di tahun 2018 yaitu 25 421.

Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 37.017. Sedangkan rasio perpustakaan persatuan penduduk selama 5 tahun yaitu 11 perpustakaan per 1000 penduduk. Yang di kelola oleh perpustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat sebanyak 4 orang.

#### **P. KEARSIPAN**

Tujuan dari kearsipan adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman, agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan serta untuk menghindari pemborosan waktu dalam mencari arsip yang dibutuhkan disamping untuk menghemat tempat penyimpanan, menjaga kerahasiaan dan kelestarian arsip.

Menurut fungsi dan kegunaannya, arsip dapat dibedakan menjadi:

- (a) Arsip dinamis, yakni arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran.
  - ✓ Arsip dinamis aktif: Arsip ini berada dan berfungsi di unit pengolah yang pada umumnya memiliki nilai simpan satu sampai dengan dua tahun atau sesuai dengan jadwal retensi yang berlaku.
  - ✓ Arsip dinamis inaktif: Arsip ini berada pada fase ketiga yang oleh unit pengolah dirasakan atau dinilai sudah kurang atau jarang/tidak diperlukan lagi dalam menunjang proses administrasi sehari-hari, walaupun mungkin masih diperlukan tetapi frekuensinya sangat rendah.
- (b) Arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.

**Tabel 2.78**

**Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bogor Tahun 2014-2018**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	13	28	48	68
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	100	106	106	117

*Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor 2018*

Dari tabel di atas telah terjadi peningkatan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku yang pada tahun 2015 hanya 13 perangkat daerah menjadi 68 perangkat daerah di tahun 2018. Terjadi pula peningkatan dalam kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu menjadi 117 pada tahun 2018.

### **2.4.3. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN**

#### **A. PARIWISATA**

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor pada tahun 2015 sebanyak 3.799.841 orang wisatawan terdiri dari wisatawan nusantara 3.597.733 dan wisatawan mancanegara 202.108. Kota Bogor yang dalam sejarahnya pernah menjadi kota penting di mata dunia memiliki banyak sekali peninggalan sejarah dan kebudayaan, namun demikian berbagai potensi ini belum dikembangkan secara maksimal sebagai destinasi wisata di Kota Bogor. Data sekunder yang tersedia, hanya menyebutkan 14 objek wisata di Kota Bogor termasuk Kebun Raya Bogor yang merupakan ikon legendaris.

Sebagai kota yang memiliki identitas serta karakter yang kuat, Kota Bogor seyogyanya dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata baru tidak harus dilakukan dengan membuat wahana wisata baru, melainkan mengembangkan potensi yang telah dimiliki agar memiliki nilai tambah. Hal ini sekaligus dapat disinambungkan dengan upaya pelestarian dan pengembalian ruh dari peninggalan sejarah.

Tabel 2.79

## Daftar Obyek Wisata, Alamat dan Daya Tarik Wisata di Kota Bogor

<b>OBYEK WISATA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JENIS OBYEK</b>	<b>LUAS WILAYAH</b>
<b>Kebun Raya Bogor</b>	Jl. Ir. H. Juanda	Alam, Ilmiah, dan Budaya	87 Ha
<b>Istana Kepresidenan Bogor</b>	Jl. Ir. H. Juanda No. 1	Sejarah dan Budaya	28,8 Ha
<b>Prasasti Batu Tulis</b>	Jl. Batutulis No. 54	Sejarah	21,34 m <sup>2</sup>
<b>Plaza Kapten Muslihat</b>	Jl. Kapten Muslihat No. 51	Taman Rekreasi	17.690 m <sup>2</sup>
<b>Museum Zoologi Bogor</b>	Jl. Ir. H. Juanda No. 9	Ilmiah dan Budaya	1500 m <sup>2</sup>
<b>Museum Etnobotani</b>	Jl. Ir. H. Juanda No, 22-24	Ilmiah	1600 m <sup>2</sup>
<b>Museum Perjuangan Bogor</b>	Jl. Merdeka No 56	Sejarah dan Budaya	650 m <sup>2</sup>
<b>Rancamaya Country Golf</b>	Jl. Rancamaya Utama Ciawi Bogor	Taman Rekreasi	400 Ha
<b>Museum dan Monumen PETA</b>	Jl. Jend Sudirman No. 35	Sejarah dan Budaya	9.400 m <sup>2</sup>
<b>Tanaman Obat</b>	Jl. Tentara Pelajar No. 3	Ilmiah	1 Ha
<b>Museum Tanah</b>	Jl. Ir. H Juanda	Ilmiah	30 m <sup>2</sup>
<b>Danau Wisata Situ Gede</b>	Jl. Tambakan No. 1	Taman Rekreasi dan Alam	6 Ha
<b>Country Club Cimanggu</b>	Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 1	Rekreasi	3,7 Ha
<b>The Jungle</b>	Bogor Nirwana Residence	Rekreasi	3 Ha

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018

Potensi yang telah dimiliki dan salah satu warisan budaya yang paling dikenal adalah Kebun Raya Bogor. Sebagai salah satu kebun raya yang mengoleksi tumbuhan tropis terbesar di dunia, Kebun Raya Bogor menjadi semakin disadari pentingnya baik ditinjau dari kepentingan ekologi maupun ekonomi. Namun demikian, lokasi ini tidak luput dari ancaman pencemaran udara dari lingkungan sekitarnya. Sebagai jalur lalu lintas yang semakin padat, ruas-ruas jalan di sekitar Kebun Raya Bogor menjadi tempat emisi pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor baik berupa gas maupun partikel. Kepadatan kendaraan di sekitar Kebun Raya Bogor sangat berpengaruh terhadap kondisi pohon.

Selain kepadatan kendaraan, pemanfaatan ruang di sekitar Kebun Raya Bogor semakin mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya lahan terbangun. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bangunan-bangunan yaitu pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan berbagai sentra lainnya. Bahkan untuk Kecamatan Bogor Tengah dimana Kebun Raya Bogor berada, terdapat 11 hotel berbintang dari jumlah total 13 hotel berbintang di Kota Bogor<sup>1</sup>.

**grafik 2.42**

**perkembangan kunjungan Wisatawan ke kota Bogor 2015 - 2018**



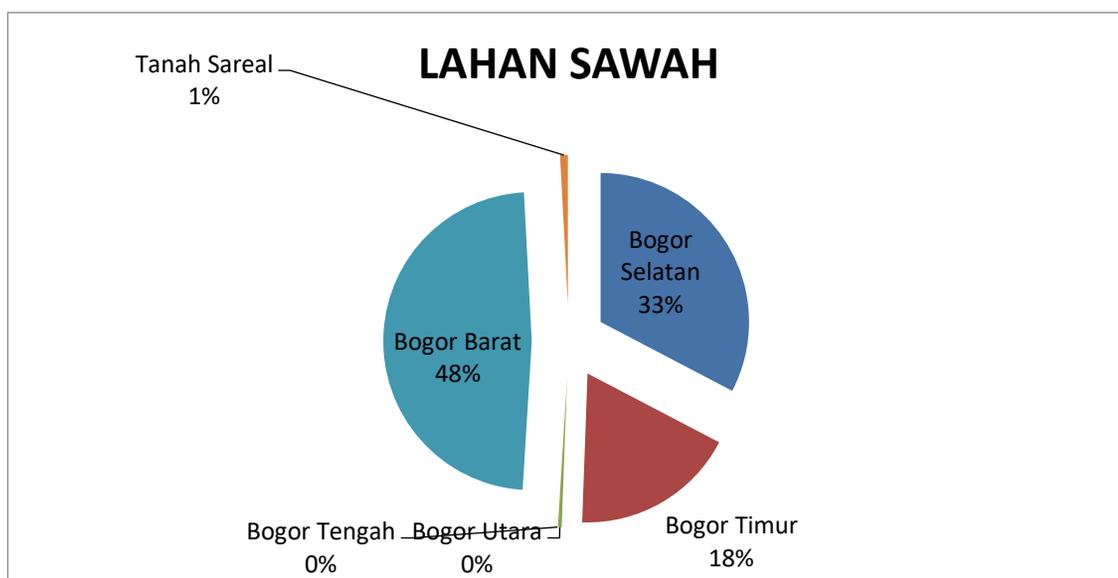
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2018

**B. PERTANIAN**

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Bogor semakin tinggi. Alih fungsi lahan ini tentu berimplikasi kepada produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya tergantung pada lahannya. Lahan pertanian (sawah) di Kota Bogor hingga saat ini tercatat hanya 321 hektar. Sebaran per Kecamatan dapat terlihat dalam grafik di bawah ini :

**Grafik 2.43**

**Sebaran Lahan Sawah di Kota Per Kecamatan**



*Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018*

Kecamatan yang masih mempunyai lahan sawah terletak di Kecamatan Bogor Barat seluas 155 hektar, Kecamatan Bogor Selatan seluas 105 ha , Kecamatan Bogor Timur 57 hektar dan 3 hektar di Kecamatan Tanah Sareal serta 1 hektar di Kecamatan Bogor Utara.

Dalam rangka mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian pangan ini, pada tahun 2009 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang didalamnya menjelaskan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. LP2B dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau pada UU Nomor 41/2009 pasal 23 dengan tegas disebutkan bahwa penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan untuk di Tingkat Provinsi diatur dalam Perda mengenai tata ruang wilayah provinsi serta di kabupaten/kota diatur dalam Perda tata ruang wilayah kabupaten/kota. Demikian juga halnya apabila suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengendalian LP2B langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah antara lain: pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan.

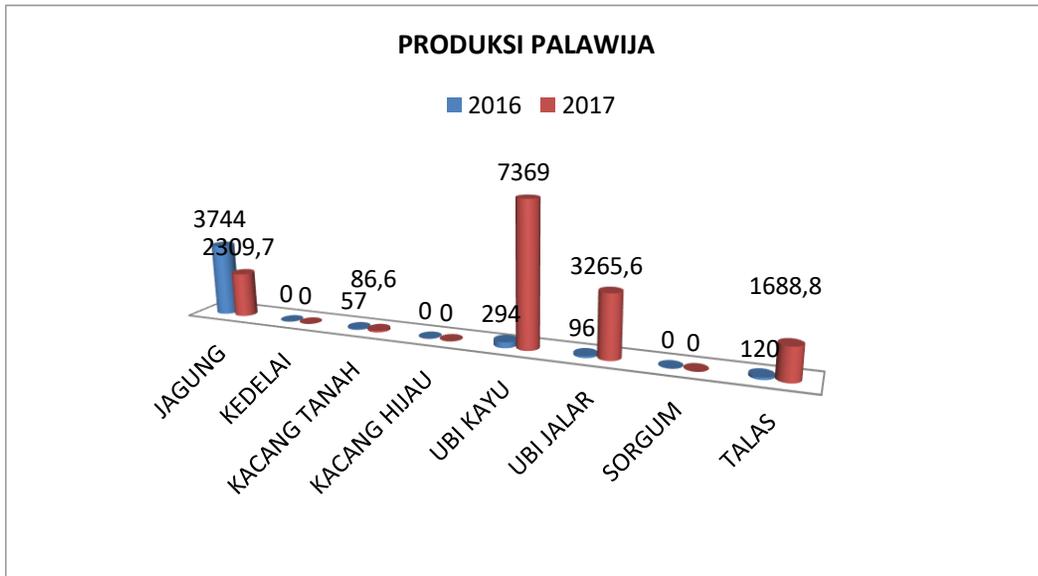
Pemberian insentif diberikan dengan mempertimbangkan: jenis lahan, kesuburan tanah, luas kondisi irigasi, produktivitas usaha tani, lokasi dan lain-lain. Pemberian insentif dapat dilakukan dengan cara:

1. Keringanan PBB
2. Pengembangan infrastruktur pertanian
3. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
4. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi
5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
6. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian tanaman pangan
7. Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Realisasi panen tanaman paditahun 2015 di lahan seluas 604 hektar, dengan jumlah produksi padi sebesar 3.926 ton Gabah Kering Panen (GKP). diperoleh produktivitas padi per tahun rata-rata mencapai 6,5 ton per hektar. Apabila dikonversi ke komoditi pangan beras, maka beras yang dihasilkan Kota Bogor selama tahun 2015 adalah 2198,56 ton beras (konversi dari Padi GKP ke beras = 56%).

Kebutuhan beras per kapita per tahun sebanyak 120 kg per jiwa per tahun, maka dengan jumlah penduduk sebanyak 1.047.922 jiwa, Kota Bogor membutuhkan beras sebanyak 125.750.640 ton per tahun. Berdasarkan data hasil produksi beras lokal Kota Bogor yang berjumlah 2198,56 ton beras, maka kontribusi produksi beras lokal Kota Bogor pada tahun 2015 sebesar 1,74 persen. Hasil produksi palawija, sayuran dan buah buahan dapat tergambar dalam grafik berikut.

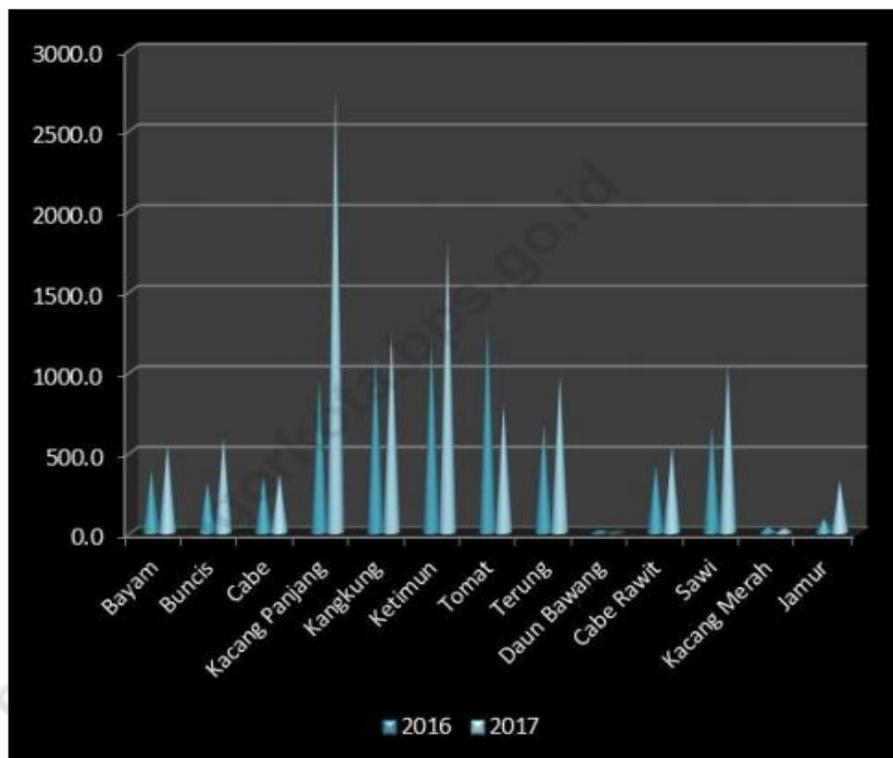
**Grafik 2.44**



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

**Grafik 2.45**

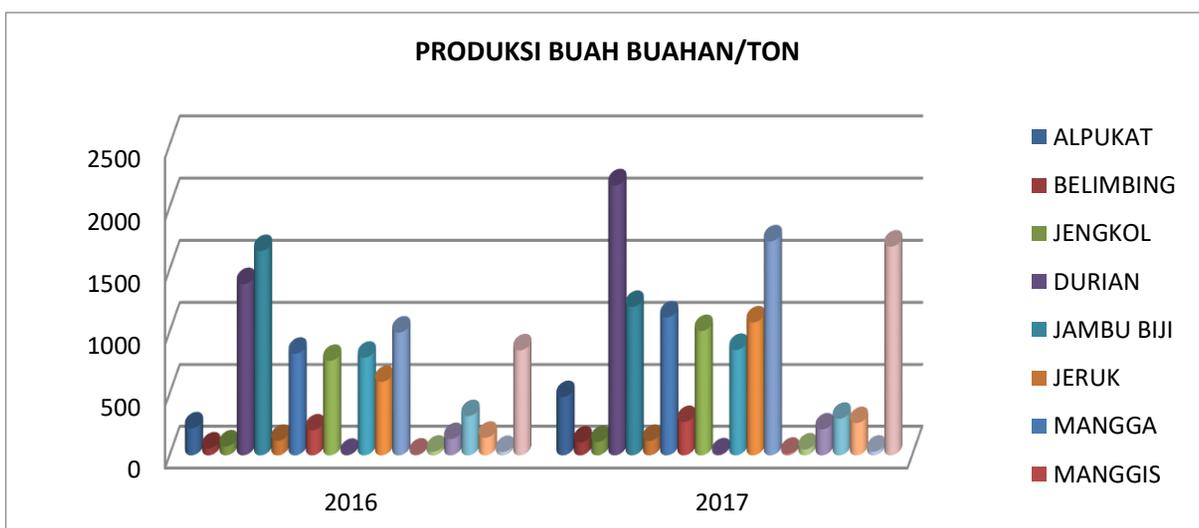
**Produksi Sayuran di Kota Bogor Tahun 2016-2017**



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

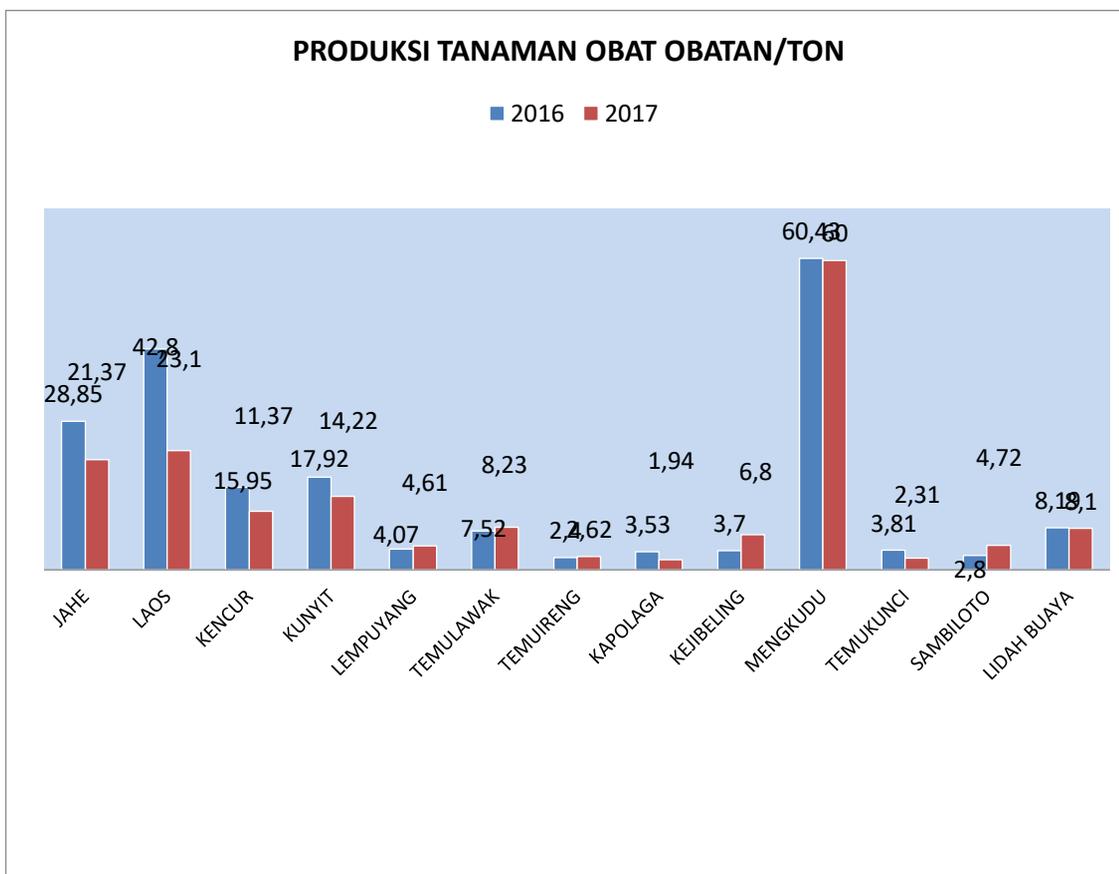
**Grafik 2.46**

**Produksi Buah-buahan Per Ton di Kota Bogor**



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

**Grafik 2.47**



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

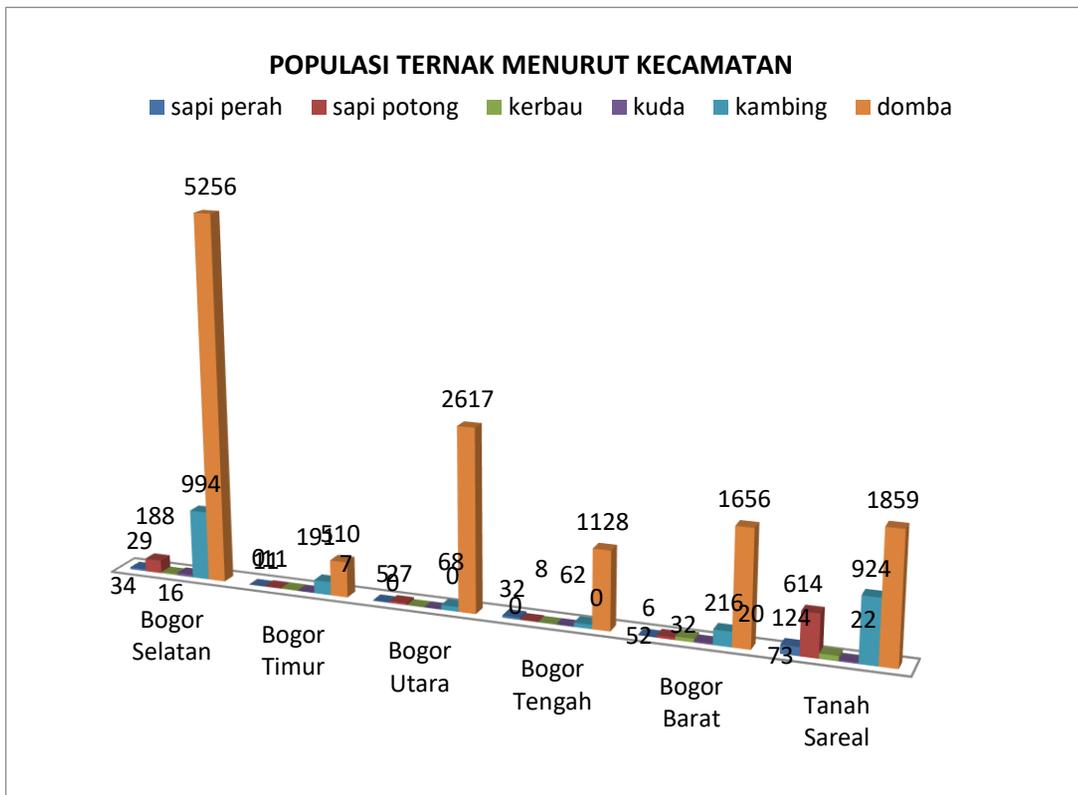
**C. PETERNAKAN**

Pada bidang peternakan, tercatat populasi hewan ternak besar terdiri dari 837 ekor sapi perah, 183 ekor sapi potong dan 153 ekor kerbau. Ternak kecil terdiri dari 11.463 ekor domba dan 2.311 ekor

kambing, sedangkan untuk ternak unggas terdiri dari 207.414 ekor ayam ras pedaging, 115.338 ekor ayam kampung dan 5.313 ekor itik.

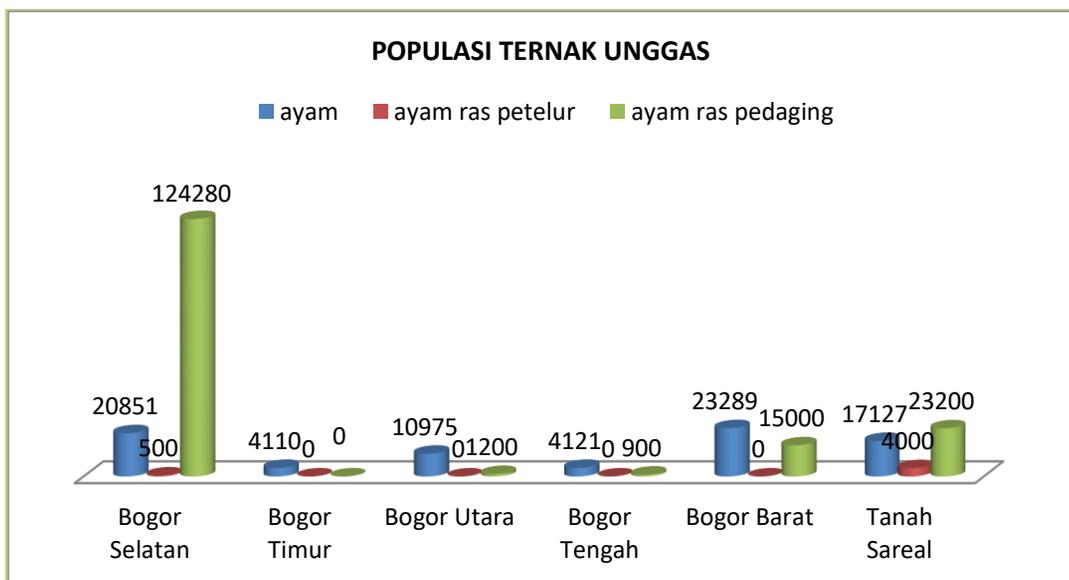
Untuk melihat sebaran populasi ternak dan populasi unggas per kecamatan dapat di lihat pada grafik

**Grafik 2.48**



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

**Grafik 2.49**



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

#### D. PERIKANAN

Produksi ikan di Kota Bogor tahun 2016 menurut tempat penangkapan/pemeliharaan sebagian besar berasal dari budi daya ikan kolam dengan total produksi sebesar 31,7 ton dan luasan kolam sebesar 264,04 hektar. Kecamatan Bogor selatan merupakan kecamatan penyumbang terbesar terhadap produksi ikan perairan umum, Sedangkan Bogor Barat penyumbang produksi ikan terbesar ikan kolam. Produksi ikan sawah, keramba dan kolam air deras masih perlu di upayakan kembali agar dapat menghasilkan produksi ikan.

Tabel 2.80

Luas Areal dan Jumlah Produksi Ikan Menurut Tempat Penangkapan/Pemeliharaan per Kecamatan

KECAMATAN	PERAIRAN UMUM		KOLAM		SAWAH		KERAMBA		KOLAM AIR DERAS	
	LUAS (HA)	PROD (TON)	LUAS (HA)	PROD (TON)	LUAS (HA)	PROD (TON)	LUAS (HA)	PROD (TON)	LUAS (HA)	PROD (TON)
Bogor Selatan	*	8	29	9	360	0	2,7	0.1	0	0
Bogor Timur	*	0.2	37	3.5	320	0	3,4	0	66.420	0
Bogor Utara	*	0,1	45	4.4	0	0	4,4	0	0	0
Bogor Tengah	*	0,15	5	2.8	0	0	0,5	0	0	0
Bogor Barat	*	1.09	26.40	7.4	156	0	2,4	0.1	0	0
Tanah Sareal	*	0.1	121.440	4.6	264	0	0	0	0	0
Jumlah	<b>0</b>	<b>9.56</b>	<b>264.04</b>	<b>31.7</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>13.4</b>	<b>0.2</b>	<b>66.420</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bogor

#### E. ENERGI

Sumber energi gas semakin diminati masyarakat Kota Bogor. Peningkatan pelanggan gas di tahun 2014 mencapai 17.308 pelanggan menjadi 19.720 pada tahun 2015 dan sebesar 97,45 % merupakan pelanggan rumah tangga. Pemanfaatan gas di kalangan pelanggan industry ada penurunan dari 420,46 juta kubik di tahun 2014 menjadi 364,70 juta kubik pada tahun 2015 Sedangkan pada kategori komersil meningkat dari 11,98 juta kubik tahun 2014 menjadi 2,10 juta kubik pada tahun 2016. . Penggunaan gas di kalangan industri meningkat 2,46 persen dari 435,7 juta kubik tahun 2011 menjadi 446,4 juta kubik tahun 2012. Sedangkan penggunaan di kalangan pelanggan komersil meningkat sekitar 4,11 persen dari 2.139.922 kubik tahun 2011 menjadi 2.227.820 kubik tahun 2012. Hal ini menyebabkan volume gas yang terjual juga meningkat 2,41 persen dibanding tahun 2011 dengan rata-rata volume gas terjual per bulan sekitar 37,7 juta kubik.

Tabel 2.81

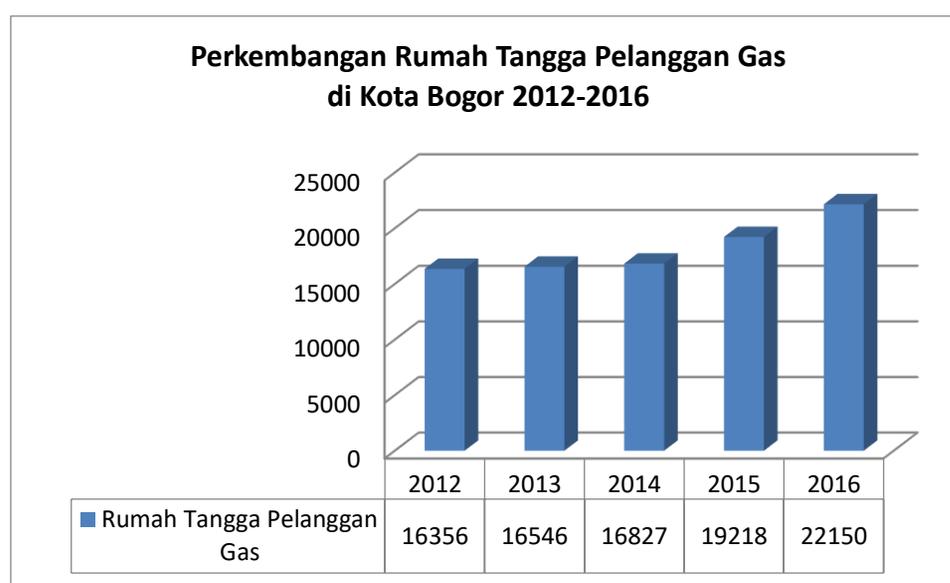
**Banyaknya Pelanggan Listrik dan Daya Tersambung Menurut Kawasan/Rayon**

NO	KECAMATAN	JUMLAH LANGGANAN	DAYA TERSAMBUNG
1	Cipayung	183.078	216.111.060
2	Bogor Timur	186.928	297.693.090
3	Bogor Kota	254.211	324.090.090
4	Bogor Barat	172.883	204.942.029
5	Leuwiliang	212.770	153.163.380
6	Jasinga	138.811	102.643.130
7	Pakuan	445	848.605.000
	<b>Jumlah</b>	1.149.126	2.147.247.779

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2018 (PLN Cabang Bogor)

Grafik di bawah ini menggambarkan perkembangan rumah tangga pelanggan gas di Kota Bogor tahun 2012 – 2015

**Grafik 2.50**



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

**F. SUMBER DAYA AIR**

Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2011, sumber air minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor berasal dari dua sumber utama, yaitu :

a) Mata Air

- ▶ Mata Air Kota Batu dengan kapasitas terpasang 70 Lt/detik
- ▶ Mata Air Bantar Kambing dengan kapasitas terpasang 170 Lt/detik
- ▶ Mata Air Tangkil dengan kapasitas terpasang 170 Lt/detik
- ▶ Mata Air Palasari dengan kapasitas terpasang 30 Lt/detik.

b) Air Permukaan

- ▶ WTP Cipaku dengan kapasitas terpasang 300 Lt/detik

- ▶ WTP I Dekeng dengan kapasitas terpasang 1.150 Lt/detik
- ▶ WTP II Dekeng dengan kapasitas terpasang 400 Lt/detik
- ▶ WTP Palasari dengan kapasitas terpasang 20 Lt/detik

Dari berbagai sumber mata air yang ada, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor mampu mengalirkan pelayanan air minumnya melalui zona zona ;

1. Mata Air Kota Batu melayani Zona 6 (Kelurahan Cikaret, Ciomas, Ciomas Rahayu, Gunung Batu, Kota Batu, Loji, Mekar Jaya, Mulya Harja, Parakan, Pasir Jaya, Pasir Mulya, Pasir Kuda dan Sirna Galih, Balumbang Jaya, Sindang Barang, NN Tajur Halang)
2. Mata Air Tangkil melayani pelanggan di zona 1 (Kelurahan Tajur, Katulampa, Lawang Gintung, Pakuan, Muara Sari, Sindang Rasa, Sindang Sari, Harjasari, Rancamaya dan Kertamaya)
3. Mata Air Bantar Kambing melayani zona 2 (Kelurahan Cipaku dan Genteng) dan membantu untuk melayani zona 3 dan Zona 1
4. WTP Dekeng I dan WTP Dekeng II melayani zona 4 (Mekar Wangi, Cibadak, Kencana, Cimahpar, Cibuluh, Tegal Gundil, Kebon Pedes, Tegal Lega, Panaragan, Sempur, Bantarjati, Kebon Kalapa, Babakan, Cibogor, Ciluar, Tanah Baru, Sukaraja, Ciwaringin, Pabaton, Tanah Sareal, Menteng, Kedung Waringin, Kedung Jaya, Curug Semplak, Kedung Halang, Kedung Badak, Cilendek Timur, Cilendek Barat, Sukaresmi, Ciparigi, Sukadamai, Kayumanis dan Margajaya)
5. WTP Cipaku melayani pelanggan zona 3 (Kelurahan Baranangsiang, Sukasari, Batutulis, Babakan Pasar, Gudang, Paledang, Bondongan, Empang, Pasir Jaya dan Bojongkerta, Tanah Baru)
6. Mata Air dan WTP Palasari melayani wilayah zona 5 (Kelurahan Pamoyanan, Ranggamekar dan Palasari)

Sumber air baku yang masih bisa diandalkan untuk penambahan kapasitas produksi adalah sungai Cisadane. Ketersediaan air sungai sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air yang dihasilkan PDAM Tirta Pakuan. Di Kota Bogor sendiri, terdapat sungai seluas 124,59 hektar dan sempadan sungai seluas 181,79 hektar.

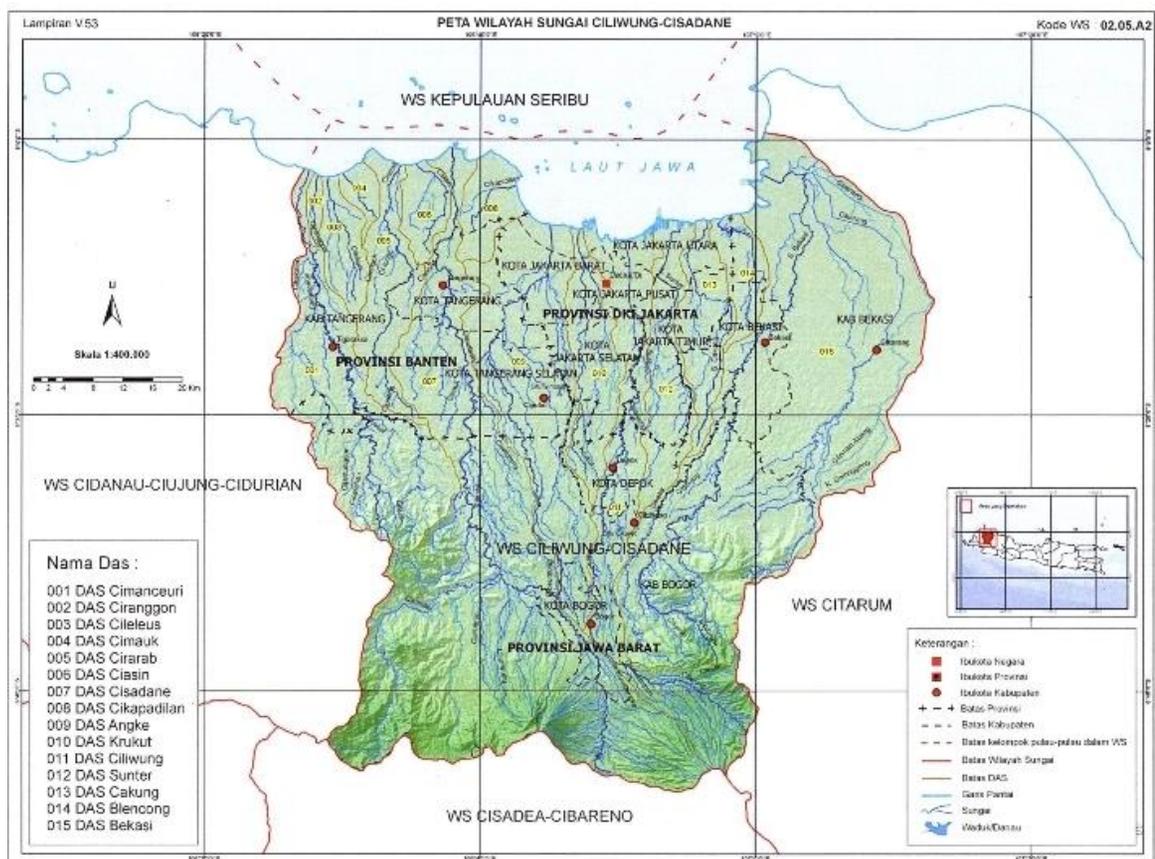
Daerah pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor adalah wilayah Kota Bogor yang telah mengalami perluasan wilayah pada tahun 1995 sehingga tanggung jawab PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor semakin bertambah, dengan adanya perluasan wilayah Kota Bogor ada wilayah Kota Bogor yang dilayani oleh PDAM Kabupaten Bogor, sampai saat ini mencapai 14.314 SL atau 78.727 jiwa.

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah menjangkau enam wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur,

Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Tengah, dan kecamatan Bogor Utara. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor saat ini telah memiliki Jumlah pelanggan sebanyak 118.424 sambungan yang tersebar pada enam wilayah kecamatan terdiri dari kelompok Sosial, Kelompok Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Perniagaan dan Industri. Untuk peta wilayah sungai Ciliwung-Cisadane telah tersaji pada gambar berikut:

**Gambar 2.4**

**Peta Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane**



**Keterangan:**

1.	Kode Wilayah	·	02.05.A2
2.	Status	·	WS Lintas Propinsi
3.	Status	·	Pemerintah Pusat
4.	Propinsi	·	Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten
5.	Kabupaten	:	Kabupaten Tangerang , Kota Tangerang , Kota Tangerang Selatan , Kabupaten Bekasi , Kabupaten Bogor , Kota Bekasi , Kota Bogor , Kota Depok , Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan
6.	DAS	:	Das Cimanceuri, Das Ciranggon, Das Cileleus, Das Cimauk, Das Cirarab, Das Ciasin, Das Cisadane, Das Cikapadilan, Das Angke, Das Krukut, Das Ciliwung, Das

			Sunter, Das Cakung, Das Blencong, Das Bekasi
7.	DAS Terbesar	.	DAS Cisadane
8.	Luas DAS	.	-
9.	Luas Wilayah	.	5.293,01 km <sup>2</sup>

**Tabel 2.82**

**Perkembangan air terjual (juta m3)**

Bulan <i>Month</i>	Pelanggan <i>Customers</i>	Air Minum yang Disalurkan <i>Drinking Water Distributed</i>	Nilai Air yang Terjual (Rp) <i>Sold Water Value (Rp)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	147 298	3 370 263	15 097 590 000
Februari/February	147 391	3 171 438	15 007 283 200
Maret/March	147 233	2 855 164	13 490 085 900
April	147 176	3 170 674	14 880 459 400
Mei/Mey	148 158	3 096 232	13 479 045 900
Juni/June	148 337	3 238 339	15 078 455 400
Juli/July	151 237	3 229 148	14 939 979 300
Agustus/August	152 078	3 215 830	14 973 485 100
September	152 527	3 469 182	16 686 295 800
Oktober/October	152 910	3 335 778	15 736 758 400
November	153 354	3 240 788	15 273 738 500
Desember/December	154 132	3 138 470	14 673 027 200
<b>Jumlah/Total</b>			
	2017	38 531 306	179 316 204 100
	2016	38 153 871	178 268 927 292
	2015	37 238 542	173 861 195 100
	2014	34 761 638	163 320 421 600
	2013	32 891 056	156 578 709 500

Sumber : PDAM "Tirta Pakuan" Kota Bogor  
Source : Regional Water Company "Tirta Pakuan" City of Bogor

**G. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Indikator hasil penanganan urusan industri dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah industri kecil dan menengah serta jumlah industri yang sudah memanfaatkan teknologi tepat guna. Capaian untuk tahun 2013 dibandingkan dengan target terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.83****Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018**

NO	INDIKATOR KERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018
1	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (kumulatif)	Unit	1.000	1.000
2	Jumlah Industri yang menerapkan Teknologi	Unit	5	5

*Sumber: Disperindag Kota Bogor 2018*

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah berdasarkan jumlah unit usaha mengalami peningkatan 5,47 persen yaitu bertambah sebanyak 195 unit usaha dari 3.562 unit usaha pada tahun 2013 menjadi 3.757 unit usaha pada tahun 2013.

Penambahan unit usaha industri tersebut diantaranya pada bidang industri makanan sebanyak 170 unit usaha, bidang industri minuman sebanyak enam unit usaha, bidang industri kayu olahan dan rotan sebanyak tiga unit usaha, bidang industri kertas sebanyak empat unit usaha, bidang industri bahan galian non logam sebanyak satu unit usaha, bidang industri kimia sebanyak lima unit usaha, bidang industri logam sebanyak empat unit usaha, bidang industri kulit sebanyak dua unit usaha.

Selain dari segi jumlah unit usaha, pertumbuhan industri di Kota Bogor juga dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap serta besar investasi pada sektor industri seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.84****Tenaga Kerja dan Investasi Industri Tahun 2012 – 2013**

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	PENINGKATAN (%)
1	Tenaga Kerja	Orang	57.790	58.166	0,66
2	Investasi	Rp.	746.591.054.659,-	753.468.545.912,-	1,00

*Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2018*

Pada tahun 2013 terdapat penambahan jumlah tenaga kerja pada sektor industri yaitu sebanyak 376 orang, yang terdiri dari 105 orang pada industri Menengah/besar, 149 orang pada industri kecil formal dan 122 orang pada industri kecil non formal. Selain itu terdapat peningkatan investasi industri sebesar 6.877.491.253 rupiah yang terdiri dari 5.853.409.630 rupiah pada industri menengah/besar, 896.081.623 rupiah pada industri kecil formal dan 128.000.000 rupiah pada industri

kecil non formal. Perusahaan perdagangan di Kota Bogor dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dari segi kuantitas, Usaha Perdagangan Kecil sampai dengan tahun 2012 masih mendominasi sektor perdagangan Kota Bogor. Pada tahun 2012, banyaknya perusahaan perdagangan kecil mencapai 8.216 pengusaha (83,02 %).

Pada 2015 perusahaan yang terdaftar sebanyak 748 perusahaan. Perusahaan terbanyak yang mendaftar adalah perusahaan terbatas yaitu sebanyak 301 (40,24 %) Secara rinci tertera dalam tabel berikut :

**Tabel 2.85**

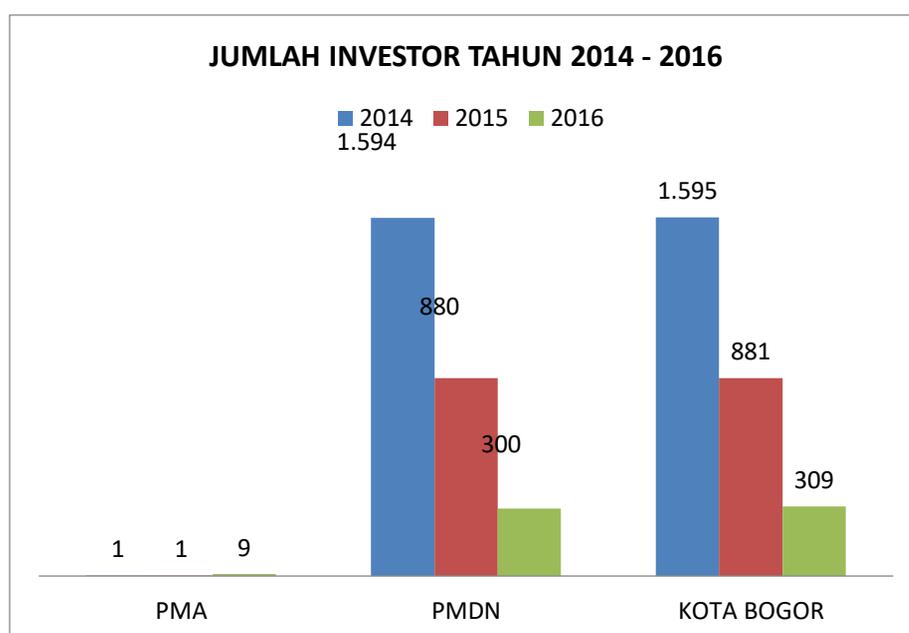
**Jumlah Perusahaan Perdagangan dan Nilai Investasi**

JENIS PERUSAHAAN PERDAGANGAN	NILAI INVESTASI (JUTA)	JUMLAH PERUSAHAAN			
		2013	2014	2015	2016
Perusahaan Perdagangan					
Perusahaan Besar	➤ Rp. 5.000,-	8	15	10	11
Perusahaan Menengah	Rp. 500,- s/d Rp.	113	131	146	87
Perusahaan Kecil	Rp. 50 s/d Rp.	377	369	376	371
Perusahaan Mikro	<Rp. 50,-	305	231	216	185
Perusahaan Perdagangan	-	-	-	-	-
Jumlah		803	746	748	654

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2018

Kota Bogor mempunyai jumlah investor berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini :

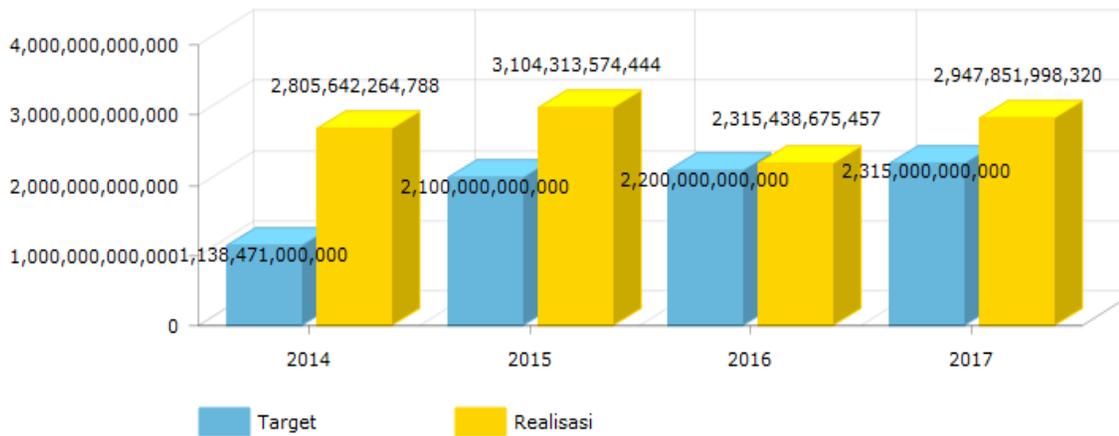
**Grafik 2.51**



Untuk realisasinya tergambar dalam grafik :

**Grafik 2.52**

**REALISASI INVESTASI**



Sumber : DPMPTSP Kota Bogor, 2018 (<https://perizinan.kotabogor.go.id/>)

Jumlah PMDN jauh lebih besar dibandingkan PMA. Banyaknya jumlah investor PMDN maupun PMA berpengaruh baik terhadap jumlah investasi di Kota Bogor.

**Tabel 2.86**

**Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan 2011-2016**

PERINCIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Perusahaan Terbatas</b>	346	213	283	70	301	286
<b>Perusahaan Komanditer (CV)</b>	432	458	312	39	241	110
<b>Perusahaan Perorangan</b>	580	605	243	35	184	227
<b>Koperasi</b>	6	11	12	1	22	31
<b>Badan Usaha Lain</b>	2	1	2	0	0	0
<b>Jumlah</b>	1336	1288	852	145	748	654

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2018

Layanan AMDAL diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Data layanan Amdal, UKL-UPL dan SPPL dari tahun 2014 s.d. 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.87

## Data Amdal Tahun 2014-2016

No	Jenis Kegiatan dan/atau Usaha	Alamat Kegiatan	Rekomendasi		ADENDUM	Keterangan
			KA-ANDAL	AMDAL		
1	Pembangunan Toko Swalayan Yogya	Jl. Pahlawan Revolusi Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duret Sawit Jakarta Timur	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/1469 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/216-BPLH Tahun 2014 Tanggal 28 Februari 2014		Beroperasi
2.	Pembangunan Revitalisasi Bale Binarum	Jl. Pajajaran No. 25 RT. 01/05 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/327 Tahun 2014 Tanggal 1 April 2014	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45573BPLH Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014		Belum beroperasi
3.	Pembangunan Bogor Green Forest	Jl. RE. Soemantadiredja Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/828 Tahun 2013 Tanggal 26 Juni 2013	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/350 Tahun 2014 Tanggal 15 April 2014		Beroperasi
4.	Pengembangan Pasar Kebon Kembang Blok CD	Jl. Dewu Sartika Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/81-BPLH Tahun 2014-08-11 Tanggal 28 Januari 2014	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/640-BPLH Tahun 2014 Tanggal 16 Juni 2014		Beroperasi
5	Pembangunan Apartemen Botanical Residence	Kampung Babakan fakultas RT. 001/004 Kel. Tegallega Kecamatan Bogor Tengah	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45-624 Tahun 2014 tanggal 16 Juni 2014	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/866 Tahun 2014 Tanggal 5 September 2014		Konstruksi
6	Pembangunan Hotel, Mall, dan Apartemen	Jl. KS. Tubun Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45-625Tahun 2014 tanggal 21 April 2014	660.1.45/866-BPLH Tahun 2014 Tanggal 1 September 2014		Beroperasi
7.	Universitas Pakuan	Jl. Pakuan No. 1 dan Jalan Babakan Fakultas Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah	-	660.1.45/1342-BPLH Tahun 2014 17 Desember 2014		Beroperasi
	Pengembangan Kampus Terpadu Universitas Pakuan	Jl. Pakuan Nomor 1 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45-370-BPLH Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/610-BPLH Tahun 2015 tanggal 8 Mei 2015		Beroperasi
8.	Pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Apartemen El Centro	Kp. Pangkalan RT.02/01 Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/727-BPLH Tahun 2015 tanggal 29 Mei 2015	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/867-BPLH Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015		Beroperasi

9.	Kegiatan Pembangunan Pengembangan Depo Bangunan	Jl. Soleh Iskandar RT.001/001 Kelurahan Kedung Badak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/867-BPLH Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015	660.1.45/989-BPLH Tahun 2016		Beroperasi
10	Kegiatan Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Baranangsiang	Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah	-	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/958-BPLH tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015	DELH	Beroperasi
11	Perubahan Fungsi Bangunan dari Plaza menjadi Mall dan Rumah Sakit	Jl. Pajajaran RT.001/004 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/1471-BPLH Tahun 2015 tanggal 13 November 2015	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/1662-BPLH Tahun 2015 tanggal 15 Desember 2015		Beroperasi untuk kegiatan Mall, Rumah Sakit saat ini belum beroperasi
12	Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cipaku	Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan	-	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1/1694-BPLH Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015	DELH	Beroperasi
13	Pembangunan Gedung RSUD Kota Bogor	Jl. DR. Sumeru No. 120 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat	Keputusan Kepala BPLH Nomor 660.1.45/1686-BPLH Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/1728-BPLH Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015		Belum beroperasi
14	Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen	Jl. Mayor Oking Jaya Atmaja RT.04/06 Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/425-BPLH Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/885-BPLH Tahun 2016		Belum beroperasi
15	Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Salak Tower / Hotel SBTH	Jl. Salak No. 38 dan 40 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/599-BPLH Tahun 2016 tanggal 27 April 2016	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/758-BPLH Tahun 2016 tanggal 24 Mei 2016		Beroperasi
16	Kegiatan Pengembangan RS. Hermina	Jl. KH. Abdullah Bin Nuh Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/676-BPLH Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/907-BPLH Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016		Beroperasi
17	Kegiatan Pembangunan Gedung DPRD	Jl. Pemuda Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/836-BPLH tanggal 13 Juni 2016	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/1108-BPLH Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016		Konstruksi
18	Rencana Kegiatan Pembangunan Pusat Perdagangan, Pusat Kuliner, dan Rekreasi	Jl. Raya Tajur Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/923-BPLH Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/1206-BPLH Tahun 2016 tanggal 9 September 2016		Konstruksi
19	Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan	Kelurahan Kayumanis dan Kelurahan Mekarwangi	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/1357-BPLH Tahun	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor Nomor 660.1.45/1688-BPLH Tahun		Beroperasi

	Bukit Mekar Wangi	Kecamatan Tanah Sareal	2016 tanggal 17 Oktober 2016	2016 tanggal 21 Desember 2016		
20	Rencana Kegiatan Pembangunan SBY Presidential Center	Kelurahan Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor 660.1.45/1382 -BPLH Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016	Keputusan Kepala BPLH Kota Bogor 660.1.45/687-BPLH Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016		Belum beroperasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

#### 2.4.4. FOKUS URUSAN PENUNJANG

##### A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

**Tabel 2.88**  
**Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	-	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	-	-	-
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2	2	2	2	2
4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	90	99.37	98.9	

Sumber: *Bappeda Kota Bogor*

## B. KEUANGAN

Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota BOGOR dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 termasuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan mengalami kenaikan predikat pada tahun 2018 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Dalam hal penetapan APBD, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 termasuk kategori Tepat Waktu. Indikator keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.89**  
**Indikator Keuangan Kota Bogor Tahun 2015 – 2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	15,33	15,33	12,23	12,78	10,88
3	Persentase SILPA terhadap APBD	15,33	15,33	12,23	12,78	10,89
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan	-		23,84	21,06	23,49
6	Persentase belanja kesehatan	-	10,75	13,98	14,58	16,54
7	% BTL terhadap total APBD	-	39,45	36,28	35,81	44,04
8	% BL terhadap total APBD	58,02	77	85,80	90,16	79,05
9	Bagi hasil kabupaten/kota		0	0	0	0
10	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kota Bogor

### C. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai Formasi dan Kompetensi merupakan salah satu indikator kepegawaian yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 2.90**  
**Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**  
**Kota Bogor Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1	1	1	1	1
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal	65	61,21	66,92	84,27	91,84
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	45	43	39	43	72
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	31	31	31	33	34
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	138	135	136	149	150
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	6458	5097	5083	3889	3690

*Sumber: BPKSDA Kota Bogor*

### D. PENGAWASAN

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan .

Indikator kinerja pengawasan dapat di lihat dari Tabel 2.93.

**Tabel 2.91**  
**Indikator Pengawasan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase tidak lanjut temuan	100	100	100	100	100
2	Jumlah temuan BPK	34	34	30	16	12

*Sumber: Inspektorat Kota Bogor*

Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 semua temuan dapat di tindak lanjuti oleh inspektorat. Sedangkan temuan BPK cenderung menurun dari tahun 2014 34 temuan menjadi 12 temuan pada tahun 2018 .

Data dari BKPSDA Kota Bogor Persentase pelanggaran yang di lakukan ASN yang di kenai hanya 0.12 pada tahun 2014, tertinggi persentase pelanggaran pada tahun 2017 yaitu 0.108. Perkembangannya dapat di lihat di Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.92**  
**Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Bogor Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase pelanggaran pegawai	0,12	0,12	0,089	0,108	0,084

*Sumber: BKPSDA Kota Bogor*

## **E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. perkembangan Indikator kinerja seperti dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.93**  
**Indikator Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan		0	0	125	52,5

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		0	54,17	68	42,85
Penerapan SIDA						
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		0	0	45,95	73,68
4	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah		0	0	84,44	87,5

Sumber: Bappeda

#### 2.4.5 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Analisis kinerja atas fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap Indikator-Indikator: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga per Kapita, Nilai Tukar Petani dan Produktivitas Total Daerah. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah, sebagai berikut:

##### A. PENGELUARAN PER KAPITA

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan merupakan rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota rumah tangga yang dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja.

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.94**  
**Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengeluaran Konsumsi RT per Kapita		10.576	10.662	10.940	10.940

*Sumber: BPS*

Pengeluaran per kapita di Kota Bogor cenderung naik setiap tahunnya akan tetapi kenaikannya tidak terlalu tinggi yaitu Rp. 86 dari tahun 2015 ke tahun 2016 dan Rp. 278 dari tahun 2016 ke 2017. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) oleh BPS, mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat.

#### **E. PERSENTASE PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PER KAPITA**

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di gunakan sebagai salah satu alat untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi untuk Kota Bogor pada tahun 2017 dapat di lihat dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.95**  
**Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita**  
**di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017
1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	222.258	441.335		3.058.467
2	Aneka barang dan jasa	199.042	240.240		970.377
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	18.547	35.599		183.544
4	Barang tahan lama	15.512	49.791		368.344
5					

6	Keperluan pesta, upacara dan kenduri	13.957	11.118		74.866
Pajak, pungutan dan asuransi	20.089	47.788		232.353	3.583.436

*Sumber: BPS di olah oleh Bappeda*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pengeluaran masyarakat Kota Bogor lebih tinggi pada konsumsi non pangan di bandingkan dengan konsumsi pangan.

#### **2.4.6 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR**

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan hotel/penginapan dan restoran. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, sebagai berikut:

##### **A. AKSESIBILITAS DAERAH**

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

##### **➤ JARINGAN JALAN**

Faktor - faktor yang mempengaruhi masalah transportasi di Kota Bogor adalah sarana dan prasarana seperti terminal, jaringan jalan, angkutan umum dan kendaraan pribadi. Faktor lainnya adalah pengaruh luar atau lalu lintas regional yang merupakan pergerakan lintasan kendaraan dari Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya. Kondisi eksisting transportasi kota Bogor adalah sebagai berikut:

##### **1. Jaringan Jalan**

Total panjang jalan Kota Bogor adalah 757.393 km. Dengan rincian jalan yang sudah beraspal sepanjang 686.916 km, Beton 15.877, Kerikil 17.359, dan Tanah 37.241 km. Berdasarkan panjang jalan diatas dapat diketahui juga kondisi ruas jalan di Kota Bogor dengan kondisi baik adalah 358.977 km, kondisi sedang adalah 308.974 km, kondisi rusak adalah 67.809 km dan ruas jalan dengan kondisi rusak ringan adalah 21.633 km.

Klasifikasi jaringan jalan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor terdiri dari:

- a. Jalan Arteri Primer, meliputi: Jalan Tol Jagorawi, Jalan Raya Pajajaran
- b. Jalan Arteri Sekunder, meliputi: Jalan Siliwangi, Jalan Raya Tajur, Jalan Semeru, Jalan Raya Bogor – Darmaga dan Jalan R1 (Jalan baru Kemang – Sindangbarang)
- c. Jalan Kolektor Primer, meliputi: Jalan. Ir. H. Juanda, Jalan Jalak Harupat, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Surya Kencana, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Raya Semplak, Jalan Raya Siliwngi dan Jalan Raya Sukabumi

Jalan Kolektor Sekunder: Jalan Tanjung Biru, Jalan Permata, Jalan RE. Martadinata, Jalan Ciwaringin, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan RE. Abdullah, Jalan Pasir Kuda, Jalan Pancasan, Jalan Raya Ciomas, Jalan Raya Tanah Baru dan Jalan Raya Cimahpar.

## 2. Kapasitas ruas jalan

### Jalan Raya Tajur

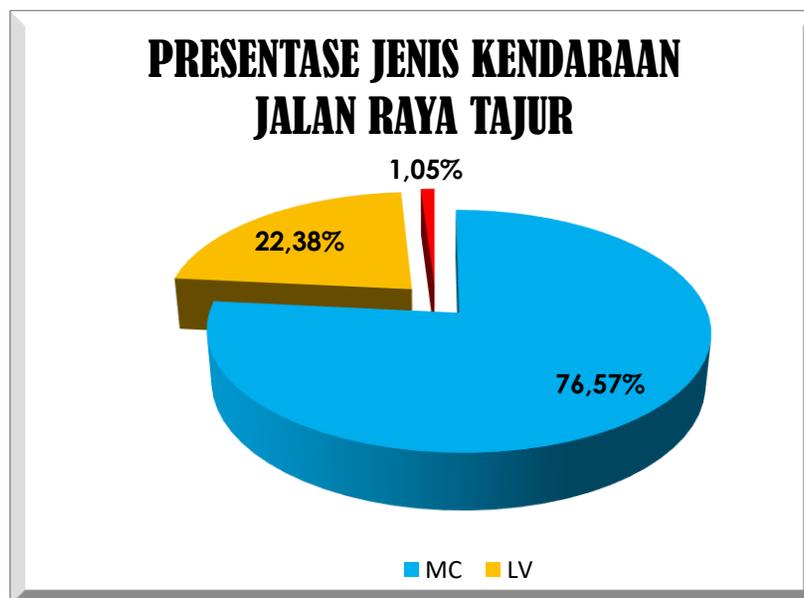
Jalan Raya Tajur merupakan ruas jalan yang memiliki tipe 2/2 UD atau 2 (dua) lajur 2 (dua) arah tanpa terpisah oleh median, status ruas jalan ini adalah Jalan Nasional dengan segmen dari Simpang Lippo Plaza (Ekalokasari) sampai dengan segmen Ciawi. Untuk selengkapnya mengenai kondisi lalu lintas pada ruas Jalan Raya Tajur dapat dilihat berikut ini.

**Tabel 2.96**  
**Kondisi Ruas Jalan Raya Tajur**

JALAN RAYA TAJUR						
No	Segmen	Kondisi Lalu Lintas				
		Kapasitas (smp/jam)	Volume Lalu Lintas (smp/jam)		Kecepatan (km/jam)	
			Hari Kerja	Hari Libur	Hari Kerja	Hari Libur
1	Simp. Ekalokasari – Simp. Ciawi	1.703,35	1509,14	1342,24	41,46	24,7
2	Simp. Ciawi – Simp. Ekalokasari	1.703,35	1434,10	1170,67	36,2	23,0

Sumber : Hasil Survei dan Analisis 2016

**Grafik 2.53**



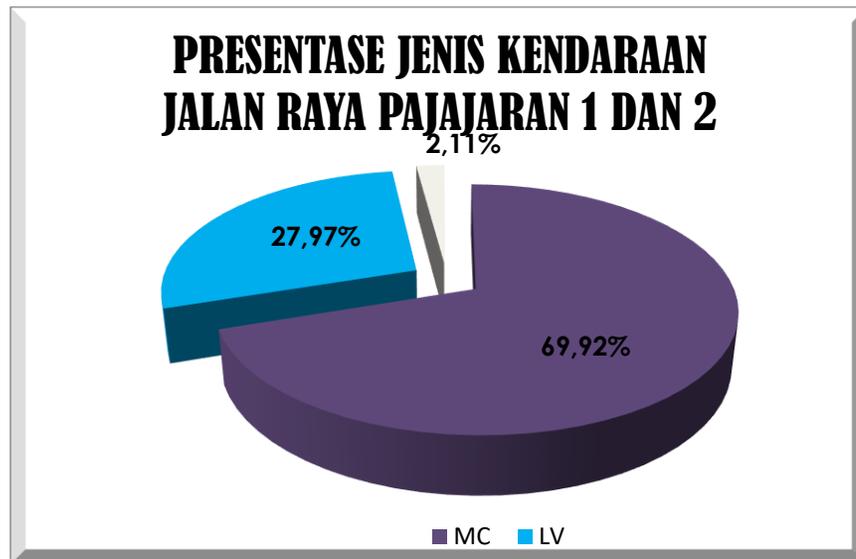
**Tabel 2.97**  
**Kondisi Ruas Jalan Raya Pajajaran Segmen 1 dan 2**

JALAN RAYA PAJAJARAN 1 & 2						
No	Segmen	Kondisi Lalu Lintas				
		Kapasitas (smp/jam)	Volume Lalu Lintas (smp/jam)		Kecepatan (km/jam)	
			Hari Kerja	Hari Libur	Hari Kerja	Hari Libur
1	Simp. Ekalokasari – Simp. Baranangsiang	3329.04	2007.53	1978.13	43.3	33.1
	Simp. Baranangsiang – Simp. Ekalokasari	3457.08	2162.12	2503.68	32.8	37.4
2	Simp. Baranangsiang – Simp. Tugu Kujang	3201.00	3151.51	2312.52	29.4	34.4

	Simp. Tugu Kujang – Simp. Baranangsiang	3201.00	2210.93	1738.61	22.5	36.7
--	--	---------	---------	---------	------	------

Sumber : Hasil Analisis 2016

**Grafik 2.54**



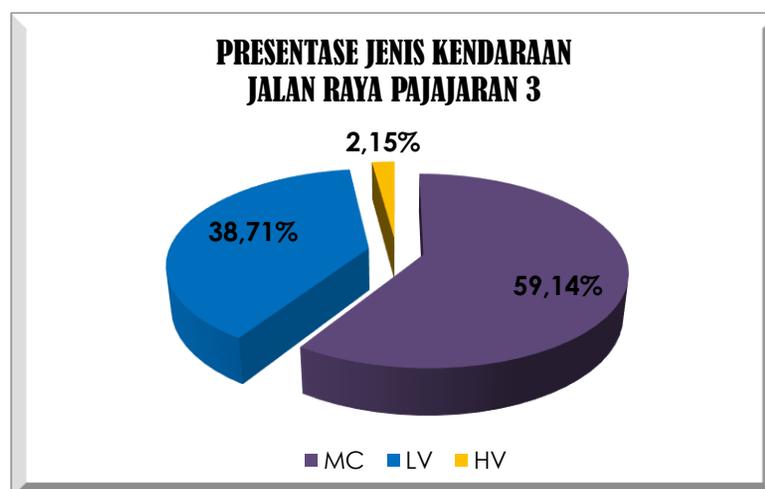
**Tabel 2.98**

**Kondisi Ruas Jalan Raya Pajajaran Segmen 3**

JALAN RAYA PAJAJARAN 3						
No	Segmen	Kondisi Lalu Lintas				
		Kapasitas (smp/jam)	Volume Lalu Lintas (smp/jam)		Kecepatan (km/jam)	
			Hari Kerja	Hari Libur	Hari Kerja	Hari Libur
1	Simp. Ekalokasari – Simp. Tugu Kujang	6468	3661.11	2987.33	46.6	41.6

Sumber : Hasil Analisis 2016

**Grafik 2.55**



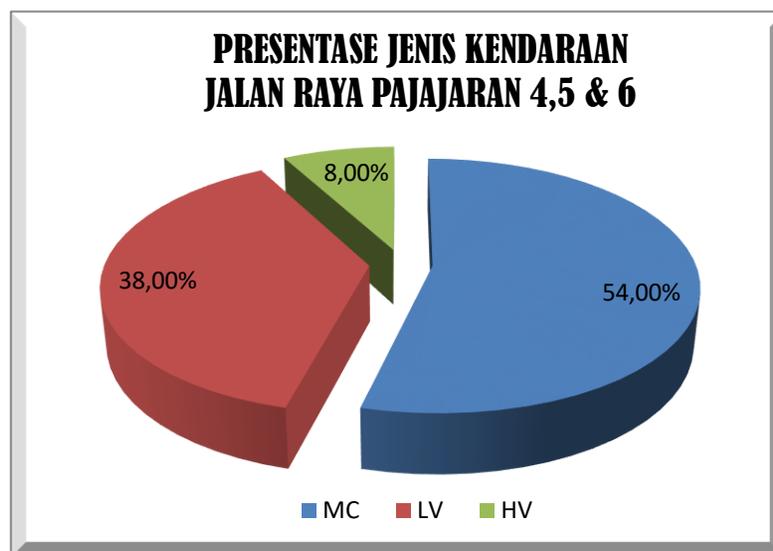
**Tabel 2.99**

**Kondisi Ruas Jalan Raya Pajajaran Segmen 4,5 dan 6**

JALAN RAYA PAJAJARAN 4,5 & 6						
No	Segmen	Kondisi Lalu Lintas				
		Kapasitas (smp/jam)	Volume Lalu Lintas (smp/jam)		Kecepatan (km/jam)	
			Hari Kerja	Hari Libur	Hari Kerja	Hari Libur
1	Simp. Pangrango - Simp. Marwan	3201	184.015	196.463	42.8	32.9
	Simp. Marwan - Simp. Pangrango	3234	1707.24	1797.12	35.4	41.4
2	Simp. Marwan - Simp. Bantarjati	2944.92	1638.864	1426.017	37.9	37.8
	Simp. Bantarjati - Simp. Marwan	2975.28	1913.52	1644.416	42.1	34.3
3	Simp. Bantarjati - Simp. Warung Jambu	3234	1885.805	1815.114	34.5	31.2
	Simp. Warung Jambu - Simp. Bantarjati	3234	1721.498	1417.133	31.7	20.8

Sumber : Hasil Analisis 2016

**Grafik 2.56**



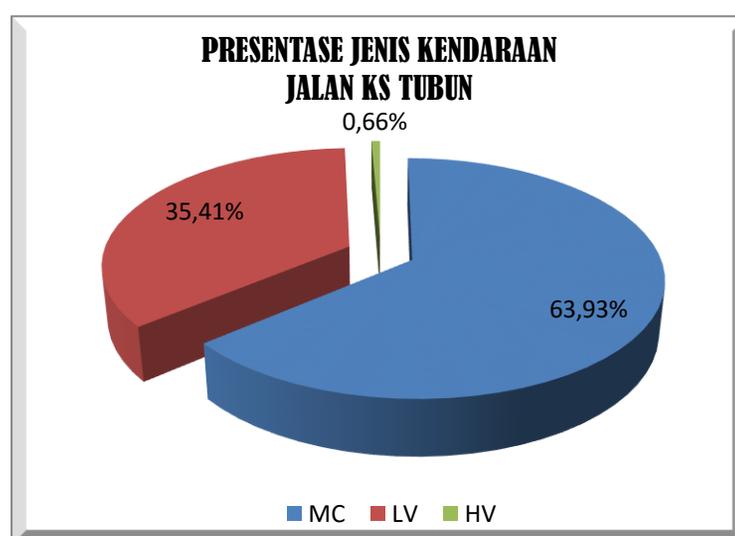
**Tabel 2.100**

**Kondisi Ruas Jalan KS. Tubun Segmen 1, 2, 3 dan 4**

JALAN KS. TUBUN 1, 2, 3 & 4						
No	Segmen	Kondisi Lalu Lintas				
		Kapasitas (smp/jam)	Volume Lalu Lintas (smp/jam)		Kecepatan (km/jam)	
			Hari Kerja	Hari Libur	Hari Kerja	Hari Libur
1	Simp. Warung Jambu - Simp. Narkoba (BORR)	3009.6	1499.616	1157.728	26.4	33.0
	Simp. Narkoba (BORR) - Simp. Warung Jambu -	3009.6	1205.55	1128.708	28.1	31.3
2	Simp. Narkoba (BORR) - Simp. Talang	2622	1547.595	1200.98	36.9	20.5
	Simp. Talang - Simp. Narkoba (BORR) -	2511.6	1412.4875	1506.684	34.7	41.5
3	Simp. Talang - Simp. POMAD	2622	1044.0465	919.31	26.8	32.8
	Simp. POMAD - Simp. Talang	2760	1237.0635	951.286	33.3	30.5
4	Simp. POMAD - Ciluar (Batas Kota)	2593.5	1039.22	859.252	41.8	39.9
	Ciluar (Batas Kota) - Simp. POMAD	2593.5	959.28	988.52	35.7	38.1

Sumber : Hasil Analisis 2016

**Grafik 2.57**



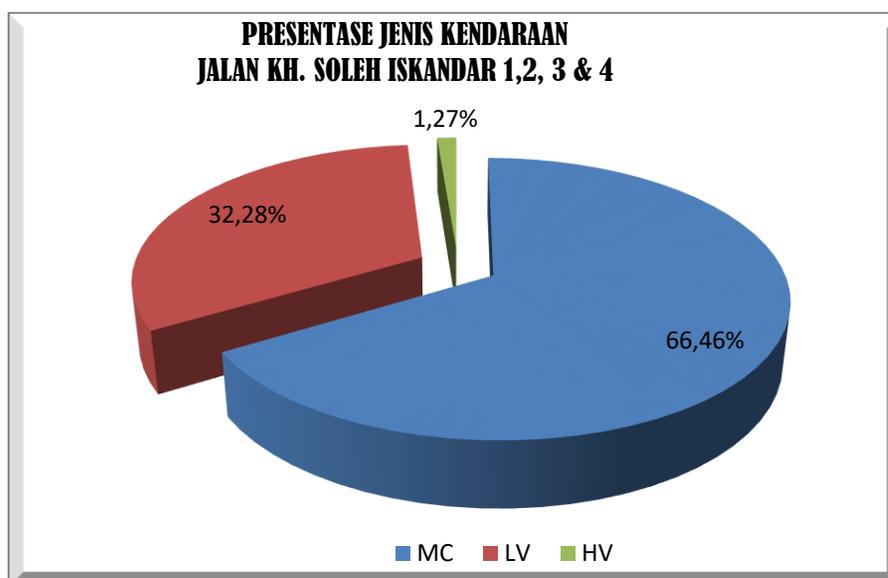
**Tabel 2.101**

**Kondisi Ruas Jalan KH. Sholeh Iskandar Segmen 1, 2, 3 dan 4**

JALAN KH. SHOLEH ISKANDAR 1, 2, 3 & 4						
No	Segmen	Kondisi Lalu Lintas				
		Kapasitas (smp/jam)	Volume Lalu Lintas (smp/jam)		Kecepatan (km/jam)	
			Hari Kerja	Hari Libur	Hari Kerja	Hari Libur
1	Simp. Narkoba (BORR) - Underpass	3201	1537.478	1698.051	40.6	36.0
	Underpass - Simp. Narkoba (BORR)	3201	1859.402	1708.325	34.4	33.4
2	Underpass - Simp. Yasmin	2884.2	2083.59	1637.943	26.9	39.3
	Simp. Yasmin - Underpass	3009.6	1758.159	1576.908	37.3	23.7
3	Simp. Yasmin- Simp. Kayumanis	1553.82	872.08	835.62	29.4	29.9
	Simp. Kayumanis - Simp. Yasmin	1553.82	887.936	791.64	26.1	26.1
4	Simp. Kayumanis - Salabenda (Batas Kota)	1392	912.4325	864.5	33.5	25.0
	Salabenda (Batas Kota) - Simp. Kayumanis	1363	866.4275	781.508	28.2	31.4

Sumber : Hasil Analisis 2016

**Grafik 2.58**



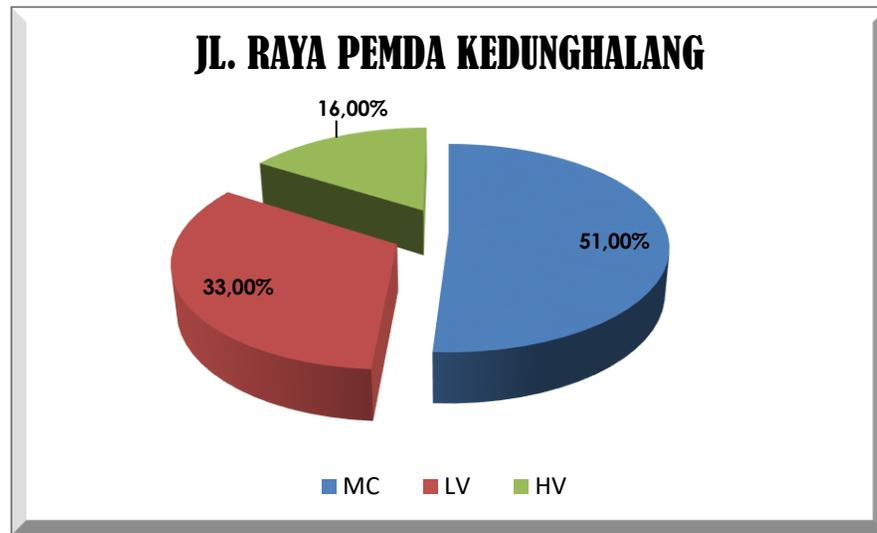
**Tabel 2. 102**

**Kondisi Ruas Jalan Raya Pemda Kedunghalang**

JALAN RAYA PEMDA KEDUNG HALANG						
No	Segmen	Kapasitas (smp/jam)	Kondisi Lalu Lintas			
			Volume Lalu Lintas (smp/jam)		Kecepatan (km/jam)	
			Hari Kerja	Hari Libur	Hari Kerja	Hari Libur
1	Simp. Talang - Karadenan (Batas Kota)	1553.82	931.65	822.10	36.1	37.2
2	Karadenan (Batas Kota)- Simp. Talang	1553.82	817.11	788.40	31.8	43.1

Sumber : Hasil Survei dan Analisis 2016

**Grafik 2.59**



➤ **TERMINAL**

Terminal yang melayani Kota Bogor terdiri dari terminal regional Barangsiang dan terminal Bubulak. Terminal Baranangsiang merupakan terminal tipe A yaitu melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan pedesaan. Dalam masalah integritas pelayanan dengan pihak Kabupaten Bogor tampaknya perlu melakukan sinergitas, mengingat terminal yang beroperasi antara terminal Laladon yang merupakan terminal milik kabupaten dan Bubulak milik Kota Bogor pelayanannya relatif dekat kurang lebih 500 meter. Sehingga efektifitasnya kurang; biaya operasionalnya menjadi mahal dan tidak berkembang secara maksimal.

➤ **TRANSPORTASI KERETA API**

Saat ini angkutan kereta api dilayani oleh dua Stasiun Kereta Api yang terdapat di Kecamatan Kota Bogor Tengah dan Kota Bogor Selatan. Stasiun Kota Bogor Tengah melayani pergerakan orang atau barang ke arah Kota Jakarta dan Sukabumi sekurang-kurangnya 15 ritasi perhari. Umumnya pola pergerakan membentuk pola komuter, pengguna jasa angkutan kereta terdiri dari pelajar, pekerja, pedagang melakukan aktivitas di Jakarta atau Sukabumi. Sedangkan Stasiun Kota Bogor Selatan hanya melayani rute angkutan Jakarta – Sukabumi dengan sekurang-kurangnya mencapai tiga ritasi perharinya.

Transportasi kereta api merupakan angkutan yang memiliki intensitas yang cukup tinggi berkaitan dengan pergerakan penduduk Kota Bogor yang bekerja di Jakarta maupun Sukabumi sehingga perlu adanya pengembangan peningkatan sarana dan prasarana bagi peningkatan pelayanannya, mengingat laju pertumbuhan pengguna kereta api adalah 3,02% pertahun.

Berdasarkan data Kota Bogor Dalam Angka 2016 diketahui jumlah penumpang kereta api Stasiun Bogor pada tahun 2015 adalah sebanyak 16.541.315 orang ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 15.253.945 orang. Dengan rata rata penumpang perhari nya 45.284 orang di tahun 2015 dan 41.775 orang di tahun 2014.

**B. FASILITAS BANK DAN NON BANK**

Ketersediaan Fasilitas Bank dan Non Bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya saing daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cabang-cabangnya.

Jumlah bank yang ada di Kota Bogor berdasarkan jenis pada selang tahun 2010 hingga tahun 2015 mengalami perubahan. Jenis bank pemerintah di Kota Bogor seluruhnya berjumlah empat unit, bank swasta nasional berjumlah 36 unit, bank pembangunan daerah berjumlah 2 unit, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berjumlah 9 unit.

Tabel 2.103

## Jumlah Bank berdasarkan jenis di Kota Bogor Tahun 2011-2016

NO.	JENIS BANK	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pemerintah	4	4	4	4	4
2	Swasta Nasional	30	31	32	36	36
3	Pembangunan Daerah	2	2	1	2	2
4	BPR	7	6	7	8	8
	Jumlah	43	43	44	50	50

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2017

### C. KETERSEDIAAN AIR BERSIH

Ketersediaan air, terutama air bersih, menjadi salah satu penentu kualitas hidup suatu masyarakat. Berdasarkan data capaian program peningkatan sanitasi dasar Kota Bogor tahun 2018 bahwa prosentase akses air bersih di Kota Bogor di luar PDAM pada tahun 2018 mencapai 101 % . artinya semua masyarakat Kota Bogor terpenuhi air bersih untuk kehidupan sehari hari.

Tabel 2.104

## Persentase Akses Air Bersih

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase akses air bersih (%)	97	98	99	99	101

Sumber ; LKPJ AMJ Walikota tahun 2018

### D. RUMAH TANGGA /PELANGGAN YANG MENGGUNAKAN LISTRIK

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat area Bogor , jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2017 sebanyak 1.149.126 pelanggan. Pengguna listrik di Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,66%. Data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.105****Jumlah Pelanggan, Daya tersambung, dan Energi Listrik Terjual Menurut Lokasi di Kota Bogor, 2017**

Jenis Tarif	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (VA)	Energi yang Terjual (Ribu KWH)
1	2	3	4
S (Sosial)	22 330	63 186 100	7 428 354
R (Rumah Tangga)	1 075 574	949 027 350	138 209 687
B (Bisnis)	44 813	341 764 550	44 998 173
I (Industri)	836	705 386 900	164 603 365
T (Traksi/Kereta Api)	5	67 877 879	8 335 500
P (Publik)	5 568	20 005 000	1 656 570
Jumlah/Total	1 149 126	2 147 247 779	365 231 649

**Tabel 2.106****Jumlah Pelanggan Listrik Kota Bogor**

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelanggan	216 896	1 033 162	NA	1 149 126

**E. RESTORAN DAN HOTEL**

Kota Bogor terdapat 78 hotel dan restoran yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kota Bogor merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

Tumbuh berkembangnya aktivitas MICE (*Meeting, Incentives, Conferences/Convention, Exhibitions/Events*), dengan strategi memfasilitasi berkembangnya aktivitas MICE dengan menerapkan regulasi yang tegas, membangun infrastruktur MICE berskala internasional, dan mendorong pertumbuhan hotel dan sertifikasi hotel dalam batas-batas yang dikendalikan sehingga tidak kontraproduktif terhadap sisi kenyamanan kota. Hal ini merupakan salah satu strategi Kota Bogor dalam menguatkan identitas dan citra Kota Bogor.

**Tabel 2.107**  
**Perkembangan data hotel dan restoran di Kota Bogor tahun**  
**2017**

Tahun	Hotel	penginapan remaja	Pondok Wisata	Restoran	Rumah Makan
2014	78	2	2	78	102

*Sumber; Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bogor*

#### **2.4.7. FOKUS IKLIM BERINVESTASI**

Fokus iklim berinvestasi sangat dipengaruhi oleh rasa aman yang diciptakan agar investor tertarik untuk berinvestasi. Salah satu hal yang menjadi halangan terbesar dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban yaitu kriminalitas. Ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif menggambarkan bahwa disiplin hukum berjalan dengan baik. Ketentraman dan ketertiban umum sangat berdampak positif dalam meningkatkan kenyamanan berinvestasi. Investasi menjadi faktor yang sangat penting karena berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi akan memberikan banyak manfaat terhadap banyak pihak, baik investor, masyarakat dan pemerintah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fokus iklim berinvestasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja: Angka Kriminalitas, Jumlah Demonstrasi, Kemudahan Perizinan, Pengenaan Pajak Daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha dan Status Kelurahan (Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan). Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah, sebagai berikut:

##### **A. ANGKA KRIMINALITAS**

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Iklim berinvestasi dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

Pada Tahun 2015 di dominasi jenis kriminalitas lain lain yang berjumlah 381 kasus ( 26,29 % ) kemudian diikuti jenis kriminalis penipuan 265 kasus ( 18,28 % ) dan jenis narkoba sejumlah 183 kasus ( 12,62 % ) Semakin tingginya angka kriminalitas pada suatu daerah menggambarkan rendahnya rasa aman masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Respon warga masyarakat terhadap kondisi perlu adanya kewaspadaan dan kepedulian antar warga masyarakat sehingga kasus kasus ini dapat diminimalisir.

**Tabel 2.108**

**Banyaknya Kriminalitas Menurut Jenisnya Tahun 2013-2016  
Kota Bogor**

NO	JENIS KRIMINAL	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Curat	137	130	138	112	149
2.	Curas	45	56	25	20	33
4.	Curanmor roda 4	60	64	115	66	
5.	Ccuranmor roda 2	173	189	114	82	293
6.	Penipuan	279	239	211	265	304
7	Penggelapan	98	0	133	104	109
8.	Penganiayaan	99	96	117	140	123
9.	Anirat	3	6	1	0	
10.	Narkoba	91	89	172	183	137
11	Pencurian	38	42	46	51	
12	Perzinaan	5	7	4	11	
13	Perkosaan	2	6	1	6	
14	Camras	5	4	5	6	
15	Kebakaran	2	4	7	8	
16	Lain lain	318	320	333	381	400
	Jumlah	1363	1415	1429	1449	1554

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2018

Angka kriminalitas yang tertangani diperoleh dari jumlah kriminalitas yang ada di bagi jumlah penduduk pada tahun tersebut

**Tabel 2.109**

**Angka kriminalitas yang tertangani  
di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Angka kriminalitas yang tertangani	13.83	14.59	14.59	10,78

Sumber : BPS, Kantor Kesbangpol

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor fuktuatif, ada kenaikan pada tahun 2015 sampai tahun 2017, akan tetpi mengalami penurunan pada tahun 2017

## B. JUMLAH DEMONSTRASI

Kejadian unjuk rasa yang terjadi di kota berdasarkan jenisnya mengalami peningkatan pada rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2013, kemudian menurun pada tahun 2014. Angka kejadian unjuk rasa tertinggi pada tahun 2014 adalah unjuk rasa bidang politik 61 kejadian (55,96%) diikuti unjuk rasa biddang ekonomi 46 kasus (42,20%) dan hanya 2 kejadian (1,8%) unjuk rasa kasus pemogokan kerja Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa pada dasarnya hanyalah penyampaian aspirasi kepada objek unjuk rasa dalam banyak kasus adalah pemerintah. Meningkatnya kasus unjuk rasa di Kota Bogor, terutama unjuk rasa bidang politik, menggambarkan bahwa beberapa pihak masyarakat Kota Bogor tidak sependapat dengan kebijakan yang ada, baik pemerintah maupun swasta.

**Tabel 2.110**

### **Banyaknya Kejadian Unjuk Rasa di Kota Bogor Tahun 2012-2016**

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bidang politik	35	53	61	12	19
2	Ekonomi	47	63	46	85	58
3	Kasus pemogokan kerja	3	7	2	...	...
4	Jumlah unjuk rasa	85	123	109	97	77

*Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018*

## C. STATUS KELURAHAN

Pembangunan kelurahan dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perkelurahan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan kelurahan dan pembangunan sektor yang lain di setiap kelurahan akan mempercepat pertumbuhan Kelurahan menjadi Kelurahan swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan

Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Berdasarkan statusnya, kelurahan diklasifikasikan menjadi tiga, yakni kelurahan Swadaya (tradisional); kelurahan Swakarya (transisional); dan kelurahan Swasembada (berkembang).

Kelurahan swadaya adalah kelurahan yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri: daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Jumlah kelurahan swadaya di Kota Bogor berjumlah 29 kelurahan.

Kelurahan swakarsa adalah peralihan atau transisi dari kelurahan swadaya menuju kelurahan swasembada. Ciri-ciri kelurahan swakarsa adalah kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, jalur lalu lintas antara Kelurahan dan kota sudah agak lancar. Jumlah Kelurahan swakarsa di Kota Bogor berjumlah 15 kelurahan,

Jumlah kelurahan swadaya, swakarsa, maupun swasembada di Kota Bogor tidak mengalami perubahan dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Jumlah Kelurahan swasembada di Kota Bogor pada tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu sebanyak 24 kelurahan dan total kelurahan di Kota Bogor sebanyak 68 kelurahan, sehingga diperoleh persentase kelurahan berstatus swasembada terhadap total Kelurahan di Kota Bogor sebesar 35,29 persen.

Ciri-ciri kelurahan swasembada: kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat-padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari Kelurahan lain, partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Kelurahan swasembada di Kota Bogor memiliki jumlah terbesar kedua setelah kelurahan swakarya. Hal ini berarti kelurahan di Kota Bogor sebagian besar masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam serta potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah keluhan swadaya, swakarsa, dan swasembada di Kota Bogor tahun 2010-2012

**Tabel 2.111**

**Jumlah Keluhan Swasembada di Kota Bogor Tahun 2012-2017**

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Keluhan Swadaya	29	15	24	29	29	29
2.	Jumlah Keluarahan Swakarsa	29	15	24	15	15	15
3.	Jumlah Keluarahan Swasembada	29	15	24	24	24	24
4.	Jumlah Kelurahan	68	68	68	68	68	68
	Rasio	42.64%	22.06%	35,29%	35,29%	35,29%	35,29%

Sumber: BPS Kota Bogor (Kota Bogor Dalam Angka, 2018)

#### **2.4.8. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA**

Fokus Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Perlu adanya upaya dalam peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta kualitas tenaga kerja. Semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Analisis kinerja atas fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator-indikator: Kualitas Tenaga Kerja dan Tingkat Ketergantungan.

##### **A. KUALITAS TENAGA KERJA (RASIO LULUSAN S1/S2/S3)**

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar

negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Kualitas tenaga kerja merupakan salah satu permasalahan yang ada, mengingat jumlah lulusan S1/S2/S3 masih terbilang kecil yang berbanding lurus dengan kecilnya rasio S1/S2/S3. Pada tahun 2015 rasio lulusan S1/S2/S3 sebesar 0,06 naik dari rasio tahun 2014 sebesar 0,05. Secara keseluruhan hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin meningkat. Selain itu, peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

**Tabel 2.112**

**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016-2017 Kota Bogor**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Jumlah Lulusan S1	37.899	35.528
2	Jumlah Lulusan S2/S3	6.706	36.265
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	44.605	71.793
5	Jumlah Penduduk	1.064.687	1.081.009
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,042	0,066

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2018

## **B. RASIO KETERGANTUNGAN**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

**Tabel 2.113**  
**Rasio Ketergantungan di Kota Bogor Tahun 2015-2017**

No	Uraian	2015	2016	2017
1.	Rasio ketergantungan (%)	43.51	43.51	42.28

*Sumber: BPS Di olah oleh Bappeda*

Rasio ketergantungan di Kota Bogor kurun waktu 2015-2017 berkisar antara 43.51 s/d 42.28. Pada tahun 2017 rasio ketergantungan total sebesar 42.28 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 sampe 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk nonproduktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah pendduk produktif (umur 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

Rasio Ketergantungan Muda merupakan perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Rasio Ketergantungan Muda mengalami penurunan pada selang waktu antara tahun 2014 sampai tahun 2015. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan muda sebesar 36,83; mengalami penurunan menjadi 22.54 pada tahun 2015;

ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 36 orang dan 22 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun).

**Tabel 2.114**

**Rasio Ketergantungan Muda Kota Bogor Tahun 2016-2017**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	262708	271944
2	Jumlah Penduduk Usia > 65 tahun	60072	49272
3	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 tahun	741907	759793
4	Rasio Ketergantungan muda	35.41	35.79
5	Rasio ketergantungan tua	8.10	6.48

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Kota Bogor Dalam Angka 2017, 2018 , BPS Kota Bogor)*

Rasio Ketergantungan Tua merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan tua mengalami kenaikan dalam selang waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2015. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan tua sebesar 5,04; mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 6.74; mengalami kenaikan 1,7%. ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 5 - 7 orang usia tidak produktif.

## 2.5. PENCAPAIAN SASARAN RPJMD TAHUN 2015 – 2019

Tabel 2.115

### Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
<b>A. MISI 1 : MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>											
<b>Tujuan 1 : Membangun Masyarakat yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>											
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Government)</b>											
1.	Indeks E-Government	2,91	2,91	3,13 (sangat baik)	3,21	3,29	2,91	NA	2,92 (baik)	3,03	Tidak Tercapai
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people)</b>											
1.	Rata-rata Lama Sekolah	9,83	10,28	10,32	10,36	10,4	10,28	10,28	10,29	10,29	Tidak Tercapai
2.	APK SD	113,5	113,7	113,8	113,9	114	110,5	106,57	105,55	112,6	Tidak Tercapai
3.	APK SMP	104,7	104,75	104,8	104,9	105	108,56	105,55	101,06	104,1	Tidak Tercapai
4.	Nilai Rata-Rata USBN SD	75,51	75,75	75,85	75,95	76	75,47	75,75	72,12	68,12	Tidak Tercapai
5.	Nilai Rata-Rata UN SMP	66,75	67	67,25	67,5	67,75	65	67	59,62	58,27	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
6.	Persentase Sekolah Terakreditasi A	59	62	63	64	65	60	62	70,26	73,5	Tercapai
<b>Sasaran 3 : Meningkatkan inovasi dan kreativitas masyarakat</b>											
1.	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil di implementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	NA	NA	NA	30	30	NA	NA	NA	100	Tercapai
<b>B. MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR</b>											
<b>Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat</b>											
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat</b>											
1.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	62	62	66	100	100	65	67	76,6	95,85	Tidak Tercapai
2.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	72,88	72,95	73	73,08	73,15	72,88	72,95	73,01	73,12	Tercapai
3.	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	100/100.000 kelahiran hidup	95/100.000 kelahiran hidup	105/100.000 kelahiran hidup	110/100.000 kelahiran hidup	30/100.000 kelahiran hidup	60/100.000 kelahiran hidup	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
4.	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	Tercapai
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>											
1.	Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan / kota	66,6	66,8	67	67,26	67,58	NA	66,8	72,1	72,2	Tercapai
2.	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/ air minum	84	86,92	90,03	94,62	98,95	63,40	64,20	90,55	90,55	Tidak Tercapai
3.	Prosentase luasan kawasan kumuh sedang	70	60	50	40	30	87,34	84,36	72,2	72,2	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat</b>											
1.	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	63	65	67	70	72	63,40	64,20	65,2	65,5	Tidak Tercapai
2.	Tingkat kepatuhan penerapan KTR	45	50	55	60	75	100	100	100	100	Tercapai
<b>Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor</b>											
<b>Sasaran 1 : Berkurangnya tingkat pengangguran</b>											
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	8,44	7,64	6,91	6,26	5,66	11,03	10,10	6,5	9,57*	Tidak Tercapai
2.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	8,96	10,89	12,35	13,35	14,89	7,90	8,89	10,25	54	Tercapai
<b>Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kemiskinan</b>											
1.	Angka kemiskinan	7,60	7,29	7,18	7,05	7	7,60	7,29	7,11	5,93	Tercapai
2.	Indeks gini ratio	0,33	0,33	0,32	0,32	0,31	0,47	0,43	0,43	0,41*	Tidak Tercapai
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat</b>											
<b>Tujuan 3 : Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Masyarakat</b>											
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>											
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,26	6,36	6,46	6,56	6,66	6,14*	6,73**	6,12	6,48	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
2.	Nilai investasi	2,1 T	2,2 T	2,3 T	2,4 T	2.5T	3,104 T	2,315 T	2.9T	3.1T	Tercapai
3.	Pertumbuhan jumlah komoditi ekspor	21	23	25	27	29	21	23	30	30	Tercapai
4.	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	31	34	36	38	40	30,88**	33,25**	37,18	37.18**	Tidak Tercapai
<b>C.</b>	<b>MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>										
	<b>Tujuan 1 : Memperthankan Kuitas Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Kota Bogor</b>										
	<b>Sasaran 1 : Terkendalnya tata ruang kota Bogor</b>										
1.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW)	75	80	85	87	90	NA	80	86	88	Tercapai
2.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang)	75	80	85	87	90	NA	80	86	89	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
<b>Sasaran 2 : Berkurangnya tingkat kemacetan</b>											
1.	Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor ( 150 ruas jalan arteri dan kolektor)	22,15	25,50	28,15	32,75	35,15	24,65	26,1	34,84	35,39	Tercapai
<b>Sasaran 3 : Meningkatkan prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau</b>											
1.	Prosentase ruang terbuka hijau publik	NA	5,85	5,90	5,925	6	5,70	5,73	5,8	5,89	Tidak Tercapai
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan</b>											
1.	Prosentase volume sampah terangkut ke TPA	71	72	73	74	75	72,2	74	74,34	75,85	Tercapai
2.	Prosentase reduksi sampah	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	3,2	3,2	4,1	6,26	Tercapai
<b>Sasaran 5 : Terkendalanya kualitas lingkungan</b>											
1.	Indeks kualitas air	52	52,5	53	54	55	50	27,33	34,44	49,67	Tidak Tercapai
2.	Indeks kualitas udara	78	78,5	79	79,5	80	70,6	78,56	85,3	85,86	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
<b>D. MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF</b>											
<b>Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat</b>											
<b>Sasaran 1 : Berkembangnya sektor kepariwisataan</b>											
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	4.348.953	4.783.848	5.262.053	5.788.456	63.67.303	4.786.023	5.310.072	7.965.987	6.106.582	Tercapai
Sasaran 2 : Berkembangnya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif											
2.	Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif	253	194	148	57	164	NA	40	148	57	Tercapai
<b>E. MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI</b>											
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani public secara prima</b>											
<b>Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel</b>											
1.	Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC	CC	B	BB	A	CC	CC	B	B	Tidak Tercapai
2.	Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	Tercapai
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	CC	B	BB	NA	NA	B	B	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
4.	Opini BPK (Hasil pemeriksaan BPK)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	Tercapai
5.	Level Maturitas SPIP	1	1	1	2	3	1	1	1	1	Tidak Tercapai
<b>Sasaran 2 : Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima</b>											
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2,65	3,2	3,3	3,4	3,5	3,1	3,2	3,21	3,39	Tidak Tercapai
<b>F.</b>	<b>MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI</b>										
<b>Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebhinekaan</b>											
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat</b>											
1.	Angka kriminalitas	<0,142	<0,143	<0,144	<0,145	<0,146	0,142	0,143	0,144	<0,145	Tercapai
2.	Prevalensi HIV/AIDS	5	4,5	4	3,5	3	0,29	0,36	0,15	0,15	Tercapai
3.	Prosentase penurunan kasus narkoba	10	10	10	10	10	6,32	23,78	21,99	21,99	Tercapai
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat</b>											
1.	Prosentase tannggap penanganan bencana	85	87	90	95	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD 2015 - 2019					Capaian Indikator Kinerja 2015 - 2018				Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan keharmonisan antar umat beragama, antar suku,ras, dan golongan</b>											
1.	Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.	Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	80	85	90	95	100	100	100	100	100	Tercapai

## 2.6. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

### 2.6.1. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2016

#### 2.6.1.1. LINGKUNGAN HIDUP

Realisasi pencapaian SPM yang sudah dicapai oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

##### 1. *Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air*

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan air. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 2.116**

#### **Target dan Realisasi pelayanan pencegahan pencemaran air**

No	Jenis Layanan	Target (%)						Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	40	60	100	100	100	100	73,3	78,05	100	100	67,5	61,25

Berdasarkan tabel diatas bahwa Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2015 sebanyak 27 kegiatan usaha (67,5 %) dari target 40 kegiatan usaha (100%),

Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase pencapaian kinerja pada tahun 2016 terhadap indikator **tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair** terealisasi 153,1% atau **kategori tercapai**. Angka tersebut didapatkan dari hasil pemantauan kualitas limbah cair pada 40 perusahaan didapatkan 11 perusahaan yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dan dari hasil

pemantauan kualitas sarana sanitasi masyarakat pada 40 titik pantau didapatkan 38 titik pantau yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

**2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak;**

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan udara dari sumber tak bergerak. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel 2.117**  
**Target dan Realisasi pelayanan pencemaran udara dari sumber Tak Bergerak**

No	Jenis Layanan	Target (%)						Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak	60	80	100	100	100	100	64	94	100	100	100	100

Pengujian dan Analisa Kualitas Udara sumber tidak bergerak/ cerobong dilakukan di 7 (tujuh) lokasi titik sampel di Kota Bogor dengan rincian lokasi pengambilan sample sebagaimana Tabel 2.118.

**Tabel 2.118**  
**Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara sumber tidak bergerak**

No	Lokasi	Jumlah Sample	Ket
1.	PT. Nutrifood Indonesia	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
2.	PT. Goodyear	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
3.	PT. Unitex	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
4.	PT. Coast Rejo	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
5.	PT. Boehringer Ingelheim	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
6.	PT. Astra Daihatsu	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali
7.	PT. Tanah Sumber Makmur	1 ( Satu)	1 ( Satu) Kali

Hasil dari pengujian dan analisa udara dari sumber tidak bergerak bahwa Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang berasal dari cerobong seperti: NH<sub>3</sub>, Cl<sub>2</sub>, HCl, HF, NO<sub>2</sub>, Opaasitas, Partikel,

SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S dan logam berat (Hg, As, Sb, Cd, Zn dan Pb) masih berada dibawah baku mutu sehingga masih tergolong dalam **kategori baik**.

### **3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa.**

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibandingkan dengan luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel 2.119**  
**Target dan Realisasi pelayanan informasi status kerusakan Lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa**

No	Jenis Layanan	Target (%)						Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa;	60	80	100	100	100	100	0	0	0	0	0	100

Dari data hasil analisa kesuburan tanah seluruh titik sampling yang di lakukan pada berbagai peruntukan tanah di kota bogor dikategorikan subur. Hasil analisa logam berat potensial yang dianalisis, memperlihatkan hasil dari seluruh titik sampling yang dilakukan nilainya rendah. Mengacu pada PP RI No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, berbagai indikator dari parameter-parameter yang dianalisa masih pada ambang batas yang diperkenankan. Hasil analisis tanah di kota bogor dari berbagai kriteria masih digolongkan baik, belum mengalami kerusakan. Namun kegiatan ini belum dapat menggambarkan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa, karena belum dapat dihitung luasan lahan yang telah rusak di daerah produksi biomassa. Kegiatan ini hanya mengukur tingkat pencemaran per titik lokasi.

**4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.**

Indikator SPM ini menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut

**Tabel 2.120**  
**Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya**  
**Dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan**

No	Jenis Layanan	Target (%)						Realisasi (%)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

**2.6.2. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2017**

**2.6.2.1. PENDIDIKAN**

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pendidikan yakni (1) pendidikan dasar; dan (2) pendidikan anak usia dini. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.121**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

<b>Pelayanan Dasar</b>		<b>2017</b>
1. Pendidikan Dasar		109,01%
2. Pendidikan Anak Usia Dini		

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pernyataan standar pelayanan minimal untuk pendidikan dasar adalah setiap warga negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sampai dengan semester 1 tahun 2017, capaian pelayanan ini sebesar 109,01%. Capaian ini diperoleh dari jumlah warga kota Bogor usia 7 s.d. 15 tahun sebanyak 168.463 orang, sedangkan warga usia 7 s.d. 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor sebanyak 183.648 orang. Capaian yang melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang berasal dari luar kota Bogor, namun bersekolah di Kota Bogor.

#### **2.6.2.2. KESEHATAN**

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat dua belas jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.122**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan**

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
1) Pelayanan kesehatan ibu hamil	50,76%
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin	49,98%
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	55,85%
4) Pelayanan kesehatan balita	59,72%
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	75,65%
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif	11,01%
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	72,45%
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	19,81%
9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	26,08%

10) Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	63,96%
11) Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%
12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	89%

### 2.6.2.3. PEKERJAAN UMUM

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pekerjaan Umum yakni (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.123**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum**

Pelayanan Dasar	Capaian
3. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,58%
- Non Perpipaan	143,30%
- Perpipaan (PDAM)	99,97%
4. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	107,61%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### A. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 90,55% dari target sebesar 90,03%. Capaian tersebut diperoleh melalui pelayanan air bersih non perpipaan sebesar 1,82% dan perpipaan sebesar 88,73%. Pelayanan air bersih melalui jaringan non perpipaan merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pembangunan infrastruktur jaringan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terlayani perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pembangunan infrastruktur jaringan air bersih sampai dengan tahun 2017 telah

mencapai 19.332 SR, dimana 67 SR merupakan hasil pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Kencana.

Sedangkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan merupakan hasil pelayanan yang dilaksanakan oleh PDAM. Sampai dengan tahun 2017 penduduk kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 900.862 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 974.603 jiwa atau sebesar 88,73% dari total proyeksi jumlah penduduk kota Bogor tahun 2017 sebanyak 1.098.397 jiwa.

Upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan diantaranya penanganan produksi dan penanganan distribusi. Penanganan produksi dilakukan diantaranya melalui penambahan kapasitas produksi di instalasi pengolahan air Dekeng 1 dan 2; pengadaan dan pemasangan meter induk produksi; penanganan permasalahan sampah melalui pemasangan screen sampah; serta pengadaan IPA Portable di Kota Batu dengan kapasitas 30 liter/detik. Sedangkan penanganan distribusi dilakukan diantaranya melalui penggantian meter induk distribusi; pemasangan alat level control di Reservoir; pengadaan Air Valve dan Reservoir Portable; pembentukan Distric Metering Area (DMA); serta pemasangan Tangki Hydrant Umum (TAHU). Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dapat terealisasi sebesar 72,1% dari target sebesar 67%. Data tersebut diperoleh dari jumlah rumah tangga yang memiliki sarana jamban (septic tank) sampai dengan tahun 2017 mencapai 185.214 SR, dan 133.534 diantaranya telah terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota.

Sistem jaringan dan pengolahan air limbah diselenggarakan melalui 3 sistem yakni sistem onsite individual, sistem komunal, serta sistem intermediate. Pengolahan air limbah domestik melalui sistem onsite (setempat) yaitu pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan menggunakan sistem pelayanan on call (berdasarkan permintaan/kebutuhan masyarakat), dimana pada tahun 2017 telah terlayani sebanyak 130.565 SR. Sarana penyedotan lumpur tinja yang dioperasikan adalah 4 unit vacum truk tinja dengan kapasitas 2-3 m<sup>3</sup>, 2 unit motor tanki dengan kapasitas 0,4 m<sup>3</sup>, serta 1 unit bus toilet. Lumpur tinja hasil penyedotan dari septic tank diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tegal Gundil, untuk kemudian dilakukan pengujian kualitas effluent air limbah sebagai audit internal di laboratorium UPTD Pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi ketentuan baku mutu air limbah domestic.

Pengolahan air limbah domestik melalui sistem komunal merupakan sistem pengolahan berbasis masyarakat dimana pelaksanaannya yang dimulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2017 telah dilakukan pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis komunal sebanyak 855 SR di 14 lokasi, dimana pembiayaannya bersumber dari Islamic Development Bank (IDB) melalui APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian apabila dikumulatifkan sampai dengan tahun 2017 telah terbangun infrastuktur pengolahan air limbah berbasis komunal sebanyak 2.547 SR.

Sedangkan sistem pengolahan air limbah domestik intermediate (terpusat) yaitu pelayanan perpipaan air limbah untuk sambungan rumah yang dikumpulkan dan dialirkan dengan sistem pemompaan dan gravitasi untuk kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tegal Gundil. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penambahan cakupan wilayah pelayanan berupa penyediaan jaringan perpipaan air limbah, sambungan rumah, dan bangunan pelengkap pada sistem intermediate sebanyak 16 SR. Sehingga apabila dikumulatifkan sampai dengan

tahun 2017 pelayanan air limbah domestik melalui sistem intermediate telah mencapai 422 SR.

#### 2.6.2.4. PERUMAHAN RAKYAT

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.124**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat**

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%
2. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota	0,68%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

*A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana*

Tahun 2017 terdapat 2 KK yang menjadi korban bencana dengan 11 anggota keluarga. Pada tanggal 13 November 2017 korban bencana tersebut telah difasilitasi untuk menempati rumah susun milik Pemerintah Kota Bogor. Sehingga pada tahun 2017 kinerja pelayanan dasar ini mencapai 100%.

*B. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota*

Tahun 2017 terdapat 1 KK yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota dan telah difasilitasi untuk menempati 2 unit hunian di rumah susun milik Pemerintah Kota Bogor.

#### **2.6.2.5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Namun dikarenakan terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan kelima jenis pelayanan dasar tersebut, maka dalam laporan ini masih menjelaskan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan (2) penanggulangan bencana kebakaran. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.125**

#### **Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Pelayanan Dasar	Capaian
1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	
a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	78,95%
b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100%
c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	100%
2. Penanggulangan bencana kebakaran	
a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	125%
b. Tingkat waktu tanggap	95%
c. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	54%
d. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	167%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

*A. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat*

1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Pada tahun 2017 jumlah pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau sebanyak 152 kasus. Dari total kasus tersebut, 78,95% atau 120 kasus dapat diselesaikan.

2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Pada tahun 2017 terdapat masing-masing 1 kelompok di 6 kecamatan. Seluruh kelompok tersebut melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebanyak 3 kali/hari, sesuai dengan target SPM yang ditetapkan.

3. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat

Sampai dengan tahun 2017 terdapat 3739 orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan 3563 RT di wilayah Kota Bogor. Sehingga setiap RT memiliki minimal 1 orang petugas Linmas. Jumlah tersebut telah sesuai dengan target SPM.

*B. Penanggulangan bencana kebakaran*

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Luas Kota Bogor adalah 11850 ha, dan seluruhnya termasuk ke dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Capaian tersebut telah melebihi target SPM yang hanya sebesar 80%.

2. Tingkat waktu tanggap

Sepanjang tahun 2017 terjadi kasus kebakaran di WMK sebanyak 28 kejadian, dan 20 kejadian diantaranya (71,43%) dapat ditangani dalam waktu tanggap. Sehingga untuk pelayanan dasar ini baru mencapai 95% dari target SPM sebesar 75%.

3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Pemerintah Kota Bogor memiliki 72 orang aparatur pemadam kebakaran, namun baru 33 orang (45,83%) diantaranya yang telah memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi. Capaian tersebut baru sebesar 54% dari target SPM dimana minimal 85% aparatur pemadam kebakaran harus memenuhi standar kualifikasi.

4. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK

#### 2.6.2.6. SOSIAL

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.126**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial**

Pelayanan Dasar	Tahun 2017
1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	87,56%
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	96,10%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti

Tahun 2017 total jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 193 orang, dan 169 orang (87,56%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

B. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti

Tahun 2017 total jumlah anak terlantar sebanyak 131 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

C. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti

Tahun 2017 total jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 150 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

D. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Tahun 2017 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 233 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

E. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Pada tahun 2017 terdapat 7000 orang korban bencana, dan 6727 orang diantaranya telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

### 2.6.3 PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL (SPM) TAHUN 2018

#### 2.6.3.1. PENDIDIKAN

Pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pendidikan yakni (1) pendidikan dasar; dan (2) pendidikan anak usia dini. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.127**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan**

Pelayanan Dasar	Tahun 2018
<b>1. Pendidikan Dasar</b>	103,38%
<b>2. Pendidikan Kesetaraan</b>	27,93%
<b>3. Pendidikan Anak Usia Dini</b>	47,90%

Adapun penjelasan capaian jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Pendidikan Dasar

Capaian pelayanan ini sebesar 103,38%. Capaian ini diperoleh dari jumlah warga kota Bogor usia 7 s.d. 15 tahun sebanyak 172.817 orang, sedangkan warga usia 7 s.d. 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor sebanyak 178.654 orang. Capaian yang melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang berasal dari luar kota Bogor, namun bersekolah di Kota Bogor.

B. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan di Kota Bogor pada Tahun 2018 mencapai 27,93% dari target pada SPM sebesar 100%. Dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan adanya penurunan warga belajar di non-formal, diprediksi melanjutkan ke pendidikan formal.

C. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bogor pada Tahun 2018 mencapai 47,90% dari target SPM sebesar 100%. Dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Hal ini disebabkan kenaikan APK PAUD, dikarenakan masyarakat sudah memahami akan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini.

### **2.6.3.2. KESEHATAN**

Terdapat dua belas jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.128****Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	2018
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	99,60%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	96,05%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,70%
4	Pelayanan kesehatan balita	90,10%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100,00%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100,00%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100,00%
10	Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	100,00%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100,00%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	96,00%

Adapun penjelasan ketidak tercapaian SPM tersebut di atas adalah:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2018 tercapai sebesar 99,60%, hal ini disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki penyakit lain sehingga terjadi komplikasi hingga kematian. Pencegahan komplikasi penyakit penyerta pada ibu hamil harus dilakukan dengan meningkatkan program KB pada wanita usia subur yang menderita penyakit penyerta untuk mencegah atau menunda kehamilan pada wanita tersebut. Upaya lain yang harus dilakukan adalah deteksi dini dan penanganan penyakit penyerta melalui pelayanan Antenatal Care Terpadu sesuai standar yang melibatkan disiplin medis lainnya (Spesialis Penyakit Dalam, Saraf,

Bedah, dll) sehingga dapat melakukan penatalaksanaan yang baik untuk penyakit penyerta nya.

- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin tercapai sebesar 96,05%, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di faskes rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif (ICU).
- c. Pelayanan kesehatan balita tercapai 90,10%, upaya yang perlu dilakukan salah satunya adalah dengan peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD dan peningkatan pelayanan imunisasi dasar lanjutan dengan meningkatkan sweeping imunisasi, juga didukung dengan kegiatan bulan pemantauan tumbuh kembang balita yang dilaksanakan di puskesmas, posyandu maupun PAUD/ TK se Kota Bogor dengan melibatkan lintas sektor yaitu PKK, kader posyandu, kecamatan dan kelurahan serta guru PAUD/TK yang sudah dilatih Simulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sehingga seluruh balita dapat terpantau tumbuh kembangnya melalui kegiatan SDIDTK.
- d. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tercapai sebesar 96,00%, hal ini disebabkan karena :
  1. Penemuan kasus masih sulit terutama untuk komunitas dan kalangan ekonomi menengah ke atas, dikarenakan faktor sosial budaya, stigma dari masyarakat dan akses layanan untuk kalangan ekonomi menengah atas masih bervariasi dan tertutup.
  2. Masih banyak Rumah Sakit di Kota Bogor yang belum membuka layanan HIV. Dari 20 Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor, 6 Rumah Sakit sudah memberikan layanan HIV, 8 Rumah Sakit memberikan layanan PDP.
  3. Masih banyak Ibu hamil ODHA yang menyembunyikan statusnya karena sulit untuk mendapatkan perawatan persalinan di layanan kesehatan, jika mereka membuka statusnya.
  4. Masih banyak ODHA yang tidak memeriksakan rutin kondisi CD 4 nya.

5. Masih ada sekolah, universitas, instansi pemerintah dan swasta yang menolak untuk diberikan pengetahuan tentang HIV/AIDS.
6. Kemauan kelompok resiko untuk memeriksakan HIV ke sarana kesehatan masih kurang.
7. Sulit untuk menjangkau sasaran pada populasi kunci.
8. Kemauan wanita penjaja seks (WPS) untuk menggunakan kondom kurang karena kondom tidak nyaman, kualitas kondom tidak baik.
9. Pasien belum siap untuk minum obat Anti Retro Viral (ARV) karena pengetahuan klien terhadap ARV belum optimal.
10. Pasien menghilang setelah diketahui positif HIV, dikarenakan masih banyak pasien yang belum menerima terhadap kondisi yang diadapinya.

### 2.6.3.3. PEKERJAAN UMUM

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pekerjaan Umum meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.129**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum**

Pelayanan Dasar	Capaian
<b>1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>	94,65%
<b>2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik</b>	67,36%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 94,65% dari

target sebesar 91,6%. Sampai dengan tahun 2018 penduduk kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 1.064.362 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 1.064.362 jiwa atau sebesar 94,65% dari total proyeksi jumlah penduduk kota Bogor tahun 2018 sebanyak 1.124.539 jiwa.

- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- Pada tahun 2018 jumlah warga negara yang memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standar sebanyak 728.215 jiwa.

#### **2.6.3.4. PERUMAHAN RAKYAT**

SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.130**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat**

Pelayanan Dasar	Tahun
	2018
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-

Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kota, dilakukan dengan penyediaan Rumah Susun Sewa Pemerintah Kota Bogor, namun untuk Tahun 2018 tidak dilakukan relokasi, hanya dilakukan rehabiiltasi rumah layak huni bagi korban bencana.

### 2.6.3.5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; dan (2) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.131**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Pelayanan Dasar	Tahun
	2018
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	
d. Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	85%
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
a. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	
3. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
a. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
a. Warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana	

	100%
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kenakaran	
e. Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	80%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
  2. Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) kasus. Dari total kasus tersebut, 90% atau 66 (enam puluh enam) kasus dapat diselesaikan.
  3. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
  4. Pada tahun 2018 dilakukan patroli dengan anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) orang di 6 kecamatan, dengan frekuensi patroli sebanyak 3 (tiga) kali/hari untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  5. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat
  6. Terdapat 3739 orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang tersebar di 68 Kelurahan se-Kota Bogor.
- C. Penanggulangan bencana kebakaran
1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran  
Luas Kota Bogor adalah 11850 ha, dan seluruhnya termasuk ke dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Capaian yang belum memenuhi target SPM dikarenakan beberapa faktor kondisi di lapangan antara lain :
    2. Kendala dengan kemacetan jalan raya,
    3. Kurangnya Pos Sektor Damkar,
    4. Kurangnya Kendaraan Pemadam kebakaran.
    5. Tingkat waktu tanggap

Sepanjang tahun 2018 terjadi kasus kebakaran di WMK sebanyak 62 kejadian, dan 54 kejadian diantaranya (95%) dapat ditangani

dalam waktu tanggap. Sehingga untuk pelayanan dasar ini baru mencapai 80% dari target SPM sebesar 100%.

6. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

Pemerintah Kota Bogor memiliki 72 (tujuh Puluh dua) orang aparatur pemadam kebakaran, diantaranya sebanyak 30 (tiga puluh) personil sudah tersertifikasi dan terlatih. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK sebanyak 9 (sembilan) unit.

#### **2.6.3.6. SOSIAL**

Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

**Tabel 2.132**

**Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial**

Pelayanan Dasar	Tahun
	2018
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	92,17%
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	104%
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	66%
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	18,02%
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	100%

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 230 orang dan sebanyak 212 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Sehingga selama tahun 2018 total jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 230 orang, dan 212 orang (92,17%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
4. Pada tahun 2018 terdapat anak terlantar sebanyak 50 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 52 orang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses pengangkatan 8 anak / adopsi. Tetapi dalam hal ini 5 (lima) anak belum selesai untuk prosesnya (masih dalam tahap persidangan) .
5. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
6. Pada tahun 2018 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 150 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 100 orang.
7. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti  
Pada tahun 2018 terdapat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 233 orang dan yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 42 orang. Sehingga selama tahun 2018 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 42 orang, dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
8. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana  
Pada tahun 2018 terdapat 7.029 orang korban bencana, dan 7.029 orang diantaranya telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

## 2.7. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasar pada hasil analisis tiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bogor dengan total sebesar 199 indikator yang terdiri dari 4 pencapaian yakni tercapainya target nasional (SS), indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), indikator ada data tetapi belum ada dalam target (TT) serta belum terdapat data terkait (NA). Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada setiap pilar yaitu sebagai berikut.

### 2.7.1. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 91 indikator. Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.133**

**Capaian Indikator TPB Pada Organisasi perangkat daerah pada Pilar Sosial**

No	Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
1	Dinas Sosial	3	0	0	6	9
2	Dinas Kesehatan	8	3	1	16	28
3	Dinas PPKB	2	3	0	6	11
4	Dinas Pendidikan	4	6	0	7	17
5	Disdukcapil	0	0	0	1	1
6	BPBD	1	1	0	7	9
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	1	0	0	0	1
8	PLN	0	0	0	1	1
9	Dinas Ketahanan Pangan	1	0	2	2	5
10	BPJS	0	1	0	0	1
11	dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak	3	0	0	3	6
12	PUPR	0	2	0	0	2
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>91</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari total 91 indikator di pilar sosial, terdapat 23 indikator atau 25,27 % yang mencapai target nasional dalam RPJMD Kota Bogor. Sebanyak 16 indikator atau 17,58 % belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 3 indikator atau 3,30 % indikator yang tidak memiliki data dan 49 indikator ada data tetapi tidak ada dalam target.

Dari 12 OPD tersebut, Dinas kesehatan merupakan OPD yang memiliki target indikator TPB paling banyak pada pilar sosial yaitu sebanyak 28 indikator.

### 2.7.2. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 44 indikator. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.134**

**Capaian Indikator TPB Pada Organisasi perangkat daerah pada Pilar Ekonomi**

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
dispenda	0	2	0	1	3
Disnaker	1	2	0	1	4
UMKM	0	0	2	0	2
Disparbud	0	1	2	2	5
Indag	2	1	0	2	5
Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0	2	2
Dinas Sosial	1	1	0	1	3
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	3	3
BPJS	1	0	0	0	1
Diskominfo	1			3	4
disdukcapil	0	0	0	1	1
BPS	1	0	1	4	6
Pemerintah Daerah	0	0	0	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>41</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar ekonomi. Dari total 41 indikator di pilar ekonomi, terdapat 7 indikator atau 17,07 % yang mencapai target nasional. Sebanyak 7 indikator atau 17,07% belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 22 indikator atau 53,66% indikator belum memiliki data.

### 2.7.3. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 41 indikator. Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan capaian per OPD pilar lingkungan,

ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar lingkungan.

Dari total 44 indikator di pilar lingkungan, terdapat 3 indikator yang mencapai target, 9 indikator **dilaksanakan belum mencapai target (SB)**, 2 indikator **ada data tidak ada target (TT)** dan 27 indikator **tidak ada data (NA)**. Persentase capaian indikator dalam pilar lingkungan disajikan pada diagram berikut ini.

**Tabel 2.135**

**Kontribusi Organisasi perangkat daerah dalam capaian indikator Pilar Lingkungan**

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
PDAM	1	1	0	0	2
Dinas Perumahan dan Permukiman	0	4	0	4	8
PUPR	0	2	0	1	3
Dinas Perhubungan	0	0	1	2	3
Dinas Lingkungan Hidup	0	2	1	4	7
Indag	0	0	0	1	1
Disnaker	0	0	0	1	1
Bappeda	0	0	0	6	6
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	1	1
BPBD	2	0	0	5	7
Kepolisian	0	0	0	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>41</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

#### 2.7.4. Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Total untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 22 indikator. Capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.136**

**Kontribusi Organisasi perangkat daerah dalam capaian indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola**

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	ada data tidak ada target (TT)	tidak ada data (NA)	Jumlah
Kepolisian	0	0	1	2	3
dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan anak	1	0	2	2	5
dispenda	1	0	0	1	2
LPSE	0	0	0	2	2
BPS	2	0	0	4	6
Disdukcapil	1	1	0	2	4
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>22</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata-mata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2018, proyeksi Tahun 2019 dan 2020. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2018, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021. Bagian akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2020

#### **3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH**

Arah Kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2018, proyeksi tahun 2019 dan prospek dan tantangan perekonomian tahun 2020. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah harus mampu meningkatkan perekonomian kota Bogor yang berdaya saing dan berbasis pada potensi daerah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan yang berkeadilan.

##### **3.1.1. KONDISI PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA BOGOR**

Pembangunan Ekonomi Kota Bogor sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur dari aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni :

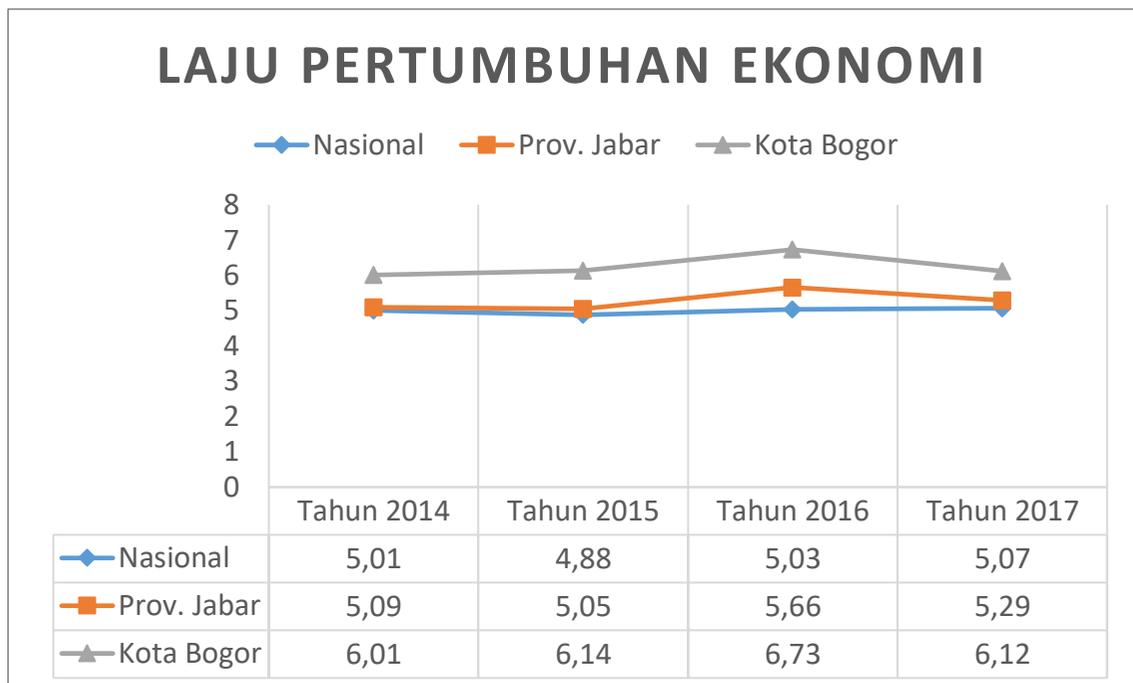
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor
2. Produk domestic regional bruto (PDRB)
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita)
4. Tingkat Inflasi daerah
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan social dan ekonomi (Indeks Gini rasio)
6. Penurunan Angka Kemiskinan
7. Kondisi Ketenagakerjaan

Berikut ini adalah capaian kinerja indikator ekonomi kota selama kurun waktu 2015-2018.

### 3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor 2015-2019

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Bogor pada periode 2014 - 2017 dapat tetap tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 6,01%; 6,14%; 6,73%; dan 6,12%, sementara kondisi pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi dan bahkan ditingkat nasional cenderung melemah dan pada posisi dibawah 5.1% di level nasional dan dibawah 5.3%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor 2017 didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang 95,65 terhadap total PDRB.

Grafik 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2014-2017



Sumber : BPS Jabar

Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi kota Bogor 2014-2017 sebagaimana tergambar diatas diturunkan dari kondisi perkembangan PDRB Kota Bogor tahun 2010-2017 yang didasarkan pada Harga Konstan Tahun 2010 menurut pengeluaran, sebagaimana tergambar pada matrik berikut ini :

Tabel. 3.1. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kota Bogor Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	5,19	4,33	5,83	7,07	7,69
2 Konsumsi LNPRT	14,20	2,96	-7,46	9,88	4,44
3 Konsumsi Pemerintah	1,57	2,65	5,10	3,39	4,56
4 PMTB	2,87	17,49	8,25	5,82	7,43
5 Perubahan Inventori	-9,37	-0,75	-4,69	2,05	1,91
6 Net (Expor Impor)	-0,34	8,71	5,19	5,63	9,49
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>6,04</b>	<b>6,01</b>	<b>6,14</b>	<b>6,73</b>	<b>6,12</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bogor

Laju pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud diatas diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume dan kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan serta Pengadaan Listrik dan Gas juga turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2017.

### 3.1.1.2. Kondisi Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bogor Tahun 2014-2017

Pada periode tahun 2014 - 2017 PDRB Kota Bogor atas dasar Harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 29.147 miliar Rupiah (2014); 32.365 miliar Rupiah (2015) ; 35.401 miliar Rupiah (2016) dan 38.506 miliar Rupiah (2017) . Berdasarkan proyeksi, laju pertumbuhan ekonomi kota Bogor tahun 2018 diprediksi meningkat

dari tahun 2017 hingga mencapai level 6,48%. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Bogor atas dasar harga berlaku pada periode 2011-2017 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut ini:

Tabel. 3.2. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, kota Bogor Tahun 2013-2017

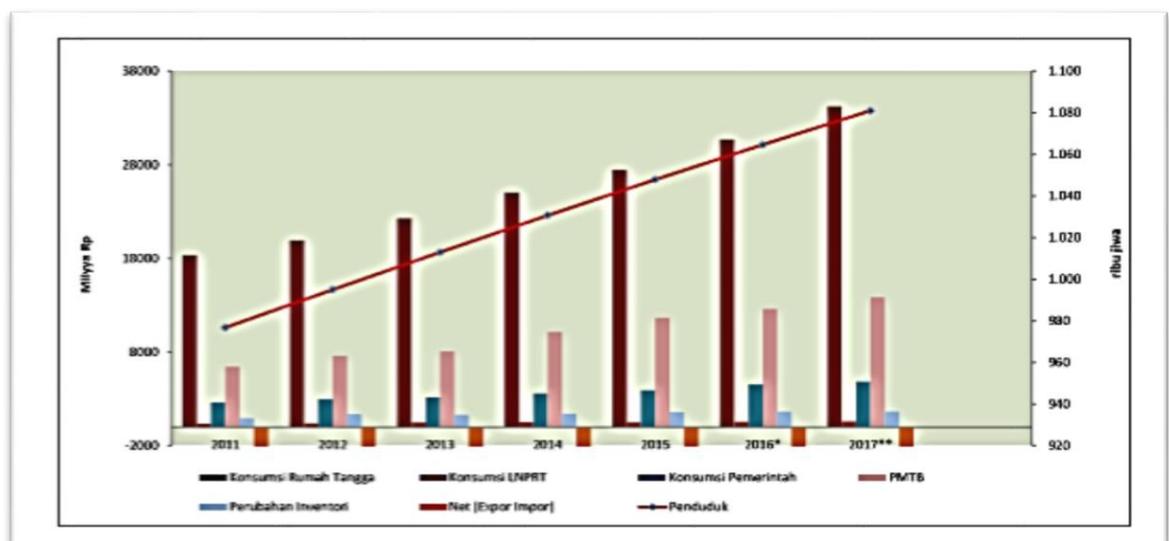
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	25.044,41	27.446,35	30.707,33	34.233,81	37.214,83
2 Konsumsi LNPRT	507,49	545,34	530,16	589,08	620,59
3 Konsumsi Pemerintah	3.188,62	3.595,85	3.940,84	4.549,12	4.844,96
4 PMTB	8.092,16	10.163,21	11.686,94	12.618,18	13.876,45
5 Perubahan Inventori	1.314,12	1.435,37	1.596,57	1.652,44	1.671,83
6 Net (Ekspor Impor)	(12.064,48)	(14.038,93)	(16.350,99)	(18.241,82)	(19.722,19)
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>26.082,33</b>	<b>29.147,19</b>	<b>32.110,85</b>	<b>35.400,81</b>	<b>38.506,47</b>

\* Angka sementara  
\*\* Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bogor

Grafik 3.2. PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, Kota Bogor Tahun 2011-2017



Sumber : BPS Kota Bogor

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan

terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kota Bogor pada periode 2011-2017 dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut ini:

Tabel. 3.3. PDRB atas dasar harga Konstan menurut pengeluaran, kota Bogor Tahun 2013-2017

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	21.680,99	22.619,23	23.937,06	25.628,24	27.598,60
2 Konsumsi LNPRT	450,92	464,28	429,64	472,08	493,02
3 Konsumsi Pemerintah	2.517,89	2.584,51	2.716,38	2.808,59	2.936,55
4 PMTB	7.198,15	8.457,34	9.154,98	9.687,92	10.408,19
5 Perubahan Inventori	1.174,28	1.165,48	1.110,78	1.133,49	1.155,12
6 Net (Epor Impor)	-10.537,57	-11.455,51	-12.050,23	-12.728,07	-13.936,51
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>22.484,67</b>	<b>23.835,31</b>	<b>25.298,60</b>	<b>27.002,25</b>	<b>28.654,97</b>

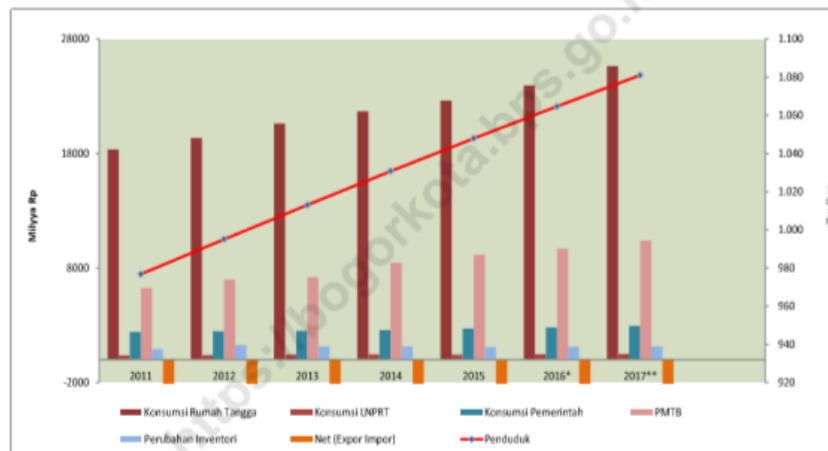
\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bogor

Dari tabel 3.3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan Tahun 2010, menurut pengeluaran di Kota Bogor meningkat, yakni sebesar 19.944 miliar Rupiah (2011); 21.203 miliar Rupiah (2012); 22.284 miliar Rupiah (2013); 23.835 miliar Rupiah (2014); 25.299 miliar Rupiah (2015); 27.002 miliar Rupiah (2016) dan 28.655 miliar Rupiah (2017).

Grafik 3.3. PDRB atas dasar harga Konstan Tahun 2010 menurut pengeluaran, Kota Bogor Tahun 2011-2017

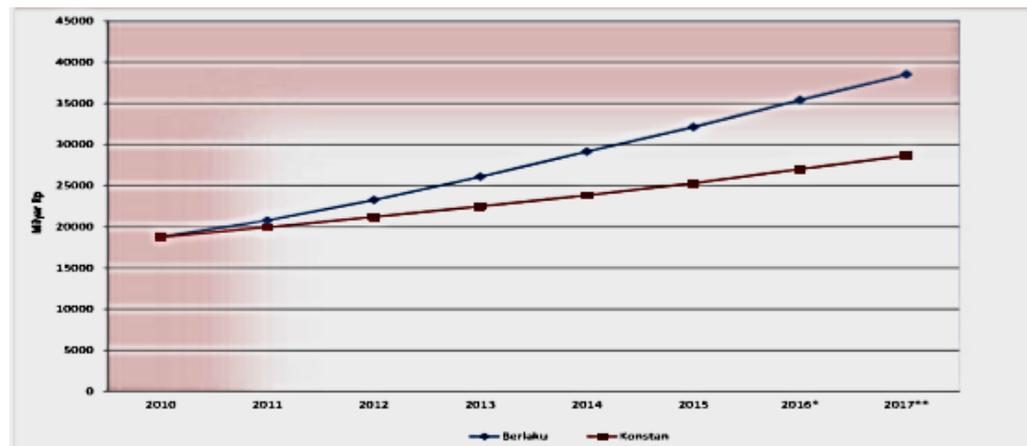


Sumber : BPS Kota Bogor

Sedangkan dari grafik 3.3, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor cenderung melambat, yakni dari 6,73 persen pada tahun 2016 menjadi 6,12 persen pada tahun 2017.

Berikut adalah gambaran perbandingan perkembangan PDRB atas dasar berlaku dan atas dasar harga konstan Tahun 2010 menurut pengeluaran di Kota Bogor dari tahun 2010-2017, untuk menggambarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor periode tahun 2011-2017.

Grafik 3.4. Perbandingan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Tahun 2010, menurut pengeluaran di Kota Bogor dari tahun 2010-2017



Sumber : BPS Kota Bogor

Nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diabaikan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel. 3.4. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku, menurut pengeluaran, Kota Bogor Tahun 2013-2017

Komponen Pengeluaran	Distribusi PDRB (%)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	96,02	94,16	95,63	96,70	96,65
2 Konsumsi LNPRT	1,95	1,87	1,65	1,66	1,61
3 Konsumsi Pemerintah	12,23	12,34	12,27	12,85	12,58
4 PMTB	31,03	34,87	36,40	35,64	36,04
5 Perubahan Inventori	5,04	4,92	4,97	4,67	4,34
6 Net (Expor Impor)	(46,26)	(48,17)	(50,92)	(51,53)	(51,22)
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bogor

Dilihat dari data, selama periode 2011-2017, PDRB Kota Bogor sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 31,12 hingga 36,04 persen. Komponen net ekspor menunjukkan angka negatif, artinya selama 2011 – 2017 untuk memenuhi pengeluaran Kota Bogor masih dipenuhi oleh banyak impor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 12,72 – 12,58 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2011-2017 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi defisit (merugi).

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Bogor untuk periode 2011 – 2017.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bogor ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Bogor maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (final consumer) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2011 – 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami fluktuasi, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.5. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bogor 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Total Konsumsi Rumah Tangga</b>					
a. ADHB (Miliar Rp)	25.044,41	27.446,35	30.707,33	34.233,81	37.214,83
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	21.680,99	22.619,23	23.937,06	25.628,24	27.598,60
<b>Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)</b>	96,02	94,16	95,63	96,70	96,65
<b>Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)</b>					
a. ADHB	24.722,55	26.628,33	29.303,07	32.153,87	34.426,01
b. ADHK 2010	21.402,35	21.945,07	22.842,41	24.071,15	25.530,40
<b>Pertumbuhan (%)</b>					
a. Total konsumsi RT	5,19	4,33	5,83	7,07	7,69
b. Perkapita	3,33	2,54	4,09	5,38	6,06
<b>Jumlah penduduk (000 org)</b>	1.013,02	1.030,72	1.047,92	1.064,69	1.081,01

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Sumber : BPS Kota Bogor

Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 4,71 hingga 6,05 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumah tangga.

Pada tahun 2011 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 5,45 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 6,48 persen (2012); 5,19 persen (2013); 4,33 persen (2014); 5,83 persen (2015); 7,07 persen (2016) dan 7,69persen (2017). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan konsumsi “riil” rumah tangga (lebih tinggi/lebih rendah) dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran

4 hingga 6 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

### 3.1.1.3. Kondisi Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor Tahun 2014-2017

Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2011-2017

**Perkembangan PDRB Kota Bogor 2011-2017 (atas Dasar Harga Konstan)**

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	206,607.39	211,810.94	216,320.33	220,689.88	225,137.69	230,150.000	233,030.000
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C	Industri Pengolahan	4,007,231.84	4,131,797.48	4,325,575.49	4,564,569.82	4,843,786.77	5,109,360.000	5,351,340.000
D	Pengadaan Listrik dan Gas	880,394.76	929,961.59	980,512.23	1,025,049.18	898,231.83	903,130.000	831,950.000
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,856.18	22,270.23	23,920.45	25,940.03	27,361.22	28,520.000	29,200.000
F	Konstruksi	2,252,195.29	2,423,813.84	2,555,955.98	2,696,289.52	2,848,754.78	3,011,150.000	3,237,080.000
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,536,826.42	4,825,488.12	5,114,427.17	5,367,108.86	5,650,090.63	5,972,860.000	6,306,050.000
H	Transportasi dan Pergudangan	2,157,242.99	2,376,810.85	2,496,952.36	2,637,721.22	2,893,357.49	3,133,320.000	3,366,500.000
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	893,954.15	946,037.32	1,002,846.67	1,059,403.07	1,119,753.25	1,209,840.000	1,304,030.000
J	Informasi dan Komunikasi	885,581.73	978,427.31	1,070,494.44	1,270,614.21	1,506,674.81	1,692,960.000	1,919,820.000
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,316,258.96	1,396,047.71	1,549,250.42	1,606,764.74	1,673,509.16	1,847,070.000	1,951,350.000
L	Real Estate	427,473.20	457,952.52	490,879.30	525,977.17	555,976.80	601,020.000	639,840.000
M,N	Jasa Perusahaan	393,352.20	417,284.07	456,796.50	477,357.37	516,834.82	560,210.000	590,800.000
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	600,564.95	618,461.78	626,872.86	643,234.24	660,730.22	675,930.000	683,610.000
P	Jasa Pendidikan	460,270.91	524,150.97	587,388.87	656,814.29	718,858.00	772,600.000	826,600.000
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	220,015.38	228,926.00	246,968.00	279,823.32	313,143.35	341,270.000	381,440.000
R,S,T,U	Jasa lainnya	685,341.54	714,328.71	739,506.47	777,953.83	843,363.78	912,980.000	1,001,430.000
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>19,944,167.88</b>	<b>21,203,569.63</b>	<b>22,484,667.54</b>	<b>23,835,310.77</b>	<b>25,295,564.62</b>	<b>27,002,250.00</b>	<b>28,654,970.00</b>
							0	0

Sumber: BPS Kota Bogor 2017

Sementara apabila dihitung atas dasar harga berlaku, maka Komposisi PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha dari tahun 2011-2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2011-2017

**Perkembangan PDRB Kota Bogor 2011-2017 (atas Dasar Harga Berlaku)**

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	211.573,3	221.051,7	231.430,6	241.575,7	253.052,0	269.243,76	280.300,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C	Industri Pengolahan	4.143.202,8	4.472.511,4	4.837.978,7	5.393.074,5	5.990.800,6	6.538.497,43	7.064.800,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.011.352,8	1.287.307,4	1.514.730,3	1.980.781,4	1.925.048,9	1.970.849,85	1.949.800,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	21.603,6	24.469,6	27.431,2	28.821,4	31.053,6	36.037,1	41.000,00
F	Konstruksi	2.323.578,6	2.620.431,0	2.984.539,8	3.280.102,8	3.647.802,3	3.937.851,87	4.409.400,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.720.252,9	5.290.523,3	5.927.802,8	6.476.574,5	7.088.063,4	7.843.843,99	8.168.700,00
H	Transportasi dan Pergudangan	2.241.937,2	2.548.233,6	2.894.271,0	3.151.053,5	3.778.163,7	4.210.072,72	4.638.100,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	911.535,9	1.014.412,5	1.170.328,1	1.294.452,1	1.421.383,4	1.588.007,85	1.750.000,00
J	Informasi dan Komunikasi	892.304,2	1.001.861,8	1.085.808,5	1.284.855,5	1.521.416,2	1.710.356,52	1.967.800,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.388.809,4	1.523.198,1	1.805.303,3	1.975.033,7	2.137.419,9	2.475.163,85	2.740.400,00
L	Real Estate	448.943,3	510.487,5	580.016,4	653.307,7	718.268,7	782.754,92	848.500,00
M,N	Jasa Perusahaan	417.781,8	471.293,8	533.352,8	593.885,2	675.244,7	748.138,04	799.300,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	660.127,3	748.018,7	787.881,0	880.978,0	955.878,4	1.019.031,66	1.080.900,00
P	Jasa Pendidikan	483.019,1	578.118,9	685.786,7	798.190,6	907.452,2	997.874,59	1.072.300,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	226.001,6	245.706,7	269.763,2	318.087,4	374.124,9	425.778,6	490.500,00
R,S,TU	Jasa lainnya	684.358,0	720.443,4	785.906,8	816.656,4	825.906,8	1.051.908,75	1.198.800,00
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>20.788.181,8</b>	<b>23.254.889,5</b>	<b>26.082.329,2</b>	<b>29.147.188,4</b>	<b>32.358.877,6</b>	<b>35.400.811,3</b>	<b>38.508.500,00</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>20.788.181,8</b>	<b>23.254.889,5</b>	<b>26.082.329,2</b>	<b>29.147.188,4</b>	<b>32.358.877,6</b>	<b>35.400.811,3</b>	<b>38.508.500,00</b>

Sumber: BPS Kota Bogor 2017

Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 21,21 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,35 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,05 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,45 persen serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,14 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 6 (enam) persen.

Tabel 3.8. Distribusi Persentase PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishery	0,89	0,83	0,78	0,76	0,73
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying					
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	18,55	18,50	18,53	18,47	18,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,81	6,73	5,95	5,57	5,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11
F	Konstruksi/Construction	11,37	11,25	11,27	11,12	11,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	22,73	22,22	21,90	21,59	21,21
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	11,10	10,81	11,67	11,89	12,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	4,49	4,44	4,39	4,48	4,54
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	4,16	4,41	4,70	4,83	5,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	6,92	6,78	6,63	6,99	7,14
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,22	2,24	2,21	2,21	2,20
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	2,04	2,04	2,09	2,11	2,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	3,02	3,02	2,95	2,88	2,81
P	Jasa Pendidikan/Education	2,63	2,74	2,80	2,82	2,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,03	1,09	1,16	1,20	1,27
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	2,94	2,80	2,86	2,97	3,11
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Kota Bogor

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor peranannya berangsur-angsur menurun. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lapangan usaha lain juga menjadi penyebab

turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

#### 3.1.1.4. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2017 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 37.18 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 6.5 persen. Namun apabila kita lihat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota Bogor dari tahun 2012-2017 menggambarkan kecenderungan yang makin menurun.

Grafik 3.5 Perbandingan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat dari tahun 2014-2017



Sumber : BPS Kota Bogor

PDRB per-kapita Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat cukup tinggi di atas 6 persen tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,7 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Tujuan utama yang harus dicapai bukan hanya sekedar peningkatan nilai PDRB per kapita tetapi pemerataan pendapatan dengan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat.

Berikut ini adalah gambaran perbandingan PDRB Per Kapita Penduduk Kota Bogor atas dasar harga berlaku dan PDRB Perkapita

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, yang dapat dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	26.082	29.147	32.111	35.401	38.506
- ADHK 2010	22.485	23.835	25.299	27.002	28.655
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	25.747	28.278	30.642	33.250	35.621
- ADHK 2010	22.196	23.125	24.142	25.362	26.508
Pertumbuhan PDRB					
perkapita ADHK 2010 (%)	4,16	4,19	4,40	5,05	4,52
Jumlah penduduk (000 org)	1.013	1.031	1.048	1.065	1.081
Pertumbuhan (%)	1,80	1,75	1,67	1,60	1,53

\* Angka sementara  
\*\* Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kota Bogor

### 3.1.1.5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita, tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat kesejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Berikut ini adalah gambaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran Tahun 2017.

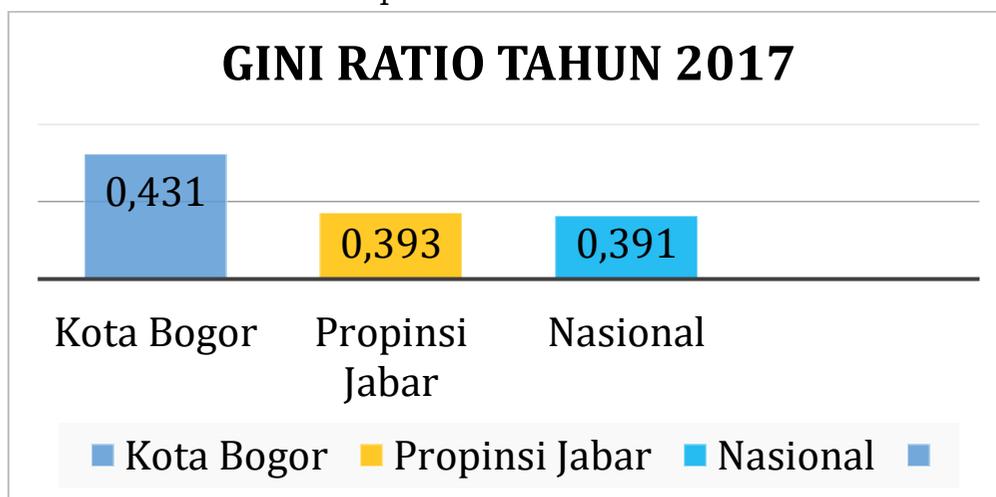
Tabel 3.10 : Gambaran rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran Tahun 2017.

Kelompok Barang	Kuintil Pengeluaran				
	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padi-padian	48.040	52.131	53.888	60.626	63.740
2. Umbi-umbian	2.004	2.585	5.284	11.318	12.642
3. Ikan/udang/ cumi/kerang	11.950	18.309	26.473	42.381	70.152
4. Daging	8.690	14.029	25.525	55.092	94.782
5. Telur dan susu	12.219	17.762	31.331	55.074	74.259
6. Sayur-sayuran	19.190	23.891	35.575	52.614	57.712
7. Kacang-kacangan	4.733	6.778	10.537	14.001	16.338
8. Buah-buahan	5.577	10.397	18.019	34.316	58.213
9. Minyak dan kelapa	9.663	10.024	12.222	17.596	21.388
10. Bahan minuman	11.922	14.534	18.810	20.941	25.935
11. Bumbu-bumbuan	4.019	5.103	8.622	11.090	14.186
12. Konsumsi lainnya	6.336	8.806	14.438	20.792	21.207
13. Makanan dan minuman jadi	74.843	111.844	175.739	264.387	412.762
14. Rokok dan tembakau	39.577	61.838	76.234	82.150	78.820
<b>Jumlah Makanan</b>	<b>258.762</b>	<b>358.030</b>	<b>512.698</b>	<b>742.377</b>	<b>1.022.135</b>
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	94.825	146.798	238.497	371.019	886.145
16. Aneka barang dan jasa	40.749	66.115	104.064	204.315	555.134
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	9.841	17.331	26.018	38.020	92.344
18. Barang tahan lama	1.481	7.367	20.175	33.188	306.133
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	5.810	12.554	27.200	49.643	137.146
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	54	649	2.151	13.804	74.866
<b>Jumlah Bukan Makanan</b>	<b>152.759</b>	<b>250.813</b>	<b>418.106</b>	<b>709.989</b>	<b>2.051.769</b>
<b>Jumlah</b>	<b>411.522</b>	<b>608.843</b>	<b>930.803</b>	<b>1.452.366</b>	<b>3.073.904</b>

Sumber : BPS Kota Bogor

Apabila dilihat dari table diatas, kesenjangan antara pengeluaran perkapita penduduk di kuintil 5 dengan penduduk di kuintil 1 dan 2 masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor masih sangat sulit diturunkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu masih berkisar di angka 0,4. Berikut ini adalah gambaran perbandingan kondisi tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks ketimpangan (gini rasio) kota Bogor, propinsi Jawa Barat dan nasional pada tahun 2017.

Grafik 3.6 : Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2017



Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2018

Kondisi ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di kota Bogor sebagaimana dijelaskan diatas sangat disebabkan karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (powerlessness) masyarakat miskin dalam hal :

- 1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation);
- 2) melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan unproductiveness);
- 3) menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi(inaccessability);
- 4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif;
- 5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin.

### 3.1.1.6. Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Propinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :

#### 1. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bogor mengalami percepatan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada kondisi Awal RPJMD 2015-2019,Angka Kemiskinan di Kota Bogor masih pada angka 7.74%, dan secara terus menerus setiap tahun mengalami penurunan, dan percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Bogor terjadi pada tahun 2018 dimana angka kemiskinan pada tahun 2018 mencapai angka 5.93%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat kota Bogor di penghujung akhir masa RPJMD 2015-2019. Berikut ini adalah gambaran perkembangan penurunan kemiskinan di Kota Bogor dari tahun 2014-2018.

Gambar 3.7 : Perkembangan Penurunan Kemiskinan Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kota Bogor

Selanjutnya untuk menganalisa perkembangan kondisi pengentasan kemiskinan di Kota Bogor juga dapat dilihat dari indikator Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

- 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1),** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.
- 3. Indeks Keparahhan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2),** merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahhan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Berdasarkan publikasi dari BPS Tahun 2016, berikut ini adalah gambaran indikator Indeks Kedalaman kemiskinan yang ada di Kota Bogor dan Kota-kota lainnya di Jawa Barat sebagai pembanding dapat digambarkan dari gambar berikut ini :

Grafik 3.8  
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-  
Kota Di Jawa Barat pada tahun 2014-2017



Sumber : BPS Jabar

Grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya Kota Bogor telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2017 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai indeks dibawah satu yaitu di angka 0.99. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan Konsultasikan ke BPS untuk interpretasi indikator ini. Lain halnya dengan kondisi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kota Depok, Kota Bandung dan Kota Bekasi, walaupun angka kesenjangan sudah berada dibawah 1 namun setiap tahun mengalami fluktuasi nilai indeks.

Lebih lanjut, Indeks Keparahan kemiskinan yang ada di Kota Bogor dan Kota-kota lainnya di Jawa Barat sebagai pembanding dapat digambarkan dari gambar berikut ini :

Grafik 3.9 : Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bogor dan Kota-Kota Di Jawa Barat pada tahun 2014-2017



Sumber : BPS Jabar

Rata-Rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 memang lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi. Namun demikian kecenderungannya sejak tahun 2015 -2017 cenderung menurun dan pada tahun 2017 bahkan lebih rendah dibanding Indeks P2 dari Kota Bandung dan Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bogor selama tahun 2015-2017 cenderung menurun.

## 2. Tingkat Kerawanan Pangan

Kemiskinan juga sangat berkaitan dengan Kerawanan pangan . Melihat data yang ada, kerawanan pangan masih terjadi pada kelompok masyarakat miskin di kota Bogor. Hal ini antara lain dapat dilihat dari :

- a) Rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk di Kuintil 1 dan kuintil 2 masih dibawah standar yaitu baru mencapai 1455.25 Kkal/per kapita/hari untuk penduduk di kuintil 1 dan baru mencapai 1.696.92 Kkal/kapita/hari untuk penduduk pada kuintil 2. Sementara standar rata-rata konsumsi kalori per kapita adalah 2.150 Kkal/kapita/hari.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2017 di Kota Bogor berdasarkan kelompok kuintil pengeluaran dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 3.11 : Rata-rata konsumsi kalori (KKal) per Kapita sehari, menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran di Kota Bogor, Tahun 2017

Kelompok Barang	Kuintil Pengeluaran				
	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padi-padian	731,53	755,74	793,19	815,99	724,09
2. Umbi-umbian	20,22	22,50	43,23	56,25	45,59
3. Ikan/udang/cumi/kerang	20,81	27,82	35,45	38,08	54,06
4. Daging	31,61	54,02	78,40	128,19	161,85
5. Telur dan susu	39,19	55,83	75,78	109,77	123,87
6. Sayur-sayuran	17,65	21,71	27,53	32,85	32,31
7. Kacang-kacangan	29,89	38,05	50,12	51,84	59,85
8. Buah-buahan	13,26	22,17	33,43	45,87	54,29
9. Minyak dan kelapa	167,41	194,75	246,64	300,43	318,14
10. Bahan minuman	47,00	55,42	75,73	76,76	83,50
11. Bumbu-bumbuan	6,36	6,33	11,62	10,26	11,85
12. Konsumsi lainnya	65,24	69,38	90,96	96,17	91,20
13. Makanan dan minuman jadi	265,08	373,20	483,46	536,62	629,89
14. Rokok dan tembakau	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.455,25</b>	<b>1.696,92</b>	<b>2.045,55</b>	<b>2.299,09</b>	<b>2.390,49</b>

Sumber : BPS Kota Bogor

- b) Rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk di Kuintil 1 dan kuintil 2 masih dibawah standar yaitu baru mencapai 38.84 gram/per kapita/hari untuk penduduk di kuintil 1 dan baru mencapai 47.8 gram/kapita/hari untuk penduduk pada kuintil 2. Sementara standar rata-rata konsumsi kalori per kapita adalah 52 gram/kapita/hari.

Rata-rata konsumsi protein per kapita pada tahun 2017 di Kota Bogor berdasarkan kelompok kuintil pengeluaran dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 3.12 : Rata-rata konsumsi protein (gram) per Kapita sehari, menurut kelompok barang dan kuintil pengeluaran di Kota Bogor, Tahun 2017

Kelompok Barang	Kuintil Pengeluaran				
	Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padi-padian	17,18	17,74	18,65	19,20	17,05
2. Umbi-umbian	0,20	0,22	0,44	0,64	0,63
3. Ikan/udang/cumi/kerang	3,84	5,06	6,12	7,05	10,28
4. Daging	2,09	3,35	4,90	7,91	10,55
5. Telur dan susu	2,21	3,15	4,04	5,65	6,81
6. Sayur-sayuran	0,92	1,24	1,53	1,78	1,73
7. Kacang-kacangan	2,91	3,72	4,69	5,03	5,54
8. Buah-buahan	0,14	0,21	0,32	0,45	0,64
9. Minyak dan kelapa	0,02	0,03	0,06	0,12	0,21
10. Bahan minuman	0,44	0,40	0,54	0,54	0,73
11. Bumbu-bumbuan	0,25	0,27	0,44	0,40	0,52
12. Konsumsi lainnya	1,30	1,41	1,79	1,97	1,83
13. Makanan dan minuman jadi	7,33	11,02	14,58	17,59	21,66
14. Rokok dan tembakau	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>38,84</b>	<b>47,80</b>	<b>58,11</b>	<b>68,35</b>	<b>78,18</b>

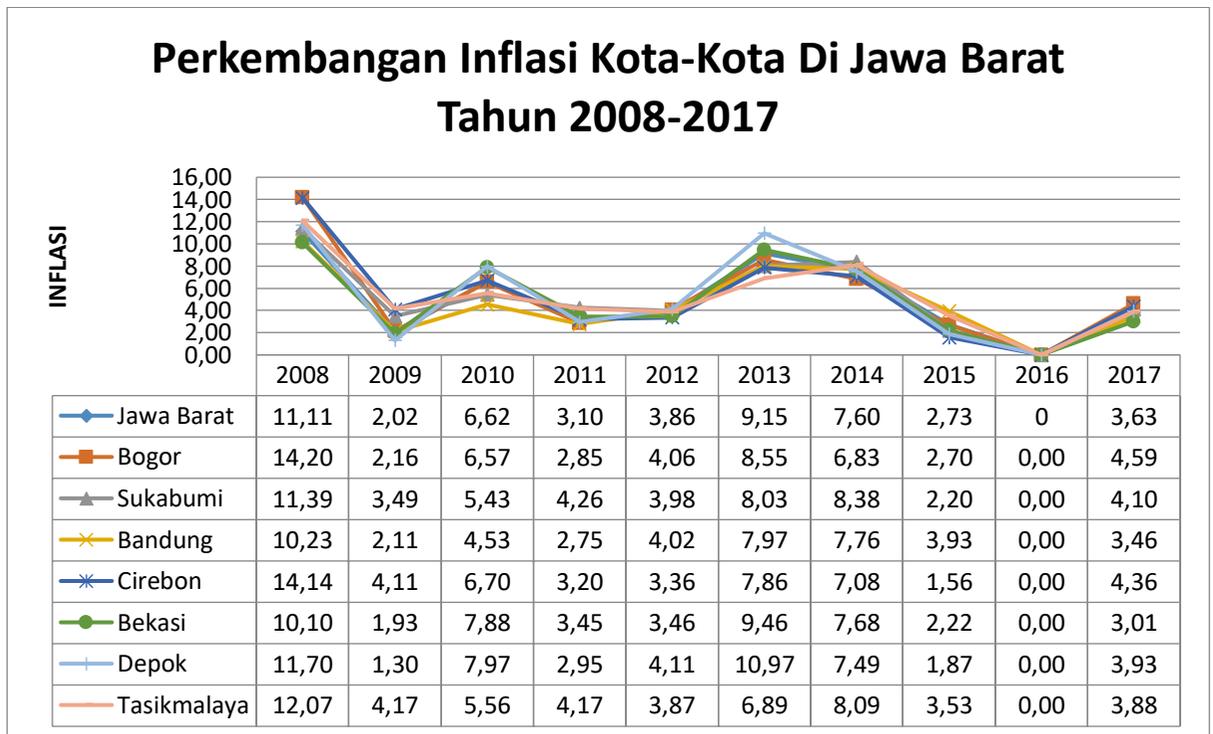
Sumber : BPS Kota Bogor

### 3.1.1.7. Inflasi

Inflasi sangat mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor dimana dalam kurun waktu tahun 2014-2017, angka inflasi di Kota Bogor cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2015, angka inflasi di Kota Bogor mencapai angka yang paling rendah selama kurun waktu tersebut, yaitu turun dari 7.6% di tahun 2014 menjadi 2.73% di tahun 2015. Namun demikian, pada tahun 2017, angka inflasi di kota Bogor cenderung meningkat kembali yaitu di angka 4.59%, dan angka tersebut termasuk angka inflasi tertinggi dibandingkan kota kota di Jawa Barat. Angka Inflasi Kota Bogor pada tahun 2017, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata angka inflasi di Jawa Barat yaitu sekitar 3.63%.

Berikut ini adalah gambaran perkembangan tingkat inflasi yang terjadi di Kota Bogor sejak tahun 2008-2017.

Grafik 3.10 : Perkembangan tingkat inflasi yang terjadi di Kota Bogor dan Kota-Kota Lainnya di Jawa Barat sejak tahun 2008-2017.



Sumber : BPS Kota Bogor

Perbandingan laju inflasi yang terjadi di Kota Bogor dan di Jawa Barat selama tahun 2017, dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 3.13 : Perbandingan Laju Inflasi Kota Bogor dan Laju Inflasi Jawa Barat Tahun 2017

**Laju Inflasi Kota Bogor dan Jawa Barat, 2017**

Bulan	Kota Bogor	Jawa Barat
Januari	1.34	0.77
Februari	0.34	0.36
Maret	0.9	0.08
April	0.07	0.17
Mei	0.57	0.45
Juni	0.63	0.88
Juli	0.14	0.01
Agustus	-0.36	-0.09
September	0.59	0.18
Oktober	0.26	-0.01
November	0.41	0.21
Desember	0.43	0.56

*Sumber : BPS Jawa Barat*

Selanjutnya, pada Desember 2018 Kota Bogor mengalami inflasi sebesar 0,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 136,73. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa dari tujuh kota IHK di Jawa Barat, Kota Bogor masih mengalami inflasi yang paling tinggi diantara 7 kota lainnya di Jawa Barat. Urutan besarnya inflasi mulai dari yang tertinggi yaitu Kota Bogor sebesar 0,78 persen; Kota Bandung sebesar 0,71 persen; Kota Bekasi sebesar 0,59 persen; Kota Cirebon sebesar 0,58 persen; Kota Sukabumi sebesar 0,52 persen; Kota Tasikmalaya sebesar 0,25 persen; dan terakhir adalah Kota Depok sebesar 0,22 persen.

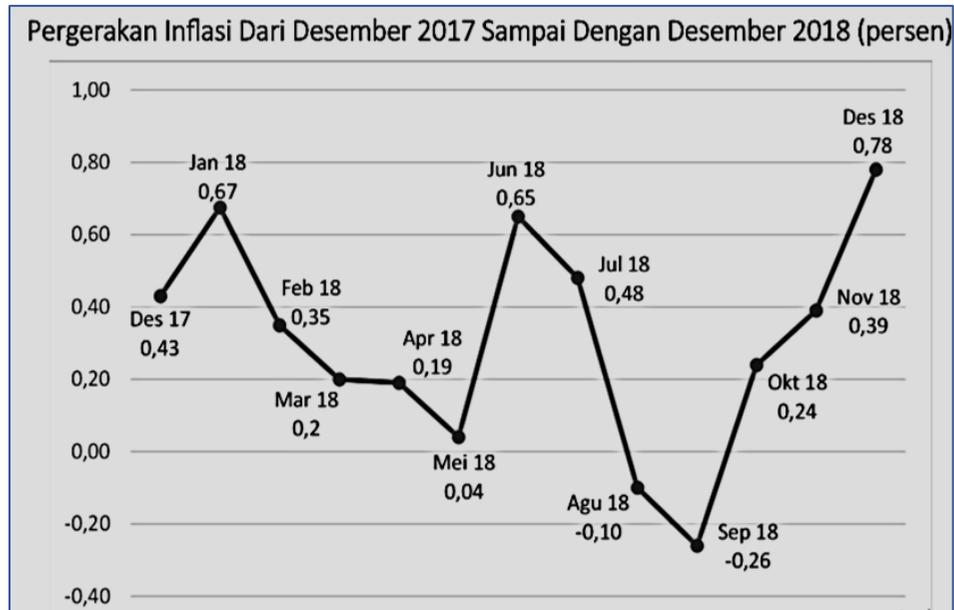
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Dari 7 kelompok pengeluaran, semuanya mengalami inflasi. Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,322 persen sedangkan yang terendah adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,001 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2018 sebesar 3,69 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2018 terhadap Desember 2017) sebesar 3,69 persen. Angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan angka inflasi tahunan kota Bogor pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.59%.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2018 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Desember 2018 terjadi inflasi sebesar 0,78 persen atau terjadi kenaikan Indeks harga Konsumen (IHK) dari 135,67 pada November 2018 menjadi 136,73 pada Desember 2018.

Selama periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, inflasi tertinggi terjadi di bulan Desember yaitu sebesar 0,78 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di September yaitu sebesar 0,26 persen.

Grafik 3. 11: Pergerakan Inflasi Dari Desember 2017 sampai Dengan Desember 2018 (persen)



Sumber : BPS

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 1,46 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,05 persen; kelompok sandang sebesar 0,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,11 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,46 persen, sedangkan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan tidak mengalami perubahan indeks jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Tabel 3.14 : IHK dan Tingkat Inflasi Menurut kelompok Pengeluaran (2012=100)

No	Kelompok/Sub kelompok	IHK Novem-ber 2018	IHK Desem-ber 2018	Inflasi Desember 2018*) (%)	Inflasi Ta-hun 2018**) (%)	Inflasi Ta-hun ke Ta-hun***) (%)	Andil Inflasi/Deflasi Desember 2018 (%)
	UMUM / TOTAL	135,67	136,73	0,78	3,69	3,69	0,780
1	Bahan Makanan	141,6	143,67	1,46	3,55	3,55	0,322
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	136,14	136,62	0,35	6,18	6,18	0,060
3	Perumahan,Air,Listrik,Gas & Bahan Bakar	126,95	128,28	1,05	1,91	1,91	0,307
4	Sandang	116,6	116,93	0,28	4,17	4,17	0,011
5	Kesehatan	134,13	135,62	1,11	2,19	2,19	0,040
6	Pendidikan, Rekreasi Dan Olah Raga	145,64	146,31	0,46	4,66	4,66	0,039
7	Transpor,Komunikasi Dan Jasa Keuangan	146,16	146,16	0,00	4,39	4,39	0,001

**Keterangan:**

\*) Persentase perubahan IHK Desember 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya.

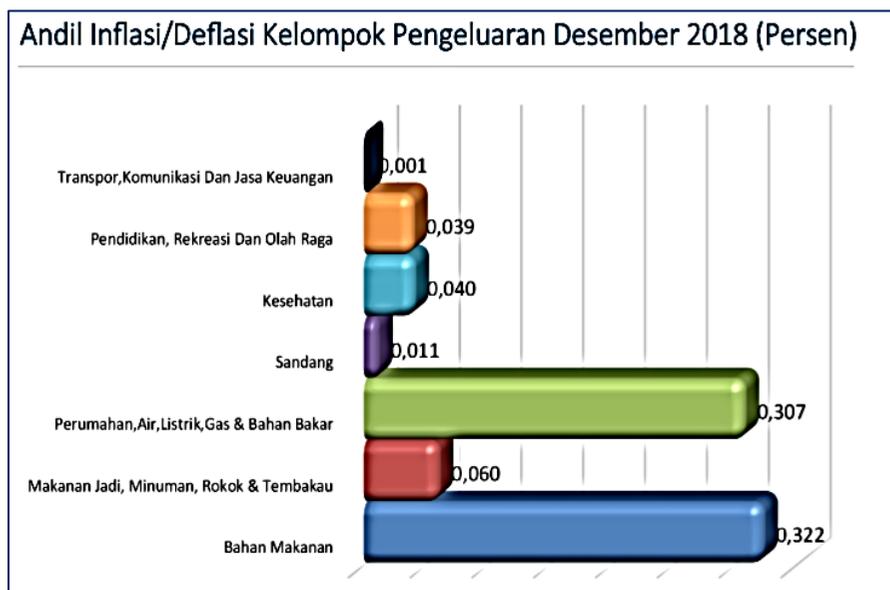
\*\*) Persentase perubahan IHK Desember 2018 terhadap IHK Desember 2017.

\*\*\*) Persentase perubahan IHK Desember 2018 terhadap IHK Desember 2017.

Sumber : BPS Kota Bogor

Pada Desember 2018 dari 7 kelompok pengeluaran, semuanya memberikan andil/sumbangan inflasi Desember 2018 terhadap inflasi Kota Bogor. Bila dilihat menurut andilnya terhadap inflasi Desember 2018, pada tabel tampak bahwa kelompok bahan makanan memberikan andil sebesar 0,322 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,060 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,307 persen; kelompok sandang sebesar 0,011 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,004 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 0,039 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,001 persen.

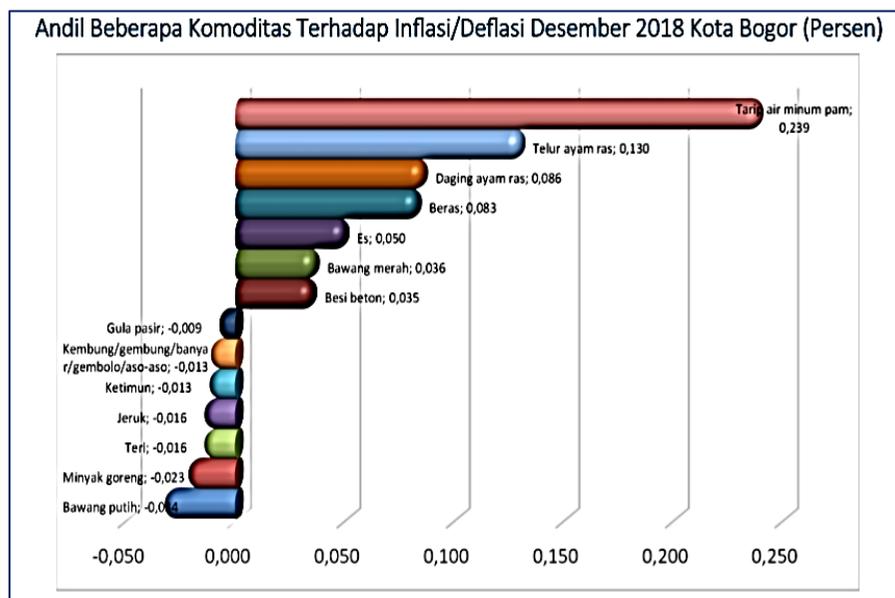
Grafik 3.12 : Andil Inflasi/Deflasi Per Kelompok Pengeluaran pada Desember 2018 di Kota Bogor



Sumber : BPS

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Desember 2018, antara lain: tarip air minum PAM, telur ayam ras, daging ayam ras, beras, es, bawang merah, dan besi beton.

Grafik 3.13 : Andil beberapa komoditas terhadap inflasi/deflasi pada Desember 2018 di Kota Bogor



Sumber : BPS

## Perbandingan Inflasi Tahunan Kota Bogor Tahun 2017-2018

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2018 sebesar 3,69 persen demikian juga halnya dengan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2018 terhadap Desember 2017). Sementara tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2017 sebesar 4,59 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Desember 2017 terhadap Desember 2016 sebesar 4,59 persen.

Angka inflasi Kota Bogor pada bulan Desember 2018 lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2017 (0,43 persen). Kemudian inflasi tahun kalender di Kota Bogor tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Pada bulan Desember tahun 2017 angka inflasi kalender sebesar 4,59 persen sedangkan pada Desember 2018 sebesar 3,69 persen. Demikian juga dengan inflasi year on year tahun 2018 (3,69 persen) masih lebih rendah dibanding tahun 2017 (4,59 persen). Secara menyeluruh hal ini memberikan indikasi bahwa selama bulan Desember tahun 2018 harga-harga kebutuhan masyarakat di pasar relatif lebih terkendali dengan baik ketimbang harga yang terjadi selama tahun 2017.

Tabel 3.15 : Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan tahun ke tahun di Kota Bogor Tahun 2017-2018

Tingkat Inflasi Bulanan, tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun  
2017-2018 (Persen)

No	Inflasi	2017 (2012=100)	2018
1	Desember	0,43	0,78
2	Tahun kalender	4,59	3,69
3	Year on year	4,59	3,69

Sumber : BPS Kota Bogor

## Perbandingan Inflasi Antar Kota Di Jawa Barat dan Nasional

Pada Desember 2018 Kota Bogor terjadi inflasi sebesar 0,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 136,73. Dari 7 kota IHK di Jawa Barat, semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kota Bogor sebesar 0,78 persen dengan IHK sebesar 136,73; Kota Bandung sebesar 0,71 persen dengan IHK sebesar 134,48; Kota Bekasi sebesar 0,59 persen dengan IHK sebesar 132,13; Kota Cirebon sebesar 0,58 persen dengan IHK sebesar 129,98; Kota Sukabumi sebesar 0,52 persen dengan IHK sebesar 134,06; Kota Tasikmalaya sebesar 0,25 persen dengan IHK sebesar 132,23; dan terakhir adalah Kota Depok sebesar 0,22 persen dengan IHK sebesar 132,93. Sementara inflasi gabungan 7 kota di Jawa barat sebesar 0,55 persen dan secara nasional tercatat inflasi sebesar 0,62 persen.

Tabel 3.16 : Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2018 Kota Kota Di Jawa Barat dan Nasional

Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Desember 2018  
Kota-kota di Jawa Barat dan Nasional (2012=100)

Kota	IHK Desember 2018	Inflasi Desember 2018*)	Inflasi Tahun 2018**)	Inflasi Tahun Ke Tahun***)
Bogor	136,73	0,78	3,69	3,69
Sukabumi	134,06	0,52	2,95	2,95
Bandung	134,48	0,71	3,76	3,76
Cirebon	129,98	0,58	2,80	2,80
Bekasi	132,13	0,59	4,23	4,23
Depok	132,93	0,22	2,86	2,86
Tasikmalaya	132,23	0,25	2,30	2,30
Jawa Barat	133,44	0,55	3,54	3,54
DKI Jakarta	135,25	0,60	3,27	3,27
Tangerang	143,08	0,63	3,46	3,46
Nasional	135,39	0,62	3,13	3,13

Keterangan:

\*)Persentase perubahan IHK Desember 2018 terhadap IHK bulan sebelumnya.

\*\*) Persentase perubahan IHK Desember 2018 terhadap IHK Desember 2017.

\*\*\*)Persentase perubahan IHK Desember 2018 terhadap IHK Desember 2017

Activate Windows  
Go to PC settings to activate Windows

Sumber : BPS

Peta Inflasi/Deflasi 7 Kota IHK Di Jawa Barat Desember 2018



### 3.1.1.8. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumberdaya manusia sekaligus income rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bahasan ketenagakerjaan, ada beberapa indicator yang relevan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas kondisi ketenaga kerjaan di Kota Bogor yaitu Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Permasalahan yang dihadapi Kota Bogor terkait bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih relatif rendah yaitu sebesar 61.13 persen di tahun 2017;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sangat tinggi yaitu sebesar 9.57 persen di tahun 2017;
3. Produktivitas Tenaga Kerja masih belum optimal;
4. Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja masih belum optimal.

Berikut adalah gambaran kondisi angkatan kerja pada tahun 2017 berdasarkan data BPS dalam Buku Kota Bogor Dalam Angka tahun 2018.

Tabel 3.17 : Penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut kegiatan, Tahun 2017 di Kota Bogor

<b>Rincian Details</b>	<b>2017</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
◆ <b>Angkatan Kerja/ Economically Active</b>	
1. Bekerja/ Working	448 386
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	
a. Pernah Bekerja/ Ever Worked	18 467
a. Tdk Pernah Bekerja/Never Worked	28 971
a. Jumlah/ Total	47 438
Jumlah Angkatan Kerja/Total Economically Active	495 824
◆ <b>Bukan Angkatan Kerja/ Not Economically Active</b>	
1. Sekolah/ Attending School	82 781
2. Mengurus Rumah Tangga/House Keeping	203 150
3. Lainnya/ Others	29 363
4. Jumlah/ Total	315 294
◆ <b>Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas/ Total of population aged 15 years and over</b>	811 118
◆ <b>% Bekerja thd Angkatan Kerja/ % Working to economically Active</b>	90.43
◆ <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)/ Employment Rate (%)</b>	9.57
◆ <b>% Angkatan Kerja thd Penduduk Usia Kerja/ % Economically Active to Working Age Population</b>	61.13

Sumber : BPS Kota Bogor  
Source : BPS-Statistics of Bogor City

Sumber : BPS Kota Bogor

Lebih lanjut dari hasil evaluasi diperoleh latar belakang yang menyebabkan TPT Kota Bogor sangat tinggi yaitu :

1. Keterampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Bogor setiap tahunnya. Pembangunan perekonomian Kota Bogor bertumpu pada sektor-sektor non produksi, sektor jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Pembangunan sektor jasa membutuhkan skill masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan. Namun demikian, apabila melihat data pada tahun 2017, peningkatan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja masih di dominasi dari sector industry pengolahan yaitu meningkat sebesar 22.93% sementara peningkatan penyerapan sector jasa lainnya hanya sebesar 15.97 % . Berikut ini adalah data penyerapan tenaga kerja berdasarkan sector lapangan kerja utama yang dipublikasi oleh BPS dalam buku Kota Bogor dalam Angka tahun 2018.

Tabel 3.18 : Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin

Lapangan Pekerjaan Utama Main Employment Field	2015			2017		
	Laki-laki/ Male	Perempu- an/Female	Jumlah/ Total	Laki-laki/ Male	Perempu- an/Female	Jumlah/ Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan Agriculture, Forestry, Hunting, and Fishery	4 138	843	4 981	2 674	545	3 219
Industri Pengolahan Manufacturing Industry	44 330	14 086	58 416	53 432	18 393	71 825
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurants and Hotels	82 701	38 101	120 802	93 500	61 206	154 706
Jasa Kemasyarakatan Community, Social, and Personal Services	74 649	44 477	119 126	57 771	47 610	105 381
Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/ Mining & Quarrying, Electricity, Gas & Water, Constructions, Transportation, Storage & Communication, Financing, Insurance, Real Estate & Business Services	87 389	10 269	97 658	101 471	11 784	113 255
<b>Jumlah/Total</b>	<b>293 207</b>	<b>107 776</b>	<b>400 983</b>	<b>308 848</b>	<b>139 538</b>	<b>448 386</b>

Sumber : BPS Kota Bogor

Oleh karena itu, selain mendorong tingkat pendidikan masyarakat, maka keterampilan dan kecakapan para pencari kerja harus menjadi focus untuk diintervensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang mampu berdaya saing di sector unggulan yang ada di Kota Bogor yaitu sector Jasa.

2. Tingginya angka pengangguran lulusan SMA/SMK

Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain bahwa lulusan SMA/SMK pada umumnya belum memiliki ketrampilan khusus yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, atau dengan kata lain lulusan SMA/SMK pada umumnya tidak memiliki keahlian untuk bersaing di dunia kerja. Pendidikan vokasi menjadi sangat penting ditingkatkan untuk menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Selain itu program peningkatan pendidikan non formal menjadi sangat penting untuk dikembangkan dengan syarat harus mengikuti tren kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Jumlah pekerja yang bekerja tidak penuh masih cukup tinggi. Jumlah pekerja tidak penuh adalah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu). Kondisi ini sebenarnya memicu terjadinya kondisi pengangguran semu karena sebenarnya mereka berstatus sebagai pekerja, tetapi ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah.

4. Adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan kerja.

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah pencari kerja di Kota Bogor adalah sebesar 3.904 orang dimana sebanyak 57.27 % adalah laki laki dan 97.51 % berlatar belakang Pendidikan SMA ke atas. Sementara jumlah lowongan pekerjaan pada tahun 2017 hanya sebanyak 2.082 orang dimana lowongan terbanyak adalah dari sector perdagangan yaitu sebanyak 1269 orang dan dari sector jasa sebanyak 638 (sumber data : Kota Bogor Dalam Angka, 2018).

5. Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bogor masih rendah. Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi.

### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019**

#### **3.1.2.1. Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Global**

Proyeksi perekonomian Kota Bogor tahun mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomiglobal, nasional dan propinsi Jawa Barat. Selama Tahun 2018, kondisi ekonomi global mengalami perbaikan dalam siklusnya, ditandai dengan tumbuhnya sektor investasi, aktivitas manufaktur, dan

perdagangan. Peningkatan ini dimotori dengan perbaikan pada sektor keuangan global, dengan tersedianya kebijakan yang lebih mumpuni, meningkatnya kepercayaan akan sektor ini, dan harga komoditi yang lebih solid. Berdasarkan *World Bank Group* dalam laporannya *Global Economic Prospect 2019*, pertumbuhan PDB global diperkirakan akan melambat sebesar 2,90 persen pada Tahun 2019 dan akan cenderung terus melambat pada kisaran 2,80 persen di Tahun 2020 sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.19 : Outlook Perekonomian Global 2018-2020

Negara	Estimasi 2018	Proyeksi 2019	Proyeksi 2020
 Dunia	3,0	2,9	2,8
 Amerika	2,9	2,5	1,7
 Eropa	1,9	1,6	1,5
 Jepang	0,8	0,9	0,7
 Tiongkok	6,5	6,2	6,2
 India	7,3	7,5	7,5
 Indonesia	5,2	5,2	5,3

Sumber : *World Bank Group*

Pertumbuhan global yang diperkirakan melambat dari 2,90 persen pada tahun 2019 menjadi 2,8 persen pada tahun 2020 disebabkan oleh pasar-pasar negara berkembang melambat, perekonomian China melambat dan kondisi keuangan dan kebijakan ekonomi yang lebih ketat membebani Turki dan negara-negara Eropa. Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi global adalah perubahan secara tiba-tiba pada kondisi pasar keuangan, ketidakpastian kebijakan, permasalahan geopolitik, meningkatnya pembatasan perdagangan, terjadinya perlambatan pertumbuhan potensial yang cukup signifikan. Perubahan pada pasar keuangan termasuk di dalamnya adalah koreksi secara mendadak pada valuasi aset, kebijakan penilaian ulang pasar oleh Bank Sentral beberapa negara atau *financial stress*. Valuasi aset mengalami peningkatan dan kompensasi terhadap risiko kredit berada pada titik yang rendah, juga *financial stress* yang terjadi di negara berkembang yang besar serta China akan menyebabkan gejolak pada pasar keuangan dan juga meningkatkan biaya pinjaman di negara ekonomi berkembang. Pada jangka waktu yang singkat, hal tersebut akan menaikkan risiko ketidakstabilan. Selain itu, kejadian cuaca buruk yang lebih sering akan meningkatkan kemungkinan perubahan besar dalam harga pangandunia, yang

bisa meningkatkan angka kemiskinan. Di sisi lain Pasar tenaga kerja AS yang menyentuh level terkuatnya dalam sejarah akan membuat bank sentral Federal Reserve tetap menaikkan bunga acuannya hingga 2020 meski kondisi eksternal melambat. Namun, penurunan proyeksi pertumbuhan Eropa dan inflasi inti yang masih saja rendah sepertinya akan membuat bank sentral Eropa menahan kenaikan suku bunganya hingga 2020. Hal ini akan mendorong penguatan dolar dan menekan mata uang negara-negara berkembang yang kondisi keuangan telah menegat. Proteksionisme dagang tetap menjadi risiko pelemahan yang akan menyebabkan pertumbuhan global akan turun di bawah 3 persen di 2020 karena pertumbuhan negara maju jatuh menjadi 1,7 persen menyusul hilangnya daya dorong dari stimulus fiskal dan moneter AS.

### **3.1.2.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional**

Prospek perekonomian Indonesia pada 2018 dan 2019 diperkirakan membaik dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Prospek perekonomian yang membaik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, inflasi yang terkendali, serta keseimbangan eksternal yang terjaga. Momentum positif dari global dan domestik pada 2017 menjadi basis bagi berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dan 2019 meningkat masing-masing dalam kisaran 5,1-5,5% dan 5,2-5,6%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai inflasi yang diperkirakan tetap rendah dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2018-2019 sebesar  $3,5 \pm 1\%$ , dipengaruhi terjaganya ekspektasi inflasi dan terkendalinya permintaan domestik. Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan mencatat surplus pada 2018-2019, didorong peningkatan arus masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan (TB) yang tetap terjaga di bawah 2,5% PDB. Dalam jangka menengah, prospek perekonomian domestik terus tumbuh ke lintasan yang lebih tinggi, didukung dampak positif implementasi reformasi struktural yang optimal dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terpelihara. Di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi, beberapa tantangan masih mengemuka yang berpotensi mengganggu kesinambungan prospek perekonomian. Tantangan jangka pendek dari global terkait dengan upaya memitigasi risiko yang bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, potensi gejolak geopolitik yang masih berlanjut, dan kebijakan proteksionisme perdagangan yang meningkat. Tantangan untuk memitigasi risiko global semakin kuat karena ekonomi global dalam jangka menengah diwarnai penurunan produktivitas akibat investasi yang masih terbatas dan populasi yang menua, terutama di berbagai negara maju. Tantangan lain terkait dengan upaya meminimalkan risiko domestik seperti proses konsolidasi ekonomi yang terus berlanjut, ruang stimulus fiskal yang masih terbatas, dan penurunan aliran modal asing yang dipicu oleh

berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter negara maju. Selain itu, tantangan juga muncul berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas makroekonomi di tengah risiko inflasi yang meningkat terkait kenaikan harga minyak dan harga komoditas pangan. Dalam jangka menengah, masih terdapat beberapa tantangan struktural dari domestik yang dapat menghambat berlanjutnya pemulihan ekonomi. Tantangan tersebut berkaitan dengan penguatan daya saing perekonomian, penguatan kapasitas dan kapabilitas industri, penciptaan ekonomi yang inklusif, penyediaan sumber pembiayaan ekonomi yang berkesinambungan, dan perkembangan teknologi digital. Respons kebijakan ditempuh untuk mengawal perekonomian sehingga dapat tumbuh dengan struktur yang lebih baik dan ditopang stabilitas yang kokoh. Dalam kaitan ini, arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan. Respons kebijakan dilakukan melalui sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait dengan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SPPUR), serta kebijakan struktural. Peran reformasi struktural menjadi penting untuk dilakukan secara konsisten guna menjawab tantangan jangka menengah dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian.

Prospek perbaikan ekonomi domestik ke depan tidak terlepas dari prakiraan berlanjutnya pemulihan ekonomi global. Perbaikan ekonomi dunia pada 2017 diprakirakan berlanjut pada 2018–2019 dengan sumber pendorong pertumbuhan yang mulai bergeser ke negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2018 diprakirakan meningkat menjadi 3,9% dari 3,7% pada 2017 (Tabel 10.1). Kenaikan pertumbuhan pada 2018- 2019 terutama didorong oleh negara berkembang,

Ekonomi Nasional tumbuh dengan laju yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren kenaikan yang positif, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor yang tinggi serta perbaikan konsumsi pemerintah yang terjaga sampai kuartal III Tahun 2018. Selain itu, capaian pemerataan pembangunan nasional dikatakan semakin membaik. Ditandai dengan koefisien gini menurun dan semakin membaik dari 0,389 poin pada Maret 2018 menjadi 0,384 poin pada September Tahun 2018, persentase penduduk miskin menurun, menjadi 9,66 persen pada September 2018 dibandingkan dengan Bulan Maret Tahun 2018 sebesar 9,82 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 25,26 juta jiwa pada September 2018, kemudian tingkat pengangguran menurun menjadi 5,34 persen. Namun demikian, diperlukan upaya-upaya yang konsisten dalam menjaga kondisi saat ini guna mencapai pemerataan pembangunan nasional. Di sisi harga, inflasi Indonesia terjaga pada 3,13 persen yang juga masuk

dalam rentang target nasional yakni  $4 \text{ persen} \pm 1$ , infasi yang rendah ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter dan koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan harga kelompok makanan dan kelompok komoditas strategis.

Berikut ini adalah gambaran perkembangan laju pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun 2007-2018 yang mengalami fluktuasi.

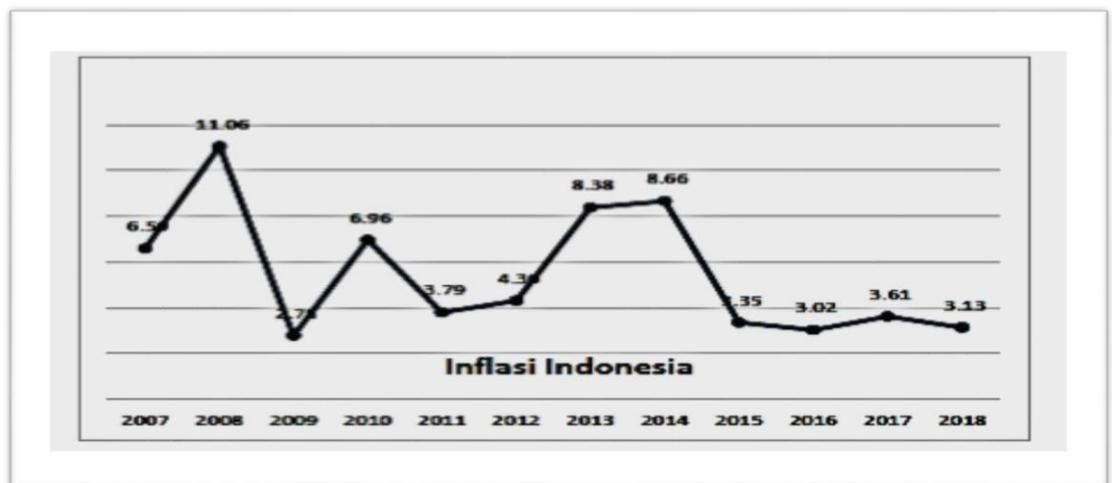
Grafik 3.14 : Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2007-2018



Sumber : Rancangan Awal RKPD Jawa Barat Tahun 2020

Berikut ini adalah gambaran perkembangan tingkat inflasi nasional dari tahun 2007-2018 yang mengalami fluktuasi. Selama Kurun waktu 2015-2018, tingkat inflasi nasional cenderung stabil dan relative cukup rendah yaitu di kisaran 3-3.6%.

Grafik 3.15: Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2007-2018



Sumber : Rancangan Awal RKPD Jawa Barat Tahun 2020

Prospek ekonomi global akan segera pulih dan perbaikan harga komoditas dan pasar keuangan akan menjadi tantangan bagi perekonomian Nasional, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar terkendali dan pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan ekonomi Tahun 2020. Sementara itu, tantangan domestic terkait dengan sisi pengeluaran adalah investasi yang tumbuh menguat Tahun 2018 namun konsumsi rumah tangga tertahan dibawah 5 persen selama Tahun 2018. Dari sektor riil, Ekspor nasional menunjukkan peningkatan yang berarti, Pada Tahun 2018 Ekspor barang mampu tumbuh dua digit, mencapai 16,2 persen dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar -3,4 persen, meskipun begitu impor nasional pun menunjukkan peningkatandiatas dua digit, mencapai 15,7 persen pada Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017 yang sebesar -4,9 persen ditambah ekspor nasionalmasih mengandalkan komoditas non olahan. Peningkatan ekspor non migas masih didominasi oleh komoditas yang memiliki nilai tambah yang masih rendah.

Di tengah berlanjutnya proses rebalancing ekonomi Tiongkok yang berlangsung gradual. Ekonomi Tiongkok diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi ditopang konsumsi dan ekspor, meskipun sudah sedikit melambat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi India juga diperkirakan meningkat cukup signifikan seiring hilangnya dampak temporer dari kebijakan demonetisasi dan penerapan sistem pajak baru. Dari negara maju, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari Amerika Serikat (AS). Kenaikan pertumbuhan ekonomi AS dipicu oleh stimulus fiskal melalui kebijakan reformasi perpajakan terutama dari sisi investasi seiring dengan penurunan pajak korporasi. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih stabil pada level 3,9% terutama ditopang negara berkembang, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan sedikit melambat. Pemulihan ekonomi global yang berlanjut akan berkontribusi positif pada volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Volume perdagangan dunia diperkirakan tetap tumbuh positif. International Monetary Fund (IMF) memprakirakan volume perdagangan dunia tumbuh mencapai 4,6% pada 2018 dan 4,4% pada 2019. Aktivitas perdagangan dunia yang tumbuh tinggi terutama ditopang oleh menguatnya perdagangan intraregional di Asia dan pemulihan penguatan permintaan dari kawasan Amerika Utara. Kondisi tersebut terutama sejalan dengan masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan pertumbuhan ekonomi Amerika yang lebih solid. Sementara itu, harga komoditas juga diperkirakan tumbuh positif meskipun dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari 2017. Sejalan dengan kenaikan harga komoditas global, indeks harga komoditas ekspor Indonesia (IHKEI) juga diperkirakan tetap tumbuh positif yakni 2,8% pada 2018. Prospek perbaikan ekonomi dunia diperkirakan berpengaruh positif pada terkendalinya pasar keuangan dunia, meskipun perlu dicermati

risiko dari normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju. Faktor utama yang berpotensi memengaruhi pasar keuangan dunia pada 2018 ialah berlanjutnya arah normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju. Kenaikan suku bunga kebijakan AS dan pengurangan neraca bank sentral (balance sheet reduction) diperkirakan terus berlanjut pada 2018. Sementara itu, bank sentral Eropa pada 2018 diperkirakan tetap mempertahankan kebijakan moneter akomodatif meskipun kecepatan pengurangan pembelian aset perlu menjadi perhatian. Perkembangan arah kebijakan moneter negara maju tersebut berpotensi memengaruhi aliran modal asing, termasuk potensi berkurangnya aliran modal masuk ke negara-negara berkembang. Dalam prospek pertumbuhan ekonomi jangka pendek, prospek perbaikan ekonomi global dan beberapa perkembangan positif domestik berpotensi terus mendorong perbaikan ekonomi Indonesia pada 2018-2019. Pertumbuhan ekonomi pada 2018-2019 diperkirakan meningkat masing-masing dalam kisaran 5,1-5,5% dan 5,2-5,6%. Prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik tersebut terutama ditopang oleh peran permintaan domestik yang meningkat sebagai sumber pertumbuhan. Permintaan domestik terutama berasal dari investasi yang menguat, baik investasi bangunan maupun investasi non bangunan. Perbaikan investasi didukung oleh sektor swasta melalui perbaikan keyakinan pelaku usaha, dan sektor Pemerintah melalui kelanjutan belanja yang berkualitas. Peran stimulus fiskal juga diperkirakan cukup besar, tidak hanya dari investasi tetapi juga dari konsumsi, didukung prospek pajak yang membaik. Konsumsi swasta sebagai kontributor utama ekonomi Indonesia diperkirakan mulai meningkat, didukung daya beli yang terjaga, termasuk dari program perlindungan sosial yang lebih luas. Sementara itu, ekspor diperkirakan sedikit melambat namun masih tumbuh positif seiring dengan prakiraan harga komoditas yang tetap tinggi dan permintaan global yang masih kuat. Kinerja investasi diperkirakan berada dalam tren yang meningkat pada 2018 dan 2019 didukung oleh stimulus.

Sejalan dengan tantangan perekonomian Indonesia 2020 diperkuat dengan perspektif Bank Dunia bahwa ada 7 (tujuh) hal yang akan terjadi pada perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yaitu:

**1. Peluang Indonesia mengalami krisis ekonomi kecil**

Meskipun ada penurunan pertumbuhan ekonomi karena faktor global, Bank Dunia menyebut peluang terjadinya krisis ekonomi di Indonesia relative kecil. Pada Tahun 2018, Indonesia berada di posisi dengan fundamentelekonomi yang lebih kuat.

**2. Bank Dunia prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 capai 5,3 persen**

Bank Dunia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesiasepanjang tahun 2018 dan 2019 sebesar 5,2 persen,

serta meningkat menjadi 5,3 persen pada 2020. Angka itu relatif sama dengan proyeksi pemerintah sebesar 5,14-5,21 persen.

### **3. Permintaan dalam negeri yang akan makin kuat**

Permintaan dalam negeri (domestik) Indonesia juga disebut akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

### **4. Konsumsi swasta yang berlanjut**

Konsumsi di sektor swasta dinilai akan terus berlanjut karena beberapa hal, mulai dari nilai inflasi yang stabil, pasar tenaga kerja yang kuat, dan juga penurunan suku bunga pinjaman. Meskipun ketidakpastian global meningkat, pandangan terhadap ekonomi Indonesia terus positif. Terbukti dengan konsumsi swasta dan pemerintah yang lebih kuat, yang mengangkat pertumbuhan PDB riil Indonesia.

### **5. Belanja pemerintah yang kian kuat**

Belanja pemerintah juga diproyeksikan menguat dimana pertumbuhan pendapatan memberikan ruang, baik untuk konsolidasi fiskal maupun belanja tambahan. Untuk pertumbuhan investasi, diperkirakan akan tetap kuat seiring dengan berkurangnya ketidakpastian pasca pemilu.

### **6. Inflasi di Indonesia pada 2019 mencapai 3,7 persen**

Bank Dunia menyebut akan ada pertumbuhan inflasi di Indonesia pada 2019 mencapai 3,7 persen dan tetap terkendali pada tahun 2020.

### **7. Neraca transaksi mengalami defisit pada tahun depan**

Untuk neraca transaksi berjalan, diprediksi akan mengalami defisit 2,4 persen terhadap PDB pada 2019 dan defisit 2,3 persen pada 2020. Sedangkan dari sisi defisit anggaran pemerintah, Bank Dunia memprediksi defisit anggaran mencapai 2,1 persen pada tahun 2019 dan 1,8 persen pada 2020 mendatang. Proyeksi Bank Dunia tersebut sudah memperhitungkan normalisasi kebijakan moneter AS yang tengah berlangsung dan juga dampak dari volatilitas yang terjadi di negara-negara berkembang. Turunnya peran industri pengolahan menjadi persoalan sendiri di kawasan Jawa mengingat perannya yang cukup signifikan dalam perekonomian di kawasan tersebut. Sementara itu di sektor keuangan, tantangan masih terkait dengan pembenahan struktur pembiayaan domestik yang masih belum beragam, struktur dana perbankan yang belum seimbang, serta pasar keuangan yang masih belum kuat.

**TANTANGAN PEREKONOMIAN.** Di tengah optimisme prospek perekonomian ke depan, hasil identifikasi menunjukkan beberapa tantangan masih mengemuka dan perlu mendapat perhatian. Identifikasi berbagai tantangan tersebut menjadi penting dalam mendukung perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan diarahkan tidak hanya untuk memitigasi risiko yang muncul, tetapi juga untuk memperkuat struktur perekonomian. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat

mengawal berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan. Tantangan perekonomian bersumber dari global dan domestik, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dari global, tantangan jangka pendek yang mengemuka berkaitan dengan upaya untuk memitigasi risiko-risiko terkait perubahan stance kebijakan moneter negara maju ke arah pengetatan, gejala geopolitik yang masih berlanjut, serta proteksionisme perdagangan yang menunjukkan tendensi meningkat. Risiko pertama dan kedua perlu dicermati karena dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dan meningkatkan risiko pembalikan modal dari negara berkembang. Sementara itu, risiko ketiga yakni peningkatan proteksionisme dapat mengganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional, yang akan berdampak negatif ke ekonomi Indonesia.

Tantangan dari global dalam jangka menengah berkaitan dengan upaya memitigasi dampak negatif dari risiko penurunan produktivitas global yang dapat kembali melemahkan ekonomi dunia. Perkembangan terkini menunjukkan pemulihan ekonomi global masih rentan dan berisiko bersifat temporer karena lebih bertumpu pada stimulus kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh di berbagai negara. Pada faktor struktural, terjadi penuaan populasi di berbagai negara maju. Selain itu, tantangan struktural global juga diwarnai dengan tingkat produktivitas dunia yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelum krisis keuangan global. Penurunan produktivitas disebabkan oleh investasi yang masih rendah dan kemudian berdampak pada lambatnya akumulasi kapital dan inovasi teknologi.

Tantangan dari domestik juga meliputi jangka pendek dan jangka menengah. Dalam jangka pendek, tantangan domestik terkait dengan upaya untuk mempercepat berakhirnya proses konsolidasi korporasi dan perbankan, memitigasi risiko ruang stimulus fiskal yang belum besar, meminimalkan risiko berkurangnya capital inflows jika arah pengetatan kebijakan moneter negara maju lebih cepat dibandingkan dengan ekspektasi pasar, dan menjaga stabilitas makro di tengah risiko peningkatan inflasi. Risiko berlanjutnya periode konsolidasi korporasi dan perbankan dapat menekan pertumbuhan ekonomi karena menghambat potensi ekspansi usaha. Risiko ruang stimulus fiskal yang belum besar juga mengemuka akibat penerimaan pajak yang belum optimal dan dapat membatasi peran fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, risiko berkurangnya capital inflows akibat pengetatan kebijakan moneter di negara maju perlu diantisipasi karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Terakhir, inflasi dalam jangka pendek berisiko meningkat akibat kenaikan harga minyak dan komoditas

pangan yang melebihi prakiraan. Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

Dalam jangka menengah, tantangan domestik terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga dapat tumbuh secara berkesinambungan. Upaya memperkuat struktur perekonomian menjadi penting karena berpengaruh pada kemampuan perekonomian untuk tumbuh tinggi tanpa diikuti dengan meningkatnya kerentanan ekonomi yang dapat berujung pada instabilitas. Kerentanan yang paling mengemuka antara lain terkait hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan defisit TB. Pengalaman empiris menunjukkan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia rentan diikuti oleh peningkatan defisit TB. Upaya mendorong perekonomian Indonesia untuk dapat tumbuh tinggi, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif setidaknya mencakup lima tantangan.

Tantangan pertama berkaitan dengan upaya memperkuat daya saing perekonomian yang perlu terus ditingkatkan. ***Daya saing perekonomian setidaknya mencakup empat modal dasar pembangunan, yaitu infrastruktur, modal manusia, penyerapan teknologi, dan institusi.***

Tantangan kedua berhubungan dengan upaya untuk membangun kapasitas dan kapabilitas industri yang masih terbatas. Tantangan tersebut juga termasuk membangun sektor industri yang potensial dan berteknologi tinggi untuk memperkuat struktur ekspor-impor yang dapat meningkatkan daya tahan sektor eksternal terhadap guncangan.

Tantangan ketiga terkait upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang belum diikuti dengan turunnya tingkat kesenjangan.

Tantangan keempat berhubungan dengan upaya memperkuat struktur dan sumber pembiayaan yang masih terbatas, termasuk dari sektor keuangan dan fiskal.

Tantangan terakhir terkait upaya untuk mengoptimalkan berbagai peluang yang ada dan sekaligus memitigasi risiko yang dapat muncul dari perkembangan teknologi digital yang pesat.

### **3.1.2.3 Tantangan dan Prospek Regional Jawa Barat**

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat.

- a. Respon pemerintah terhadap tantangan global dan Nasional. Memperhatikan perkembangan perekonomian

global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian Nasional. Di sector domestik, perlu terus dibangun industri yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri.

- b. Penyiapan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.
- c. Belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi. Bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2020 mendatang. Penurunan subsidi akan direlokasi untuk kebutuhan belanja infrastruktur yang memiliki multiplier besar terhadap perekonomian, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,4 – 5,8 persen. Melalui Kementerian Koordinator Perekonomian, sejumlah proyek strategis akan dikembangkan di Provinsi Jawa Barat antara lain : Peningkatan Rel, Pembangunan Bandar Udara, Pembangunan Bendungan, Rehabilitasi Rumah tidak layak huni (RTLH) Rehabilitasi Daerah Irigasi, dan lain-lain.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi di Jawa Barat yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi Nasional.

1. Kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makro ekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah panjang dan kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makro ekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi.
2. Teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing economy dan digital economy yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas fintech (financial technology) dan ecommerce. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam.

3. Bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat tahun ini diantaranya di dukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, Nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di Tahun 2020, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik. Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi disajikan sebagaimana table berikut ini :

Tabel 3.20 : Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2019-2020

No.	Indikator Makro Pembangunan Propinsi Jawa Barat	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.4-71.91	71.91-72.52
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.4-5.7	5.4-5.7
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7.8-8.1	8.0-7.9
4.	Inflasi	3.8-4	3.5-4
5.	Angka Kemiskinan	8.1-8.4	7.8-7.3
6.	Gini Rasio	0.4-0.401	0.39-0.4
7.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.5	1.48

Sumber : Rancangan Awal RKPD Jawa Barat Tahun 2020

Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Jawa Barat Tahun 2019 maka dapat diproyeksikan bahwa pada Tahun 2020 ekonomi Jawa Barat mampu tumbuh hingga 5,4 – 5,7 persen. Hal tersebut dapat terwujud dengan asumsi tidak ada perubahan drastis dan optimis.

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah berikut ini:

- a. Strategi meningkatkan kontribusi Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan terhadap PDRB, penciptaan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan, dengan arah kebijakan: Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan 9

kelompok pangan terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah di kabupaten/kota yang memiliki laju penurunan skor Pola Pangan Harapan ketersediaan.

- b. Strategi mempertahankan konsumsi energi 2,150 kkal/kap/hr dan ketersediaan energi 2,400 kkal/kap/hr.
- c. Strategi peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan arah kebijakan: fokus pada perbaikan di bidang industri dan pertanian, dengan mempertahankan capaian kinerja di sektor perdagangan;
- d. Strategi memantapkan peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya, dengan arah kebijakan mendorong peningkatan nilai tambah di usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya.
- e. Strategi membangkitkan lapangan industri pengolahan di Jawa Barat sebagai sektor dengan kontribusi terbesar khususnya upaya - upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektoral industri pengolahan, dengan arah kebijakan: mengupayakan perluasan pangsa pasar ekspor (melalui peran market intelegent dan juga market penetration, dan juga peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja.
- f. Strategi meningkatkan daya saing lapangan usaha konstruksi – melalui pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan : (1) Fokus pada peningkatan aksesibilitas seluruh daerah di Jawa Barat; (2) Pengembangan Jasa Keuangan & Asuransi untuk mendukung terwujudnya program financial inklusion di Jawa Barat; serta (3) Peningkatan daya saing pendidikan dan kesehatan dengan sasaran peningkatan kualitas SDM.
- g. Strategi Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, untuk menjadi stabilitas kesempatan kerja, dengan arah kebijakan : (1) Meningkatkan laju pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas - melalui penciptaan bibit unggul ,teknologi tepat guna dan juga memberikan perlindungan kepada petani melalui subsidi untuk asuransi pertanian; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen, melalui upaya mendorong dan pengembangan industry-industri mikro, kecil dan menengah pengolah hasil pertanian, (3) pemberian insentif kepada aktivitas industri pengolah hasil pertanian, misalnya aksesibilitas modal bagi pengusaha mikro dan kecil yang diwujudkan bersamaan dengan program financial inclusion.

### **3.1.3. Proyeksi Perekonomian Kota Bogor**

Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020, bertepatan dengan tahun awal RPJMD 2019-2024. Dalam konteks sebagai tahun awal dimulainya rencana pembangunan jangka menengah Kota Bogor dan dalam konteks sebagai tahapan ke-4 perencanaan lima tahunan dalam Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, maka Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bogor seluruhnya mengarah pada pencapaian Visi Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu untuk mewujudkan kota Bogor sebagai Kota Yang ramah Keluarga dan Visi Misi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan Kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan yang amanah.

Pada tahapan tahun pertama, rencana jangka menengah 2019-2024 ini, focus pembangunan kota Bogor diarahkan kepada **“Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berkeadilan”** Peningkatan kualitas hidup berarti adalah

Hal ini searah dengan tema/focus pembangunan nasional tahun 2020 yang mengarah pada **“Pembangunan Sumberdaya Manusia Untuk Pembangunan Yang Berkualitas”**, dan tema/focus RKPD propinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang mengarah pada **“Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pelayanan Publik”**. Memperhatikan fokus pembangunan Tahun 2020 baik di tingkat Nasional, Propinsi Jaa Barat dan Kota Bogor, maka pembangunan ekonomi kota Bogor ditargetkan untuk mencapai keberhasilan melalui pencapaian target indicator ekonomi makro sebagai berikut :

Tabel 3.21 : Target Pembangunan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2020 (Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024)

No.	Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2020
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76.13	76.68
2.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73.45	73.69
3.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.29	10.63
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.37	13.6
5	Pengeluaran Per kapita	Ribu Rp.	11.029	11.124
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,57	6.66
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9.28	8.47
8	Inflasi	%	3.69	≤ 3.6
9	Angka Kemiskinan	%	5.85	5.8
10	Gini Rasio	Indeks	0.41	0.4
11	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1.53	1.5

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Bogor terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah dirumuskan berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa yang akan datang.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Gambaran umum capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realisasi Belanja baik berupa Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung serta capaian pembiayaan.

#### **3.2.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah.

### **3.2.1.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah diperoleh melalui sumber-sumber meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pembiayaan daerah.

### 3.2.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tabel 3.22 Realisasi Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1.1.1	Pajak Daerah	376,487,551,008	398,435,398,328	492,138,653,391	555,477,512,682	592,978,746,862	9.79
1.1.2	Retribusi Daerah	77,167,650,951	46,219,894,849	62,727,631,456	49,046,366,179	48,414,245,997	-5.50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,681,532,602	28,807,740,268	33,107,211,225	29,949,487,128	26,772,427,406	3.29
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,498,973,693	154,134,016,696	195,900,091,147	267,354,262,108	240,081,650,933	36.34
	<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>544,835,708,254</b>	<b>627,597,050,141</b>	<b>783,873,587,219</b>	<b>901,827,628,097</b>	<b>908,247,071,198</b>	<b>11.17</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

PAD selama kurun waktu 2014-2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 11.17%. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen PAD kecuali komponen retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pajak Daerah dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 9.79% dan komponen Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 36.34%.

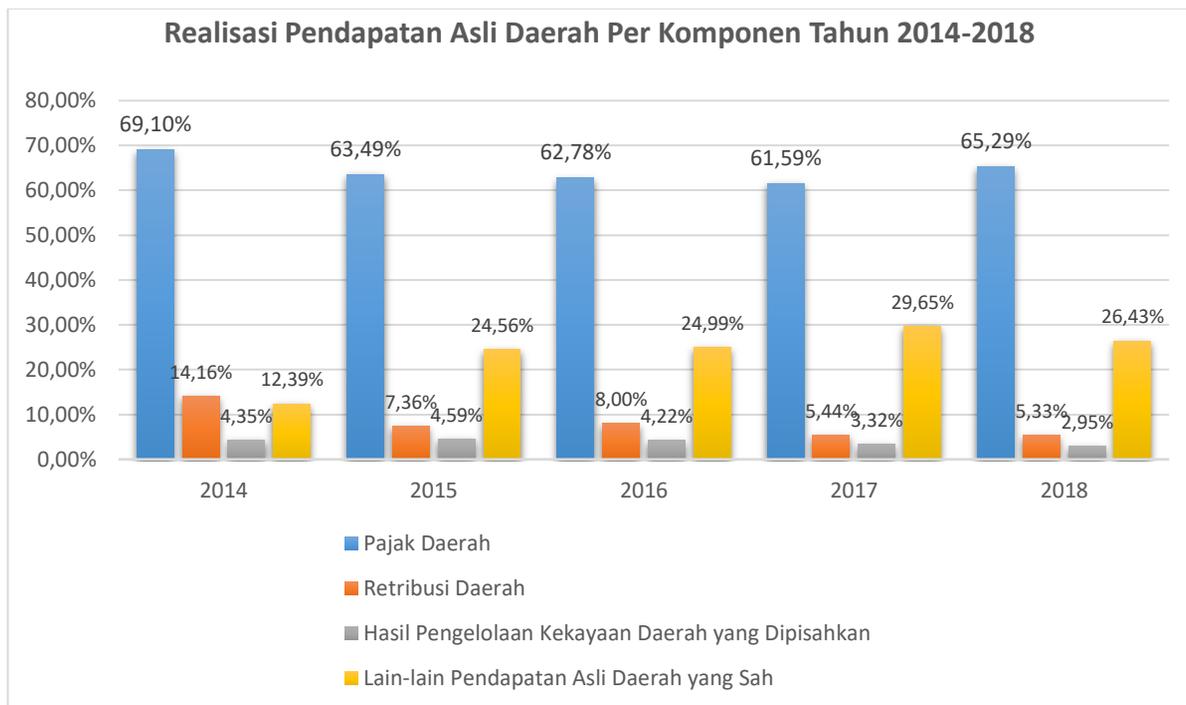
Selain itu Pajak Daerah juga menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata diatas 60 % dari Total PAD. Penerimaan Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah antara lain :

1. Mempertahankan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menggali potensi pajak melalui regulasi dan penerapan insentif dan disinsentif

Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah berturut-turut adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 65.29% dari total PAD 2018
- b. lainlain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak daerah yaitu sebesar 26.43% dari total PAD 2018
- c. retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebesar 5.33% dari Total PAD 2018
- d. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 2.95 dari total PAD 2018.

Grafik 3.16 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Per Komponen Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Dari sisi kebijakan, ada 3 (tiga) komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya-upaya intensifikasi yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan kebijakan eksternal.

### 3.2.1.1.2. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Dana perimbangan dari pusat, merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara umum dapat dikatakan bahwa, DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keseluruhan jumlah DAU, ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri neto, dan ditetapkan dalam APBN. Besarnya proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, DAK dialokasikan untuk daerah tertentu dalam membiayai kegiatan khusus di mana hal itu menjadi bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan DBH, yang bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Berdasarkan data realisasi Dana Perimbangan dalam APBD Kota Bogor pada tahun 2014-2018, terlihat bahwa Dana Perimbangan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Penerimaan Dana Perimbangan ini mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6.66% per tahun.

Pos-pos yang memberikan kontribusi kepada Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Pos Dana Alokasi Umum (DAU). (2) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.23. : Realisasi Dana Perimbangan Kota Bogor Pada Pendapatan Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.2. 1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	89,831,370,015	68,503,716,916	96,843,148,408	90,543,462,995	77,129,803,351	-0.74
1.2. 2	Dana Alokasi Umum	732,337,058,000	737,833,158,000	806,089,544,000	791,929,143,000	791,929,143,000	1.65
1.2. 3	Dana Alokasi Khusus	33,477,500,000	8,616,560,000	194,681,619,028	190,013,867,775	162,369,919,564	413.64
1.2. 4	Dana Perimbangan dari Propinsi			199,830,168,384			-
1.2. 5	Lain - Lain Pendapatan yang Sah						-
	<b>TOTAL DANA PERIMBANGAN</b>	<b>855,645,928,015</b>	<b>814,953,434,916</b>	<b>1,297,444,479,820</b>	<b>1,072,486,473,770</b>	<b>1,031,428,865,915</b>	<b>6.66</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Dilihat dari tabel di atas masih besarnya ketergantungan terhadap dana perimbangan ini, menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara. Hal itu secara

eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016.

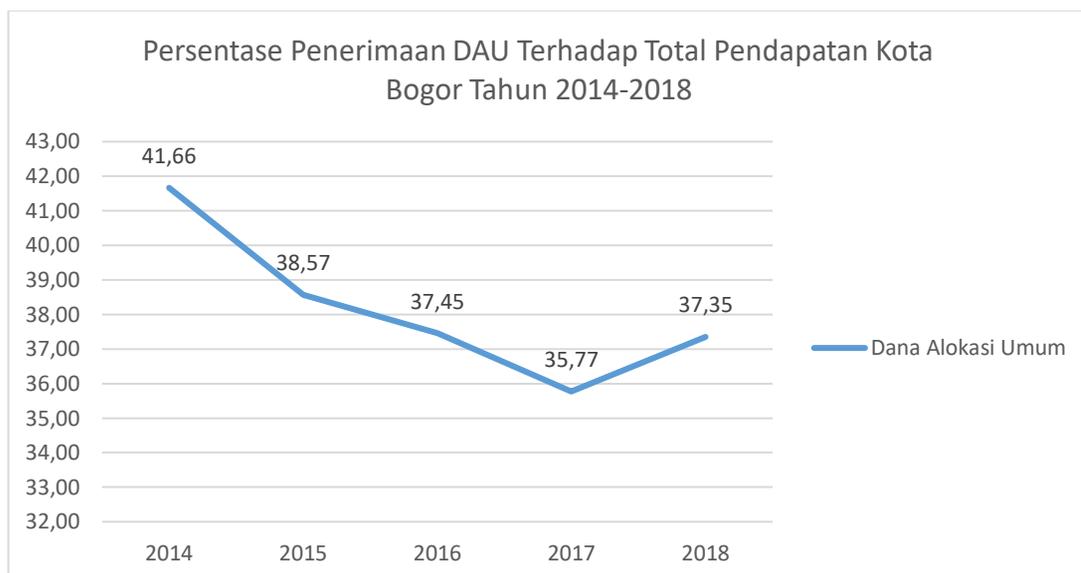
Sementara itu, alokasi DAU bersifat dinamis, yang artinya besaran DAU per daerah dan realisasi penyalurannya, akan mengikuti perkembangan Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Pada saat PDN neto naik, maka pagu DAU nasional akan ikut naik sehingga alokasi DAU pada tiap daerah, juga akan ikut meningkat, dan begitu pula sebaliknya.

Alokasi transfer daerah yang dinamis, menuntut daerah untuk dapat menetapkan program atau kegiatan prioritas agar dinamika alokasi dana perimbangan, dapat segera direspon dengan tetap mengutamakan prioritas kegiatan dan pembangunan daerah.

Poin penting lain dalam PMK itu adalah, penyaluran dana transfer dilakukan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output pada tahun, tahapan, atau triwulan sebelumnya. Poin ini berimplikasi pada perencanaan anggaran yang harus tepat, persiapan pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan di daerah, agar penyerapan anggaran serta capaian output dapat ditingkatkan. Tentunya monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban anggaran tetap harus diperhatikan.

Pada tahun 2014 - 2018, rata-rata kontribusi DAU terhadap APBD Kota Bogor sebesar 37.89%. Namun demikian kecenderungan yang terjadi persentase DAU terhadap pendapatan Kota Bogor dari tahun 2014-2018 cenderung semakin menurun. Pada Tahun 2018, persentase penerimaan DAU terhadap total pendapatan kota Bogor berkisar 37.35%. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

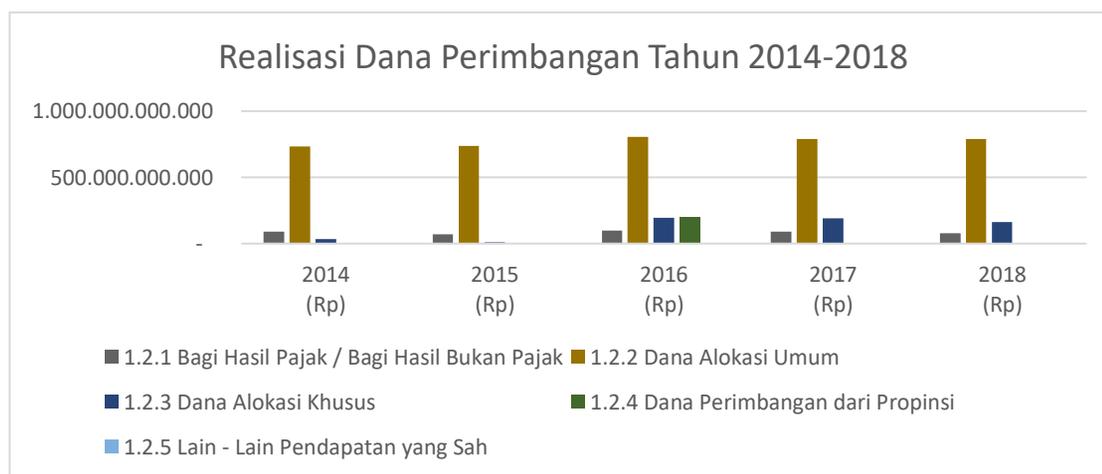
Grafik 3.17 : Persentase Penerimaan DAU Terhadap Total Pendapatan Kota Bogor



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Penerimaan DAU untuk setiap Kabupaten Kota bersifat dinamis, besarnya tergantung PDN neto, maka perlu antisipasi daerah pada saat DAU turun, karena dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD.

Grafik 3.18 : Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

#### 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah lainnya, (d) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan (e) Dana Darurat.

Tabel 3.24. : Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor Tahun 2014-2018

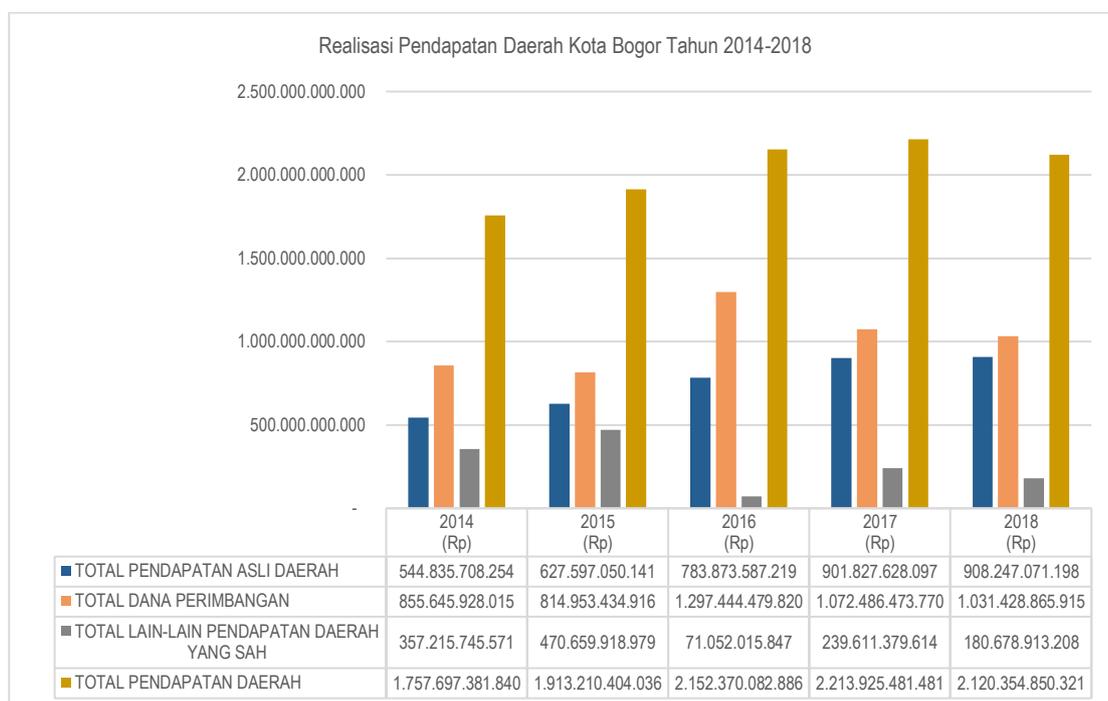
No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
1.3. 1	Hibah	1,034,000,000	4,875,000,000	14,106,000,000	9,000,000,000	17,842,285,147	124.57
1.3. 2	Dana Darurat					-	
1.3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	175,444,557,860	200,623,100,069		221,019,088,491	162,162,144,861	-
1.3. 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	157,301,111,000	202,799,344,000		936,232,656	-	-
1.3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23,436,076,711	62,362,474,910	56,946,015,847	8,656,058,467	674,483,200	-3.92
	<b>TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>357,215,745,571</b>	<b>470,659,918,979</b>	<b>71,052,015,847</b>	<b>239,611,379,614</b>	<b>180,678,913,208</b>	<b>31.90</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

## 5. TOTAL PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR

Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan realisasi pendapatan Kota Bogor tahun 2014-2018.

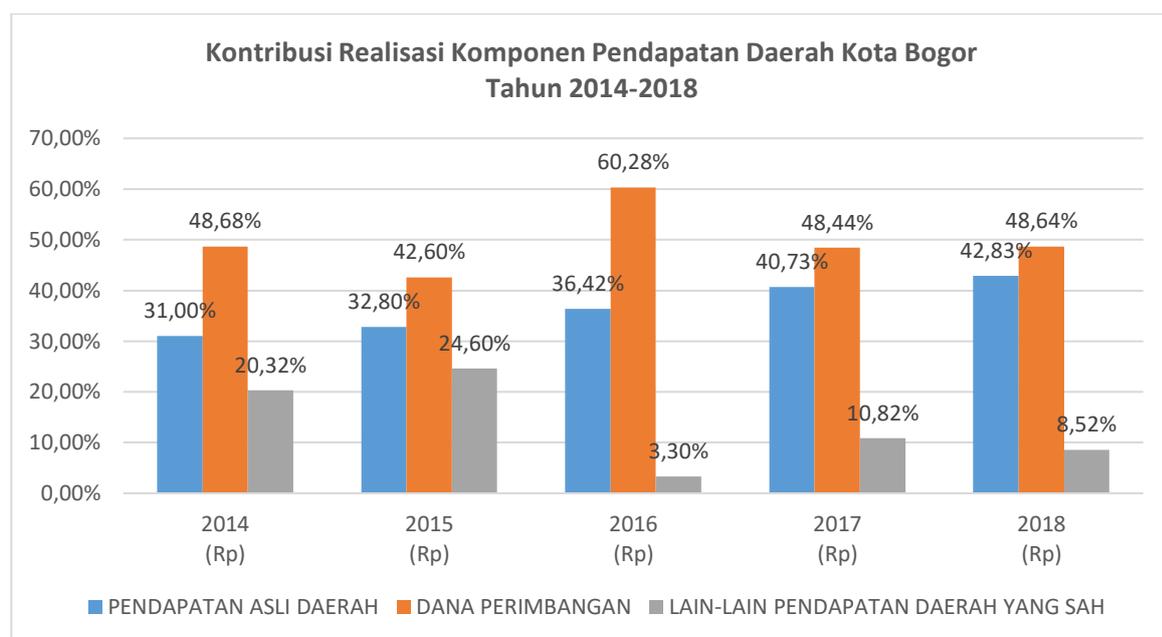
Grafik 3.19. : Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Dari gambaran tabel diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan kota Bogor dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan dari pusat. Proporsi kedua yang menopang pendapatan daerah kota Bogor adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Kota Bogor dari tahun 2014-2018 menunjukkan tren positif, dimana persentase kontribusinya terhadap total pendapatan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, kontribusi PAD terhadap Total pendapatan Kota Bogor masih berkisar 30.99% dan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 mencapai kisaran 42.83%. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.20. : kontribusi realisasi komponen pendapatan daerah kota bogor



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Mengingat kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016 mengamanatkan bahwa penyaluran dana perimbangan yang akan diterima oleh daerah kabupaten/kota bersifat dinamis yang artinya dimungkinkan untuk naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara, maka dalam penyusunan APBD perlu antisipasi terhadap kemungkinan penurunan dana perimbangan, karena konsekuensinya akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD. Upaya-upaya intensifikasi untuk peningkatan PAD merupakan pilihan yang harus dilakukan meskipun tidak mudah dalam pelaksanaannya.

### **3.2.1.2.BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Belanja Daerah terdiri dari dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

#### **A. Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung pada dasarnya tidak berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 3.25. : Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Kota Bogor

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>BELANJA DAERAH</b>					
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					
1.1	Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )	726,175,854,412	792,640,665,276	868,927,388,610	814,005,452,521	872,972,628,517
1.2	Belanja Bunga	352,457,562	2,415,905,429	2,646,198,572	5,685,279,325	6,609,258,977
1.3	Belanja Subsidi					
1.4	Belanja Hibah	35,272,291,000	42,891,089,240	26,636,028,500	75,739,412,400	116,769,203,285
1.5	Belanja Bantuan Sosial	14,654,510,975	30,872,505,105	29,748,900	28,400,948,000	32,177,459,900
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes					
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	852,232,538	999,621,220	999,621,220	3,371,939,614	1,912,780,390
1.8	Belanja Tidak Terduga	2,533,275,000	3,855,084,200	5,370,006,482	1,714,085,956	43,586,950
	<b>TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>779,840,621,487</b>	<b>873,674,870,470</b>	<b>904,608,992,284</b>	<b>928,917,117,816</b>	<b>1,030,484,918,019</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-20

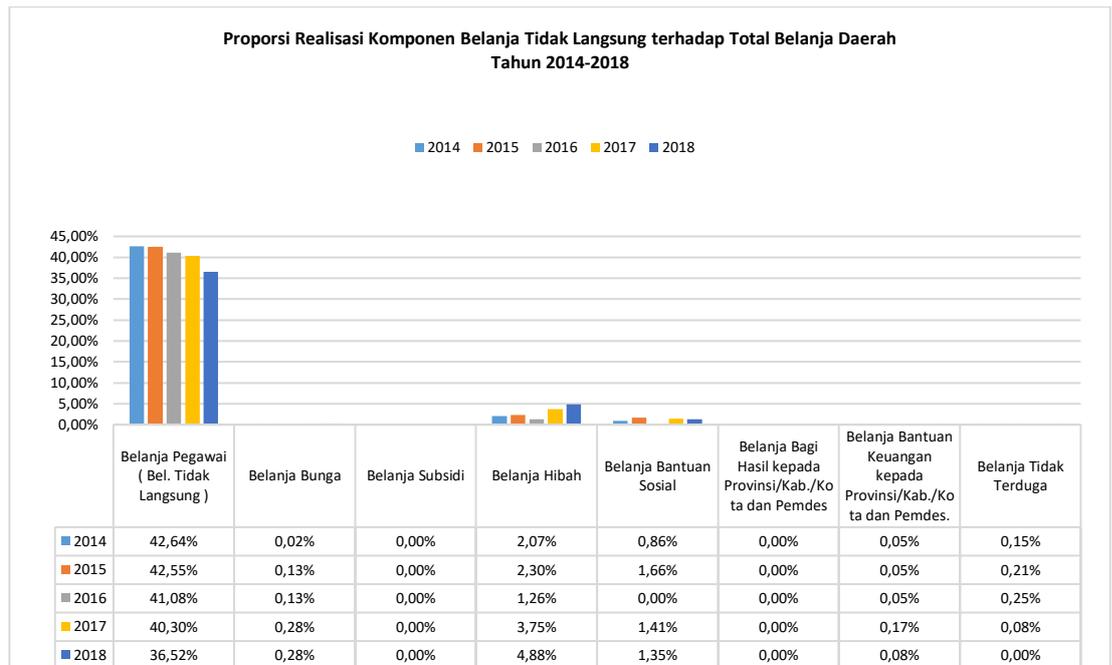
Grafik 3.21 : Tren Realisasi Belanja Langsung Per Komponen



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Apabila dilihat dari tren realisasi belanja tidak langsung Tahun 2014-2018 sebagaimana digambarkan diatas, terlihat bahwa total Belanja tidak langsung dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama peningkatan setiap tahun terjadi pada komponen Belanja Pegawai. Peningkatan belanja pegawai sejalan dengan penambahan jumlah pegawai yang ada di kota Bogor dan perubahan administrasi kepegawaian secara berkala. Lain halnya dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, besarnya mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan kebijakan umum terhadap prioritas anggaran tahun bersangkutan.

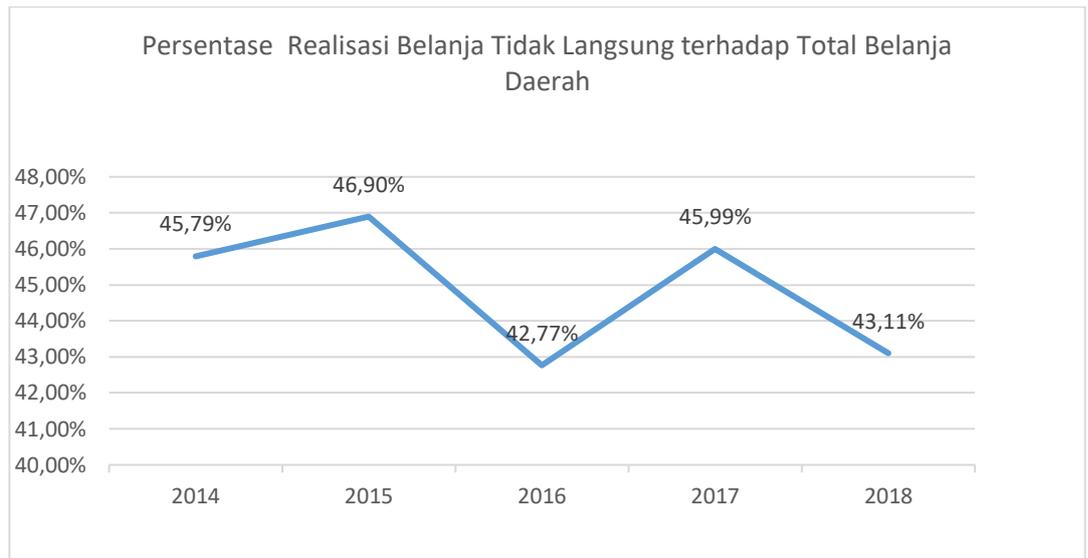
Grafik 3.22. : Proporsi Realisasi Belanja Langsung Per Komponen terhadap Total Belanja Daerah



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Rata-rata proporsi Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan pegawai yang termasuk dalam kategori Belanja tidak langsung terhadap total Belanja Daerah berkisar 40.62%, sementara secara umum rata-rata proporsi total realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total realisasi Belanja Daerah berkisar 44.91%. Angka ini secara tidak langsung menunjukkan masih lebih besar keberpihakan pemerintah Kota Bogor untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang dapat membawa hasil (*outcome*) bagi kepentingan masyarakat. Persentase realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah tahun 2014-2018 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini :

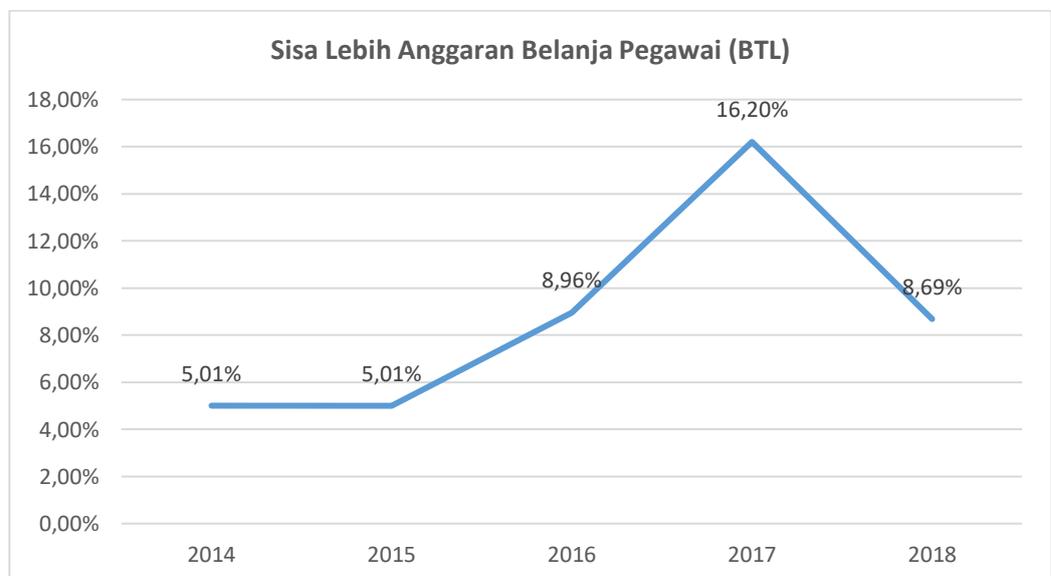
Grafik 3.23.: Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2014-2018 terdapat permasalahan bahwa sisa lebih anggaran belanja pegawai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada Tahun 2018, sisa lebih anggaran Belanja Pegawai berkisar 8,69% dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran belanja pegawai belum dilakukan secara akurat.

Gambar 3.24. : Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai (BTL)



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Untuk menghindari kekurangakuratan perencanaan penganggaran belanja pegawai sudah seharusnya integrasi antara sistem informasi/ data pegawai dan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan belanja pegawai perlu dilakukan. Berikut ini adalah gambaran perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2014-2018.

Grafik 3.25. : Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi, dan Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

## B. Belanja Langsung

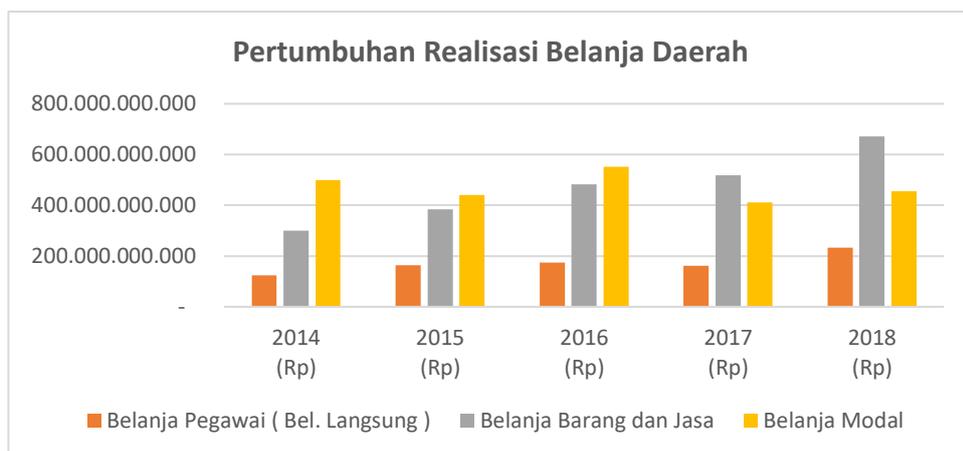
Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengukur capaian prestasi kerja dari belanja langsung dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai. Belanja Langsung terdiri atas tiga komponen utama yang menjadi prioritas, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Tabel 3.26. :Realisasi Belanja Langsung APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2014-2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						
2.1	Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )	124,035,291,258	164,327,724,558	175,103,589,795	160,721,220,228	234,051,884,972	15.29
2.2	Belanja Barang dan Jasa	299,750,681,278	384,060,724,979	483,099,789,155	519,022,548,669	671,754,308,226	18.16
2.3	Belanja Modal	499,335,882,425	440,919,551,227	552,484,517,036	411,084,400,003	454,281,173,803	-0.30
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>923,121,854,961</b>	<b>989,308,000,764</b>	<b>1,210,687,895,986</b>	<b>1,090,828,168,900</b>	<b>1,360,087,367,001</b>	<b>8.87</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

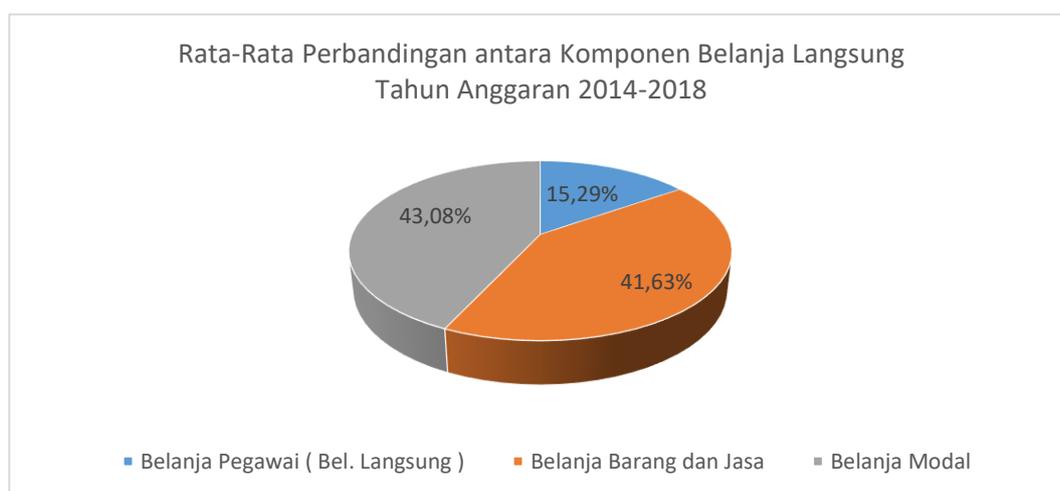
Grafik 3.26. : Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Apabila dilihat pada Tabel 3.26. tentang Realisasi Belanja Langsung 2014-2018, terlihat bahwa proporsi belanja pegawai pada komponen belanja langsung masih cukup tinggi yaitu berkisar antara 13 – 17 % dari total Belanja Langsung, sementara proporsi Belanja Modal berkisar antara 33-54% dari Belanja langsung sedangkan proporsi Belanja Barang dan Jasa berkisar rata-rata 32-49% dari Belanja Langsung. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat kecenderungan penurunan proporsi belanja modal terhadap belanja langsung dari tahun 2014-2018. Sementara sebaliknya terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja barang dan jasa setiap tahunnya.

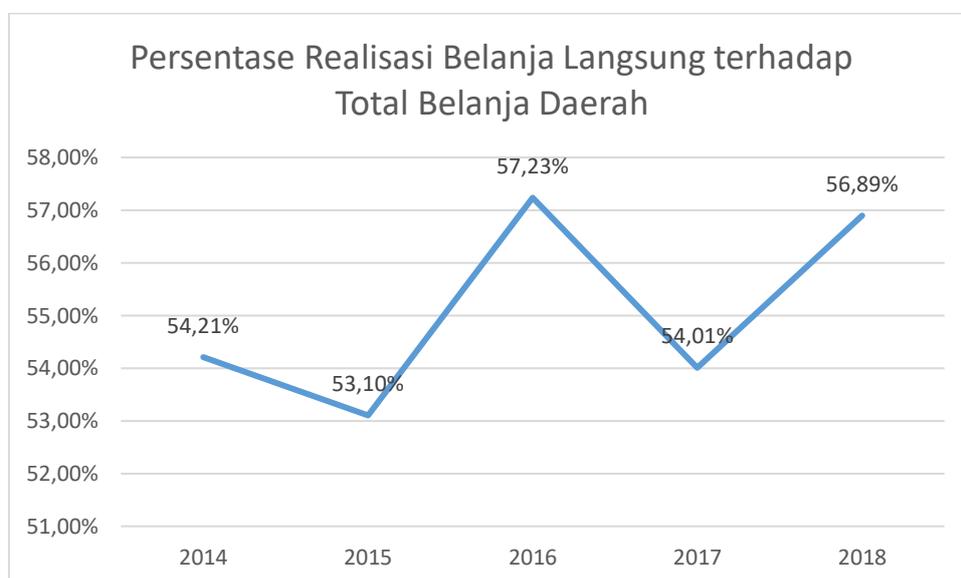
Grafik 3.27. : Rata-rata Perbandingan Per komponen Belanja Langsung



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Apabila kita lihat tren realisasi belanja langsung dan realisasi total belanja daerah dari tahun 2014-2018, maka dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi belanja langsung terhadap total belanja daerah masih berkisar 55,09%. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi Belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah yang hanya berkisar 44,91%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan APBD Kota Bogor masih lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pegawai/aparatur. Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

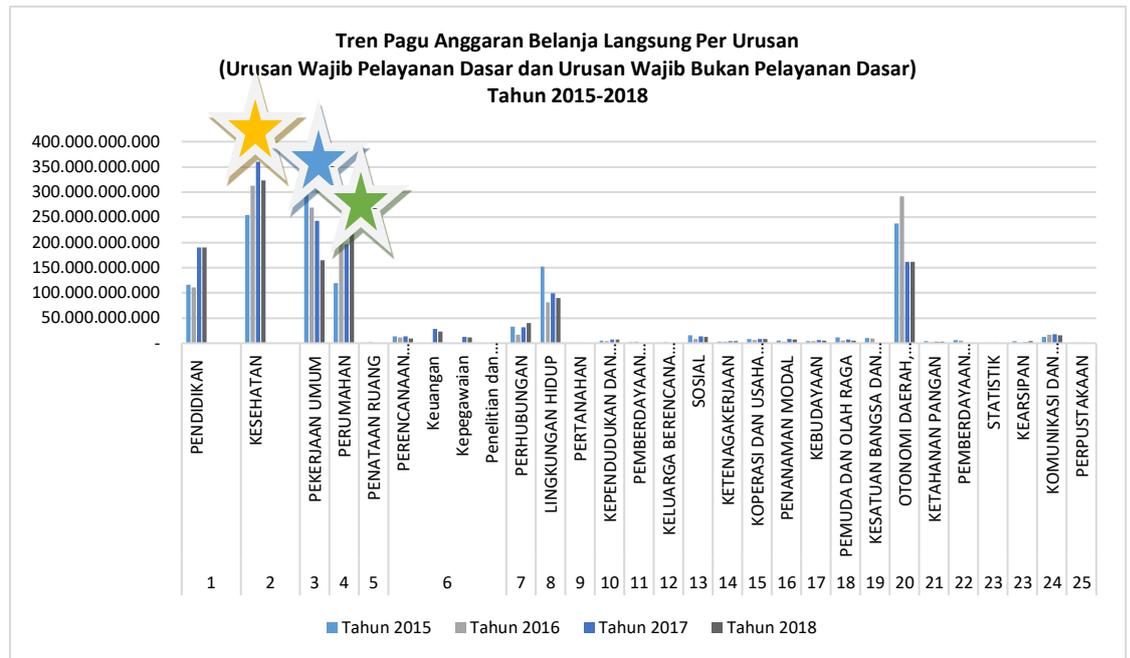
Grafik 3.28. : Persentase Realisasi Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Berikut ini adalah tren pagu anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bogor, APBD Propinsi Jawa Barat maupun Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat Tahun 2015-2018 yang dialokasikan untuk setiap urusan pemerintahan :

Grafik 3.29.: Tren Pagu Anggaran Belanja Langsung Per Urusan



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Apabila kita melihat tren alokasi anggaran tahun 2015-2018, anggaran terbesar dialokasikan berturut-turut untuk pelaksanaan urusan sebagai berikut :

1. Kesehatan,
2. Pekerjaan Umum,
3. Perumahan,
4. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian,
5. Pendidikan,
6. Lingkungan Hidup
7. Perhubungan
8. Sosial

Dilihat dari 8 tertinggi alokasi anggaran per urusan sebagaimana dimaksud diatas, urusan kesehatan, urusan perumahan dan urusan pendidikan menggambarkan tren positif. Perkembangan dari tahun 2015-2018, alokasi anggaran meningkat cukup tinggi untuk ketiga urusan tersebut. Sementara urusan perhubungan, urusan lingkungan hidup dan urusan sosial pada tahun 2016 sempat

mengalami penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan tetapi meningkat kembali pada tahun 2017 walaupun peningkatan alokasi anggaran tidak terlalu besar perubahannya. Sebaliknya, untuk urusan Pekerjaan Umum, dan urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian mengalami kecenderungan terjadi tren negatif dimana terjadi penurunan alokasi anggaran setiap tahun. Berikut ini adalah gambaran alokasi anggaran per urusan dari tahun 2015-2018.

Tabel 3.27. : Alokasi Anggaran Per Urusan Dari Tahun 2015-2018

<b>Pagu Anggaran Per Urusan</b>		<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
Urusan Wajib					
1	Pendidikan	115.683.786.822	110.968.917.701	189.716.776.697	190.173.747.546
2	Kesehatan	254.158.531.872	312.636.496.722	359.917.183.787	323.375.225.000
3	Pekerjaan umum	303.207.915.585	269.610.463.399	242.380.754.938	165.050.971.200
4	Perumahan	119.300.485.042	227.881.332.138	196.864.707.878	259.450.737.805
5	Penataan ruang	1.110.000.000	1.790.840.000	-	-
6	Perencanaan pembangunan	13.278.936.000	12.077.490.000	14.058.473.053	9.482.350.000
	Keuangan			28.925.006.220	23.549.400.000
	Kepegawaian			12.465.636.488	11.856.000.000
	Penelitian dan Pengembangan			700.000.000	-
7	Perhubungan	33.086.684.120	17.309.115.000	31.469.219.333	40.288.632.333
8	Lingkungan hidup	152.219.618.570	81.174.590.773	99.058.629.977	89.680.700.000
9	Pertanahan	850.000.000	500.000.000	450.000.000	-

<b>Pagu Anggaran Per Urusan</b>		<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
10	Kependudukan dan catatan sipil	5.398.500.000	4.300.561.188	7.725.761.000	7.842.269.000
11	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.955.000.000	2.577.000.000	-	-
12	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1.100.000.000	2.036.893.500	-	-
13	Sosial	15.881.074.560	8.067.414.000	13.937.967.745	13.003.107.000
14	Ketenagakerjaan	3.404.325.000	3.025.000.000	4.152.980.000	3.663.000.000
15	Koperasi dan usaha kecil menengah	8.331.967.200	5.973.581.000	8.490.610.000	8.823.000.000
16	Penanaman modal	4.862.090.000	3.342.500.000	7.986.046.000	7.083.000.000
17	Kebudayaan	4.451.323.700	3.699.622.000	5.866.042.600	4.760.700.000
18	Pemuda dan olah raga	11.177.151.000	5.713.740.000	7.834.851.000	4.865.000.000
19	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	10.903.066.330	9.940.656.410	-	-
20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	237.809.732.057	291.600.400.250	161.483.016.450	161.833.743.000
21	Ketahanan pangan	4.669.497.600	2.375.000.000	3.443.049.480	3.535.816.000
22	Pemberdayaan masyarakat dan desa	5.804.328.500	5.534.042.000	-	-
23	Statistik	-	276.261.000	125.000.000	-

<b>Pagu Anggaran Per Urusan</b>		<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
23	Kearsipan	4.533.445.500	1.122.000.000	1.932.887.445	3.725.000.000
24	Komunikasi dan informatika	12.916.585.900	16.471.476.860	18.049.190.312	15.551.479.080
25	Perpustakaan	-	694.300.000	845.000.000	-
<b><u>URUSAN PILIHAN</u></b>					
1	PERTANIAN	10.272.649.680	4.648.520.000	6.835.040.000	6.010.000.000
2	PARIWISATA	1.990.000.000	1.550.165.000	2.288.957.400	1.378.650.000
3	PERDAGANGAN	7.618.712.240	4.562.970.000	3.961.020.000	3.275.000.000
4	INDUSTRI	2.047.000.000	2.438.220.000	3.109.846.628	3.088.250.000
5	KETRANSMIGRASIAN	360.200.000	348.000.000	400.000.000	100.000.000

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Seiring dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, prioritas anggaran tahun 2015-2018 dialokasikan untuk

- a. Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri dari :
  1. Urusan Wajib Pendidikan
  2. Urusan Wajib Kesehatan
  3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman
  5. Urusan Wajib Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  6. Urusan Wajib Sosial
  
- b. Pelaksanaan 6 skala prioritas pembangunan yang terdiri dari :
  1. Penataan Transportasi dan Angkutan Umum
  2. Penataan pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota
  3. Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
  4. Penataan Ruang Publik, Pedestrian, taman dan ruang terbuka hijau
  5. Transformasi budaya dan reformasi birokrasi
  6. Penanggulangan Kemiskinan

Selain untuk mendanai pembangunan daerah yang terbagi menjadi 25 (dua puluh lima) urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana dimaksud diatas, ada kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan 5 (lima) urusan pilihan meliputi urusan pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan transmigrasi.

### C. Total Belanja Daerah Kota Bogor

**TABEL 3.28. :** Realisasi Belanja Kota Bogor Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>779,840,621,487</b>	<b>873,674,870,470</b>	<b>904,608,992,284</b>	<b>928,917,117,816</b>	<b>1,030,484,918,019</b>	<b>5.84</b>
1.1	Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )	726,175,854,412	792,640,665,276	868,927,388,610	814,005,452,521	872,972,628,517	3.94
1.2	Belanja Bunga	352,457,562	2,415,905,429	2,646,198,572	5,685,279,325	6,609,258,977	145.22
1.3	Belanja Subsidi						
1.4	Belanja Hibah	35,272,291,000	42,891,089,240	26,636,028,500	75,739,412,400	116,769,203,285	44.44
1.5	Belanja Bantuan Sosial	14,654,510,975	30,872,505,105	29,748,900	28,400,948,000	32,177,459,900	19,078.59
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes						
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	852,232,538	999,621,220	999,621,220	3,371,939,614	1,912,780,390	42.27
1.8	Belanja Tidak Terduga	2,533,275,000	3,855,084,200	5,370,006,482	1,714,085,956	43,586,950	-14.81
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>923,121,854,961</b>	<b>989,308,000,764</b>	<b>1,210,687,895,986</b>	<b>1,090,828,168,900</b>	<b>1,360,087,367,001</b>	<b>8.87</b>
2.1	Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )	124,035,291,258	164,327,724,558	175,103,589,795	160,721,220,228	234,051,884,972	15.29
2.2	Belanja Barang dan Jasa	299,750,681,278	384,060,724,979	483,099,789,155	519,022,548,669	671,754,308,226	18.16
2.3	Belanja Modal	499,335,882,425	440,919,551,227	552,484,517,036	411,084,400,003	454,281,173,803	-0.30
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>1,702,962,476,448</b>	<b>1,862,982,871,234</b>	<b>2,115,296,888,270</b>	<b>2,019,745,286,716</b>	<b>2,390,572,285,020</b>	<b>7.36</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

**TABEL 3.29. : Realisasi Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Persentase Realisasi BTL terhadap Total Belanja Daerah	45.79%	46.90%	42.77%	45.99%	43.11%	44.91%
2	Persentase Realisasi BL terhadap Total Belanja Daerah	54.21%	53.10%	57.23%	54.01%	56.89%	55.09%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Apabila dilihat pada Tabel 3.2.8 tentang realisasi Belanja Kota Bogor tahun 2014-2018, terlihat bahwa rata-rata rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 55% : 45%. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan publik yang telah direncanakan dalam bentuk pelaksanaan urusan dan program pembangunan lebih besar dibanding kebutuhan lainnya berupa belanja gaji pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan belanja tidak terduga. Tren yang menggambarkan rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2014-2017 tergambar pada diagram berikut ini :

**Grafik 3.30. :** Rasio antara Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2014-2017



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

**Grafik 3.31. :** Komposisi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Sementara apabila dianalisa lebih detail lagi rasio antara total belanja pegawai yang terdapat dalam komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan belanja lainnya yang diperuntukkan untuk

pemenuhan kebutuhan publik/ kebutuhan non pegawai adalah berkisar 48-49% untuk belanja pegawai dan 51-52% untuk belanja pemenuhan kebutuhan publik. Dan terlihat kecenderungannya dari tahun ke tahun terdapat penurunan proporsi belanja pegawai dibanding belanja pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap prioritas pemenuhan kebutuhan publik.

Tabel 3.30. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bogor Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2014			TAHUN ANGGARAN 2015			TAHUN ANGGARAN 2016			TAHUN ANGGARAN 2017			TAHUN ANGGARAN 2018		
		ANGGAR AN (Rp)	REALISA SI (Rp)	Prop orsi realis asi belanja thd belanja (%)	ANGGAR AN (Rp)	REALISA SI (Rp)	Prop orsi realis asi belanja thd belanja (%)	ANGGAR AN (Rp)	REALISA SI (Rp)	Prop orsi realis asi belanja thd belanja (%)	ANGGAR AN (Rp)	REALISA SI (Rp)	Prop orsi realis asi belanja thd belanja (%)	ANGGAR AN (Rp)	REALISA SI (Rp)	Prop orsi realis asi belanja thd belanja (%)
2																
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>															
2.1	Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )	764,440,723	726,175,854	42.64	834,444,991	792,640,665	42.55	954,477,099	868,927,388	41.08	971,401,154	814,005,452	40.30	956,014,994	872,972,628	36.52
.1		,204	,412	%	,588	,276	%	,975	,610	%	,327	,521	%	,291	,517	%
2.1	Belanja Bunga	6,603,600,0	352,457,562	0.02	4,952,483,3	2,415,905,4	0.13	4,938,951,9	2,646,198,5	0.13	5,685,279,3	5,685,279,3	0.28	7,000,000,0	6,609,258,9	0.28
.2		00		%	31	29	%	56	72	%	27	25	%	00	77	%
2.1	Belanja Subsidi															
.3																
2.1	Belanja Hibah	40,099,104,000	35,272,291,000	2.07	46,687,048,729	42,891,089,240	2.30	27,656,752,500	26,636,028,500	1.26	81,832,872,400	75,739,412,400	3.75	122,276,492,285	116,769,203,285	4.88
.4				%			%			%			%			%
2.1	Belanja Bantuan Sosial	31,180,229,000	14,654,510,975	0.86	57,070,197,500	30,872,505,105	1.66	50,000,000	29,748,900	0.00	31,518,018,840	28,400,948,000	1.41	38,759,144,900	32,177,459,900	1.35
.5				%			%			%			%			%
2.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes															
.6																
2.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	900,000,000	852,232,538	0.05	1,207,251,155	999,621,220	0.05	1,115,203,192	999,621,220	0.05	6,960,762,926	3,371,939,614	0.17	5,157,216,192	1,912,780,390	0.08
.7				%			%			%			%			%
2.1	Belanja Tidak Terduga	7,759,147,281	2,533,275,000	0.15	19,309,977,788	3,855,084,200	0.21	23,255,577,341	5,370,006,482	0.25	28,079,575,767	1,714,085,956	0.08	20,278,006,034	43,586,950	0.00
.8				%			%			%			%			%
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>850,982,803,485</b>	<b>779,840,621,487</b>	<b>45.79</b>	<b>963,671,950,091</b>	<b>873,674,870,470</b>	<b>46.90</b>	<b>1,011,493,584,964</b>	<b>904,608,992,284</b>	<b>42.77</b>	<b>1,125,477,663,587</b>	<b>928,917,117,816</b>	<b>45.99</b>	<b>1,149,485,853,702</b>	<b>1,030,484,918,019</b>	<b>43.11</b>
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>															
2.2	Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )	123,981,461,298	124,035,291,258	7.28	178,638,138,090	164,327,724,558	8.82	181,772,153,544	175,103,589,795	8.28	230,978,702,104	160,721,220,228	7.96	239,955,040,235	234,051,884,972	9.79
.1				%			%			%			%			%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	343,688,262,703	299,750,681,278	17.60	481,022,426,081	384,060,724,979	20.62	530,892,764,217	483,099,789,155	22.84	733,911,053,849	519,022,548,669	25.70	749,808,967,659	671,754,308,226	28.10
.2				%			%			%			%			%
2.2	Belanja Modal	674,174,836,139	499,335,882,425	29.32	688,722,043,107	440,919,551,227	23.67	701,582,651,180	552,484,517,036	26.12	507,090,025,022	411,084,400,003	20.35	512,030,788,564	454,281,173,803	19.00
.3				%			%			%			%			%
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,141,844,560,140</b>	<b>923,121,854,961</b>	<b>54.21</b>	<b>1,348,382,607,278</b>	<b>989,308,000,764</b>	<b>53.10</b>	<b>1,414,247,568,941</b>	<b>1,210,687,895,986</b>	<b>57.23</b>	<b>1,471,979,780,975</b>	<b>1,090,828,168,900</b>	<b>54.01</b>	<b>1,501,794,796,458</b>	<b>1,360,087,367,001</b>	<b>56.89</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1,992,827,363,625</b>	<b>1,702,962,476,448</b>	<b>100.0</b>	<b>2,312,054,557,369</b>	<b>1,862,982,871,234</b>	<b>100.0</b>	<b>2,425,741,153,905</b>	<b>2,115,296,888,270</b>	<b>100.0</b>	<b>2,597,457,444,562</b>	<b>2,019,745,286,716</b>	<b>100.0</b>	<b>2,651,280,650,160</b>	<b>2,390,572,285,020</b>	<b>100.0</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Gambaran tentang realisasi belanja pemenuhan kebutuhan apartur Kota Bogor yang menginformasikan kebutuhan belanja aparatur selama tahun 2014-2018, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.31. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	628,667,475,086	683,220,310,370	710,723,908,975	466,850,472,154	460,118,149,976
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72,719,690,300	83,714,425,000	128,193,906,419	315,056,595,870	372,130,781,375
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,377,165,000	4,395,120,000	4,565,370,000	8,619,700,000	15,216,625,000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	17,176,262,666	19,390,598,280	22,655,139,708	22,536,365,039	19,127,250,000
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>					
1	Belanja Honorarium PNS**)	61,782,809,635	48,714,560,477	48,119,025,550	35,564,828,100	24,837,943,110
2	Belanja Uang Lembur**)	1,367,329,000	1,874,684,600	2,497,153,500	4,246,925,500	3,041,619,000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	87,000,000	142,250,000	-	113,000,000	112,800,000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	5,465,422,200	6,242,219,800	7,323,230,807	6,405,699,760	4,841,418,009
5	Belanja premi asuransi kesehatan	879,100,000	4,475,020,070	20,255,938,500	27,416,500,000	36,183,593,000
6	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	3,147,583,500	2,238,747,845	5,604,530,025	3,564,321,237	3,489,123,671
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1,006,016,300	1,327,686,550	1,354,797,400	1,637,617,870	2,352,855,815
8	Belanja perjalanan dinas**)	31,422,799,144	44,464,215,821	64,649,885,367	80,414,518,068	92,804,807,934
9	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	492,283,600,325	440,919,551,227	552,484,517,036	433,491,716,724	455,461,723,593
	<b>TOTAL</b>	<b>1,320,382,253,156</b>	<b>1,341,119,390,040</b>	<b>1,568,427,403,287</b>	<b>1,405,918,260,322</b>	<b>1,470,610,567,733</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Gambaran tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Bogor yang menginformasikan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2014-2018, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.32 : Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	628,667,475,086.0	683,220,310,370.0	710,723,908,975.0	466,850,472,154.0	460,118,149,976.0	-4.61
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72,719,690,300.0	83,714,425,000.0	128,193,906,419.0	315,056,595,870.0	372,130,781,375.0	46.43
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,377,165,000.0	4,395,120,000.0	4,565,370,000.0	8,619,700,000.0	15,216,625,000.0	33.92
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	17,176,262,666.0	19,390,598,280.0	22,655,139,708.0	22,536,365,039.0	19,127,250.0	-14.14
<b>B</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>						
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	8,700,000,000	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	54,934,179,256	10,921,110,161	71,917,632,000	19,234,000,000	-	61.03
3	Pembayaran Pokok Utang	777,777,776	-	-	-	45,523,415,589	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	500,000,000	936,048,000	936,048,000	-	-	-
							-
	Total (A+B)	779,152,550,084.0	802,577,611,811.0	938,992,005,102.0	832,297,133,063.0	901,708,099,190.0	3.40

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

### **3.2.1.3. NERACA DAERAH**

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Di sisi neraca daerah, total aset pemerintah Kota Bogor yang tercatat pada tahun 2013 sebesar Rp 5.438.033.205.130,55 Aset yang paling besar peningkatannya adalah pada aset tanah yang mengalami peningkatan sebesar Rp 250.572.365.606 atau mengalami peningkatan sebesar 9,52 persen dibanding tahun 2012.

Berikut ini adalah perkembangan kondisi neraca daerah dalam kurun waktu 2014-2018 yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.33. : Kondisi Neraca Daerah Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (anaudited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
<b>1</b>	<b>ASET</b>						
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
11101	Kas di Kas Daerah	289,565,303,000	324,780,908,786	288,028,518,947	300,431,310,181	300,431,310,181	1.03
11102	Kas di Bendahara Penerimaan	22,250,000	2,985,000	8,522,500	5,760,000	0	(6.70)
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,649,800,802	309,243,753	137,561,674	694,504,515	0	31.56
11104	Kas di BLUD	5,131,020,928	5,442,572,901	2,898,752,122	14,350,183,959	0	50.88
11105	Kas di Bendahara FKTP	3,484,964,453	10,624,410,125	14,393,911,340	14,442,219,555	0	28.14
11106	Kas Lainnya	79,101,520	92,212,151	152,340	9,722,841	0	1,219.81
11107	Kas di Bendahara BOS Pusat		2,610,967,858	1,383,988,995	553,021,703	0	-
11108	Setara Kas						
112	Investasi Jangka Pendek						
113	Piutang Pendapatan	201,683,610,623	234,263,525,081	228,710,549,332	266,562,258,467	12,686,284,438	(12.98)
114	Piutang Lainnya	178,881,402,224	196,077,941,115	217,830,975,789	156,355,315,478	95,184,803,423	(9.33)
115	Penyisihan Piutang	0	(134,562,670,943)	(210,479,082,190)	(150,642,870,026)	(488,811,479)	-
116	Beban Dibayar Dimuka	0	543,537,332	624,085,970	628,357,288	0	-
117	Persediaan	21,343,218,214	26,475,086,576	21,633,622,895	25,902,278,249	0	(14.90)
11801	R/K SKPD						
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>703,840,671,765</b>	<b>666,660,719,735</b>	<b>565,171,559,713</b>	<b>629,292,062,210</b>	<b>407,813,586,564</b>	<b>(8.87)</b>

NO	URAIAN	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (anaudited)	Rata- Rata Pertumbu- han (%)
<b>12</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
121	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
12101	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya						
12102	Investasi dalam Obligasi						
12103	Investasi dalam Proyek Pembangunan						
12104	Dana Bergulir	63,742,100	63,742,100	63,742,100	63,742,100	63,742,100	0.00
12105	Deposito Jangka Panjang						
12106	Investasi Non Permanen Lainnya						
122	Investasi Jangka Panjang Permanen						
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	377,200,142,940	414,813,899,454	480,145,325,043	495,500,265,059	495,500,265,059	5.78
12202	Investasi Permanen Lainnya						
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>377,263,885,040</b>	<b>414,877,641,554</b>	<b>480,209,067,143</b>	<b>495,564,007,159</b>	<b>495,564,007,159</b>	<b>5.78</b>
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>						
131	Tanah	2,966,049,533,007	3,798,390,467,269	4,777,034,955,270	4,708,114,761,107	2,030,038,235,525	(0.90)
132	Peralatan dan Mesin	373,664,663,395	373,807,735,084	482,687,944,551	526,574,545,751	2,435,048,280	(12.26)
133	Gedung dan Bangunan	641,444,980,505	690,549,117,290	811,933,746,981	796,074,327,217	10,400,583,237	(15.08)
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,013,583,750,943	1,239,288,612,328	1,599,063,331,888	1,781,248,778,912	104,203,999,904	(6.29)
135	Aset Tetap Lainnya	18,348,602,332	19,566,866,046	15,238,592,504	13,835,356,165	189,040,000	(24.66)
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	10,438,201,945	20,144,534,718	62,721,423,609	114,545,306,676	0	57.39

NO	URAIAN	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (anaudited)	Rata- Rata Pertumbu- han (%)
137	Akumulasi Penyusutan	0	(927,377,840,579)	(1,302,449,283,874)	(1,355,566,488,044)	(61,691,722,497)	-
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>5,023,529,732,127</b>	<b>5,214,369,492,155</b>	<b>6,446,230,710,929</b>	<b>6,584,826,587,784</b>	<b>2,085,575,184,449</b>	<b>(7.75)</b>
<b>14</b>	<b>DANA CADANGAN</b>						
141	Dana Cadangan						
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>							
<b>15</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
151	Tagihan Jangka Panjang	1,884,686,569	1,835,834,279	1,357,186,175	3,477,148,757	3,477,148,757	25.51
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	127,572,732,768	127,572,732,768	127,572,732,768	127,572,732,768	127,572,732,768	0.00
153	Aset Tak Berwujud	8,641,753,030	11,092,553,493	13,100,114,798	13,038,019,187	0	(10.80)
154	Aset Lain-lain	20,696,537,766	134,027,089,084	132,281,197,032	150,808,465,200	3,499,325,263	92.52
155	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud				(10,680,822,599)	0	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>158,795,710,133</b>	<b>274,528,209,624</b>	<b>274,311,230,773</b>	<b>284,215,543,312</b>	<b>134,549,206,788</b>	<b>4.75</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>6,263,429,999,065</b>	<b>6,570,436,063,068</b>	<b>7,765,922,568,559</b>	<b>7,993,898,200,466</b>	<b>3,123,501,984,960</b>	<b>(6.98)</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,003,003,979	1,575,717,459	727,852,898	463,359,376	0	(26.61)
212	Utang Bunga						
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2,333,333,328	0	1,708,622,235	103,477,778	0	-
214	Pendapatan Diterima Dimuka	0	3,477,777,580	23,401,719,615	517,737,454	0	-

NO	URAIAN	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)	2017 (audited)	2018 (anaudited)	Rata- Rata Pertumbu- han (%)
215	Utang Beban	0	12,334,600,489	6,050,701,870	7,696,678,003	0	-
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	14,244,219,020	52,861,101	30,552,980,707	9,683,558,774	0	11,486.13
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>17,580,556,327</b>	<b>17,440,956,629</b>	<b>62,441,877,325</b>	<b>18,464,811,385</b>	<b>0</b>	<b>17.36</b>
<b>22</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
221	Utang Dalam Negeri	89,745,233,774	89,297,790,559	85,255,834,996	85,013,875,740	85,013,875,740	(1.06)
222	Utang Jangka Panjang Lainnya						
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>89,745,233,774</b>	<b>89,297,790,559</b>	<b>85,255,834,996</b>	<b>85,013,875,740</b>	<b>85,013,875,740</b>	<b>(1.06)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>107,325,790,101</b>	<b>106,738,747,188</b>	<b>147,697,712,321</b>	<b>103,478,687,125</b>	<b>85,013,875,740</b>	<b>(1.99)</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>						
311	Ekuitas	6,156,104,208,964	6,463,697,315,880	7,618,224,856,238	7,890,419,513,341	3,038,488,109,220	(7.01)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>6,156,104,208,964</b>	<b>6,463,697,315,880</b>	<b>7,618,224,856,238</b>	<b>7,890,419,513,341</b>	<b>3,038,488,109,220</b>	<b>(7.01)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>6,263,429,999,065</b>	<b>6,570,436,063,068</b>	<b>7,765,922,568,559</b>	<b>7,993,898,200,466</b>	<b>3,123,501,984,960</b>	<b>(6.98)</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

### 3.2.2.KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh pendanaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan dicerminkan dari proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja keseluruhan dan proporsi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

#### 3.2.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Tabel 3.34. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2018	1,470,610,567,733	2,444,795,700,609	60.15%
2	Tahun Anggaran 2017	1,405,918,260,322	2,038,979,286,716	68.95%
3	Tahun Anggaran 2016	1,568,427,403,287	2,188,150,568,270	71.68%
4	Tahun Anggaran 2015	1,341,119,390,040	1,874,840,029,395	71.53%
5	Tahun Anggaran 2014	1,320,382,253,156	1,759,174,433,480	75.06%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

### **3.2.2.2. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya.

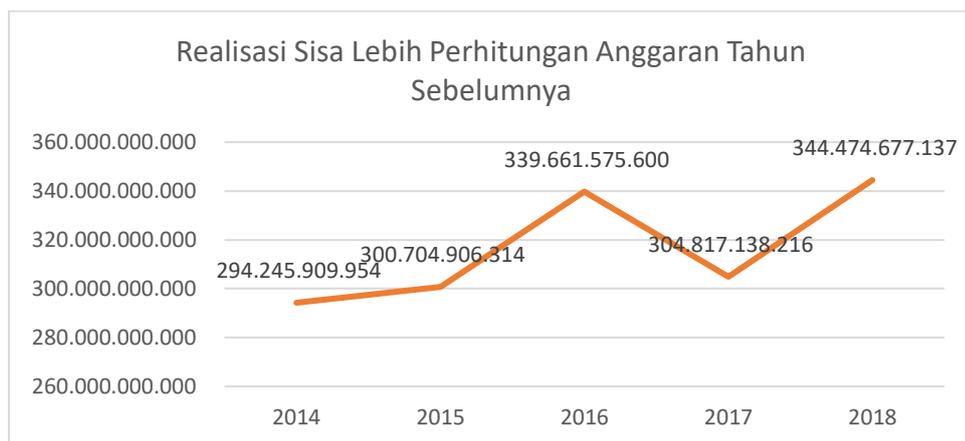
Tabel 3.35. : Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,757,697,381,840	1,913,210,404,036	2,152,370,082,886	2,213,925,481,481	2,120,354,850,321
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,702,962,476,448	1,862,982,871,234	2,115,296,888,270	2,019,745,286,716	2,390,572,285,020
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	56,211,957,032	11,857,158,161	72,853,680,000	19,234,000,000	54,223,415,589
<b>A</b>	<b>Defisit riil</b>	<b>(1,477,051,640)</b>	<b>38,370,374,641</b>	<b>(35,780,485,384)</b>	<b>174,946,194,765</b>	<b>(324,440,850,288)</b>
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	294,245,909,954	300,704,906,314	339,661,575,600	304,817,138,216	344,474,677,137
5	Pencairan Dana Cadangan					
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	7,000,000,000				55,640,573,400
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	936,048,000	500,000,000	936,048,000		
9	Penerimaan Piutang Daerah					
<b>B</b>	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>302,181,957,954</b>	<b>301,204,906,314</b>	<b>340,597,623,600</b>	<b>304,817,138,216</b>	<b>400,115,250,537</b>
<b>A-B</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>300,704,906,314</b>	<b>339,575,280,955</b>	<b>304,817,138,216</b>	<b>479,763,332,981</b>	<b>75,674,400,249</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Gambar 3.2.16. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bogor Tahun 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

#### A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Realisasi penerimaan pembiayaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 penerimaan pembiayaan daerah hanya sebesar Rp. 302.181.957.954, sedangkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan pembiayaan daerah meningkat sebesar Rp 400.115.250.537,-.

## **B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD dan pemberian pinjaman daerah. Tahun 2014 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah Rp 56.211.957.032 dan pada tahun 2018 menurun menjadi Rp. 54.223.415.589,-

Tabel 3.36 : Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>302,181,957,954</b>	<b>301,204,906,314</b>	<b>340,597,623,600</b>	<b>304,817,138,216</b>	<b>400,115,250,537</b>	<b>6.70</b>
1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	294,245,909,954	300,704,906,314	339,661,575,600	304,817,138,216	344,474,677,137	3.58
1.2	Pencairan Dana Cadangan						
1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	7,000,000,000				55,640,573,400	-
1.4	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	936,048,000	500,000,000	936,048,000			-
1.5	Penerimaan Piutang Daerah						
1.6	Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja						
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>56,211,957,032</b>	<b>11,857,158,161</b>	<b>72,853,680,000</b>	<b>19,234,000,000</b>	<b>54,223,415,589</b>	<b>108.77</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan					8,700,000,000	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	54,934,179,256	10,921,110,161	71,917,632,000	19,234,000,000		61.03
2.3	Pembayaran Pokok Utang	777,777,776				45,523,415,589	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	500,000,000	936,048,000	936,048,000			-
	<b>TOTAL PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>245,970,000,922</b>	<b>289,347,748,153</b>	<b>267,743,943,600</b>	<b>285,583,138,216</b>	<b>345,891,834,948</b>	<b>7.59</b>

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

### **3.2.3. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020**

#### **3.2.3.1. Arah kebijakan pendapatan daerah**

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber -sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Sistem dan Prosedur Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;;
4. Memberikan penghargaan kepada PD penghasil yang memenuhi atau melebihi target pencapaian retribusi, serta Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi atau melebihi target pencapaian PBB.
5. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan msyarakat dan dunia usaha
6. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan.
7. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
8. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
9. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari dana perimbangan.
10. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.

11. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.
12. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
13. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
14. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;

#### **3.2.3.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020**

Dalam upaya terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah kota Bogor sebagai salah satu sumber dana penopang pembangunan kota Bogor tahun 2020, maka arah kebijakan yang ditetapkan untuk memenuhi penerimaan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk peningkatan PAD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pajak dan retribusi daerah mengacu pada Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
2. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
3. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
4. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan PAD.

5. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, bahwa pada tahun 2016 telah dikeluarkan beberapa kebijakan diantaranya :
- a) Penyesuaian terhadap Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2 dengan asumsi dapat meningkatkan rasa keadilan diantara para wajib pajak, sekaligus dapat mendekati nilai jual obyek pajak dengan harga pasar;
  - b) Penerapan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan PBB P2 tahun 2020:
    1. penerapan e-SPPT PBB P2, mulai dari penerbitan sampai dengan penyampaian kepada Wajib Pajak;
    2. penyampaian SPPT secara online melalui e – SPPT PBB P2;
    3. restrukturisasi tarif PBB P2;
  - c) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan menitikberatkan pada pengintegrasian sistem informasi;
  - d) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah;
  - e) Melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
  - f) Pembentukan profil potensi Pendapatan Asli Daerah Wajib Pajak Daerah non PBB BPHTB;
  - g) Kerjasama antar PD, dan intansi vertikal dalam rangka optimalisasi pajak dan retribusi;
  - h) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
  - i) Meningkatkan peran PD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
  - j) Inventarisasi asset dengan pengelolaan pemanfaatan kekayaan daerah.

#### **3.2.3.1.2. Arah kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan**

Kebijakan pendapatan untuk penerimaan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21);
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

4. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH TA 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2020 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH dapat direncanakan berdasarkan pada :
  - a) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 atau
  - b) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2020.
5. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT TA 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2020 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT dapat direncanakan berdasarkan pada :
  - a) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2017, TA 2018 dan TA 2019; atau
  - b) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2020.
6. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2020 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU dapat direncanakan berdasarkan pada alokasi DAU TA 2019.
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2020. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka perkiraan alokasi DAK dapat direncanakan berdasarkan pada:
  - a) Realisasi pendapatan DAK 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 atau
  - b) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2020.

### **3.2.3.1.3. Arah Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Kebijakan yang ditetapkan untuk Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi sinergis dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan PD Penghasil;
2. Melakukan upaya peningkatan alokasi dana dari pusat di luar alokasi DAU dan DAK ke daerah.
3. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud atau dianggarkan berdasarkan alokasi penerimaan pendapatan hibah tahun 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2018.
4. Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2020. Dalam hal penetapan APBD Kota TA 2020 mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2020, penganggarnya dapat direncanakan berdasarkan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2018.
5. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2020.
6. Dana Otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2020.
7. Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Penetapan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta mengacu pada tren penerimaan dana perimbangan dan tren penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait. Penetapan Target Pendapatan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37. : Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2020

No.	URAIAN	Tahun 2019 (RP)	Tahun 2020 ( Rp )
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	620,894,818,419	684.050.500.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	47,559,782,875	47.170.287.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32,609,812,282	32.609.812.282
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	243,330,237,231	247.428.264.675
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>944,394,650,807</b>	<b>1.011.258.863.957</b>
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	96,957,077,000	96.957.077.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	813,779,065,000	838.948.449.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	128,635,135,000	
	<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1,039,371,277,000</b>	<b>935.905.526.000</b>
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		
1.3.1	Pendapatan Hibah	86,269,600,000	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	239,370,189,517	239.370.189.517
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41,073,011,000	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>366,712,800,517</b>	<b>239.370.189.517</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,350,478,728,324</b>	<b>2.186.534.579.474</b>

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) untuk Tahun Anggaran 2020 perlu melakukan langkah - langkah strategis untuk meningkatkan perencanaan Pendapatan Daerah yaitu dengan:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
  - a) Peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah melalui forum diskusi, seminar dan sebagainya;
  - b) Peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak dan retribusi daerah;
  - c) Penyempurnaan dasar hukum pengelolaan pendapatan asli daerah;
  - d) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung;
  - e) Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;

- f) Peningkatan upaya yang dapat mengoptimalkan potensi pariwisata Kota Bogor
    - sosialisasi potensi pariwisata Kota Bogor;
    - penyelenggaraan kegiatan skala nasional dan internasional;
    - melakukan edukasi terhadap Warga, Kelompok Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor dalam membangun citra pariwisata Kota Bogor;
    - meningkatkan rasa nyaman dan aman wisatawan di Kota Bogor;
    - melakukan penataan kuliner sehingga lebih bersih, rapi, dan nyaman sebagai salah satu potensi wisata dan potensi pendapatan asli daerah;
  - g) Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - i) Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.
  - j) Peningkatan profesionalitas sumber daya aparatur pengelola PAD melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, fungsionalisasi jabatan dan lain sebagainya;
  - k) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antar kabupaten/kota;
  - l) Optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah; m. Penguatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan law enforcement pengelolaan PAD.
2. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:
    - a) Peningkatan kerjasama dengan KPP Pratama Bogor;
    - b) Peningkatan koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah;
    - c) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI serta Pemprov Jabar dalam upaya meningkatkan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
  3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Lainnya dalam rangka meningkatkan besaran target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

### **3.2.3.2. Arah kebijakan Belanja Daerah**

Struktur belanja daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, dan (3) Belanja Modal.

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Mendasarkan pada hasil evaluasi realisasi belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

Ketentuan umum alokasi belanja daerah tahun 2020 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di atasnya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Daerah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-

2024 dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja 3 (tiga) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 18 (delapan belas) Sasaran pembangunan Kota Bogor pada Tahun 2020, dengan program prioritas dan kegiatan prioritas sesuai dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) urusan dan pemerintah pilihan sejumlah 6 (enam) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (lima) urusan; serta untuk mendukung pembiayaan program/kegiatan prioritas untuk mewujudkan janji politis walikota yang terdiri dari :

a) BOGOR LANCAR

- Konversi Angkot
- Pembangunan jalan protokol alternatif
- Pembangunan flyover di Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes
- Penataan kawasan stasiun kereta api

b) BOGOR MERENAH

- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
- Pembangunan kampung wisata
- Revitalisasi pasar tradisional
- Kampungku bersih dan hijau
- Pembangunan Gedung Olah Raga Di setiap Kecamatan

c) BOGOR KASOHOR

- Pembangunan museum
- Revitalisasi perpustakaan kota
- Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

d) BOGOR MOTEKAR

- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional
- Festival seni & Helaran Budaya

e) BOGOR SAMAWA

- Sekolah Ibu
- 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
- Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2023
- Pemberian insentif bagi guru ngaji
- Orang Tua Asuh

f) ABDI BOGOR

- Mall pelayanan Publik
- Kunjungan dokter ke keluarga
- Konseling & Call Center 24 Jam
- Layanan Malam Kelurahan
- RSUD Unggul

2. Belanja Daerah juga dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang sinergis dengan Program Prioritas yang tertuang dalam RKP Tahun 2020 serta RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;

3. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana fungsi pendidikan

20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

4. Sesuai amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Selanjutnya bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 persen agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Pembiayaan untuk fungsi kesehatan, tidak hanya diperuntukkan untuk urusan kesehatan tetapi juga untuk non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
5. Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bogor akan terus melakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat. Oleh karenanya, belanja daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berupa Hibah dan Bantuan Sosial) harus dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 untuk mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah baik melalui usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil Musrenbang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari DAK Fisik dan Non Fisik menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, sementara Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh Ketentuan dari Pemerintah Propinsi.
7. Dana Insentif Daerah yang dialokasikan dari APBN untuk pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiscal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan,

- kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya Dana Insentif Daerah tersebut akan dialokasikan dalam belanja daerah semaksimal mungkin untuk program-program prioritas pelayanan dasar public di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pelayanan umum pemerintahan, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. DAU Tambahan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk dana kelurahan, dialokasikan dalam belanja daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
  9. Alokasi Belanja Langsung dalam Belanja Daerah direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yaitu :
    - a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
    - b) dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah;
    - c) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
    - d) dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.
    - e) direncanakan menurut prinsip “*money follow programme*” dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.
  10. Pemenuhan proporsi Belanja langsung diupayakan meningkat menjadi 55% dari Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 . (Total Belanja Langsung Tahun 2019 = 54% dari Total APBD Tahun 2019).
  11. Penataan Kawasan DAS Ciliwung dan Penataan Kawasan Suryakencana menjadi prioritas Pembangunan Tahun 2020 yang harus diintervensi oleh anggaran belanja lintas sector dengan harapan program pembangunan tahun 2020 dapat lebih terintegrasi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian kinerja rencana pembangunan daerah tahun 2020-2024.

### **3.2.3.2.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

#### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a) Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok PNSD, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Pengalokasian tunjangan PNSD sesuai dengan kelas jabatan yang sudah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi;
- d) Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2020;
- e) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
- f) Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

#### **2. Belanja Bunga**

Alokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Belanja bunga dialokasikan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Bogor sebagai tindak lanjut dari penerusan pinjaman World Bank.

#### **3. Belanja Subsidi**

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran. Dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### 4. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja hibah mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 5. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor

123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian Bantuan Sosial pada tahun 2020 diprioritaskan untuk memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan bantuan beasiswa siswa miskin sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 yaitu dalam hal pengurangan angka kemiskinan.

#### 6. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2019 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

#### 7. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota, Pemdes dan Parpol Penganggaran bantuan keuangan dialokasikan untuk mendukung sistem dan kelembagaan Partai Politik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

#### 8. Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020. Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan untuk pemberian bantuan terkait penanganan bencana alam, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah, dan kebutuhan mendesak lainnya.

#### **3.2.3.2.2. Kebijakan Belanja Langsung**

Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan Penunjang Urusan dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran - Perangkat Daerah).

Kebijakan belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebih berperspektif gender.

- b) Alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c) Alokasi belanja langsung untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- d) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
- e) Kebijakan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung:  
Penghapusan komponen alokasi belanja honorarium dan Uang Lembur PNS dilingkungan Pemerintah Kota Bogor pada belanja pegawai di belanja langsung, antara lain:
- 1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, kecuali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  - 2) Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa
  - 3) Uang Lembur PNS, kecuali Uang lembur untuk kewajiban pelaksanaan tugas di hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama pada pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan serta Kewajiban pelaksanaan tugas penanggulangan

bencana pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.

- 4) Penetapan tenaga kerja padat karya dan atau PKWT ditetapkan oleh peraturan walikota dan pengupahannya disesuaikan dengan peraturan walikota tentang standar biaya 2020
- f) Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung:
1. pengalokasian anggaran makan minum, alat tulis kantor, dan perjalanan dinas kedalam satu kegiatan pengelolaan rumah tangga di Sekretariat perangkat daerah, kecuali secretariat daerah dan secretariat dewan.
  2. Penghapusan untuk belanja:
    - a. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ PengajarPNS untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
    - b. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai;
    - c. Belanja Makan Minum Rapat internal PNS Perangkat Daerah;
    - d. Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga PNS Kota Bogor
    - e. Belanja Makanan dan Minuman Lembur PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, kecuali Makanan dan Minuman Lembur dalam rangka pelaksanaan tugas di hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari cuti bersama pada pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan serta Kewajiban pelaksanaan tugas penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.;
    - f. Belanja Kit Pelatihan.
  3. Pemberian Makanan Tambahan Penambah Daya Tahan Tubuh (extra fooding) dalam pos Belanja Makan Minum, hanya dialokasikan untuk beberapa perangkat daerah yang diamanatkan mendapatkan pemberian makanan tambahan penambah daya tahan tubuh berdasarkan peraturan walikota tentang standar biaya.
  4. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom:
    - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dihapuskan;
    - b. besaran uang saku dalam Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menyesuaikan dengan standar biaya 2020

- c. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di luar gedung Pemerintah kota Bogor hanya untuk kegiatan yang melibatkan peserta lebih dari 75 orang.
  - d. Standar biaya belanja bahan bakar minyak disesuaikan dengan standar harga Pertamina/Pemerintah
- g) Belanja Modal pada Belanja Langsung:
- 1) Prioritas pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan tahun 2020 diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang mendukung :
    - a. Penataan Kawasan Suryakencana
    - b. Naturalisasi sungai Ciliwung dan Cisadane.
  - 2) Prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun 2020 harus sudah berdasarkan perencanaan/DED serta status kepemilikan tanah yang sudah jelas, kecuali untuk pembangunan/ peningkatan/ perbaikan infrastruktur/bangunan gedung sampai dengan Rp 200 juta maka DED dapat disusun pada tahun yang sama;
  - 3) Peningkatan proporsi belanja modal sesuai dengan target kinerja dalam RPJMD
  - 4) Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis
- h) Dalam hal terjadi kelebihan pendapatan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi maka akan dialokasikan kepada pemenuhan belanja prioritas sesuai dengan usulan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD dan KUA/PPAS 2020, kecuali untuk alokasi kegiatan yang sudah di atur penggunaannya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Berikut ini adalah Rencana Alokasi Belanja Daerah Tahun 2020 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018, kondisi Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 serta arah kebijakan belanja daerah tahun 2020.

Tabel 3.38 : Rencana Belanja Daerah Tahun 2020

No	URAIAN	Tahun 2019 (RP)	Tahun 2020* (Rp)
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		
2.1.1	Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )	1,053,553,078,053	1.184.451.380.066
2.1.2	Belanja Bunga	7,000,000,000	7.000.000.000
2.1.3	Belanja Subsidi		
2.1.4	Belanja Hibah	60,155,000,000	73.000.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	48,570,456,200	80.070.217.696
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	5,157,216,192	2.434.531.000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	15.000.000.000
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,184,435,750,445</b>	<b>1.361.956.128.762</b>
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		
2.2.1	Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.3	Belanja Modal		
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,423,243,649,860</b>	<b>1.716.399.223.315</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2,607,679,400,305</b>	<b>3.078.355.352.077</b>

### 3.2.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

#### A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

#### B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan - kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan

pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana.

Tabel 3.39 : Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun 2019 (RP)	Rencana Tahun 2020* ( Rp )
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	263,200,671,981	65.479.410.814
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	5,497,032,260	5,497,032,260
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		
3.1.7	Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja		
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>268,697,704,241</b>	<b>70.976.443.074</b>
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,000,000,000	34.300.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5,497,032,260	5,497,032,260
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>11,497,032,260</b>	<b>39.797.032.260</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>257,200,671,981</b>	<b>31.179.410.814</b>

### 3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Bogor dan terbatasnya sumber – sumber penerimaan konvensional mendorong pemerintah Kota Bogor untuk mencari alternative pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative pembiayaan pembangunan diantaranya : APBN (Dana Transfer dan Belanja DIPA K/L di Daerah), Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Sumber Pendanaa Lainnya (PHLN & Obligasi).

### 3.3.1. APBN

Dana APBN yang masuk ke Pemerintah daerah :

- Transfer ke Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah, dan Dana Insentif Daerah (DID), serta Tambahan DAU untuk dana Kelurahan.

#### **Dana Transfer Ke Daerah**

Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bogor agar pemanfaatan Dana Transfer di daerah dapat terwujud di antaranya :

**Pertama**, Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

**Kedua**, DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. "Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas.

**Ketiga** adalah pemberian dana insentif kepada daerah untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, dan pelayanan pemerintahan umum.

**Keempat**, Tambahan Dana Alokasi Umum untuk dana kelurahan diarahkan untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

### 3.3.2. Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSL) dalam Penganggaran Pembangunan Daerah

Sumber pendapatan Daerah Tahun 2020 selain berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud diatas, potensi pendapatan daerah juga berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, dan lingkungan. Implementasi CSR/TJSLP di Kota Bogor disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Bogor.

Tabel 3.40 : Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bogor

No	Nama Perusahaan	2016	2017	2018
1	Perumda BPR Bank Kota Bogor	104,282,000		183,900,000
2	Bank BJB Cabang Bogor		948,260,000	15,000,000
3	PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor			350,000,000
4	PT. Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom)/ Telkom Group	10,000,000	15,000,000	
5	PT. Metrasat (Telkom Group)	15,000,000	20,000,000	
6	The 101 Hotel Bogor Suryakencana	10,000,000	67,250,000	124,464,600
7	Universitas Ibn Khaldun Bogor	19,600,000	180,000,000	
8	PT. Bank Mandiri (Persero) TBK		2,969,300,000	
9	Yogya Bogor Junction		14,000,000	
10	Rumah Makan Gurih 7		13,920,000	
11	The Mirah Hotel (PT Mirah Segar)			197,226,850
12	PT Taspen (Persero)			242,500,000

No	Nama Perusahaan	2016	2017	2018
13	PT Bogor Anggana Cendekia (Botani Square)			233,000,000
14	PT Adev Natural Indonesia			231,153,000
15	PT Baruna Bangun Sentosa (Damara Village)			16,500,000
16	Yayasan Inspirasi Anak Bangsa dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			300,000,000
17	PT Agricon			300,000,000
	TOTAL	158,882,000	4,227,730,000	2,193,744,450

Sumber : Bappeda Kota Bogor

Peran perusahaan/sector swasta dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada tahun 2020 akan diarahkan untuk :

- a. pembangunan sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan social melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- c. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
- g. Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang perencanaan pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui :

1. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kota Bogor
2. Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSLP.
4. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSLP.
5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSLP. Berdasarkan upaya-upaya diatas diharapkan adanya peningkatan mitra CSR Jawa Barat serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bogor periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025. Pada saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang melaksanakan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 pasca dilaksanakannya Pilkada serentak pada tahun 2018, dan pelantikan Kepala Daerah terpilih pada tanggal 7 April 2019. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD 2019-2024 akan ditetapkan menjadi peraturan daerah selambat-lambatnya 6 bulan setelah kepala Daerah terpilih dilantik, atau dengan kata lain RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 baru akan ditetapkan menjadi peraturan Daerah selambat-lambatnya 7 Oktober 2019.

Dalam rangka penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2020, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota , penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah propinsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka, dalam bab ini akan dijelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kota Bogor Tahun 2005-2005, arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor 2019-2024, serta Arah Kebijakan RPJMD Propinsi Jawa Barat sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah kota Bogor yang tertuang dalam RKPD Kota Bogor Tahun 2020.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024 adalah ditujukan untuk **mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan**

**prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik.**

Selanjutnya tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD 2019-2024 akan menjabarkan tema tersebut dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam setiap RKPD sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Adapun tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025 dan penjabarannya pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah disajikan pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor , 2019

Berikut arahan pembangunan dalam RPJPD Kota Bogor 2005 – 2025 untuk periode RPJMD 2020-2024.

Tabel 4.1. Arah-an Pembangunan Dalam RPJPD Kota Bogor 2005 – 2025  
Untuk Periode RPJMD 2020-2024

MISI 1: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN  
TITIK BERAT PADA JASA YANG MENGOPTIMALKAN  
PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADA.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Memantapkan sektor tersier sebagai sektor unggulan.</li> <li>▶ PDRB Rp. 7.849.788,84 (juta)</li> <li>▶ Indeks Daya Beli 74,12</li> </ul>
2	Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Terpeliharanya peningkatan jejaring antar wilayah sentra ekonomi, secara fisik, permodalan dan inovasi</li> </ul>
3	Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengelolaan dan Pemanfaatan pusat bisnis</li> <li>▶ Peningkatan promosi dan pemasaran pusat bisnis</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	<p>diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah.</p>	
4	<p>Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi</li> <li>▶ Mempertahankan iklim investasi yang kondusif</li> <li>▶ Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi</li> <li>▶ Peningkatan promosi investasi, agar Kota Bogor menjadi salah satu tujuan investor</li> </ul>
5	<p>Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penerapan pengelolaan tenaga kerja secara madani oleh pemberi kerja</li> </ul>
6	<p>Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan dan peningkatan produktivitas</li> <li>▶ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.	prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi.</li> <li>▶ Meningkatkan Pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah</li> </ul>
7	Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan</li> </ul>
8	Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri</li> <li>▶ Pengelolaan wilayah industri yang berwawasan lingkungan</li> </ul>
9	Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama Jasa Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa Angkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan serta jasa lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Terpeliharanya keberlanjutan kawasan bisnis dan perdagangan</li> </ul>
10	Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penciptaan dan pelestarian kesan dan citra kota Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	<p>memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.</p>	
11	<p>Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal.</p> <p>Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Memantapkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM</li> <li>▶ Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar</li> </ul>

MISI 2: MEWUJUDKAN KOTA YANG BERSIH, INDAH, TERTIB DAN AMAN (BERIMAN) DENGAN SARANA PRASARANA PERKOTAAN YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang dan pertanahan yang terintegrasi secara nasional, regional, maupun lokal menuju kota metropolitan yang nyaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengendalian tata ruang terutama untuk menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan</li> </ul>
2	Mewujudkan penataan kota secara menyeluruh untuk membentuk wajah dan lingkungan kota yang beridentitas dan berbudaya yang mendukung kenyamanan dan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan penataan kota yang beridentitas dan berbudaya</li> </ul>
3	Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyelenggaraan transportasi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta bersinergi dengan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan angkutan umum</li> <li>▶ Pemantapan rekayasa lalu lintas</li> </ul>
4	Mewujudkan kelestarian sistem ekologi kota yang memperhatikan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan serta pengamanan kota dari bencana melalui perlindungan dan pemanfaatan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan ruang terbuka hijau</li> <li>▶ Perlindungan Kawasan Resapan Air</li> <li>▶ Penataan bantaran sungai</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	alam yang terintegrasi secara regional.	
5	Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui pembangunan perumahan permukiman yang sehat dengan mengutamakan pembangunan secara vertikal dan memperhatikan daya dukung lahan, konservasi sumber daya air serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman</li> <li>▶ Perwujudan lingkungan permukiman yang berkualitas</li> <li>▶ Pengelolaan dan pengembangan rusun</li> </ul>
6	Mewujudkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana informasi telekomunikasi modern untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kegiatan perkotaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Integrasi jaringan utilitas kota dilakukan secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan layanan kualitas air minum</li> <li>▶ keterpaduan jaringan utilitas Kota</li> </ul>
7	Meningkatkan sistem layanan persampahan melalui modernisasi pengolahan dan peningkatan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan kinerja layanan persampahan</li> <li>▶ Pemantapan pengembangan pengelolaan persampahan skala kawasan dengan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)</li> <li>▶ Perluasan jaringan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
		▶ Pemantapan Pengelolaan TPA
8	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.	▶ Pemantapan model partisipasi swasta dalam investasi dibidang infrastruktur dan sarana kota

MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERKETERAMPILAN, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ IPM Kota Bogor 86.85</li> </ul>
2	Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jumlah Penduduk 1.500.000 jiwa</li> <li>▶ LPP 2 %</li> </ul>
3	Terciptanya sistem administrasi kependudukan yang tertib guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan sistem administrasi kependudukan</li> </ul>
4	Pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya pendidikan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas berketerampilan dan berdaya saing dengan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bebas Buta</li> <li>▶ RLS 15.00</li> <li>▶ Peningkatan kualitas lulusan pendidikan non formal</li> </ul>
5	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor melalui peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ AHH 79.5</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin	
6	Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian disertai peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Terwujudnya peningkatan pembiayaan, pembinaan, pengawasan pengendalian dan Penilaian dalam pelayanan kesehatan serta pemantapan kemandirian masyarakat</li> </ul>
7	Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Terwujudnya pemantapan, pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat</li> </ul>
8	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelayanan Sosial (34.86%)</li> </ul>
9	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Menurunnya Jumlah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (0%)</li> </ul>

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak anak-anak yang dilaksanakan secara integral lintas sektor dan lintas wilayah.	
10	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak (40%)</li> </ul>
11	Pembangunan daerah harus memperhatikan pengarusutamaan gender yaitu setiap kebijakan publik haruslah memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan kebijakan publik yang memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki</li> </ul>
12	Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan (100%)</li> <li>▶ Pengembangan nilai-nilai budaya lokal.</li> </ul>
13	Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga dan budaya olahraga di kalangan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</li> </ul>

MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Memantapkan dan mendukung proses demokrasi secara berkelanjutan pada berbagai aspek, yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan pembangunan Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan dan penguatan pemahaman partisipasi politik masyarakat yang demokratis</li> </ul>
2	Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang amanah pada semua tingkat pemerintahan serta mendekatkan pola pelayanan masyarakat yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat</li> </ul>
3	Terwujudnya kualitas masyarakat dan aparatur yang mempunyai kesadaran hukum dan menjunjung tinggi hukum serta memperkuat penegakan hukum tanpa diskriminatif dengan sanksi hukum yang tegas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan budaya hukum masyarakat dengan tersedianya produk hukum daerah yang responsif</li> <li>▶ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penegakan hukum</li> <li>▶ Peningkatan kompetensi aparatur</li> </ul>
4	Memperkuat peran serta masyarakat melalui bentuk kelembagaan yang lebih efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan</li> </ul>
5	Terwujudnya sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemantapan sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan</li> </ul>

6	Memantapkan peran media massa yang profesional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan bertanggungjawab dengan menjadikan media massa sebagai alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik	▶ Pemantapan peran Media yang profesional dan bertanggungjawab sebagai alat kontrol
7	Terciptanya kesetaraan gender dalam segala aspek tatanan kehidupan	▶ Pemantapan program, anggaran, kerjasama yang berbasis gender

Sumber : RPJPD Kota Bogor 2005-2025

Selanjutnya pada tahapan pembangunan jangka menengah ke-4 (Tahun 2019-2024) sebagaimana dimaksud diatas, untuk menuju pada terwujudnya kemandirian masyarakat dan dengan memperhatikan tema visi kota Bogor pada tahun 2019-2024 yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah Terpilih periode 2019-2024, maka disusunlah tahapan pembangunan jangka pendeknya yang akan menjadi fokus/tema pembangunan dalam setiap RKPD pada periode 2019-2024. Fokus/Tema pembangunan jangka pendek sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2. Fokus/Tema Tahapan RKPD Periode 2019-2024



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor , 2019

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **4.1. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

##### **“Mewujudkan kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”**

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

**Kota Bogor** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

**Kota Yang Ramah Keluarga** dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin

- dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
  3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Keluarga (family) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa (Zastrow, 2006). Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Burgess dan Locke dalam Sunarti, 2006). Dari dua definisi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar

hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Selanjutnya, dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (small scale system) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (characteristics of the small scale system) yang disebut sebagai Faktor Komunal (Communal Factors). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (large scale system) yang disebut sebagai Faktor Sosial (Societal Factors).

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan). Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: (1) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (2) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (3) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (4) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan (5) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan

penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

#### **4.2. Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019-2024 yaitu :

##### **1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**

**Kota Bogor Yang Sehat adalah** suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

##### **2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**

**Kota Bogor Yang Cerdas** adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

### **3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera**

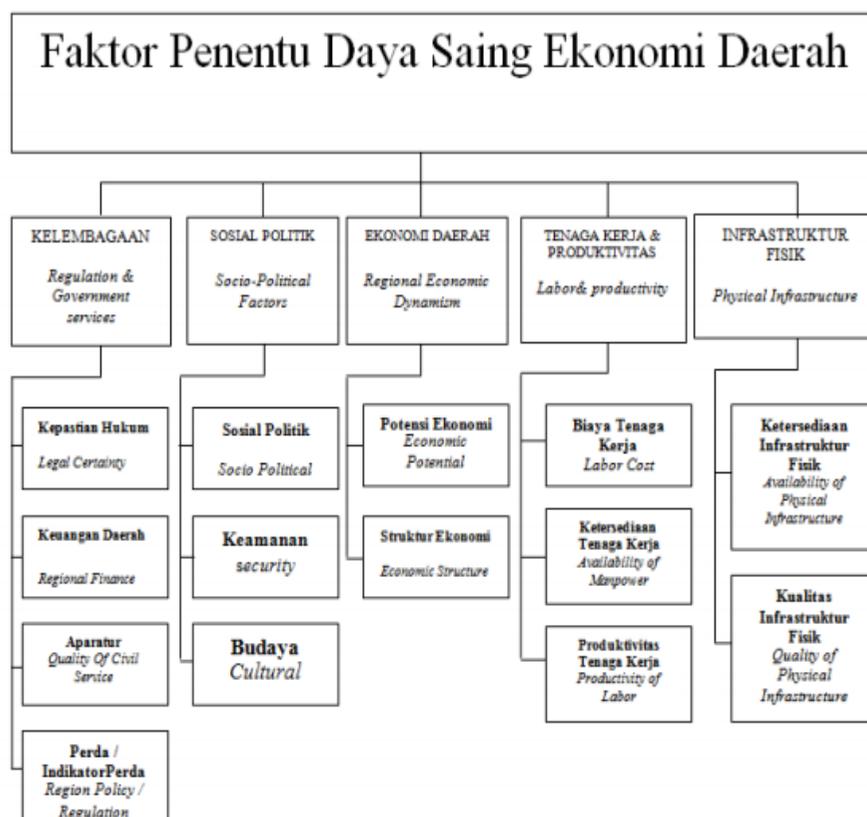
**Kota Bogor Yang Sejahtera** adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong daya saing daerah adalah kelembagaan, sosio-politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur fisik, sebagaimana diuraikan dalam began berikut ini :

Gambar 4.3. Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan misi RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.2.**  
**Keselarasn Misi Pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024**

MISI RPJPD 2005 – 2025	MISI RPJMD 2019 – 2024
<p><b>MISI 1 :</b>                      Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada.</p>	<p><b>Misi 3 :</b>                      Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</p>
<p><b>MISI 2 :</b>                      Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.</p>	<p><b>Misi 1 :</b>                      Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat</p> <p><b>Misi 2 :</b></p>

MISI RPJPD 2005 – 2025	MISI RPJMD 2019 – 2024
	<p>Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas</p> <p><b>Misi 3 :</b> Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</p>
<p><b>MISI 3 :</b></p> <p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera.</p>	<p><b>Misi 1 :</b> Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat</p> <p><b>Misi 2 :</b> Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas</p> <p><b>Misi 3 :</b> Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera</p>
<p><b>MISI 4 :</b></p> <p>Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.</p>	<p><b>Misi 2 :</b></p> <p>Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas</p>

Sumber : Hasil Olahan Bappeda, 2019

### **4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

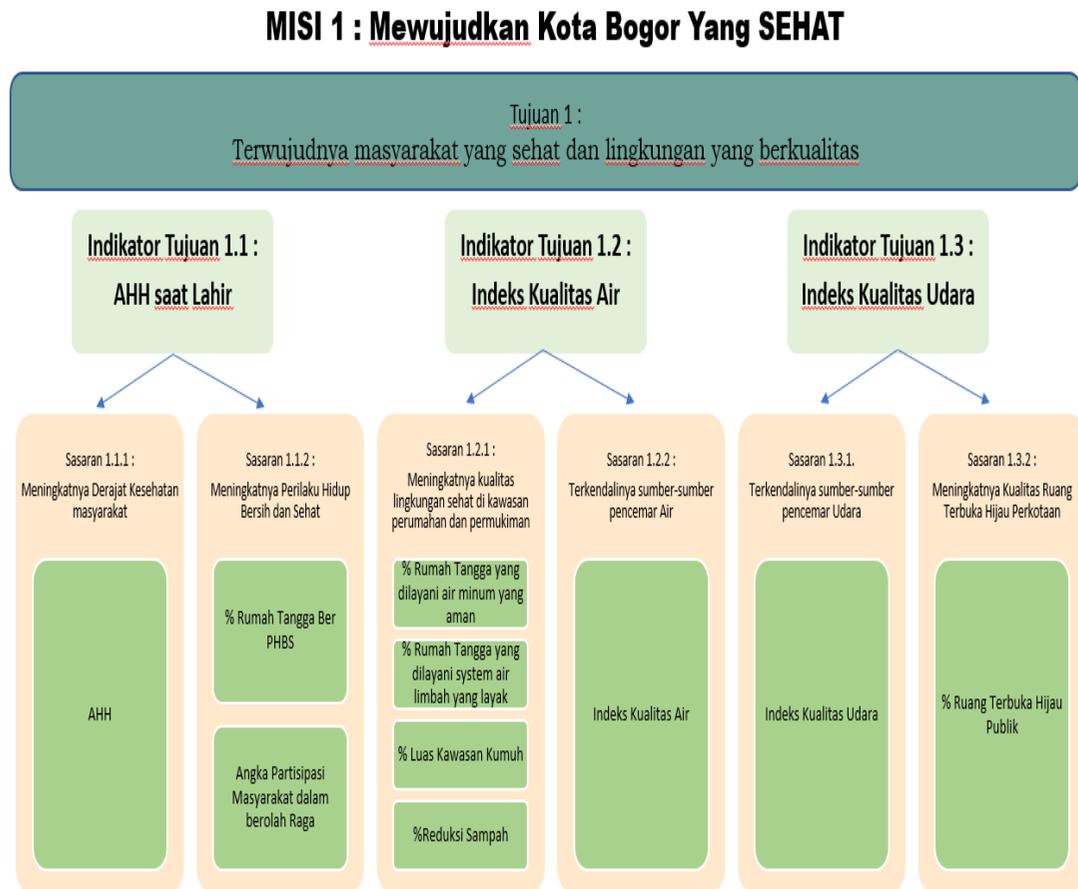
#### **4.3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Gambar 4.4. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024 (Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT)



Sumber : Hasil Olahan Bapeda Kota Bogor, Tahun 2019

**Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT.**

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

**A. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT adalah terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan

lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

## **B. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 6 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir.
2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Indeks Pembangunan Olahraga.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumahtangga yang dilayani system air limbah yang layak, persentase luasan Kawasan kumuh, dan persentase reduksi sampah.
4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air
5. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara dalah Indeks Kualitas udara.
6. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik

Gambar 4.5. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024 (Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS)



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

**Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang CERDAS.**

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

## **A. Tujuan**

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*), yang dapat diukur dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City.

## **B. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Nilai rata-Rata USBN SD, dan Nilai Rata-rata UN SMP.

2. Meningkatnya kualitas generasi muda;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

3. Meningkatnya kreativitas dan Inovasi masyarakat;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Inovasi Daerah.

4. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu :

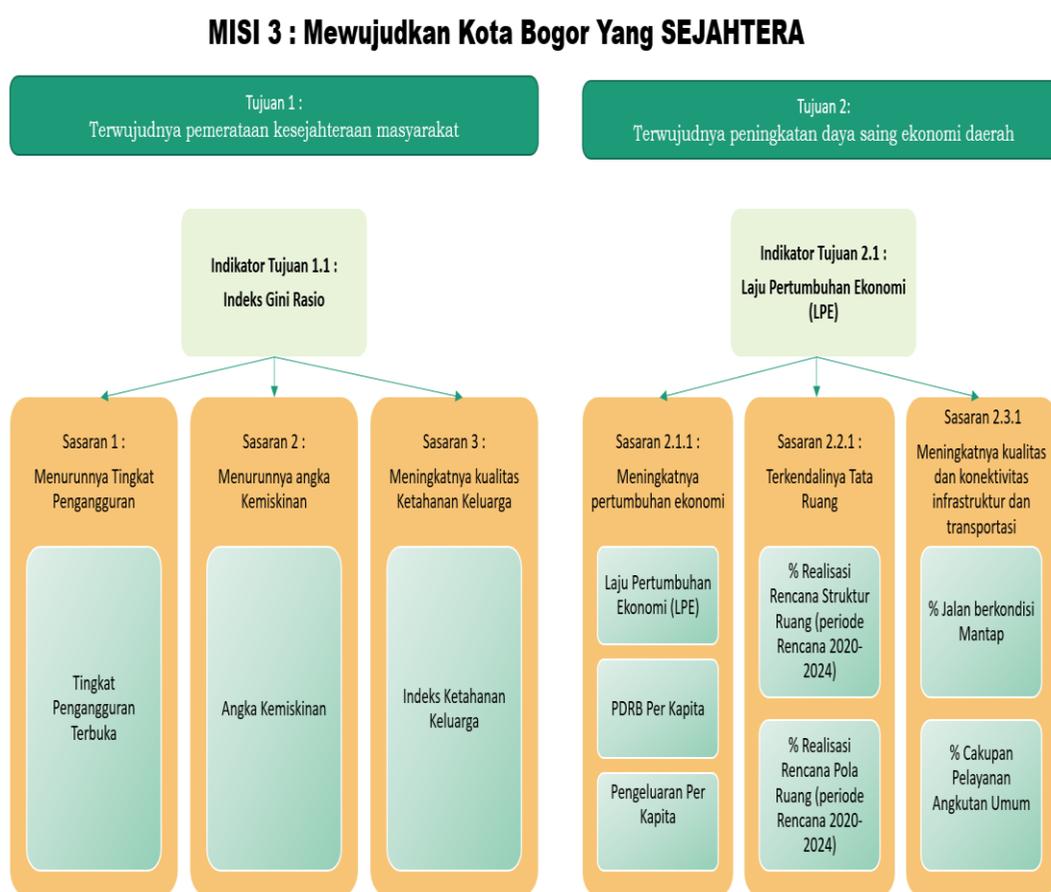
1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Level Kematangan Smart City.

Gambar 4.6. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024 (Misi 3: Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA)



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

**Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA.**

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel

yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

#### **A. Tujuan**

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA yaitu :

1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan.
2. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

#### **B. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Menurunnya tingkat pengangguran;  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Menurunnya tingkat kemiskinan;  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Angka kemiskinan.
3. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Ketahanan Keluarga (IKK).

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, dan Pengeluaran Per Kapita.
2. Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi;  
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase realisasi rencana struktur ruang pada periode rencana 2020-2024, dan persentase realisasi rencana pola ruang pada periode rencana 2020-2024.

3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase jalan berkondisi mantap dan persentase cakupan pelayanan angkutan umum.

**Tabel 4.3. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BOGOR TAHUN 2019-2024**

**VISI : TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA**

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT	Tujuan 1.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.21	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	74.91
				Indeks Kualitas Air	Point	49.6	49.67	49.7	49.8	49.9	50	50
				Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85.9	86	86.1	86.2	86.3	86.3
		Sasaran 1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73.21	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	74.91
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	68	70	72	74	76	76
				Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Point	0.45	0.45	0.47	0.49	0.51	0.53	0.53
		Sasaran 1.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	79.02	86.34	89.48	92.32	94.94	97.46	97.46
			Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak	%	62.21	63.85	66.86	68.56	69.17	69.65	69.65	

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
				Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	1.43	1.37	1.35	1.34	1.32	1.30	1.30
				Persentase Reduksi Sampah	%	6.26	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.2
		Sasaran 1.1.4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	Indeks Kualitas Air	Point	49.6	49.67	49.7	49.8	49.9	50	50
		Sasaran 1.1.5	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85.9	86	86.1	86.2	86.3	86.3
		Sasaran 1.1.6	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5.89	5.91	5.92	5.94	5.95	5.96	5.96
2	Mewujudkan kota Bogor yang CERDAS	Tujuan 2.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter ( <i>Smart People</i> )	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.30	10.63	10.97	11.31	11.65	12	12
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.6	13.9	14.2	14.5	15	15
				Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05
				Indeks Inovasi Daerah	Point	600	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650	641-650
				Indeks Pemberdayaan Gender	Point	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	73.5
		Sasaran 2.1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.30	10.63	10.97	11.31	11.65	12	12

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.6	13.9	14.2	14.5	15	15
				Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68.12	68.14	68.18	68.20	68.23	68.25	68.25
				Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58.27	58.3	58.32	58.36	58.4	58.42	58.42
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05
		Sasaran 2.1.3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	Indeks Inovasi Daerah (Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi)	Point	600	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650	641-650
		Sasaran 2.1.4	Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	73.5
		Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani ( <i>Smart government</i> ),	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	BB	BB	A	A	A	A
				Level Kematangan Smart City	Level	Ad Hoc	Initiative	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart
		Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Point	B	BB	BB	A	A	A	A
		Sasaran 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi	Level Kematangan Smart City	Level	Ad Hoc	Initiative	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart
3	Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA	Tujuan 3.1	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini Rasio	Point	0.41	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36	0.36

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET					KONDISI AKHIR
							2020	2021	2022	2023	2024	
		Sasaran 3.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9.28	8.47	8.22	7.97	7.8	7.6	7.6
		Sasaran 3.1.2	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	5.93	5.8	5.78	5.53	5.28	5	5
		Sasaran 3.1.3	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)	Point	NA	73-74	74-75	75-76	76-77	76-77	76-77
		Tujuan 3.2	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7	7
		Sasaran 3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6.48	6.66	6.75	6.84	6.94	7	7
				PDRB Per Kapita	Dalam Juta Rp.	37.99	40.36	42.73	45.1	47.47	49.84	49.84
				Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	10.940	11.124	11.219	11.314	11.409	11.504	11.504
		Sasaran 3.2.2	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0	20	40	60	80	100	100
				Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0	20	40	60	80	100	100
		Sasaran 3.2.3	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	88.59	90	91	92	93	94	94
				Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	45	50	60	70	80	90	90

Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

#### **4.3.2 PROGRAM UNGGULAN 2019 – 2024**

Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019-2024 merupakan janji-janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota yang strategis dan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2019 – 2024. Program unggulan ini salah satu arah kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan kota Bogor pada tahun 2019-2024. Program unggulan 2019-2024, meliputi:

##### **BOGOR LANCAR**

- Konversi Angkot
- Pembangunan jalan protokol alternatif
- Pembangunan flyover di Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes
- Penataan kawasan stasiun kereta api
- Pembangunan gedung aprkir di pusat kota
- Penuntasan sarana terminal Baranangsiang & stasiun LRT

##### **BOGOR MERENAH**

- Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
- Pembangunan kampung wisata
- Revitalisasi pasar tradisional
- Kampungku bersih dan hijau
- Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

##### **BOGOR KASOHOR**

- Pembangunan museum
- Revitalisasi perpustakaan kota
- Pembangunan GOR di setiap Kecamatan

##### **BOGOR MOTEKAR**

- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional
- Festival seni & Helaran Budaya

##### **BOGOR SAMAWA**

- Sekolah Ibu
- 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
- Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2023
- Pemberian insentif bagi guru ngaji
- Orang Tua Asuh

## ABDI BOGOR

- Mall pelayanan Publik
- Kunjungan dokter ke keluarga
- Konseling & Call Center 24 Jam
- Layanan Malam Kelurahan
- RSUD Unggul

### **4.3.3. Sasaran Pembangunan Tahun 2020**

Prioritas Pembangunan tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020 yang berkorelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Sasaran Pembangunan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020**  
**PENJABARAN MISI 1 : MEWUJUDKAN KOTA SEHAT**

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
					Target	Rp. (dln Juta)		
1.	<b>Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT</b>							
1.1.	Tujuan 1 :	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,21	73.69	
			2	Indeks Kualitas Air	Point	49,6	49,67	
			3	Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85,9	
1.1.1	Sasaran 1 :	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,21	73.69	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1	Program 1.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Indeks Keluarga Sehat	Point	0,32	0,50	80.046
			2	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	68	80%	Dinas Kesehatan
			3	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	0	24%	
			4	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	98,85	96%	
			5	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	4	8 % (2 puskesmas)	
2	Program 1.1.1.2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	6	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	60	86	6.300
			7	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	2,95	2,95	
			8	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	3,35	3,35	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
			9	Persentase Ibu Hamil Dengan KEK	%	4,9	3,99			
			10	Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia	%	8,3	8,3			
			11	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	%	4,8	4,75			
			12	Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)	%	2,08	1,97			
			13	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	%	4,53	4,42			
3	Program 1.1.1.3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	14	Persentase kesembuhan TB Paru	%	81,22	86	7.500	Dinas Kesehatan	
			15	Prevalensi HIV Aids	%	0,42	<0,5			
			16	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	66	65			
			17	Prevalensi Hipertensi	%	9,67	9,3			
			18	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,4	2,35			
			19	Angka Kesakitan ODGJ	%	≤ 0,13	≤ 0,13			
4	Program 1.1.1.4	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	20	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	70	80%	47.130		
			21	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	80	80%			
			22	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Per 30.000 penduduk	68	0,68			
			23	Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	%	72	60%			
			24	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan	%	70,86	85			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
						Target	Rp. (dlm Juta)		
5.	Program 1.1.1.5	Pengembangan Data dan Informasi		Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health	%	50%	65%	900	
6	Program 1.1.1.6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik	%	35%	50%	700	
7	Program 1.1.1.7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	25	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	75,5	60	423.535	RSUD
8	Program 1.1.1.8	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	26	Persentase capaian SPM RSUD	%	87,86	84	178.679	
			27	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD	Point	3,66	3,66		
9	Program 1.1.1.9	Kesehatan Reproduksi Remaja	28	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Per 1000 Remaja	11,42	11,41	1.000	DPPKB
			29	Persentase PIK R Aktif	%	40,68	42,18		
10	Program 1.1.1.10	Kependudukan dan Keluarga Berencana	30	Persentase peningkatan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Tingkat Peserta KB Aktif	%	77,41	77,41%	6.700	
			31	Persentase Peningkatan Peserta KB MKJP pada PUS	%	22	22		
11	Program 1.1.1.11	Peningkatan Ketahanan Pangan	32	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Point	84,9	86,9	1.700	Dinas Ketahanan Pangan
			33	Konsumsi energi	Kkal/Kapita/Hari	1809	1920		
			34	Konsumsi protein	gr/kapita/Hari	50,8	53		
			35	Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	%	91,53	93		
12	Program 1.1.1.12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	36	Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun	Kasus	0	3	750	Dinas Pertanian
			37	Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	%	22,2	22		
13	Program 1.1.1.13	Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan	38	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	27,28	29,37	300	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
	SASARAN 2 : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		1	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	68		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	
			2	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45			
1	Program 1.1.2.1 :	Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan	39	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS)	%	66	68	10.125	Dinas Kesehatan	
			40	Persentase Rumah sehat (%)	%	78,01	10			
2	Program 1.1.2.2	Kemitraan Lingkungan Hidup	41	Persentase sekolah adiwiyata (%)	%	30	31	3.000	Dinas LH	
			42	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	%	0	10			
3	Program 1.1.2.3	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	43	Jumlah penurunan temuan Kasus pelanggaran KTR	Angka	158	126	75	Satuan Polisi Pamong Praja	
4	Program 1.1.2.4	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	44	Persentase Sekolah Sehat (%)	%	13	15	76	Dinas Pendidikan	
5	Program 1.1.2.5	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	45	Persentase PAUD Sehat (%)	%	31	32			80
6	Program 1.1.2.6	Kepemudaan dan Keolahragaan	46	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45	1.095	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
			47	Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	Per 916,052 Penduduk	2,08	2,08			
			48	Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	%	33,34	33,34	21.623		
			49	Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	Angka	2	0			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
7	Program 1.1.2.7	Peningkatan Olah Raga Prestasi	50	Jumlah perolehan medali Tk. Internasional	Medali	4	4	3.670		
			51	Jumlah perolehan medali Tk. Nasional	Medali	14	66			
			52	Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar	Medali	162	64			
	SASARAN 3 :	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	86,34	86,34			Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			2	Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang aman	%	62,21	63,85			
			3	Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	1,43	1,37			
			4	Persentase Reduksi Sampah	%	6,26	6,4			
1	Program 1.1.3.1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1	Persentase masyarakat yang mendapat akses terhadap air minum yang aman	%	86,34	86,34	189.288	Dinas PUPR	
			2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	%	62,21	63,85			
2	Program 1.1.3.2.	Lingkungan Sehat Perumahan	3	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota	Ha	168,99	166,99	21.155	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			4	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi	Ha	163,57	153,57			
			5	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat	Ha	133,09	118,09			
			6	Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	%	43,45	54,76			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
			7	Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	%	27,4	41,92			
			8	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh	%	19,4	35,52			
			9	Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik	%	39,5	51,6			
			10	Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh	%	61,55	69,24			
			11	Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh	%	13,2	30,56			
			12	Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh	%	39,75	51,8			
			13	Luas pencegahan kawasan kumuh pada permukiman tidak tertata	Ha	5.553,18	5.553,18			
3	Program 1.1.3.3	Peningkatan Utilitas Perkotaan	14	Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU	%	74,03	74,47%	2.650	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			15	Persentase pemeliharaan PJU	%	81,09	77,09%	41.620		
4	Program 1.1.3.4	Lingkungan Sehat Perumahan	16	Panjang Jalan lingkungan permukiman berkondisi baik	Km	503,34	551,34	98.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			17	Panjang drainase lingkungan permukiman berkondisi baik	Km	137,45	167,43			
			18	Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	titik	0	60			
			19	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	Lokasi	745	865			
5	Program 1.1.3.5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	20	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	11	2	250	BPBD	
			21	Jumlah Sekolah Aman bencana	Sekolah	0	2	200		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
6	Program 1.1.3.6	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	22	% sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	%	34	50	28.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
7	Program 1.1.3.7	Pemulihan Pasca Bencana	23	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	%	40	60	2000	Dinas PUPR	
			24	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	%	0	20	2.175	Dinas Perumkim	
8	Program 1.1.3.8	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	25	jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani	Lokasi	27	18	2.100	Dinas PUPR	
9	Program 1.1.3.9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	26	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA (%)	%	75,85	76	28.734	Dinas LH	
			27	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%	195,900 m	48,8			
			28	Persentase peningkatan retribusi persampahan	%	9,5 Milyar	2,1			
10	Program 1.1.3.10	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	29	Persentase Reduksi Sampah (%)	%	6,26	6,4	3.200		
			30	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	%	4	4			
11	Program 1.1.3.11	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	31	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA (%)	%	98,16	98,16	54.946		
			32	Kapasitas pengolahan sampah	Ton/hari	931	931			
	SASARAN 4 :	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air		Indeks Kualitas Air	Point	49,6	49,67			Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1	Program 1.1.4.1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	86	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	35	36	1.100	Dinas LH	
			87	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air =	100	120		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
			88	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	%	30	30	300	Dinas LH	
			89	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	%	30	30	1.300		
2	Program 1.1.4.2	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	90	Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air	%	10	10	1300		
3	Program 1.1.4.3	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	91	Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	57,29	58,75	2.200	Dinas PUPR	
			92	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)	%	90	91,03	19.600		
	SASARAN 5 :	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	1	Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	85,9			Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1	Program 1.1.5.1	Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	93	Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%)	%	100	100	375	Dinas Perhubungan	
			94	Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif	%	40	40	0		
			95	Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	%	87,82	88	150		
			96	Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi	Angka	1	2	975		
2	Program 1.1.5.2	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	97	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	40	50	1.300	Dinas LH	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
			98	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran udara yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran udara =	60			
			99	Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	%		50			
3	Program 1.1.5.3	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	emisi GRK =	7,5	700		
	SASARAN 6 :	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,89	5,91			Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1	Program 1.1.6.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	101	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	Ha	Luas RTH Publik = 697,96 Ha	1,8	4.150	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			102	Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)	Ha	Luas RTH yang terkelola dengan baik = 41,86 Ha	43,27	11.345		
2	Program 1.1.6.2	Pengelolaan Areal Pemakaman	103	Luas TPU Hijau yang terkelola dengan baik (Ha)	Ha	Luas TPU Hijau Terkelola = 46,2	46,9	4.044	Dinas Perumahan dan Permukiman	
3	Program 1.1.6.3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	104	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	Luas Kawasan konservasi = 0,5 Ha	0,5	1300	Dinas LH	

**Tabel 4.7 Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020**  
**PENJABARAN MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA CERDAS**

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	
					Target	Rp. (dlm Juta)			
2	<b>Misi 2 : MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS</b>								
2.1.	Tujuan 2.1 : Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter ( <i>Smart People</i> )		1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,3	10,63		
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,6		
			3	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	56.31		
			4	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	600-610		
			5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	69.5		
2.1.1	SASARAN 2.1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,3	10,63		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,6		
			3	Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68.12	68.14		
			4	Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58.27	58.3		
1	Program 2.1.1.1.	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	1	APK PAUD	angka	49,04	50	1.173	Dinas Pendidikan
2	Program 2.1.1.2.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	2	APK SD	angka	112,4	113	44.829	
			3	APK SMP	angka	104,1	104,3		
			4	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik	%	93,7	94,5	90.786	
			5	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik	%	94,7	94,8	18.979	
			6	Nilai Rata-Rata USBN SD	Point	68.12	68.14	806	
			7	Nilai Rata-Rata UNSMP	Point	58.27	58.3	300	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dln Juta)		
3	Program 2.1.1.3.	Pendidikan non formal	8	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi					Dinas Pendidikan	
			-	Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi	%	33	34	45.370		
			-	Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi	%	50	51	470		
4	Program 2.1.1.4.	Manajemen Layanan Pendidikan	9	Prosentase Sekolah terakreditasi A					Dinas Pendidikan	
			-	TK Terakreditasi A	%	38	39	1.290		
			-	SD Terakreditasi A	%	73	74	67		
			-	SMP Terakreditasi A	%	73	74	70		
5	Program 2.1.1.5.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)	%	67	68,4	7.120	Dinas Pendidikan	
			11	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	%	19	20	510		
			12	Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	%	53	54	9.100		
			13	Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	%	53	54	3.200		
			14	Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	orang	1	2	430		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
	SASARAN 2 :	Meningkatnya kualitas generasi muda		Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	56.31			Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1	Program 2.1.2.1	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO	15	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	%	75	77	1.200	DPMPPA	
			16	Prevalensi kekerasan terhadap anak	angka	0,0240	0,0133			
2	Program 2.1.2.2	Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	17	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Peringkat	Madya	Nindya	1.950		
3	Program 2.1.2.3	Manajemen Layanan Pendidikan	18	jumlah siswa berprestasi	orang	61	63	1.936	Dinas Pendidikan	
4	Program 2.1.2.4	Pengelolaan Keragaman Budaya	19	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni/budaya	%	10	10	950	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			20	jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasanggiri /Lomba/Sayembara Karyaseni	Event	15	15	2.557		
			21	Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	%	100	150	400		
			22	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	%	2	2	1.380		
5	Program 2.1.2.5	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	23	Jumlah Konflik SARA	angka	0	0	2.900	Kantor Kesbangpol	
			24	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan	rasio	3950 orang	1 : 100			
6	Program 2.1.2.6	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	25	Persentase penurunan jumlah Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras melalui upaya deteksi dini	%	0,00015	0,00013	150		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
7	Program 2.1.2.7	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	26	penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	%	Jumlah tempat menjual miras ilegal = 178	148	140	SatpolPP	
			27	Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	%	70	90			
8	Program 2.1.2.8	Manajemen layanan Pendidikan	28	Persentase Pelajar Bebas NAPZA	%	100	100	237	Dinas Pendidikan	
			29	penurunan kejadian tawuran pelajar	%	20	18			
9	Program 2.1.2.9	Kepemudaan dan Keolahragaan	30	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	%	Jumlah pemuda pengguna NAPZA = 162	5	2.250	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
			31	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	%	Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5	20			
			32	Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)	Predikat	0%	30 % Menuju KLP			
10	Program 2.1.2.10	Pembinaan Anak Terlantar	33	Persentase Anak terlantar yang ditangani	%	Jumlah anak terlantar = 385 orang	19,48	225	Dinas Sosial	
11	Program 2.1.2.11	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	34	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	%	Jumlah anjal, gepeng dan WTS = 397	21,41			
			35	Prosentase penurunan eks penyakit sosial ( Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	%	Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya =329 orang	20			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
12	Program 2.1.2.12	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	36	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/taman bacaan	%	10	10	65	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
13	Program 2.1.2.13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	37	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	%	-	-	-		
2.1.3	SASARAN 3 :	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	600-610			Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
1	Program 2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan	38	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil diimplementasikan untuk menunjang visi misi Kota Bogor	%	100	20	1.700	Bappeda	
			39	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	0	0			
			40	Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	angka	0	20			
			41	Persentase Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.	angka	0	20			
2.1.4	SASARAN 4 :	Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	69.5			Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			2	Rasio partisipasi masyarakat dalam pembangunan ((jumlah masyarakat yang berpartisipasi dibagi jumlah masyarakat yang wajib berpartisipasi * 100%)	%	60	70			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
1	Program 2.1.4.1	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	42	Persentase perempuan berpolitik (%)	%	17	17	1.550	DPMPPA	
			43	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	70	78			
2	Program 2.1.4.2	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	43	Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%)	%	Jumlah panti asuhan/yayasan = 83	100	150	Dinas Sosial	
			44	Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi	%	Jumlah Panti Asuhan/Yayasan/Orsos = 83	12,04			
3	Program 2.1.4.3	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	45	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	%	Jumlah penyandang disabilitas dan trauma = 970 orang	29,58	325	Dinas Sosial	
			46	Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	%	2 Kasus	100			
4	Program 2.1.4.4	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	47	Jumlah lansia yang berdaya	Angka	150	100	300		
5	Program 2.1.4.5	Perencanaan Pembangunan Daerah	48	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	20 : 100	20 : 100	530	Bappeda	
			49	Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	1 : 100	1 : 100			
			50	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5	6			
			51	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10	10			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
6	Program 2.1.4.6	Pendidikan Politik Masyarakat	52	Persentase Partisipasi Pemilu	%	75,85	0	550	Kantor Kesbangpol	
			53	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu	%	39,90	0			
7	Program 2.1.4.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	54	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif	%	45	50	700	DPMPPA	
8	Program 2.1.4.8	Pemberdayaan lembaga Sosial	55	Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	%	43	50	6.898	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
2.2	Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani ( <i>Smart government</i> ),	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	BB			
			2	Level Kematangan Smart City	Level	Ad Hoc	Initiative			
2.2.1	Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	BB			Penguatan Reformasi Birokrasi
1	Program 2.2.1.1	Penerapan Reformasi Birokrasi	56	Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,31	3,32	1.150	Bagian Organisasi	
			57	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	Point	B	BB			
			58	Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi	Point	3,84	4			
			59	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	18,92	67,56	53	Inspektorat dan Bagian organisasi	
2	Program 2.2.1.2	Pengendalian pembangunan	60	Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana	%	80	80	500	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan	
			61	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%	75	80	450	Bappeda	

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
3	Program 2.2.1.3	Perencanaan Pembangunan Daerah	62	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Angka	21	22	300	Bappeda	
4	Program 2.2.1.4	Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam	63	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,7	73	1.300		
5	Program 2.2.1.5	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	64	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,7	73	607		
6	Program 2.2.1.6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	65	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,7	73	90	Bappeda	
7	Program 2.2.1.7	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Point	3,1	3,12	165	Bagian Administrasi Pemerintahan	
8	Program 2.2.1.8	Kerjasama Pembangunan	67	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	%	70	70	4.400	Bagian Kerjasama Setda	
			68	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	10	110	Bappeda	
9	Program 2.2.1.9	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah	69	Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	%	100	100	250	Bagian Administrasi Pemerintahan	
10	Program 2.2.1.10	Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	70	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	%	70	70	300		
11	Program 2.2.1.11	Penataan Perundang-undangan	71	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	%	90	95	750	Bagian Hukum dan HAM	
12	Program 2.2.1.12	Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM	72	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	%	100	100	750		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
13	Program 2.2.1.13	Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	73	PersentasePD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%)	%		17		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			74	Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	arsip		100			
14	Program 2.2.1.14	Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah	75	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda	%		60	10.297	Setwan	
			76	Persentase Perda yang Disosialisasikan	%		100			
			77	Persentase Rapat dan Risalah Persidangan yang Berkualitas	%		80			
15	Program 2.2.1.15	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	78	Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	%		100	11	BKPSDA	
16	Program 2.2.1.16	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	79	Persentase Penempatan Aparatur Pelaksana sesuai formasi	%		77	755		
			80	Persentase Penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan syarat jabatan (pangkt dan pendidikan formal)	%		87	409		
			81	Persentase Penempatan pejabat fungsiona yang sesuai dengan syarat jabatan (pendidikan formal)	%		100	83		
			82	Persentase Penyelesaian sengketa	%		100	335		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
17	Program 2.2.1.17	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	83	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	%		35	1.038		
			84	Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	%		82	171		
			85	Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional	%		77	400		
			86	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	%		87	4.153		
18	Program 2.2.1.18	Pelayanan Administrasi Perkantoran	87	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100		Seluruh Perangkat Daerah	
19	Program 2.2.1.19	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	88	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	80		Seluruh Perangkat Daerah	
20	Program 2.2.1.20	Peningkatan Pelayanan PATEN	89	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	%	80	82		Kecamatan	
			90	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	Point	3	3,1			
21	Program 2.2.1.21	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	91	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	125	Inspektorat	
			92	Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan	%	100	100	220		
			93	Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat	%	100	100			
			94	Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	%	100	100			
			95	Level Maturitas SPIP	Level	1	2	200		
			96	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	%	43,24	45,95			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dln Juta)		
			97	Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate	Elemen	3	3	350		
			98	Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM	Angka	7	8			
			99	Jumlah PD berpredikat WBK	%	0	1	84		
22	Program 2.2.1.22	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	%	100	100	3.700	BPKAD	
23	Program 2.2.1.23	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	101	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80	81	17.000	BPKAD	
24	Program 2.2.1.24	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	102	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	85	90		Seluruh Perangkat Daerah	
			103	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	B	B			
			104	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	Point	75	80			
26	Program 2.2.1.26	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	105	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,91	2,92	23.740	Dinas Kominfo Standi	
			106	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	%	7	14	9.500		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
			107	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	%	80	90		Seluruh Perangkat Daerah	
			108	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	100	100			
27	Program 2.2.1.27	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	109	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	NA	Level 1	1.900	Dinas KominfoStandi	
28	Program 2.2.1.28	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	110	Persentase ketersediaan data statistik sektoral (jumlah data statistik sektoral yang tersedia dibagi jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan X 100%)	%	NA	70	3.800		
29	Program 2.2.1.29	Pengembangan Data dan Informasi	111	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	%	50	55		Seluruh Perangkat Daerah	
			112	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	%	50	55			
			113	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90			
30	Program 2.2.1.30	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa	114	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa	%	8,53	10	750	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	
31	Program 2.2.1.31	Kerjasama Informasi dengan Media massa	115	Persentase Keterbukaan Informasi publik	%	91,9	100	4.400	Bagian Humas dan Protokol	
	SASARAN 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	1	Level Kematangan Smart City	Level	Ad Hoc	Initiative			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	RKPD TAHUN 2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
						Target	Rp. (dlm Juta)		
1	Program 2.2.2.1	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	116	persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	0	10	600	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Program 2.2.2.2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	117	Prosentase pemanfaatan E Commerce	%	4,4	5,4	695	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Program 2.2.2.3	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	118	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya	%	2	2,5	900	
4	Program 2.2.2.4	Pengembangan Ekonomi Kreatif	119	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	0,5	2	300	Dinas pariwisata dan Kebudayaan
5	Program 2.2.2.5	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	120	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	Angka	1	1	750	Dinas LH
6	Program 2.2.2.7	Pengembangan Komunikasi, Infomasi, dan Media Massa	121	Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi		0	1	400	Dinas PUPR
						0	1	450	Dinas Perumkim
						1	3	5.750	Dinas Perhubungan
						1	1	1.800	Bapenda
						0	0		RSUD
						1	1	200	BPBD
									Dinas Kesehatan
						1	1	818	Dinas Pendidikan
					1	1	4.400	Humas dan Protokol	
8	Program 2.2.2.8	Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan	122	Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	%	100	100	100	BPBD
9	Program 2.2.2.9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	123	Rata-Rata Respon time penanganan bencana	Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	800	BPBD
10	Program 2.2.2.10	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	124	Respon time penanganan kebakaran	Menit	30	15	400	SatpolPP

**Tabel 4.8 Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020**  
**PENJABARAN MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA SEJAHTERA**

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	
					Target	Rp. (dln Juta)			
<b>3</b>	<b>Misi 3 : MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA</b>								
	Tujuan 3.1	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1	Indeks Gini Rasio	Point	0.41	0.4		
	SASARAN 3.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9.28	8,47		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1	Program 3.1.1.1	Perluasan Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	90,38	91,53	1.828	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2.189	2.500		
2	Program 3.1.1.2	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3	Persentase penurunan angka kecelakaan kerja	%	10	10	644	
			4	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	%	109.416	233.578		
			5	Penetapan besaran UMK		3.557.146	4.149.797		
			6	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100		
3	Program 3.1.1.3	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	7	Nilai produktivitas tenaga kerja (%)	Juta	63,91	65,78	1.547	
4	Program 3.1.1.4	Pembinaan dan penempatan transmigrasi	8	Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman	KK	0	2	301	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	Program 3.1.1.5	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	9	Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM	orang	1000	20	200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Program 3.1.1.6	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	10	Jumlah Kesempatan kerja baru pada UMKM	orang	0	880	2.800	Dinas Koperasi dan UMKM
7	Program 3.1.1.7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	11	Jumlah Kesempatan kerja baru pada Koperasi	orang	0	20	600	
8	Program 3.1.1.8	Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif	12	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	orang	245	30	950	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	Program 3.1.1.9	Kepemudaan dan Keolahragaan	13	jumlah wirausahaan muda pemula	orang	25	30	150	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	SASARAN 3.1.2	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	%	5.93	5.8		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020			
					Target	Rp. (d/m Juta)					
1	Program 3.1.2.1	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	14	persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	Jumlah PMKS = 60,944 jiwa jumlah KK Miskin = 72,187 KK jumlah Penduduk Miskin = 321,250 jiwa	5,8	5.980	Dinas Sosial		
2	Program 3.1.2.2	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	15	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	12 Jenis Lembaga	100	2.475			
			16	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	%	1142 relawan	27,85				
3	Program 3.1.2.3	Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat	17	Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi	%		2,51	1.500	DPMPPA		
4	Program 3.1.2.4	Pendidikan Non Formal	18	Persentase Kelulusan Paket A	%	100	100	45		Dinas Pendidikan	
			19	Persentase Kelulusan Paket B	%	100	100				
			20	Persentase Kelulusan Paket C	%	100	100				
			21	Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan	%	50	51				
5	Program 3.1.2.5	Manajemen Layanan Pendidikan	22	Jumlah siswa dan mahasiswa miskin yang mendapatkan BSM	siswa/mahasiswa	6.345	6.445	7.900			
6	Program 3.1.2.6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	23	Persentase Penduduk miskin yang memiliki JKN	%		100		Dinas Kesehatan		
7	Program 3.1.2.7	Lingkungan Sehat Perumahan	24	Persentase RTLH	%	29,4	25,20%	600	Dinas Perumahan dan Permukiman		
	SASARAN 3.1.3	Meningkatnya ketahanan keluarga	1	<b>Indeks Ketahanan Keluarga</b> (cara perhitungan mengikuti buku panduan Kementerian PMPPA, 2016)	Point		73-74			Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	
1	Program 3.1.3.1	Pembangunan Keluarga	26	Persentase Keluarga Sejahtera	%	92,62	93,00	504	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			27	Persentase Anggota bina keluarga balita aktif	%	75,25	75,25%				

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (dlm Juta)		
			28	Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif	%	70,05	70,05%			
			29	Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif	%	70	70,00%			
			30	Jumlah Kelompok UPPKS aktif	angka	22	1	150		
2	Program 3.1.3.2	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	31	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%)	%	75	77	5.250	DPPMPA	
			32	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,025	0,0108			
			33	Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya	%	NA	1,5			
			34	Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan	%	NA	0,9			
			35	Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan	%	0,0126	0,0126			
3	Program 3.1.3.3	Penataan Administrasi Kependudukan	36	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	%	94%	95%	500	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
			37	Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	4%	25%	500		
			38	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	99%	99,50%	500		
			39	Persentase Penduduk yang memiliki KK	%	100%	100%	250		
			40	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	1%	30%	500		
4	Program 3.1.3.4	Lingkungan Sehat Perumahan	41	Persentase Rumah Layak Huni	%	70,6	74,80%	400	Dinas Perumahan dan Permukiman	
5	Program 3.1.3.5	Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan	42	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa	%	76,61	80%	4.300		
6	Program 3.1.3.6	Peningkatan Ketahanan pangan	43	Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan	%	18,3	16,6	1.600	Dinas Ketahanan Pangan	
			44	Ketersediaan energi	Kkal/Kapita/Hari	2512,8	2400			
			45	Ketersediaan Protein	Gr/Kapita/Hari	89,4	63			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (d/m Juta)		
7	Program 3.1.3.7	Peningkatan Produksi Pertanian	46	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	Padi: 5439 Ton Palawija: 11.540 Ton Hortikultura: 28.972 Ton	4	3.948	Dinas Pertanian	
			47	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	Daging: 5.999 Ton Telur: 93,5 Ton Susu: 1.929.316 Liter	2			
8	Program 3.1.3.8	Peningkatan Produksi Perikanan	48	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	Ikan Konsumsi: 4.980 Ton Ikan Hias: 18.578.560 ekor	3	750		
	Tujuan 3.2.	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6.48	6.66			
	Sasaran 3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6.48	6.66			Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
2			PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Dalam Juta Rp.	37,99	40,36				
3			Pengeluaran Per Kapita	Dalam Ribu Rp.	10.940	11.124				
1	Program 3.2.1.1	Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	50	Nilai Investasi	Trilyun Rp.	2,3	2,50	10.150	DPMPSTP	
			51	Persentase pelayanan perijinan sesuai dengan SOP	%	72	72,5%			
2	Program 3.2.1.2	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	52	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	%	99.283.771,63	1,1	1.650	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	Program 3.2.1.3	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	53	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	%	5,58	5,59	5.903		
4	Program 3.2.1.4	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	54	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	%	11630 UTPP	5	2.885	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			55	Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)	%	3,69	≤ 3,6 %		Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama	
5	Program 3.2.1.5	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	56	Persentase IKM yang produktif	%	1000 IKM	2	2.970	Dinas Perindustrian	
6	Program 3.2.1.6	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	57	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.965.987	7.004.033	3.050	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
7	Program 3.2.1.7	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	58	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	0	180	6.200	Dinas Koperasi dan UMKM	
			59	Persentase peningkatan omzet UMKM Per Tahun	%	0	25			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (d/m Juta)		
8	Program 3.2.1.8	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	60	Jumlah PKL yang direlokasi berdasarkan zona	PKL	816	1.350	3.295	Dinas Koperasi dan UMKM	
			61	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	418	20			
9	Program 3.2.1.9	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	62	Persentase Koperasi Aktif	%	61	65	9.100		
			63	Persentase Koperasi berkualitas	%	8,3	8,7			
10	Program 3.2.1.10	Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif	64	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	75	75	400	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
11	Program 3.2.1.11	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	65	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	75	75	325	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama	
12	Program 3.2.1.12	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	66	Nilai Pajak Daerah	dalam Juta Rp.	592.978	713.500	11.850	Bapenda	
			67	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	6,75	14,91			
			68	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Dalam Juta Rp.	912.197	996.655			
			69	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	%	-6,74	9,25			
	Sasaran 3.2.2.	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang	%	0	20			Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis Potensi Lokal
			2	Persentase Realisasi Rencana PolaRuang	%	0	20			
1	Program 3.2.2.1	Perencanaan Tata Ruang	70	Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM	%	0	20	1.550	Bappeda dan Dinas PUPR	
			71	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	85	100		Bappeda	
2	Program 3.2.2.2	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	72	Prosentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%)	%	0	20	250	Dinas PUPR	
			73	Prosentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%)	%	0	20			
3	Program 1.1.3.3	Penataan dan Pengaturan Bagunan Gedung	74	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi	%	25	30	1.200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			75	Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang direncanakan sesuai NSPK yang berlaku	%	0	20			

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Tujuan/Sasaran/Program		Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020		Perangkat Daerah	Prioritas Pembangunan Tahun 2020
							Target	Rp. (d/m Juta)		
4	Program 1.1.3.4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	76	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	%	80	82	2.100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
			77	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)	%	90	90			
5	Program 3.2.2.5	Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	78	Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	%	90	90	290	SatpolPP	
			79	Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang	%	10	2			
	Sasaran 3.2.3.	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	88.59	90			
			2	Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	45	50			
	Program 3.2.3.1	Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian	80	Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah)	Km	270,25	270,25	277.658	Dinas PUPR	
			81	Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km)	Km	78,3	85,3			
			82	Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	Km	0	0			
			83	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	Km	15,14	18,14			
			84	Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan	Angka	2	2			
			85	Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%)	%					
			86	Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan (%)	M	278	278,3			
			87	Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan (%)	Jalur	2	0			
	Program 3.2.3.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	88	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	%	88.59	89	57.600		
	Program 3.2.3.3	Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	89	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	50	60	1.800		
	Program 3.2.3.4	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Trasportasi	90	Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik	%	70	75	9.900	Dinas Perhubungan	
	Program 3.2.3.5	Peningkatan Pelayanan Angkutan	91	Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%)	%	50	50	42.050	Dinas Perhubungan	
			92	Load Factor Angkutan Umum	%	40	45			650
	Program 3.2.3.6	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	93	Konektivitas transportasi multimoda	%	2	2	505.000		

#### **4.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2020**

Prioritas pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2020 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap :

1. Permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan keselarasannya dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang berkembang di tingkat Propinsi Jawa Barat dan di tingkat Nasional.
2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2020;
3. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020
4. Arah Kebijakan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024.
5. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sesuai target rencana tahun 2020.
6. Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2018
7. Kerangka Ekonomi dan Kerangka Pendanaan Kota Bogor Tahun 2020.

##### **4.4.1. Isu Strategis Nasional, Propinsi Jawa Barat dan Kota Bogor**

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan kota Bogor harus saling berkaitan dan saling mengisi satu dengan lainnya. Oleh karenanya, berikut ini digambarkan keterkaitan antara isu strategis pemerintah pusat, propinsi jabar, dan isu strategis Ranwal RPJMD Kota Bogor 2019-2024, dan Isu Strategis Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam table berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Sinergitas isu strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan**  
**Kota Bogor**

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Kota Bogor
1. Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi - Hankam - Politik	1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi Birokrasi	1. Pembangunan Manusia yang Berkeadilan 2. Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis potensi local 3. Pmanfaatan ruang dan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan 4. Reformasi Birokrasi

Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

#### 4.4.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Tema Pembangunan Nasional pada Tahun 2020 adalah **Peningkatan Sumber daya Manusia untk pertumbuhan berkualitas**. Tema tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) prioritas Nasional yaitu : Pembangunan Manusia dan pengentasan Kemiskinan, Konektivitas dan Pemerataan, Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, Ketahanan Pangan, air, energy dan Lingkungan Hidup, serta Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Selanjutnya Tema dan Prioritas pembangunan nasional sebagaimana disampaikan diatas dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut ini :

Gambar 4.7. Tema Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020



Sumber: Bappenas, 2019

Selanjutnya pada arah kebijakan makro untk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) kebijakan sebagai berikut

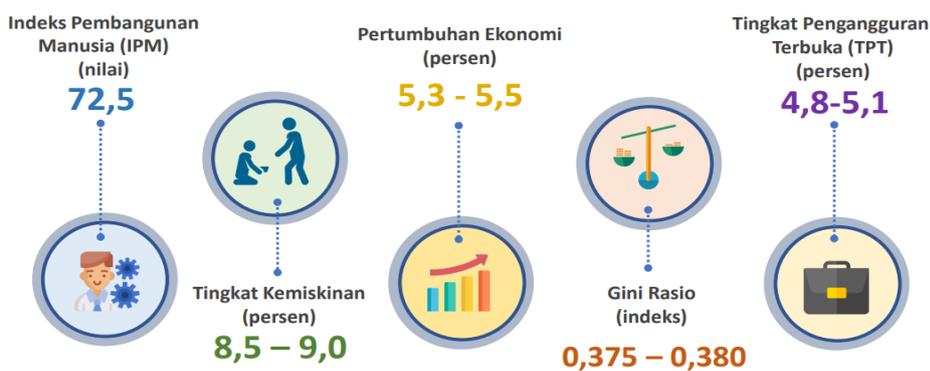
Gambar 4.8. Arah Kebijakan Makro Pembangunan Nasional Tahun 2020



Sumber : Bappenas, 2019.

Dengan target nasional untuk pencapaian indikator makro ekonomi tahun 2020 sebagai berikut :

Gambar 4.9. Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Nasional Tahun 2020



Sumber : Bappenas, 2019.

#### 4.4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020

Tema Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat pada Tahun 2020 adalah **Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan pelayanan Publik**. Tema Tersebut dijabarkan ke dalam 4 (Empat) prioritas pembangunan daerah propinsi Jawa Barat pada Tahun 2020 yaitu : Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, Percepatan Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,

peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan public, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum.

Gambar 4.10. Tema Pembangunan Propinsi Jawa Barat Tahun 2020  
**TEMA PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2020**



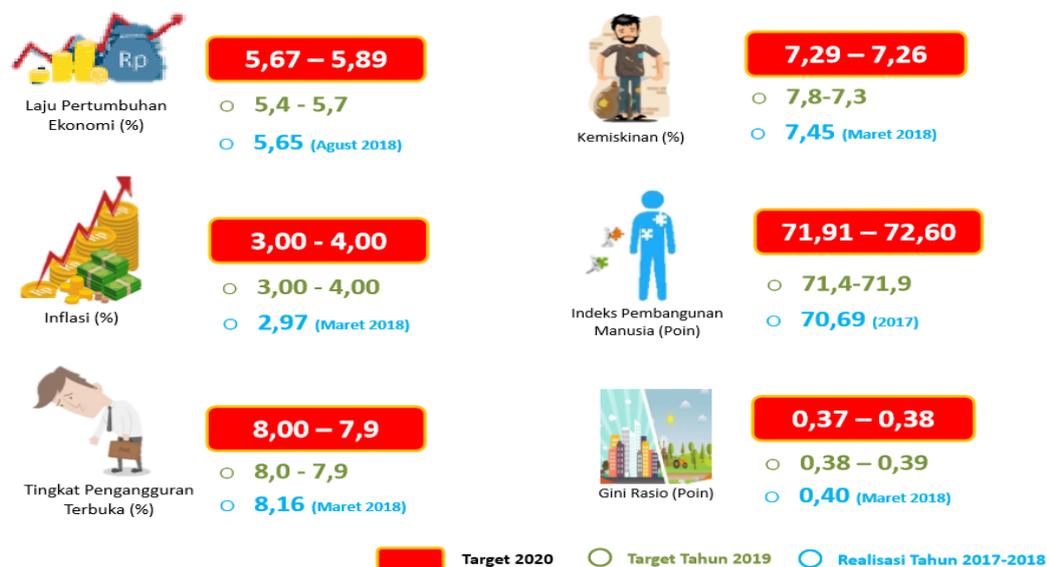
Sumber : Bappeda Jawa Barat Tahun 2019

Selanjutnya Arah Kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Barat tersebut pada tahun 2020 difokuskan pada :

- 1) Meningkatkan Akses Pendidikan Untuk Semua;
- 2) Desentralisasi Pelayanan Kesehatan;
- 3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi;
- 4) Mengembangkan Destinasi Dan Infrastruktur Pariwisata;
- 5) Mewujudkan Pesantren Juara;
- 6) Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas Wilayah;
- 7) Gerakan Membangun Desa;
- 8) Memberikan Subsidi Gratis Untuk Golongan Ekonomi Lemah; Serta
- 9) Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah.

Sementara secara makro, pembangunan ekonomi di Jawa Barat diarahkan untuk pencapaian target indicator makro ekonomi sebaga berikut :

Gambar 4.11. Capaian Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2017-2018 Dan Target Tahun 2020

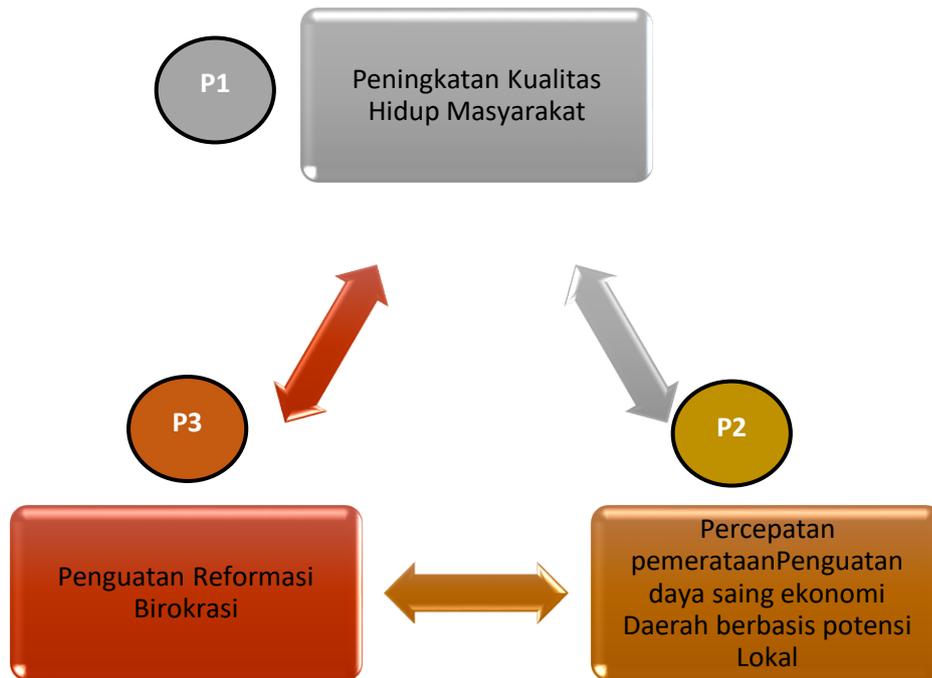


Sumber : Bappeda Jawa Barat Tahun 2019

#### 4.4.4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020

Tema Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2020 adalah ***Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berkeadilan.*** Tema tersebut dijabarkan ke dalam 3 (Tiga) prioritas pembangunan Kota Bogor yaitu : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat, Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal, dan Penguatan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya Tema dan Prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2020 sebagaimana disampaikan diatas dapat dilihat sesuai dengan gambar berikut ini :

Gambar 4.12.  
**Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor pada  
 Tahun 2020**  
**“ Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang  
 Berkeadilan.”**

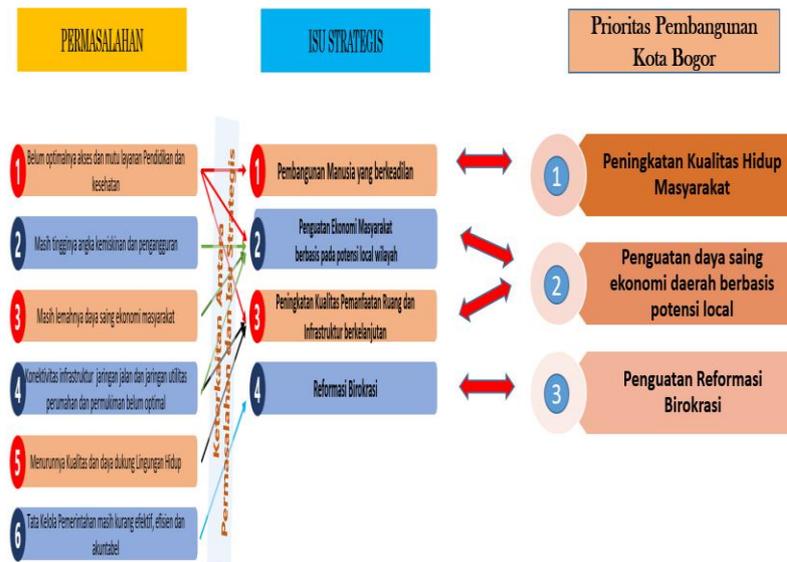


Dalam rangka merumuskan perencanaan pembangunan yang akuntabel sebagai bagian dari perwujudan reformasi birokrasi, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah ini harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis yang ada di Kota Bogor dan sinergis menjawab permasalahan dan isu strategis yang ada di tingkat propinsi Jawa Barat dan di Tingkat Nasional. Untuk itu perlu dijabarkan keterkaitan permasalahan dan Isu strategis Kota Bogor dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka pendek.

Gambar berikut ini menjelaskan keterkaitan antara Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2020

Gambar 4.13. Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2020

Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor



© 2019 Bappeda Kota Bogor

Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah tahun 2020, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bogor Tahun 2020. Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor tersebut disajikan pada Tabel 4.5. dibawah ini

**Tabel 4.5.**

**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor  
Tahun 2020**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
<b>VISI : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga</b>				
<b>Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sehat</b>				
1 Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1. Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, professional dan bermutu;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan;</li> <li>b. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</li> <li>c. Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>d. Menjalinkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;</li> <li>e. Peningkatan Ketersediaan sumberdaya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana</li> </ul>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar; f. Kolaborasi pembiayaan Kesehatan Masyarakat. g. Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi;	
		2 Menurunkan Angka Kelahiran	a. Penurunan angka kelahiran pada usia remaja b. Peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		3 Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi masyarakat	a. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam b. Peningkatan kecukupan konsumsi energy dan protein pada asupan pangan masyarakat c. Pengendalian cemaran pada bahan pangan dan produk produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat	

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
			d. Menjamin Kualitas konsumsi pangan dan Gizi Ibu Hamil, Bayi dan Balita	
	2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif serta penyehatan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Advokasi pembangunan berwawasan kesehatan;</li> <li>b. Kemitraan dengan Kelompok Kesehatan Masyarakat;</li> <li>c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat;</li> <li>d. Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan.</li> </ul>	
		2. Meningkatkan Kebugaran Masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga</li> <li>b. Menjamin ketersediaan sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau</li> </ul>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman	<p>c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahraga Prestasi secara Berkelanjutan</p> <p>a. Menyediakan alternatif sumber air minum yang aman bagi masyarakat di Kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan;</p> <p>b. Meningkatkan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas;</p> <p>c. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat.</p>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan system air limbah yang layak	<p>a. Menyediakan system air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat.</p> <p>b. Menjalinkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah.</p>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		<p>3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman</p>	<p>c. Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan,;</p> <p>d. Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh</p> <p>e. Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman</p> <p>f. Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat</p> <p>g. Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>h. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
			i. Akselerasi Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana	
		4. Reduksi timbulan sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional;</li> <li>b. Penerapan dan Pengelolaan 3 R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat</li> <li>c. Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah</li> <li>d. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar.</li> </ul>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
	4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	1. Meningkatkan pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane</li> <li>b. Konservasi sumberdaya Air secara berkelanjutan</li> <li>c. Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA</li> <li>d. Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi,</li> </ul>	

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
			Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi Sumberdaya Air	
		2. Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar air	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air</li> <li>b. Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air.</li> <li>c. Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air.</li> </ul>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
	5. Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	1. Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara</li> <li>b. Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/</li> </ul>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara</p> <p>c. Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara</p>	
		<p>2. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p>	<p>a. penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim</p> <p>b. Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p>	
	<p>6. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan</p>	<p>1. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas</p>	<p>a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas</p> <p>b. Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang diteapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai</p>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>dengan amanat rencana tata ruang wilayah.</p> <p>c. Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau.</p>	
<b>Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Cerdas</b>				
<p>1 Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)</p>	<p>1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;</p>	<p>1. Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Dasar 9 Tahun</p>	<p>a. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan local sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan enterpreneurship.</p> <p>b. Standarisasi dan pemerataan Mutu Pendidikan Dasar</p> <p>c. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar</p> <p>d. Pengembangan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun.</p> <p>e. Penerapan Sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah</p> <p>f. Penguatan Karakter, Kreatifitas, Inovasi, dan Prestasi Siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi</p> <p>g. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.</p> <p>h. Menjamin Pendidikan Inklusif yang berkualitas.</p> <p>i. Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang</p>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswa miskin.	
		2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara</li> <li>b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Wajib Belajar 12 Tahun (setara SMA/SMK)</li> <li>c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja</li> <li>d. Meningkatkan Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/enterpreneurshi</li> </ul>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>p dalam rangka percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka</p> <p>e. Penguatan Kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas</p>	
	<p>2. Meningkatnya kualitas generasi muda</p>	<p>1. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda</p>	<p>a. Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak</p> <p>b. Penguatan Daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang</p> <p>c. Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa pada generasi muda</p> <p>d. Membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda</p> <p>e. Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor</p> <p>f. Memerangi penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>Minuman Keras pada generasi muda</p> <p>g. Melakukan pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan social ( anak jalanan, WTS,dll) secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih berdaya.</p> <p>h. Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan</p> <p>i. Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif</p> <p>j. Pengembangan budaya dan minat baca pada generasi muda untuk mendorong/memacu kreatifitas dan inovasi generasi muda</p> <p>k. Revitalisasi Perpustakaan Kota dan pengembangan taman taman bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.</p> <p>l. Memperkuat kharakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti.</p>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	3. Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggali kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdayaguna dan bernilai ekonomis</li> <li>b. Memperkuat jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> <li>c. Berupaya selalu menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan permasalahan pembangunan sehingga tidak terjebak pada rutinitas “Business As Usual”</li> <li>d. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya, dll)</li> </ul>	Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	4. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	1. Membangun dan menguatkan budaya partisipatif dalam setiap proses pembangunan daerah 2. Mendorong pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender	a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam setiap proses bisnis pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. b. Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
Terwujudnya 2 Pemerintahan yang Cerdas dan melayani ( <i>Smart government</i> )	1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan ( <i>open government</i> ) b. Memperkuat perencanaan pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas	Penguatan Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</li> <li>d. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja</li> <li>e. Penguatan system pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien</li> <li>f. Penguatan Kapasitas Aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur</li> <li>g. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan <i>'smart'</i></li> <li>h. Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.</li> </ul>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)</li> <li>j. Penataan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih</li> </ul>	
	2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi	1. Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat</li> <li>b. Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan</li> </ul>	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
<b>Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera</b>				
Terwujudnya 1 pemerataan . kesejahteraan masyarakat	1. Menurunnya tingkat pengangguran	1. Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM,	a. Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		Perbankan & profesional	<p>untuk memenuhi Kebutuhan Pasar</p> <p>b. Mengembangkan Inkubator Bisnis</p> <p>c. memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah</p> <p>d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja</p> <p>e. Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja</p> <p>f. Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja</p>	
	2. Menurunnya Kemiskinan		<p>a. Menjamin adanya perlindungan social bagi masyarakat miskin</p> <p>b. Meningkatkan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin</p> <p>c. Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Miskin</p>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
	3. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga	1. Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya</li> <li>b. Memastikan adanya kemitraan gender dalam kehidupan berkeluarga</li> </ul>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		2. Meningkatkan Ketahanan Fisik Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga</li> <li>b. Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia</li> <li>c. Peningkatan kualitas kesehatan keluarga</li> <li>d. Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga</li> </ul>	
		3. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Pendapatan per kapita keluarga melalui Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan</li> </ul>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga b. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar 12 tahun c. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat berbasis keluarga d. Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera e. Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga	
		4. Meningkatkan ketahanan Sosial Psikologis Keluarga	a. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak b. Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak</p> <p>c. Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga</p> <p>d. Peingkatan kualitas hidp bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga</p>	
		<p>5. Meningkatkan ketahanan social dan Budaya dalam keluarga</p>	<p>a. Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah</p> <p>b. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku social dan seksual menyimpang</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
<p>Terwujudnya</p> <p>2 peningkatan daya saing ekonomi daerah</p>	<p>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</p>	<p>1. Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah</p>	<p>a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local</p> <p>b. penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas</p> <p>c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi.</p> <p>d. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah</p> <p>e. Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional</p> <p>f. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan</p>	<p>Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi Lokal</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) g. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen h. Revitalisasi pasar tradisional i. Mengembangkan potensi ekonomi local melalui pengembangan kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah	
		2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing	a. Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik.	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi Lokal
	2. Terkendalinya Tata Ruang	1. Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	a. Pengendalian pemanfaatan Ruang melalui Pelaksanaan Perijinan, Penegakan Sanksi dan Penerapan Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan turunannya.	
	3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan jalan-jalan alternative/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran</li> <li>b. Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang (Flyover/underpass) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas</li> <li>c. Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.</li> </ul>	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
		2 Menyediakan jaringan transportasi yang berkualitas dalam rangka percepatan	a. Mendorong percepatan tersedianya sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		<p>pertumbuhan ekonomi daerah</p>	<p>b. Mengintegrasikan sistem jaringan transportasi perkotaan antar moda</p> <p>c. Melaksanakan percepatan penataan kawasan seputar Stasiun Kereta Api dan simpul-simpul transportasi lainnya dengan pengembangan system <i>Transit Oriented Development</i> (TOD).</p> <p>d. Membangun sarana prasarana simpul transportasi seperti penyediaan gedung parker di pusat-pusat kegiatan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas.</p> <p>e. Penuntasan Sarana Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT</p>	

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, 2019

Selanjutnya Arah Kebijakan pembangunan Kota Bogor tersebut pada tahun 2020 tersebut lebih difokuskan pada :

1. Pengembangan Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Penguatan spiritualitas dan nilai budaya untuk keluarga tangguh dan masyarakat madani.
3. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan dan melayani.

Sementara itu, secara makro, pembangunan ekonomi di Kota Bogor pada tahun 2020 diarahkan untuk pencapaian target indikator makro ekonomi sebagai berikut :

Gambar 4.14.

**TARGET CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KOTA BOGOR  
TAHUN 2020**



Sumber : Hasil Analisa Bappeda, 2019

#### 4.5. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bogor dengan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020

Untuk memastikan keselarasan Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kota Bogor dengan pembangunan nasional dan pembangunan propinsi Jawa Barat Tahun 2020 dapat dijelaskan melalui Tabel 4.6. sebagai berikut :

Tabel 4.6 : Keselarasan Arah Kebijakan dan Fokus Program Prioritas pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bogor untuk rencana pembangunan Tahun 2020

Rancangan RKP	RKPD Propinsi Jawa Barat	RKPD Kota Bogor
Tema : <b><i>Peningkatan Sumber daya Manusia untk pertumbuhan berkualitas.</i></b>	Tema : <b><i>Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan pelayanan Publik.</i></b>	Tema : <b><i>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berkeadilan</i></b>
<b>Prioritas Pembangunan:</b> 1. Pembangunan Manusia dan pengentasan Kemiskinan 2. Konektivitas dan Pemerataan 3. Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, 3. Ketahanan Pangan, air, energy dan Lingkungan Hidup 4. Stabilitas Pertahanan dan 5. Keamanan	<b>Prioritas Pembangunan:</b> 1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumberdaya Manusia 2. Percepatan Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 3. peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi 4. reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan public, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum	<b>Prioritas Pembangunan:</b> 1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 2. Penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal 3. Penguatan Reformasi Birokrasi

Rancangan RKP	RKPD Propinsi Jawa Barat	RKPD Kota Bogor
<p><b>Arah Kebijakan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia melalui transformasi structural untuk peningkatan kesejahteraan dan penguatan permintaan domestic serta peningkatan kinerja perdagangan internasional</li> <li>2. Menjaga stabilitas makro ekonomi</li> <li>3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi</li> </ol>	<p><b>Arah Kebijakan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Akses Pendidikan Untuk Semua</li> <li>2. Desentralisasi Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi;</li> <li>4. Mengembangkan Destinasi Dan Infrastruktur Pariwisata;</li> <li>5. Mewujudkan Pesantren Juara;</li> <li>6. Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas Wilayah;</li> <li>7. Gerakan Membangun Desa;</li> <li>8. Memberikan Subsidi Gratis Untuk Golongan</li> </ol>	<p><b>Arah Kebijakan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</li> <li>2. Penguatan spiritualitas dan nilai budaya untuk keluarga tangguh dan masyarakat madani.</li> <li>3. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, transparan dan melayani.</li> </ol>

Rancangan RKP	RKPD Propinsi Jawa Barat	RKPD Kota Bogor
	Ekonomi Lemah; Serta 9. Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah.	
<b>Target Indikator Makro</b>	<b>Target Indikator Makro</b>	<b>Target Indikator Makro</b>
IPM = 72.5	IPM = 71.91-72.6	IPM = 76.68
LPE = 5.3 – 5.5 %	LPE = 5.4-5.7 %	LPE = 6.66 %
Kemiskinan = 8.5 – 9%	Kemiskinan = 7.29 – 7.26	Kemiskinan = 5.8%
TPT = 4.8 – 5.1%	TPT = 8.0 – 7.9%	TPT = 8.47 %
Gini Rasio = 0.375 – 0.380	Gini Rasio = 0.37- 0.38	Gini Rasio = 0.4

Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota bogor, Tahun 2019

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dan masyarakat.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang tertuang dalam Bab V ini diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2020 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui 153 Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2019. Musrenbangda Tahun 2019 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2020, dimana Pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan pembangunan, yaitu pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Bogor.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, pada Bab V dokumen RKPD ini juga dituangkan prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2021. Rencana program dan kegiatan tahun 2020 diprioritaskan

- a. Untuk pemenuhan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019-2024
- b. untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial.

- c. Untuk pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- d. Untuk pemenuhan kebutuhan aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) dan melalui aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD

Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2020. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2020 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2020

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA BOGOR  
TAHUN 2020-2021**

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>										117.376.283.678	3.855.000.000		
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										117.376.283.678	3.855.000.000		
<b>PENDIDIKAN</b>										117.376.283.678	3.855.000.000		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										17.514.927.278	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Honorarium PNS	12 Bulan			17.514.927.278	-	Dinas Pendidikan	
						Honorarium Non PNS	12 Bulan						
						Pengadaan ATK	1 Paket						
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan						
						Belanja BBM Kendaraan Operasional	4 Unit						
						Belanja, Telepon, Air, Listrik, Tabung Gas, Surat Kabar/Majalah	12 Bulan						
						Belanja Jasa Kebersihan (Out Sourcing)	1 Paket						
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS	12 Bulan						
						Belanja Jasa Keamanan (Out Sourcing)	1 Paket						
						Belanja Makan dan Minuman Tamu	12 Bulan						
						Belanja Makan dan Minuman	12 Bulan						
						Pelatihan/Seminar/Lokarva/Sejenisnva	12 Bulan						
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan						
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										2.468.420.000	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						BM Pengadaan Motor	7 unit			1.524.400.000	-	Dinas Pendidikan	
						BM Rak Arsip Besi	15 unit						
						BM Lemari Arsip 2 pintu (sliding)	5 unit						
						BM Filling Cabinet	12 Unit						
						BM TV 60 inch	9 Unit						
						BM TV 82 inch	1 Unit						
						BM Meja 1/2 biro	15 Unit						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						BM Kursi Putar Sandaran Tinggi	2 Unit						
						BM Kursi Rapat Sandaran Tinggi	6 Unit						
						Meja lipat	40 unit						
						Kursi Rapat	220 unit						
						Sofa	1 set						
						Meja Rapat	1 Unit						
						Kursi Rapat Sandaran Tinggi	12 Unit						
						Tirai	1 paket						
						Misty Fan	3 Unit						
						Air Conditioner 1 PK	2 Unit						
						Air Conditioner 2 PK	8 Unit						
						Kamera Mirrorless	1 paket						
						Tangga Telescopic	3 unit						
						Telepon fax	1 unit						
						PABX Telepon Ekstensi	7 unit						
						Personal Computer	22 Unit						
						Printer	22 Unit						
						proyektor	2 paket						
						Scanner	2 Unit						
						Laptop	9 Unit						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Service Kendaraan	4 Unit			874.020.000	-	Dinas Pendidikan	
						Dinas Perorangan	4 Unit						
						Belanja Suku CadangKendaraan	4 Unit						
						Dinas Bermotor	4 Unit						
						Perorangan	4 Unit						
						Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4 Unit						
						Belanja STNK/Pajak (Mobil)	4 Unit						
						Belanja STNK/Pajak Motor	17 Unit						
						Terpeliharanya Jaringan Kantor	3 Paket						
						Service AC dan Pemeliharaan AC	36 Unit						
						Terpeliharanya Peralatan Komputer	12 Paket						
						Pemeliharaan Gedung	4 Paket						
						Terpeliharanya Peralatan Kantor	4 Paket						
Pengelolaan Informasi Publik						Tersedianya data digital data pokok pendidikan yang bisa diakses secara umum	1 kegiatan			70.000.000	-	Dinas Pendidikan	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>33.729.400</b>	<b>55.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Tersusunnya Dokumen Lakip	1 dokumen			8.774.000	-	Dinas Pendidikan	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan□	1 dokumen						
						Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD & EPPD□	1 dokumen						
						Tersusunnya Dokumen LKPJ	1 dokumen						
						Tersusunnya Dokumen Renja	1 dokumen						
						Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan	1 dokumen						
						Tersusunnya Dokumen LPPD,IPPD & EPPD	1 dokumen						
Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			Dinas Pendidikan			Terverifikasi Proposal Hibah dan Bantuan Sosial (Penerima Beasiswa SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA,PKBM,PAUD)	100%			24.955.400	55.000.000	Dinas Pendidikan	
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	100%						
						Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	100%						
						Jumlah Rekomendasi Penerima Hibah	rekomen dasi						
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;</b>		<b>Persentase PAUD Sehat (%)</b>	<b>32</b>			<b>Persentase PAUD Sehat (%)</b>	<b>32</b>	<b>473.670.000</b>	<b>-</b>		
				<b>APK PAUD</b>	<b>50</b>			<b>APK PAUD</b>	<b>50</b>				
Pendidikan Parenting						Pelatihan Pendidikan Parenting bagi PTK PAUD	200 orang			-	-		
Peningkatan Sarana dan Prasarana TK						Pembangunan UKS	1 sekolah			300.000.000	-	Dinas Pendidikan	
Apresiasi PAUD						Lomba Apresiasi GTK PAUD Berprestasi Tk. Kota	21 peserta			100.000.000	-	Dinas Pendidikan	
						Lomba Apresiasi Keteladanan Lembaga PAUD Berprestasi Tk. Kota	21 peserta						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 PAUD						Jumlah Peserta/lembaga Bimtek Kurikulum 2013 PAUD	700 lembaga/orang			73.670.000	-	Dinas Pendidikan	
<b>WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;</b>		<b>APK SD</b>	<b>113</b>			<b>APK SD</b>	<b>113</b>	<b>82.837.378.400</b>	<b>-</b>		
				<b>APK SMP</b>	<b>104,3</b>			<b>APK SMP</b>	<b>104,3</b>				
				<b>Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik</b>	<b>94,5</b>			<b>Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik</b>	<b>94,5</b>				
				<b>Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik</b>	<b>94,8</b>			<b>Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik</b>	<b>94,8</b>				
				<b>Nilai Rata-Rata USBN SD</b>	<b>68.14</b>			<b>Nilai Rata-Rata USBN SD</b>	<b>68.14</b>				
				<b>Nilai Rata-Rata UNSMP</b>	<b>58.3</b>			<b>Nilai Rata-Rata UNSMP</b>	<b>58.3</b>				
				<b>Persentase Sekolah Sehat (%)</b>	<b>15</b>			<b>Persentase Sekolah Sehat (%)</b>	<b>15</b>				
Peningkatan Manajemen Kurikulum SMP						Terlaksananya Workshop Penjaringan dan Verifikasi Data Peserta UN/USBN	123 sekolah			126.600.000	-	Dinas Pendidikan	
						Terlaksananya Verifikasi perangkat UNBK	123 sekolah						
						Tersedianya Jumlah Naskah Soal USBN	123 mata pelajaran						
						Terlaksananya Workshop Gerakan Literasi Sekolah bagi Guru Penggerak Literasi di Kota Bogor	123 sekolah						
						Terlaksananya Workshop Pendidikan Keluarga bagi Guru SMP Kota Bogor	123 sekolah						
						Terlaksananya Workshop Pembelajaran Digital bagi Guru SMP Kota Bogor	123 sekolah						
						Terlaksananya Workshop Pendidikan Inklusif bagi Guru SMP Kota Bogor	123 sekolah						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Workshop Sekolah Ramah Anak bagi Guru SMP Kota Bogor	123 sekolah						
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP			Kota Bogor			Rehabilitasi SMP Negeri	16 Unit			11.844.875.400	-	Dinas Pendidikan	
						Revitalisasi SMP Negeri	3 Unit						
						Rehabilitasi/ Revitalisasi Toilet Pemagaran	3 Unit 2 Sekolah						
						Penataan Lapangan	1 Sekolah						
						Jumlah Komputer Penunjang UNBK	153 Unit						
						Jumlah Mebeulair	75 Kelas						
						Junlah Whiteboard	200 Unit						
Peningkatan Sarana dan Prasarana SD						Unit Sekolah Baru	1 Unit			28.610.000.000	-	Dinas Pendidikan	
						Prosentase Sekolah yang Memadai	85 persen						
Pengadaan Lahan SD Cibuluh 3						Pengadaan Lahan SDN Cibuluh 3	1 sekolah			1.300.000.000	-	Dinas Pendidikan	
Peningkatan Manajemen Kurikulum SD						Terselenggaranya Ujian Sekolah Berstandar Nasional jenjang Sekolah Dasar	266 sekolah			481.909.000	-	Dinas Pendidikan	
						Terlaksananya pemberdayaan Gugus sebagai tempat peningkatan mutu pendidikan di Kota Bogor	44 gugus						
						Terselenggaranya pembelajaran "lesson Study" di Sekolah secara bertahap	266 sekolah						
						Terlaksananya pengembangan bahan ajar di semua sekolah secara bertahap	266 sekolah						
						Terlaksananya pengembangan sistem penilaian di sekolah sevara bertahap	266 sekolah						
						Terlaksananya pengembangan Lembar Kerja Siswa di semua sekolah secara bertahap	266 sekolah						
						Terselenggaranya Lomba Gugus di Tingkat Kota	6 gugus						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terselenggaranya pelatihan untuk pendamping anak berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara inklusif	100 orang							
						Terselenggaranya kegiatan gebyar anak anak berkebutuhan khusus bagi sekolah penyelenggaraan inklusif	20 sekolah							
Pengelolaan BOS Kota						Terkelolanya penggunaan BOS sesuai iuknis	233 sekolah			75.460.000	-	Dinas Pendidikan		
						Jumlah peserta bimtek keuangan dan penyusunan laporan	478 orang							
Penerimaan Siswa Didik Baru Online			Dinas pendidikan			Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan	sekolah			266.760.000	-	Dinas Pendidikan		
BOS Kota TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri						Terlaksananya KBM jenjang TK Negeri	2 sekolah			40.024.000.000	-	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya KBM jenjang SD Negeri	90000 siswa							
Pengelolaan BOS APBN						Terselenggaranya sosialisasi dan bimtek tata kelola BOS APBN Sd dan SMP Kota Bogor	305 sekolah			107.774.000	-	Dinas Pendidikan		
						Terselenggaranya lomba tata kelola BOS APBN Jenjang SD dan SMP Tingkat Kota Bogor	305 sekolah							
<b>PROGRAM MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;</b>		<b>Prosentase Sekolah terakreditasi A</b>				<b>Prosentase Sekolah terakreditasi A</b>		<b>5.278.421.600</b>	<b>-</b>			
				<b>TK Terakreditasi A</b>	<b>39</b>			<b>TK Terakreditasi A</b>	<b>39</b>					
				<b>SD Terakreditasi A</b>	<b>74</b>			<b>SD Terakreditasi A</b>	<b>74</b>					
				<b>SMP Terakreditasi A</b>	<b>74</b>			<b>SMP Terakreditasi A</b>	<b>74</b>					
				<b>jumlah siswa berprestasi</b>	<b>63</b>			<b>jumlah siswa berprestasi</b>	<b>63</b>					
				<b>Persentase Pelajar Bebas NAPZA</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Pelajar Bebas NAPZA</b>	<b>100</b>					
				<b>penurunan kejadian tawuran pelajar</b>	<b>18</b>			<b>penurunan kejadian tawuran pelajar</b>	<b>18</b>					
				<b>Jumlah siswa dan mahasiswa miskin yang mendapatkan BSM</b>	<b>6445</b>			<b>Jumlah siswa dan mahasiswa miskin yang mendapatkan BSM</b>	<b>6445</b>					
Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku						Terlaksananya KBM jenjang SMP Negeri	18314 siswa			226.597.400	-	Dinas Pendidikan		
						Terselenggaranya operasi siswa SMP	90 persen							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terselenggaranya pembinaan siswa SMP	90 persen							
						Terselenggaranya pelatihan konselor pembina kesiswaan SMP	92 persen							
Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN						Dokumen Penilaian Siswa	5 dokumen			3.000.000.000	-	Dinas Pendidikan		
Beasiswa Mahasiswa Berprestasi						Siswa berprestasi Tingkat Provinsi	Orang			578.488.000	-	Dinas Pendidikan		
						Siswa berprestasi Tingkat Nasional	Orang							
						Siswa berprestasi Tingkat Internasional	Orang							
Peningkatan Manajemen SD						Terlaksananya pengembangan program peningkatan manajemen di Sekolah Dasar	266 sekolah			36.027.000	-	Dinas Pendidikan		
						Terlaksananya Peningkatan Sekolah Potensial menjadi Potensial Mandiri	80 sekolah							
Peningkatan Kompetensi Siswa SD						Terselenggaranya O2SN SD Tingkat Kota	256 siswa			282.014.000	-	Dinas Pendidikan		
						Terselenggaranya OSN dan IMSO Tingkat Kota	72 siswa							
						Terselenggaranya Lomba Calistung Tingkat Kota	3 mata lomba							
						Terselenggaranya FLS2N SD Tingkat Kota	4 mata lomba							
						Terselenggaranya Lomba Pasangiri SD Tingkat Kota	5 mata lomba							
						Terselenggaranya LTUB SD Tingkat Kota	6 sekolah							
						Terselenggaranya Pekan Kreativitas Tingkat Kota	3 mata lomba							
Peningkatan Manajemen SMP						Pelatihan 8 SNP bagi 123 SMP	123 Sekolah			64.540.000	-	Dinas Pendidikan		
Peningkatan Kompetensi Siswa SMP						Terselenggaranya kegiatan-kegiatan lomba seperti : OSN, O2SN, FLS2N, FLS, Galasiswa Indonesia, Lomojari, Pasangiri, LTUB, Duta Sanitasi, dan KIR	5560 siswa			722.768.200	-	Dinas Pendidikan		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terselenggaranya kegiatan sosialisasi, workshop dan Bimbingan Teknis dalam kegiatan MPLS, Workshop Wakasek Kesiswaan, LDK, dan Pendidikan Karakter	363 guru dan siswa							
Peningkatan Manajemen PAUD						Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagi PAUD	orang			103.921.800	-	Dinas Pendidikan		
Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus			Kota Bogor			pelaksanaan workshop manajemen LKP	1 kegiatan			144.265.000	-	Dinas Pendidikan		
						pelaksanaan pelatihan tenaga administrasi LKP	1 kegiatan							
						pelaksanaan pelatihan instruktur LKP	1 kegiatan							
Peningkatan Manajemen Lembaga PKBM			Kota Bogor			Terlaksananya Pelatihan Akreditasi bagi Lembaga PKBM	185 orang			45.370.000	-	Dinas Pendidikan		
Optimalisasi pengelolaan aset Sarana Prasarana TK, SD dan SMP						Terinventarisasi seluruh barang milik daerah di lingkup TK, SD, SMP dan SKB	234 sekolah			74.430.200	-	Dinas Pendidikan		
						Tersusunnya RKBMD dan RKPBMMD di lingkup TK, SD, SMP dan SKB	234 sekolah							
						Terlaksananya laporan BMD di lingkup TK, SD, SMP dan SKB	234 sekolah							
<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;</b>		<b>Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)</b>	<b>67</b>			<b>Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)</b>	<b>67</b>	<b>7.277.962.400</b>	<b>3.800.000.000</b>			
				<b>Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)</b>	<b>19</b>			<b>Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)</b>	<b>19</b>					
				<b>Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)</b>	<b>53</b>			<b>Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)</b>	<b>53</b>					
				<b>Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)</b>	<b>53</b>			<b>Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)</b>	<b>53</b>					
				<b>Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional</b>	<b>1</b>			<b>Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional</b>	<b>1</b>					

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah						Terselenggaranya Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah Terselenggaranya Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah	120 orang 60 orang			65.500.000	-	Dinas Pendidikan	
Peningkatan Kompetensi PTK SD			Dinas Pendidikan Kota Bogor			Meningkatnya Kompetensi Guru SD, Kepala SD dan Pengawas Tingkat TK, SD dan SMP berkualifikasi S1 dan memiliki sertifikat kompetensi	570 orang			123.600.000	-	Dinas Pendidikan	
Peningkatan Prestasi PTK SD			Dinas Pendidikan Kota Bogor			PTK / Tutor yang berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	2 Orang			48.250.000	-	Dinas Pendidikan	
Peningkatan Kompetensi PTK SMP			Kota Bogor			Jumlah Guru Yang meningkat Kompeten dan Bersertifikasi	200 Kegiatan			191.542.400	2.000.000.000	Dinas Pendidikan	
						jumlah guru yang mengikuti PPG Dalam Jabatan	kegiatan						
Peningkatan Prestasi PTK SMP			Dinas Pendidikan Kota Bogor			Jumlah PTK SMP Berprestasi meningkat secara Nasional	200 Kegiatan			116.840.000	300.000.000	Dinas Pendidikan	
Peningkatan Kompetensi PTK PAUD						Tercapainya Standar Kopetensi PTK PAUD Tamatan SMA menjadi Guru PAUD	orang			456.930.000	-	Dinas Pendidikan	
Peningkatan Kualifikasi PAUD						Tercapainya Standar Kualifikasi PTK PAUD	orang			366.050.000	-	Dinas Pendidikan	
Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik PAUD						Terjaminnya Kesejahteraan Guru PAUD	orang			2.415.600.000	-	Dinas Pendidikan	
Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik SD			Dinas Pendidikan Kota Bogor			Meningkatnya Kesejahteraan Guru honor dan Guru pendamping ABK Jenjang SD	1183 Orang			3.000.000.000	-	Dinas Pendidikan	
Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik SMP			Dinas Pendidikan Kota Bogor			Jumlah Guru Jonor dan Pendamping ABK Di SMP Negeri Kota Bogor	Kegiatan			-	1.500.000.000		
Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik SD			Dinas Pendidikan Kota Bogor			Sosialisasi Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Tunjangan Sertifikasi	264 orang 264 orang			56.250.000	-	Dinas Pendidikan	
						Tersalurkannya Tunjangan Profesi tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku	264 Orang						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Kompetensi PTK Kesetaraan						Tercapainya Standar Kompetensi Tutor Paket A,B,C	150 Orang			53.000.000	-	Dinas Pendidikan	
Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan (Kesharlindung) Pendidik Kesetaraan						Terjaminnya Kesejahteraan Tutor PKBM	150 Orang			384.400.000	-	Dinas Pendidikan	
<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;</b>		<b>Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi</b>	<b>33</b>			<b>Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi</b>	<b>33</b>	<b>990.774.600</b>	<b>-</b>		
				<b>Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi</b>	<b>50</b>			<b>Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi</b>	<b>50</b>				
				<b>Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi</b>	<b>50</b>			<b>Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi</b>	<b>50</b>				
				<b>Persentase Kelulusan Paket A</b>				<b>Persentase Kelulusan Paket A</b>					
				<b>Persentase Kelulusan Paket B</b>				<b>Persentase Kelulusan Paket B</b>					
				<b>Persentase Kelulusan Paket C</b>				<b>Persentase Kelulusan Paket C</b>					
				<b>Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan</b>	<b>50</b>			<b>Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan</b>	<b>50</b>				
Apresiasi Kursus						pelaksanaan lomba apresiasi GTK kursus berprestasi dan berdedikasi tk.kota	1 kegiatan			97.480.000	-	Dinas Pendidikan	
						pelaksanaan lomba apresiasi peserta didik kursus berprestasi tk.kota	1 kegiatan						
						pelaksanaan lomba apresiasi keteladanan lembaga kursus berprestasi tk.kota	1 kegiatan						
						pengiriman peserta lomba lomba apresiasi GTK kursus berprestasi dan berdedikasi tingkat provinsi dan nasional	1 kegiatan						
						pengiriman peserta lomba apresiasi peserta didik kursus berprestasi tingkat provinsi dan nasional	1 kegiatan						
						pengiriman peserta lomba lomba apresiasi keteladanan lembaga kursus berprestasi tingkat wilayah, tingkat provinsi dan nasional	1 kegiatan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						pelaksanaan expo kursus tingkat kota	1 kegiatan							
						pengiriman peserta expo kursus tingkat provinsi	1 kegiatan							
Peningkatan Kompetensi Warga Belajar DIKMAS						- Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket A - Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket B - Jumlah Peserta yang lulus mengikuti Kejar Paket C - Jumlah Peserta belajar Keaksaraan Fungsional - Jumlah Peserta belajar Keaksaraan Usaha Mandiri	orang			589.619.600	-	Dinas Pendidikan		
Apresiasi Kesetaraan						Pelaksanaan Apresiasi GTK Kesetaraan Berprestasi Tk. Kota Bogor  Pelaksanaan Lomba Keteladanan Lembaga Kesetaraan Berprestasi Tk. Kota Bogor	1 Kegiatan  1 Kegiatan			103.675.000	-	Dinas Pendidikan		
						Terwujudnya Pameran Hasil Karya Warga Belajar KF/KUM dan Dikmas Terlaksananya Upacara HAI Tk. Provinsi dan memotifasi para Lembaga PNF	1 Kegiatan  1 Kegiatan							
Peningkatan Sarana dan Prasarana SKB						Perbaikan Gedung SKB Bubulak dan Pengadaan TIK	1 unit			200.000.000	-	Dinas Pendidikan		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik</b>	<b>55</b>			<b>Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik</b>	<b>55</b>	<b>501.000.000</b>	<b>-</b>			
				<b>Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik</b>	<b>55</b>			<b>Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik</b>	<b>55</b>					

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90			Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90				
Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web						Buku Saku Profil Pendidikan 2019	Buku			125.000.000	-	Dinas Pendidikan	
Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data Pokok Pendidikan - Pendidikan Non Formal dan Informal)						Buimtek Dapodik Puad Dikmas untuk operator PAUD, Kesetaraan dan Lembaga Kursus yang sudah mempunyai NPSN	480 Satuan Pendidik an			350.000.000	-	Dinas Pendidikan	
Pemutakhiran Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar )						Bimtek Aplikasi Dapodik untuik operator Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dan Swasta	370 Satuan Pendidik an			26.000.000	-	Dinas Pendidikan	
						Perlombaan Pameran Hasil Karya KF/KUM	1 Kegiatan						
<b>DINAS KESEHATAN</b>										<b>162.775.924.009</b>	<b>115.255.000.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>162.775.924.009</b>	<b>115.255.000.000</b>		
<b>KESEHATAN</b>										<b>162.775.924.009</b>	<b>115.255.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>9.080.640.609</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %			9.080.640.609	-	Dinkes	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>5.000.000.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %			1.500.000.000	-	Dinkes	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Persentase pemeliharaan rutin/berkala inventaris kantor	100 %			500.000.000	-	Dinkes	
Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor						Gedung ex Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Tersedianya sarana Prasarana	1 paket 1 paket			3.000.000.000	-	Dinkes	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>8.115.000.000</b>	<b>550.000.000</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kota Bogor			Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan (Review RPJMD/ Renstra, Renja, PRA RKA, RKA, DPA, DPPA, MONEV, LKPJ, LPPD, ELPPD, LAKIP/SAKIP, RUP, ASPAK)	100 %			50.000.000	50.000.000	Dinkes	
						Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pelaporan	1 paket						
Workshop Perencanaan			Kota Bogor			Persentase workshop Perencanaan( Rapat Kerja Kesehatan Daerah, SPIP, SOP, Respon Gender, SKM, SPM dan P2KT)	100 %			150.000.000	500.000.000	Dinkes	
						Persentase meningkatnya tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	80 %						
						Persentase capaian SPM terpadu di Puskesmas	100 %						
						Tersusunnya Perencanaan Kesehatan	100 %						
Evaluasi Permohonan Hibah			Kota Bogor			Monitoring Evaluasi Hibah-Bansos urusan Kesehatan	3 Kali			15.000.000	-	Dinkes	
						Survey Lokasi Pemohon Hibah-bansos	3 Kali						
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)						terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan	100 %			-	-	Dinkes	
Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM			Puskesmas dan Labkesda			Persentase Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM	100 persenta se			7.300.000.000	-	Dinkes	
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Kota Bogor			Persentase Puskesmas yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	48 persenta se			600.000.000	-	Dinkes	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</b>		<b>Indeks Keluarga Sehat</b>	<b>0,5</b>			<b>Indeks Keluarga Sehat</b>	<b>0,5</b>	<b>93.346.522.050</b>	<b>82.000.000.000</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	80%			Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	0,8				
				Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	24%			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	0,244				
				Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	96%			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	0,96				
				Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	8 % (2 pusks)			Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	8 % (2 pusks)				
				Persentase Penduduk miskin yang memiliki JKN	100			Persentase Penduduk miskin yang memiliki JKN	100				
Pelayanan Kesehatan Primer			Kota Bogor			Presentasi puskesmas dengan manajemen baik	80 %			263.674.050	900.000.000	Dinkes	
						Quickwin (layanan ketersediaan darah)	100 %						
						Persentase pelaksanaan PIS PK di Puskesmas	75 %						
						Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	20 %						
						Persentase penyehat tradisional yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	65 %						
Penyediaan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok ( DBHCHT)						Tersedianya alat kesehatan dan bahan habis pakai dalam pencegahan dan pengendalian penyakit akibat dampak asap rokok	100 %			-	-	Dinkes	
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah						Persentase peningkatan kunjungan pada tiga layanan labkesda	100 %			250.000.000	-	Dinkes	
Pelayanan Kesehatan Rujukan						Ketersediaan e-SIR Bogor Sehat di Puskesmas	6			727.945.920	7.100.000.000	Dinkes	
						Ketersediaan e-SIR Bogor Sehat di Rumah Sakit	5						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya pelayanan rujukan kesehatan di Kota Bogor	25 Faskes (puskesmas/RS)							
						Penguatan e-SIR bagi Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Swasta	1 Kali							
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pengelolaan e-SIR Bogor Sehat	70 Pkm, RS, Klinik/B PM							
						Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan e-SIR Bogor Sehat	1 Paket							
						Terlaksananya pengembangan e-SIR Bogor Sehat	1 Paket							
						Terlaksananya Workshop Penguatan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Regional	6 Kali							
						Tersedianya Roll Banner Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	3 Buah							
						Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	80 Buku							
						Tersedianya Leaflet Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	250 Lembar							
						Terlaksananya Sosialisasi Perwali Sistem Pelayanan Kesehatan Rujukan Kota Bogor	1 Kali							
						Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan antara FKTL dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahap Awal	21 Draf PKS							
						Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan antara FKTL dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahap Akhir	21 PKS							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			Kota Bogor			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan dasar	68000 Orang			5.712.877.080	4.500.000.000	Dinkes	
						Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di sarana kesehatan rujukan	7500 Orang						
						Terbentuknya Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 Tim						
						Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor Program Jaminan Kesehatan dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC)	2 Kali						
						Terlaksananya Pertemuan Laporan Pihak Ketiga Jasa Administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	2 Kali						
						Terlaksananya Dialog Stakeholders Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 Kali						
						Tersedianya penyedia jasa administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 Paket						
						Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1 Paket						
						Terlaksananya rekonsiliasi klaim pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	3 Kali						
						Terlaksananya rekonsiliasi klaim premi PBI APBD Kota Bogor	11 Kali						
						Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Peserta JKN KIS menunggal Kelas III dan masyarakat yang belum ber-JKN	1 Kali						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Awal	1 Kali							
						Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Akhir	1 Kali							
						Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Sistem Rujukan dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Faskes Tk. I dan II	1 Kali							
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I	25 faskes tk. I							
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. II	29 faskes tk. II							
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JKN di Kelurahan Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Sarana Kesehatan Rujukan (RS) Tahap Awal	68 Kelurahan 34 Draf PKS							
						Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Sarana Kesehatan Rujukan (RS) Tahap Akhir	34 PKS							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			Kota Bogor			Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di sarana kesehatan dasar	68000 Orang			5.712.877.080	4.500.000.000	Dinkes	
						Terlaksananya pelayanan kesehatan penduduk miskin di sarana kesehatan rujukan	7500 Orang						
						Terbentuknya Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC)	1 Tim						
						Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor Program Jaminan Kesehatan dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC)	2 Kali						
						Terlaksananya Pertemuan Laporan Pihak Ketiga Jasa Administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	2 Kali						
						Terlaksananya Dialog Stakeholders Program Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 Kali						
						Tersedianya penyedia jasa administrasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan	1 Paket						
						Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengelolaan Aplikasi PBI APBD Kota Bogor	1 Paket						
						Terlaksananya rekonsiliasi klaim pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	3 Kali						
						Terlaksananya rekonsiliasi klaim premi PBI APBD Kota Bogor	11 Kali						
						Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Peserta JKN KIS menunggal Kelas III dan masyarakat yang belum ber-JKN	1 Kali						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Awal	1 Kali							
						Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Tim Penguatan Universal Health Coverage (UHC) Tahap Akhir	1 Kali							
						Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Sistem Rujukan dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Faskes Tk. I dan II	1 Kali							
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. I	25 faskes tk. I							
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Faskes Tk. II	29 faskes tk. II							
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JKN di Kelurahan Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Sarana Kesehatan Rujukan (RS) Tahap Awal	68 Kelurahan 34 Draf PKS							
						Tersedianya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Sarana Kesehatan Rujukan (RS) Tahap Akhir	34 PKS							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas						Terlaksananya pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor	220000 Jiwa			38.000.000.000	41.000.000.000	Dinkes	
Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di luar kuota jamkesmas (Banprov)						Terlaksananya pembayaran premi bagi penerima bantuan iuran daerah Kota Bogor	220000 Jiwa			-	28.000.000.000	Dinkes	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas						Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Dan Kapitasi JKN Puskesmas Rekonsiliasi Laporan JKN per Bulan	25 unit 25 Dokumen			100.000.000	-	Dinkes	
Akreditasi Fasilitas Kesehatan			Kota Bogor			Terlaksananya Workshop Penggalangan Komitmen	5 Klinik			92.025.000	300.000.000	Dinkes	
						Terlaksananya Workshop Self Assesment dan POA Akreditasi	5 Klinik						
						Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar Akreditasi	5 Klinik						
						Terlaksananya Workshop Penyusunan Dokumen Akreditasi	5 Klinik						
						Terlaksananya Workshop Implementasi Dokumen	5 Klinik						
						Terlaksananya Workshop Audit Internal dan Manaiemen Mutu	1 Angkatan						
						Terlaksananya Workshop Keselamatan Pasien	1 Angkatan						
Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Dasar -Akreditasi Puskesmas (Biaya Umum)(DAK NON FISIK)						Terlaksananya Pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas	25 Puskesmas			-	-	Dinkes	
						Terlaksananya Survey Reakreditasi Puskesmas	8 Puskesmas						
						Terlaksananya Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko	2 Angkatan						
						Terlaksananya Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manaiemen	2 Angkatan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya Workshop Pemahaman Standar Akreditasi	4 Angkataan							
Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta			Wilayah Kota Bogor			Terstandarisasinya Sarana Kesehatan Swasta Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku	83 %			200.000.000	200.000.000	Dinkes		
						Terlaksananya Pertemuan Pengelolaan Limbah Medis	50 Peserta							
						Terlaksananya Fullday Capacity Building Bersama Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas Kota Bogor	75 Peserta							
						Terlaksananya Pertemuan Pembinaan Apotek bersama Pemilik Apotek	50 Peserta							
						Terlaksananya Pembinaan Tenaga Gizi Rumah Sakit	45 Peserta							
						Terlaksananya Pertemuan Petugas Puskesmas Dalam Manajemen	55 Peserta							
						Pengendalian Infeksi Terlaksananya Pertemuan Petugas Rumah Sakit Dalam Manajemen	45 Peserta							
						Pengendalian Infeksi								
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas Bogor Selatan	70 %			2.933.182.000	-	Dinkes		
						terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis pakai habis	10 %							
						terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %							
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Cipaku	70 %			2.550.437.000	-	Dinkes		
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	15 %							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	15 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan			Kota Bogor			terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bondongan	70 %			2.339.543.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	10 %						
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Lawang Gintung	70 %			1.391.966.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis pakai habis	10 %						
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur			Kota Bogor			Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Bogor Timur	70 %			2.967.992.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes dan Bahan Media Habis Pakai	10 %						
						Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armin			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %			1.693.282.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	10 %						
						Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah			Kota Bogor			Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskemas	100 %			1.360.195.000	-	Dinkes	
						terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Bogor Tengah	%						
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	%						
						Terlaksananya Dukungan kegiatan operasional lainnya	%						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur			Kota Bogor			Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Sempur	70 %			1.264.882.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis pakai habis	10 %						
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Aut	70 %			892.715.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan BHP medis	10 %						
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Belong	%			535.265.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya Pengadaan Obat, AlKes, dan Bahan Medis Habis Pakai	%						
						Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	%						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka			Kota Bogor			Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %			1.530.795.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	10 %						
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Semplak	70 %			2.492.723.000	-	Dinkes	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis pakai habis	10 %							
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %							
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan			Kota Bogor			Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas	100 %			1.792.266.000	-	Dinkes		
						Terlaksananya jasa layanan di Puskesmas Pancasan	70 %							
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes, bahan kimia dan bahan medis habis pakai	10 %							
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %							
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	70 %			2.172.176.000	-	Dinkes		
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes, dan bahan medis habis pakai	10 %							
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %							
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Gang Kelor	70 %			2.085.831.000	-	Dinkes		
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis pakai habis	10 %							
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %							
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Sindang Barang	70 %			3.121.210.000	-	Dinkes		
						Pengadaan obat, alkes dan bahan habis pakai	10 %							
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %							
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara			Kota Bogor			Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Bogor Utara	70 %			2.813.860.000	-	Dinkes		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya pengadaan Obat, alkes, dan bahan medis pakai habis Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	10 % 20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegal Gundil			Kota Bogor			Terlaksananya Jasa Pelayanan Dipuskesmas Tegal Gundil Terlaksananya Pengadaan Obat,Alat Kesehatan,Bahan Kimia Dan Bahas Medis Habis Pakai Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional lainnya	70 % 10 % 20 %			1.675.467.000	-	Dinkes	
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu			Kota Bogor			Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan Terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai Terlaksananya dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan	70 % 10 % 20 %			2.183.007.000	-	Dinkes	
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal			kota bogor			Persentase terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskemas Terlaksananya Jasa Pelayanan Di Puskesmas Tanah Sareal Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes Dan Bahan Medis Habis Pakai Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	100 % 70 % 10 % 20 %			1.944.720.000	-	Dinkes	
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumpit			Kota Bogor			Persentase Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Pondok Rumpit Persentase Terlaksananya Pengadaan Obat Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis PAKai	70 % 10 %			775.779.000	-	Dinkes	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Persentase Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak			Kota Bogor			Persentase masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	96 %			2.025.693.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kedung Badak	70 %						
						Terlaksananya Pengadaan Obat, Alkes, dan Bahan Medis Habis Pakai	10 %						
						Terlaksananya Dukungan Kegiatan Operasional Lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayu Manis			Kota Bogor			Terlaksananya Jasa Pelayanan di Puskesmas Kayu Manis	70 %			2.034.242.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Bahan Kimia	10 %						
						Terlaksananya Dukungan Operasional Lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi			Kota Bogor			terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Mekarwangi	70 %			1.873.542.000	-	Dinkes	
						terlaksananya pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai	10 %						
						terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	20 %						
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja			Puskesmas Mulyaharja Kota Bogor			Persentase terlaksananya pengelolaan dana kapitasi JKN	100 %			1.549.230.000	-	Dinkes	
						Terlaksananya pengadaan obat, alkes dan bahan medis habis pakai	100 %						
						Terlaksananya dukungan kegiatan operasional lainnya	100 %						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya jasa pelayanan di Puskesmas Kota Bogor	100 %							
<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</b>		<b>Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS)</b>	<b>66</b>			<b>Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS)</b>	<b>66</b>	<b>8.084.005.000</b>	<b>8.525.000.000</b>			
				<b>Persentase Rumah sehat (%)</b>	<b>78,01</b>			<b>Persentase Rumah sehat (%)</b>	<b>78,01</b>					
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat			Kota Bogor			Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	3 kebijakan			380.226.000	1.300.000.000	Dinkes		
						Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	10 Persentase							
Peningkatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)			Kota Bogor			Persentase kawasan yang mematuhi perda KTR	75 %			227.479.000	725.000.000	Dinkes		
						Persentase institusi yang telah memiliki satgas KTR internal	37 %							
Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			kota Bogor			Persentase posyandu aktif	85 %			6.250.000.000	6.500.000.000	Dinkes		
						Persentase UKBM lain yang berstrata madya	4 %							
						Persentase RW Siaga Aktif	47 %							
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan						terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan	100 %			-	-	Dinkes		
Pengembangan Kesehatan Lingkungan						PERSENTASE KELUARGA YANG MEMPUNYAI AKSES ATAU MENGGUNAKAN AIR MINUM YANG MEMENUHI SYARAT	99%			1.226.300.000	-	Dinkes		
						PERSENTASE RUMAH SEHAT YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN	79%							
						PERESENTASE KELUARGA YANG MEMPUNYAI AKSES ATAU YANG MENGGUNAKAN JAMBAN	80%							
						PERSENTASE TTU YANG MEMNUHI SYARAT KESEHATAN	72%							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN MAKAN YANG MEMENUHI SYARAT	50%							
						PERSENTASE PUSKESMAS YANG MEMBINA POS UKK	40%							
						PERSENTASE PERUSAHAAN FORMAL YANG MELAKSANAKAN YANKESJA	50%							
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</b>		<b>Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	<b>86</b>			<b>Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	<b>86</b>	<b>2.314.464.000</b>	<b>850.000.000</b>			
				<b>Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup</b>	<b>2,95</b>			<b>Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup</b>	<b>2,95</b>					
				<b>Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup</b>	<b>3,35</b>			<b>Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup</b>	<b>3,35</b>					
				<b>Persentase Ibu Hamil Dengan KEK</b>	<b>3,99</b>			<b>Persentase Ibu Hamil Dengan KEK</b>	<b>3,99</b>					
				<b>Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia</b>	<b>8,3</b>			<b>Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia</b>	<b>8,3</b>					
				<b>Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs</b>	<b>4,75</b>			<b>Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs</b>	<b>4,75</b>					
				<b>Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)</b>	<b>1,97</b>			<b>Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)</b>	<b>1,97</b>					
				<b>Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)</b>	<b>4,42</b>			<b>Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)</b>	<b>4,42</b>					
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak						Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)	100 %			920.930.000	-	Dinkes		
						Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu bersalin (Pn)	100 %							
						Meningkatnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KNL)	100 %							
						Meningkatnya pelayanan kesehatan balita (Kunjungan Balita)	100 %							
						Meningkatnya komplikasi kebidanan yang dideteksi dan ditangani (PKO)	75 %							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Meningkatnya ibu hamil yang mengikuti kelas ibu	12 %							
						Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan persalinan	68 %							
						Meningkatnya Jumlah fasilitas kesehatan swasta diintervensi EMAS	7 faskes swasta							
						Meningkatnya puskesmas dengan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu	25 %							
						Meningkatnya komplikasi bayi baru lahir yang dideteksi dan ditangani (PKN)	79 %							
						Meningkatnya puskesmas ramah anak	32 %							
						Meningkatnya Jumlah kelas ibu balita per kelurahan	3 kelas ibu							
						Meningkatnya puskesmas mampu pelayanan penatalaksanaan kekerasan terhadap perempuan/Anak (PP-Ktp/AD □	100 %							
Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah, Remaja dan Lansia						Meningkatnya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %			286.833.000	850.000.000	Dinkes		
						Meningkatnya Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %							
						Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 1 dan 7	100 %							
						Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 10	100 %							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Meningkatnya siswa kelas 10 yang mendapat penjarangan kesehatan	100 %						
						Meningkatnya Jumlah Puskesmas Santun Lansia strata madya	3 puskesmas						
						Meningkatnya RW memiliki Posbindu	65 %						
						Meningkatnya Kelurahan memiliki Kelompok Pemberdayaan Lansia	10 %						
Pembinaan dan Pelayanan Gizi Masyarakat						Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan	95 %			1.106.701.000	-	Dinkes	
						Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	90 %						
						Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini	50 %						
						Persentase bayi mendapat ASI Eksklusif	51 %						
						Persentase balita Sangat Kurus mendapat PMT	100 %						
						Persentase Balita kurus Mendapat PMT	90 %						
						Persentase remaja putri mendapat Tablet Tambah Darah	31 %						
<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</b>		<b>Persentase kesembuhan TB Paru</b>	<b>86</b>			<b>Persentase kesembuhan TB Paru</b>	<b>86</b>	<b>2.451.641.350</b>	<b>-</b>		
				<b>Prevalensi HIV Aids</b>	<b>&lt;0,5</b>			<b>Prevalensi HIV Aids</b>	<b>&lt;0,5</b>				
				<b>Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)</b>	<b>65</b>			<b>Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)</b>	<b>65</b>				
				<b>Prevalensi Hipertensi</b>	<b>9,3</b>			<b>Prevalensi Hipertensi</b>	<b>9,3</b>				
				<b>Prevalensi Diabetes Militus</b>	<b>2,35</b>			<b>Prevalensi Diabetes Militus</b>	<b>2,35</b>				
				<b>Angka Kesakitan ODGJ</b>	<b>≤ 0,13</b>			<b>Angka Kesakitan ODGJ</b>	<b>≤ 0,13</b>				
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular						Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB sesuai Standar	100 Persen			1.946.185.150	-	Dinkes	
						Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90 Persen						
						Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	100 Persen						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Persentase Pasien HIV yang Diobati Persentase Konseling Tes HIV (VCT/PITC) Angka Bebas Jentik Nyamuk DBD Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bavi Persentase Penemuan Penderita Diare pada Balita	85 Persen 30 Persen 96 Persen 85 Persen 97 Persen						
						Persentase Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita  Persentase Desa/Kelurahan yang Berpotensi Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100 Persen  100 Persen						
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular						Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentasi Capaian Penderita Diabetes Melitus Persentase Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) di Puskesmas Persentase Pelaksanaan KIE dan Psikososial  Persentase Posbindu yang terintegrasi Penyakit Tidak Menular  Persentase Capaian Penderita Hypertensi Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Persentase Penjaringan Faktor Risiko PTM	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 60 Persen  4.4 Persen 1.2 Persen 100 Persen 52 Persen			505.456.200	-	Dinkes	
Penyediaan fasilitas kesehatan perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT)										-	-	Dinkes	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</b>		<b>Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi</b>	<b>80%</b>			<b>Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi</b>	<b>0,8</b>	<b>33.487.391.000</b>	<b>23.330.000.000</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	80%			Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	0,8				
				Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0,68			Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0,68				
				Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	60%			Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	0,6				
				Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan	85			Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan	85				
Pengadaan Obat-obatan			Dinas Kesehatan			Persentase Ketersediaan obat dengan tingkat kecukupan minimal 18 bulan	97 %			927.600.000	4.900.000.000	Dinkes	
Pengendalian Obat dan Makanan			Kota Bogor			Persentase Industri rumah tangga pangan yang mendapatkan rekomendasi sertifikasi PIRT	82 persen			124.780.000	380.000.000	Dinkes	
Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum)						Persentase Ketersediaan obat dengan tingkat kecukupan minimal 18 bulan.	97 %			40.000.000	50.000.000	Dinkes	
						Persentase tersediannya biaya penunjang sub bidang Pelayanan kefarmasian	100 %						
Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya			Kota Bogor			Persentase Puskesmas/Puskesmas pembantu yang di Bangun	100 %			16.195.011.000	18.000.000.000	Dinkes	
						Persentase Puskesmas/Puskesmas pembantu yang di rehabilitasi sesuai kebutuhan	100 %						
						Jumlah puskesmas menjadi Rumah Sakit	0 unit						
Perencanaan Pengadaan Lahan Puskesmas						Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah	1 dokumen			50.000.000	-	Dinkes	
Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas						Jumlah persiapan pengadaan tanah	1 dokumen			10.000.000	-	Dinkes	
Pelaksanaan Pengadaan Lahan Puskesmas						Jumlah lahan puskesmas yang tersedia	1 kali			9.200.000.000	-	Dinkes	
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas			Kota Bogor			Jumlah penyerahan hasil pengadaan tanah	1 dokumen			60.000.000	-	Dinkes	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Dokumen SPH	1 dokumen						
Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB Bidang Pelayanan Dasar - Sub Pelayanan Dasar (Biaya Umum) (DAK FISIK)						Persentase tersedianya biaya penunjang sub pelayanan dasar	100 %			50.000.000	-	Dinkes	
						Tersedianya Alat-alat Kesehatan	1 paket						
Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Empat)						Jumlah kendaraan roda 4 (empat)	4 unit			830.000.000	-	Dinkes	
Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan						Terlaksananya pendataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen			6.000.000.000	-	Dinkes	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health</b>	<b>65%</b>			<b>Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health</b>	<b>0,65</b>	<b>426.600.000</b>	-		
Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Informasi Publik						Persentase Puskesmas dan Labkesda yang aktif melaksanakan Pelayanan Informasi Publik	50 Persen			426.600.000	-	Dinkes	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health</b>	<b>50%</b>			<b>Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health</b>	<b>0,5</b>	<b>469.660.000</b>	-		
Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Kesehatan						Persentase Puskesmas yang menggunakan SIMPUS aktif	55 Persen			469.660.000	-	Dinkes	
						Digunakan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	1 Sistem						
						Persentase Puskesmas yang menggunakan e-Profil aktif	65 persen						
						Persentase Puskesmas yang menggunakan ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan) aktif	50 persen						
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>										<b>176.000.000.000</b>	-		
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>176.000.000.000</b>	-		
<b>KESEHATAN</b>										<b>176.000.000.000</b>	-		
<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</b>		<b>Persentase capaian SPM RSUD</b>	<b>84</b>			<b>Persentase capaian SPM RSUD</b>	<b>84</b>	<b>175.000.000.000</b>	-		
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD</b>	<b>3,66</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD</b>	<b>3,66</b>				

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Obat dan BHP Medis						Jumlah tindakan orthopaedi, onkologi dan kebidanan yang dilayani sesuai SPM	933 kasus			-	-		
Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit						Sertifikat	1 lembar			-	-		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kota Bogor						Jumlah Kunjungan Pasien yang dilayani sesuai SPM Melaksanakan Pelayanan Kesehatan	284207 Pasien 43 Layanan			175.000.000.000	-	RSUD	
<b>PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</b>		<b>Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan</b>	<b>60</b>			<b>Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan</b>	<b>60</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>RSUD</b>	
Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor (Lanjutan)						Terbangunnya Gedung Pelayanan dan Administrasi	Gedung			-	-		
Pengadaan Alat-alat Kesehatan						Jumlah Alat Kesehatan	10 unit			-	-		
Pengadaan Prasarana dan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan DAK						Jumlah Prasarana Alat Kesehatan	774 unit/set			-	-		
Pengadaan Prasarana dan Alat Kesehatan (Banprov)						Jumlah Prasarana Alat Kesehatan	314 unit			-	-		
Revitalisasi Sarana dan Gedung RSUD Kota Bogor Lanjutan (Bantuan Keuangan Provinsi)						Terbangunnya Gedung Pelayanan dan Administrasi sebanyak 1 Blok	1 Gedung			-	-		
Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit						Jumlah Unit Kerja terintegrasi SIM RS	14 unit			-	-		
Pengadaan sarana prasarana dan Alat Kesehatan DBHCHT						Jumlah Prasarana dan alat kesehatan penanganan akibat dampak asap rokok	3 Unit/set			-	-		
Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit-DAK						Jumlah SIM RS yang dikembangkan	2 Sistem/A PK			-	-		
Penyusunan FS Pembiayaan Pembangunan RSUD Kota Bogor						Jumlah Dokumen FS	1 dokumen			1.000.000.000			
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										<b>332.063.484.797</b>	<b>-</b>		
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>330.963.484.797</b>	<b>-</b>		
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										<b>240.605.784.797</b>	<b>-</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>3.700.000.000</b>	<b>-</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			3.700.000.000	-	Dinas PUPR	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Belanja Bahan Dekorasi dan Interior eksterior	1 Tahun						
						Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	1 Tahun						
						Peralatan dan Perlengkapan Tukang	1 Tahun						
						Belanja Telpon	1 Tahun						
						Belanja Air	1 Tahun						
						Belanja Listrik	1 Tahun						
						Belanja Surat Kabar/Majalah	1 Tahun						
						Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1 Tahun						
						Belanja Jasa Keamanan	1 Tahun						
						Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1 Tahun						
						Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaa	1 Tahun						
						Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1 Tahun						
						Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun						
						Belanja Cetak	1 Tahun						
						Belanja Penjilidan	1 Tahun						
						Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1 Tahun						
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun						
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>6.000.000.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Pengadaan Sepeda Motor	10 Unit			3.000.000.000	-	Dinas PUPR	
						Pengadaan Kendaraan Operasional Pick Up/Light Truck	2 Unit						
						Pengadaan Kendaraan Operasional Dump Trcuk	2 Unit						
						Pengadaan Filling Besi/Metal	10 Buah						
						Pengadaan Papan Instansi	2 Buah						
						Pengadaan Papan Pengumuman	2 Buah						
						Pengadaan Meja Rapat Kapasitas 20 Orang	1 Paket						
						Pengadaan Meja Rapat Kapasitas 30 Orang	1 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keeluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Sofa Kursi Kepala Dinas Pengadaan Meja Komputer Pengadaan Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf  Pengadaan AC Split Pengadaan Tempat Sampah Pengadaan Komputer PC Pengadaan UPS Pengadaan Printer A3 Pengadaan Printer F4 Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon II  Pengadaan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Paket 1 Paket 20 Buah  75 Buah  1 Paket 10 Buah  8 Unit 10 Unit 6 Unit 5 Unit 1 Unit  2 Unit						
						Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Proyektor + Attachment Pengadaan Layar Proyektor Pengadaan Sound System Pengadaan CCTV	10 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Foto Kopi Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer Pemeliharaan dan Perbaikan Ploter Pemeliharaan dan Perbaikan AC Split Pengecatan dan Perbaikan Plafon Gedung Kantor Dinas PUPR Pemeliharaan dan Perbaikan Kamar Mandi, Mushola Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kadis  Pemeliharaan Taman Dinas PUPR Pemeliharaan dan Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi Perbaikan Pintu dan Lobby Kantor Dinas PUPR Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan LAN	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	3.000.000.000	-	Dinas PUPR			

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon	1 Paket						
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>50.000.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						RENJA	1 Dokumen			50.000.000	-	Dinas PUPR	
						LKIP	1 Dokumen						
						RENSTRA	1 Dokumen						
						LKPJ	1 Dokumen						
						LPPD	1 Dokumen						
<b>PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi</b>		<b>Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik &amp; sedang) (%)</b>	<b>89%</b>			<b>Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik &amp; sedang) (%)</b>	<b>0,89</b>	<b>54.700.000.000</b>	-		
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase						Tersedianya Dokumen Perencanaan/DED Pemeliharaan Jalan,jembatan,trotoar dan drainase	20 dokumen			-	-		
Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, dan Jembatan Wilayah 1						Pekerjaan Perbaikan jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar dan Pekerjaan Perbaikan Jembatan	15 KM			8.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah 2						Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	15 Km			8.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah 3						Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan Trotoar, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	15 KM			8.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 1						Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal Kota Bgor Masyarakat Kota Bogor	1 Paket			8.000.000.000	-	Dinas PUPR	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 2						terlaksananya pemeliharaan berkala jalan dikecamatan Bogor Timu dan Bogor Selatan mempertahankan kualitas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang kota Bogor	1 Paket			8.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah 3						terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Teneah mempertahankan kuwalitas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang kota bogor	1 paket  100%			8.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan						Terlaksananya Pengujian Tanah dan Bahan di Lokasi Pekerjaan	75 lokasi			100.000.000	-	Dinas PUPR	
Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional						Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Compressor	2 unit			4.500.000.000	-	Dinas PUPR	
						Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Alat Pemeliharaan Trotoar Jalan dan Jembatan	2 Set						
						Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Penumpang	1 Unit						
						Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Pick Up	4 Unit						
						Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Light Truck	2 Unit						
						Tersedianya pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional Kendaraan Operasional Dump Truck	2 Unit						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional						Dapat beroperasinya Alat Berat untuk menunjang kelancaran pembangunan Infrastruktur	30 Unit			2.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Penyusunan Peraturan Standarisasi Kualitas Infrastruktur						Jumlah peraturan Standarisasi Kualitas Infrastruktur	1 Dokumen			100.000.000	-	Dinas PUPR	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI IRIGASI, SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani</b>	<b>18</b>			<b>jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani</b>	<b>18</b>	<b>40.942.142.400</b>	-		
				<b>Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%)</b>	<b>58,75</b>			<b>Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%)</b>	<b>58,75</b>				
				<b>Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)</b>	<b>91,03</b>			<b>Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)</b>	<b>91,03</b>				
Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1						Panjang saluran, sungai dan situ di wilayah 1 yang terpelihara	193 km			5.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2						Panjang saluran, sungai dan situ di wilayah 2 yang terpelihara	194 km			5.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah 1						Panjang saluran, sungai, situ yang dibangun/ ditingkatkan	2 km			11.742.142.400	-	Dinas PUPR	
Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah 2						Panjang saluran, sungai, situ yang terbangun/ditingkatkan di wilayah 2	2 km			11.500.000.000	-	Dinas PUPR	
Updating Analisa Harga satuan Bidang Sumber Daya Air						Tersusunnya Dokumen AHS SDA	1 Dokumen			-	-		
Perencanaan Teknis SDA						Tersusunnya dokumen perencanaan teknis SDA	2 dokumen			500.000.000	-	Dinas PUPR	
Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1						Terlaksananya pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana irigasi wilayah 1	250 meter			1.100.000.000	-	Dinas PUPR	
Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2						Pembangunan/Peningkatan Sarana dan prasarana Irigasi Wilayah 2	km			1.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Studi Kelayakan Pembangunan Kolam retensi						Jumlah studi kelayakan pembangunan kolam retensi Cibuluh Rusunawa	1 Dokumen			100.000.000	-	Dinas PUPR	
Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 1						Jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani	9 lokasi			1.000.000.000	-	Dinas PUPR	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Normalisasi dan Pengendalian Banjir Wilayah 2						Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani di wilayah 2	9 lokasi			1.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Naturalisasi DAS Ciliwung						Pemeliharaan dan penataan DAS Ciliwung	100 %			3.000.000.000	-	Dinas PUPR	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Persentase masyarakat yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM PDAM</b>	<b>85,54</b>			<b>Persentase masyarakat yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM PDAM</b>	<b>85,54</b>	<b>9.050.000.000</b>	<b>-</b>		
				<b>Persentase masyarakat yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM non PDAM</b>	<b>0,8</b>			<b>Persentase masyarakat yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM non PDAM</b>	<b>0,8</b>				
				<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik</b>	<b>63,85</b>			<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik</b>	<b>63,85</b>				
Pengelolaan IPAL dan IPLT Tegal Gundil			Kota Bogor			Tersedia BBM kendaraan Operasional (4 truk, 2 moteng, 1 pickup, 2 mobil tinja, 1 cap combi dan 1 bus toilet)	11 unit			1.800.000.000	-	Dinas PUPR	
						Terlaksananya Perawatan Kendaraan Operasional (4 truk, 2 moteng, 1 pickup, 2 mobil tinja, 1 cap combi dan 1 bus toilet)	11 unit						
						Tersedia Honorarium Pekerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	20 orang						
						Terlaksananya Pembayaran Telepon,Air,Listrik dan Internet	1 paket						
						Tersedianya pakaian kerja lapangan	1 paket						
						Terselenggaranya sosialisasi LLTT	600 orang						
						Perpipaan Air Limbah Sambungan Rumah	1 paket						
						Terpeliharanya mesin babat rumput	12 bulan						
						Terlaksanya Fogging	4 unit						
						Terpeliharanya peralatan kantor	1 paket						
						Tersedianya alat-alat kebersihan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Pengurusan Lumpur Kolam IPAL & IPLT Tersedianya dokumen monev IPAL & IPLT  Terselenggaranya uji kualitas efluent air limbah Terpeliharanya jaringan perpipaan air limbah Terpeliharanya alat-alat laboratorium	7 kolam  2 dokumen  1 paket 1 paket 1 paket						
						Terpeliharanya mesin babat rumput Tersedianya Bahan Dekorasi Tersedianya Bahan Cetak Tersedianya peralatan kantor lemari dan filling cabinet Tersedianya Pendingin Udara (AC)	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket						
Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang IPAL dan IPLT			Kota Bogor			Terpeliharanya Rumah Jaga IPAL dan IPLT  Tersambungnya Perpipaan Air Limbah Sambungan Rumah Terlaksananya Perbaikan TPT dan Tembok Pembatas Area IPAL dan IPLT Tersedianya DED RRevitalisasi IPLT  Tersedianya Toilet Portable Tersedianya Alat Laboratorium IPAL dan IPLT Tersedianya Pintu Gerbang dan Pos Tersedianya Hanggar untuk Kendaraan Operasional Tersedianya PJU dan Instalasinya Terselenggaranya Revitalisasi Jaringan Perpipaan Air Limbah di Villa Citra	1 Lokasi  100 SR 50 Meter  1 Dokumen 4 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Lokasi			3.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Optimalisasi Infrastruktur Air Minum			Kota Bogor			Optimalisasi infrastruktur air minum non PDAM	9 Lokasi			-	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersusunnya Konsultansi Perencanaan Optimalisasi Infrastruktur Air Minum Non PDAM Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen						
						Tersusunnya Konsultansi Perencanaan Optimalisasi Infrastruktur Air Minum Non PDAM Tahun Anggaran 2021	1 Dokumen						
						Terusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Air Minum Non PDAM di Kota Bogor	1 Dokumen						
Dana Pendamping Kegiatan Air Minum			Kota Bogor			Sosialisasi Pembangunan Air Minum yang bersumber dari APBN Biaya pendampingan untuk operasional kegiatan pembangunan Infrastruktur Air Minum	6 Lokasi  1 Tahun			250.000.000	-	Dinas PUPR	
Pengadaan Tangki Septik Individu			Kota Bogor			Pengadaan Tangki Septik Individu Base Line Penerima Manfaat Tangki Septik Individu	Unit  1 Dokumen			1.000.000.000	-	Dinas PUPR	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Domestik			Kota Bogor			Pembangunan Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik□	Unit			1.000.000.000	-	Dinas PUPR	
						Identifikasi Tangki Septik Individu di Kecamatan Bogor Utara□	Lokasi						
Optimalisasi Infrastruktur Air Limbah Domestik			Kota Bogor			- Optimalisasi IPAL Komunal□	Lokasi			2.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Dana Pendamping Kegiatan Air Limbah Domestik						- Sosialisasi Pembangunan IPAL Komunal yang bersumber dari APBN□	6 Lokasi			-	-		
						- Biaya pendampingan untuk operasional kegiatan pembangunan Infrastruktur Air Limbah□	1 Tahun						
						- Terlaksananya Pelatihan TFL Bidang Air Limbah□	4 Orang						
<b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal</b>	<b>Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM</b>	<b>20</b>			<b>Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM</b>	<b>20</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>-</b>		
				<b>Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD</b>	<b>100</b>				
Persetujuan Substansi dan Pengesahan Perda RDTR dan PZ Kota Bogor						Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Bogor Yang Di Perda kan	1 Dokumen			600.000.000	-	Dinas PUPR	
Penyelenggaraan Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)						Terselenggaranya Koordinasi Penataan Ruang di Kota Bogor	1 Kegiatan			350.000.000	-	Dinas PUPR	
Penyelenggaraan Studio Tata Ruang dan Penyajian Info Grafis Tata Ruang						Terselenggaranya Pengolahan dan Penyajian Data Tata Ruang	1 Kegiatan			350.000.000	-	Dinas PUPR	
Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang						Tersosialisasikannya Peraturan Bidang Tata Ruang	1 Kegiatan			-	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi		Prosentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%)	20			Prosentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%)	20	60.000.000	-		
				Prosentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%)	20			Prosentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%)	20				
				Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	82			Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	82				
				Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)	90			Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)	90				
Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan						Tersampainya materi bimbingan teknik kepada aparatur wilayah mengenai pengawasan dan pengendalian bangunan gedung	30 orang			60.000.000	-	Dinas PUPR	
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang						Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Kegiatan			-	-		
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN,JEMBATAN, DRAINASE DAN PEDESTRIAN</b>	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi		Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah)	270,25			Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah)	270,3	124.803.642.397	-		
				Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km)	85,3			Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km)	85,3				
				Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	0			Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	0				
				Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	18,14			Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	18,14				
				Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan	2			Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan	2				
				Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%)				Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%)					
				Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan	278,3			Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan	278,3				
				Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan	0			Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan	0				

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase						Tersusunnya dokumen ded pembangunan jalan,jembatan,trotoar dan drainase	15 dokumen			500.000.000	-	Dinas PUPR	
Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase						Tersusunnya dokumen ded peningkatan jalan,jembatan,trotoar dan drainase	11 dokumen			1.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan dan Jembatan						Pembebasan Lahan untuk rencanaPembangunan Jalan dan Jembatan	1 dokumen			-	-		
Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 1						Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Tanah Sareal dan Kec. Bogor Utara	Paket			20.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 2			Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan			Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur	12 Paket			12.470.030.000	-	Dinas PUPR	
						Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan	12 Paket						
Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 3						Terlaksananya Pembangunan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	37 Paket			6.427.100.000	-	Dinas PUPR	
Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 1						Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	54 Paket			15.000.000.000	-	Dinas PUPR	
						Terlaksananya peningkatan jalan, trotoar, jembatan dan drainase di Kec. Bogor Utara dan Tanah Sareal	Paket						
						Terlaksananya Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sareal	8 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Ke luaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sereal	Paket						
						Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sereal	8 Paket						
						Terlaksananya Pengawasan Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec Bogor Utara dan Kec. Tanah Sereal	Paket						
Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 2			Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan			Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Timur	32 Paket			15.000.000.000	-	Dinas PUPR	
						Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Selatan	24 Paket						
Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase wilayah 3						Terlaksananya Peningkatan Jalan, trotoar, Jembatan dan Drainase di Kec. Bogor Tengah dan Bogor Barat	34 Paket			52.456.512.397	-	Dinas PUPR	
Reinventarisasi dan Reidentifikasi Kebutuhan dan Status Lahan Rencana Frontage R-2						Terlaksananya Reinventarisasi dan Reidentifikasi Kebutuhan dan Status Lahan Rencana Frontage R-2	1 dokumen			600.000.000		Dinas PUPR	
FS Rencana Pembangunan Frontage R-2						Tersusunnya FS Rencana Pembangunan Frontage R2	1 dokumen			250.000.000		Dinas PUPR	
Update Desain Frontage R-2 terhadap Rencana LRT						Tersusunnya Desain Frontage R2	1 dokumen			500.000.000		Dinas PUPR	
Amdal Frontage R-2						Tersusunnya Dokumen Amdal Frontage R2	1 dokumen			600.000.000		Dinas PUPR	
<b>PROGRAM PENATAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Persentase Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi</b>	<b>30</b>			<b>Persentase Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi</b>	<b>30</b>	<b>16.857.700.000</b>	<b>-</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang direncanakan sesuai NSPK yang berlaku	20			Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang direncanakan sesuai NSPK yang berlaku	20				
Penyelenggaraan Bantuan Teknis Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung						Presentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut	100 %			350.000.000	-	Dinas PUPR	
Penyelenggaraan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Bogor						Hasil Kajian Tim Ahli Bangunan Gedung	20 kajian teknis			500.000.000	-	Dinas PUPR	
Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor						Terbangunnya Mesjid Agung Kota Bogor	100 %			15.000.000.000	-	Dinas PUPR	
Perencanaan Teknis Bangunan Gedung						Presentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut	100 %			500.000.000	-	Dinas PUPR	
Peningkatan Penataan, Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan						laporan pengawasan	1 buku			507.700.000	-	Dinas PUPR	
<b>PROGRAM PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi</b>		<b>Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik</b>	<b>60</b>			<b>Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik</b>	<b>60</b>	<b>500.000.000</b>	-		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi						Terupdatenya sistem informasi Jasa Konstruksi di Kota Bogor	Kegiatan			-	-		
Penyusunan Peraturan Bidang Jasa Konstruksi						Tersusunnya Peraturan Bidang Jasa Konstruksi di Kota Bogor	%			-	-		
Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi						Terbinanya Pelaksana/ Pelaku Usaha Jasa Konstruksi di Kota Bogor	100 %			250.000.000	-	Dinas PUPR	
Pengawasan dan Pengendalian Jasa Konstruksi						Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Usaha Jasa Konstruksi di Kota Bogor	%			-	-		
Bimbingan Teknis, Uji Kompetensi dan Sertifikasi Ahli						Terlaksanakannya sertifikasi Tenaga Ahli	%			-	-		
Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi						Terlaksananya sertifikasi tenaga kerja konstruksi	20 %			250.000.000	-	Dinas PUPR	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>1.100.000.000</b>	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Sistem Informasi Ledger Jalan (Aset dan database)						Terupdatenya/terbangunnya sistem informasi ledger jalan	1 aplikasi			600.000.000	-	Dinas PUPR	
Pembangunan SIM Perencanaan						Tersusunnya Dokumen Perencanaan pembangunan SIM	Dokumen			-	-		
Pembangunan SIM Pengawasan						Tersusunnya Dokumen Pengawasan untuk Pembangunan SIM	Dokumen			-	-		
SIM aplikasi Integrasi						Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi	Aplikasi			-	-		
SIM Infrastruktur						Terbangunnya sistem informasi aplikasi Infrastruktur	Aplikasi			-	-		
Pembangunan Data Centre						Terbangunnya data center untuk sistem informasi	Aplikasi			500.000.000	-	Dinas PUPR	
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>										<b>73.000.000.000</b>	-		
<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Panjang Jalan lingkungan permukiman berkondisi baik</b>	<b>551,34</b>			<b>Panjang Jalan lingkungan permukiman berkondisi baik</b>	<b>551,3</b>	<b>73.000.000.000</b>	-		
				<b>Panjang drainase lingkungan permukiman berkondisi baik</b>	<b>167,43</b>			<b>Panjang drainase lingkungan permukiman berkondisi baik</b>	<b>167,4</b>				
				<b>Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan</b>	<b>60</b>			<b>Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan</b>	<b>60</b>				
				<b>Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)</b>	<b>865</b>			<b>Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)</b>	<b>865</b>				
				<b>Persentase RTLH Persentase Rumah Layak Huni</b>	<b>25,20% 74,80%</b>			<b>Persentase RTLH Persentase Rumah Layak Huni</b>	<b>0,252 0,748</b>				
Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Tanah sereal)						Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	34 paket			12.500.000.000	-	Dinas PUPR	
						Terbangunnya Jembatan penvebrangan	2 paket						
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	20 paket						
						Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	20 paket						
Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah I (Kec. Bogor Utara)						Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	25 paket			12.500.000.000	-	Dinas PUPR	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terbangunnya Jembatan penyebrangan	2 paket						
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	16 paket						
						Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	43 paket						
Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Timur)						Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	25 paket			10.000.000.000	-	Dinas PUPR	
						Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	26 paket						
						Terbangunnya Jembatan penyebrangan	4 paket						
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	29 paket						
Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah II (Kec. Bogor Selatan)						Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	25 paket			12.500.000.000	-	Dinas PUPR	
Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Barat)						Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	8 km			12.500.000.000	-	Dinas PUPR	
						Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	20 km						
						Terbangunnya Jembatan Lingkungan dan penyebrangan Orang	4 unit						
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	24 unit						
Pembangunan/ Perbaikan Infrastruktur Permukiman Wilayah III (Kec. Bogor Tengah)						Terbangunnya / Terpeliharanya Jalan Lingkungan	8 km			10.000.000.000	-	Dinas PUPR	
						Terbangunnya / Terpeliharanya Saluran Air permukiman	20 km						
						Terbangunnya Jembatan Lingkungan dan penyebrangan Orang	4 unit						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah untuk daerah yang rawan longsor	24 unit						
Pemeliharaan Infrastruktur Pemukiman						Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan Perbaikan Saluran, Pekerjaan Perbaikan TPT, Pekerjaan Perbaikan Jembatan	100 %			3.000.000.000	-	Dinas PUPR	
<b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>										<b>198.845.477.891</b>	<b>113.221.845.946</b>		
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>185.068.540.490</b>	<b>106.171.845.946</b>		
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>										<b>183.893.540.490</b>	<b>106.171.845.946</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>11.600.000.000</b>	<b>11.600.000.000</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor			Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 %			11.600.000.000	11.600.000.000	Dinas Perumkim	
						Terpenuhinya ATK, Cetakan, Peralatan Rumah Tangga, Perjalanan Dinas, Mamin Rapat, Honor Non PNS, dll	100 %						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>7.265.000.000</b>	<b>3.750.000.000</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor			Pengadaan Dump Truck	1 Unit			5.465.000.000	2.500.000.000	Dinas Perumkim	
						Pengadaan Truck Arm Roll	1 Unit						
						Skylife Minimal 23 Meter	1 Unit						
						Pengadaan Mobil Ambulance	1 Unit						
						Pengadaan mobil tenki Air	1 Unit						
						Pengadaan Mobil Pick Up Modifikasi	1 Unit						
						Pengadaan Mesin potong Rumpuk	5 Unit						
						Pengadaan gergaji Mesin	5 Unit						
						Pengadaan Kursi 1 Biro	2 Unit						
						Pengadaan Kursi 1/2 Biro	10 Unit						
						Pengadaan Meja Komputer	10 Unit						
						Pengadaan Kursi Rapat	30 Unit						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pengadaan Rak Arsip Pengadaan Filling Cabinet Kendali Arsip Pengadaan Locker Pengadaan AC Pengadaan Vacuum Pengadaan Blower Pengadaan Smart TV	10 Unit 2 Unit 20 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit						
						Pengadaan Wireless Pengadaan Toren Air Pengadaan Partisi Ruangan Pengadaan Karpet Lapangan Bulutangkis  Pengadaan Jet Pump Pengadaan Sistem IT Pengelolaan Aset Pengadaan Komputer / PC Pengadaan Printer Pengadaan Hardisk Eksternal Pengadaan Sound System Pengadaan Handy Talky	10 Unit 1 Unit 1 Paket  1 Paket  1 Unit 1 Paket 15 Unit 11 Unit 10 Unit 1 Paket 10 Unit						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Boeor			Prosentase aset yang diinventarisir  Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya barang inventaris dinas  Terpeliharanya kendaraan operasional dinas Terpeliharanya taman Digitalisasi tata kelola aset	100 %  100 % 100 % 13 Unit 100 % 100 %			1.800.000.000	1.250.000.000	Dinas Perumkim	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Jl. Pengadilan No. 8A			Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun  Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	5 Dokumen  2 Dokumen			125.000.000	125.000.000	Dinas Perumkim	
<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota</b>	<b>166,99</b>			<b>Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota</b>	<b>167</b>	<b>67.744.972.000</b>	<b>2.936.845.946</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi	153,57			Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi	153,6				
				Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat	118,09			Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat	118,1				
				Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	54,76			Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	54,76				
				Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	41,92			Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	41,92				
				Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh	35,52			Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh	35,52				
				Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik	51,6			Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik	51,6				
				Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh	69,24			Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh	69,24				
				Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh	30,56			Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh	30,56				
				Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh	51,8			Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh	51,8				
				Luas pencegahan kawasan kumuh pada permukiman tidak tertata	5553,2			Luas pencegahan kawasan kumuh pada permukiman tidak tertata	5553				
Penunjang Kota Tanpa Kumuh						Sosialisasi Program KOTAKU	50 Orang			300.000.000	-		
						Lomba Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	17 Lokasi						
Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Perumahan Tidak Tertata			6 Kecamatan di Kota Bogor			Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tengah 25 Paket Pekerjaan	100 %			53.266.099.500	1.336.845.950	Dinas Perumkim	
						Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Barat 138 Paket Pekerjaan	100 %						
						Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Utara 53 Paket Pekerjaan	100 %						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Timur 74 Paket Pekerjaan□	100 %						
						Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Selatan 149 Paket Pekerjaan□	100 %						
						Terpeliharanya Jalan Di Kecamatan Bogor Tanah Sareal 107 Paket Pekerjaan□	100 %						
						Terlaksananya Konsultan Perencanaan Perbaikan Jalan 27 Paket Pekerjaan□	100 %						
						Terlaksananya Konsultan Pengawasan Perbaikan Jalan 18 Paket Pekerjaan□	100 %						
Pendukung RTLH						Sosialisasi 68 Kelurahan Perencanaan RTLH Monitoring dan Evaluasi Updating Data	68 Kelurahan			600.000.000		-	Dinas Perumkim
Pendukung RLH						Sosialisasi 68 Kelurahan Lomba Rumah Sehat Konsultasi Rumah Sehat Penyusunan Petunjuk Teknis Rumah Sehat	68 Kelurahan 68 Kelurahan 12 Bulan 1 Dokumen			400.000.000		-	Dinas Perumkim
Pembangunan Kampung Tematik						Terbangunnya 7 Lokasi Kampung Tematik meliputi sarana prasarana umum dan sarana prasarana pendukung kampung tematik	2 Lokasi			5.000.000.000		-	Dinas Perumkim
Penanganan Kumuh						Sarana Pengelolaan Sampah  Drainase	24 Unit  3290.4 m'			1.853.872.500		-	Dinas Perumkim

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Perbaikan/ pembangunan Jalan	3487.49 m2							
						Jamban Septic tank	20 Unit							
						Sumur air bersih	4 Unit							
Fasilitasi Lomba di Wilayah			Kota Bogor			Perbaikan Sarana pada Lokasi Lomba Binaan P2WKSS	100 %			1.500.000.000	1.500.000.000	Dinas Perumkim		
						Perbaikan Sarana pada lokasi Lomba Posyandu	100 %							
						Perbaikan Sarana pada Lokasi Lomba 5 Program PKK	100 %							
						Perbaikan Sarana pada Lokasi Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan	100 %							
						Perbaikan Sarana pada Lokasi Kesatuan Gerak PKK	100 %							
						Perbaikan PSU pada Lokasi Lomba Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	100 %							
						Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, PKK, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU	5 Lomba							
Perencanaan Teknis Pembangunan/ Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh						Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	6 Dokumen			1.000.000.000	-	Dinas Perumkim		
Pembelian Lahan Untuk PSU						Tersedianya tanah untuk RTH publik /taman	600 m2			1.600.000.000	99.999.996	Dinas Perumkim		
						Hasil analisa kesesuaian lahan terhadap persyaratan teknis, administrasi dan biaya	100%							
						Terpublikasinya rencana lokasi pengadaan tanah	100%							
						Tersedianya sertifikasi tanah untuk lokasi RTH	100%							
						Tersedianya peta dasar RTH	100%							
Pengelolaan Rusunawa						Honorarium Pegawai Tenaga Honorir/Tidak Tetap	7 orang			2.225.000.000	-	Dinas Perumkim		
						Tersedianya Tempat Sampah Besar	4 buah							
						Tersedianya Tempat Sampah Besar	4 buah							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pembayaran Rekening Telepon, PDAM, Listrik, Surat Kabar, Foto Kopi, Penyedotan Septic Tank, Bahan Bakar Minyak	12 bulan							
						Tenaga Kebersihan Tenaga Keamanan	7 orang 14 orang							
						Terpeliharanya Kendaraan Operasional	1paket							
						Tersedianya Buku Laporan Pengaduan	1buku							
<b>PROGRAM PENINGKATAN UTILITAS PERKOTAAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU</b>	<b>0,7447</b>			<b>Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU</b>	<b>0,745</b>	<b>88.113.602.400</b>	<b>82.710.000.000</b>			
				<b>Persentase pemeliharaan PJU</b>	<b>0,7709</b>			<b>Persentase pemeliharaan PJU</b>	<b>0,771</b>					
Pemasangan PJU Jalan Potokol dan Penghubung di Kota Bogor			Kota Bogor			Terpasangnya lampu PJU di jalan Protokol di Kota Bogor	50 Titik Lampu			1.520.000.000	1.800.000.000	Dinas Perumkim		
Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di Kota Bogor			Kota Bogor			Terpasangnya lampu PJU di jalan Lingkungan di Kota Bogor	300 Titik Lampu			36.823.602.400	20.000.000.000	Dinas Perumkim		
Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor			Kota Bogor			Terpasangnya lampu Highmast di Kota Bogor	70 Titik Lampu			650.000.000	780.000.000	Dinas Perumkim		
Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH			Kota Bogor			Terpasangnya lampu taman, jembatan dan jalur hijau RTH di Kota Bogor	3 Lokasi			500.000.000	600.000.000	Dinas Perumkim		
Pemasangan Lampu Dekorasi Kota			Kota Bogor			Terpasangnya Lampu Dekorasi Kota di Kota Bogor	3 Lokasi			-	480.000.000			
Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan Perencanaan PJU Dan Dekorasi Kota			Kota Bogor			Tersedianya dokumen perencanaan lampu PJU Dekorasi di Kota Bogor	2 Dokumen			120.000.000	200.000.000	Dinas Perumkim		
Pembayaran Rekening PJU			Kota Bogor			Terbayarnya rekening listrik PJU kepada PT. PLN	12 Bulan			41.000.000.000	50.000.000.000	Dinas Perumkim		
Pemeliharaan Lampu Taman Dan Lampu Hias			Kota Bogor			Terpeliharanya lampu taman dan lampu hias di Kota Bogor	30 Lokasi			-	600.000.000			
Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU			Kota Bogor			Tersedianya peralatan, perlengkapan dan BBM kendaraan operasional PJU	12 Bulan			800.000.000	1.000.000.000	Dinas Perumkim		
Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu Highmast			Kota Bogor			Terpeliharanya lampu PJU, lampu highmast dan panel PJU di Kota Bogor	12000 Titik Lampu			4.500.000.000	5.000.000.000	Dinas Perumkim		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Dekorasi Kota			Kota Bogor			Terbangunnya Dekorasi Kota di Kota Bogor	3 lokasi			400.000.000	400.000.000	Dinas Perumkim	
Pemeliharaan Dekorasi Kota			Kota Bogor			Terpeliharanya Dekorasi Kota di Kota Bogor	40 lokasi			1.800.000.000	1.850.000.000	Dinas Perumkim	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Luas TPU Hijau yang dikelola dengan baik (Ha)</b>	<b>46,9</b>			<b>Luas TPU Hijau yang dikelola dengan baik (Ha)</b>	<b>46,9</b>	<b>4.044.966.090</b>	<b>2.300.000.000</b>		
Penataan Infrastruktur TPU						Pembangunan dan Perbaikan Jalan, TPT, Drainase, Pemagaran, PJU, dan Kelengkapan TPU Lainnya.	8 TPU			2.420.370.590	-	Dinas Perumkim	
Peningkatan Pelayanan Pemakaman			TPU Kota Bogor			Pelayanan retribusi pemakaman dan pelayanan pemakaman	100 %			1.624.595.500	2.300.000.000	Dinas Perumkim	
<b>PROGRAM PENATAAN PRASARANA SARANA UMUM PERUMAHAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa</b>	<b>80%</b>			<b>Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa</b>	<b>0,8</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>2.750.000.000</b>		
Pengelolaan PSU Perumahan dan Perkotaan						Terpeliharana PSU Perumahan dan Perkotaan	3 Paket			1.500.000.000	-	Dinas Perumkim	
Pengembangan, Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa			Kec. Bogor Utara dan Kec. bogor Barat			Pemeliharaan Rutin dan Berkala	518 Unit			2.500.000.000	2.750.000.000	Dinas Perumkim	
<b>PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana</b>	<b>60</b>			<b>Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana</b>	<b>60</b>	<b>2.175.000.000</b>	<b>-</b>		
				<b>Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana</b>	<b>20</b>			<b>Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana</b>	<b>20</b>				
Perbaikan Rumah dan PSU di lokasi bencana						Tertangannya Rumah di Lokasi Bencana Tertangannya TPT di Lokasi Bencana Tertangannya Jalan dan Jembatan di Lokasi Bencana	15 Unit 8 Titik 1 Titik			2.175.000.000	-	Dinas Perumkim	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan</b>		<b>Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)</b>	<b>1,8</b>			<b>Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)</b>	<b>1,8</b>	<b>13.376.937.401</b>	<b>6.550.000.000</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
				Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)	43,27			Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)	43,27					
Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau						Terpeliharanya RTH	43.29 Hektar			6.095.000.000	-	Dinas Perumkim		
Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau						Meningkatnya Kualitas RTH	10 Lokasi			1.000.000.000	-	Dinas Perumkim		
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			tersebar di Kota Bogor sesuai arahan RTRW			Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun	1.8 Hektar			3.250.000.000	6.000.000.000	Dinas Perumkim		
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			tersebar di kota Bogor			Dokumen Perencanaan Teknis RTH	6 dokumen			400.000.000	550.000.000	Dinas Perumkim		
Pengadaan Sarana Prasarana Pemeliharaan Taman						Meningkatnya kualitas sarpras penunjang taman	75 %			1.881.937.401	-	Dinas Perumkim		
Pemeliharaan Pohon						Pohon peneduh yang terlepihara	120 Pohon			750.000.000	-	Dinas Perumkim		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>13.776.937.401</b>	<b>7.050.000.000</b>			
<b>KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>										<b>400.000.000</b>	<b>500.000.000</b>			
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi</b>								<b>400.000.000</b>	<b>500.000.000</b>			
Perencanaan Teknis PJU Pintar			Kota Bogor			Dokumen Perencanaan Teknis PJU Pintar	2 Dokumen			400.000.000	500.000.000	Dinas Perumkim		
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>20.430.775.000</b>	<b>27.097.000.000</b>			
<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										<b>20.330.775.000</b>	<b>26.987.000.000</b>			
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>7.200.000.000</b>	<b>13.200.000.000</b>			
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor			Honorarium Tenaga Kontrak	12 Bulan			3.700.000.000	4.000.000.000	Satpol PP		
						Honorarium Tugas Perbantuan Anggota POLRI	12 Bulan							
						Belanja ATK	12 Bulan							
						Belanja Cetak/Penggandaan	12 Bulan							
						Belanja Alat Listrik/Elektronik	12 Bulan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Belanja Telepon, Listrik, Air dan Surat Kabar	12 Bulan						
						Belanja Makan dan Minum	12 Bulan						
						Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan						
						Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan						
						Belanja Publikasi	12 Bulan						
						Belanja PDL dan Kelengkapannya	250 Orang						
Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor			Terseleksinya Anggota Banpol sesuai kriteria	70 Orang			3.500.000.000	5.500.000.000	Satpol PP	
Penyediaan Anggota Bantuan Pemadam Kebakaran			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor			Terseleksinya Anggota Bantuan Pemadam Kebakaran sesuai kriteria	25 Orang			-	3.700.000.000		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>10.134.775.000</b>	<b>10.500.000.000</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor			Gembok	20 Buah			4.684.775.000	5.500.000.000	Satpol PP	
						Rantai	20 Meter						
						Palu Godam	20 Buah						
						Gunting Rantai	10 Buah						
						Linggis	10 Buah						
						Masker	30 Buah						
						Sarung Tangan	30 Buah						
						Police Line	10 Roll						
						Filling cabinet	15 Buah						
						Rak Arsip	10 Buah						
						Lemari Besi	10 Buah						
						Loker	10 Buah						
						Kursi Lipat	29 Buah						
						Kursi Kerja	50 Buah						
						Alat Pendingin (AC)	10 Buah						
						Komputer/PC	29 Unit						
						Laptop	20 Unit						
						Printer Multifungsi	30 Unit						
						Kamera	4 Buah						
						Handy Talkie (HT)	20 Buah						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Fire Jeep Helm Safety Dmakar	1 Unit 30 Buah						
						Sepatu Safety Damkar Peralatan Self Kampak Damkar Sarung Tangan Safety Damkar Cutting Metal Nozzle 2.5" Nozzle 1.5" Kopling 2.5" Kopling 1.5" Selang 2.5"  Selang 1.5"	30 Pasang 30 Buah 30 Buah 2 Buah 3 Buah 3 Buah 6 Buah 6 Buah 200 Meter 200 Meter						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor			Minibus  Truck Sepeda motor Suku Cadang Bahan Bakar Minyak Solar Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 4 Bahan Bakar Minyak Pertamina Roda 2 Lumsum Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Alat Pendingin Ruangan (AC) Komputer PC/Laptop Bangunan Air wheel Sepeda Sewa Lahan Perbaikan Mobil Hibah KPK Sewa Gedung	21 Unit  21 Unit 25 Unit 67 Unit 29 Unit  11 Unit 25 Unit  9 Unit 67 Unit 23 Unit 30 Unit 1 Unit 3 Unit 12 Unit 1 Tahun 3 Unit 1 Tahun			4.700.000.000	5.000.000.000	Satpol PP	
Pembangunan Pos Damkar			Kota Bogor			Pembangunan Pos Damkar	1 Pos			-	-		
Pembangunan Gedung Sat.Pol.PP			Kota Bogor			Gedung Kantor Sat Pol PP	1 Gedung			-	-		
Pembangunan Control Room			Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor			Terbangunnya control room	1 Ruangan			750.000.000	-	Satpol PP	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor			Penyusunan RENJA Tahun Anggaran 2021  Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen  1 Dokumen			75.000.000	75.000.000	Satpol PP	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen							
						Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2020	1 Dokumen							
						Penyusunan Laporan Bulanan	12 Laporan							
<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas generasi muda</b>		<b>Jumlah penurunan temuan Kasus pelanggaran KTR</b>	<b>126</b>			<b>Jumlah penurunan temuan Kasus pelanggaran KTR</b>	<b>126</b>	<b>1.811.000.000</b>	<b>2.012.000.000</b>			
				<b>penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal</b>	<b>148</b>			<b>penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal</b>	<b>148</b>					
				<b>Persentase pelanggar perda yang ditertibkan</b>	<b>90</b>			<b>Persentase pelanggar perda yang ditertibkan</b>	<b>90</b>					
				<b>Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan</b>	<b>90</b>			<b>Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan</b>	<b>90</b>					
				<b>Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang</b>	<b>2</b>			<b>Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang</b>	<b>2</b>					
Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring			Kota Bogor			Sidang Tipiring Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	3 Kegiatan			75.000.000	80.000.000	Satpol PP		
						Sidang Tipiring Pedagang Kaki Lima (PKL)	4 Kegiatan							
						Penertiban Perizinan	90 Kegiatan							
						Penyegelan Bangunan	15 Kegiatan							
Pembongkaran Bangunan			Kota Bogor			Pembongkaran Bangunan/Tempat Usaha/Menara Tower	4 Bangunan			95.000.000	97.000.000	Satpol PP		
Kemitraan dan Pemberdayaan PPNS			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor			Koordinasi rutin dengan Korwas PPNS	4 Kali			11.000.000	15.000.000	Satpol PP		
Penyidikan Trantibum			Kota Bogor			Penyelidikan Pelanggar Perda, Razia Mercon/Petasan, Majalah & VCD/DVD Porno, Razia WTS	75 Kegiatan			70.000.000	75.000.000	Satpol PP		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BURAS (Buru Miras)			Kota Bogor			Monitoring titik rawan miras/minol, Razia miras/minol, Pemusnahan barang bukti miras/minol	36 Kegiatan			70.000.000	70.000.000	Satpol PP	
Kawasan Tertib Kota			Kota Bogor			Kawasan Pedestrian Tertib Pejalan Kaki Aman dan Nyaman serta tertib kawasan/titik lainnya melalui penertiban dan patroli	1 Kawasan			800.000.000	900.000.000	Satpol PP	
Pembinaan Masyarakat Sadar Trantibum			Kota Bogor			Pembinaan Masyarakat dan PKL Monitoring Anjal dan Gepeng Razia Anjal dan Gepeng	6 Kegiatan 12 Kegiatan 10 Kegiatan			50.000.000	55.000.000	Satpol PP	
Pengamanan Tempat Tempat Penting, Deteksi Dini dan Operasi Intelejen			Kota Bogor			Pengamanan Tempat Tempat Penting, Deteksi Dini dan Operasi Intelejen	24 Kegiatan			200.000.000	215.000.000	Satpol PP	
Pengamanan dan Pengawasan VVIP/VIP			Kota Bogor			Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Tamu dan Pejabat Negara di Kota Bogor	12 Kegiatan			100.000.000	110.000.000	Satpol PP	
Linmas Siaga Trantibum			Kota Bogor			Pembinaan Linmas Tingkat Kecamatan Monitoring Operasi Anjal Gepeng Wilayah Kota Bogor Upacara HUT Sat Pol PP dan HUT Linmas	180 Anggota Linmas 72 Anggota Linmas 30 Anggota Linmas			50.000.000	60.000.000	Satpol PP	
Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya serta Pelaksanaan HUT Satpol PP dan HUT Linmas			Kota Bogor			Terlaksananya Pengamanan Tahun Baru Imlek Terlaksananya HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS Terlaksananya Pengamanan HJB Terlaksananya Pengamanan Idul Fitri  Terlaksananya Pengamanan HUT RI Terlaksananya Pengamanan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Pengamanan Hari Pahlawan	1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali  1 Kali 1 Kali 1 Kali			50.000.000	55.000.000	Satpol PP	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Pengamanan Malam Natal	1 Kali						
SATPOL PP Ramah Anak			Kota Bogor			Sekolah tertib Trantibum Sat Pol PP Goes To School Patroli Cinta Pelajar Bermain dan Mengenal Peran Sat Pol PP	3 Kali 12 Kali 48 Kali 12 Kali			40.000.000	50.000.000	Satpol PP	
Kampung Tertib Trantibum			Kota Bogor			Pembentukan kampung tertib trantibum  Sosialisasi ketertiban umum Monitoring kampung tertib Pembinaan aparat wilayah	3 RW  3 RW 3 RW 3 RW			100.000.000	120.000.000	Satpol PP	
Sistem Pembinaan Anggota (SIPETA)			Kota Bogor			Pembinaan Fisik dan Rohani Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	300 Orang			100.000.000	110.000.000	Satpol PP	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)</b>		<b>Respon time penanganan kebakaran</b>	<b>15</b>			<b>Respon time penanganan kebakaran</b>	<b>15</b>	<b>1.210.000.000</b>	<b>1.310.000.000</b>		
				<b>% sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik</b>	<b>50</b>			<b>% sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik</b>	<b>50</b>				
Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran			Kota Bogor			Latihan Gabungan dan Skill Kompetisi	4 Kali			200.000.000	200.000.000	Satpol PP	
Pemasangan Hidrant			Kota Bogor			Terpasangnya hidrant kota fasilitas pemadam kebakaran	5 Lokasi			175.000.000	200.000.000	Satpol PP	
Penyelamatan			Kota Bogor			Penyelamatan pada kejadian non kebakaran	20 Kali			50.000.000	50.000.000	Satpol PP	
Kesiapan Petugas Penyelamatan			Kota Bogor			Latihan dan Pembinaan Fisik Petugas Penyelamatan	10 Orang			50.000.000	50.000.000	Satpol PP	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar			Kota Bogor			Pengamanan Tamu Negara dan Hari Besar	15 Kegiatan			15.000.000	15.000.000	Satpol PP	
Pelaksanaan HUT Damkar			Kota Bogor			Pelaksanaan HUT Damkar Tingkat Kota, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional	3 Kali			100.000.000	120.000.000	Satpol PP	
BOGOR TENAR (Bogor Tanggap Kebakaran)			Kota Bogor			Kelurahan Tanggap Kebakaran Sekolah Tanggap Kebakaran Gedung Tanggap Kebakaran	2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi			300.000.000	300.000.000	Satpol PP	
Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan			Kota Bogor			Penempatan alat pemadam kebakaran portable kepada masyarakat Pelatihan Pemadam Kebakaran kepada masyarakat	2 Lokasi 2 Lokasi			300.000.000	350.000.000	Satpol PP	
Inspeksi Proteksi Kebakaran			Kota Bogor			Pemeriksaan sarana proteksi kebakaran gedung	300 Bangunan			20.000.000	25.000.000	Satpol PP	
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										100.000.000	110.000.000		
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>										<b>4.671.523.788</b>	<b>4.820.000.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>4.671.523.788</b>	<b>4.820.000.000</b>		
<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										<b>4.671.523.788</b>	<b>4.820.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.344.123.788</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			BPBD Kota Bogor			Tersedianya Bahan Bakar Minyak, Honorarium PNS&Non PNS, ATK, Alat Kebersihan, spanduk, biaya telepon, biaya air, Biaya Listrik, Biaya Cetak&Penggandaan, Makan&minum Rapat&Tamun, Surat Menyurat, Alat listrik, Perjalanan Dinas	12 bulan			1.344.123.788	-	BPBD	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.100.000.000</b>	<b>2.300.000.000</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor			Kota Bogor			Tersedianya chain saw  Tersedianya mesin potong rumput Tersedianya alat khusus water rescue	3 unit  2 unit 1 paket			600.000.000	1.500.000.000	BPBD	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersedianya Alat pendukung latihan kebugaran personil penanggulangan bencana Tersedianya genset Tersedianya peralatan latihan kebugaran personil penanggulangan bencana Tersedianya flood pump  Tersedianya alat peraga/ Diorama edukasi bencana	1 paket  1 unit 1 paket  1 unit  1 paket						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kota Bogor			Terpeliharanya kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua  Tersedianya bahan bakar minyak kendaraan roda empat, roda tiga, dan roda dua  Terpeliharanya AC Terpeliharanya komputer Terpeliharanya printer  Terpeliharanya chain saw Terpeliharanya mesin fotokopi Terpeliharanya genset  Terpeliharanya gedung dan bangunan	27 unit  27 unit  11 unit 11 unit 13 unit  18 unit 1 unit 3 unit  1 paket			500.000.000	800.000.000	BPBD	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>7.400.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Tersusunnya dokumen perencanaan (Renja dan Renstra SKPD), laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas (LKIP,LKPJ,LPPD)	5 dokumen			7.400.000	-	BPBD	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)</b>		<b>Rata-Rata Respon time penanganan bencana</b>	<b>&lt; 24 Jam</b>			<b>Rata-Rata Respon time penanganan bencana</b>	<b>&lt; 24 Jam</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>2.400.000.000</b>		
Pengadaan Logistik bagi Korban Bencana			Kota Bogor			Tersedianya kebutuhan dasar sandang pangan bagi korban bencana	100 Paket			179.550.000	800.000.000	BPBD	
Hunian Sementara bagi Korban Bencana			Kota Bogor			Evakuasi bagi korban bencana	350 KK			62.325.000	800.000.000	BPBD	
Pelayanan Penanggulangan Bencana			Kota Bogor			Kesiapsiagaan petugas dalam mengantisipasi kejadian bencana  Penanganan dan pelayanan serta penyelatan sumber daya dalam penyelamatan korban bencana	12 Bulan  100 persen			758.125.000	800.000.000	BPBD	
<b>PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana</b>	<b>60</b>			<b>Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana</b>	<b>60</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>		
Penyusunan Dokumen Kaji Kebutuhan Pasca Bencana			Kota Bogor			Tersusunnya dokumen kajian kebutuhan pasca bencana	1 Dokumen			60.000.000	60.000.000	BPBD	
Pendataan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana			Kota Bogor			Terlaksananya pendataan dan inventarisasi dampak pasca bencana	1 Dokumen			60.000.000	60.000.000	BPBD	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)</b>		<b>Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana</b>	<b>2</b>			<b>Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana</b>	<b>2</b>	<b>900.000.000</b>	-		
				<b>Jumlah Sekolah Aman bencana</b>	<b>2</b>			<b>Jumlah Sekolah Aman bencana</b>	<b>2</b>				
Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana						Bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparat atau masyarakat di Kelurahan dalam menghadapi bencana	3 Kelurahan			100.000.000	-	BPBD	
Penerapan Sekolah Aman Bencana (SMAB) dan Simulasi Penanggulangan Bencana di Sekolah			2 Sekolah yang Rawan Becana			Meningkatnya wawasan siswa, tenaga pendidik, komite sekolah terhadap sekolah yang aman bencana	2 Sekolah			100.000.000	-	BPBD	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Tersedianya Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 Persen			200.000.000	-	BPBD	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi			Kota Bogor			tersusunnya dokumen PRB dan Renkon	2 Dokumen			200.000.000	-	BPBD	
Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Alam			Masyarakat Kota Bogor			meningkatnya Kapasitas masyarakat anggota komunitas / kelompok dalam penanggulangan bencana	100 Persen			100.000.000	-	BPBD	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bagi Aparatur						terlatihnya aparat pemkot kota bogor sub-urusan kebencanaan	80 Orang			100.000.000	-	BPBD	
Simulasi Kebencanaan						Gladi Kesiapsiagaan bencana	3 komunitas			100.000.000	-	BPBD	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI KEBENCANAAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)</b>		<b>Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat</b>	<b>100</b>			<b>Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>	-		
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana								Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100 Persen	100.000.000	-	BPBD	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana								tersedianya data /informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/ilegal	100 persen	100.000.000	-	BPBD	
<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										<b>3.271.017.750</b>	<b>3.150.000.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>3.271.017.750</b>	<b>3.150.000.000</b>		
<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										<b>3.271.017.750</b>	<b>3.150.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.560.867.250</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD								Tersedianya Gaji TKK	12 Bulan	1.560.867.250	-	Kesbangpol	
								Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Bulan				
								Tingkat Pemenuhan Dasar Operasional Unit Keria SKPD	100 %				
								Tersedianya Alat Listrik	12 Bulan				
								Tersedianya Alat Kebersihan	12 Bulan				
								Tersediannya Pengisian Tabung Gas	12 Bulan				
								Tersedianya Surat Menyurat	12 Bulan				
								Tersediannya Surat Kabar/Majalah	12 Bulan				

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Tersedianya Kops Surat, Amplop Surat, Buku Disposisi, Kartu Kendali Masuk/Keluar.	12 Bulan							
						Tersedianya Seragam Dinas	20 Stel							
						Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	12 Bulan							
						Tersedianya ATK Kegiatan	12 Bulan							
						Tersedianya Perjalanan Dinas	12 Bulan							
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>225.000.000</b>	-			
Pengadaan Inventaris Kantor						Tersedianya Peralatan Kantor	100 %			150.000.000	-	Kesbangpol		
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda Empat	3 Unit			75.000.000	-	Kesbangpol		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Kantor	10 Unit							
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Tik	4 Unit							
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	10 Unit							
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Roda Dua	9 Unit							
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>20.000.000</b>	<b>50.000.000</b>			
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Wilayah Kota Bogor			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			20.000.000	50.000.000	Kesbangpol		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas generasi muda</b>		<b>Jumlah Konflik SARA</b>	<b>0</b>			<b>Jumlah Konflik SARA</b>	<b>0</b>	<b>1.427.163.000</b>	<b>2.400.000.000</b>			
				<b>Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan</b>	<b>1 : 100</b>			<b>Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan</b>	<b>1 : 100</b>					
Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi masyarakat			Wilayah Kota Bogor			Terlaksananya Rakor Wasbang Dan Ideologi Negara Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Dan Aparatur Wilayah	4 Kegiatan			16.972.600	400.000.000	Kesbangpol		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Rakor Wasbang Dan Idiologi Negara Bagi Pemuda Dan Pelajar	3 Kegiatan						
						Terlaksananya Pelatihan 4 Konsesus Dasar (Pancasila,UUD 1945, NKRI Dan Bhineka Tunggal Ika) Berbangsa Dan Bernegara	1 Kegiatan						
						Tersedianya Dokumen Konsensus Dasar Kebangsaan	1 Dokumen						
Pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan (Ormas)			Kota Bogor			Sosialisasi tertib berorganisasi Pengurus dan Anggota	3 Kegiatan			828.200.000	450.000.000	Kesbangpol	
						Terlaksananya Bimtek Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan	3 Kegiatan						
						Terselenggaranya pembinaan pada pengurus ORMAS	4 Kegiatan						
						Monitoring dan Evaluasi	1 Ke						
Peningkatan pemahaman Bela Negara bagi masyarakat			Wilayah Kota Bogor			Terselenggaranya Pendidikan Dan Pelatihan Bela Negara Bagi Masyarakat	4 Kegiatan			25.988.600	300.000.000	Kesbangpol	
						Penetapan Keputusan Tingkat Kota Forum Bela Negara	1 Dokumen						
						Terbentuknya Forum Bela Negara	1 Forum						
Penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)			Wilayah Kota Bogor			Terselenggaranya Frekuensi Dialog Lintas Agama Tentang Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12 Kegiatan			17.170.600	300.000.000	Kesbangpol	
						Terselenggaranya Sosialisasi Tentang Kerukunan Kebangsaan Etnis, Suku, Ras (FPK)	2 Kegiatan						
Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)			6 Kecamatan Se-Kota Bogor			Terselenggaranya Sosialisasi Tentang Kewaspadaan Dini Bagi Masyarakat	2 Kegiatan			20.051.600	175.000.000	Kesbangpol	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Kewaspadaan Dini Bagi Masyarakat Dan Aparatur	2 Kegiatan							
Penguatan Kelembagaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah (PKSD)			Wilayah Kota Bogor Dan Luar Daerah Kota Bogor			Rapat Koordinasi Tim Terpadu PKSD	1 Kegiatan			510.979.200	600.000.000	Kesbangpol		
						Rapat Kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Perumusan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Monitoring Dan Evaluasi KAMTIBNAS	4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan							
						Telaksananya kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKMFINDA) Kota Bogor	0 Kegiatan							
Penguatan Kelembagaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)			Wilayah Kota Bogor			Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Rapat Kerja Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Perumusan Rencana Aksi Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah Monitoring Dan Evaluasi KAMTIBMAS	1 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan			7.800.400	175.000.000	Kesbangpol		
<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</b>		<b>Persentase Partisipasi Pemilu</b>	<b>0</b>			<b>Persentase Partisipasi Pemilu</b>	<b>0</b>	<b>37.987.500</b>	<b>700.000.000</b>			
				<b>Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu</b>	<b>0</b>			<b>Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu</b>	<b>0</b>					
Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik			Kota Bogor			Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi Tentang bantuan keuangan Bagi Partai Politik	1 Kegiatan			16.787.500	300.000.000	Kesbangpol		
Pendidikan politik bagi elemen masyarakat			Kota Bogor			Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi Pemilu Bagi Masyarakat Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Disabilitas	1 Kegiatan 0 Kegiatan			21.200.000	400.000.000	Kesbangpol		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Pemilih Pemula	1 Kegiatan							
						Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Perempuan	1 Kegiatan							
						Terselenggaranya Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Bagi Lansia	0 Kegiatan							
						Terselenggaranya Sosialisasi Pembangunan Etika, Moral Dan Budaya Politik bagi Masyarakat Dan Partai Politik	0 Kegiatan							
						Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara								
<b>DINAS SOSIAL</b>										<b>10.504.763.560</b>	<b>12.096.350.000</b>			
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>10.168.463.560</b>	<b>11.376.350.000</b>			
<b>SOSIAL</b>										<b>10.168.463.560</b>	<b>11.376.350.000</b>			
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>4.417.430.260</b>	<b>2.250.000.000</b>			
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Kota Bogor			Terfasilitasinya dan tersedianya sarana dan prasarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %			4.417.430.260	2.250.000.000	Dinsos		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>2.210.400.000</b>	<b>950.000.000</b>			
Pengadaan Inventaris Kantor			Dinas Sosial Kota Bogor			Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Dinas Sosial	100 %			1.740.400.000	450.000.000	Dinsos		
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kota Bogor			Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja yang optimal sebagai pendukung kegiatan Dinas Sosial	100 %			470.000.000	500.000.000	Dinsos		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>16.700.000</b>	<b>70.000.000</b>			
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kota Bogor			Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	8 dokumen			11.700.000	50.000.000	Dinsos		
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)			Kota Bogor			Jumlah Verifikasi Usulan Hibah/Bansos	5 Proposal			5.000.000	20.000.000	Dinsos		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</b>		<b>Jumlah lansia yang berdaya</b>	<b>100</b>			<b>Jumlah lansia yang berdaya</b>	<b>100</b>	<b>2.110.493.800</b>	<b>5.558.000.000</b>		
				<b>persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>	<b>5,8</b>			<b>persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial</b>	<b>5,8</b>				
Penyelenggaraan Perlindungan Sosial			Kota Bogor			Terfasilitasinya Orang Terlantar Dalam Perjalanan Untuk Kembali Ke Daerah Asal	360 orang			55.825.000	300.000.000	Dinsos	
						Bertambahnya pengetahuan dan kemampuan warga masyarakat	1 Kelurahan						
Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)			Kota Bogor			Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin yang harus ditangani	17039 RTSM			38.937.800	400.000.000	Dinsos	
						Peningkatan kapasitas Pendamping Sosial	84 Orang						
Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar			Kota Bogor			Jumlah Lanjut Usia terlantar yang ditangani	100 Orang			188.400.000	100.000.000	Dinsos	
Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Pembinaan KUBE			Kota Bogor			Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	50 orang			226.109.000	300.000.000	Dinsos	
						Terbentuknya KUBE - KUBE baru di Kota Bogor	5 Kelompok						
Verifikasi dan Validasi BDT (Basis Data Terpadu)			Kota Bogor			Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi BDT secara akurat	2 Kegiatan			888.400.000	3.000.000.000	Dinsos	
						Tersedianya komputer dan printer khusus bagi Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka Verifikasi dan Validasi BDT	77 Unit						
Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana			Kota Bogor			Bertambahnya Anggota TAGANA Kota Bogor	5 orang			402.152.000	750.000.000	Dinsos	
						Terselenggaranya Sosialisasi Kebencanaan ke Sekolah	10 Sekolah						
						Tertanganinya Korban Bencana Dalam Kebutuhan Pemenuhan Dasar	2000 Jiwa						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai			Kota Bogor			Tersalurkannya Bantuan Pangan Non Tunai untuk 31.305 KPM	31305 Keluarga Penerima Manfaat			183.015.000	408.000.000	Dinsos	
<b>PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</b>		<b>Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%)</b>	<b>100</b>			<b>Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%)</b>	<b>100</b>	<b>10.310.000</b>	<b>150.000.000</b>		
				<b>Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi</b>	<b>12,04</b>			<b>Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi</b>	<b>12,04</b>				
Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial			Kota Bogor			Terlaksananya pembinaan bagi Yayasan Sosial / Orsos / Panti Sosial	10 Yayasan / Orsos / Panti Sosial			10.310.000	150.000.000	Dinsos	
<b>PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas generasi muda</b>		Persentase Anak terlantar yang ditangani	19,48			Persentase Anak terlantar yang ditangani	19,48	<b>74.950.000</b>	<b>75.000.000</b>		
Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar			Kota Bogor			Jumlah Anak Terlantar yang di bina dan terlayani	75 Orang			74.950.000	75.000.000	Dinsos	
<b>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN TRAUMA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</b>		<b>Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina</b>	<b>29,58</b>			<b>Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina</b>	<b>29,58</b>	<b>168.140.000</b>	<b>150.000.000</b>		
				<b>Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos</b>	<b>100</b>				
Bimbingan Sosial, Fisik, Mental dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Disabilitas						Terlaksananya Bimbingan bagi para Disabilitas	75 Orang			113.010.000	-	Dinsos	
Pelayanan bagi Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking			Kota Bogor			Pelayanan bagi korban tindak kekerasan dan trafficking	2 Kasus			32.290.000	-	Dinsos	
Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking			Kota Bogor			Prosentase jumlah kasus yang diintervensi	100 %			22.840.000	150.000.000	Dinsos	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Menurunnya tingkat kemiskinan</b>		<b>Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif</b>	<b>100</b>			<b>Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif</b>	<b>100</b>	<b>1.022.554.500</b>	<b>1.868.350.000</b>		
				<b>Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)</b>	<b>27,846</b>			<b>Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)</b>	<b>27,85</b>				
Pemeliharaan TMP Dreded			Kota Bogor			Fasilitasi Pemeliharaan TMP Revitalisasi TMP Dreded	1061 Makam 1 TMP			739.297.000	1.030.000.000	Dinsos	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat			Kota Bogor			Meningkatnya Jumlah PSKS yang Terbina	100 PSKS			164.020.000	350.000	Dinsos	
						Meningkatnya Jumlah PSKS yang dibantu	10 PSKS						
						Terbentuknya UEP untuk PSKS	2 UEP						
Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial			Kota Bogor			Terlaksananya pembinaan untuk PSKS lain	10 Dunia Usaha			55.359.500	188.000.000	Dinsos	
						Kemitraan Dunia Usaha dan Penyuluh Kesejahteraan Sosial	5 Penyuluh Sosial						
Penumbuhan Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Bogor			Kota Bogor			Jumlah Puskesmas yang terbentuk	6 Puskesmas			27.060.000	300.000.000	Dinsos	
						Jumlah Anggota Puskesmas yang dibina	90 Orang						
Peningkatan Kapasitas LK3			Kota Bogor			Jumlah kasus LK3 yang ditangani	20 kasus			3.880.000	175.000.000	Dinsos	
Penanaman Nilai Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Restorasi Sosial			Kota Bogor			Meningkatkan penanaman Nilai Kepahlawan, Keperintisan dan Restorasi Sosial	50 %			16.480.000	100.000.000	Dinsos	
Pembekalan Calon Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat			Kota Bogor			Jumlah Penyuluh Sosial Masyarakat	5 Penyuluh Sosial Masyarakat			16.458.000	75.000.000	Dinsos	
<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas generasi muda</b>		<b>Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi</b>	<b>21,41</b>			<b>Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi</b>	<b>21,41</b>				
				<b>Prosentase penurunan eks penyakit sosial ( Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>20</b>			<b>Prosentase penurunan eks penyakit sosial ( Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>20</b>				
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			Kota Bogor			Prosentase Jumlah Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan WTS yang Ditangani	10 %			152.655.000	300.000.000	Dinsos	
Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah			Kota Bogor			Terlayannya PMKS dan Orang Terlantar di rumah singgah	100 Orang			95.980.000	275.000.000	Dinsos	
Pembinaan bagi Wanita Tuna Susila, Kelompok Minoritas dan Eks Narapidana			Kota Bogor			Jumlah Eks Psikotik yang dibina	50 Orang			46.505.000	50.000.000	Dinsos	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>6.100.000</b>	<b>200.000.000</b>		
Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang Undang KIP			Kota Bogor			Prosentase Pelayanan Publik yang Berbasis Sistem Informasi	100 %			6.100.000	200.000.000	Dinsos	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>325.200.000</b>	<b>500.000.000</b>		
Pengembangan Aplikasi PMKS dan PSKS			Kota Bogor			Prosentase data PMKS dan PSKS yang akurat	100 %			325.200.000	500.000.000	Dinsos	
						Jumlah Monitoring Penyaluran Hibah/Bansos	4 Proposal						
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>										<b>7.882.077.740</b>	<b>-</b>		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>7.783.194.240</b>	<b>-</b>		
<b>KETENAGAKERJAAN</b>										<b>7.783.194.240</b>	<b>-</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>2.886.310.550</b>	<b>-</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						tersedianya / terpenuhinya kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100 %			2.886.310.550	-	Disnaker	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.817.195.090</b>	<b>-</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor						Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %			1.480.481.418	-	Disnaker	
						Mobil Trainin Unit Lemari Arsip Berkas Locker Cupboard Mesin Penghancur Kertas - Merk. EBAType. 2339 S	Unit Buah Buah Buah Buah						
						Meja Sidang - Bahan Kayu sungkai dilapis Teacwood sungkai Profil jati lisjati, Finishing Melamic Kursi Putar Sandaran Sedang - Merk. Indachi Type. D-2900 (HDT)	Buah 25 Buah						
						Pendingin Ruangan (1,5 PK ) CCTV	2 Buah Buah						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris kantor yang Optimal Sebagai Pendukung Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100 %			336.713.672	-	Disnaker	
						Terlaksananya Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas	100 %						
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	100 %						
						Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	100 %						
						Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan	100 %						
						Terlaksananya Pengawasan Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	100 %						
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>28.225.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD, ILPPD, EPPD, RENJA, RENSTRA, LKIP dan Laporan Tahun 2019 Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2020 LAKIP	24 Dokumen			18.000.000	-	Disnaker	
						LKPJ	8 Buku						
						LPPD,ILPPD,EPPD	4 Buku						
						Laporan Tahunan	4 Buku						
Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos						Tersedianya Rekomendasi Penerima Hibah/Bansos	100 %			10.225.000	-	Disnaker	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Menurunnya tingkat pengangguran</b>		<b>Nilai produktivitas tenaga kerja (%)</b>	<b>65,775</b>			<b>Nilai produktivitas tenaga kerja (%)</b>	<b>65,78</b>	<b>1.474.896.200</b>	-		
Pelatihan Produktivitas			Kota Bogor			terlaksananya Pelatihan Produktivitas	100 Perusahaan/UKM			72.870.500	-	Disnaker	
						Pelatihan Bimbingan Konsultasi	5 Perusahaan/UKM						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Meningkatnya daya saing perusahaan serta kesejahteraan pekerja	100 orang/pe rusahaa n/tahun							
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Menurunnya tingkat pengangguran</b>		<b>Persentase penurunan angka kecelakaan kerja</b>	<b>10</b>			<b>Persentase penurunan angka kecelakaan kerja</b>	<b>10</b>	<b>131.176.000</b>	<b>-</b>			
				<b>Persentase Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b>233578</b>			<b>Persentase Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b>2E+05</b>					
				<b>Penetapan besaran UMK</b>	<b>4E+06</b>			<b>Penetapan besaran UMK</b>	<b>4E+06</b>					
				<b>Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi</b>	<b>100</b>					
Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial dan Organisasi			Kota Bogor			Sosialisasi UMK	100 orang			88.040.000	-	Disnaker		
						Terlaksananya Pertemuan LKS Tripartit	100 orang							
						Terlaksananya Peringatan Hari Buruh Internasional Tingkat Kota Bogor	75 Orang							
						Penetapan UMK Bogor 2020	19 orang							
						Survey Kebutuhan Hidup Layak	19 orang							
Pembinaan, Penyuluhan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						Meningkatnya pemahaman yang sama antara pekerja dan pengusaha mengenai syarat kerja	100 orang			43.136.000	-	Disnaker		
						Terjalinnnya Hubungan yang baik antara pemerintah,pengusaha dan pekerja melalui penilaian pekerja teladan sebagai upaya meminimalisir Mogok Kerja	20 Perusah aan							
						Terpenuhinya syarat administratif (PP dan PKB) sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari <del>perundang-undangan</del>	20 kasus							
Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS)			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor			Sosialisasi Tata Cara Izin Pendirian LPK	50 orang			41.130.650	-	Disnaker		
						Bimtek Peningkatan Mutu LPK	15 orang							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Meningkatnya Mutu Lembaga Latihan Swasta (LLS) Guna menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan menekan angka pengangguran	28 LPK							
<b>PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Menurunnya tingkat Pengangguran</b>		<b>Tingkat Kesempatan kerja (%)</b>	<b>91,53</b>			<b>Tingkat Kesempatan kerja (%)</b>	<b>91,53</b>	<b>1.445.391.400</b>	-			
				<b>Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja</b>	<b>2500</b>			<b>Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja</b>	<b>2500</b>					
				<b>Jumlah KK miskin yang dilatih dan terserap pasar kerja</b>				<b>Jumlah KK miskin yang dilatih dan terserap pasar kerja</b>						
Informasi pasar kerja						Tersedianya Informasi Data Ketenagakerjaan dan Terlaksananya Data Pembaruan Data	700 Data			1.400.100.000	-	Disnaker		
						Terserapnya Tenaga Kerja di Perusahaan	50 Perusahan							
						Terserapnya Tenaga Kerja Sementara bagi KK Miskin, Setengah Menganggur dan PHK	90 Orang/Kelurahan							
						Terlaksananya Penyuluhan dan Terwujudnya BKK yang terampil memahami Ketenagakerjaan	500 Orang/BKK							
						Perangkat Daerah/BUMD mempekerjakan Disabilitas	10 Instansi/Orang							
						Tersedianya Petugas Operator Aplikasi Pelayanan Bursa Kerja Online	6 Customer Service							
Perluasan Kerja			2 Kelurahan			Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirausaha	0 Orang			45.291.400	-	Disnaker		
						Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirausaha	Orang							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirausaha	Orang							
						Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirausaha	Orang							
						Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirausaha	Orang							
						Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang berjiwa kewirausahaan	20 Orang							
						Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirausaha	Orang							
						Tersedianya Tenaga Kerja Mandiri yang Berjiwa Kewirausahaan dan terlaksananya Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri disektor Wirausaha	Orang							
Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Penganggur (Enterpreunership)						Terselenggaranya pelatihan 2 kejuruan di UPTD BLK	96 Orang			359.805.000	-	Disnaker		
						Kejuruan Perhotelan ( 4 Angkatan)	64 Orang							
						Kejuruan Tata boga (2 Angkatan)	32 Orang							
Uji Kompetensi						Terselenggaranya Uji Kompetensi 2 Kejuruan di UPTD BLK	96 orang			121.200.000	-	Disnaker		
						Kejuruan Tata Boga (2 Angkatan)	32 orang							
						Kejuruan Perhotelan (4 angkatan)	64 orang							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat			19 Kelurahan Di Kota Bogor			Pelatihan Menjahit di Kelurahan Paledang	10 orang			557.066.450	-	Disnaker	
						Pelatihan Menjahit di Kelurahan Kebon Kelapa	10 orang						
						Pelatihan Menjahit di Kelurahan Panaragan	10 orang						
						Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Cibereum	10 orang						
						Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Mulyaharja	10 orang						
						Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Kayu Manis	10 orang						
						Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Ciparigi	10 orang						
						Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Katulampa	10 orang						
						Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Cipaku	10 orang						
						Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Bubulak	10 orang						
Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Semplak	10 orang												
Pelatihan Pangkas Rambut Kelurahan Mekarwangi	10 orang												
Pelatihan Tata Rias Wajah Kelurahan Mulvaharia	10 orang												
Pelatihan Tata Rias wajah Kelurahan Pasir Kuda	10 orang												
Pelatihan Tata rias Wajah Kelurahan Situ gede	10 orang												
Pelatihan tata rias Wajah Kelurahan Cilendek	10 orang												
Pelatihan Souvenir Kelurahan Sukadamai	10 orang												
Pelatihan Souvenir Kelurahan Bondongan	10 orang												
Pelatihan Souvenir Lokasi P2wkss	10 orang												
Terciptanya masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan mandiri	190 orang												

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelatihan Melalui Pemagangan			10 perusahaan dan Lembaga Pelatihan Kerja			Sosialisasi Peraturan Pemagangan	40 perusahaan retail/perhotelan			322.823.600	-	Disnaker	
						Peserta Pelatihan pemagangan	100 orang						
						Terbentuknya Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Kota Bogor	10 orang						
						Peningkatan Kualitas SDM Pemagangan Luar Negeri (Jepang)	20 orang						
						Meningkatkan keterampilan kerja sehingga alumni pemagangan akan lebih muda terserap Pasar kerja	100 orang/tahun						
<b>URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI</b>										<b>98.883.500</b>	-		
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI</b>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Menurunnya tingkat pengangguran		Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi	2			Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi	2	<b>98.883.500</b>	-		
Penempatan Transmigrasi						Terselenggaranya Penjajakan kelokasi transmigrasi Kabupaten Muna, SP. Raimuna, Provinsi Sulawesi Tenggara	KK			98.883.500	-	Disnaker	
						Terselenggaranya Penjajakan kelokasi transmigrasi Kabupaten Muna, SP. Raimuna, Provinsi Sulawesi Tenggara	KK						
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>										<b>2.767.323.700</b>	<b>2.680.000.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>2.767.323.700</b>	<b>2.680.000.000</b>		
<b>PANGAN</b>										<b>2.767.323.700</b>	<b>2.680.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										-	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD										-	-		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										-	-		
Pengadaan Inventaris Kantor										-	-		
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor										-	-		
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya ketahanan keluarga		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,9			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,9	<b>2.767.323.700</b>	<b>2.680.000.000</b>		
				Konsumsi energi	1920			Konsumsi energi	1920				
				Konsumsi protein	53			Konsumsi protein	53				

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	93			Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	93				
				Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan	16,6			Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan	16,6				
				Ketersediaan energi	2400			Ketersediaan energi	2400				
				Ketersediaan Protein	63			Ketersediaan Protein	63				
Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Bogor						Terlaksananya sosialisasi persiapan data pola kebutuhan konsumsi pangan	1 laporan			126.096.200	-	DKP	
						pelatihan enumelator (petugas survey)	1 laporan						
						penyusunan kuesioner survey	1 laporan						
						pengambilan data konsumsi pangan	1 laporan						
						pengolahan data konsumsi pangan	1 laporan						
						analisis data	1 laporan						
						penyusunan laporan/buku hasil analisa data kebutuhan konsumsi pangan	1 laporan						
						seminar hasil pola dan kebutuhan konsumsi pangan	1 laporan						
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			Kota Bogor			Terlaksananya Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Bagi Produsen pangan	3 kali			75.645.000	200.000.000	DKP	
						Terlaksananya Promosi Keamanan pangan melalui Kalender dan Poster	1 paket						
						Terlaksananya Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar dan pangan olahan non kemasan	1 kegiatan						
						Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan bagi produsen pangan	3 kali						
Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)			Kota Bogor			Laporan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan	85 buku			150.000.000	200.000.000	DKP	
						Rapat Koordinasi Kegiatan NBM	3 kegiatan						
Fasilitasi dan Pengembangan Ketersediaan Pangan										-	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Optimalisasi Informasi Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Bogor										-	-		
Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok			Kota Bogor			Terselenggarakannya Inventarisasi Harga Pangan Terselenggarakannya Pendampingan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tersedianya Data Harga Pangan Di Website/situs Dinas Ketahanan Pangan Kota Bogor. Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat Terlaksananya Pelaporan Pasokan dan Distribusi Pangan Pokok Masyarakat Kota Bogor	12 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 5 Kali 12 Laporan			400.000.000	450.000.000	DKP	
						Penyelenggaraan Pasar Murah dalam Peran Stabilisasi Harga Pangan Pokok di Mavarakat Tersedianya data hasil pemeriksaan kualitas pangan	5 Kali 200 Sample						
Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan			Kota Bogor			Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Menu B2SA Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA Tk. Kota Bogor Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan LCM B2SA H Tingkat Kota Bogor Tahun 2017 Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Kota dan Tk. Propinsi	1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kali 2 kegiatan 2 kegiatan			176.505.000	385.000.000	DKP	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan			
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
						Terlaksananya Kampanye Gerakan Makan Sayur dan Buah untuk siswa SD □	1500 siswa								
						Bimtek Pengenekaragaman Olahan Berbasis Pangan Lokal	3 kegiatan								
Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah Sehat			Kota Bogor			Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan di Lingkungan Sekolah	10 kali			100.860.000	250.000.000	DKP			
						Terlaksananya Bimtek Pengelola Kantin Sekolah	1 kegiatan								
						Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kantin Sekolah Sehat di Kota Bogor	40 sekolah								
						Terlaksananya Lomba Kantin Sehat Antar Sekolah SD dan SMP	2 kali								
						Terlaksananya Rapat Persiapan Lomba Kantin Sekolah Sehat	2 kali								
						Terlaksananya Rapat Teknis Lomba Kantin Sekolah Sehat	2 kali								
						Terlaksananya Bimtek untuk duta kantin	1 kegiatan								
Penanganan daerah rawan pangan			Kota Bogor			Kompilasi data kerawanan pangan masyarakat	1 dokumen			500.000.000	375.000.000	DKP			
						Pelatihan penanganan kerawanan pangan tingkat rumah tangga	1 kegiatan								
						Pemantauan ketersediaan bahan pangan di agen penyalur komoditi pangan bantuan proqram BPNT	12 bulan								
						Pembuatan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	1 peta								
						Sosialisasi hasil penyusunan Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan	1 kegiatan								
						Pengambilan data dan pelaporan bulanan SKPG	12 bulan								
						Rapat Koordinasi SKPG	4 kegiatan								

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Analisis SKPG	4 Kegiatan							
						Laporan tahunan situasi pangan dan gizi wilayah	1 laporan							
Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga			Kota Bogor (lokasi lomba P2WKSS, Lomba Hatinya PKK, Lomba Posyandu, KRPL)			Terselenggaranya Workshop Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga	3 kegiatan			150.067.500	220.000.000	DKP		
						Terselenggaranya Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	120 orang							
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (Demapan)										-	-			
Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan										-	-			
Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Kota Bogor										-	-			
Optimalisasi Pengembangan Pangan Lokal di Kota Bogor										-	-			
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi										-	-			
Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pangan										538.150.000	-	DKP		
Pengembangan Ketersediaan dan Kawasan Mandiri Pangan			Kota Bogor			Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	1 kegiatan			200.000.000	250.000.000	DKP		
						Pembentuka Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) baru	1 lokasi							
						Sosialisasi Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)	1 kegiatan							
						Bimtek Ketersediaan Pangan	1 kegiatan							
Pengelolaan dan Pengadaan Cadangan Pangan			Kota Bogor			Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan(KLPM) Kota Bogor	10 kelompok			350.000.000	350.000.000	DKP		
						Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kota Bogor	68 kelurahan							
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (beras)	30 ton beras							
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>										<b>136.170.174.000</b>	<b>4.450.000.000</b>			
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>136.170.174.000</b>	<b>4.450.000.000</b>			

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>										<b>136.170.174.000</b>	<b>4.450.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>49.627.000.000</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Terpenuhinya Belanja Honorarium Pegawai	100 %			9.000.000.000	-	DLH	
						Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Peralatan, dan Kebutuhan Rumah Tangga SKPD.	100 %						
Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat						Terlaksananya Kebutuhan Pendukung SDM Non PNS Lingkungan Hidup Kota Bogor	1272 Orang			40.627.000.000	-	DLH	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>7.874.000.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD : Belanja Kendaraan Bermotor Roda Dua	100 % 3 unit			350.000.000	-	DLH	
						Belanja Rak Besi Belanja Alat Penangkal Petir  Belanja Partisi Meja  Belanja Tangga Multifungsi Belanja Pemadam Api  Belanja Printer Inkjet Multifungsi Belanja Printer Laser Mono	8 unit 1 unit  23 unit  1 unit 25 unit  5 unit 5 unit						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional dinas  Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor  Terpeliharanya Bukan Gedung dan Bangunan (Penataan PJU, Penataan Areal Taman, Normalisasi Saluran Drainase) Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya (CCTV, Alat Pendingin (AC), Barang Electronic, Komputer, Printer, Meubelair, HT, Instalasi Listrik dan Telepon)	100 paket  100 paket  100 paket 100 paket			900.000.000	-	DLH	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Pelayanan Perbengkelan						Pemeliharaan Rutin	Unit			6.224.000.000	-	DLH	
						Perbaikan Kendaraan	Unit						
						Pemeliharaan Alat Berat	Unit						
						Pengadaan Pelumas	Unit						
						Pengadaan Ban	Paket						
						Pengelasan dan Pegecatan	Unit						
Pengadaan Gedung dan Bangunan						Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur SKPD :	100 %			400.000.000	-	DLH	
						Penataan Areal Parkir	100 paket						
						Pembuatan Gudang Arsip	100 paket						
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>25.000.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, Laporan Semester, LAKIP, LKPJ, LPPD-EPPD, dan Laporan Tahunan	100 %			25.000.000	-	DLH	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Persentase Volume sampah terangkut ke TPA (%)</b>	<b>76</b>			<b>Persentase Volume sampah terangkut ke TPA (%)</b>	<b>76</b>	<b>23.040.997.000</b>	<b>2.000.000.000</b>		
				<b>Persentase Jalur Wilayah Penyapuan</b>	<b>48,8</b>			<b>Persentase Jalur Wilayah Penyapuan</b>	<b>48,8</b>				
				<b>Persentase peningkatan retribusi persampahan</b>	<b>2,1</b>			<b>Persentase peningkatan retribusi persampahan</b>	<b>2,1</b>				
Pelayanan Persampahan						Terangkutnya sampah diwilayah Kota Bogor melalui Penyapuan dan Pengangkutan	100%			12.709.000.000	-	DLH	
						Honor/Upah Bulanan PNS	OB						
						BBM Solar	Liter						
						BBM Bensin	Liter						
						Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan	Macam						
						Penggunaan/Fotocopy	Lembar						
Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana						Pengadaan Tong Sampah	86 Unit			8.277.997.000	-	DLH	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pengadaan Tong Sampah Beroda Pengadaan Gerobak Sampah Pengadaan Motor Sampah Pengadaan Bak Kontainer Pengadaan Krucut Lalu Lintas Pengadaan Pick Up Mini Dump Pengadaan Dump Truck 6 Roda Pengadaan Compactor 10 Roda	160 Unit 76 Unit 10 Unit 18 Unit 355 Unit 5 Unit 1 Unit 10 Unit						
Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS						Revitalisasi Landasan Container dan TPS ( Pembangunan TPS Kel. Empang 1, Pembangunan TPS Kel. Empang 2, Landasan Container Jl. Paledang SMPN 7, TPS Ciawi, Landasan Container Semmur Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Terlaksananya Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Revitalisasi Terlaksananya Konsultasi Pengawasa Revitalisasi	Titik      Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen			652.000.000	-	DLH	
Pelombaian Kebersihan						Lomba kebersihan kantor OPD Lomba kebersihan kelurahan  Lomba kebersihan RT(perumahan tepi sungai, teratur dan swadava) Lomba kebersihan pasar tradisional Lomba kebersihan kegiatan usaha pusat perbelanjaan  Lomba kebersihan sekolah Lomba TPS 3R Lomba Bank Sampah	35 kantor 68 kelurahan 680 RT  6 pasar 10 pusat perbelanjaan  60 sekolah 26 TPS 3R 24 Bank Sampah			900.000.000	2.000.000.000	DLH	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Lomba kebersihan hotel	20 Hotel						
						Lomba kebersihan restoran/rumah makan	20 Restoran /Rumah makan						
						Seremonial penerimaan penghargaan	1 paket						
						Sarana Pemilahan dan Pengelolaan Sampah	20 Paket						
Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah						Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi sampah	12 Bulan			252.000.000	-	DLH	
						Terpenuhinya Pembayaran Penunjang Retribusi Pelayanan sampah oleh PDAM	100 %						
Peningkatan PAD Retribusi Persampahan						Kesadaran Masyarakat dalam membayar Retribusi persampahan	100 %			250.000.000	-	DLH	
						Draft Perwali tentang pengelolaan Persampahan Tersedianya Rool Baner Tentang mekanisme pelayanan persampahan	1 Dokumen 100 Buah						
						Tersedianya Buku Perda Retribusi Persampahan	1000 Buah						
<b>PROGRAM PERBAIKAN, OPTIMALISASI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN FUNGSI TPA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Prosentase volume sampah yang diolah di TPA (%)</b>	<b>98,16</b>			<b>Prosentase volume sampah yang diolah di TPA (%)</b>	<b>98,16</b>	<b>46.655.677.000</b>	-		
				<b>Kapasitas pengolahan sampah</b>	<b>931</b>			<b>Kapasitas pengolahan sampah</b>	<b>931</b>				
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan						Tersedianya Suku Cadang dan Pemeliharaan 9 unit Alat Berat dan 1 unit Truk Taneki Air <u>Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM)</u> <u>Solar HSD dan Pelumas untuk 9 unit Alat Berat.</u> <u>1 unit Truk Tangki Air.</u> <u>2 Kendaraan Operasional dan 1 unit Motor Sampah</u>	1 tahun  bulan			8.605.677.000	-	DLH	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Sampah di TPA						Terpenuhinya Sarana Pendukung dalam Pengelolaan Sampah di TPA Galuga	paket			3.500.000.000	-	DLH	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan di TPA	tahun						
						Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	paket						
						Terlaksananya Pelaksanaan Komposting, Pengadaan Alat Pengendalian Vector / Nyamuk (Ovitrap), Pengobatan Gratis, Pelaksanaan Fogging, Keamanan dan Kelancaran Pembuangan Sampah ke TPA Galuga	paket						
Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga						Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	pohon			13.000.000.000	-	DLH	
						Penutupan Lahan / Zona Dengan Tanah (Controlled Landfill)	m2						
						Pemasangan Pipa Pengendalian Gas Methane (Ventilasi Gas)	paket						
						Terpelihara dan Tertatanya Sarana dan Prasarana di TPA Galuga	paket						
						Terpasangnya PJU Baru	titik						
						Tebangunnya Hanggar Parkir Alat Berat	paket						
						Terbangunnya Tanggul Penahan Tanah / Sampah	m2						
						Terbangunnya Pagar Tembok Pembatas lahan Area TPA dengan Lahan milik Warga	m1						
						Terbangunnya Saluran Lindi	m1						
Pengadaan Alat Berat						Pengadaan Alat Berat Exavator	unit			8.000.000.000	-	DLH	
						Pengadaan Alat Berat Bulldozer	unit						
Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga						Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga	dokumen			200.000.000	-	DLH	
						Uji Udara	titik						
						Uji Badan Air, Inlet, Outlet dan Air Bersih	titik						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Teknis Proses Penutupan TPA Galuga						Kajian Teknis Penutupan TPAS Galuga	dokumen			250.000.000	-	DLH	
Pembangunan Sarana dan Prasarana SPA						Penanaman Pohon Pelindung (Buffer Zone)	pohon			-	-		
						Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor SPA	paket						
						Pembangunan Lansekap Kawasan SPA (Tembok Pagar Pembatas)	paket						
						Pembangunan Jalan, Saluran dan Lahan Parkir	paket						
						Pembangunan Sumber Air Bersih	titik						
						Pembangunan Instalasi Pengolah Lindi	paket						
Pembayaran Retribusi dan Tipping fee TPS Nambo						Pembayaran Tipping Fee ke TPPAS Nambo	bulan			12.600.000.000	-	DLH	
Perencanaan Teknis Penyiapan Pengelolaan Sampah ke TPA Nambo						Perencanaan Teknis Penyiapan Pengelolaan Sampah ke TPPAS Nambo	dokumen			500.000.000	-	DLH	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman</b>		<b>Persentase Reduksi Sampah (%)</b>	<b>6,4</b>			<b>Persentase Reduksi Sampah (%)</b>	<b>6,4</b>	<b>2.402.500.000</b>	<b>900.000.000</b>		
				<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R</b>	<b>4</b>			<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R</b>	<b>4</b>				
Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat						Tersedianya Alat Pengolahan Air Kotor	2 Unit			300.000.000	-	DLH	
						Tersedianya Peralatan Las Listrik	2 Unit						
						Tersedianya Peningkatan Sarana Penunjang TPS 3R BISA	1 Lokasi						
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah						Pembinaan dan Pengawasan 3R	19 Kelurahan			300.000.000	-	DLH	
						Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah	150 Orang						
Pengelolaan Sampah dengan 3R						Reduksi Sampah 4,4 %	19 Kelurahan			1.000.000.000	-	DLH	
						Tereduksi dan terolahnya sampah disumber	29 Lokasi						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terselenggaranya Pengelolaan Sampah 3R Berbasis Masyarakat	29 Lokasi							
						Terpeliharanya Sarana dan Prasarana 3R	29 Lokasi							
						Terselenggaranya Uji Kualitas Kompos	1 Dokumen							
						Tersedianya Tenaga Pemilah Sampah sebanyak 12 orang	12 Bulan							
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	29 LOKasi							
Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah						Terbentuknya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	15 bank sampah			802.500.000	900.000.000	DLH		
						Pembinaan teknis pemilahan sampah, pengelolaan sampah dan bank sampah	6 kecamatan							
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Terkendalinya sumber-sumber pencemar Air dan sumber-sumber pencemar udara</b>		<b>Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya</b>	<b>36</b>			<b>Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya</b>	<b>36</b>	<b>2.770.000.000</b>	<b>-</b>			
				<b>Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang ditindaklanjuti</b>	<b>100</b>			<b>Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang ditindaklanjuti</b>	<b>100</b>					
				<b>Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3</b>	<b>30</b>			<b>Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3</b>	<b>30</b>					
				<b>Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan</b>	<b>30</b>			<b>Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan</b>	<b>30</b>					
				<b>Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya</b>	<b>50</b>			<b>Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya</b>	<b>50</b>					

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran udara yang ditindaklanjuti	60			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran udara yang ditindaklanjuti	60				
				Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	50			Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	50				
Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3						Terbinanya usaha/kegiatan penghasil limbah B3	20 .			100.000.000	-	DLH	
Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL						Terbinanya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan/usaha di Kota Bogor	250 Kegiatan /Usaha			400.000.000	-	DLH	
						Terlaksananya sosialisasi tentang peraturan lingkungan hidup	400 Kegiatan /Usaha						
						Terlaksananya kajian pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan laboratorium di Kota Bogor	1 Dokumen						
						Terlaksananya kajian pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pusat pendidikan di kota bogor	1 Dokumen						
						Terlaksananya kajian pengelolaan lingkungan hidup kegiatan perumahan di kota Bogor	1 Dokumen						
Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I						Kegiatan Usaha yang telah mentaati Perizinan	66 %			40.000.000	-	DLH	
						Kegiatan Usaha Baru yang Telah dilakukan Pengawasan dan membuat Perizinan	43 %						
						Terlaksananya sosialisasi tentang Penegakan Hukum Lingkungan	100 %						
Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II						Kegiatan Usaha yang telah mentaati Perizinan	66 %			40.000.000	-	DLH	
						Kegiatan usaha baru yang telah dilakukan Pengawasan dan membuat Perizinan	43 %						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Sosialisasi tentang Penegakan Hukum Lingkungan	100 %						
Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III						Kegiatan Usaha yang telah mentaati Perizinan	66 %			40.000.000	-	DLH	
						Kegiatan usaha baru yang telah dilakukan pengawasan dan membuat Perizinan	43 %						
						Terlaksananya Sosialisasi tentang Penegakan hukum lingkungan	100 %						
Pengendalian Pencemaran Air						Data Kualitas Air Sungai dan Situ pada musim penghujan, musim peralihan dan kemarau	108 Sampel			1.200.000.000	-	DLH	
						Data Kualitas Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan	150 Sampel						
						Data Kualitas Air Sumur dekat Sumber Pencemar	50 Sampel						
						Data Kualitas Air Limbah Sanimas Komunal	1 Paket						
						Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Air	4 Laporan						
						Terlaksananya Bintek Pengendalian Pencemaran Air	1 Kali						
						Terlaksananya Pelatihan Penginputan Data pada Web Nawasis Info	1 Kali						
						Tersedianya Papan Petunjuk Titik Pengambilan Sampling Air Sungai	36 Unit						
						Tersedianya Alat Pengujian Kualitas Air Portable	1 Paket						
						Tersedianya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Cisadane	1 Paket						
Pengendalian Pencemaran Udara						Data Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambien secara aktif 24 jam	24 Sampel			750.000.000	-	DLH	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Data Pengujian dan Analisa Kualitas Udara Ambien secara Passive	8 Sampel						
						Data Pengujian Emisi Sumber tidak bergerak	7 Sample						
						Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Kualitas Udara	3 Laporan						
						Tersedianya Laporan Pengujian dan Analisa Emisi Gas Buang Kendaraan	2 Laporan						
						Tersedianya Laporan Kajian Pemantauan Kinerja Lalu Lintas dalam Rangka Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	2 Laporan						
						Tersedianya Laporan Kajian Permodelan Pengukuran Kualitas Udara Perkotaan di Kota Bogor	1 laporan						
Identifikasi Timbulan Sampah Limbah B3						Tersedianya dokumen kegiatan/usaha penghasil limbah B3	dokumen			200.000.000	-	DLH	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Terkendalinya sumber-sumber pencemar air dan sumber-sumber pencemar udara</b>		<b>Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air</b>	<b>10</b>			<b>Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air</b>	<b>10</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>-</b>		
				<b>Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)</b>	<b>0,5</b>			<b>Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)</b>	<b>0,5</b>				
Pengelolaan Sumber Daya Air						Terbangunya bangunan konservasi air	35 Unit			900.000.000	-	DLH	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						Profil keanekaragaman hayati	1 Dokumen			400.000.000	-	DLH	
						Pengadaan bibit tanaman	1 Paket						
						Terlaksananya hari menanam pohon Indonesia	1 Paket						
						Terpeliharanya tanaman pohon yang ada	1 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)</b>		<b>Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi</b>	<b>1</b>			<b>Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi</b>	<b>1</b>	<b>925.000.000</b>	<b>650.000.000</b>		
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah			Kota Bogor			Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan	1 dokumen			575.000.000	200.000.000	DLH	
						Dokumen kajian lanjutan pengelolaan lingkungan hidup	1 dokumen						
						Dokumen lingkungan Pusat Daur Ulang	4 dokumen						
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						Dokumen RPPLH	1 dokumen			350.000.000	450.000.000	DLH	
						Dokumen pendukung RPPLH	1 dokumen						
Penyusunan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar						Inventarisasi sumber pencemardi sungai cisadane	1 dokumen			-	-		
<b>PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara</b>		<b>Persentase Penurunan Emisi GRK</b>	<b>7,5</b>			<b>Persentase Penurunan Emisi GRK</b>	<b>7,5</b>	<b>1.550.000.000</b>	<b>900.000.000</b>		
Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim						Terlaksananya pembinaan kampung iklim	3 Lokasi			400.000.000	-	DLH	
						Terlaksananya sosialisasi proklam	3 Lokasi						
Inventarisasi Gas Rumah Kaca						Dokumen Inventraisasi Gas rumah Kaca	1 Buku			300.000.000	-	DLH	
Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata						Fasilitasi, pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan dan adiwiyata	100 sekolah			350.000.000	400.000.000	DLH	
Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup			Kota Bogor			Sosialisasi Adipura	100 orang			500.000.000	500.000.000	DLH	
						Sosialisasi Pengelolaan sampah dan Bank Sampah	700 orang						
						Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	6 Kecamatan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Sosialisasi Adiwiyata	200 orang						
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										<b>14.804.657.458</b>	<b>21.530.000.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>14.491.857.458</b>	<b>20.680.000.000</b>		
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>										<b>13.456.868.658</b>	<b>17.680.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>7.911.851.658</b>	<b>10.000.000.000</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor			Presentase Pengelolaan Rumah Tangga OPD	100 100%			7.911.851.658	10.000.000.000	Disdukcapil	
						1. Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	12 Bulan						
						2. Belanja alat Tulis Kantor	12 Bulan						
						3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan						
						4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan						
						5. Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Bulan						
						6. Biaya Dokumentasi/Dekorasi	12 Bulan						
						7. Belanja Peralatan dan Perlengkapan	12 Bulan						
						8. Belanja Telepon	12 Bulan						
						9. Belanja Air	12 Bulan						
						10. Belanja Listrik	12 Bulan						
						11. Belanja Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan						
						12. Belanja Jasa Tenaga Ahli	12 Bulan						
						13. Belanja Bahan Bakar Minyak , Gas dan Pelumas	12 Bulan						
						14. Belanja STNK	25 Motor, 6 Mobil						
						15. Belanja Cetak, Fotocopy dan Penjilidan	12 Bulan						
						16. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan						
						17. Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan						
						18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan						
						19. Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>4.000.000.000</b>	<b>5.500.000.000</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor			Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor			Perangkat perekaman dan pencetakan KTP el	100 8 unit			1.000.000.000	2.000.000.000	Disdukcapil	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor			<p>Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor</p> <p>1. Belanja Pemeliharaan software kependudukan dan capil</p> <p>2. Belanja pemeliharaan hardware kependudukan</p> <p>3. Belanja jasa service (kendaraan roda 4 )</p> <p>4. Penggantian suku cadang kendaraan roda 4</p> <p>5. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>6. Pemeliharaan komputer</p> <p>7. Pemeliharaan gedung kantor, jalan, taman dan pelataran</p> <p>8. Bahan bakar minyak,gas dan pelumas</p> <p>9. Pemeliharaan perlengkapan kantor</p>	<p>100 100%</p> <p>4 aplikasi</p> <p>1 Paket</p> <p>6 unit</p> <p>6 unit</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p> <p>1 gedung</p> <p>12 bulan</p> <p>12 bulan</p>			800.000.000	2.500.000.000	Disdukcapil	
Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor			<p>Tersedianya Blangko kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>1.Belanja ATK Pencetakan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA)</p> <p>2.Sarana Pelayanan (Blangko kependudukan dan pencatatan sipil</p> <p>3.Sarana pelayanan penerbitan KIA</p>	<p>100 100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>1 paket</p>			1.000.000.000	1.000.000.000	Disdukcapil	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Revitalisasi Ruang Pelayanan dan Pembangunan Aula Kantor			Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor			Pembangunan lantai dua	1 gedung			1.200.000.000	-	Disdukcapil	
						Ruang Rapat/aula	1 gedung						
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>30.000.000</b>	<b>80.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor			Nilai Hasil LKIP perangkat daerah	100%			30.000.000	80.000.000	Disdukcapil	
						1. Laporan Monev	12 kali						
						2. Rencana Kerja ( renja )	2 Buku						
						3.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	2 Buku						
						4.Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah (LKIP)	2 Buku						
						5.Laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan EPPD	2 Buku						
						6. Laporan Tahunan	2 Buku						
						7. Laporan Keuangan Tahunan	5 Buku						
						8. Laporan RKA	5 Buku						
						9. Laporan DPA & DPPA	5 Buku						
<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya ketahanan keluarga</b>		<b>Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran</b>	<b>95,00%</b>			<b>Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran</b>	<b>0,95</b>	<b>1.515.017.000</b>	<b>2.100.000.000</b>		
				<b>Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan</b>	<b>25,00%</b>			<b>Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan</b>	<b>0,25</b>				
				<b>Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP</b>	<b>99,50%</b>			<b>Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP</b>	<b>0,995</b>				
				<b>Persentase Penduduk yang memiliki KK</b>	<b>#####</b>			<b>Persentase Penduduk yang memiliki KK</b>	<b>1</b>				
				<b>Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)</b>	<b>30,00%</b>			<b>Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)</b>	<b>0,3</b>				
Pelayanan dasar Administrasi kependudukan						Terlaksananya pelayanan mobil keliling (pelayanan KTP dan KK )	11 bulan			110.048.000	500.000.000	Disdukcapil	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya kualitas pelayanan melalui konsultasi dan evaluasi	4 kali							
						Pemahaman tentang KIA melalui workshop	2 kali							
Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan			Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor			Pelayanan penduduk pindah datang WNI dan WNA dan penduduk non permanen	100%			28.585.000	200.000.000	Disdukcapil		
						1. Tersedianya data lahir, mati, pindah dan datang (LAMPID) bulanan 2. tersedianya RW percontohan 3. tersedianya data orang asing	2 dokumen 5 RW percontohan 60%							
Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di bidang Perkawinan			Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor			Prosentase kepemilikan AKta Perkawinan meningkat	55%			17.980.000	100.000.000	Disdukcapil		
						1. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki AKta perkawinan 2. Peserta rakor pengurus tempat ibadah non muslim 3. Tertatanya dokumen administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian	200 Akta perkawinan 50 org 100%							
Pelayanan Publik Akte Kelahiran			Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor			Tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka pelayanan catatan sipil	6 kecamatan			72.531.000	500.000.000	Disdukcapil		
Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan			Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor			Terlaksananya Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil teratur dan Rapi	65 Tahun			104.000.000	200.000.000	Disdukcapil		
Pelayanan Perubahan status anak, kewarganegaraan dan Akta kematian			Dinas kependudukan dan pencatatan sipil			Terlaksananya Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Akta Kematian Updating Database Kependudukan	6 Kecamatan 6 Kecamatan			53.393.000	600.000.000	Disdukcapil		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemutakhiran Data Penduduk			Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor			Pelaksanaan operasi sisir kepemilikan dokumen	65 313625 KK			1.128.480.000	-	Disdukcapil	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>										<b>160.000.000</b>	<b>200.000.000</b>		
Penyusunan Profil Penduduk			Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor			Tersusunya buku profil kependudukan dan data agregat kependudukan	2 buku			110.000.000	200.000.000	Disdukcapil	
Pengembangan Kerjasama Data dan Informasi Administrasi Kependudukan						Pembuatan Kajian Inovasi Layanan dan Kerjasama	1 Kegiatan			50.000.000	-	Disdukcapil	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>312.800.000</b>	<b>850.000.000</b>		
Indeks kepuasan masyarakat			Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor			Tersusunnya Buku survei kepuasan masyarakat Disdukcapil Kota Bogor	10 Buku			112.800.000	250.000.000	Disdukcapil	
						Sertifikasi hasil audit ISO 9001:2015	1 Sertifikasi						
						Meningkatnya pelayanan melalui pengembangan wawasan	1 kegiatan						
Inovasi Pelayanan Adminduk			Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor			Terlaksananya Pelayanan Adminduk lebih rapih, teratur, efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Adanya sarana prasarana untuk anak ketika orangtuanya mengurus dokumen adminduk	1 Kegiatan			200.000.000	600.000.000	Disdukcapil	
<b>KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>										<b>874.988.800</b>	<b>2.800.000.000</b>		
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>874.988.800</b>	<b>2.800.000.000</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan (Adminduk)			Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor			Penyuluhan dan sosialisasi Adminduk	100%			360.440.000	1.500.000.000	Disdukcapil	
						1. Terlaksananya advokasi dan publikasi adminduk dan pemberian media cetak ke kecamatan, kelurahan dan peserta berupa : roll banner, spanduk, iklan media cetak online/elektronik, leaflet poster buku sinter 2. Pameran 3. Terpublikasinya pelayanan adminduk melalui masa	68 Kelurahan & 6 Kecamatan  2 Kegiatan  12 Kegiatan						
Digitalisasi arsip kependudukan dan pencatatan sipil			Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor			Peningkatan Pengembangan Kerjasama Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan			150.000.000	250.000.000	Disdukcapil	
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIAK, SITANDUK dan Blue Room			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor			Terbangunnya aplikasi sitanduk wilayah tingkat kelurahan dan kecamatan	1 aplikasi dan hardware			350.000.000	750.000.000	Disdukcapil	
Peningkatan Kualitas Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor			Pelatihan operator wilayah	460 orang			14.548.800	300.000.000	Disdukcapil	
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>										<b>11.102.782.800</b>	<b>5.400.000.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>10.988.396.800</b>	<b>5.400.000.000</b>		
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>										<b>8.944.401.800</b>	-		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>5.071.455.180</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Pemenuhan Kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan funesinva  Gaji Petugas Keamanan (4 Orang),Kebersihan (5 Orang) dan Jasa Supir (3 Orang)	12 bulan  12 Bulan			5.071.455.180	-	DPMPPA	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.063.245.820</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Mobil Avanza Filling Kabinet Rak Besi Videotron Ac Split	1 Unit 11 buah 4 buah 1 unit 1 unit			620.171.569	-	DPMPPA	
						Jam Dinding APE Dalam Dispenser Komputer (PC) All In One Printer Multifungsi Meja Kerja Kasie	2 unit 1 paket 1 unit 4 unit 5 unit 7 buah						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	12 bulan			443.074.251	-	DPMPPA	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>4.900.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Tersusunnya Buku LAKIP SKPD Tersusunnya Buku Renja SKPD Tersusunnya Buku LKPJ SKPD Tersusunnya Buku LPPD SKPD Tersusunnya Buku Laporan Tahunan SKPD	DOKUM EN DOKUM EN DOKUM EN DOKUM EN DOKUM EN			4.900.000	-	DPMPPA	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif</b>	<b>50</b>			<b>Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif</b>	<b>50</b>	<b>2.532.739.800</b>	-		
Peningkatan kemandirian lembaga kemasyarakatan						Jumlah Peserta Rakor LPM Jumlah peserta Pelathan Adminitrasi RT RW Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	75 Orang 75 Orang 75 Orang			143.179.000	-	DPMPPA	
TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)			Kelurahan Situgede			Monitoring dan Evaluasi kegiatan TNI Manunggal Satata Sariksa terselenggaranya kegiatan Fisik di Kelurahan Situgede Bogor Barat Terlaksananya Penyuluhan keamanan di Kelurahan	1 dokumen  90%  68 Kelurahan			62.725.000	-	DPMPPA	
Bulan bhakti gotong royong masyarakat						Jumlah Kelurahan yang dinilai untuk BBGRM Tk Kota	Kelurahan			6.966.000	-	DPMPPA	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Ke luaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Jumlah Kelurahan yang di Nilai untuk Lomba BBGRM Tk Provinsi Jabar	Kelurahan							
						Jumlah Kelurahan untuk pembinaan Lomba BBGRM Tk Provinsi Jabar	Kelurahan							
						Pengembangan Wawasan	Orang							
Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat						Jumlah peserta pelatihan KPM	Orang			46.000.000	-	DPMPPA		
						Jumlah peserta Pelatihan Posdaya	Orang							
						Jumlah observasi lapangan kader posdaya	Orang							
						Pengembangan wawasan	Orang							
Pembinaan PKK						Terbinanya TP. PKK Kota (Kegiatan Lomba)	3 Lomba			305.588.400	-	DPMPPA		
						Terselenggaranya Kegiatan Pokja 1 (Majlis Taklim, Pola asuh anak, dan halal bihalal)	322 orang							
						Terselenggaranya Kegiatan Pokja 2 (Pelatihan BKB, Administrasi UP2K)	330 Orang							
						Terselenggaranya Kegiatan Pokja 3 (Hatinya PKK dan Bogor Hejo)	124 orang							
						Terselenggaranya Kegiatan Pokja 4 (Penguatan Model Posyandu, Peningkatan strats Posyandu, Gerakan Peduli Kesehatan organ	870 orang							
						reproskudi, penyuluhan deteksi dini kanker dan revitalisasi posyandu)								
Evaluasi Perkembangan Kelurahan						Jumlah kelurahan yang dinilai untuk evdeskel Tk. Kota	6 Kelurahan			147.362.400	-	DPMPPA		
						Jumlah kelurahan yang dibina untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jawa Barat	1 Kelurahan							
						Jumlah kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Provinsi Jawa Barat	1 Kelurahan							
						Jumlah kelurahan yang dibina untuk Evdeskel Tk. Regional	1 Kelurahan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Jumlah kelurahan yang dinilai untuk Evdeskel Tk. Regional	1 Kelurahan							
Penguatan Kelembagaan Pokjandal Posyandu						Terlaksananya Rakor Pokjandal Posyandu	3 Kegiatan			75.870.000	-	DPMPPA		
						Terlaksananya Recking Lomba Posyandu dan Finalisasi Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat	3 Kegiatan							
						Terlaksananya Pelatihan Smart Posvandu	2 Kegiatan							
						Terlaksananya Pembinaan ketua Posvandu	1 Kegiatan							
Penyelenggaraan Kelembagaan Posyandu se-Kota Bogor						Terlaksananya Kegiatan Pokjandal Tingkat Kota	1 Kegiatan			1.745.049.000	-	DPMPPA		
						Terlaksananya Kegiatan Rakor Pokjandal Kecamatan	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Pokja Kelurahan	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Meningkatnya Kinerja Kader Posyandu	1 Kegiatan							
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Menurunnya Kemiskinan</b>		<b>Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi</b>	<b>2,51</b>			<b>Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi</b>	<b>2,51</b>	<b>272.061.000</b>	<b>-</b>			
				<b>Persentase Pelaku Usaha yang mampu memanfaatkan Teknologi Tepat Guna</b>	<b>13,5</b>			<b>Persentase Pelaku Usaha yang mampu memanfaatkan Teknologi Tepat Guna</b>	<b>13,5</b>					
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS)						Jumlah RTS yang meningkat Pengetahuan sikap dan keterampilannya	200 Orang			93.850.000	-	DPMPPA		
						Terselenggaranya Pelatihan keterampilan bagi Rumah Tangga Sasaran	4 Kegiatan							
						Terselenggaranya Monev Rumah Tangga Sasaran di 6 Kecamatan	1 Kegiatan							
Pemberdayaan UP2K PKK						Peserta Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota UP2K PKK	74 orang			65.396.000	-	DPMPPA		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terselenggaranya Lomba UP2K PKK Tingkat Kota	1 kegiatan							
						Terselenggaranya Lomba UP2K PKK Tingkat Provinsi	1 kegiatan							
						Terselenggaranya Promosi Produk UP2K PKK se Kota Bogor	1 kegiatan							
						Terselenggaranya Monev UP2K PKK	1 kegiatan							
Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)			Kota Bogor			Terlaksananya Pemasyarakatan TTG/Gelar Teknologi Tepat Guna	3 Kegiatan		24.165.000		-	DPMPPA		
						Terlaksananya Lomba seleksi /Lomba Inovasi TTG	1 Kegiatan							
						Monitoring Evaluasi Pengembangan dan Penerapan TTG	1 Kegiatan							
Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan TTG						Terlaksananya Sosialisasi /Pelatihan/Bimtek Pemanfaatan TTG bagi Kelompok Masyarakat.	3 Kegiatan		56.900.000		-	DPMPPA		
						Optimalisasi Pengelolaan Posyantek	1 Paket							
						Monev Hasil Pembinaan Pemanfaatan TTG	1 Kegiatan							
Pemberdayaan Ekonomi Syariah						Jumlah Peserta Bimtek dan Pelatihan	100 orang		31.750.000		-	DPMPPA		
						Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Kegiatan							
						Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Syariah	1 Kegiatan							
						Lomba Cerdas Cermat Ekonomi Syariah	1 Kegiatan							
						Terselenggaranya Monev Ekonomi Syariah	1 Kegiatan							
<b>PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya ketahanan keluarga</b>		<b>Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%)</b>	<b>77</b>	<b>Prevalensi kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>0,0108</b>	<b>Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%)</b>	<b>77</b>	<b>1.374.474.000</b>	<b>5.400.000.000</b>			
				<b>Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya</b>	<b>1,5</b>	<b>Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya</b>	<b>1,5</b>	<b>Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya</b>	<b>0,011</b>					

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase Perempuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan	0,9			Persentase Perempuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan	0,9				
				Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan	0,0126			Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan	0,013				
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)			Kota Bogor			Pembinaan Terhadap Warga Binaan Program Terpadu P2WKSS	100 KK			83.090.000	600.000.000	DPMPPA	
						Keikutsertaan dalam Lomba/Evaluasi Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	1 Masuk Nominasi						
						Keikutsertaan dalam Rechecking Program Terpadu P2WKSS Tingkat Propinsi Jawa Barat	1 Kali (Juara)						
Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)			Kota Bogor			Jumlah Peserta Pelatihan Tata Boga Bagi Perempuan Kepala Keluarga	1 kelompok			44.800.000	300.000.000	DPMPPA	
						Jumlah Peserta Pelatihan Sulam Pita Bagi Perempuan Kepala Keluarga	1 Kelompok						
Sekolah Ibu			68 Kelurahan			Jumlah peserta sekolah ibu	4080 org			1.246.584.000	4.500.000.000	DPMPPA	
<b>PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</b>		<b>Persentase perempuan berpolitik (%)</b>	<b>17</b>			<b>Persentase perempuan berpolitik (%)</b>	<b>17</b>	<b>115.020.000</b>	<b>-</b>		
				<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</b>	<b>78</b>			<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)</b>	<b>78</b>				
Pembinaan dan pengembangan kelembagaan perempuan						Terlaksananya Capacity Building	1 kali			72.220.000	-	DPMPPA	
						Terlaksananya Musyawarah Daerah KPPI Kota Bogor	1 Kali						
						Terlaksananya Pembekalan kapasitas KPPI Kota Bogor	1 kali						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Pelantikan Pengurus KPPI Kota Bogor Terlaksananya Pembekalan Kapasitas PUSPA Kota Bogor  Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerdayaan Perempuan Terlaksananya Peringatan Hari Ibu Terlaksananya kegiatan darmawanita	1 Kali 1 kali  1 kali 1 kali 1 kali						
Advokasi dan Fasilitasi pengarusutamaan Gender (PUG)						Terlaksananya Rakor PUG Terlaksananya Raker PUG  Terlaksananya Sosialisasi PUG Terlaksananya Bintek PPRG	400 Orang 400 Orang 0 Orang 450 Orang			42.800.000	-	DPMPPA	
<b>PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</b>		<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)</b> <b>Prevalensi kekerasan terhadap anak</b>	<b>77</b>  <b>0,0133</b>			<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)</b> <b>Prevalensi kekerasan terhadap anak</b>	<b>77</b>  <b>0,013</b>	<b>427.075.000</b>	-		
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak dan TPPO						Terlaksananya Rakor Perlindungan Anak  Home Visit  Terlaksananya Suport Group  Terlaksananya Rapat Intern Perlindungan Anak Tertanganinya Kasus Yang Terlaporkan Penguatan Jejaring Penangan Kasus Anak	1 Kegiatan  25 Kegiatan  6 Kegiatan  12 Kegiatan 100 Persen 1 Kegiatan			427.075.000	-	DPMPPA	
<b>PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</b>		<b>Predikat Kota Layak Anak (KLA)</b>	<b>Nindya</b>			<b>Predikat Kota Layak Anak (KLA)</b>	<b>Nindya</b>	<b>127.426.000</b>	-		
Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)			Kota Bogor			Terlaksananya Rakor Forum Anak Kota Bogor  Terlaksananya Jambore Forum Anak Tingkat Kota	2 kali  1 kali			84.840.000	-	DPMPPA	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)						Sosialisasi PATBM dan PUSAPAGA	2 Kegiatan			42.586.000	-	DPMPPA	
						Terlaksananya Pelatihan PATBM	3 Kegiatan						
						Terlaksannya Pembentukan Penguatan Perlindungan Anak	1 Kegiatan						
<b>PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>113.504.200</b>	-		
Penyusunan Profil Perempuan Kota Bogor						Tersedianya data profil perempuan	1 dokumen			37.000.000	-	DPMPPA	
Penyusunan Profil Anak Kota Bogor						Tersusunnya Buku Profil Anak Kota Bogor	1 Dokumen			35.651.200	-	DPMPPA	
Pemutakhiran data profil Kelurahan						Jumlah Peserta Rakernis Profil Kelurahan	74 Orang			40.853.000	-	DPMPPA	
						Jumlah Peserta Rakor Profil Kelurahan	74 Orang						
						Jumlah Peserta Pelatihan Profil Tercetaknya Buku rofil Kelurahan	11 Orang 68 Kelurahan						
<b>KEUANGAN</b>										<b>881.800</b>	-		
<b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>										<b>881.800</b>	-		
Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)						Terverifikasinya usulan-usulan Hibah dan Bantuan Sosial Termonitornya Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial	100% 100%			881.800	-	DPMPPA	
<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										<b>5.870.983.495</b>	<b>15.680.300.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>5.870.983.495</b>	<b>15.680.300.000</b>		
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										<b>5.870.983.495</b>	<b>15.680.300.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>2.051.573.695</b>	<b>5.000.000.000</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Kota Bogor			Pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD dalam mendukung tugas dan fungsi	12 bulan			2.051.573.695	5.000.000.000	Dinas DaldukKB	
						Gaji Satpam	2 orang						
						Gaji Supir	2 orang						
						Gaji Petugas Kebersihan	2 orang						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Capacity Building menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kinerja dan menguatkan kerjasama tim	35 orang							
						Sewa Gedung	bulan			1.175.000.000	2.350.000.000			
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>														
Pengadaan Inventaris Kantor			Kota Bogor			Jumlah Pengadaan Komputer	10 Unit			550.000.000	2.000.000.000	Dinas DaldukKB		
						Jumlah Pengadaan Printer	10 Unit							
						Jumlah Pengadaan AC	Unit							
						Jumlah Kendaraan Roda 4	1 Unit							
						Jumlah Kendaraan Roda 2	4 Unit							
						Jumlah Tangga Lipat	1 Buah							
						Filling Kabinet	5 Buah							
						Jumlah Pengadaan Lemari Besi	5 Buah							
						Jumlah Pengadaan CCTV	1 Paket							
						Jumlah Pengadaan TV	2 Unit							
						Jumlah Pengadaan LCD	1 Unit							
						Jumlah Layar LCD	1 Unit							
						Jumlah Rak Arsip	5 Unit							
						Jumlah Pengadaan Kamera	1 Unit							
						Jumlah Pengadaan Laptop	1 Unit							
						Jumlah Pengadaan Kursi Sice	Set							
						Jumlah Work Station	Paket							
						Jumlah Meja Receptionist	Set							
						Jumlah Kursi Putar	Buah							
						Jumlah Standing AC	2 Unit							
						Jumlah Pengadaan Gorden	Set							
						Jumlah Pengadaan Teralis	Set							
						Jumlah Meja Setengah Biro	buah							
						Jumlah Pengadaan Kursi Lipat	buah							
						Jumlah Pengadaan Kursi Rapat	Buah							
						Jumlah Pengadaan Meja Rapat	Buah							
						Jumlah Pengadaan Forclift	buah							
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kota Bogor			Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 paket			325.000.000	350.000.000	Dinas DaldukKB		
						Pemeliharaan instalasi listrik	1 paket							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor (BMD/aset)	1 paket							
DED Gedung DPPKB			Kota Bogor			Rapat penyusunan DED	10 Kegiatan			300.000.000	-	Dinas DaldukKB		
						Dokumen DED	1 Dokumen							
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>20.000.000</b>	<b>50.000.000</b>			
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kota Bogor			Tersusunnya Renja	1 dokumen			20.000.000	50.000.000	Dinas DaldukKB		
						Tersusunnya Renstra	1 dokumen							
						Tersusunnya Laporan Keuangan	1 dokumen							
						Tersusunnya LKIP	1 dokumen							
						Tersusunnya LPPD	1 dokumen							
						Tersusunnya LKPJ	1 dokumen							
						Tersusunnya SOP Dinas	1 dokumen							
						Tersusunnya SKM Dinas	1 dokumen							
						Tersusunnya Maturitas SPIP Dinas	1 dokumen							
<b>KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</b>		<b>Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)</b>	<b>11,4</b>			<b>Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)</b>	<b>11,4</b>	<b>200.350.000</b>	<b>1.100.000.000</b>			
				<b>Persentase PIK R Aktif</b>	<b>43,48</b>			<b>Persentase PIK R Aktif</b>	<b>43,48</b>					
Peningkatan Pengetahuan Remaja Terhadap Kesehatan Reproduksi			Kota Bogor			Pembentukan PIK R	2 Kelompok			200.350.000	1.100.000.000	Dinas DaldukKB		
						Pembinaan PIK R	6 Kelompok							
						Pemilihan Duta GenRe	1 Kegiatan							
						Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	1 Kelompok							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</b>		<b>Persentase peningkatan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Tingkat Peserta KB Aktif</b>	<b>0,7742</b>			<b>Persentase peningkatan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Tingkat Peserta KB Aktif</b>	<b>0,774</b>	<b>1.860.061.000</b>	<b>6.030.300.000</b>		
				<b>Persentase Peningkatan Peserta KB MKJP pada PUS</b>	<b>22,07</b>			<b>Persentase Peningkatan Peserta KB MKJP pada PUS</b>	<b>22,07</b>				
Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)K			Kota Bogor			Sosialisasi dan KIE mengenai Bahaya TRIAD KRR	75 Peserta			185.000.000	910.000.000	Dinas DaldukKB	
						Pembinaan dan Peningkatan kapasitas terhadap Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)	68 Peserta						
						Sosialisasi dan KIE KKBP melalui media luar ruang (Billboard)	3 Buah						
						Pojok KB	1 Kegiatan						
						Lomba Paduan Suara	1 Kegiatan						
Pelayanan KB			Kota Bogor			Pencapaian KB Baru (PB)	10000 Akseptor			429.451.000	1.200.000.000	Dinas DaldukKB	
						Pencapaian KB Aktif (PA)	101000 Akseptor						
						Pelayanan KB Safari	1650 Akseptor						
						Pelayanan KB MOW	170 Akseptor						
						Pelayanan KB MOP	40 Akseptor						
						Momentum Pelayanan KB : HJB, Hari Kemerdekaan RI, Bakti IBI, TNI KB Kes	4 Kegiatan						
Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Pelayanan KB			Kota Bogor			Pengadaan Obat dan BHP (barang pakai habis)	1 paket			162.500.000	310.000.000	Dinas DaldukKB	
						Pengadaan Barang cetakan (K/IV/KB)	6000 lembar						
						Pengadaan Barang cetakan (K/1/KB)	6000 lembar						
						Pengadaan Barang cetakan (Inform Concern)	5910 lembar						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pengadaan Barang cetakan (Buku Register)	68 buku						
						Pengadaan Bahan Makanan (Sembako) untuk akseptor MO	210 paket						
Penggerakan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB			Kota Bogor			Aktor KB (Akod Akseptor KB)	400 Akseptor			195.000.000	850.000.000	Dinas DaldukKB	
						Penggerakan Kepada Akseptor KB Aktif Non MKJP menjadi MKJP	550 peserta						
						Pembentukan dan pembinaan Paguyuban KB Pria	2 kelompok						
						Pemberian Penghargaan Akseptor KB Pria	1 kegiatan						
Penguatan dan Pengembangan Kampung KB			Kota Bogor			Pembinaan dan Pelatihan Kampung KB	26 Kampung KB			231.280.000	810.000.000	Dinas DaldukKB	
						Lomba Kampung KB Tingkat Kota Bogor	1 Kegiatan						
Grand Design KKBPK			Kota Bogor			Dokumen Grand Design	1 dokumen			111.000.000	-	Dinas DaldukKB	
Pendataan Keluarga			Kota Bogor			Pendataan dan Updating Keluarga	200000 Kepala Keluarga			250.000.000	750.300.000	Dinas DaldukKB	
						Laporan Pendataan Keluarga	1 Dokumen						
Kemitraan KKBPK			Kota Bogor			Momentum Hari Keluarga	3 Kegiatan			295.830.000	1.200.000.000	Dinas DaldukKB	
						Momentum Kesatuan Gerak PKK KB Kes (Pencanangan, Rakor, Lomba)	3 Kegiatan						
						Momentum Lomba-lomba Ketahanan Keluarga Tk Kota Bogor (Tribina, UPPKS, PIK R, KB Lestari, Pos KB, Orang Tua Hebat, PKB/PLKB, P2WKSS, Posyandu, Lima Lomba, Kinerja Kelurahan)	12 Kegiatan						
						Momentum TNI KB Kesehatan (Pencanangan, Rakor, Lomba)	3 Kegiatan						
<b>PEMBANGUNAN KELUARGA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya ketahanan keluarga</b>		<b>Persentase Keluarga Sejahtera</b>	<b>93,5</b>			<b>Persentase Keluarga Sejahtera</b>	<b>93,5</b>	<b>563.998.800</b>	<b>1.150.000.000</b>		
				<b>Persentase Anggota bina keluarga balita aktif</b>	<b>0,755</b>			<b>Persentase Anggota bina keluarga balita aktif</b>	<b>0,755</b>				

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif Jumlah Kelompok UPPKS aktif	0,701 0,7001 1			Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif Jumlah Kelompok UPPKS aktif	0,701 0,7 1				
Peningkatan Promosi Kesehatan 1000 HPK			Kota Bogor			Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Promosi Kesehatan 1000 HPK	136 Peserta			159.748.800	270.000.000	Dinas DaldukKB	
Bintek Tribina			Kota Bogor			Anggota BKB yang mengikuti bintek Anggota BKR yang mengikuti bintek Anggota BKL yang mengikuti bintek	68 Peserta 68 Peserta 68 Peserta			297.750.000	680.000.000	Dinas DaldukKB	
Pelatihan Wirausaha bagi Kelompok UPPKS			Kota Bogor			Terselenggaranya Pelatihan Wirausaha bagi Kelompok UPPKS	50 peserta			106.500.000	200.000.000	Dinas DaldukKB	
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>										<b>53.363.177.000</b>	-		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>52.023.617.000</b>	-		
<b>PERHUBUNGAN</b>										<b>49.002.742.000</b>	-		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>15.559.832.000</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS	12 OB			14.759.832.000	-	Dsihub	
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11 Paket Pekerjaan						
						Honoarium Pegawai Honoror /Tidak Tetap	2948 OB						
						Belanja Alat Tulis Kantor	46 Jenis Barang						
						Belanja Pengisian Tabung Gas	12 Buah						
						Pengadaan Perlengkapan Pendukung Penyelenggaraan PKB (Cat dan Thinner)	7 Item						
						Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor (Plat Uji)	1 Paket						
						Jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah	12 Bulan						
						Belanja Jasa Kebersihan (Jasa Cleaning Service)	1 Paket						
						Belanja Jasa Keamanan (Jasa Satpam)	1 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Belanja Jasa Tenaga Tim TP4	36 OB							
						Belanja Iuran Premi Asuransi Kesehatan	348 Kali							
						Belanja Iuran Premi Asuransi Ketenagakerjaan	348 Kali							
						Terpenuhinya BBM Operasional Kendaraan Kantor (Kend Roda 6 dan 4 = 23 Unit, Kend Roda 2 (100-150CC) = 43 unit, kend Roda 2 (250-450CC) = 16 unit, Kend Roda 2 (750CC) = 1 Unit)	1 Paket							
						Belanja Cetak (Pengadaan Blanko Cetakan Dinas)	26 Item							
						Belanja Penyebarluasan Informasi/Spanduk	10 Buah							
						Pengadaan Perlengkapan PKB (Buku Uji, Kartu Uji, Kertas Gesek)	3 Paket							
						Belanja Pengadaan/Fotocopy	50000 Lembar							
						Belanja Makanan dan Minuman	10000 Per Orang							
						Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar	4 Stel							
						Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian Dinas Lapangan Berikut Atribut)	250 Stel							
						Pakaian Kerja Lapangan (Perlengkapan Dinas)	6 Item							
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket							
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1 Paket							
Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas						Prosentase fasilitas lalu lintas yang dibayar	100 %			800.000.000	-	Dsihub		
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>8.300.000.000</b>	-			
Pengadaan Inventaris Kantor						pengadaan sarana kerja alat angkutan darat bermotor	13 Unit			6.300.000.000	-	Dsihub		
						Peralatan, Perlengkapan Kantor, Meubeulair dan Elektronik	4 Paket							
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Belanja Pegawai	12 Bulan			2.000.000.000	-	Dsihub		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Belanja Penggantian Suku Cadang / Pemeliharaan (Roda 2, 4, 6 dan 10)	12 Bulan							
						Belanja STNK (Mobil dan Motor)	69 Kendaraan							
						Belanja Sewa Gedung / Kantor tempat alat komunikasi repiter	12 Bulan							
						Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC, Mesin Tik, Tabung Pemadam, CCTV)	12 Paket							
						Belanja Pemeliharaan Komputer (PC, Laptop dan Printer)	12 Paket							
						Belanja Pemeliharaan Komunikasi (HT, Righ, Telepo, Fax, Finger Print, Pesawat Repiter)	12 Paket							
						Belanja Pemeliharaan Bangunan (Pemeliharaan Gedung Kantor DISHUB)	1 Paket							
						Pemeliharaan Alat - alat Bengkel Teknis PKB dan Belanja Pemeliharaan Pembelian Sparepart dan Pemasangan peralatan teknis PKB	1 Paket							
						Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Kantor DISHUB	1 Paket							
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>33.018.000</b>	-			
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	100 %			16.398.000	-	Dsihub		
Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset PD						Tersedianya Dokumen : laporan keuangan semesteran, laporan keuangan tahunan, inventaris barang, neraca, CALK, LRA	7 Dokumen			16.620.000	-	Dsihub		
<b>PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASA TRANSPORTASI</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi</b>		<b>Konektivitas transportasi multimoda</b>	<b>2</b>			<b>Konektivitas transportasi multimoda</b>	<b>2</b>	<b>10.976.402.000</b>	-			

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang						Tersedianya kinerja lalu lintas (volume, kapasitas, kecepatan, kepadatan, antrian) pada ruas jalan dan simpang di Kota Bogor	1 dokumen			150.000.000	-	Dsihub	
Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang										-	-		
Pembangunan Pos GATUR						Jumlah Pos Gatur yang dibangun	1 Lokasi			125.000.000	-	Dsihub	
Pemeliharaan Pos GATUR						Pos gatur yang dipelihara	3 Lokasi			60.000.000	-	Dsihub	
Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)						Tersedianya data kinerja lokasi sebagai dasar penetapan lokasi (obyek retribusi) parkir di tepi jalan umum	1 Dokumen			50.000.000	-	Dsihub	
Pemeliharaan jembatan penyeberangan orang						Jembatan Penyeberangan Orang yang dipelihara	1 Lokasi			150.000.000	-	Dsihub	
Operasional Pelayanan Angkutan Sekolah						Jumlah Angkutan Sekolah	4 Unit			450.000.000	-	Dsihub	
Evaluasi Kinerja Angkutan Sekolah di Kota Bogor						Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan sekolah	1 Dokumen			73.500.000	-	Dsihub	
Operasional Pelayanan Angkutan Wisata						Jumlah angkutan wisata	5 Unit			1.000.000.000	-	Dsihub	
Evaluasi Kinerja Angkutan Wisata di Kota Bogor						Tersedianya data kinerja rute dan pelayanan angkutan wisata dalam kota	1 Paket			73.875.000	-	Dsihub	
Evaluasi Jaringan Lintas dan Lokasi Bongkar Muat di Kota Bogor										-	-		
Penyusunan Feasibility Study Terminal Angkutan Barang						Kelayakan lokasi terminal angkutan barang	1 Paket			198.875.000	-	Dsihub	
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran						Ruas Jalan Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir (uang lembur petugas juru parkir Non PNS dan penataan lokasi parkir khusus)	54 Lokasi			307.525.000	-	Dsihub	
Dukungan Operasional WASDAL GATUR Lalu Lintas						Wilayah operasional lalu lintas/koordinator wilayah (pengamanan penyelenggaraan lebaran, natal dan tahun baru, hari besar nasional)	8 Wilayah			477.490.000	-	Dsihub	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan						Pengadaan & pemasangan marka parkir, rambu parkir, & tarif parkir pada lokasi parkir di tepi jalan umum	1 Paket			200.000.000	-	Dsihub	
Penghargaan Wahana Tata Nugraha						Dokumen administrasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha	1 Dokumen			12.600.000	-	Dsihub	
Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor			Dinas Perhubungan Kota Bogor / Kota Bogor			Prosentase kendaraan wajib uji yang lulus uji (BBM solar genset, pengecatan tanda samping, jumlah peralatan UPUBKB yang terkalibrasi dan perpanjangan ISO 9001 : 2015)	89 %			470.152.000	-	Dsihub	
Operasional Penyelenggaraan Terminal						Pelayanan Operasional Penyelenggaraan Terminal	2 Lokasi			800.750.000	-	Dsihub	
Operasional Forum LLAJ						Laporan hasil Koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan dan penanganan masalah transportasi	1 Dokumen			64.560.000	-	Dsihub	
Uji Petik Pengawasan Pengendalian Angkutan Online Roda 2 (Dua)						Operasional WASDAL pemenuhan persyaratan administrasi dan operasional angkutan online	24 Kali			62.700.000	-	Dsihub	
Pembangunan Pospam Terpadu						Pospam terpadu yang dibangun	1 Lokasi			500.000.000	-	Dsihub	
Pemeliharaan Shelter						Shelter yang dipelihara	9 Titik Shelter			450.000.000	-	Dsihub	
Penyusunan Feasibility Studi Ruang publik Terpadu Ramah Anak (Taman Lalu Lintas)						Kelayakan lokasi pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (Taman lalu lintas)	1 paket			72.200.000	-	Dsihub	
Pembangunan Shelter dan fasilitas lalu lintas						Jumlah shelter yang dibangun	5 Lokasi			1.900.000.000	-	Dsihub	
Penyusunan Feasibility Study Relokasi Stasiun KA Batutulis						Kelayakan lokasi pembangunan relokasi Stasiun KA Batutulis	1 Paket			299.200.000	-	Dsihub	
Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalin Kawasan Rawan Kemacetan						Memedomani penanganan kawasan rawan kemacetan	1 Paket			149.200.000	-	Dsihub	
Operasional Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban						Operasi Penertiban Terpadu dengan Instansi Terkait Penggembokan Kendaraan Roda 4	48 Kali			382.800.000	-	Dsihub	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Operasi Terpadu Angkutan Kota dan Perkotaan dengan Insaniti Terkait di jalan	48 Kali							
						Operasi Terpadu Angkutan Barang dengan Instansi terkait di jalan	48 Kali							
Penyusunan DED Pembangunan Gedung UPUBKB						Perencanaan teknis dan RAB pembangunan gedung UPUBKB	1 Dokumen			248.600.000	-	Dsihub		
Pembangunan Gedung UPUBKB dan Pengadaan Peralatan Uji						Pengadaan Peralatan Uji 2 Line	1 Paket			-	-			
						Pembangunan Gedung UPUBKB	1 Paket							
Penyusunan Feasibility Study Terminal Angkutan Penumpang Wilayah Perbatasan						kelayakan lokasi terminal angkutan penumpang di wilayah perbatasan	1 Paket			97.375.000	-	Dsihub		
Penyusunan DED Pembangunan Fasilitas Integrasi moda						Laporan Hasil DED Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda	1 Paket			300.000.000	-	Dsihub		
Penyusunan Feasibility Study Lokasi Simpul/Stasiun/Terminal Terpadu dan Fasilitas Park and Ride Pengembangan LRT Jakarta-Cibubur-Bogor						Buku Laporan Hasil Kegiatan	1 Paket			200.000.000	-	Dsihub		
						Tersedianya data kajian studi lokasi (Simpul/stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT	1 Dokumen							
						Alternatif/pilihan lokasi strategis lokasi (Simpul/stasiun dan park and ride) Pengembangan LRT meliputi (lokasi, luasan, status, alasan teknis pilihan, kelebihan dan kekurangan lokasi)	1 Dokumen							
						tersedianya model desain (Simpul/stasiun dan park and ride)	1 Dokumen							
Studi Kelayakan dan Kebutuhan Pembangunan Shelter Angkutan Umum di Kota Bogor						Laporan Hasil Studi kelayakan (Jumlah kebutuhan ,data naik dan turun penumpang, lokasi dan typikal , gambar desain shelter)	1 Paket			150.000.000	-	Dsihub		
Revitalisasi Terminal Bubulak										-	-			

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Angkutan Bus Sekolah						Pelayanan operasional angkutan sekolah	4 Unit kendaraan			-	-		
Pembangunan Pangkalan Angkutan Perkotaan						Jumlah Pangkalan Angkutan Umum yang dibangun	1 Lokasi			1.000.000.000	-	Dsihub	
Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel										500.000.000		Dsihub	
<b>PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi</b>		<b>Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik</b>	<b>75</b>			<b>Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik</b>	<b>75</b>	<b>7.450.000.000</b>	<b>-</b>		
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu						Rambu lalu lintas tiang F	23 Buah			850.000.000	-	Dsihub	
						RPPJ tiang F	14 Buah						
						Rambu standar Uk 75	83 Buah						
						Rambu papan nama jalan	60 Buah						
Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan						Pengadaan Pengecatan Marka Jalan membujur	1380 Meter2			1.500.000.000	-	Dsihub	
						Pengadaan Pengecatan Marka Kuning Larangan Parkir	800 Meter2						
						Pengadaan Pengecatan Marka Yellow Box Junction	1364 Meter2						
						Pengadaan Pengecatan Zebra Cross di Wilayah Kota Bogor	800 Meter2						
						Pengadaan Pengecatan Pita Kejut di Wilayah Kota Bogor	160 Meter2						
Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan						Pagar pengaman jalan (guardrail)	125 Meter			1.500.000.000	-	Dsihub	
						cermin tikungan	59 Buah						
						Traffic cone	700 Buah						
						moveable concrete barrier (kanstin beton)	70 Buah						
						Rubber speed bump	230 Buah						
						Delineator (patok jalan)	250 Buah						
						Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan	3 Lokasi						
						Paku marka	900 Buah						
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						Bahan marka jalan	3850 Kg			1.000.000.000	-	Dsihub	
						Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	1 Paket						
						Peralatan Pendukung	1 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Suku Cadang APILL ATCS dan Non ATCS	1 Paket						
Pemeliharaan Median Jalan dan Pulau Lalu lintas						Median jalan dan pulau lalu lintas terpelihara	1 Paket			100.000.000	-	Dsihub	
Pemeliharaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) "Parking Meter"						Jumlah TPE yang dipelihara	18 Unit			100.000.000	-	Dsihub	
Pemeliharaan Gate Parkir						Jumlah gate parkir yang dipelihara	1 unit			50.000.000	-	Dsihub	
Peningkatan dan Pemasangan APILL						Pengadaan Pelican Crossing	2 Lokasi			1.900.000.000	-	Dsihub	
						Peningkatan Pengendalian Simpang APILL Warning Light	6 Simpang 10 Lokasi						
Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)						Lokasi Terpasangnya fasilitas lalu lintas ZOSS	6 Lokasi			450.000.000	-	Dsihub	
Pengadaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) "Parking Meter"										-	-		
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dan Fasilitas Keselamatan Jalan mendukung RASS										-	-		
<b>PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi</b>		<b>Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%)</b>	<b>50</b>			<b>Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%)</b>	<b>50</b>	<b>3.613.740.000</b>	<b>-</b>		
				Load Factor Angkutan Umum	45			Load Factor Angkutan Umum	45				
Restrukturisasi/ Re-Routing Angkutan Pengumpan (Feeder)						Operasional Trayek Pengumpan (Feeder)	100 %			245.000.000	-	Dsihub	
Pembinaan Badan Hukum Operator Angkutan Umum di Kota Bogor						Peningkatan kapasitas manajemen (badan hukum) angkutan umum	16 Badan hukum			57.825.000	-	Dsihub	
Subsidi Angkutan Umum										-	-		
Sosialisasi Jaringan Pelayanan (re-routing) Angkutan Umum						Jumlah peserta (masyarakat) dan tersedianya sarana sosialisasi	100 Orang			71.015.000	-	Dsihub	
Pemilihan Abiyasa Teladan						Jumlah peserta pengemudi angkutan umum teladan (angkutan perkotaan, AKDP, AKAP, pariwisata)	100 Orang			85.975.000	-	Dsihub	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum						Ketersediaan SIM angkutan umum, peningkatan database dan terpasangnya barcode pada angkutan perkotaan	1 Paket			542.125.000	-	Dsihub	
Kajian Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Angkutan Perkotaan						Tersedianya Dokumen BOK sebagai dasar evaluasi tarif penumpang angkutan umum	10 Dokumen			107.125.000	-	Dsihub	
Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek						Tersedianya data kinerja angkutan dalam trayek di setiap trayek pelayanan (LF, Headway, Frekuensi, waktu perjalanan)	1 Dokumen			92.125.000	-	Dsihub	
Uji Petik Pengawasan & Pengendalian (WASDAL) Administrasi Kendaraan Angkutan Umum						Jumlah pelaksanaan WASDAL	33 kali			103.800.000	-	Dsihub	
Rasionalisasi Supply Demand / Reduksi Angkutan Pengumpan (FEEDER)						Penghapusan (kompensasi) kendaraan angkutan pengumpan dan sewalah untuk penampungan	40 Kendaraan			2.070.000.000	-	Dsihub	
Kajian Estimasi Harga Angkutan Perkotaan						Adanya estimasi harga sebagai dasar rasionalisasi/reduksi angkutan perkotaan	5 Dokumen			49.250.000	-	Dsihub	
Evaluasi Kinerja Badan Hukum Angkutan Umum						Hasil penilaian kinerja badan hukum yang memenuhi kriteria sebagai operator angkutan umum	1 Dokumen			92.125.000	-	Dsihub	
Kajian Ability & Willingness to Pay						Tersedianya data kemampuan masyarakat untuk membayar angkutan sebagai dasar pertimbangan pemberi subsidi angkutan umum terhadap tarif penumpang yang diberlakukan	1 paket			97.375.000	-	Dsihub	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara</b>		<b>Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%)</b>	<b>100</b>			<b>Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%)</b>	<b>100</b>	<b>3.069.750.000</b>	-		
				<b>Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif</b>	<b>40</b>			<b>Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif</b>	<b>40</b>				
				<b>Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang</b>	<b>88</b>			<b>Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang</b>	<b>88</b>				
				<b>Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi</b>	<b>2</b>			<b>Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi</b>	<b>2</b>				
Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Sepeda dan Tempat Parkir Sepeda						Perbaikan perkerasan, pemasangan bollard, perbaikan dan pemeliharaan jalur sepeda / rak parkir	1 Lokasi			150.000.000	-	Dsihub	
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Jalur Pesepeoda						Tersedianya marka dan rambu pada jalur pesepeda	1 Kawasan			225.000.000	-	Dsihub	
Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan						Prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji (petik) emisi gas buang	88 %			138.000.000	-	Dsihub	
						Prosentase kendaraan bermotor yang lulus uji (berkala) emisi gas buang	88 %						
Audit/Verifikasi Operasional Angkutan Umum Massal						Laporan keuangan badan hukum sebagai operator angkutan umum massal	5 Badan Hukum			234.250.000	-	Dsihub	
Restrukturisasi Koridor Angkutan Umum Massal						Jumlah koridor angkutan umum massal yang beroperasi	7 Koridor			2.322.500.000	-	Dsihub	
Pengawasan Operasional Angkutan Umum Massal										-	-		
<b>PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi</b>								<b>2.514.600.000</b>	-		
Pemeliharaan Sarana & Prasarana BITS (Bogor Intelligent Transport System)						Terpeliharanya perlengkapan CCTV Lalin, CC-Room BITS dan ITS	100 %			243.000.000	-	Dsihub	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Peningkatan dan Pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport System)						Tersedianya perlengkapan CCTV lalin di shelter pos wasdal gatur, peningkatan dan pengembangan BITS (Bogor Intelligent Transport Sytem), Terminal, Pengembangan GPS Tracking Angkutan Umum dan Peningkatan Database dan Website Dishub Kota Bogor	100 %				2.271.600.000	-	Dsihub	
<b>PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>									<b>200.000.000</b>	-		
Kerjasama Media Massa (Surat kabar, Radio, Televisi)						Jumlah media massa yang bekerjasama dalam penyampaian informasi publik tentang Dinas perhubungan	9 Media massa				200.000.000	-	Dsihub	
<b>KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>											<b>3.020.875.000</b>	-		
<b>KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>									<b>306.275.000</b>	-		
Pengadaan Media (sarana) Sosialisasi dan Pendidikan Keselamatan Transportasi						Spanduk  Banner  XBanner Leaflet  Jumlah Peserta Capacity Building dengan media	200 Buah  40 Meter  33 Set 5290 Buah 50 Orang				306.275.000	-	Dsihub	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>											<b>1.339.560.000</b>	-		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>											<b>1.339.560.000</b>	-		
<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>									<b>1.339.560.000</b>	-		
Pemeliharaan Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor			Kota Bogor/Dinas Perhubungan Kota Bogor								-	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan Data Base Angkutan Barang Secara Online										-	-		
Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat						Hasil survey kepuasan masyarakat	6 Jenis Pelayanan			47.200.000	-	Dsihub	
Sosialisasi Sadar Tertib Berjalan (Dartiblantasi) di Jalan						Jumlah peserta	700 Orang			169.500.000	-	Dsihub	
penyelenggaraan Safety Riding			Kota Bogor			Jumlah peserta	100 Orang			86.000.000	-	Dsihub	
Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan						Kampanye keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dan upacara Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)	3 Event			167.750.000	-	Dsihub	
Sosialisasi DARTIBLANTAS tentang Kegunaan Perlengkapan Jalan dan Cara berlalu lintas kepada TK/PAUD						Jumlah peserta	440 Orang			145.600.000	-	Dsihub	
Pengembangan Sarana E-KIR						Terpenuhinya sistem e-KIR	1 Paket			250.000.000	-	Dsihub	
Pembinaan Angkutan Tidak Dalam Trayek (Barang, Becak, Delman, dan Online)						Jumlah peserta/pengusaha/pe milik angkutan yang terbina	120 Orang			66.600.000	-	Dsihub	
Bimbingan teknis pengemudi angkutan umum						Bimbingan Teknis Pengemudi ANgkutan Umum	100 Orang			74.800.000	-	Dsihub	
Peningkatan Kapasitas SDM PKB dan PPNS						Jumlah peserta diklat	10 Orang			250.000.000	-	Dsihub	
Bimbingan Teknis Petugas Operasional (WASDALGATUR) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										-	-		
Pemilihan Pelajar dan Mahasiswa Pelopor Keselamatan Lalu Lintas			Kota Bogor			Duta Pelajar dan Mahasiswa Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	100 Orang			82.110.000	-	Dsihub	
<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>										<b>20.000.000.000</b>	<b>29.502.350.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>20.000.000.000</b>	<b>29.502.350.000</b>		
<b>KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>										<b>20.000.000.000</b>	<b>29.502.350.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.280.000.000</b>	<b>1.342.500.000</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor			Honorarium PNS (PPTK, Staf PPTK, Honorarium Tim PBJ)	12 bulan			1.280.000.000	1.342.500.000	Dsihub	
						Honorarium Non PNS	12 bulan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Belanja Barang Pakai Habis (ATK, Alat Listrik, Materai, Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Bahan Pakai Habis Lainnya)	12 bulan							
						Belanja cetak dan penggandaan	12 bulan							
						Belanja jasa kantor (Belanja jasa telepon, belanja surat kabar dan majalah)	12 bulan							
						Belanja jasa tenaga ahli/narasumber/instruktur/pengajar Non PNS	12 bulan							
						Belanja makan minum (tamu dan lokakarya)	12 bulan							
						Belanja perjalanan dinas luar daerah	12 bulan							
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.200.000.000</b>	<b>1.564.850.000</b>			
Pengadaan Inventaris Kantor			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Boeør			Kendaraan Roda Empat 1500 cc	1 unit			700.000.000	1.064.850.000	Dsihub		
						Kendaraan Roda Dua	4 unit							
						Kursi Bar	5 unit							
						Alat Pendingin ( AC )	4 Unit							
						PC Core i5	12 unit							
						Laptop Core i7	1 unit							
						Laptop Core i5	1 unit							
						Printer	12 unit							
						Hardisk Eksternal	3 unit							
						Monitor 21.5"	2 unit							
						Proyektor	2 unit							
						Layar Proyektor	2 unit							
						Audio Mixer	2 unit							
						Smart Board	2 Unit							
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kota Bogor			Terpeliharanya bangunan	12 bulan			500.000.000	500.000.000	Dsihub		
						Terpeliharanya inventaris kantor	12 bulan							
						Terpeliharanya kendaraan Dinas operasional dan penggantian suku cadang	12 bulan							
						Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										30.000.000	30.000.000		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor			Tersedianya Dokumen Rencana kerja dan Laporan Perangkat Daerah	4 Dokumen			30.000.000	30.000.000	Dsihub	
<b>PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Hasil Penilaian SPBE</b>	<b>2,92</b>			<b>Hasil Penilaian SPBE</b>	<b>2,92</b>	<b>17.490.000.000</b>	<b>26.015.000.000</b>		
				<b>Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi</b>	<b>14</b>			<b>Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi</b>	<b>14</b>				
Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor			Kota Bogor			Tersedianya jaringan intranet dan internet (Backbone) Tertatanya jaringan intranet LAN pada SKPD se-Kota Bogor	146 Titik 146 Titik			1.800.000.000	2.100.000.000	Dsihub	
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota			Kota Bogor			Tersedianyajaringan Fiber Optik di OPD	10 Titik			2.000.000.000	2.000.000.000	Dsihub	
Pemeliharaan Wifi Ruang Publik			Kota Bogor			Stabilnya koneksi wifi di ruang publik	50 Titik			200.000.000	175.000.000	Dsihub	
Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester			Kota Bogor			Terpeliharanya Grounding Listrik dan erester OPD dan Kelurahan	8 Titik			200.000.000	175.000.000	Dsihub	
Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor			Kota Bogor			Terlaksananya Pengelolaan website Pemkot Bogor Tersedianya Keberlangsungan website dan Kota Bogor	12 bulan 1 Aplikasi			200.000.000	500.000.000	Dsihub	
Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room (Command Center), Server Data dan Aplikasi			Kota Bogor			Tersedianya Outsourcing Operator Bogor Green Room Terpeliharanya Perangkat Multimedia Bogor Green Room	4 Orang 1 Paket			300.000.000	1.000.000.000	Dsihub	
Digitalisasi Profil dan Pengembangan/Promosi Ekosistem E-Government dan Smart City			Kota Bogor			Tersedianya profil digital e-Government Kota Bogor dan meningkatnya literasi digital ekosistem e-Government Smart City	3 Paket			600.000.000	600.000.000	Dsihub	
Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik Berbasis Multimedia			Diskominfo Kota Bogor			Tersedianya Booklet Smartcty  Terpeliharanya hologram Tersedianya Brosur/Leaflet	1 Paket  1 Paket 1 Paket			200.000.000	225.000.000	Dsihub	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Tersedianya APK Mobily Smartcity	1 Paket							
Pembangunan Wifi ruang publik			Kota Bogor			Tersedianya ruang publik yang memiliki wifi	15 Titik			300.000.000	100.000.000	Dsihub		
Pendataan, Verifikasi, Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor			Pendataan, Verifikasi dan Serah Terima Hak Akses Seluruh Aplikasi dan Data Base serta Evaluasi SPBE	2 PAKET			125.000.000	125.000.000	Dsihub		
Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor			Peraturan Wali Kota dalam paket peraturan pelaksanaan SPBE	2 Perwali			30.000.000	15.000.000	Dsihub		
Sosialisasi/Diseminasi Standarisasi Aplikasi			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor			15 pertemuan	3 Pertemuan			60.000.000	90.000.000	Dsihub		
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi			Kota Bogor			Aplikasi Layanan e-Government yang dibuatkan/ dikembangkan/ dipelihara oleh Diskominfo	3 Paket			1.100.000.000	1.200.000.000	Dsihub		
Relokasi dan revitalisasi ruang kendali jaringan dan server			kota bogor			tersedianya ruang kendali jaringan dan server	3 paket			-	-			
Pengadaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server			kota bogor			terlaksananya penyediaan server Terlaksananya pengadaan router Terlaksananya pengadaan UPS	3 paket 1 paket 1 paket			600.000.000	1.200.000.000	Dsihub		
Pemeliharaan dan Pengelolaan Infrastruktur ruang kendali jaringan dan server			kota bogor			Tersedianya outsourcing data center Terlaksananya pemeliharaan perangkat ruang kendali server dan iaringan Tertatanya perangkat data center	1 paket 1 paket 1 paket			300.000.000	700.000.000	Dsihub		
Pengelolaan Data Recovery Center (DRC)			kota bogor			Terkelolanya data recovery centre (DRC) Terpeliharanya perangkat data recovery centre Tersedianya perangkat server	1 paket 1 paket 0 paket			350.000.000	450.000.000	Dsihub		
Pemeliharaan CCTV Kota Bogor			Kota Bogor			Terpeliharanya CCTV di Lingkungan Kota Bogor  Tersedianya Outsourcing Operator CCTV	58 Titik  2 Orang			200.000.000	600.000.000	Dsihub		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan CCTV Kota Bogor			Kota Bogor			Tersedianya CCTV di Kota Bogor	10 Titik			350.000.000	800.000.000	Dsihub	
Pemeliharaan Teleconference Kota Bogor			Kota Bogor			Terpeliharanya Perangkat Teleconference	1 Paket			100.000.000	200.000.000	Dsihub	
Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat			DisKominfo kota Bogor			Tersedianya Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	1 paket			1.700.000.000	1.560.000.000	Dsihub	
						Tersedianya data survey Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengaduan Masyarakat	1 Paket						
						Tersedianya server Aplikasi layanan Pengaduan masyarakat	1 unit						
						Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi layanan Pengaduan Masyarakat	1 Kali						
Layanan Kemitraan dan Pengelolaan Media Dalam Penyebaran Informasi			Diskominfosta ndi Kota Bogor			Tersedianya Konten Publikasi Informasi	6 Konten			700.000.000	1.000.000.000	Dsihub	
						Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang kreatif dan Inovatif	75 Kelompok						
						Terselenggaranya Lomba Kreatif Kelompok Informasi Masyarakat	1 Lomba						
						Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Penyebaran Informasi	11 Orang						
						Tersebaranya Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	4 Medsos (Internal & Eksternal)						
						Tersedianya Peralatan studio Video dan Film	1 Paket						
						Penyebaran Informasi Kebijakan Pemerintah Melalui Media Spanduk	120 Buah						
Pemindahan dan penataan ulang infrastruktur Command Center (Bogor Green Room) Banprov 2020			Kota Bogor			Tersedianya command center yang memenuhi standar minimal sebagai Command Center, Monitoring center, dan Crisis Center	4 Paket			-	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Bandwith			kota bogor			tersedianya bandwidth internet untuk OPD se - Kota Bogor	700 Mbps			3.500.000.000	5.100.000.000	Dsihub	
Pengembangan datawarehouse dan Sistem Informasi Kota (SIMATA)			Kota Bogor			Tersedianya Pengembangan Aplikasi SIMATA	1 Paket			225.000.000	800.000.000	Dsihub	
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Implementasi Aplikasi Teknologi Informatika			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor			Jumlah ASN yang memahami implementasi aplikasi teknologi informatika	400 ORANG			-	550.000.000		
<b>PERSANDIAN</b>													
<b>PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)</b>	<b>Level 1</b>			<b>Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)</b>	<b>Level 1</b>				
Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian			Kota Bogor			Tersedianya Sistem Keamanan Informasi	1 Paket			500.000.000	800.000.000	Dsihub	
						Tersedianya Sistem Anti Virus	1 Paket						
						Tersosialisasinya Keamanan Informasi	164 Orang						
						Tersedianya Firewall	1 Paket						
Audit Sistem Informasi dan Evaluasi Status Aplikasi di Tingkat Perangkat Daerah			Kota Bogor			Terselenggaranya Audit Sistem Informasi	1 Paket			300.000.000	300.000.000	Dsihub	
<b>STATISTIK</b>													
<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase ketersediaan data statistik sektoral (jumlah data statistik sektoral yang tersedia dibagi jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan X 100%)</b>	<b>70</b>			<b>Persentase ketersediaan data statistik sektoral (jumlah data statistik sektoral yang tersedia dibagi jumlah data statistik sektoral yang dibutuhkan X 100%)</b>	<b>70</b>				
Satu Data Statistik Sektoral			Diskominfosta ndi Kota Bogor			Tersedianya Aplikasi Satu Data	1 Paket			500.000.000	1.500.000.000	Dsihub	
						Terpeliharanya Aplikasi Portal Data	1 Paket						
						Tersedianya Tenaga Ahli	1 Paket						
Penyajian Statistik Sektoral			Diskominfosta ndi Kota Bogor			Terlaksananya Sosialisasi Portal Data	3 Kali			500.000.000	500.000.000	Dsihub	
						Tersusunnya Buku Saku Statistik Kota Bogor	1 Paket						
						Tersusunnya Buku Statistik Pola Tingkat Kemiskinan	1 Paket						
						Tersusunnya Buku Statistik Sosial Ekonomi	1 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Buku Indeks Statistik Kota Bogor	8 Buku						
Pengelolaan Statistik Sektoral			Diskominfostandi Kota Bogor			Tersusunnya Data Indeks Inovasi Daerah	1 Paket			550.000.000	2.200.000.000	Dsihub	
						Tersusunnya Data Indeks Pembangunan Olahraga	1 Paket						
						Tersusunnya Data Indeks Pembangunan Keluarga	1 Paket						
						Tersusunnya Data Indeks Ketahanan Keluarga	1 Paket						
<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>										<b>9.693.761.000</b>	<b>800.000.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>9.693.761.000</b>	<b>800.000.000</b>		
<b>KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>										<b>9.693.761.000</b>	<b>800.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>5.104.847.800</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Belanja Pegawai	12 orang			5.104.847.800	-	Dinas Kop dan KUKM	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>875.000.000</b>	<b>300.000.000</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor						- Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Dinas Koperasi dan UKM	38 PEGAWAI			600.000.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor	90 persen			275.000.000	300.000.000	Dinas Kop dan KUKM	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>10.761.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Dokumen Rencana Kerja OPD Tahun 2019,Dokumen LAKIP Kota Bogor Tahun 2019,Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Dokumen LKPJ dan Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2020	5 Dokumen			10.761.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
<b>PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>	<b>Peningkatan Daya Saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal</b>	<b>Menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Jumlah Kesempatan kerja baru pada Koperasi</b>	<b>20</b>			<b>Jumlah Kesempatan kerja baru pada Koperasi</b>	<b>20</b>	<b>877.565.000</b>	<b>500.000.000</b>		
				<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>65</b>			<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>65</b>				

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase Koperasi berkualitas	8,7			Persentase Koperasi berkualitas	8,7				
Pelatihan Start UP dan Network Digitalisasi			Kota Bogor			Terlaksananya Pelatihan Start-Up	75 Koperasi			116.655.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
						Terlaksananya Pengaduan Aplikasi network Digital Usaha Koperasi	1 Paket						
Pendampingan Manajemen dan Jaringan Usaha Koperasi			Kota Bogor			Terlaksananya Pendampingan Manajemen bagi Koperasi	75 Koperasi			31.900.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
						Terciptanya Jaringan Usaha Koperasi (JUK)	75 Koperasi						
Temu Bisnis Koperasi dan Konsorsium Koperasi			Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional			Terlaksananya temu bisnis dalam iven pameran Peringatan Hari koperasi Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	3 Pameran			144.250.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
						Terlaksananya Konsorsium bagi permodalan usaha Koperasi	75 Koperasi						
Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Konvensional dan Syariah						terlaksananya Pelatihan Bussines Koperasi	25 koperasi			31.350.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
						Terlaksananya Pelatihan Bussines Pola Svariah	25 Koperasi						
						Terselenggaranya Praktek Kerja Lapangan	20 Koperasi						
Coaching Clinic Koperasi						Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian bagi peserta Coaching Clinic Koperasi	75 Koperasi			95.520.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
						Terlaksananya Pembinaan Coaching Clinic bagi Koperasi	75 Koperasi						
						Terlaksananya pendampingan pembuatan laporan RAT Koperasi	30 Koperasi						
						Terlaksananya Observasi lapangan	30 Orang						
Fasilitasi Badan Hukum Koperasi						Terfasilitasinya Badan Hukum Koperasi	27 LKM			85.590.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
						Terlaksananya Pendampingan Pembuatan Laporan RAT Koperasi	30 Koperasi						
						Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan	1 kali						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerapan Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi			Kota Bogor			Terselenggaranya Bimtek dan Sosialisasi Regulasi dan Pengawasan terhadap 75 Koperasi	50 Koperasi			35.550.000	250.000.000	Dinas Kop dan KUKM	
						Terselenggaranya Bimtek Pemeriksaan USP/KSP terhadap 75 Koperas	50 Koperasi						
						Terselenggaranya Bimtek dan Sosialisasi Kepatuhan Hukum dan Penerapan Sanksi terhadap 75 Koperasi	50 Koperasi						
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi						Terlaksananya pelatihan kapasitas SDM koperasi	100 koperasi			31.425.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi						Terlaksananya Temu Koperasi dalam rangka Hari Koperasi	150 Koperasi			251.000.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Rapat Kerja Koperasi						Terlaksananya Rapat Kerja Koperasi	75 Koperasi			14.775.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Penilaian Kesehatan Koperasi			Kota Bogor			Terselenggaranya Penilaian Kesehatan KSP/USP	65 Koperasi			39.550.000	250.000.000	Dinas Kop dan KUKM	
<b>PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>110.000.000</b>	-		
Pengembangan dan Pemeliharaan SIM OPD						- Terupdatenya Data pada aplikasi SIM OPD	5 UKM, PKL, KOPERASI			110.000.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
<b>PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Jumlah Kesempatan kerja baru pada UMKM</b>	<b>880</b>			<b>Jumlah Kesempatan kerja baru pada UMKM</b>	<b>880</b>	<b>1.197.979.000</b>	-		
				<b>Jumlah UMKM (wirausaha) baru</b>	<b>180</b>			<b>Jumlah UMKM (wirausaha) baru</b>	<b>180</b>				
				<b>Persentase peningkatan omzet UMKM Per Tahun</b>	<b>25</b>			<b>Persentase peningkatan omzet UMKM Per Tahun</b>	<b>25</b>				
SOLUSI (Sistem Operasional dan Layanan Usaha Mikro dan Sarana Promosi)			Dinas Koperasi dan UKM			Memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk berinteraksi dengan Pemerintah Kota Bogor	1 Paket			351.959.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Kelas Inspirasi						Mendapatkan Pelatihan Penumbuhan minat Wirausaha	0 UMKM Kota Bogor			35.600.000	-	Dinas Kop dan KUKM	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kompetisi Rencana Usaha						Menstimulasi dan menjaring calon wirausaha baru	0 UMKM Kota Bogor			29.350.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Pelatihan Peningkatan Kompetensi UMKM						Meningkatnya minat usaha kalangan masyarakat	150 UMKM Kota Bogor			27.750.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Peningkatan Kualitas dan Nilai Jual Produk UMKM						Inovasi Produk,Higeinis Produk,Fotografi dan Caption Produk	375 UMKM Kota Bogor			22.600.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Promosi Produk UMKM						Mengikuti berbagai Pameran Lokal, Regional, dan Nasional	6 Pameran			450.770.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Teknologi Terapan Untuk UMKM						Penerapan Teknologi bagi pelaku UMKM	170 UMKM Kota Bogor			22.650.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Expo Permodalan UMKM						UMKM mendapatkan permodalan Bank penyalur KUR :Dana Bergulir LPDB,Bantuan Modal Usaha Pemerintah,Peer to Peer, crowd Funding,Ventura Capital,CSR Impact Investment dan Modal Usaha Koperasi	100 UMKM Kota Bogor			222.750.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM						UMKM yang memperoleh kesempatan bermitra dengan usaha besar	160 UMKM Kota Bogor			34.550.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
<b>PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA</b>	<b>Penguatan daya saing ekonomi daerah/masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Jumlah PKL yang direlokasi berdasarkan zona</b>	<b>1350</b>			<b>Jumlah PKL yang direlokasi berdasarkan zona</b>	<b>1350</b>	<b>1.517.608.200</b>	<b>-</b>		
				<b>Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM</b>	<b>20</b>			<b>Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM</b>	<b>20</b>				
Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL						Terlaksananya Revitalisasi Zona PKL dan Terbangunnya Sentra Kuliner di Kota Bogor	3 Lokasi			-	-		
Penyusunan Feasibility Study (FS) PKL Zona						Tersedianya Dokumen Lokasi Pembangunan Zona PKL Yang Representatif	1 Dokumen			-	-		
Sosialisasi Regulasi PKL non Zona						Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL Terlaksananya Sosialisasi Regulasi PKL di Luar Zona Binaan	6 Kecamatan 600 PKL			36.400.000	-	Dinas Kop dan KUKM	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelatihan Peningkatan Kompetensi PKL						Terlaksananya pelatihan peningkatan kompetensi Bagi PKL Zona Binaan	600 PKL			73.800.000	-	Dinas Kop dan KUKM	
Pemeliharaan Zona PKL						Terawatnya Bangunan dan Fasilitas Lainnya Yang Berada Dalam Zona PKL	5 Zona PKL			223.814.400	-	Dinas Kop dan KUKM	
Penataan dan Relokasi PKL										989.613.800		Dinas Kop dan KUKM	
Penyusunan Feasibility Study (FS)						Tersusunnya Dokumen Feasibility study	1 Dokumen			193.980.000		Dinas Kop dan KUKM	
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>										<b>7.903.895.000</b>	-		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>7.903.895.000</b>	-		
<b>PENANAMAN MODAL</b>										<b>7.903.895.000</b>	-		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.935.270.000</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Terpenuhinya Belanja Telpon	Bulan			1.935.270.000	-	DPMPTSP	
						Terpenuhinya Belanja Air PDAM	Bulan						
						Terpenuhinya Belanja Jasa Kebersihan	Bulan						
						Terpenuhinya Belanja Jasa Keamanan	Bulan						
						Terpenuhinya Jasa Costumer Servis dan Front Office	Bulan						
						Terpenuhinya BBM	Bulan						
						Terpenuhinya Makan Minum	Bulan						
						Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bulan						
						Terpenuhinya Belanja ATK	Kali						
						Terpenuhinya Balanja Cetakan	Kali						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>974.585.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						BM Pengadaan Laptop	Unit			401.800.000	-	DPMPTSP	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						BM Pengadaan Server	Unit			572.785.000	-	DPMPTSP	
						Terpeliharanya Sarana dan prasarana Inventaris Kantor	100 Persen						
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>30.000.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Buku LKPJ	1 Laporan 1 Buku			30.000.000	-	DPMPTSP	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Buku LKIP Buku LPPD SOP Zona Integritas SPIP Materi	1 Buku 1 Buku 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket							
<b>PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL</b>	<b>Penguatan Daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Nilai Investasi</b>	<b>2,5</b>			<b>Nilai Investasi</b>	<b>2,5</b>	<b>4.964.040.000</b>	-			
				<b>Persentase pelayanan perijinan sesuai dengan SOP</b>	<b>0,725</b>			<b>Persentase pelayanan perijinan sesuai dengan SOP</b>	<b>0,725</b>					
Promosi Investasi						Terselenggaranya Promosi Investasi/Pameran di Dalam Negeri Terselenggaranya Promosi Investasi/Pameran di Luar Negeri Tersedianya Video Peluang dan Potensi Investasi Terselenggaranya Temu Investor di Kota Bogor Tersusunnya Buku Peluang dan Potensi Invetasi di Kota Bogor	4 kali 3 Kali 1 paket 1 kali 200 buku			400.000.000	-	DPMPTSP		
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor						Pelaksanaan Workshop LKPM Pelaksanaan Helpdesk LKPM Penilaian Perusahaan Terbaik Monitoring LKPM	Kali Kali Kali Perusahaan			51.000.000	-	DPMPTSP		
Pemeliharaan dan Pengembangan Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (Database Perizinan)						Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perizinan SMART Pengembangan dan Pemeliharaan Website Pengembangan dan Pemeliharaan Server dan Database Perizinan dan Non Perizinan	Paket Paket Paket			850.000.000	-	DPMPTSP		
						Pengembangan dan Pemeliharaan Integrasi Sistem Aplikasi Perizinan Lembaga Kementrerian dan OPD Terka	Paket							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Mobile Perizinan Berbasis IOS/ Android	Paket						
						Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Perkantoran	Paket						
						Pembuatan Master Plan IT DPMPPTSP Kota Bogor	Paket						
						Belanja Sewa Data Center (Co-Location)	Paket						
Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal						Terlaksananya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat dan Aparatur	4 kali			174.570.000	-	DPMPPTSP	
						Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling	24 kali						
						Tersedianya Video Pelayanan Perizinan di Kota Bogor	1 paket						
						Penyebaran informasi di Media Cetak dan Elektronik	1 paket						
						Tersedianya souvenir sosialisasi	500 buah						
						Tersedianya Bookleat/leaflet	500 buah						
Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal						Workshop Pelayanan Notifikasi Penggunaan TKA	Kali			83.580.000	-	DPMPPTSP	
						Keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat	Kali						
Mall Pelayanan Publik						Belanja Jasa Kebersihan	1 Paket			3.100.000.000	-	DPMPPTSP	
						Belanja Jasa Keamanan	1 Paket						
						Belanja Jasa CS dan FO	1 Paket						
						Belanja Jasa TIK	1 Paket						
						Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	1 Paket						
						Belanja Jasa Sewa	1 Paket						
Perizinan Dalam Angka						Buku Perizinan Dalam Angka	100 Persen			91.390.000	-	DPMPPTSP	
Resertifikasi/Surveillance ISO 9001						Tersedianya Dokumen ISO 9001 : 2015	1 Dokumen			70.000.000	-	DPMPPTSP	
Resertifikasi/Surveillance ISO 27001						Tersedianya Dokumen ISO 27001	1 Dokumen			93.500.000	-	DPMPPTSP	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal						Tersedianya Buku Potensi	1 Paket			50.000.000	-	DPMPPTSP	
<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>										<b>15.701.684.595</b>	-		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>15.701.684.595</b>	-		
<b>KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN</b>										<b>15.701.684.595</b>	-		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>4.969.846.388</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD										4.969.846.388	-	Dispora	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>573.677.707</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Belanja Pegawai Belanja Cetak Penggandaan Pengadaan Mesin Tik Pengadaan Mobil Dinas  Pengadaan Kursi putar sandaran sedang  Pengadaan pendingin ruangan lemari Pendingin Pengadaan Personal Computer Pengadaan laptop/note book Pengadaan Printer inkjet	2 Orang lembar  1 Unit 1 Unit  18 buah  1 unit 1 unit 5 unit 1 unit 5 unit			423.677.707	-	Dispora	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Komputer  Terlaksananya Pemeliharaan Printer Terlaksananya Pemeliharaan Sound System Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat  Terlaksananya Pemeliharaan AC Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan roda tiga Terlaksananya Pemeliharaan CCTV	1 Paket  18 Unit  17 Unit 1 Paket 4 Paket  21 unit 1 unit 1 paket			150.000.000	-	Dispora	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>20.000.000</b>	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Penyusunan Dokumen Renja Secara Tepat Waktu	1	Dokumen			20.000.000	-	Dispora	
						Penyusunan Dokumen LPPD Secara Tepat waktu	1	Dokumen						
						Penyusunan Dokumen LAKIP Secara Tepat Waktu	1	Dokumen						
						Penyusunan Dokumen LKPJ Secara Tepat Waktu	1	Dokumen						
						Penyusunan Dokumen RENSTRA secara Tepat Waktu	1	Dokumen						
<b>KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</b>		<b>Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga</b>	<b>0,45</b>			<b>Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga</b>	<b>0,45</b>	<b>9.253.705.000</b>	<b>-</b>			
				<b>Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan</b>	<b>2,08</b>			<b>Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan</b>	<b>2,08</b>					
				<b>Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)</b>	<b>33,34</b>			<b>Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)</b>	<b>33,34</b>					
				<b>Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun</b>	<b>0</b>			<b>Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun</b>	<b>0</b>					
				<b>Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras</b>	<b>5</b>			<b>Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras</b>	<b>5</b>					
		<b>Meningkatnya kualitas generasi Muda</b>		<b>Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan</b>	<b>20</b>			<b>Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan</b>	<b>20</b>					
				<b>Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)</b>	<b>30 % Menuju KLP</b>			<b>Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)</b>	<b>30 % Menuju KLP</b>					
				<b>jumlah wirausahaan muda pemula</b>	<b>30</b>			<b>jumlah wirausahaan muda pemula</b>	<b>30</b>					
Pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat, Layanan Khusus dan Olahraga Tradisional						Jumlah peserta kegiatan penyelenggaraan Olahraga Masyarakat/senam bersama		36623 orang		305.600.000	-	Dispora		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Jumlah kontingen pelajar Sekolah Dasar yang mengikuti kejuaraan olahraga tradisional Olahraga Rekreasi /Tradisional Jumlah Atlet Kontingen Kota Bogor untuk invitasi Olahraga Rekreasi / Tradisional masyarakat bagi pelajar sekolah dasar Tk. Provinsi Jawa Barat	7 Kontingen							
						Jumlah Atlit kontingenKota Bogor untuk Festival/Pasanggiri Pencak silat Tk. Provinsi Jawa Barat Jumlah Peserta Pelatihan dalam mengikuti kegiatan pelatihan olahraga tradisional	1 kontingen							
						Jumlah Pendata dalam melaksanakan kegiatan pengukuran angka partisipasi masyarakat berolahraga Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam berolahraga di Kota Bogor	1 Kontingen							
Pengukuran Angka Partisipasi dan Angka Kebugaran Masyarakat Olahraga						Jumlah Pendata dalam melaksanakan kegiatan pengukuran angka partisipasi masyarakat berolahraga Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam berolahraga di Kota Bogor	20 Orang			130.876.000		-	Dispora	
Peningkatan SDM Keolahragaan			Kota Bogor			Workshop Peningkatan SDM Keolahragaan Tutor PAUD	45 Persen			156.274.000		-	Dispora	
Kepeloporan Pemuda						Terlaksananya Workshop cara berwirausaha bagi pemuda dan jumlah wira usaha mandiri dan produktif serta terlaksananya seleksi pemuda pelopor	136 Orang			12.550.000		-	Dispora	
Diklat dan Seleksi Paskibra						Terlaksananya Diklat dan Seleksi Paskibra Tingkat Kota Bogor	100 Orang			202.824.000		-	Dispora	
Kreativitas Kepemudaan						Jumlah Pemuda yang berpartisipasi kegiatan PPAN Terlaksananya kegiatan Olahraga untuk Pemuda	68 orang			41.221.000		-	Dispora	
Jambore Kepemudaan						Terlaksananya Jambore Pemuda dan jambore Komunitas	52 TIM			26.160.000		-	Dispora	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan wawasan Kepemudaan						Terlaksananya kegiatan jambore pramuka, mahasiswa, kemah bakti pemuda dan jelajah Kota	150 Orang			24.160.000	-	Dispora	
Peningkatan Peran serta Pemuda Pramuka						Terlaksananya kegiatan dalam mengikuti Jambore Pramuka Mahasiswa, Kemah Bakti pemuda dan Jelajah Kota	250 Orang			18.410.000	-	Dispora	
Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga			Kota Bogor							5.128.000.000	-	Dispora	
Peningkatan sarana Kreativitas Pemuda			Kota Bogor							198.800.000	-	Dispora	
Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga			Kota Bogor							1.118.130.000	-	Dispora	
Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan sarana penunjang lainnya			Kota Bogor			Pengadaan Sepeda	1 Buah			490.700.000	-	Dispora	
						Pengadaan Tenis Meja	96 Buah						
Penyusunan Kajian Sarana Prasarana Kawasan Olahraga di Kota Bogor						Tersusunnya dokumen Kajian Sarpras Olahraga	1 Buku			1.400.000.000		Dispora	
<b>PENINGKATAN OLAHRAGA PRESTASI</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas generasi Muda</b>		<b>Jumlah perolehan medali Tk. Internasional</b>	<b>4</b>			<b>Jumlah perolehan medali Tk. Internasional</b>	<b>4</b>	<b>884.455.500</b>	<b>-</b>		
				<b>Jumlah perolehan medali Tk. Nasional</b>	<b>66</b>			<b>Jumlah perolehan medali Tk. Nasional</b>	<b>66</b>				
				<b>Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar</b>	<b>64</b>			<b>Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar</b>	<b>64</b>				
Event Olahraga Pelajar dan Santri						Jumlah Tim yang mengikuti seleksi dan Pembinaan Piala Walikota Cup Jumlah Cabang Olahraga Yang diikutsertakan dalam POPDA/POPWIL, POSPEDA, POSPEDAWIL dan jumlah medali yang diraih	96 Tim  17 Cabang Olahraga			479.900.000	-	Dispora	
Seleksi Atlit						Jumlah Atlit yang diseleksi	200 Atlit			132.500.000	-	Dispora	
Pembinaan Olahraga Tingkat Pendidikan dasar dan Menengah						Jumlah atlit yang dibina dalam rangka POPWIL dan POPDA	204 Atlit			61.575.500	-	Dispora	
POR PEMDA						Jumlah Atlit ASN Kota Bogor dalam POR PEMDA	10 Cabang Olahraga			180.150.000	-	Dispora	
Pemberian Penghargaan Insan Olahraga Yang Berprestasi			Kota Bogor							30.330.000	-	Dispora	
<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>										<b>7.839.212.880</b>	<b>-</b>		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>6.873.835.430</b>	<b>-</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>										605.356.000	-		
<b>PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF</b>	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi								50.000.000	-		
Pemeliharaan Website						Terlaksananya pengembangan website kepariwisataan	1 Website			50.000.000	-	Disparbud	
Pembangunan Aplikasi Ekonomi kreatif						Terselenggaranya Gebyar Ekonomi Kreatif (Animasi, Kuliner, Komik, desain batik, dll)	1 Kegiatan			-	-		
<b>PENINGKATAN KREATIFITAS DAN DAYA SAING EKONOMI KREATIF</b>	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi								555.356.000	-		
Pelatihan/ Workshop/ Rakor Ekonomi Kreatif						terlaksananya kegiatan pelatihan/workshop pelaku ekonomi kreatif	4 kali			-	-		
Penyusunan database ekonomi kreatif						Tersusunnya Data base ekonomi kreatif	100 %			-	-		
Gebyar Ekonomi Kreatif			Bogor			Kemandirian Pelaku Usaha Kreatif	1 Kegiatan			102.305.000	-	Disparbud	
Pengadaan sarana gedung creative center						Tersedianya Filling cabinet Tersedianya Meja Kantor -UK.1/2 Biro Tersedianya Kursi Putar Sandaran Rendah Tersedianya Kursi Susun Futura Tersedianya Kursi Tamu /Sice-Sofa Tersedianya PC all in one Tersedianya Computer editing Tersedianya Printer Multifungsi Tersedianya Prntab Wacom Cintiq 13 HD Tersedianya Stabilizer-Merk Matsunaga 150(1000 VA)	10 Unit 11 Buah 1 Buah 100 Buah 2 Set 10 Unit 2 Unit 12 unit 2 Unit 12 Unit		384.206.000	-	Disparbud		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersedianya UPS	12 Unit						
Pameran Ekonomi Kreatif						Terlaksananya Pameran Didalam dan Diluar Daerah	1 Kegiatan			68.845.000	-	Disparbud	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Ekonomi Kreatif						Terlaksananya Sosialisasi HAKI untuk Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan			-	-		
<b>KEBUDAYAAN</b>										<b>6.268.479.430</b>	-		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>2.032.912.830</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Terpenuhinya Sarana dan Prasarana operasional PD (ATK, Dokumen, Fotocopy, Penjilidan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Listrik dan Elektronik, Alat Kebersihan dan bahan pembersih, tabung gas, biaya cetak, biaya penggandaan, biaya mamin)	100 %			2.032.912.830	-	Disparbud	
						Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	1 paket						
						Pengadaan Jasa Keamanan Kantor	1 paket						
						Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Air, Surat kabar)	12 bulan						
						Terlaksananya Perjalanan Dinas	1 paket						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.858.218.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Tersedianya Mobil Dinas	1 unit			983.400.000	-	Disparbud	
						Tersedianya Lemari Arsip/ Roll Pact	3 unit						
						Tersedianya Filling Kabinet	15 unit						
						Tersedianya Kursi Tamu/sice - Sofa	7 set						
						Tersedianya Kursi Susun	50 bh						
						Tersedianya Smart TV	1 unit						
						Tersedianya Komputer Editing	2 unit						
						Tersedianya Infocus/ Proyektor	1 unit						
						Tersedianya Lensa	1 unit						
						Tersedianya Camcoder	1 unit						
						Tersedianya Tripod Camera	1 unit						
						Tersedianya Mic Conference System	2 unit						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						terpeliharanya kendaraan mobil rush 1 unit terpeliharanya kendaraan nissan navara 1 unit	3 kali 3 kali			874.818.000	-	Disparbud	
						terpeliharanya kendaraan avanza 1 unit terpeliharanya kendaraan toyota kijang 1 unit terpeliharanya mesin fax 1 unit terpeliharanya mesin tik 2 unit terpeliharanya ac disparbud 18 unit terpeliharanya camera 3 unit terpeliharanya soundsytem 2 unit terpeliharanya Filingkabinet 5 unit terpeliharanya printer 28 unit terpeliharanya komputer 28 unit terpeliharanya laptop 3 unit terpeliharanya ac Floor standing 5 PK gedung kemuning gading 10 unit terpeliharanya instalasi listrik dan tlp gedung kantor disparbud terpeliharanya gedung kantor disparbud terpeliharanya gedung kemuning gading	3 kali 3 kali 1 kali 10 kali 3 kali 3 kali 2 kali 5 kali 28 kali 28 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali						
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>20.000.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor			Tersedianya Buku Renstra  Tersedianya Buku Renja  Tersedianya Buku LKIP  Tersedianya Buku LKPJ	1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen			20.000.000	-	Disparbud	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tersedianya Buku LPPD	1 Dokumen						
<b>PENGLOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas generasi muda</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah pelaku seni/budaya</b>	<b>10</b>			<b>Persentase peningkatan jumlah pelaku seni/budaya</b>	<b>10</b>	<b>2.357.348.600</b>	<b>-</b>		
				<b>jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasanggiri /Lomba/Sayembara Karyaseni</b>	<b>15</b>			<b>jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasanggiri /Lomba/Sayembara Karyaseni</b>	<b>15</b>				
				<b>Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda</b>	<b>150</b>			<b>Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda</b>	<b>150</b>				
				<b>Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya</b>	<b>2</b>			<b>Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya</b>	<b>2</b>				
Pelestarian Seni Tradisi						Terselenggaranya atraksi seni tradisi	6 Kali			474.870.000	-	Disparbud	
						Terselenggaranya Pasanggiri Sen Tradisi Tingkat Kota dan Jawa Barat	7 kali						
						Terselenggaranya Workshop/pelatihan Seni Tradisi	1 kali						
Sosialisasi Sastra, bahasa dan aksara sunda						Terlaksananya Workshop Bahasa sunda	100 Orang			70.377.000	-	Disparbud	
						Terlaksananya Sosialisasi Penulisan Aksara Sunda	100 Orang						
						Terlaksananya Rempug Bahasa serta Aksara Sunda	100 Orang						
						Terlaksananya Lomba Dongeng Bahasa Sunda	1 kali						
						Terlaksananya Lomba Pidato Bahasa sunda	1 kali						
						Terlaksananya Lomba Sajak Bahasa sunda	1 Kali						
						Terlaksananya Lomba Pupuh Sunda	1 Kali						
Bantuan Peralatan Kesenian			Kota Bogor			Tersediannya Alat Musik Gamelan Kuningan	1 Set			88.000.000	-	Disparbud	
						Tersediannya Alat Musik Marawis	6 Set						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pagelaran, Workshop Pengembangan SDM dan Kelembagaan Seni						Presentase Peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	10 Persen			1.121.426.000	-	Disparbud	
Festival/ Lomba Seni						Pameran Seni rupa	1 Kali			-	-		
Helaran seni budaya dan Mobil hias dalam rangka HJB						Pameran Seni rupa Terselenggaranya Pagelaran Helaran Seni Budaya	1 Kali			-	-		
Pelestarian Nilai Sejarah Budaya dan Tradisional						Jumlah Naskah Inventarisasi Komunitas Budaya Cetak Buku Sejarah Bogor Cetak Buku Kaulinan Urang Lembur Worshop Kaulinan Urang Lembur Lomba Kaulinan Urang Lembur	12 Data 400 Buku 350 Buku 1 Kali 1 Kali			200.667.000	-	Disparbud	
Penyusunan Buku 300 karakter wayang						Jumlah Buku Sejarah yang disusun dan ditulis (300 karakter wayang)	400 Buku			-	-		
Revitalisasi Museum						sertifikasi meseum perjuangan	1 kali			-	-		
Penataan Situs Cagar Budaya						terpenuhinya sarana dan prasarana situs batu tulis	1 dokumen			-	-		
Optimalisasi Situs dan BCB menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata						situs dan cagar budaya terpelihara map cagar budaya sosialisasi cagar budaya ke sekolah pembuatan papan nama cagar budaya masyarakat luas	24 buah 1500 eksemplar 15 kali 6 kali 1 kali			264.783.600	-	Disparbud	
Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia										40.000.000	-	Disparbud	
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesenian			Kota Bogor			Terselenggaranya Pemanfaatan Gedung Kesenian Terselenggaranya Pemanfaatan Ruang Publik	3 kali 3 kali			97.225.000	-	Disparbud	
<b>URUSAN PILIHAN</b>										<b>965.377.450</b>	-		
<b>PARIWISATA</b>										<b>965.377.450</b>	-		
<b>PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Jumlah kunjungan wisatawan</b>	<b>7.004.033</b>			<b>Jumlah kunjungan wisatawan</b>	<b>7.004.033</b>	<b>965.377.450</b>	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kemitraan Kompepar						Terlaksananya Pembinaan Kompepar	1 kali			37.250.000	-	Disparbud	
						terlasannya Sosialisasi Sadar Wisata	1 kali						
Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata						Seminar SDM Pariwisata	1 kali			67.600.000	-	Disparbud	
						Workshop SDM Pariwisata	1 kali						
Promosi Pariwisata						Terselenggaranya Pameran Luar Daerah	5 kali			336.200.000	-	Disparbud	
						Terselenggaranya Travel exchange	1 kali						
Bahan Promosi Pariwisata						Tersedianya Paket Bahan Promosi	1 paket			-	-		
						Tersedianya Majalah Pariwisata	12 paket						
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah						Terlaksananya Lomba Poto Obyek Wisata	1 kali			162.280.000	-	Disparbud	
						Tersedianya Peta Wisata	6 buah						
						Tersedianya Papan Petunjuk Obyek Wisata	6 buah						
Event Pariwisata						Terlaksananya Istana Untuk Rakyat	1 kali			285.750.000	-	Disparbud	
						Terlaksananya Pasanggiri Mojang dan Jajaka Kota Bogor	1 kali						
						Mengikuti Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Provinsi Jawa Barat	1 kali						
						Terlaksananya Dekorasi Underpass	6 kali						
Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata Lanjutan						Data potensi pariwisata dan sarana pariwisata di kota Bogor yang telah dimutakhirkan	2 kali			76.297.450	-	Disparbud	
Anugerah bagi pelaku usaha kepariwisataan						Terselenggaranya anugrah bagi pelaku jasa pariwisata	1 kali			-	-		
<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b>										<b>9.876.748.585</b>	<b>4.717.000.000</b>		
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>9.876.748.585</b>	<b>4.717.000.000</b>		
<b>KEARSIPAN</b>										<b>9.876.748.585</b>	<b>4.717.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.575.898.600</b>	<b>-</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Terpenuhinya kebutuhan dasar organisasi pada Diskarpus selama 12 Bulan	12 Bulan			1.575.898.600	-	Diskarpus	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.400.000.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Terpenuhinya sarana dan prasarana inventaris kantor di Lingkungan Diskarpus	60 Persen			600.000.000	-	Diskarpus	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Terpeliharanya sarana dan prasarana inventaris kantor Diskarpus	60 Persen			800.000.000	-	Diskarpus	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>10.000.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	80 Bulan			5.000.000	-	Diskarpus	
Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial						Jumlah Berkas Pengajuan Hibah/Bansos	0 Proposal			5.000.000	-	Diskarpus	
<b>PENINGKATAN SADAR TERTIB ARSIP</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>PersentasePD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%)</b>	<b>17</b>			<b>PersentasePD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%)</b>	<b>17</b>	<b>248.680.000</b>	<b>100.000.000</b>		
Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan						Jumlah Kegiatan Workshop Aplikasi kearsipan Jumlah Peserta Workshop Aplikasi Kearsipan	1 Kegiatan 100 Orang			3.500.000	-	Diskarpus	
Pemeliharaan Arsip Dinamis, Arsip Vital, Arsip Terjaga, dan Alih Media										59.625.000	-	Diskarpus	
Penyusunan/penyempurnaan NSPK Kearsipan						Jumlah Dokumen NSPK Kearsipan yang ditertibkan	5 Dokumen			5.100.000	-	Diskarpus	
Edukasi Sadar Tertib Arsip kepada Eselon III, dan IV						jumlah Peserta Edukasi Sadar Tertib Arsip Kepada Eselon III dan IV	200 orang			23.875.000	-	Diskarpus	
Pembinaan dan Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal			Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Bogor			Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan kearsipan  Jumlah Peserta Bimtek Pengawasan Kearsipan Internal	20 PD dan Unit Kerja  20 PD dan Unit Kerja			26.630.000	100.000.000	Diskarpus	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penataan Arsip Tidak Teratur pada PD/Unit Kerja yang belum dientry ke dalam aplikasi kearsipan						Menghasilkan Database Arsip Inaktif	27000 Data			129.950.000	-	Diskarpus	
						Menghasilkan Data Keterangan Arsip ( Permanen, Musnah dan Dinilai Kembali)	27000 Data						
						Menghasilkan Database Arsip Permanen dalam Media Elektronik (Digital) hasil alihmedia arsip dalam bentuk JPG	8750 Data						
						Menghasilkan Database Arsip Permanen dalam Media Elektronik (Digital) hasil alihmedia arsip dalam bentuk PDF	8750 Data						
						Tertatanya Arsip dalam Box berdasarkan berkas atau klasifikasi dan Perangkat Daerah	100 Bok						
<b>PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan</b>	<b>100</b>			<b>Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan</b>	<b>100</b>	<b>61.000.000</b>	-		
Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis						Akuisisi dan Pengolahan Jumlah Arsip Statis	500			26.500.000	-	Diskarpus	
Preservasi, Akses Arsip Statis dan Layanan Pengguna Arsip						Tersedianya Sarana Prasarana Pemeliharaan Arsip	1 paket			34.500.000	-	Diskarpus	
<b>PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas generasi muda</b>		<b>Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/taman bacaan</b>	<b>35</b>			<b>Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/taman bacaan</b>	<b>35</b>	<b>179.112.000</b>	<b>175.000.000</b>		
Pelayanan Perpustakaan Umum dan Keliling			Perpustakaan Kota Bogor			Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling	180 Titik Layanan			68.801.000	75.000.000	Diskarpus	
Workshop Aplikasi Perpustakaan						Jumlah Perpustakaan yang menggunakan aplikasi perpustakaan	100 Perpustakaan			27.650.000	-	Diskarpus	
Wisata Pustaka Loka			Perpustakaan Kota Bogor			Wisata Pustakaloka	9 Kali			25.100.000	35.000.000	Diskarpus	
						Pengunjung Perpustakaan	4000 Orang						
Edukasi, Promosi, Layanan Pemustaka dan Sirkulasi			Perpustakaan Kota Bogor			Jumlah Anggota Pemustaka	6000 Orang			19.301.000	45.000.000	Diskarpus	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Jumlah Transaksi Sirkulasi Jumlah Peminjam	5000 Buku 2500 Orang							
Pengembangan Sistem Aplikasi Perpustakaan			Perpustakaan Umum Kota Bogor			Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Di Perpustakaan Umum	2 Paket			15.260.000	20.000.000	Diskarpus		
Pembinaan dan Kerjasama dengan Mitra Perpustakaan, Bedah Buku, Story Telling, dan Lomba Perpustakaan						Story Telling  Bedah Buku  Lomba Bercerita Tingkat SD se Kota Bogor Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Kota Bogor	2 Kegiatan  2 Kegiatan  1 Kegiatan  1 Kegiatan			23.000.000	-	Diskarpus		
<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya kualitas generasi muda</b>		<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota</b>	<b>60</b>			<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota</b>	<b>60</b>	<b>6.402.057.985</b>	<b>4.442.000.000</b>			
Penyediaan Bahan Pustaka			Perpustakaan Kota Bogor			Jumlah Koleksi Perpustakaan	8 Paket			178.187.400	250.000.000	Diskarpus		
Revitalisasi gedung Eks DPRD menjadi Perpustakaan Umum Kota Bogor			Perpustakaan Kota Bogor			Design Interior Galery, Ruang Kerja, Ruang Baca dan Meubeler	1 Paket			6.218.870.585	4.180.000.000	Diskarpus		
Pelestarian Bahan Perpustakaan			Perpustakaan Kota Bogor			Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan Yang Dipelihara	10 Bundel			5.000.000	12.000.000	Diskarpus		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										-	-			
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>										-	-			
<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								-	-			
Pembinaan Pelayanan Publik						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kearsipan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap layanan Perpustakaan	0 Persen  0 Persen			-	-			
<b>DINAS PERTANIAN</b>										<b>7.912.209.000</b>	<b>12.859.900.000</b>			
<b>URUSAN PILIHAN PERTANIAN</b>										<b>7.785.882.000</b>	<b>12.509.900.000</b>			
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>2.232.973.550</b>	<b>2.500.000.000</b>			

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Kota Bogor			Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	12 bulan			2.232.973.550	2.500.000.000	Distani	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.175.300.000</b>	<b>4.000.000.000</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor			Kota Bogor			Terpenuhinya barang-barang inventaris kantor	12 bulan			637.900.000	2.000.000.000	Distani	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kota Bogor			Terpeliharanya gedung, kendaraan bermotor dan perlengkapan kantor	12 bulan			537.400.000	2.000.000.000	Distani	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kota Bogor			Tersusunnya Dokumen LKIP	1 dokumen			10.000.000	20.000.000	Distani	
						Tersusunnya Dokumen LKPJ	1 dokumen						
						Tersusunnya Dokumen Renja	1 dokumen						
						Tersusunnya Dokumen LPPD	1 dokumen						
						Tersusunnya Laporan Realisasi Bulanan	12 laporan						
						Tersusunnya Laporan Realisasi Triwulan	4 laporan						
<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN ZOONOSIS DAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI SESUAI DENGAN KRITERIA AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat</b>		<b>Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun</b>	<b>3</b>			<b>Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun</b>	<b>3</b>	<b>402.473.000</b>	<b>820.000.000</b>		
				<b>Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar</b>	<b>22</b>			<b>Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar</b>	<b>22</b>				
Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis			Kota Bogor			Terlaksananya Vaksinasi dan Infestasi Endoparasit dan Ektoparasit	12 bulan			171.842.000	450.000.000	Distani	
						Terlaksananya biosecurity (Desinfeksi Kandang dan Lingkungan)	1 kegiatan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Bimtek Surveilans dan Tindakan Respon Penyakit Hewan Menular Zonosis Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Terlaksananya Bursa Hewan Qurban	2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan						
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)			Kota Bogor			Terlaksananya Pemeriksaan, Pengawasan, Monitoring, Surveillance Residu dan cemaran mikroorganisme pada produk peternakan  Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan Dan Daging Hewan Qurban  Terlaksananya Sosialisasi Tata Cara Pemotongan Hewan Qurban 1441 H Terlaksananya Sosialisasi Higiene dan Sanitasi Pelaku Usaha Bahan Pangan Asal Hewan Uji Sampel bahan pangan asal hewan	3 kegiatan  2 hari  1 kegiatan 1 kegiatan 640 sampel			230.631.000	370.000.000	Distansi	
<b>PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya Ketahanan Keluarga</b>		<b>Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	<b>4</b>			<b>Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	<b>4</b>	<b>3.965.135.450</b>	<b>5.169.900.000</b>		
				<b>Persentase peningkatan produksi peternakan</b>	<b>2</b>			<b>Persentase peningkatan produksi peternakan</b>	<b>2</b>				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			Kota Bogor			Pemeliharaan jaringan irigasi Penyediaan pupuk Workshop Pembiayaan Kredit Usaha Tani Pelatihan operator alsintan dan service center Pelatihan pemupukan berimbang	2 kelompok 355 hektar 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan			374.605.000	545.900.000	Distansi	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pemeliharaan dan penyediaan sarana green house dan UPJA  Kajian Potensi Dan Ketersediaan lahan untuk mendukung ketahanan pangan uji kesuburan tanah dan kualitas pupuk Monitoring dan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk (KP3) Pembiayaan Asuransi Usaha Tani padi (AUTP)	1 unit  1 dokumen 3 sampel 4 kegiatan 100 Ha						
Peningkatan Penyuluhan Pertanian			Kota Bogor			Pembuatan demplot pertanian Brosur/leaflet Pembuatan kebun contoh Mengikuti jambore penyuluh  Pelatihan bagi petani  Pelatihan bagi penyuluh  Mengikuti Pekan Nasional Pertanian (PENAS)	1 Unit 4 Rim 3 Unit 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan			180.939.600	500.000.000	Distansi	
Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			Kota Bogor			Penyediaan benih padi unggul berlabel pelatihan penggunaan benih padi berlabel  Penyediaan benih palawija unggul berlabel Pelatihan penggunaan benih palawija unggul berlabel  Penyediaan benih sayuran unggul Pelatihan penggunaan benih sayuran unggul  pembibitan hasil kultur jaringan Pembibitan Hortikultura Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ( OPT)  Pelatihan brigade proteksi tanaman	50 Ha 1 kegiatan 5 Ha 1 kegiatan 300 Ha 1 kegiatan 1500 pohon 2000 pohon 44 Ha 2 kegiatan			281.391.250	450.000.000	Distansi	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Produksi Peternakan			Kota Bogor			Pelatihan Budidaya Ruminansia dan Unggas	1 kegiatan			180.176.000	360.000.000	Distani	
						Inseminasi Buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb)	12 bulan						
						Budidaya pakan hijauan ternak dan pakan unggas	2 Kegiatan						
						Pengawasan produksi peternakan	12 bulan						
						Budidaya ruminansia dan unggas	2 kegiatan						
Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)			RPH Dinas Pertanian Kota Bogor			Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Potong Hewan	822960 ekor			652.864.000	800.000.000	Distani	
						Terlaksananya Audit ISO 9001-2015 di RPH	1 paket						
						Tersedia Alat Tulis Kantor	1 paket						
						Tersedianya Alat Listrik	1 paket						
						Tersedianya Alat Kebersihan	1 paket						
						Tersedianya Obat-Obatan Ternak	1 paket						
						Tersedianya Bahan Kimia Untuk Pengolahan Limbah	1 paket						
						Tersedianya Perlengkapan Kerja	1 paket						
						Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	1 paket						
						Terlaksananya Perpanjangan Sertifikat Halal Rumah Potong Hewan	2 paket						
						Terlaksananya Pemeliharaan IPAL dan Alat RPH	2 paket						
						Terlaksananya Pemeliharaan Genset, Pompa Air Timbangan dan Roda Scrudle	4 paket						
						Tersedianya Barang Cetak (SKKH, SKKD dan PIN Sehat)	1 jenis						
						Tersedianya Laporan Monitoring RKL, RPL dan AMDAL RPH	2 paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Renovasi UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu Kota Bogor			RPH Dinas Pertanian Kota Bogor			Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD RPH Terpadu Yang Optimal	1 Paket			1.947.000.000	1.759.000.000	Distansi	
<b>PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>										<b>474.486.600</b>	<b>1.105.000.000</b>		
<b>PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya ketahanan keluarga</b>		<b>Persentase peningkatan produksi perikanan</b>	<b>3</b>			<b>Persentase peningkatan produksi perikanan</b>	<b>3</b>	<b>348.159.600</b>	<b>755.000.000</b>		
Pengembangan Potensi Sumberdaya Perikanan			Kota Bogor			Pelatihan budidaya perikanan Pembuatan dempond Uji sampel air budidaya ikan Pelatihan pembuatan pakan ikan alternatif/alami	2 kegiatan 6 lokasi 20 sampel 2 kegiatan			136.527.800	375.000.000	Distansi	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan			Kota Bogor			Pembenihan Ikan Konsumsi di Balai Benih Ikan (BBI) dan Holding Ground Pembenihan Ikan Hias di Holding Ground Uji sampel mutu pakan ikan	12 Bulan 12 Bulan 12 Sampel			211.631.800	380.000.000	Distansi	
<b>PENINGKATAN KONSUMSI PRODUK PERIKANAN</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya ketahanan keluarga</b>		<b>Tingkat konsumsi ikan</b>	<b>29,37</b>			<b>Tingkat konsumsi ikan</b>	<b>29,37</b>	<b>126.327.000</b>	<b>350.000.000</b>		
Pengembangan Produk Hasil Perikanan			Kota Bogor			Bimtek Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan Pelatihan SSOP dan GMP Safari Gemarikan Sosialisasi Penanganan Mutu Ikan Segar	2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan			126.327.000	350.000.000	Distansi	
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>										<b>9.693.761.000</b>	-		
<b>URUSAN PILIHAN</b>										<b>9.693.761.000</b>	-		
<b>PERINDUSTRIAN</b>										<b>4.750.487.000</b>	-		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>2.676.141.000</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Kota Bogor			Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan Dekorasi dan Desain/ Eksterior	44 jenis 8 jenis 14 jenis 1 jenis 3 jenis			2.676.141.000	-	Disperindag	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Belanja Plakat Belanja Jasa Kantor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai  Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Tamu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 jenis 4 jenis 1 jenis  3 jenis 14 jenis 1 Jenis 1 Jenis  2 Jenis 1 Jenis 1 Jenis						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.250.000.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor			Kota Bogor			Terlaksananya Sarana Inventaris Kantor yang terpelihara (AC, Mesin Kemasan, Komputer, Peralatan Komputer, Komputer, Laptop, Printer, Mesin Fotocopy, Camera Digital dll)	80 Persen			600.000.000	-	Disperindag	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kota Bogor			Belanja Jasa Service Roda 4 Belanja Pengantian Suku Belanja Pengganti Ban Mobil Ganti Oli Gardan dan Perseneling Ganti Oli Mesin Service AC  Service Komputer, Printer, Laptop, Infocus  Belanja Pemeliharaan papan Informasi Harga  Belanja Jasa dan Pemeliharaan Gedung	1 Paket 1 Paket 28 Buah 12 kali 12 kali 12 Paket  1 Paket  1 Paket  3 gedung			650.000.000	-	Disperindag	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>20.261.000</b>	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kota Bogor			Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Peringkat Daerah (RENJA, LPPD, LKPJ dan LKIP)	5 Dokumen			20.261.000	-	Disperindag	
Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			Kota Bogor			Terlaksananya Hasil Verifikasi dan Monitoring Evaluasi serta Pengelolaan Bansos	50 Persen			-	-		
<b>PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>Penguatan Daa Saing Ekonomi daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM</b>	<b>20</b>			<b>Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM</b>	<b>20</b>	<b>754.085.000</b>	-		
				<b>Persentase IKM yang produktif</b>	<b>2</b>			<b>Persentase IKM yang produktif</b>	<b>2</b>				
Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)			Kota Bogor			Terlaksananya Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)	78 IKM			100.000.000	-	Disperindag	
Peningkatan daya saing produk IKM			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor 1. Jalan Ciremai Ujung Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara; dan 2. Jalan Dadali No. 4 Kel. Tanahsareal Kec. Tanahsareal.			Terlaksananya Pembinaan Achivement Motivation Training (AMT) bagi IKM	50 IKM			177.000.000	-	Disperindag	
						Meningkatnya Daya Saing Mutu Produk IKM	200 IKM						
						Terlaksananya Pengolahan Produk IKM Makanan dan Minuman	100 IKM						
Pemberdayaan Rumah Kemasan			Kota Bogor			Terlaksananya Peningkatan Kemasan Pangan Lomba Desain Kemasan Hasil Pangan TInggkat Pelajar Kota Bogor	70 IKM 100 Pelajar			200.000.000	-	Disperindag	
						Terlaksananya Desain Kemasan bagi TP-PKK Kota Bogor Tersedianya Peralatan Rumah Kemasan	100 Anggota TP-PKK 11 Alat						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kiat Membuka Usaha Baru (WUB)			Kota Bogor			Terlaksananya Kiat Mengembangkan Usaha Baru	100 Wirausaha Baru			75.000.000	-	Disperindag	
Penerapan Sertifikasi Industri			Kota Bogor			Terdaftarnya Sertifikat HKI Produk IKM	0 IKM			202.085.000	-	Disperindag	
						Terlaksananya bantuan Sertifikasi Halal	0 IKM						
						Terlaksananya Sertifikasi SNI Produk IKM	0 IKM						
Peningkatan Produktivitas IKM			Kota Bogor			Terlaksananya Penghitungan harga Pokok Penjualan Produk IKM	50 IKM			-	-		
						Terlaksananya Pengolahan Administarsi Usaha IKM	50 IKM						
						Meningkatnya Produktivitas IKM Melalui Penerapan E-smart	40 IKM						
						Terlaksananya Penerapan Barcode bagi Produk IKM	20 IKM						
<b>PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)</b>		<b>Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya</b>	<b>2,5</b>			<b>Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya</b>	<b>2,5</b>	<b>50.000.000</b>	<b>-</b>		
Penerapan dan pengembangan teknologi			Kota Bogor			Terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Bagi IKM	1 IKM			50.000.000	-	Disperindag	
						Terlaksananya Gelar TTG Bagi IKM	1 IKM						
						Terlaksananya Bantuan Mesin Peralatan	1 IKM						
						Terlaksananya Pendampingan Penerapan Penggunaan Teknologi Bantuan Peralatan	100 persen						
<b>PERDAGANGAN</b>										<b>4.943.274.000</b>	<b>-</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran</b>	5			<b>Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran</b>	5	2.225.000.000	-		
				<b>Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)</b>	≤ 3,6 %			<b>Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)</b>	≤ 3,6 %				
Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP			6 Kecamatan dan 8 Pasar Kota Bogor			Terjaganya akurasi alat UTTP di Kota Bogor	5 %			50.000.000	-	Disperindag	
Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium dan Pemeliharaan			Kota Bogor			Terlaksananya pengujian alat UTTP	5 %			150.000.000	-	Disperindag	
						Terpeliharanya alat UTTP	5 %						
Tertib Niaga di Bidang Perdagangan			Kota Bogor			Terlaksananya pendataan dan pembinaan perdagangan BBM, pupuk bersubsidi dan barang berbahaya	60 persen			60.000.000	-	Disperindag	
						Meningkatnya pemahaman tentang metrologi	60 persen						
						Terlaksananya pembinaan tentang aturan tertib niaga di bidang perdagangan	80 orang						
Pengendalian /Pengawasan BDKT pada IKM			Kota Bogor			Terlaksananya pengendalian dan pengawasan BDKT pada IKM	70 persen			150.000.000	-	Disperindag	
						Terlaksananya pengendalian alat UTTP di Kota Bogor	70 persen						
						Terlaksananya pembinaan ketentuan kebijakan pengawasan	80 orang						
Kajian potensi data pengguna UTTP layanan kesehatan			Kota Bogor			Tersedianya dokumen kajian data pengguna UTTP layanan kesehatan	1 dokumen			100.000.000	-	Disperindag	
Pembangunan / Revitalisasi Gedung Tangki Ukur Mobil (TUM) dan Perlengkapannya			Jl. KH. Sholeh Iskandar			Tersedianya gedung tanki ukur mobil di Kota Bogor	100 persen			1.600.000.000	-	Disperindag	
Pendataan dan Ukur Ulang SPBU dan Gas LPG			Kota Bogor			Terlaksananya pendataan dan akurasi ukuran di SPBU	70 persen			115.000.000	-	Disperindag	
						Terlaksananya pemutakhiran data agen maupun pangkalan GAS LPG	70 persen						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran</b>	<b>5,59</b>			<b>Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran</b>	<b>5,59</b>	<b>2.018.374.000</b>	-		
Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN)			Kota Bogor			- Tersedianya Video Profil dan Videotron P2DN	1 kali			186.445.000	-	Disperindag	
						Tersedianya buku kajian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Bogor	1 kali						
						Terselenggaranya pembinaan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 kali						
Penyusunan data base jasa bidang perdagangan			Kota Bogor			Tersedianya database jasa di bidang perdagangan 2 (dua) Kecamatan	1 paket			100.000.000	-	Disperindag	
						Buku Pemutakhiran data perdagangan jasa	40 buku						
Pemantauan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya			Kota Bogor			Terpantaunya harga 34 jenis kebutuhan pokok masyarakat di Kota Bogor	12 Bulan			150.000.000	-	Disperindag	
						Terpantaunya harga 7 jenis barang penting lainnya di Kota Bogor	12 Bulan						
Operasi Pasar Murah KEPOKMAS			Kota Bogor			Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat menengah kebawah	30			-	-		
						Terlaksananya Operasi Pasar Murah OPM	100						
Kajian Pembuatan Raperda Pasar Rakyat			Kota Bogor			Tersedianya Kajian Dokumen Raperda	1 Dokumen			-	-		
Pembuatan Aplikasi E-Pasar			Kota Bogor			Tersedianya Database Pasar	1 Aplikasi			200.000.000	-	Disperindag	
Coacing Clinic Pengembangan Usaha Waralaba bagi IKM			Kota Bogor			Terselenggaranya Coaching Clinic Pengembangan Usaha Waralaba bagi IKM	12 IKM			100.000.000	-	Disperindag	
						Terselenggaranya pembinaan kebijakan waralaba di Kota Bogor	1 kali						
						Terselenggaranya partisipasi pameran waralaba tingkat nasional	1 kali						
Master Plan/DED Pasar Rakyat			Kota Bogor			Tersedianya Dokumen Masterplan Pasar Rakyat dikota Bogor	1 Dokumen			-	-		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kajian Penentuan Harga Operasi Pasar Murah (OPM)			Kota Bogor			Akurasi dalam penentuan besaran subsidi kebutuhan pokok Masyarakat	100%			-	-		
Pengembangan Pelaku Usaha TPMSE/E-Commerce di Kota Bogor			Kota Bogor			Tersedianya data pelaku usaha TPMSE/E-Commerce di 5 Kecamatan Kota Bogor  Terlaksananya pembinaan kebijakan TPMSE Terselenggaranya pemasaran galeri IKM melalui MEdia Onlien Terselenggaranya temu bisnis digital marketing  Terselenggaranya pendampingan fasilitator pengembangan e-commerce/TPMSE melalui branding, desain dan marketing	100 buku  1 kali 2 galeri 1 kali 1 kali			200.000.000	-	Disperindag	
Pengelolaan Gudang dan Distribusi			Kota Bogor			Tersedianya database pelaku usaha distribusi barang kebutuhan masyarakat  Tersedianya dokumen kajian (FS)Gudang	1 Aplikasi  1 dokumen			150.000.000	-	Disperindag	
Promosi Produk Kota Bogor ke Pasar Dalam Negeri			Kota Bogor			Partisipasi pada pameran perdagangan skala nasional  Partisipasi pada pameran perdagangan skala regional  Terlaksananya pembangunan desain interior Galery IKM	1 kali  2 kali 1 kali			184.425.000	-	Disperindag	
Peningkatan Kemitraan Perdagangan antara Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan Pelaku Usaha Besar dan Menengah			Kota Bogor			- Terlaksananya sosialisasi temu usaha  - Tersedianya laporan perkembangan kemitraan antara IKM dengan Toko Swalayan	80 IKM  15 Buku			11.100.000	-	Disperindag	
Peningkatan Kinerja Dekranasda Kota Bogor			Kota Bogor			Pameran yang diikuti Dekranasda Kota Bogor (Skala Regional dan Nasional) Pameran pelatihan naik panggung bagi seluruh Pengrajin Kota Bogor	2 kali  25 buku			736.304.000	-	Disperindag	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Sarana Promosi Kerajinan Binaan Dekranasda Kota Bogor	2 Paket							
						Updating Data Website Dekranasda 1 Tahun	1 Tahun							
<b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor</b>	<b>1,1</b>			<b>Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor</b>	<b>1,1</b>	<b>700.000.000</b>	<b>-</b>			
Promosi Produk Berorientasi Ekspor			Kota Bogor			Partisipasi Pada pameran internasional di Dalam Negeri	2 Kali			350.000.000	-	Disperindag		
						Partisipasi Pada pameran di Luar Negeri	1 kali							
						Tersedianya Katalog Produk Potensial Ekspor Kota Bogor	300 Buku							
Peningkatan Sumber Daya Manusia IKM di Bidang Ekspor			Kota Bogor			Terlaksananya Pelatihan Ekspor	2 Kali			100.000.000	-	Disperindag		
						Terselenggaranya Temu Bisnis Ekspor / Calon Eksporir dengan Atase Perdagangan / IPTC	1 kali							
						Terselenggaranya Konsultasi Ekspor bagi IKM dengan FTA	1 Kali							
						Tersedianya data realisasi ekspor Kota Bogor	1 Data							
Peningkatan Produk Berorientasi Ekspor			Kota Bogor			Terciptanya Produk Kerajinan Berorientasi Ekspor	2 IKM			250.000.000	-	Disperindag		
						Terselenggaranya Rebranding Produk Berorientasi Ekspor	2 IKM							
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										<b>61.275.276.500</b>	<b>67.013.052.134</b>			
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>7.718.357.000</b>	<b>10.123.519.334</b>			
<b>SOSIAL</b>										<b>7.718.357.000</b>	<b>10.123.519.334</b>			
<b>PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat</b>		<b>Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan</b>	<b>50</b>			<b>Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan</b>	<b>50</b>	<b>7.718.357.000</b>	<b>10.123.519.334</b>			
Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor						Terfasilitasinya Kemakmuran Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya Petugas Kebersihan	6 org			330.000.000	363.000.000	Bag. Adkesra		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya Pengajian Rutin di Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan Pemberdayaan para Ulama yang ada di Kota Bogor sebagai Pengisi Acara (Ceramah dan Imam Subuh)	50 Kali							
						Terlaksananya Ibadah Shalat Jum'at di Masjid At-Taqwa BalaiKota Bogor	52 kali							
						Terfasilitasi Keamanan Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor dengan tersedianya Petugas Keamanan	2 Org							
Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang tidak Memiliki Pekerjaan Tetap						Tersalurkannya Insentif Guru Ngaji yang tidak memiliki pekerjaan tetap	2600 Orang			3.370.000.000	5.120.000.000	Bag. Adkesra		
Peningkatan Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Lainnya			Kota Bogor			Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Sehat Tingkat Kota	100 Orang			355.000.000	422.719.550	Bag. Adkesra		
						Terlaksananya Pembinaan terhadap Kelembagaan Sosial, dan Kemasyarakatan di Kota Bogor	50 Lembaga							
Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)						Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bogor	1 Kali			1.430.468.500	1.610.849.284	Bag. Adkesra		
						Terpilihnya Qori-Qoriah Terbaik MTQ Tk. Kota Bogor	44 Org							
						Terlaksana dan terfasilitasinya pembinaan dan pengiriman Qori/Qori'ah Kota Bogor untuk mengikuti MTQ Jawa Barat	44 Org							
Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji						Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji (pemberangkatan dan Pemulangan) di Kota Bogor	1 Kali			625.000.000	687.195.300	Bag. Adkesra		
Pembinaan Lembaga Keagamaan Kegerejawian			Kota Bogor			Terlaksananya Workshop kebangsaan bagi Pemuda Gereja	1 Kali			210.000.000	230.601.800	Bag. Adkesra		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksana dan Terfasilitasinya Pelaksanaan Lomba Pesparawi Tingkat Kota Bogor	1 Kali						
Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos terhadap Lembaga Kemasyarakatan. (Pokmas, LPM, RW, dan RT), dan juga unsur pemerintahan (kelurahan dan kecamatan)						Terlaksananya sosialisasi tentang proses hibah/bansos terhadap lembaga kemasyarakatan, kecamatan, dan Kelurahan	3 Kali			145.388.500	162.442.500	Bag. Adkesra	
Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah Bidang Keagamaan						Terlaksananya Monitoring Hibah Bidang Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan yang sudah Mencairkan	80 Penerima			100.000.000	165.000.000	Bag. Adkesra	
Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bogor						Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Bogor, meliputi : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Tarhib Ramadhan, Tarawih Keliling, Nuzulul Qur'an, Shalat Idul Fitri, Halal Bi Halal, Shalat Idul Adha, Tahun Baru Islam, Hari Santri Nasional, Maulid	11 Kegiatan			750.000.000	866.710.900	Bag. Adkesra	
Peningkatan Peran Serta Lembaga Keagamaan						Terfasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah	50 MDT			150.000.000	220.000.000	Bag. Adkesra	
						Terfasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Majelis Taklim se-Kota Bogor Terfasilitasi dan Terlaksananya Pembinaan Remaja Masjid se-Kota Bogor	50 Majelis Taklim 100 Masjid						
Penyelenggaraan Verifikasi dan Distribusi Proposal Hbah/Bansos						Terverifikasi dan terdistribusinya proposal permohonan masuk hibah/bansos kepada OPD/Instansi yang membidangi sesuai dengan perwali nomor 97 tahun 2017	1500 Proposal			250.000.000	275.000.000	Bag. Adkesra	
						Pemeriksaan Lapangan berdasarkan proposal hibah/bansos yang diajukan	6 kecamatan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										4.191.764.000	7.685.000.000		
<b>KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>										3.866.764.000	6.710.000.000		
<b>KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase Keterbukaan Informasi publik</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Keterbukaan Informasi publik</b>	<b>100</b>	3.162.631.000	4.840.000.000		
Penyebarluasan Informasi Publik			Kota Bogor			Terkelolanya Penerbitan Advertorial di Media Cetak, Media Online, Media Sosial	20 Media			2.881.273.000	4.345.000.000	Bag. Humpro	
						Terlaksananya Temu Redaktur dan Temu Pemimpin Redaksi Publikasi Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Bogor	12 Bulan						
						Tersampainya Informasi Tentang kebijakan Pemkot Melalui Jumpa Pers	20 Media						
						Tersedianya Surat Kabar/Majalah Sosialisasi Program Pemerintah Kota Bogor Melalui TV dan Radio	1920 Orang						
						Analisis Media	12 Bulan						
Pengelolaan Media Publikasi			Kota Bogor			Tersedianya Majalah Digital Djuanda 10 Tercetaknya Spanduk	12 Bulan			281.358.000	495.000.000	Bag. Humpro	
						Tercetaknya Baliho	415 Buah						
						Tercetaknya Backdrop	40 Buah						
						Tercetaknya Roll Banner	31 Buah						
						Terlaksananya Film Dokumenter	2 Film						
<b>PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								704.133.000	1.870.000.000		
Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID			Kota Bogor			Tersebar nya Kuisisioner dan Pelaksanaan Wawancara PPID Pembantu	40 Lembaga			96.995.000	550.000.000	Bag. Humpro	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen							
						Terselenggaranya Workshop KIP	1 Kali							
						Jumlah Peserta Workshop KIP	75 Orang							
						Penyelesaian Sengketa Informasi	6 Kasus							
Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan			Kota Bogor			Terselenggaranya Kegiatan Bakohumas (Badan Koordinasi Humas) TK Kota Bogor	1 Kali			544.375.000	1.100.000.000	Bag. Humpro		
						Jumlah Peserta Bakohumas Kota Bogor	75 Peserta							
						Terselenggaranya Forum Perhumas	1 Kali							
						Jumlah Peserta Forum Perhumas Kota Bogor	75 Peserta							
						Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Bakohumas TK. Provinsi Jawa Barat dan TK. Nasional Tenaga Profesional Kehumasan	2 Kali							
							8 Orang							
Pengelolaan Data Kehumasan			Kota Bogor			Terdokumentasikannya Sambutan Walikota	6 Buku			62.763.000	220.000.000	Bag. Humpro		
						Terdokumentasikannya Press Release	24 Buku							
						Terdokumentasikannya Kliping Berita Media Cetak	24 Buku							
						Terdokumentasikannya Publikasi Terkait Hari Jadi Bogor	9 Buku							
						Tersedianya Dokumentasi Foto Bogor dalam Bingkai	1 Paket							
<b>KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>										<b>325.000.000</b>	<b>975.000.000</b>			

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)</b>		<b>Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>75</b>			<b>Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>75</b>	<b>325.000.000</b>	<b>975.000.000</b>		
Pengembangan Sarana Perekonomian dan Produksi			Kota Bogor			Kajian di bidang sarana perekonomian dan produksi Rakor Optimalisasi Pengembangan Sarana Perekonomian dan Produksi	1 1 dokumen 2 2 kali			175.000.000	175.000.000	Bag. Adekon dan Kerjasama	
Pengendalian dan Evaluasi Sarana Pembiayaan						Laporan Sarana Pembiayaan Rakor Sarana Pembiayaan	2 Laporan 2 kali			-	150.000.000		
Pengembangan Usaha Daerah						Rakor Dekranasda Kota Bogor Rakor Kemitraan Buku Laporan Kemitraan antara Pelaku Usaha Kecil dengan pelaku usaha menengah dan Besar Kota Bogor Buku Laporan Tahunan Dekranasda Kota Bogor dan Laporan Tahunan Bakul Bogor	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Buku 1 Buku			150.000.000	650.000.000	Bag. Adekon dan Kerjasama	
<b>URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN</b>										<b>360.000.000</b>	<b>600.000.000</b>		
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>		<b>Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)</b>	<b>5</b> <b>≤ 3,6 %</b>			<b>Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)</b>	<b>5</b> <b>≤ 3,6 %</b>	<b>360.000.000</b>	<b>600.000.000</b>		
Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal			Kota Bogor			Kajian Program Halal tentang Pemetaan daging	1 Buku			60.000.000	300.000.000	Bag. Adekon dan Kerjasama	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor						Buku Laporan Tahunan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor 2020	1 Buku				300.000.000	300.000.000	Bag. Adekon dan Kerjasama	
						Buku Database Produksi	1 Buku							
						Buku Evaluasi Perkembangan Harga Sembako dan Barng - Barang Strategis	1 Buku							
						Lainnva Rakor/Capacity Building TPID	3 Kali							
						Tolok Ukur	Target							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>											<b>46.183.905.500</b>	<b>48.604.532.800</b>		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>											<b>46.183.905.500</b>	<b>48.604.532.800</b>		
<b>ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>											<b>18.951.524.500</b>	<b>19.184.532.800</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1800 op				18.619.759.500		Bag. Umum	
						Honorarium Pegawai Honorer /tidak tetap	13 bulan							
						Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan	64 jenis							
						Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateery kering)	21 jenis							
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	59 jenis							
						Belanja Gas	12 bulan							
						Belanja Dekorasi	20 jenis							
						Belanja Pembuatan Promosi, Miniatur Ikon, Lambang kota Bogor	4 jenis							
						Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	54 jenis							
						Belanja Bahan Makanan/Minuman	42 jenis							
						Belanja Telepon	12 bulan							
						Belanja Air	12 bulan							
						Belanja Listrik	12 bulan							
						Belanja Kawat / Faximili / Internet	12 bulan							
						Belanja Jasa Penyelenggara Acara/Event Organizer	12 bulan							
						Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Laundry	12 bulan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60 kendaraan							
						Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	132 kali							
						Belanja Premi Asuransi Kesehatan	96 ob							
						Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah Dinas KDH/WKDH	1 tahun							
						Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	96 ob							
						Belanja Solar,Pertramax dan Lumpsom BBM	12 bulan							
						Belanja Cetak	51 jenis							
						Belanja Sewa kendaraan	12 bulan							
						Belanja Sewa Meja Kursi	2 jenis							
						Belanja Sewa Generator	85 hari							
						Belanja Sewa Tenda	12 bulan							
						Belanja Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	12 bulan							
						Belanja Sewa Pendingin Ruang (AC)	23 bulan							
						Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	12 bulan							
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan							
						Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan							
						Belanja Makanan dan Minuman (Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya)	1 bulan							
						Belanja Makanan dan Minuman Piket/Jaga	12 bulan							
						Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	12 bulan							
						Belanja Pakaian Dinas HUT RI	75 stel							
						Belanja Pakaian Adat Daerah	15 jenis							
						Belanja Pakaian Olah Raga	4 jenis							
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun							
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat			Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor			Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	12 Bulan			100.000.000	100.000.000	Bag. Umum		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelayanan Kerumahtanggaan			Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor			Laporan Piket Bulanan	12 Laporan			51.765.000	52.800.300	Bag. Umum	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor			Pelayanan administrasi persuratan	12 Bulan			180.000.000	200.000.000	Bag. Umum	
						Layanan sms gateway	12 Bulan						
						Alih Media Arsip	1 Paket						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>17.975.000.000</b>	<b>17.645.000.000</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor			Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor			Pengadaan Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	1 Unit			4.800.000.000	6.900.000.000	Bag. Umum	
						Pengadaan Kendaraan Roda 4 Pick Up	2 Unit						
						Pengadaan Sepeda Motor min 125cc	15 Unit						
						Pengadaan Mesin Fotocopy	13 Unit						
						AC Split 1 PK	10 Unit						
						AC Split 2 PK	7 Unit						
						Kulkas Dua Pintu	12 Unit						
						Inverter							
						Televisi LED min 43"	10 Unit						
						Note Book	20 Unit						
						Meja Kerja (Workstation)	80 Unit						
						Meja Kerja Pejabat	1 Set						
						Pengadaan Meja rapat	2 Set						
						Kursi Kerja Pejabat	1 Set						
						Kursi Rapat Pejabat	1 set						
						Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	1 Set						
						Pengadaan Power Supply Mic Conference	1 Set						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor			Pemeliharaan Kendaraan	12 Bulan			5.375.000.000	6.850.000.000	Bag. Umum	
						Pemeliharaan Taman/Tanah ( Taman )	12 Bulan						
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan						
						Pemeliharaan Bangunan	12 Bulan						
						Pemeliharaan Jaringan	12 Bulan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Jasa Konsultasi	12 Bulan						
Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH			Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor			Pengadaan Meja Kecil	6 Unit			1.200.000.000	1.200.000.000	Bag. Umum	
						Pengadaan Kaca Cermin Lux	4 Unit						
						Meja Kerja	4 Unit						
						Kursi 1 Seater	10 Unit						
						Meja Makan	4 Unit						
						Lemari Pakaian	4 Unit						
						Tempat Tidur Kayu (lengkap) Lux	4 Unit						
						Lemari Buffet	8 Unit						
						Meja Kaca	2 Unit						
						Meja Tamu	2 Set						
						Meja Televisi	4 Unit						
						Meja Komputer	2 Unit						
						Lemari Buku	4 Unit						
						AC Split 2 PK	4 Unit						
						AC Split 5 PK	4 Unit						
						Kulkas Dua Pintu	2 Unit						
						Inverte							
						Televisi LED Min 50" L	4 Unit						
DED Pembangunan Gedung Balaikota Bogor dan sekitarnya			Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor			Tersusunnya DED Pembangunan Gedung Balaikota Bogor dan Sekitarnya	1 Dokumen			1.000.000.000	2.695.000.000	Bag. Umum	
Pembangunan Lift Gedung Sekretariat Daerah (lanjutan)										5.500.000.000		Bag. Umum	
Review DED Pembangunan Lift Sekretariat Daerah										100.000.000		Bag. Umum	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>						<b>Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</b>	<b>3,12</b>			<b>711.441.700</b>	<b>980.000.000</b>		
Evaluasi Permohonan Hibah			Kota Bogor			Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah yang diterima	10 Proposal			15.000.000	15.000.000	Bag. Adpem	
						Membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	10 Dokumen						
						Jumlah Laporan Penggunaan Hibah yang terselesaikan	10 Dokumen						
Penyusunan LPPD dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)			Kota Bogor			Dokumen LPPD dan EPPD kepada Pemerintah dan ILPPD kepada Masyarakat	Dokumen			80.000.000	165.000.000	Bag. Adpem	
Penyusunan serta Penyampaian LKPJ Walikota Tahunan			Kota Bogor			Dokumen LKPJ Walikota Konsinering Tim LKPJ Kota Bogor	Dokumen kali			80.000.000	200.000.000	Bag. Adpem	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Kinerja BUMD Kota Bogor						Buku Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor	3 Buku			475.000.000	600.000.000	Bag. Adekon dan Kerjasama	
						Buku Kajian PDJT	1 Buku						
						Buku Studi Kelayakan Pembentukan BUMD Pariwisata dan BUMD Infrastruktur	1 Buku						
						Rakor BUMD Kota Bogor	1 Kegiatan						
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah	1 Dokumen			61.441.700	66.000.000	Bag. Adbang	
						Penyusunan LKPJ Sekretariat Daerah	1 Dokumen						
						Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	1 Dokumen						
						Penyusunan Buku Pendukung LPPD	1 Dokumen						
						Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah	1 Dokumen						
<b>PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH</b>										<b>350.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>		
Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah			Kota Bogor			Persentase Rapat Kerja Daerah	100 %			125.000.000	450.000.000	Bag. Adpem	
						Jumlah Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah	2 kali						
						Jumlah Instansi yang terlibat	68 Lurah, BUMD, Seluruh OPD						
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundangan mengenai Pemerintah Daerah			Kota Bogor			Advokasi penyelenggaraan Pemernitahan Daerah	1 kali			50.000.000	100.000.000	Bag. Adpem	
Pelayanan Administrasi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Bogor			Dokumen Administrasi untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari pemerintah Pusat	10 Dokumen			30.000.000	50.000.000	Bag. Umum	
Keikutsertaan dalam APEKSI			Kota Bogor			Keikutsertaan dalam Kegiatan APEKSI, dan Forum Lainnya	kali			145.000.000	400.000.000	Bag. Adpem	
<b>PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)</b>	<b>70</b>			<b>Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)</b>	<b>70</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keleuran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan			Kota Bogor			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja Baik  Laporan Hasil Pembinaan terhadap ASN Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	12 kali  1 Dokumen			200.000.000	300.000.000	Bag. Adpem	
Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bogor			Kota Bogor			Lomba Sinergitas Kinerja kecamatan Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 SK Walikota Pembentukan Tim Pembina Lomba Tk. Propinsi Jawa Barat Penyusunan Indikator Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tk. Kota Bogor	100 %  1 Dokumen  1 Dokumen			50.000.000	100.000.000	Bag. Adpem	
Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Barat			Kota Bogor			Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 SK Walikota Pembentukan Tim Pembina Lomba Tingkat Propinsi Jawa Barat	100 %  1 dokumen			50.000.000	-	Bag. Adpem	
Penyusunan serta Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan			Kota Bogor			Menyusun Tim Evaluasi  Pelaksanaan Evaluasi terhadap 68 Kelurahan  Produk Hukum Perwali tentang Pedoman Pembangunan Sarpras di Lingkungan Kelurahan	15 orang  68 Kel  100 buku			50.000.000	-	Bag. Adpem	
Penyusunan serta Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan			Kota Bogor			Persentase Penyelenggaraan Evaluasi PATEN  Jumlah Kecamatan  SK Tim Evaluasi  Penyelenggaraan Evaluasi Perwali Pelimpahan Kewenangan	100 %  6 kecamatan  1 dokumen  6 kali  1 dokumen			50.000.000	-	Bag. Adpem	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)</b>	<b>95</b>			<b>Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)</b>	<b>95</b>	<b>809.884.625</b>	<b>1.425.000.000</b>		
Penyusunan Produk Hukum Daerah			Kota Bogor			Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah Jumlah Kajian Produk Hukum Daerah	26 produk hukum 1 kajian			435.370.200	750.000.000	Bag. Hukum dan HAM	
Evaluasi Produk Hukum Daerah			Kota Bogor			Evaluasi Produk Hukum Daerah	2 dokumen			50.000.000	75.000.000	Bag. Hukum dan HAM	
Pengolahan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi			Kota Bogor			Jumlah Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah  Jumlah buku himpunan Lembaran Daerh dan Berita Daerah Jumlah Peserta Sosialisasi produk hukum daerah di Kecamatan se-Kota Bogor	500 buku  10 buku  612 orang			324.514.425	600.000.000	Bag. Hukum dan HAM	
<b>PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN HAM</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>515.115.375</b>	<b>1.000.000.000</b>		
Penanganan Perkara Perdata dan TUN serta Bantuan Hukum			Kota Bogor			Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN Jumlah Perkara Bantuan Hukum Litigasi bagi Masyarakat Miskin  Jumlah Bantuan Hukum Non Litigasi bagi Masyarakat Miskin Jumlah Perkara Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI  Jumlah Paket Legal Opinion/Sewa Jasa Advokat  Aplikasi Penangan Perkara dan Bantuan HUKUM bagi Masyarakat Miskin	8 perkara 10 perkara  1 paket 1 perkara  2 paket  1 paket			412.615.375	750.000.000	Bag. Hukum dan HAM	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyuluhan Hukum dan RANHAM			Kota Bogor			Jumlah Peserta Penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat Jumlah Peserta Pembinaan kelurahan sadar hukum Jumlah Laporan RANHAM secara periodik Jumlah Peserta Diseminasi HAM	180 orang 180 orang 4 laporan 90 orang			102.500.000	250.000.000	Bag. Hukum dan HAM	
<b>KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan</b>	<b>70</b>			<b>Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan</b>	<b>70</b>	<b>615.000.000</b>	-		
Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama						Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kerja sama Pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Kerjasama (aSIK) (lanjutan)	20 Naskah kerja sama 1 Aplikasi			56.650.000	-	Bag. Adekon dan Kerjasama	
Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri						Rekomendasi/Sasaran/Laporan Pengajuan Kerja Sama Pembayaran Iuran dan Keikutsertaan dalam organisasi nasional (APEKSI, AKKOPSI, Citynet Indonesia, JKPI)	50 dokumen 5 organisasi			274.675.000	-	Bag. Adekon dan Kerjasama	
Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri						Rekomendasi/sasaran/laporan/naskah pengajuan kerja sama Pembayaran Iuran dan keikutsertaan dalam organisasi Internasional	7 dokumen 3 organisasi			283.675.000	-	Bag. Adekon dan Kerjasama	
<b>PENGENDALIAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana</b>	<b>80</b>			<b>Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana</b>	<b>80</b>	<b>688.558.300</b>	-		
				<b>Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>80</b>			<b>Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>80</b>				
Pembinaan Administrasi Pembangunan						Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan	1 Kali			138.500.000	150.000.000	Bag. Adbang	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Sosialisasi Pembinaan Administrasi Pembangunan	1 Kali						
						Ketersediaan Data dan Informasi Kinerja dan Permasalahan Pembangunan	1 Dokumen						
Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan						Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan			264.462.300	280.000.000	Bag. Adbang	
						Terselenggaranya Rapat Evaluasi kegiatan dengan Perangkat Daerah	4 kegiatan						
						Terselenggaranya Rapat Teknis Renlap Perangkat Daerah dan Admin Movev	2 kegiatan						
Penyusunan Standar Biaya						Jumlah Dokumen Standar Biaya sebagai Pedoman Pelaksanaan kegiatan Pembangunan	4 Buku Perwali			285.596.000	310.000.000	Bag. Adbang	
						FGD Draft Perwali Standar Biaya Sosialisasi Buku Perwali Standar Biaya	1 Kali 250 PPTK						
<b>PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase</b>	<b>100</b>			<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>4.845.845.000</b>	<b>4.100.000.000</b>		
Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Sekretariat Daerah			Terlaksananya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya dan Luar Negeri	12 Bulan			2.500.000.000	1.100.000.000	Bag. Umum	
						Terlaksananya Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan						
Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor			Sekretariat Daerah			Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pusat dan Intansi Lainnya	12 Bulan			2.000.000.000	1.900.000.000	Bag. Umum	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota dalam Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan	12 Bulan						
						Melakukan Kajian, Telaahan dan Pembahasan serta Pertimbangan terhadap suatu Rumusan Kebijakan Publik	12 Bulan						
Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan			Kota Bogor			Terciptanya Pelayanan Keprotokolan yang Optimal	12 Bulan			345.845.000	1.100.000.000	Bag. Humpro	
						Tenaga Master of Ceremony (MC) Profesional	4 Orang						
<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		
Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal			Kota Bogor			Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM	100 %			20.000.000	20.000.000	Bag. Organisasi	
<b>PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>3,32</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>3,32</b>	<b>1.150.000.000</b>	<b>-</b>	<b>Bag. Organisasi</b>	
				<b>Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota</b>	<b>BB</b>			<b>Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota</b>	<b>BB</b>				
				<b>Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi</b>	<b>4</b>			<b>Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi</b>	<b>4</b>				
				<b>Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"</b>	<b>67,56</b>			<b>Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"</b>	<b>67,56</b>				
Pembinaan Akuntabilitas Kinerja dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						Dokumen Laporan Kinerja Kota	1 Dokumen			300.000.000	-	Bag. Organisasi	
						Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Kota	1 Dokumen						
						Dokumen Perjanjian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah Pembinaan SAKIP	19 Dokumen Perangkat Daerah						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor Laporan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Dokumen 1 Dokumen							
Penguatan Kelembagaan						Rancangan Perwali SOTK	1 dokumen			475.000.000	-	Bag. Organisasi		
						Rancangan Perwali Uraian Tugas dan Fungsi Dokumen Informasi Jabatan  Dokumen Kelas dan Nilai Jabatan  Sosialisasi bidang kelembagaan Kajian Kelembagaan  Evaluasi dan Monitoring Anjab dan ABK Pemeliharaan aplikasi ABAKEV	10 dokumen 10 dokumen  10 dokumen  2 kali 1 dokumen  1 kali 1 paket							
Penyusunan Standarisasi Kerja						Standar Operasional Prosedur  Rancangan Peta Proses Bisnis  Workshop Standarisasi Kerja Rancangan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas	16 dokumen  1 dokumen  1 kali 1 dokumen			75.000.000	-	Bag. Organisasi		
Pembinaan Pelayanan Publik						Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik Pemeliharaan Aplikasi SKM Sertifikasi ISO 9001:2015  Workshop Pelayanan Publik Pembinaan Kinerja Pelayanan Publik  Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 dokumen  1 paket 2 perangkat daerah  1 kali 21 perangkat daerah  3 kali			300.000.000	-	Bag. Organisasi		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Buku Panduan Standar Pelayanan	125 buah						
<b>FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>375.286.000</b>	<b>1.650.000.000</b>		
Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD)			Kota Bogor			Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Besar Nasional Hardiknas, HUT RI, Hari Pahlawan	3 PHBN			375.286.000	1.650.000.000	Bag. Adkesra	
<b>PENINGKATAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa</b>	<b>10</b>			<b>Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa</b>	<b>10</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>Bag. PBJ</b>	
Penguatan Kelembagaan UKPBJ						Advokasi Implementasi UKPBJ Menuju Center of Excellence PBJ	1 Kali			225.000.000	-	Bag. PBJ	
						Pencapaian target prioritas kematangan organisasi UKPBJ ISO / Surveilaince UKPBJ	2 Level						
						Sosialisasi/bimtek/workshop/FGD/advokasi terhadap pelaku pengadaan	1 Dokumen						
						Meningkatnya pemahaman PA/KPA, PPK, PP, PPHP dan PPTK terkait pengadaan barang jasa pemerintah	15 Kali						
						Meningkatnya pemahaman pokja pemilihan terhadap proses pengadaan barang iasa	80 %						
						Terlaksananya proses Pengadaan Barang Jasa tepat tujuan, tepat lokasi, tepat biaya, tepat waktu dan tepat jumlah.	80 %						
Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa			Kota Bogor			On The Spot Pelaksanaan Barang dan Jasa	12 Bulan			725.000.000	1.100.000.000	Bag. PBJ	
						Pendampingan Hukum Pengadaan PBJ	15 Paket						
Penyelenggaraan Eprocurement						Tingkat kepuasan pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	80 %			300.000.000	-	Bag. PBJ	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pelatihan Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa	75 Orang						
						Informasi monitoring pengadaan barang dan jasa pemerintah secara real time	4 Aplikasi						
<b>PERTANAHAN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>350.000.000</b>	<b>500.000.000</b>		
Penyusunan Raperda Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan			Kota Bogor			Wilayah Pemekaran Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan	2 Kecamatan			100.000.000	-	Bag. Adpem	
						Terlaksananya Rapat Rapat Persiapan, Pembahasan Pemekaran Kecamatan	20 kali						
						Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Ke emerintah Pusat dan Propinsi	20 kali						
						Monitoring ke Kelurahan dan Ke Kecamatan	20 kali						
						FGD Perda Pemekaran wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan	2 kali						
						Dokumen Perda	1 Dokumen						
Penataan Batas Wilayah dan Toponimi			Kota Bogor			Evaluasi Batas Wilayah dan Pemeliharaan Tanda Batas	17 Pilar			150.000.000	250.000.000	Bag. Adpem	
						Pengukuran Koordinat Tugu Batas - GPS Geodetik	88 Koordinat						
						Fasilitas Penataan Batas Antar Daerah Kota/Kabupaten Bogor	4 Kali (per-Triwulan)						
						Inventarisasi Data Rupabumi	1 Dokumen						
						Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi, dan Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat/Provinsi serta Lembaga Pemerintah Lainnya	12 Bulan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Fasilitasi Penanganan Masalah Pertanahan			Kota Bogor			Melaksanakan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	20 Kasus			100.000.000	250.000.000	Bag. Adpem	
						Inventarisasi Data Konflik Pertanahan	68 Kelurahan						
						Sosialisasi Peraturan Pertanahan Bagi Aparatur Pemerintah Kota Bogor	150 Peserta						
						Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi, dan Kegiatan lainnya yang dilaksanakan Pemerintah Pusat/Provinsi	12 Bulan						
<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>										<b>81.193.410.000</b>	<b>6.500.000.000</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										<b>79.693.410.000</b>	<b>6.500.000.000</b>		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>1.500.000.000</b>	<b>-</b>		
Pelayanan Kehumasan dan Publikasi						Majalah Buletin DPRD Kota Bogor	3600 exemplar			1.500.000.000	-	Sekret DPRD	
						Pelayanan Kehumasan	12 bulan						
						Advetorial	15 media						
						Dokumentasi Kliping Media Cetak DPRD Kota Bogor	12 bulan						
						Publikasi Perda	1 kali						
						Prakarsa DPRD Kota Bogor Melalui Media Cetak dan Online							
						Buku DPRD Dalam Berita Pers Tahun 2019-2020	100 exemplar						
						Tersedianya Informasi DPRD dalam Media Sosial	12 bulan						
						Peliputan Kegiatan DPRD	12 bulan						
						Tersedianya Leaflet	3000 exemplar						
						Tersedianya Baligho	12 buah						
						Tersedianya Spanduk	60 buah			<b>60.000.000.000</b>	<b>-</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>													
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Honorarium Tenaga Kontrak Kerja	14 OB			60.000.000.000	-	Sekret DPRD	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Alat Tulis Kantor Operasional Kegiatan dan Penunjang Kegiatan DPRD	1 paket							
						Alat Listrik dan Elektronik Gedung DPRD	1 paket							
						Bahan Dekorasi dan Desain Interior	1 paket							
						Peralatan Habis Pakai Penunjang Kegiatan	1 paket							
						Kebutuhan Listrik, Telepon, Gas, Air, TV Kabel Gedung DPRD	1 paket							
						BBM Kendaraan Operasional Pimpinan DPRD dan Pimpinan Sekretariat DPRD	8 mobil							
						Bahan Cetak Penunjang Kegiatan DPRD	1 paket							
						Jasa Kebersihan Gedung DPRD	1 paket							
						Jasa Keamanan Gedung DPRD	1 paket							
						Jasa Pengemudi/Supir Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Bus Operasional	1 paket							
						Medical Cek Up Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket							
						Jamuan Makan Minum Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Anggota DPRD	1 paket							
						Jamuan Makan Minum Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 masa sidang							
						Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket							
						Perjalanan Dinas Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket							
						Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1 paket							
						Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Bogor	1 paket							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>10.500.000.000</b>	<b>6.500.000.000</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor						Pengadaan Alat Pengangkat	1 Unit			5.000.000.000	-	Sekret DPRD	
						Pengadaan Unit Lainnya	2 Unit						
						Komputer	50 Unit						
						CCTV	1 Paket						
						Alat Studio	1 Paket						
						Alat Pemeliharaan Lainnya	1 Paket						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Terpeliharanya Gedung	Gedung			5.500.000.000	6.500.000.000	Sekret DPRD	
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas Bus Operasional Roda 4 Dan Roda 6	14 Unit						
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4	23 Unit						
						Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Roda 6 ,Roda 4 Dan Roda 2	47 Unit						
						1 UNIT GENSET	12 Bulan						
						Terpeliharanya UNIT TABUNG PEMADAM	20 Unit						
						Terpeliharanya AC Gedung	80 Unit						
						Terpeliharanya Komputer /PC/Printer	120 Unit						
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>30.000.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan						Renja PD	1 Laporan			30.000.000	-	Sekret DPRD	
						RKA	1 Dokumen						
						DPA	1 Dokumen						
						RKAP	1 Dokumen						
						DPAP	1 Dokumen						
						LKIP	1 Laporan						
						LPPD	1 Laporan						
						LKPJ	1 Laporan						
						Laporan Bulanan	12 Laporan						
						Laporan Triwulan	4 Laporan						
						Laporan Semesteran	2 Laporan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Laporan Tahunan	1 laporan						
<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								-	-		
Implementasi Jaringan Informasi dan Aspirasi DPRD						Tersedianya Jaringan Informasi DPRD	1 paket			-	-		
<b>PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda</b>	<b>60</b>			<b>Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda</b>	<b>60</b>	<b>9.163.410.000</b>	-		
				<b>Persentase Perda yang Disosialisasikan</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Perda yang Disosialisasikan</b>	<b>100</b>				
				<b>Persentase Rapat dan Risalah Persidangan yang Berkualitas</b>	<b>80</b>			<b>Persentase Rapat dan Risalah Persidangan yang Berkualitas</b>	<b>80</b>				
Pendukung Pelaksanaan Rapat Alat Kelengkapan DPRD										452.180.000	-	Sekret DPRD	
Pendukung Pelaksanaan Rapat/Sidang Paripurna			Sekretariat DPRD Kota Bogor			Penyusunan Dokumen Risalah Rapat-Rapat Paripurna	40 Dokumen			122.680.000	-	Sekret DPRD	
Fasilitasi Reses			Kota Bogor			Pelaksanaan reses perorangan anggota DPRD	3 kali/anggota			350.000.000	-	Sekret DPRD	
						Pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD	3 masa sidang						
						Tersusunnya Informasi Yang Bersifat Dua Arah Untuk Dijadikan Masukan Bagi DPRD Dalam Pengambilan Keputusan	3 masa sidang						
Sosialisasi Peraturan Daerah						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Prakarsa DPRD Kota Bogor	3 Kali			-	-		
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Prakarsa DPRD Kota Bogor	3 Kali						
Pendukung Kunjungan Kerja DPRD						Tercapainya Efektivitas Kinerja Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bogor Dalam Melaksanakan Pembangunan Daerah	40 kali			30.000.000	-	Sekret DPRD	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Pakaian Dinas DPRD			Kota Bogor			Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Bogor	250 stel			1.000.000.000	-	Sekret DPRD	
Fasilitasi pembahasan Raperda dan rapat-rapat Bapemperda			Sekretariat DPRD Kota Bogor			Pembahasan Raperda	10 Perda			975.690.000	-	Sekret DPRD	
						Pembahasan Raperda Usul Prakarsa	3 Raperda Usul Prakarsa						
						Pembahasan Program Pembentukan Perda	1 Propemp erda						
						Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Perda	1 Perubahan Propemp erda						
						Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Perda	2 Rekomendasi DPRD						
						Naskah AKademik	3 Naskah Akademik						
						Sosialisasi Peraturan PerUU	1 Perda						
Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan										846.560.000	-	Sekret DPRD	
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD						Pendalaman Tugas, Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar Mengikuti Rakernas ADEKSI Menghadiri Undangan Seminar, Orientasi, lokakarya, Sosialisasi, dll.	8 kali / anggota  2 kali / anggota 96 kali			4.500.000.000	-	Sekret DPRD	
Keikutsertaan dalam ASDEKSI										370.000.000	-	Sekret DPRD	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan						Pelayanan Keprotokolan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD	36 kegiatan			516.300.000	-	Sekret DPRD	
						Terpenuhinya kebutuhan penunjang rapat paripurna istimewa	3 kali						
<b>KECAMATAN BOGOR UTARA</b>										<b>14.584.235.700</b>	<b>13.406.548.870</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										<b>14.584.235.700</b>	<b>13.406.548.870</b>		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>										<b>14.584.235.700</b>	<b>13.406.548.870</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.967.601.780</b>	<b>2.164.361.958</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Kecamatan Bogor Utara			Pengelolaan Kesekretariatan Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan			1.967.601.780	2.164.361.958	Kec. Bout	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.432.174.700</b>	<b>1.575.392.170</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor			Kecamatan Bogor Utara			Pengadaan Barang Inventaris Kantor	1 Kegiatan			932.250.000	1.025.475.000	Kec. Bout	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kecamatan Bogor Utara			Perawatan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan			499.924.700	549.917.170	Kec. Bout	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>46.134.220</b>	<b>50.747.642</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kecamatan Bogor Utara			Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen			46.134.220	50.747.642	Kec. Bout	
						Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi Publik Survey Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik	1 Kegiatan 12 Bulan						
<b>PENINGKATAN PELAYANAN PATEN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>			<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>	<b>11.138.325.000</b>	<b>9.616.047.100</b>		
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	<b>3,1</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	<b>3,1</b>				
Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan (lanjutan)			Kecamatan Bogor Utara			Pengadaan Jasa Konsultansi Pelaksanaan Kontruksi	1 Paket			2.000.000.000	-	Kec. Bout	
						Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Paket						
						Jasa Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan Negeri Bogor	1 Paket						
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan			Kecamatan Bogor Utara			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pegawai Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan			30.400.000	33.440.000	Kec. Bout	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Kegiatan							
						Penguatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	1 Kegiatan							
						Lomba Kinerja Kelurahan	1 Kegiatan							
						Operasi Sisir PBB	2 Kegiatan							
						Sosialisasi dan Mediasi terkait Pertanahan	2 Kegiatan							
						Sosialisasi Administrasi Kependudukan	2 Kegiatan							
Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan			Kecamatan Bogor Utara			Pendataan dan Verifikasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12 Bulan			60.000.000	66.000.000	Kec. Bout		
						Survey Penertiban IUMK	1 Kegiatan							
						Helaran HJB	1 Kegiatan							
Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan			Kecamatan Bogor Utara			Seleksi Tilawatil Qur'an	5 Kegiatan			489.460.000	538.406.000	Kec. Bout		
						Pendataan dan Verifikasi RTLH	3 Kegiatan							
						Pemberdayaan Perempuan tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)	3 Kegiatan							
						Penilaian Lomba-Lomba tingkat Kecamatan dan Kelurahan	5 Kegiatan							
Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan			Kecamatan Bogor Utara			TRANTIBUM tingkat Kecamatan	2 Kegiatan			60.000.000	66.000.000	Kec. Bout		
						Penanganan Mayat Terlantar	1 Kegiatan							
						Sosialisasi Bank Sampah dan TPS 3R	1 Kegiatan							
						Kesiapsiagaan Bencana tingkat Kecamatan	1 Kegiatan							
						Pemuktahiran Data Daerah Rawan Bencana	1 Kegiatan							
						Penertiban PKL	1 Kegiatan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan			Kecamatan Bogor Utara			Musrenbang tingkat Kecamatan	4 Kegiatan			48.411.000	53.252.100	Kec. Bout	
						Survey Penerbitan IMB tingkat Kecamatan	1 Kegiatan						
						Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Sarprasling Kelurahan	2 Kegiatan						
						Evaluasi Pembangunan tingkat Kecamatan	1 Kegiatan						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegal Gundil			Kelurahan Tegal Gundil			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Kelurahan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bout	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bantarjati			Kelurahan Bantarjati			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Kelurahan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bout	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibuluh			Kelurahan Cibuluh			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Kelurahan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bout	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Halang			Kelurahan Kedung Halang			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Kelurahan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bout	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciparigi			Kelurahan Ciparigi			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Kelurahan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bout	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keeluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciluar			Kelurahan Ciluar			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Kelurahan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bout	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Baru			Kelurahan Tanah Baru			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Kelurahan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bout	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimahpar			Kelurahan Cimahpar			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Kelurahan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bout	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Gundil			Kelurahan Tegal Gundil			Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT/RW/LPM) Musrenbang Tahunan tingkat Kelurahan Gerakan Kebersihan Lingkungan Rembug Warga Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	12 Bulan 12 Bulan 2 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 1 Kelurahan			827.260.000	892.486.000	Kec. Bout	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarjati			Kelurahan Bantarjati			Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT/RW/LPM)	12 Bulan 12 Bulan			716.980.000	771.178.000	Kec. Bout	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Musrenbang Tahunan tingkat Kelurahan	2 Kegiatan						
						Gerakan Kebersihan Lingkungan Rembug Warga	12 Bulan 12 Bulan						
						Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	1 Kelurahan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibuluh			Kelurahan Cibuluh			Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	12 Bulan			565.080.000	604.088.000	Kec. Bout	
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT/RW/LPM)	12 Bulan						
						Musrenbang Tahunan tingkat Kelurahan	2 Kegiatan						
						Gerakan Kebersihan Lingkungan Rembug Warga	12 Bulan 12 Bulan						
						Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	1 Kelurahan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Halang			Kelurahan Kedung Halang			Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	12 Bulan			716.360.000	770.496.000	Kec. Bout	
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	1 Kegiatan						
						Musrenbang tingkat Kelurahan	2 Kegiatan						
						Gerakan Kebersihan Lingkungan	1 Kegiatan						
						Rembug Warga	1 Kegiatan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	1 Kelurahan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciluar			Kelurahan Ciluar			Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	12 Bulan			611.290.000	654.919.000	Kec. Bout	
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT/RW/LPM)	12 Bulan						
						Musrenbang Tahunan tingkat Kelurahan	2 Kegiatan						
						Gerakan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Rembug Warga	12 Bulan						
						Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	1 Kelurahan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Baru			Kelurahan Tanah Baru			Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	12 Bulan			667.920.000	717.212.000	Kec. Bout	
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	1 Kegiatan						
						Musrenbang tingkat Kelurahan	2 Kegiatan						
						Gerakan Kebersihan Lingkungan	1 Kegiatan						
						Rembug Warga	1 Kegiatan						
						Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	1 Kelurahan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cimahpar			Kelurahan Cimahpar			Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	12 Bulan			699.860.000	752.346.000	Kec. Bout	
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	1 Kegiatan						
						Musrenbang tingkat Kelurahan	2 Kegiatan						
						Gerakan Kebersihan Lingkungan	1 Kegiatan						
						Rembug Warga	1 Kegiatan						
						Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	1 Kelurahan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciparigi			Kelurahan Ciparigi			Pengelolaan Kebutuhan Operasional Kantor Kelurahan	12 Bulan			684.200.000	735.120.000	Kec. Bout	
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW/LPM)	1 Kegiatan						
						Musrenbang tingkat Kelurahan	2 Kegiatan						
						Gerakan Kebersihan Lingkungan	1 Kegiatan						
						Rembug Warga	1 Kegiatan						
						Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan	1 Kelurahan						
<b>KECAMATAN BOGOR SELATAN</b>										<b>30.696.377.625</b>	<b>3.180.551.999</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										<b>30.696.377.625</b>	<b>3.180.551.999</b>		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>30.696.377.625</b>	<b>3.180.551.999</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD										<b>1.699.495.000</b>	-		
						Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Belanja Alat Tulis Kantor	0 Bulan 0 Bulan			1.699.495.000	-	Kec. Bosel	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>12.107.000.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Pengadaan Roll Opact Pengadaan Vacuum Cleaner Pengadaan Komputer / PC Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Multifungsi Pengadaan Kamera DSLR D3400	16 Unit 17 Unit 19 Unit 1 Unit 19 Unit 1 Unit			950.000.000	-	Kec. Bosel	
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Service Kendaraan  Penggantian Suku Cadang Belanja Pajak STNK Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Paket  1 Paket 1 Paket 4 Paket 17 Paket  17 Paket			867.000.000	-	Kec. Bosel	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Jasa Konsultan Perencanaan	1 Paket						
						Jasa Pengawasan	1 Paket						
Perencanaan Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Pakuan										100.000.000		Kec. Bosel	
Persiapan Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Pakuan										50.000.000		Kec. Bosel	
Pelaksanaan Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Pakuan										10.120.000.000		Kec. Bosel	
Penyerahan Hasil Pengadaan Lahan Kantor kelurahan Pakuan										20.000.000		Kec. Bosel	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>70.000.000</b>		-	
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kecamatan dan 16 Kelurahan			Tersusunnya LAKIP	6 buku			70.000.000		-	Kec. Bosel
						Tersusunnya Renja	6 buku						
						Tersusunnya LPPD	6 buku						
						Laporan Tahunan terlaksananya Belanja cetak Poster informasi dan pelaporan	17 buku 17 buah						
						terlaksananya Belanja cetak standing Banner	17 buah						
						terlaksananya Belanja cetak spanduk	17 buah						
						terlaksananya Belanja cetak Poster informasi dan pelaporan	17 buah						
						terlaksananya Belanja leaflet informasi standar pelayanan	17 buah						
<b>PENINGKATAN PELAYANAN PATEN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>			<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>	<b>16.819.882.625</b>	<b>3.180.551.999</b>		
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	<b>3,1</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	<b>3,1</b>				
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan			Kecamatan Bogor Selatan			Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan Tingkat Kecamatan Bogor Selatan	4 Kali			605.000.000	800.000.000	Kec. Bosel	
						Terlaksananya Kegiatan Piket Hari Libur, Hari Keria	12 Bulan						
						Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasvarakatan	4 Kali						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	4 Kali						
Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan			Kecamatan Bogor Selatan			Pendataan Pelaku UMKM Pelaksanaan Bazar/Pameran UMKM  Sosialisasi dan Pembinaan Koperasi Pendataan Koperasi yang aktif	100 % 3 hari 1 Kali 22 Koperasi			80.000.000	100.000.000	Kec. Bosel	
Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan						Pelaksanaan Kegiatan Bina Wilayah Tk. Kecamatan dan 16 Kelurahan  Pelaksanaan Monitoring Kegiatan UP2K Tk. Kecamatan Tersusunnya laporan tahunan PKK Pelaksanaan MTQ Tk Kecamatan Uang Pembinaan Juara 1, 2 dan 3 Monitoring dan Evaluasi hasil Perbaikan RTLH Terverifikasinya proposal hibah bansos RTLH	11 Kali 11 Kali 1 Kali 1 Kali 16 Cabang 7 Kali 1000 Proposal			600.000.000	-	Kec. Bosel	
Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan			Kecamatan Bogor Selatan			Penanganan Mayat Terlantar  Monitoring dan Evaluasi PKL Penyebaran Informasi Tentang Keamanan dan Ketertiban Penanganan Korban bencana	5 Orang 4 Bulan 4 Bulan 16 Kelurahan			95.000.000	100.000.000	Kec. Bosel	
Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan						Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarpras Lingkungan Kelurahan  Sosialisasi monitoring pembangunan Sarpras  Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan dan Kelurahan	5 Kali 1 Kali 2 Kegiatan			80.000.000	-	Kec. Bosel	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan	16 Kelurahan							
						terlaksananya pelayanan perijina terpadu	12 Bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Batutulis						Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap Dan Teratur	12 Bulan			585.000.000	-	Kec. Bosel		
						Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan							
						Kegiatan Operasi Sisir PBB	12 Bulan							
						Kegiatan Rembug Waraga	9 Kegiatan							
						Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	8 Kegiatan							
						Kegiatan Pembinaan RT,RW Dan LPM	12 Bulan							
						Kgiatan Jumat Bersih	12 Bulan							
						Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	3 Kegiatan							
						Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	2 Kegiatan							
						Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	2 Kegiatan							
						Permbangunan Drainase RW 02	200 M2							
						Permbangunan Drainase RW 04	175 M2							
						Permbangunan Drainase RW 05	175 M2							
						Permbangunan Drainase RW 03	200 M2							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bojong Kerta						Penyelenggaraan Pemerintahan RT,RW dan LPM	12 Bulan			409.252.650	-	Kec. Bosel		
						Petugas Administrasi dan Kebersihan	13 OB							
						Musrenbang Tk Kelurahan	1 kali							
						Rakor Kelurahan	12 Bulan							
						Jumsih	12 Bulan							
						Pemasangan Paving Block RT 05 RW 02	250 M2							
						Pemasangan Paving Block RT 06 RW 02	180 M2							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bondongan						Terciptanya tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan			738.000.000	-	Kec. Bosel	
						Musrenbang Tingkat Kelurahan Bondongan	1 Kegiatan						
						Pembinaan Lembaga Kelurahan, RT,RW,LPM.	12 Bulan						
						Petugas Administrasi Kantor	26 Bulan						
						Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan						
						Kegiatan Koordinasi Tk Kelurahan dengan lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Agama.	3 Kegiatan						
						Kegiatan Koordinasi Persiapan Kegiatan Sarana dan Prasarana	3 Kegiatan						
						Kegiatan Musrenbang	3 Kegiatan						
						Kegiatan Jumsih	44 Kegiatan						
						Kegiatan Pengaminitrasian PBB P2	4 Kegiatan						
						Kegiatan Sosialisasi Gerakan Anti Narkoba	3 Kegiatan						
						Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	3 Kegiatan						
						Kegiatan Sosialisasi Program JKN BPJS Mandiri	2 Kegiatan						
						Kegiatan Pendataan penduduk	3 Kegiatan						
						Kegiatan Pendataan Penduduk	3 Kegiatan						
						Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan RTLH	5 Kegiatan						
						Kegiatan Rembuk Warga	3 Kegiatan						
						Pembangunan Rehabilitasi Jl.Setapak / Betonisasi. Rw.002 dan Rw.009.	2 Kegiatan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pembangunan Rehabilitasi Saluran Air / Draenase. Rw.004,006 dan Rw.019.	3 Kegiatan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikaret						Administrasi Kelurahan dan Pelayanan kepada Masyarakat  Musrenbang tingkat Kelurahan Sosialisasi/Rakor Tk Kelurahan terhadap LPM, RT, RW Tertib administrasi kependudukan Honor Kelembagaan LPM, RT dan RW	12 Bulan  1 kali 4 kali 12 kali 12 Bulan			666.000.000	-	Kec. Bosel		
						Pembinaan Keamanan danKetetriban  Perbaikan saluran air RW.001 Perbaikan Jalan Setapak RW.008 Perbaikan Jalan Setapak RW.001 Perbaikan saluran air RW.009	1 kali  1 paket 1 paket 1 paket 1 paket							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipaku						Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur Musrenbang Tingkat Kelurahan Pelayanan Administrasi Kependudukan  Koordinasi Lembaga di Kelurahan Sosialisasi Gerakan Anti Narkoba Sosialisasi Program Penataan PKL Sosialisasi Program JKN BPJS Mandiri Kegiatan Pembinaan LPM, RW, dan RT Kegiatan Jumat Bersih  Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan	12 Kali  1 Kali 12 OB  2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kali 12 Bulan  4 Kegiatan			675.000.000	-	Kec. Bosel		
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empang						Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yanglengkap dan teratur	12 Bulan			895.500.000	-	Kec. Bosel		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan						
						Petugas Pelayanan Administrasi Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	12 Bulan 6 Kegiatan						
						Kegiatan Kelurahan	7 Kegiatan						
						Kegiatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan	6 Kegiatan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Genteng			Kelurahan Genteng			Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan			526.500.000	-	Kec. Bosel	
						Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan						
						Petugas Administrasi Pelayanan	13 Bulan						
						Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan						
						Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan						
						Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	4 Kegiatan						
						Kegiatan Pengadministrasian Pengelolaan PBB	3 Kegiatan						
						Kegiatan Jumsih	44 Kegiatan						
						Kegiatan Rembug Warga	11 Kegiatan						
						Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	1 Kegiatan						
						Perbaikan MCK RW. 006	4 M2						
						Perbaikan MCK RW. 007	6.5 M2						
						Terbangunnya Betonisasi Jalan Setapak RW. 010	85 M1						
						Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW.007	16 M1						
						Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 010	100 M1						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Harjasari						Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap dan Teratur	12 Kali			585.000.000	-	Kec. Bosel	
						Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali						
						Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 OB						
						Kegiatan Pembinaan RT RW dan LPM	4 Kali						
						Kegiatan Sosialisasi Program JKN BPJS	2 Kali						
						Kegiatan Operasi Sisir PBB	2 Kali						
						Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	12 Kali						
						Kegiatan Jum'at Bersih	12 Kali						
						Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	4 Kegiatan						
						Pemasangan Paving Block di RW.03	300 M2						
						Pemasangan Paving Block di RW.04	300 M2						
						Perbaikan Saluran Air Kotor/Drainase RW.06	250 M2						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kertamaya						Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan			472.500.000	-	Kec. Bosel	
						Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan						
						Sosialisasi / Rapat Koordinasi Wilayah	1 Kegiatan						
						Kegiatan Non PNS	3 Lembaga						
						Kegiatan Jumsih	48 Kali						
						Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk	1 Kali						
						Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	1 Kali						
						Kegiatan Verifikasi RTLH	1 Kali						
						Kegiatan Operasi Sisir PBB	4 Kali						
						Kegiatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	4 Kegiatan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lawang Gintung						Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan			522.000.000	-	Kec. Bosel	
						Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan						
						Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan						
						Kegiatan Operasi Sisir PBB	9 Kegiatan						
						Kegiatan Rembug Warga	8 Kegiatan						
						Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	4 Kegiatan						
						Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan						
						Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan						
Kegiatan Pemutakhiran Data PKL	2 Kegiatan												
						Kegiatan Pemutakhiran Data RTLH	2 Kegiatan						
						Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM	2 Kegiatan						
						Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	5 Kegiatan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Muara Sari						Kelembagaan RT, RW dan LPM	12 Bulan			565.000.000	-	Kec. Bosel	
						Petugas Administrasi dan Kebersihan	39 OB						
						Musrenbang Tk Kelurahan	1 kali						
						Rakor Kelurahan	12 Bulan						
						Jumsih	12 Bulan						
						Tertib administrasi Pemerintahan	4 kali						
Drainase RT.01 ,02 RW.06	1 paket												
Drainase RW. 07	1 paket												

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyaharja			Kelurahan Mulyaharja			Administrasi Kelurahan Yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan			630.000.000	700.000.000	Kec. Bosel	
						Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan						
						Petugas Tenaga Pelayanan Administrasi	12 Bulan						
						Petugas Kebersihan Kantor	12 Bulan						
						Musrenbang Tk Kelurahan Tahun 2020	1						
						RKPD 2020	Dokumen						
						Kegiatan Operasi Sisir PBB	8 Kegiatan						
						Kegiatan Kerja Bhakti Jumat Bersih dan Minggu Bersih	10 Kegiatan						
						Rapat Pembinaan RT, RW, LPM dan Lembaga Kelurahan	4 Kali						
						Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	2 Kegiatan						
						Pendataan Pendudukan tiap RT	1 Kegiatan						
						Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	6 Bulan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan						Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang Lengkap dan Teratur	12 Bulan			380.691.300	-	Kec. Bosel	
						Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kelurahan	2 Kelurahan						
						Pelaksanaan Kegiatan Persampahan dan Kebersihan	12 Bulan						
						Pelaksanaan Pembinaan Kepemudaan dan Karang Taruna	1 Kali						
						Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Koperasi dan UKM	1 Kali						
						Pelaksanaan Penyerahan Honorarium Kelembagaan Masvarakat	12 Bulan						
						Pelaksanaan Jumsih	24 Kali						
						Pelaksanaan Pengadaan ATK	69 Jenis						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keleuran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pelaksanaan Pengadaan Listrik dan Elektronik Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih Pelaksanaan Sekolah Ibu	6 Jenis 20 Jenis 3 Angkataan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pamoyanan			Kecamatan Bogor Selatan			Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan Yang Lengkap dan Teratur Musrembang Ti. Kelurahan Tahun 2020 Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah RT, RW dan LPM Petugas Pelayanan Administrasi Petugas Kebersihan Kantor Kegiatan Opsir PBB Kegiatan Rembug Warga	12 Dokumen 1 Kegiatan 4 Kegiatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 Bulan 12 Bulan			616.500.000	-	Kec. Bosel		
						Kegiatan Jumat Bersih Pemasangan Paving Block RW. 03 Pemasangan Paving Block RW. 04 Pemasangan Paving Block RW. 07 Pemasangan Paving Block RW. 09	12 Bulan 200 M2 225 M2 225 M2 120 M2							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Rancamaya						Pelaksana Kegiatan Non RT,RW dan LPM Petugas Administrasi Pelayanan Petugas Kebersihan Rakor Kelurahan Musrenbang TK Kelurahan Kegiatan Mingsih Muskel Pembangunan Jalan Setapak (RW 8) Pembangunan Saluran Pembuangan di RW.02	1 bulan 26 OB 13 ob 4 Kali 1 kali 12 bulan 4 kali 1 paket 1 paket			566.830.675	-	Kec. Bosel		
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ranggamekar						Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur	12 Bulan			603.900.000	-	Kec. Bosel		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Musrenbang Tk. Kelurahan	1 Kegiatan						
						Petugas Pelayanan Administrasi	12 Bulan						
						Kegiatan Operasi Sisir PBB	6 Bulan						
						Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan	1 Kegiatan						
						Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM	12 Bulan						
						Kegiatan Jumat Bersih	11 Bulan						
						Pemutahiran Data RTLH	6 Kegiatan						
						Pemutahiran Data UMKM	5 Kegiatan						
						Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	6 Kegiatan						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batutulis						Pelatihan Siaga Darurat Bencana	1 Kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Betonisasi RW 01	200 m2						
						Betonisasi RW 03	150 m2						
						Betonisasi RW 05	200 m2						
						Betonisasi RW 06	200 m2						
						Betonisasi RW 08	150 m2						
						Betonisasi RW 09	197 m2						
						Betonisasi RW 10	150 m2						
						Pembangunan Drainase RW 02	150 M'						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojongkerta						Renovasi Posyandu RW. 02 ,04,05 dan 07	1 paket			370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Pembangunan jalan setapak RW. 03 ,04 dan 06	1 paket						
						Pembangunan saluran air RW. 08	1 paket						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bondongan						Pembangunan Gedung Serba Guna RW.05	1 paket			370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Kontruksi Betonisasi Jalan Setapak RW.012	1 paket						
						Kontruksi Tembok Penahan Tanah ( TPT )RW.015	1 paket						
						Kontruksi Perbaikan Saluran Pembuangan/drainase RW.014	1 paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cikaret						Belanja Hibah Barang Pengadaan Bibit Ikan Hias dan Ulat Hongkong	1 paket				370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Betonisasi Jalan setapak RW.07 dan 08	1 paket							
						Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Jembatan Jalan Setapak RW.07 dan 10	1 paket							
						Pembangunan Konstruksi Pagar Tembok Pemakaman RW.12	1 paket							
						Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Penutup saluran air RW.02.03 dan 11	1 paket							
						Pembuatan Pekerjaan Konstruksi Pagar Pengaman Solokan RW.07	1 paket							
						Pembangunan Pekerjaan Konstruksi saluran air pipa besi RW.08	1 paket							
						Pembangunan Pekerjaan Konstruksi Saluran air/drainase RW.07.08 dan 09	1 paket							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cipaku						Sosialisasi Pelatihan UMKM	1 Kali				370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Pengadaan Gerobak Sampah	13 Unit							
						Pembangunan Turap RW 006	1 Paket							
						Pembangunan Paving Block Jalan Setapak RW 002, RW 012, RW 015	1 Paket							
						Perbaikan Saluran Pembuangan Air di RW 009, RW 011, RW 017	1 Paket							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Empang						Pembangunan posyandu RW.11	36 m2				370.138.000	370.138.000	Kec. Bosel	
						Pemeliharaan poskamling vertikal RW.17	9 m2							
						Pemeliharaan poskamling vertikal RW.06	12 m2							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keleuran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pembuatan Relling RW.10	200 m						
						Perbaikan saluran air RW.08	200 m						
						Perbaikan saluran air RW.07	110 m						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Genteng			Kelurahan Genteng			Pengembangan Wawasan Kader Posyandu	1 Kegiatan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bosel	
						Pelatihan Pengelolaan Manajemen UMKM	1 Kegiatan						
						Pelatihan Tanggap Bencana	1 Kegiatan						
						Rehabilitasi Gedung Posyandu Kangkung 2 RW. 001	14 M2						
						Perbaikan Jalan Setapak RW. 006	200 M1						
						Terbangunnya TPT RW. 009	9 M3						
						Terbangunnya TPT RW. 010	18 M3						
						Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 002	100 M1						
						Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 005	136 M1						
						Terbangunnya Saluran Pembuangan Air RW. 006	148 M1						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Harjasari						Pembangunan Turap/TPT RW.04	1 Paket			370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Pembangunan Turap/TPT RW.08	1 Paket						
						Pembangunan Saluran Air Kotor/Drainase RW.02	1 Paket						
						Pembangunan Saluran Air Kotor/Drainase RW.05	1 Paket						
						Pembangunan Saluran Air Kotor/Drainase RW.11	1 Paket						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kertamaya						Pembangunan Jalan Setapak (Paving Blok) RT. 02/07	200 M2			370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Pembangunan Saluran Pembuangan RW. 02	20 M2						
						Pembangunan Saluran Pembuangan RW. 09	150 M2						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT. 02 / 04	56 M3						
						Pembangunan Tembok Penahan Tanah RT. 02 / 02	36 M3						
						Pembangunan Trotoar (Paving Blok) RW. 02	500 M2						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lawangintung						Sosialisasi Bahaya Narkoba	1 Kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Perbaikan Gedung Posyandu Lestari RW.007	30 m2						
						Perbaikan Jalan Setapak (Paving Block) RT.003/004	187 m2						
						Perbaikan Jalan Setapak (Paving Block) RT.004/004	151 m2						
						Lanjutan Perbaikan Gedung Posyandu Melati RW.006	38 m2						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muarasari						Renovasi Posyandu	1 paket			370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Pembangunan Jalan RW. 01,04,05 dan 09	1 paket						
						Pembangunan Saluran Air RW. 08	1 paket						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mulyaharja			Kelurahan Mulyaharja			Pembangunan Gedung Serbaguna	80 M2			370.138.000	370.137.999	Kec. Bosel	
						Pemasangan Paving Block RW.002	275 M2						
						Pembangunan Turab RW.002	60 M3						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuan			RW. 03, RW. 04, RW. 05 dan RW. 07 Kelurahan Pakuan			Perbaikan Jalan Lingkungan RW. 03	0 m2			370.138.000	370.138.000	Kec. Bosel	
						Pembangunan TPT RW. 04, RW. 05 dan RW. 07	0 m3						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pamoyanan						Pembangunan Drainase di RW. 03	180 M2			370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Pembangunan Drainas di RW. 07	180 M2						
						Pembangunan Drainas di RW. 08	180 M2						
						Rehab Posyandu di RW. 06	72 M2						
						pembangunan Posyandu di RW. 09	60 M2						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rancamaya						Pembangunan Turap Penahan Tanah RW.02 dan RW.010	1 paket			370.138.000	-	Kec. Bosel	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ranggamekar						Pekerjaan Pembangunan Draenase Air Rw. 1,2,4,5,6,7,8,13 (520 m)	0 520 m			370.138.000	-	Kec. Bosel	
						Pembangunan TPT Rw 2,3,4,5,6 (225M)	0 225 M						
						Pelatihan Keluarga Berencana (KB)	0 Paket						
<b>KECAMATAN BOGOR TIMUR</b>										<b>12.880.693.000</b>	<b>14.790.828.000</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										<b>12.880.693.000</b>	<b>14.790.828.000</b>		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.910.000.000</b>	<b>2.200.000.000</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Kecamatan Bogor Timur			Pengelolaan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24 orang			1.910.000.000	2.200.000.000	Kec. Bosel	
						Pemenuhan Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik	12 bulan						
						Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 bulan						
						Pemenuhan Kebutuhan Pengisian Tabung Gas	12 Tabung						
						Pemenuhan Kebutuhan Bahan Dekorasi dan Dokumentasi	12 bulan						
						Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar dan Pelumas	7 Mobil						
						Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Pertukangan	12 bulan						
						Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	12 bulan						
						Pemenuhan Kebutuhan Belanja Listrik Air Telpon	12 bulan						
						Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.848.000.000</b>	<b>2.300.000.000</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengadaan Inventaris Kantor			Kecamatan Bogor Timur			BM Kendaraan Dinas Pick Up Roda 4	1 Unit			848.000.000	1.300.000.000	Kec. Bosel	
						BM Kendaraan Dinas Roda 2	8 Unit						
						BM Pengadaan Meja Pimpinan	1 Unit						
						BM Pengadaan LCD Proyektor	7 Unit						
						BM Pengadaan Lemari Es	1 Unit						
						BM Pengadaan Sofa	7 Set						
						BM Pengadaan Tangga Sorong	1 Unit						
						BM Pengadaan Tangga Multifungsi	1 Unit						
						BM Pengadaan Camera DSLR	1 Unit						
						BM pengadaan Standing Mix	2 Unit						
						BM Pengadaan Standing Fan	4 Unit						
						BM Pengadaan Dispenser	10 Unit						
						BM Pengadaan Kursi Susun	350 Unit						
						BM Pengadaan Printer Multifungsi	9 Unit						
						BM Pengadaan Notebook	8 Unit						
						BM Pengadaan Komputer PC All In One	4 Unit						
						BM Pengadaan Wireless Router	1 Paket						
						BM Pengadaan Lemari Arsip	8 Buah						
						BM Pengadaan Filling Cabinet	10 Buah						
						BM pengadaan Rak Arsip	16 Buah						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kecamatan Bogor Timur			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda (2) dua	25 motor			1.000.000.000	1.000.000.000	Kec. Bosel	
						Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda (4) empat	6 mobil						
						Belanja pemeliharaan Printer	10						
						Belanja Pemeliharaan PC	10 PC						
						Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1						
						Belanja Loket Pelayanan Kelurahan	Gedung 1 unit						
						Belanja Pengadaan Tiang Bendera	0 unit						
						Belanja Pengadaan Pot Bunga	0 Paket						
						Belanja Pengadaan Kitchen Set	0 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>149.970.000</b>	<b>260.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kecamatan Bogor Timur			Penyusunan Sakip Kecamatan Bogor Timur Tahun 2019	6 Buku			149.970.000	260.000.000	Kec. Bosel	
						Penyusunan LKPJ Kecamatan Bogor Timur 2019	6 Buku						
						Penyusunan Renja OPD 2021	6 Buku						
						Penyusunan LPPD 2019	5 Buku						
						Penyusunan Laporan Tahunan 2019	4 Buku						
						Pembuatan Spanduk Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasvarakatan	28 Buah						
						Pembuatan Leaflet Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasvarakatan	1680 Lembar						
						Pembuatan Brosur Kegiatan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasvarakatan	1680 Lembar						
						Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	12 Dokumen						
<b>PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DAN KELURAHAN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>450.000.000</b>	-		
Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016 Kecamatan Bogor Timur						Pengadaan Mobil Siaga Kelurahan	2 Mobil			450.000.000	-	Kec. Bosel	
<b>PENINGKATAN PELAYANAN PATEN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>			<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>	<b>8.522.723.000</b>	<b>10.030.828.000</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	3,1			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	3,1				
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan			Kecamatan Bogor Timur			Honorarium Pegawai Tidak Tetap Front Office dan Tenaga Pengadministrasi Kelurahan Kelurahan Belanja Cetak Blangko Pelayanan Kecamatan Kelurahan Belanja Kop Surat, Stop Map, AMPlop	9 Orang  1 Paket  1 Paket			485.400.000	610.000.000	Kec. Bosel	
Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan			Kecamatan Bogor Timur			Sosialisasi Koperasi dan UMKM Validasi Data UMKM, PKL dan Koperasi Bazar Festival Bogor Timur Bazar Ramadhan Bogor Timur Rapat Verivikasi Perusahaan Terbaik Pemeliharaan Aplikasi Dokart Helaran Hari Jadi Bogor	2 Kegiatan 12 Bulan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Unit 1 Kegiatan			495.000.000	450.000.000	Kec. Bosel	
Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan						Dilaksanakannya Sosialisasi PAAR Dilaksanakannya Sosialisasi Bank Sampah dan Manfaat Barang Bekas Dilaksanakannya Sosialisasi HATINYA PKK Dilaksakannya Sosialisasi TOGA Dilaksanakannya Hari Besar Islam Dilaksanakannya Pengajian rutin PKK Dilaksanakannya Pertemuan Rutin PKK Dilaksanakannya Peningkatan Wawasan Rapat terkait STQ Acara Puncak STQ	7 Kegiatan 7 Kegiatan 7 Kegiatan 1 Kegiatan 14 Kegiatan 70 Kegiatan 71 Kegiatan 1 Paket 3 kegiatan 1 Kegiatan			877.760.000	1.100.000.000	Kec. Bosel	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Keikutsertaan MTQ tingkat Kota	1 Kegiatan						
						Sosialisasi RTLH Tk. Kecamatan	12 Kegiatan						
						Survei dalam rangka Verifikasi RTLH	12 Bulan						
						Rapat Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Budaya Tingkat Kecamatan	24 Kegiatan						
						Teraweh Keliling Tk, Kecamatan Bogor Timur	6 Kegiatan						
						Penanganan Darurat Pasca Bencana	12 Bulan						
Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan			Kecamatan Bogor Timur			Honorarium Linmas Kegiatan Penyakit Masyarakat	264 Orang			263.490.000	560.000.000	Kec. Bosel	
						Honorarium Linmas Kegiatan Penataan PKL	264 Orang						
						Spanduk	44 Buah						
						Cetak Foto	1025 Buah						
						Biaya Penanganan Jenazah	1 Paket						
						Fotocopy	1 Paket						
						Penjilidan	201 explar						
						Sewa Mobil Ambulance	44 Unit						
						Pakaian Non PNS (Linmas)Lengkap	42 Paket						
						Kegiatan Sosialisasi K3 untuk Mengurangi Reduksi Sampah	424 OH						
						Kegiatan Sosialisasi Sistem Keamanan Lingkungan	250 OH						
						Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Tawuran pada pelajar	600 OH						
Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan			Kecamatan Bogor Timur			Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DED	1 Paket			325.880.000	790.000.000	Kec. Bosel	
						Pembangunan Kantor Kelurahan Sindangrasa							
						Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DED	1 Paket						
						Pembangunan Kantor Kelurahan Sindangsari							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Honorarium Tim Musrenbang Honorarium Tim Monitoring Saprass Honorarium Tim Pendataan IMB Belanja Benner	1 Paket 1 Paket 1 Paket 10 Meter						
						Belanja X banner Cetak Foto Kegiatan Bahan Musrenbang photocopy, HVS 70gr Laporan Monev photocopy, HVS 70gr Blanko IMB Dinas Bahan HVS Folio 80 GRam Logo Berwarna dan Background Blanko Pengajuan IMB - Bahan HVS Folio 80 Gram Logo warna Hitam Map Dinas - Bahan Buffalo Berikut Logo Berwarna fotocopy Pra Musrenbang fotocopy Musrenbang Biaya Fotocopy Kegiatan Sewa Gedung Rapat Musrenbang	13 Set 500 buah 150 Set 6 set 20 rim 10 rim 300 buah 8000 Lembar 22000 lembar 3000 Lembar 1 Paket						
						Belanja Uang Saku Peserta Sosialisasi IMB (RT,RW dan LPM) Belanja Uang Saku Peserta Sosialisasi Saprass (RT,RW dan LPM) DED Pembangunan Kelurahan Sindangrasa DED Pembangunan Kelurahan Sindangsari	424 OH 424 OH 1 Paket 1 Paket						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang			Kelurahan Baranangsiang			Pelaksanaan pengelola kegiatan kelurahan Terlaksananya Musrenbang Tk. Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan RT, RW LPM	12 Bulan 0 Kegiatan 2 Kegiatan			757.320.000	800.000.000	Kec. Bosel	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya Kegiatan Rakor Kependudukan	2 kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor data kemiskinan	2 Kegaitan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor rawan bencana	2 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor k3	2 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor RTLH	2 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor IMB	2 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor UMKM	2 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	2 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Kerja Bakti	12 Kegiatan							
						terlaksananya kegiatan betonisasi di RW 005	0 M1							
						terlaksananya kegiatan Drainase di RW 004	0 M1							
						terlaksananya kegiatan Drainase di RW 011	0 M1							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa			Kelurahan Sindangrasa			Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan			616.250.000	650.000.000	Kec. Bosel		
						Terlaksananya Kegiatan Piket Kantor	12 Bulan							
						Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LPM, RW dan RT	12 Bulan							
						Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan							
						Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	0 Bulan							
						Tersedianya Alat Kebersihan	12 Bulan							
						Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tk.Kelurahan	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Musyawarah Kelurahan	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Rakor RT RW LPM Babinsa dan Babinmas	4 Kegiatan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya Pemutakhiran Data Penduduk	0 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen	0 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Pendataan Kemiskinan	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor Rawan Bencana	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor IMB	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan K3	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor RTLH	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Kegiatan Rakor UMKM	1 Kegiatan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari			Kelurahan Sindangsari			Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Kelurahan	12 Bulan			525.400.000	600.000.000	Kec. Bosel		
						Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kegiatan							
						Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Kelurahan	4 Kegiatan							
						Pelaksanaan Pembinaan Rakor RT, RW, LPM	4 Kegiatan							
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	4 Kegiatan							
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan	4 Kegiatan							
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kader Posyandu	4 Kegiatan							
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	4 Kegiatan							
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor Rawan Bencana	4 Kegiatan							
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor IMB	4 Kegiatan							
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor UMKM	4 Kegiatan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor K3	4 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bhakti	4 Kegiatan						
						Perbaikan Saluran Air RW.04	250 m2						
						Perbaikan Saluran Air RW.05	200 m2						
						Perbaikan Saluran Air RW.07	150 m2						
						Tim Teknis	1 Tim						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari			Kecamatan Bogor Timur			Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan			524.075.000	600.000.000	Kec. Bosel	
						Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LPM, RW dan RT	12 Bulan						
						Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Penduduk	12 Bulan						
						Terlaksananya Kegiatan Data Penduduk Non Permanen	2 Kegiatan						
						Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan						
						Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Dana Kelurahan Tahun 2020	1 Kegiatan						
						Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan						
						Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan						
						Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan						
						Terlaksananya kegiatan Jumsih	11 Bulan						
						Terlaksananya Kegiatan Rembug Warga	6 Kegiatan						
						Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Saluran Air RW. 02	200 M1						
						Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Saluran Air RW. 03	200 M1						
						Terlaksananya Kegiatan Perbaikan Saluran Air RW. 05	200 M1						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur			Kelurahan Tajur			Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Kelurahan	12 Bulan			487.690.000	550.000.000	Kec. Bosel	
						Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Tingkat Kelurahan	6 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor RT , RW , LPM Tingkat Kelurahan	6 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan Tingkat Kelurahan	8 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor Data Kemiskinan Tingkat Kelurahan	8 Kegiatan						
						Pelaksanaan Pembinaan Kader Posyandu	4 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan rawan Bencana	6 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor UMKM	6 Kegiatan						
						Pelaksanaan Rakor K3	6 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor IMB	6 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bhakti	6 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor RTLH	6 Kegiatan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa			Kelurahan Katulampa			Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Kelurahan	Bulan			943.630.000	1.100.000.000	Kec. Bosel	
						Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan	Kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rt,Rw, dan LPM	kegiatan						
						Pelaksanaan Kegiatan Rakor Kependudukan	kegiatan						
						Pelaksanaan kegiatan Rakor data kemiskinan	kegiatan						
						Pelaksanaan kegiatan Rakor RTLH	kegiatan						
						Pelaksanaan kegiatan Rakor rawan bencana	kegiatan						
						pelaksanaan kegiatan Pembinaan Posvandu	kegiatan						



Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pembuatan Ralling Tangga	100 M1						
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	12 Posyandu						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tajur			Kelurahan Tajur			Perbaikan Jalan Lingkungan RW 001	450 m2			370.138.000	370.138.000	Kec. Bosel	
						Perbaikan Jalan Lingkungan RW 003	450 m2						
						Perbaikan Jalan Lingkungan RW 004	350 m2						
						Perbaikan Saluran AIR RW 005	100 m1						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Katulampa			Kelurahan Katulampa			Perbaikan Jalan Setapak RT. 003 Rw. 002	kegiatan			370.138.000	370.138.000	Kec. Bosel	
						Perbaikan Jalan Setapak RT. 001 Rw. 003	kegiatan						
						Perbaikan Jalan Setapak RT. 011 Rw. 004	kegiatan						
<b>KECAMATAN BOGOR BARAT</b>										<b>20.588.000.000</b>	<b>3.423.468.900</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										<b>20.588.000.000</b>	<b>3.423.468.900</b>		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.841.279.900</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						terpenuhi belanja pns	bulan			1.841.279.900	-	Kec. Bobar	
						terpenuhinya belanja non pns	bulan						
						terpenuhinya belanja ATK	bulan						
						terpenuhinya belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	bulan						
						terpenuhinya belanja pengisian tabung gas	bulan						
						terpenuhinya belanja promosi	bulan						
						penyebarluasan informasi	bulan						
						terpenuhinya belanja listrik, telepon, air	0 bulan						
						terpenuhinya belanja surat kabar	0 bulan						
						terpenuhinya stnk kendaraan	0 bulan						
						terpenuhinya BBM	0 bulan						
						terpenuhinya BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan	0 bulan						
						terpenuhinya Belanja cetak dan penggandaan	0 bulan						
						terpenuhinya belanja makan dan minum	0 bulan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						terpenuhinya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	0 bulan							
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.834.605.000</b>	<b>1.600.000.000</b>			
Pengadaan Inventaris Kantor			Kecamatan Bogor Barat			terpenuhinya belanja pegawai terpenuhinya belanja vertical blind terpenuhinya belanja interior design kecamatan terpenuhinya belanja motor dinas kelurahan  terpenuhinya belanja proyektor terpenuhinya belanja komputer terpenuhinya belanja printer terpenuhinya belanja televisi	0 6 bulan 0 1 paket 0 1 paket 0 16 unit  0 4 unit 0 12 unit 0 12 unit 0 2 unit			1.096.205.000	1.100.000.000	Kec. Bobar		
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kecamatan Bogor Barat			terpeliharanya perlengkapan kantor terpeliharanya bangunan dan gedung  terpeliharanya kendaraan dinas terpeliharanya septitank	0 12 bulan 0 12 bulan  0 12 bulan 0 12 bulan			488.400.000	500.000.000	Kec. Bobar		
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>93.865.000</b>	-			
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Terlaksana kegiatan penyusunan perencanaan dan pelaporan PD	0 Kegiatan			93.865.000	-	Kec. Bobar		
<b>PENINGKATAN PELAYANAN PATEN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>			<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>	<b>17.068.250.100</b>	<b>1.833.468.900</b>			
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	<b>3,1</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	<b>3,1</b>					
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan						Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah di Kecamatan	kegiatan			713.400.000	-	Kec. Bobar		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keuaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan						Terlaksananya kegiatan peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan	kegiatan			89.571.900	-	Kec. Bobar	
Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan						Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan sosial Budaya di Kecamatan	kegiatan			757.077.600	-	Kec. Bobar	
Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan						Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	kegiatan			205.216.000	-	Kec. Bobar	
Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan						Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan	kegiatan			320.900.500	-	Kec. Bobar	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Balumbang Jaya						Musrenbang Tingkat Kelurahan Rapat Koordinasi dengan LPM, RW dan RT Pelaksanaan K3 Monitoring Posyandu  Piket Kantor Alat Tulis Kantor  Petugas Administrasi Pelayanan Kantor dan Petugas Kebersihan	1 Kali 12 Kali 48 Kali 12 Bulan  12 Bulan 12 Bulan  12 Bulan			539.503.500	-	Kec. Bobar	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bubulak			Kelurahan Bubulak			Musrenbang Tingkat Kelurahan Honorarium Penyelenggaraan LPM , RT ,RW Alat Tulis Kantor  Peralatan Kebersihan dan Pembersih  Piket Kantor  Petugas Kebersihan  Petugas Administrasi Kelurahan	1 kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan  12 Bulan 12 Bulan  12 Bulan			560.684.000	-	Kec. Bobar	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Barat						Musrenbang Tingkat Kelurahan Rapat Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Pembinaan LPM,RW dan RT	1 Kali 12 Kali 12 Kali			671.833.500	-	Kec. Bobar	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keleuran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pelaksanaan K3 Monitoring Posvandu	48 Kali 12 Kali							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Timur						Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor,  Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM, RW dan RT Pelaksanaan Kegiatan Persiapan dan Musrenbang Tingkat Kelurahan	12 Bulan  12 Bulan  2 Kali			600.334.600	-	Kec. Bobar		
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug			Kelurahan Curug			Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug mulai dari Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan			603.435.500	463.435.500	Kec. Bobar		
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug Mekar						Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM/RT/RW	1 Kali  12 Bulan			584.576.000	-	Kec. Bobar		
						Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai dari Petugas Administrasi, pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor Serta Alat Tulis Kantor	12 Bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu			Kelurahan Gunung Batu			Terpeuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu Pembinaan Penyelenggaraan RT/RW dan LM Pelaksanaan Kegitan Piket Kantor Petugas Kebersiohan dan petugas pelayanan	12 builan  12 bulan 12 bulan 13 bulan			632.716.400	492.716.400	Kec. Bobar		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pelaksanaan Rapat/Musyawaharah Pembinaan	12 bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Loji						Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM	12 Bulan			567.394.000	-	Kec. Bobar		
						Pengadministrasian Pelayanan/ Front Office	12 Bulan							
						Pelaksanaan Kebersihan Kantor	12 Bulan							
						Pelaksanaan Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan							
						Belanja Alat Listrik dan Eletonik (Lampu)	12 Bulan							
						Belanja Peralatan dan kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan							
						Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior (Spanduk)	12 Bulan							
						Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 Kali							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Marga Java						Musrenbang Tingkat kelurahan	1 Kali			428.684.000	-	Kec. Bobar		
						Sosialisasi Tingkat kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masvarakat	4 Bulan							
						Pengadadaan ATK	25 Jenis							
						Alat Kebersihan	13 Jenis							
						Pengisian Tabung Gas	24 Kali							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Menteng						Terpenuhinya kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Menteng	12 Bulan			703.348.500	-	Kec. Bobar		
						Pembinaan Kelembagaan RT Rw LPM	12 Bulan							
						Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kali							
						Tersedianya Belanja Barang dan Jasa	12 Bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Java						Musreimbang Tingkat Kelurahan	1 Kali			599.262.500	-	Kec. Bobar		
						Pembinaan kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT	12 Bulan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, mulai petugas Administrasi pelayanan kantor, Petugas Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	12 Bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Kuda			Kelurahan Pasir Kuda			Pelaksanaan Piket	12 bulan			604.360.600	464.360.600	Kec. Bobar		
						Pengadministrasian pelayanan	12 bulan							
						Pelaksanaan Kebersihan Kantor Honorarium	12 bulan							
						Penyelenggaraan pemerintahan LPM RW RT								
						Alat Tulis Kantor	12 bulan							
						Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Mulya			Kelurahan Pasir Mulya			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT, RW dan LPM	1 Kali			440.911.600	-	Kec. Bobar		
						Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	12 Bulan							
						Pelaksanaan Kebersihan Kantor	12 Bulan							
						Pelaksanaan Piket Kantor Non PNS	12 Bulan							
						Alat Tulis Kantor	12 Bulan							
						Peralatan Kebersihan dan Pembersih	12 Bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Semplak						Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPM, RW dan RT	2 Kali			497.951.000	-	Kec. Bobar		
							12 Bulan							
						Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Mulai Petugas Administrasi Pelayanan Kantor, Petugas Kebersihan Kantor seta Alat Tulis Kantor	12 Bulan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pelaksanaan Kegiatan Piket Kantor	12 Bulan							
						Petugas Kebersihan dan Pelayanan	13 Bulan							
						Pelaksanaan Rapat Musyawarah/Pembinaan	12 Bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindang Barang			Kelurahan Sindangbarang			Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sindangbarang	12 Bulan			542.956.400	402.956.400	Kec. Bobar		
						Pembinaan	12 Bulan							
						Penyelenggaraan Pemerintahan RT, RW dan LPM								
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situ Gede			Kelurahan Situgede			Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan	2 kali			481.924.000	-	Kec. Bobar		
						Pembinaan kelembagaan Masyarakat LPM,RW dan RT	12 bulan							
						Terpenuhinya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, mulai petugas Administrasi pelayanan kantor, Petugas Kebersihan dan Alat Tulis Kantor	12 bulan							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balumbang Jaya						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bubulak						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Barat						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cilendek Timur						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug Mekar						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Batu						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Loji						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Marga Jaya						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Menteng						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Jaya						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Kuda						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasir Mulya						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semplak						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sindang barang						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Situgede						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan			370.138.000	-	Kec. Bobar	
<b>KECAMATAN BOGOR TENGAH</b>										<b>18.903.924.459</b>	<b>8.531.566.000</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										<b>18.903.924.459</b>	<b>8.531.566.000</b>		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>										<b>18.903.924.459</b>	<b>8.531.566.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.136.747.500</b>	<b>1.450.000.000</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Kecamatan Bogor Tengah			Pembayaran Honor TKK Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan Belanja Alat Tulis kantor Belanja Listrik Belanja Jasa Kantor Belanja Bahana Bakar Minyak/Gas Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pajak Kendaraan Belanja Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	12 Bulan 3 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Paket			1.136.747.500	1.450.000.000	Kec. Boteng	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.880.816.000</b>	<b>1.950.000.000</b>		
Pengadaan Inventaris Kantor						Pengadaan Motor Dinas	2 Unit			888.500.000	950.000.000	Kec. Boteng	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pengadaan Filing Kabinet Pengadaan Meubeulair	10 Unit 22 Unit						
						Pengadaan Alat Pendingin Pengadaan TV Pengadaan Komputer Pengadaan Printer Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat Pengadaan Kursi rapat Pengadaan Sofa Tamu	22 Unit 1 Unit 10 Unit 18 Unit 16 Unit 300 Unit 11 Unit						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kecamatan Bogor Tengah			Service Kendaraan Roda 4 Penggantain Suku Cadang kendaraan Roda 4 Pemeliharaan Peralatan kantor (AC) Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Pemeliharaan Renovasi Atap Gedung Kecamatan Pemeliharaan Teralis jendela	8 Unit 6 Unit 23 Unit 27 Unit 19 Unit 5 Kelurahan 1 Kelurahan 0 Kelurahan			992.316.000	1.000.000.000	Kec. Boteng	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>23.804.460</b>	<b>35.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Kecamatan Bogor Tengah			Rencana Kerja SKPD Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD Laporan Tahunan SKPD dan LKPJ LPPD dan EPPD tahun 2018 Pra RKA, RKA dan DPA Renstra Perangkat Daerah	8 Buku 8 Buku 8 Buku 8 Buku 10 Buku 8 Buku			23.804.460	35.000.000	Kec. Boteng	
<b>PENINGKATAN PELAYANAN PATEN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>			<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>	<b>18.362.556.499</b>	<b>5.096.566.000</b>		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	3,1			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	3,1				
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan						Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan			5.311.200.000	-	Kec. Boteng	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan di Kelurahan Optimalisasi Pembangunan Kecamatan Melalui Penghargaan Pencapaian PBB P2 untuk Kecamatan dan Kelurahan Penilaian lomba-lomba tingkat kelurahan dan kecamatan Pelayanan dan penyebarluasan informasi dibidang pemerintahan,pembangunan dan kemasvarakatan Perluasan Tanah untuk Kantor Kecamatan Survey Kepuasan Masyarakat	11 Kelurahan 5 Lokasi 11 Kelurahan 100 % 1 Lokasi 11 Kelurahan						
Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan						Pendataan Pelaku Usaha Kecil Menengah Peserta Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Kegiatan Helaran UMKM	11 kelurahan 110 Peserta 1 kali			48.075.000	-	Kec. Boteng	
Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan						Jumlah Proposal Hibah dan Bansos Penerima Manfaat yang telah di Verifikasi Terselenggaranya kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Bogor Teneah Terlaksananya Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan	100 % 4 Pokja 1 bulan			715.009.500	-	Kec. Boteng	
Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan			Kecamatan Bogor Tengah			peningkatan pelayanan sektor trantib di kecamatan	1 bulan			191.999.999	-	Kec. Boteng	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keeluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						penataan PKL di jalan lingkungan	11 Kelurahan							
						pemutakhiran data gangguan kantrantibmas	11 Kelurahan							
						Penanganan mayat terlantar	20 orang							
						Tanggap darurat bencana	11 kelurahan							
Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan			Kecamatan Bogor Tengah			Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan			44.154.000	-	Kec. Boteng		
						Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	11 kelurahan							
						Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan se-Kecamatan Bogor Tengah	11 kelurahan							
						Pelayanan Perizinan IMB yang terlayani	12 bulan							
						Sosialisasi Pelayanan Perizinan Di Kecamatan Bogor Tengah	66 Peserta							
						Pengadaan Konsultansi Pengawasan	10 Dokumen							
						Pembangunan Kantor Kelurahan	2 unit							
						Mutual Check (MC) / Persentase Realisasi Fisik	90 %							
						Pendampingan T4D	6 Orang							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan Pasar			kelurahan babakan pasar kecamatan bogor tengah			dana/ anggaran	Rp			501.400.000	404.400.000	Kec. Boteng		
						pengelola BOP kegiatan kelurahan	bulan							
						honor pembinaan lembaga LMP RW RT	12 bulan							
						kegiatan musrenbang tk kelurahan	bulan							
						belanja ATK	bulan							
						belanja alat listrik	bulan							
						Belanja Alat Kebersihan	bulan							
						belanja spanduk	bulan							
						belanja dokumentasi	bulan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						belanja penggandaan belanja makan dan minum	bulan bulan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan			Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah			Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 bulan			477.400.000	450.000.000	Kec. Boteng	
						Kegiatan Pra dan Musrenbang Tk.Kelurahan Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan	1 bulan 12 bulan						
						Kegiatan Pemutakhiran Data di Kelurahan	10 bulan						
						Kegiatan Kebersihan Lingkungan di wilayah Kelurahan	10 bulan						
						Kegiatan Pengamanan Kantor Kelurahan	12 bulan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibogor			Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah			Tertib Administrasi di Kelurahan	95 %			442.600.000	345.600.000	Kec. Boteng	
						Musrenbang Tk.kelurahan	1 Kegiatan						
						Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan (LPM.RW.RT)	12 Bulan						
						Verifikasi Data Penduduk	2 Kegiatan						
						Verifikasi Data RTLH	1 Kegiatan						
						Verifikasi Data UMKM	1 Kegiatan						
						Verifikasi Data Penerima Bantuan	1 Kegiatan						
						Verifikasi Data Penduduk Non Permanen	1 Kegiatan						
						Verifikasi Data Rawan Bencana	1 Kegiatan						
						Verifikasi Data Sarana Prasarana Keagamaan dan Guru Ngaji	1 Kegiatan						
						Kegiatan Kebersihan Lingkungan	33 Kegiatan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciwaringin						Tertib administrasi di Kelurahan Musrenbang Tingkat Kelurahan 2021 untuk RKPD 2021 Kegiatan Pendataan RTLH  Kegiatan Pendataan Monev dan Partisipasi Masyarakat Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen	12 bulan  1 bulan  1 kegiatan  2 kegiatan  2 kegiatan			525.400.000	-	Kec. Boteng	
						Kegiatan Pendataan Kemiskinan  Sosialisasi RTLH  Sosialisasi Kamtibmas  Sosialisasi Kependudukan  Sosialisasi Kemiskinan	1 kegiatan  1 kegiatan  1 kegiatan  1 kegiatan  1 kegiatan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gudang						Terciptanya Tertib Administrasi Kelurahan yang lengkap dan teratur Musrenbang Tk. Kelurahan  Petugas Pelayanan Administrasi Kegiatan Operasi Sisir PBB  Kegiatan Rembug Warga  Kegiatan Rapat Koordinasi Kelurahan  Kegiatan Pembinaan RT, RW dan LPM Kegiatan Jumat Bersih dan Minggu Bersih	12 Bulan  1 Kegiatan  12 Bulan 8 Kegiatan  12 Kegiatan  4 Kegiatan  12 Bulan 33 Kegiatan			557.800.000	-	Kec. Boteng	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Kalapa						Tertib Administrasi Kelurahan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat RT,RW & LPM	12 bulan  1 Kegiatan  12 Bulan			519.400.000	-	Kec. Boteng	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pengamanan Kantor Kelurahan Kebersihan Kantor Kelurahan Pendataan Penerimaan Rastra Pendataan RTLH  Pendataan Rawan Bencana Alam  Pendataan UMKM  Pendataan Sarana dan Prasarana <b>Perekonomian</b>	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Kegiatan  1 Kegiatan  1 Kegiatan  1 Kegiatan						
						Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan (Jumsih & Mingsih)  Perengkapan Penerangan Kantor Alat Listrik dll Perengkapan Kebersihan Kantor, Alat Kebersihan Kantor dll  Perengkapan Dokumentasi & Dekorasi	12 Bulan  1 Paket 1 Paket  1 Paket						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pabaton						Tertib administrasi di kelurahan Musrenbang Tk. Kelurahan  Piket kantor  Petugas kebersihan  Verifikasi data kependudukan  Verifikasi data KIS / KIP / BPJS  Verifikasi data RTLH  Pembinaan lembaga kemasyarakatan ( LPM. RT dan RW ) Kegiatan kebersihan lingkungan	95 % 1 kegiatan 12 bulan 24 bulan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 12 bulan 48 kegiatan			398.200.000	-	Kec. Boteng	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Paledang			Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah			Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan			584.200.000	487.200.000	Kec. Boteng	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan							
						Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Bulan							
						Kegiatan Pemutakhiran Data	8 Kegiatan							
						Kegiatan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan							
						Pengamanan Kantor Kelurahan	12 Bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panaragan			Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah			Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan			469.000.000	372.000.000	Kec. Boteng		
						Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan	12 Bulan							
						Belanja ATK	12 Bulan							
						Belanja Alat Listrik	12 Bulan							
						Belanja Peralatan Kebersihan	12 Bulan							
						Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior	12 Bulan							
						Belanja Isi Ulang Tabung Gas	12 Bulan							
						Belanja Dokumentasi	12 Bulan							
						Belanja Cetak dan Penggadaan	12 Bulan							
						Belanja Makanan dan Minuman	12 Bulan							
						Belanja Makan dan Minum	12 Bulan							
						Pelatihan/Lokakarya	12 Bulan							
						Senisnva	12 Bulan							
						Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sempur						Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan			461.800.000	-	Kec. Boteng		
						Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan	12 Bulan							
						Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan							
						Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Bulan							
						Kegiatan Verifikasi Data Kependudukan	2 Kegiatan							
						Kegiatan Verifikasi Data RTLH	2 Kegiatan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Kegiatan Verifikasi Data Rawan Bencana	2 Kegiatan						
						Kegiatan Verifikasi Data Koperasi dan UMKM	2 Kegiatan						
						Kegiatan Verifikasi Data KIP/KIS/BPJS	2 Kegiatan						
						Belanja ATK Kegiatan	12 Bulan						
						Belanja Alat Listrik	12 Bulan						
						Belanja Peralatan Kebersihan	12 Bulan						
						Belanja Dokumentasi	12 Bulan						
						Belanja Penggandaan	12 Bulan						
						Belanja Mamin Kegiatan	12 Bulan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Lega			Kelurahan Tegallega			Pelaksanaan Teknis Kegiatan Kelurahan Kegiatan Musrembang Tingkat Kelurahan	12 Bulan 1 Kegiatan			543.400.000	446.400.000	Kec. Boteng	
						Kegiatan Pengamanan Kantor	12 Bulan						
						Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	12 Bulan						
						Kegiatan Pemutakhiran Data	8 Kegiatan						
						Kegiatan Kebersihan Lingkungan	12 Bulan						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan			Kelurahan Babakan			Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah wilayah Rw.08	1701380 00 200 Meter			370.138.000	370.138.000	Kec. Boteng	
						Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Kotor Wilayah Rw.03	3701380 00 200 Meter						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan Pasar						Perbaikan Jalan RW. 08	450 m			370.138.000	-	Kec. Boteng	
						Perbaikan TPT/Turap RW. 09	112 m3						
						Perbaikan TPT/Turap RW. 04	120 m3						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibogor			Kelurahan Cibogor			PERBAIKAN SALURAN AIR ( DRAINASE) RT 005 RW 001	M			370.138.000	370.138.000	Kec. Boteng	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						PERBAIKAN SALURAN AIR ( DRAINASE) RT 003 RW 002	M						
						PERBAIKAN SALURAN AIR ( DRAINASE) RT 001 RW 003	M						
						PERBAIKAN SALURAN AIR ( DRAINASE) RT 005 RW 004	M						
						PERBAIKAN SALURAN AIR ( DRAINASE) RT 001 RW 005	M						
						PERBAIKAN SALURAN AIR ( DRAINASE) RT 003 RW 006	M						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ciwaringin			RT 02 RW 01 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Ciwaringin			Presentasi partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sarana Prasarana Lingkungan dan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	10 %			370.138.000	370.138.000	Kec. Boteng	
						Tersedianya Fasilitas Umum (Fasum) dalam kondisi yang baik	2 paket						
						Turap / TPT RT 02 RW 02	1 paket						
						Turap / TPT RT 02 RW 01	1 paket						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gudang			Kelurahan Gudang			Perbaikan Tembok Penahan Tanah di RT.05 RW.001	86 m3			370.138.000	370.138.000	Kec. Boteng	
						Perbaikan Tembok Penahan Tanah di RT.04 dan RT.05 RW.003	71 m3						
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Kalapa			Kelurahan Kebon Kalapa			Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di RT.003/001	meter			370.138.000	370.138.000	Kec. Boteng	
						Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di RT.003/001	meter						
						Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di RT.003/003	meter						
						Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di RT.003/003	meter						
						Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di RT.005/007	meter						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di RT.005/007	meter							
						Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di RT.005/009	meter							
						Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) di RT.005/009	meter							
						Kegiatan RW Layak Anak	orang							
						Kegiatan RW Layak Anak	orang							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pabaton						Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	0 %			370.138.000	-	Kec. Boteng		
						Pembangunan Pos Ronda RW 03	Buah							
						Perbaikan Saluran Air RW 02	Meter							
						Perbaikan Saluran Air RW 04	Meter							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Paledang			Kelurahan Paledang			Pembangunan Gedung Posyandu RW.05	25 m2			370.138.000	370.138.000	Kec. Boteng		
						Pembangunan Gedung Sekretariat Kampung KB Kebon Manggis RW.04	16 m2							
						Pembangunan Gedung Sekretariat LPM	15 m2							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panaragan						Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Yang Memadai	3 Buah			370.138.000	-	Kec. Boteng		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempur						- Pembangunan Turap Penahan Tanah (TPT) Rt.02 Rw.04	1 Paket			370.138.000	-	Kec. Boteng		
						- Pembangunan Posyandu RW.07	1 Paket							
						- Kegiatan RW Ramah Anak	30 Orang							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegallega			Kelurahan Tegallega			Tersedianya TPT/Turap yang kokoh di rw 02	90 meter			370.138.000	370.138.000	Kec. Boteng		
						Tersedianya Saluran Air yang memadai di RW 7	125 meter							
						Tersedianya Saluran Air yang memadai di RW 1	125 meter							
<b>KECAMATAN TANAH SAREAL</b>										<b>15.569.708.000</b>	<b>6.810.276.000</b>			

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										<b>15.569.708.000</b>	<b>6.810.276.000</b>		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>15.569.708.000</b>	<b>6.810.276.000</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Kecamatan Tanah Sareal			Kebutuhan Belanja Pegawai/Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12 Bulan			1.578.190.000	1.600.000.000	Kec. Tanah Sareal	
						Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Bulan						
						Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan						
						Belanja Makanan dan Minuman	12 Bulan						
						Belanja Perjalanan Dinas	12 Bulan						
						Rekening Telepon	12 Bulan						
						Rekening Air	12 Bulan						
						Rekening Listrik	12 Bulan						
						Surat Kabar dan Majalah	12 Bulan						
						BBM Kendaraan Operasional	9 Mobil/Motor						
						Cetak dan Penggandaan	12 Bulan						
						Belanja Jasa Kebersihan	12 Bulan						
						Belanja Jasa Keamanan	12 Bulan						
						Belanja Peralatan Dapur	12 Bulan						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.150.000.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Tersedianya laptop	6 unit			450.000.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Tersedianya AC Standing 2PK	13 unit						
						Tersedianya meja infocus	2 unit						
						Tersedianya kursi rapat	500 unit						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Terpeliharanya septik tank Kecamatan dan Kelurahan	12 kantor			700.000.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat	6 unit						
						Terpenuhinya pajak kendaraan dinas	66 unit						
						Terpeliharanya AC Kecamatan dan Kelurahan	52 unit						
						Terpeliharanya printer Kecamatan dan Kelurahan	57 unit						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terpeliharanya komputer dan laptop (Kecamatan dan Kelurahan)	80 unit							
						Terpeliharanya CCTV Kecamatan dan Kelurahan	1 paket							
						Terpeliharanya mesin foto copy	7 unit							
						Terpeliharanya bangunan Kecamatan dan Kelurahan	12 gedung							
						Terpeliharanya taman Kecamatan	1 Kantor							
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>60.000.000</b>	-			
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Tersedianya sarana informasi ke masyarakat	12 bulan			60.000.000	-	Kec. Tanah Sareal		
						Terkoordinasinya informasi dengan masyarakat	12 bulan							
						Terpenuhinya dokumen laporan perencanaan dan pelaporan (LKPJ, LPPD, RENJA, LKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan)	24 buku							
						Terpenuhinya laporan hasil survey kepuasan masyarakat	6 buku							
<b>PENINGKATAN PELAYANAN PATEN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>			<b>Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan</b>	<b>82</b>	<b>12.781.518.000</b>	<b>5.210.276.000</b>			
				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	<b>3,1</b>			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan</b>	<b>3,1</b>					
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan						Sosialisasi Opsir PBB	1 Kegiatan			200.000.000	-	Kec. Tanah Sareal		
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan							
						Sosialisasi Pertanahan	1 Kegiatan							
						Penyebaran Informasi	1 Kegiatan							
						Terlaksananya Lomba-lomba Aparatur	5 Kegiatan							
Peningkatan Pelayanan Perekonomian di Kecamatan						Pendataan Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil	12 kali			50.000.000	50.000.000	Kec. Tanah Sareal		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Sosialisasi Perizinan Usaha Mikro dan Kecil	1 kali						
						Sosialisasi Koperasi	1 kali						
Peningkatan Pelayanan Sosial Budaya di Kecamatan			Kecamatan Tanah Sareal			Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan Tanah Sareal	1 Kecamatan			575.000.000	310.000.000	Kec. Tanah Sareal	
						Pelaksanaan Verifikasi Hibah/Bansos/RTLH	11 Kelurahan						
						Pelaksanaan Monitoring Hibah/Bansos/RTLH	11 Kelurahan						
						Evaluasi Pelaksanaan Hibah/Bansos/RTLH Terselenggaranya 10 Program PKK di Kecamatan	1000 Proposal						
						Terselenggaranya 10 Program PKK di Kelurahan	11 Kelurahan						
						Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %						
						Meningkatnya Peran Serta PKK dalam Pembangunan di Kelurahan	100 %						
						Terselenggaranya Kegiatan Lomba-Lomba	100 %						
Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan			Kecamatan Tanah Sareal			Terlaksananya Penertiban PKL dan Tingkat Gangguan Kamtibmas di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal	11 Kelurahan			100.000.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Benacan	11 Kelurahan						
						Pengurusan/Pemulasaran Bagi Mayat Terlantar	11 Kelurahan						
Peningkatan Pelayanan Pembangunan di Kecamatan			Kecamatan Tanah Sareal			Terlaksananya Renovasi Lantai II Aula Kelurahan Kedung Waringin	128 m2			1.800.000.000	1.800.000.000	Kec. Tanah Sareal	
						Terlaksananya Renovasi Lantai II Aula Kelurahan Kayumanis	35 m2						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pemasangan Canopy di Kelurahan Sukaresmi dan Gd. PKK/LPM Kel. Mekarwangi dan Pemagaran Gd. PKK/LPM Kel. Mekarwangi	90 m2							
						Penyelenggaraan Pra Musrenbang Tk. Kecamatan Tanah Sareal	1 Kali							
						Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan Tanah Sareal	1 Kali							
						Tersusunnya Rencana Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tanah Sareal	100 %							
						Terbitnya Ijin IMB	50 IMB							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kayumanis			Kelurahan Kayumanis			Musrenbang Tk Kelurahan	1 Kali			525.000.000	525.000.000	Kec. Tanah Sareal		
						Kelurahan Siaga Rakor Terhadap LPM,RW,dan RT	6 Kali							
						Kegiatan Rempug Warga	6 Kali							
						Petugas Piket	12 Bulan							
						Tenaga Pelayanan Administrasi BOP RT,RW,LPM	12 Bulan							
						Honor Jumsih	12 Bulan							
						Honor Jumantik	12 Bulan							
						Honor Petugas Kebersihan Kantor	13 Bulan							
						Honor Musrenbang Non PNS	1 Kali							
						Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Kali							
						Dokumentasi/Dekorasi	12 Kali							
						Makan Minum Kegiatan	12 Kali							
						Sarana dan Prasarana	2 Kegiatan							
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana						Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			600.000.000	-	Kec. Tanah Sareal		
						Belanja ATK	1 Paket							
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan							
						Pelayanan Masyarakat	12 Bulan							
						Terlaksananya Lokmin	11 Bulan							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Jumsih	11 Bulan						
						Renovasi Posyandu RW 01	1 Paket						
						Renovasi Posyandu RW 10	1 Paket						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwangi			Kelurahan Mekarwangi			Panitia Pelaksana Kegiatan	12 Bulan			600.000.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap LPM, RW, RT	12 Bulan						
						Piket Kantor Kelurahan	12 Bulan						
						Tenaga Administrasi ( S1 )	13 Bulan						
						Tenaga Kebersiahn	13 Bulan						
						Belanja ATK Admistrasi dan Pelayanan Kelurahan	12 Bulan						
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan						
						Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/ Eksterior	12 Bulan						
						Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12 Bulan						
						Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12 Bulan						
						Belanja Dokumentasi	12 Bulan						
						Belanja Cetak	12 Bulan						
						Belanja Penjilidan	12 Bulan						
						Belanja makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lok akarva/ Sejenisnva	12 Bulan						
						Perbaikan Gedung Posyandu	2 Bulan						
						Betonisasi Jalan	1 Bulan						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak						Musrenbang Tingkat kelurahan	1 Kali			600.000.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Sosialisasi / Rakor RT,RW dan LPM	3 Kali						
						Monitoring Dan Evaluasi Posyandu	20 Posyandu						
						Rembug Warga Kelurahan	5 Kali						
						Siaga Jumsih	5 Kali						
						Monitoring Rastra	12 Kali						
						Tenaga Administarsi Pelayanan Umum	13 Bulan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tenaga Piket Kantor	12 Bulan						
						Pembangunan Gedung Posyandu Rw. 002	30 M2						
						Pembangunan Gedung Posyandu Rw. 005	20 M2						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaresmi			Kelurahan Sukaresmi			Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			425.000.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Pembinaan RT RW LPM	12 Bulan						
						Pelayanan Administarsi	12 Bulan						
						Pelaksanaan Kebersihan Kantor	12 Bulan						
						Pelaksanaan Jum'at Bersih	12 Bulan						
						Belanja ATK	12 Bulan						
						Belanja Mamin/Snack	12 Bulan						
						Terbangunnya Saluran Air Hujan Perumahan di RW.004	60 m1						
						Terbangunnya Saluran Air Hujan Perumahan di RW.006	60 m1						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukadamai			Kelurahan Sukadamai			Pembuatan Rencana Kerja Kelurahan Tahun 2020	2 dok/tahun			510.000.000	510.000.000	Kec. Tanah Sareal	
						Pelaksanaan Pendataan data PBB (WP 4500)	71 % per tahun						
						Rencana kebutuhan rumah tangga Kelurahan	1 Paket/Tahun						
						Penataan lingkungan yang tertib, sehat, indah dan bersih	14 lokasi/tahun						
						Kegiatan Musrenbang ( Rt.53, Rw.14 dan 1 LPM )	1 Kegiatan /tahun						
						Pembinaan Rt, Rw dan LPM	12 kegiatan /tahun						
						Pelaksanaan rebug warga 14 Posyandu	14 posyandu/tahun						
						ATK Pengelola Kegiatan	12 bulan						
						Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	14 RW						
						Peningkatan Gedung Posyandu RW 08 (Lanjutan)	1 titi						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Waringin			Kelurahan Kedung Waringin			Peningkatan Gedung Posyandu RW 08 (Lanjutan)	1 titik			575.000.000	600.000.000	Kec. Tanah Sareal	
						Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan						
						Pelayanan Administrasi	12 Bulan						
						Pelaksanaan Jumat Bersih	12 Bulan						
						Belanja ATK	12 Bulan						
						Belanja Makan dan Minum / Snack	12 Bulan						
						Pembinaan LPM / RW / RT	12 Bulan						
						Lokmin Posyandu	12 Bulan						
						Perbaikan Saluran Air RW. 06	0 M1						
						Perbaikan Saluran Air RW. 07	0 M1						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya						Musrenbang Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan			450.000.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan						
						Pelayanan Masyarakat	12 Bulan						
						Jumsih	12 Bulan						
						Belanja ATK	1 Paket						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sareal						Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 Bulan			450.000.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	1 Kali						
						Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana	2 Titik						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes						Musrenbang tingkat kelurahan	1 dokumen			575.000.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Pembinaan LPM, RW dan RT	12 bulan						
						Pelayanan Administrasi	13 bulan						
						Petugas Kebersihan	13 bulan						
						Petugas Piket Kantor	12 bulan						
						Pelaksanaan Rapat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan Sarpras	1 paket						
						Perbaikan Drainase di RW 03	150 M3						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Perbaikan Drainase di RW 08	150 M3						
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Badak			Kelurahan Kedungbadak			Musrebang Tk.Kelurahan Pendataan Kemiskinan	Kegiatan Bulan			675.000.000	675.000.000	Kec. Tanah Sareal	
						Monitoring Posyandu Jegiatan Rembug Warga	Bulan Triwulan						
						Pelayanan Umum Kelurahan Siaga Pembinaan dan Pembirian BOP LPM,RW,RT	Bulan Bulan Bulan						
						Pembangunan Saluran Air Drainase di RW.03m1	m1						
						Pembangunan Jalan Lingkungan dengan Paping Blok	m1						
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Sareal						Pembangunan Pagar Tembok Sisi Ciliwung RW.01	60 Meter			370.138.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Pembangunan Pagar Tembok Sisi Ciliwung RW.02	75 Meter						
						Pembangunan Pagar Tembok Sisi Ciliwung RW.07	60 Meter						
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebon Pedes						Perbaikan Jalan Setapak di RT 04 RW 12	150 M2			370.138.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Perbaikan Jalan Setapak di RT 05 RW 12	150 M2						
						Pembangunan TPT di RT 06 RW 09	95 M3						
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Badak			Rw.01 Rw.12, Rw.06 dan Rw.04			Pembangunan Septitang Kelompok di Rw,01,06,12	KK			370.138.000	370.138.000	Kec. Tanah Sareal	
						Pembangunan Linning/Peninggian Batas tembok Sungai di Rw.01	m1						
						Pembangunan Posyandu Di Rw.04	m3						
						Pembangunan Posyandu di Rw.06	m3						
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Jaya						Renovasi Gedung Posyandu RW 01	1 Paket			370.138.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Renovasi Gedung Posyandu RW 04	1 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Renovasi Gedung Posyandu RW 05	1 Paket							
						Renovasi Gedung Posyandu RW 07	1 Paket							
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedung Waringin			RW.04,RW.06, RW.14 Kelurahan Kedung Warinein			Pembangunan Trotoar RW.04	375 M			370.138.000	370.138.000	Kec. Tanah Sareal		
						Perbaikan Jalan Setapak RW.14	375 M							
						Perbaikan TPT RW.06	126 M3							
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukadamai						Peningkatan/Pengaspalan Jalan lingkungan RT 003 RW 007	200 m			370.138.000	-	Kec. Tanah Sareal		
						Peningkatan/Pengaspalan RT 02 RW009	100 m							
						Peningkatan/Pengaspalan RT 001 RW 006	60 m							
						peningkatan saluran air/drainase RW 001	300 m							
						peningkatan saluran air/drainase RW 002	259 m							
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukaresmi			Kelurahan Sukaresmi			Terselenggaranya Pelatihan Kader Posbindu	1 Kegiatan			370.138.000	-	Kec. Tanah Sareal		
						Tersedianya Meubelair Posbindu	8 Posbindu							
						Tersedianya Peralatan Pemeriksaan Kesehatan Posbindu	8 Posbindu							
						Terbangunnya Gedung Posyandu Melati di RT.003 RW.007	1 Unit							
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah di RW.003	70 m1							
						Terbangunnya Tembok Penahan Tanah di RW.006	30 m1							
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibadak						Renovasi Gedung Posyandu Rw. 012	100 M2			370.138.000	-	Kec. Tanah Sareal		
						Renovasi Gedung Posyandu Rw. 001	100 M2							
						Pembangunan Turap / TPT Rw. 006	200 M							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayumanis			Kelurahan Kayumanis			Terlaksananya Pembangunan TPT di RW 06, 13 M3	100 %			370.138.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung RW 07 RW 011. 100 M3	100 %						
						Terlaksananya Pembangunan Jalan Penghubung RW 10 RW 011. 110 M3	100 %						
						Terlaksananya Pembangunan Jalan Setapak RW 011, 125 M3	100 %						
						Terlaksananya Pengadaan Gerobak Sampah Untuk RW 1 s/d RW 12. 12 Unit	100 %						
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kencana						Pembangunan TPT RW 04	1 Paket			370.138.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Pengaspalan Jalan RW 06	1 Paket						
						Pembangunan Drainase RW 09	1 Paket						
						Pelatihan Kader	1 Paket						
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekarwangi			Kelurahan Mekarwangi			Pembuatan TPT di RW. 006	560 M3			370.138.000	-	Kec. Tanah Sareal	
						Pembuatan TPT. 007 Perbaiki Betonisasi Jalan di RW, 005	500 M3 500 M2						
						RW. 001 s/d 003	460 M2						
<b>INSPEKTORAT</b>										<b>14.946.841.000</b>	<b>1.197.000.000</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										<b>14.946.841.000</b>	<b>1.197.000.000</b>		
<b>PENGAWASAN</b>										<b>14.821.841.000</b>	<b>1.197.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>1.753.476.000</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai Inspektorat Kota Bogor	100 Persen			1.753.476.000	-	Inspektorat	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>12.400.000.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor			Kecamatan Bogor Selatan			Kendaraan Dinas Roda 2	2 Unit			500.000.000	-	Inspektorat	
						Pendingin Ruangan (AC) Standing	10 Unit						
						Scanner	3 Unit						
						Proyektor	3 Unit						
						Laptop / Notebook	9 Unit						
						Personal Computer	5 Unit						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Kamera DSLR Penghancur Kertas	1 Unit 1 Unit							
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Kecamatan Bogor Selatan			Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat	100 %			200.000.000	-	Inspektorat		
						Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 Unit Kendaraan Roda 4							
						Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 4	10 Unit Kendaraan Roda 4							
						Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 2	11 Unit Kendaraan Roda 2							
						Belanja Pemeliharaan AC	13 Unit AC							
						Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah	11 Unit							
						Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik	1 Unit							
						Belanja Pemeliharaan Sound System	5 Unit							
						Belanja Pemeliharaan Komputer	16 Unit							
						Belanja Pemeliharaan Laptop	27 Unit							
						Belanja Pemeliharaan Printer	22 Unit							
						Belanja Pemeliharaan CCTV	1 Set							
						Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung							
Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Bogor			Kecamatan Bogor Selatan			Bangunan Kantor Inspektorat Kota Bogor	100 %			11.700.000.000	-	Inspektorat		
						Produk Pengawasan (Manajemen Konstruksi)	100 %							
<b>PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>52.720.000</b>	<b>52.000.000</b>			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Bogor			Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Laporan Kinerja	37 Perangkat Daerah			52.720.000	52.000.000	Inspektorat		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Jumlah Pembinaan/Monitoring Kinerja	37 Perangkat Daerah							
						Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bogor	1 LHR							
<b>PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>			<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>615.645.000</b>	<b>1.145.000.000</b>			
				<b>Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan</b>	<b>100</b>					
				<b>Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>100</b>					
				<b>Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti Level Maturitas SPIP</b>	<b>100</b>			<b>Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti Level Maturitas SPIP</b>	<b>100</b>					
				<b>Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah</b>	<b>2</b>			<b>Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah</b>	<b>2</b>					
				<b>Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah</b>	<b>45,95</b>			<b>Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah</b>	<b>45,95</b>					
				<b>Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/ diupdate</b>	<b>3</b>			<b>Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/ diupdate</b>	<b>3</b>					
				<b>Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM</b>	<b>8</b>			<b>Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM</b>	<b>8</b>					
				<b>Jumlah PD berpredikat WBK</b>	<b>1</b>			<b>Jumlah PD berpredikat WBK</b>	<b>1</b>					
Penerapan SPIP			Kota Bogor			Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor	3 level			121.200.000	250.000.000	Inspektorat		
						FGD Peningkatan SPIP	1 kali							
						Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas	1 kali							
						Survey kepuasan stake holder	1 kali							
						Pendampingan perwakilan BPKP	4 kali							
						Perwakilan Provinsi Jawa Barat								
						Pembinaan penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Tim Satgas SPIP Kota Bogor	15 orang						
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kota Bogor			Terlaksananya reviu LKPD Kota Bogor Jumlah monitoring pengelolaan keuangan dan aset Expose persiapan awal reviu LKPD Expose penyajian LKPD rinci Klarifikasi penyajian laporan keuangan Laporan hasil reviu	1 kali 12 laporan 1 kali 1 kali 5 kali 1 laporan			27.400.000	150.000.000	Inspektorat	
Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB			Kota Bogor			Jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK  Terlaksananya monitoring RADPPK Terlaksananya penilaian internal ZI Terlaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan  Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB  Terlaksananya Monitoring dan Hasil Evaluasi Penilaian mandiri RB	37 PD  4 kali 1 kali 3 kali  2 kali  1 kali			199.320.000	120.000.000	Inspektorat	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Kapabilitas APIP						Terlaksananya pembangunan / updating infrastruktur PK APIP	4 kali			111.625.000	400.000.000	Inspektorat	
						Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Verifikasi LHKASN	DUPAK 100 Persen 12 kali						
						Terselenggaranya fasilitas diklat, bimtek, sosialisasi, PPSDAM							
Pengawasan internal secara berkala			Kota Bogor			Jumlah laporan Perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja	8 laporan			156.100.000	225.000.000	Inspektorat	
						Jumlah laporan Perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Audit Probity	8 laporan						
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran dan barang jasa	37 Perangkat Daerah						
						Jumlah Laporan PD yang di lakukan monitoring (pembangunan, dana bos, aksi pencegahan korupsi)	3 laporan						
						Jumlah pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Kemenpan, Kemendagri	12 kali						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan/pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran barang dan jasa	37 Perangkat Daerah							
						Ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat	12 pengaduan							
						Jumlah pemantauan tindak lanjut	8 kali							
<b>PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>125.000.000</b>	-			
Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT						Pengembangan Sim HP dalam Penilaian PAK-JFA	2 kali			125.000.000	-	Inspektorat		
						Pengembangan Dokumen Terintegrasi	1 kali							
						Pngembangan WEB SITE	1 kali							
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>										<b>9.888.059.100</b>	<b>1.195.000.000</b>			
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>										<b>794.686.000</b>	-			
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										<b>794.686.000</b>	-			
<b>PERENCANAAN TATA RUANG</b>										<b>794.686.000</b>	-			
Perencanaan Tata Ruang			Kota Bogor			Dokumen Laporan Pendampingan	1 Dokumen			295.336.000	-	Bappeda		
						Materi Sosialisasi Tata Ruang	1 Dokumen							
						Dokumen Kinerja Tata Ruang	1 Dokumen							
Pengembangan Informasi Geospasial			Kota Bogor			Peta Dasar Mutakhir	1 Dokumen			499.350.000	-	Bappeda		
						Simtaru dan Simpul Jaringan	1 Sistem							
<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>										<b>82.690.000</b>	-			
<b>KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>										<b>82.690.000</b>	-			
<b>PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>82.690.000</b>	-			

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah						Buku Data dan Analisa Indikator Pembangunan Daerah	1 Buku			82.690.000	-	Bappeda	
						Berita Acara Analisa Kebutuhan Data Perencanaan Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan	1 Naskah 9216 Elemen Data 1 Dokumen						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										<b>9.010.683.100</b>	<b>1.195.000.000</b>		
<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>										<b>130.327.000</b>	<b>120.000.000</b>		
	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan</b>	<b>70</b>			<b>Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan</b>	<b>70</b>	<b>34.127.000</b>	<b>120.000.000</b>		
				<b>Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR</b>	<b>10</b>			<b>Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR</b>	<b>10</b>				
Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR			Kota Bogor			Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR	1 Dokumen 3 Kali 1 Dokumen			34.127.000	120.000.000	Bappeda	
<b>PENGENDALIAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>80</b>			<b>Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>80</b>	<b>96.200.000</b>	-		
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah						Terselenggaranya Workshop SIPD Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Terselenggaranya Asistensi Evaluasi Kinerja RPJMD Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020	1 kali 1 Dokumen 2 kali 300 buah			96.200.000	-	Bappeda	
<b>PERENCANAAN</b>										<b>8.880.356.100</b>	<b>1.075.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>2.969.439.850</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Jalan Kapten Muslihat No. 21 Kota Bogor			Honorarium Pegawai PNS	12 Bulan			2.969.439.850	-	Bappeda	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Honorarium Pegawai Non Pns (Supir)	12 Bulan						
						Belanja Alat Tulis Kerja	1 paket						
						Pembayaran Listrik	12 bulan						
						Belanja Surat Kabar	12 bulan						
						Pembayaran Air/PDAM	12 bulan						
						Pembayaran Telepon □ □	12 bulan						
						Belanja Makan Dan Minum Rapat	1 paket						
						Pembayaran STNK Roda 2	24 Unit						
						Pembayaran STNK Roda 4	10 Unit						
						Pengadaan Jasa Keamanan	1 paket						
						Pengadaan Jasa Kebersihan	1 paket						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.662.620.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor			Jl, Kapten Muslihat No. 21			Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4 unit			1.001.100.000	-	Bappeda	
						BM.Pengadaan AC 1/2 PK	1 unit						
						BM.Pengadaan Komputer PC	3 unit						
						BM.Pengadaan Printer	2 unit						
						BM.Pengadaan Server	1 unit						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Jalan Kapten Muslihat No. 21 Kota Bogor			Renovasi Bappeda	1 paket			661.520.000	-	Bappeda	
						Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda	1 paket						
						Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda	1 paket						
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>45.479.400</b>	<b>75.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Bappeda Kota Bogor			Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	1 Dokumen			45.479.400	75.000.000	Bappeda	
						Tersusunnya LKIP	1 Dokumen						
						Tersusunnya LKPJ	1 Dokumen						
						Tersusunnya LPPD	1 Dokumen						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	20:100			Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	20:100	858.759.000	-		
				Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	1:100			Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	1:100				
				Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	6			Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	6				
				Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10				
				Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22			Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22				
Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)						Dokumen Hasil Musrenbang Tigkat Kelurahan	1 dokumen			738.900.000	-	Bappeda	
						Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan	6 Kecamatan						
						Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	4 Bidang						
						Rekapitulasi Hasil Musrenbang	1 Dokumen						
						Terlaksananya Forum PD	10 Hari						
						Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota	1 Hari						
						Pameran Pembangunan	1 Paket						
						Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Penghargaan						
						Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	2 Kali						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah						Rancangan RKPD Tahun 2021	8 set			119.859.000	-	Bappeda	
						Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2021	55 Buku						
						Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2020	8 set						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Peraturan Walikota tentang RKPD Perubahan Tahun 2020	55 Buku							
						Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll TA.2021	1 paket							
						Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll Perubahan TA.2020	1 paket							
<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD</b>	<b>73</b>			<b>Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD</b>	<b>73</b>	<b>174.421.000</b>	-			
Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan			Kota Bogor			Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan UKM di Kota Bogor	1 Dokumen			174.421.000	-	Bappeda		
						Dokumen Perencanaan Kota Sehat	1 Dokumen							
						Pembinaan Forum Kota Sehat	12 bulan							
<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD</b>	<b>73</b>			<b>Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD</b>	<b>73</b>	<b>401.928.250</b>	-			
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya						Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	1 dokumen			401.928.250	-	Bappeda		
						Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	2 dokumen							
						Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan	1 dokumen							
<b>PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD</b>	<b>73</b>			<b>Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD</b>	<b>73</b>	<b>1.025.788.800</b>	<b>350.000.000</b>			
Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur			Kota Bogor (Jalan Sekunder, Tersier dan lingkungan)			Dokumen Rencana Induk Utilitas	1 Dokumen			620.000.000	-	Bappeda		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Lingkungan Hidup			Kota Bogor			Dokumen rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 dokumen			116.373.800	-	Bappeda	
Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman			Kota Bogor			Dokumen strategi sanitasi kota  Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi  Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	1 dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen			289.415.000	350.000.000	Bappeda	
<b>PENELITIAN PENGEMBANGAN</b>	<b>Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat</b>		<b>Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan</b>	<b>10</b>			<b>Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan</b>	<b>10</b>	<b>1.741.919.800</b>	<b>650.000.000</b>		
				<b>Persentase Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.</b>	<b>10</b>			<b>Persentase Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.</b>	<b>10</b>				
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bogor			Kota Bogor			Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 Gebyar Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2020 Terfasilitasinya Jejaring Inovasi Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap Kampung Tematik  Sosialisasi HAKI Inovasi Peserta Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Pembuatan Video Inovasi	1 Lomba  1 Acara  1 Jejaring 1 Dokumen  3 sosialisasi  1 Video			652.300.000	650.000.000	Bappeda	
Kajian Lingkup Bidang Ekonomi			Kota Bogor			Tersedianya data, informasi dan arah strategis Rencana Aksi Pendapatan Daerah  Tersedianya data, informasi dan arah strategis Upaya Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Bogor	1 Dokumen  1 Dokumen			536.877.400	-	Bappeda	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya						Tersedianya data informasi, dan arahan strategis rencana pembangunan GOR yg sesuai dengan ketersediaan lokasi dan kebutuhan masyarakat setempat	1 dokumen			289.415.000	-	Bappeda	
Kajian Lingkup Bidang Pembangunan			Kota Bogor			Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Bogor	1 Dokumen			263.327.400	-	Bappeda	
<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								-	-		
Perencanaan Pembangunan Pemerintahan						Buku Hasil Monev Pemerintahan	1 Dokumen			-	-		
<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>										<b>23.650.000.000</b>	<b>3.349.999.999</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN</b>										<b>23.650.000.000</b>	<b>3.349.999.999</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>2.250.000.000</b>	-		
Pengelolaan Rumah Tangga PD						Honorarium Pelaksana Kegiatan	14 Bulan			2.250.000.000	-	BPKAD	
						Honorarium Tim	12 Bulan						
						Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan						
						Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap	12 Bulan						
						Belanja ATK	12 Bulan						
						Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan						
						Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Bulan						
						Belanja Tabung Gas	12 Bulan						
						Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis	12 Bulan						
						Rumah Tangga	12 Bulan						
						Belanja Telepon	12 Bulan						
						Belanja Surat Kabar	12 Bulan						
						Belanja Kawat/Fax/Internet	12 Bulan						
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	12 Bulan						
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	12 Bulan						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Belanja BBM	12 Bulan						
						Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12 Bulan						
						Belanja STNK	12 Bulan						
						Belanja Cetak	12 Bulan						
						Belanja Penggandaan	12 Bulan						
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan						
						Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan						
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>1.200.000.000</b>	-		
Pengadaan Inventaris Kantor						Belanja Pegawai	12 Bulan			500.000.000	-	BPKAD	
						BM Pengadaan Mesin Tik	1 Buah						
						BM Pengadaan Rak Arsip	10 Buah						
						BM Pengadaan Vacuum Cleaner	1 Unit						
						BM Pengadaan AC	4 Paket						
						BM Pengadaan Termos Pemanas	1 Unit						
						BM Pengadaan Server	1 Paket						
						BM Pengadaan Komputer/PC	3 Buah						
						BM Pengadaan Laptop	3 Buah						
						BM Pengadaan Printer	2 Unit						
						BM Pengadaan Meja Gambar Arsitek	1 Buah						
						BM Pengadaan Meja Rapat	1 Buah						
						BM Pengadaan Kursi Sandaran Sedang	4 Buah						
						BM Pengadaan Kursi Putar Sandaran Sedang	30 Buah						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Belanja Pegawai	12 Bulan			700.000.000	-	BPKAD	
						Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan						
						Belanja Penggantian Suku Cadang	6 Unit						
						Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12 Bulan						
						Belanja Pemeliharaan Komputer	12 Bulan						
						Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio	12 Bulan						
						Belanja Pemeliharaan Bangunan	1 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kali  1 Kali						
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah			Tersusunnya Rencana Kerja (Renja)  Tersusunnya LKIP  Tersusunnya LKPJ  Tersusunnya LPPD	1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen			50.000.000	50.000.000	BPKAD	
<b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)</b>	<b>100</b>	<b>3.375.000.000</b>	<b>-</b>		
Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD						Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020  Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 Buku Persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2021 untuk di Evaluasi Gubernur  Nota Keuangan RAPBD 2021 Buku Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021	1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen			300.000.000	-	BPKAD	
Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD						Dokumen Rancangan P APBD 2020	1 Dokumen			375.000.000	-	BPKAD	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Dokumen P APBD 2020	1							
						Dokumen Perubahan Penjabaran APBD 2020	Dokumen							
Penelitian RKA dan DPA OPD						Terselesaikannya verifikasi RKA dan DPA-SKPD	Perangkat Daerah			450.000.000	-	BPKAD		
						Tersusunnya Keputusan Walikota dan Keputusan BUD tentang Kode Rekening	Buku							
						Penjilidan RKA dan DPA	Buku							
Penelitian RKAP dan DPPA OPD						Terselesaikannya verifikasi RKAP dan DPPA-SKPD	Perangkat Daerah			400.000.000	-	BPKAD		
Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD						Laporan Semester 2 Tahun 2019	30 buku			175.000.000	-	BPKAD		
						Laporan Semester 1 Tahun 2020	30 buku							
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						Buku laporan keuangan pemkot bogor	230 Buku			400.000.000	-	BPKAD		
Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD						Pembinaan Penatausahaan Keuangan OPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan	OPD			500.000.000	-	BPKAD		
Pengadministrasian Belanja Langsung						Sosialisasi Pengelolaan Keuangan	OPD			75.000.000	-	BPKAD		
						Laporan Dana Transfer	Laporan							
						Verifikasi Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat	Berkas							
Penyusunan KUA/ KUPA dan PPAS/PPASP						Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 2021 (Kebijakan Pendapatan,Belanja,dan Pembiayaan)	2 Dokumen			400.000.000	-	BPKAD		
						Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 (Kebijakan Pendapatan,Belanja,dan Pembiayaan)	2 Dokumen							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan perencanaan anggaran perangkat daerah						Terlaksananya pembinaan perencanaan anggaran PD	200 peserta			100.000.000	-	BPKAD	
						Sosialisasi terhadap unsur perencanaan anggaran di seluruh perangkat daerah pada lingkup pemerintah Kota Bogor	2 Kegiatan						
Pengadministrasian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan						Updating Daftar Gaji PNS, Non PNS, Tunjangan dan Buku SB BTL dan Verifikasi Dokumen Pencairan Hibah Bansos	100 %			200.000.000	-	BPKAD	
						Pembinaan terkait dengan proses penatausahaan hibah dan bansos	46 Perangkat Daerah						
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan</b>	<b>81</b>			<b>Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan</b>	<b>81</b>	<b>16.775.000.000</b>	<b>3.299.999.999</b>		
Evaluasi Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah			Pemerintah Kota Bogor			Dokumen Hasil Penggunaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	20 Dokumen			500.000.000	600.000.000	BPKAD	
						Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Dokumen Hasil Lelang Barang Milik Daerah	10 Dokumen						
Pemetaan BMD						Buku dan File Digital Peta Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bogor	1 buku dan DVD			250.000.000	-	BPKAD	
						Data tematik dalam bentuk gambar lokasi, peta bidang/gambar gedung dan koordinat	150 bidang						
Pengadministrasian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGKD)						Tersedianya arsip TGR Kota Bogor	40 Kasus			75.000.000	-	BPKAD	
						Tersedianya Sarana Pengarsipan TGR	40 Buah						
Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor			Pemerintah Kota Bogor			Peta Bidang	20 Peta Bidang			250.000.000	400.000.000	BPKAD	
						Sertipikat Kepemilikan Tanah	20 Sertipikat						
Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor			Pemerintah Kota Bogor			Polis Asuransi (Kontrak)	1 Dokumen			1.000.000.000	1.200.000.000	BPKAD	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah						Pembuatan Papan Nama Tanda Kepemilikan Tanah Kepemilikan Tanah Kota Bogor Pembuatan Pagar Batas Tanda Kepemilikan Tanah  Pembuatan Patok Penanda Batas Tanah Pemerintah Kota Bogor	25 Buah  2 Lokasi  1 Paket			500.000.000	600.000.000	BPKAD	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Pemerintah Kota Bogor			Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang diserahkan Pengguna Barang ke Pengelola Barang Terpeliharanya Kendaraan yang diserahkan Pengguna Barang kepada Pengelola	1 Bangunan  2 Kendaraan			200.000.000	499.999.999	BPKAD	
Penatausahaan Barang Milik Daerah						pemutakhiran data BMD dan mutasi BMD	1 kegiatan			300.000.000	-	BPKAD	
Penilaian Barang Milik Daerah						Penilaian BMD untuk Updating neraca	1 kegiatan			1.000.000.000	-	BPKAD	
Kajian Penggunaan dan tertinggi Barang Milik Daerah						Dokumen Kajiann penggunaannm dan tertinggi BMD	Dokumen			200.000.000	-	BPKAD	
Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah						Dokumen Penelitian Pemanfaatan BMD  Penetapan Status penggunaan untuk BMD yang belum ditetapkan status penggunaannya Persetujuan penguasa BMD dan pengelola BMD atas Pemanfaatan BMD Rekomendasi untuk peningkatan status menjadi hak milik atas pelepasan tanah sewa	Dokumen  Dokumen  Dokumen  Dokumen			250.000.000	-	BPKAD	
Pembinaan Pengelolaan BMD						bimbingan teknis kepada pengurus barang pengguna	1 kegiatan			400.000.000	-	BPKAD	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi BMD						Sistem aplikasi penatausahaan BMD	1 kegiatan			1.000.000.000	-	BPKAD	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor			Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor			Gudang Aset Pemerintah Kota Bogor	1 Bangunan			10.000.000.000	-	BPKAD	
Pembangunan Gedung Kantor BPKAD										500.000.000	-	BPKAD	
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						keputusan Walikota Bogor tentang Standar kebutuhan BMD	1 keputusan Walikota			350.000.000	-	BPKAD	
						Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang tentang RKBMD Tahun 2021	1 Keputusan Sekretaris Daerah						
						Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang tentang RKBMD Perubahan tahun 2020	1 Keputusan Sekretaris Daerah						
						Keputusan Walikota Bogor tentang Standar Harga Barang	1 Keputusan						
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>										<b>39.915.944.500</b>	<b>21.225.000.000</b>		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN</b>										<b>39.915.944.500</b>	<b>21.225.000.000</b>		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										<b>5.224.316.500</b>	<b>6.500.000.000</b>		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			Bapenda Kota Bogor			Tersedianya Blangko SPPT dan Barang Koasi SKPD Incomer se Kota Bogor (Karcis Parkir, UPTD Terminal, UPTD RPH, Dispora dan Dinkes)	3 Jenis			5.224.316.500	6.500.000.000	Bapenda	
						Terpenuhi kebutuhan kantor selama 1 tahun ( ATK, Air, Telpo, Listrik, Internet, Surat Kabar/Majalah	12 Bulan						
						Outsourcing Security	9 Orang						
						Outsourcing Kebersihan	7 Orang						
						Tercetaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Paia)	280000 WP						
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian Pegawai	1 Pegawai						
						Belanja Makan Minum Rapat	2515 Box						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Belanja Makan Minum Tamu Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja BBM Mobil Dinas	1800 Box 50 Tabung 10 Mobil Dinas							
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										<b>21.844.053.500</b>	<b>5.500.000.000</b>			
Pengadaan Inventaris Kantor			Bapenda Kota Bogor			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Operasional Bapenda Pengadaan Mobil Truck Roda 6 (Sky Walker)  Pengadaan Mesin Foto Copy	120 Orang 1 Unit  2 Unit			2.000.000.000	3.000.000.000	Bapenda		
						Pengadaan Rak Besi  Pengadaan Filling Cabinet Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Pengadaan Scanner Pengadaan Meja Rapat  Pengadaan Kursi Sandaran Pengadaan Sofa Pengadaan Tripoot Camera Pengadaan CCTV Monitor Interaktif Mesin Perforasi	46 Buah  8 Buah 4 Buah 4 Buah 1 Set  30 Buah 2 Set 4 Buah 1 Set 1 Set 1 Paket 2 Unit							
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			Bapenda Kota Bogor			Terpeliharanya inventaris kantor Pemeliharaan Mobil Dinas Pemeliharaan STNK Mobil Dinas Pemeliharaan Tanah/Taman Pemeliharaan Mesin Perforasi Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas Pemeliharaan Pompa Hydrant Pemeliharaan Pompa Pemeliharaan Mesin Foto Copy Pemeliharaan Genset Pemeliharaan AC Pemeliharaan Kipas Angin Pemeliharaan Lift Pemeliharaan Gondola  Pemeliharaan Gedung Kantor	85 % 15 Unit 15 Unit 1 Paket 1 Paket			2.000.000.000	2.500.000.000	Bapenda		

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Pemeliharaan Jaringan Telepon Pemeliharaan Jaringan Listrik Pemeliharaan Ruang Security Pemeliharaan Luar Gedung	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket						
Pembangunan Gedung Pelayanan			Bapenda Kota Bogor			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Wajib Pajak	90 %			17.844.053.500	-	Bapenda	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>400.000.000</b>	<b>200.000.000</b>		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD			Bapenda Kota Bogor			Penyampaian Pelaporan Tepat Waktu  Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD dan Laporan Akuntabilitas Tepat Waktu  Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, EPPD dan Laporan Keuangan Tepat Waktu  Profil Badan Pendapatan Daerah	100 %  100 %  100 %  250 Buku dan CD			400.000.000	200.000.000	Bapenda	
<b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Nilai Pajak Daerah</b>	<b>713.500</b>			<b>Nilai Pajak Daerah</b>	<b>7E+05</b>	<b>12.447.574.500</b>	<b>9.025.000.000</b>		
				Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	14,91			Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	14,91				
				Nilai Pendapatan Asli Daerah	996.655			Nilai Pendapatan Asli Daerah	1E+06				
				Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	9,25			Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	9,25				
Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah						Ketetapan SPPT PBB P2 dalam cetak massal SPPT PBB P2 berdasarkan SK Ketetapan NJOP DHKP PBB P2  Klasifikasi NJOP	262000 Wajib Pajak  204 Buku 3 Buku			400.000.000	430.000.000	Bapenda	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Monitoring, Profiling dan Maintenance Tapping Box	180 Device						
Rekonsiliasi Pajak Daerah			Bapenda Kota Bogor			Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah Terlaksananya Aplikasi Pembentukan Proses Bisnis Sistem Akuntansi Pajak Daerah (Pengelolaan Realisasi Penerimaan dan Piutang Pajak Daerah)	12 Kali 1 Paket Pekerjaan			500.000.000	500.000.000	Bapenda	
						Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan PPAT dan BPN (125 orang)	4 Kali						
						Terlaksananya Rapat Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tempat Pembayaran Pajak Daerah	20 Kali						
Pemeliharaan Basis Data PBB						Terlaksananya pemeliharaan basis data PBB P2 Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop pemeliharaan Basis Data Terlaksananya pengadaan cetakan lembar Verifikasi Terlaksananya pemetaan objek Pajak PBB P2 Terlaksananya pengadaan cetakan tanda terima SPOP / LSPOP Terlaksananya pengadaan cetakan lembar Verifikasi	30000 OP 204 Orang 100000 Lembar 1 Peta PBB P2 Kota Bogor 100000 lembar 100000 lembar			1.503.133.500	1.750.000.000	Bapenda	
Penyusunan Zona Nilai Tanah						Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar Tersedianya tenaga ahli non sertipikat Tersedianya data pasar hasil survey	1 Paket 4 Orang 2500 Data			400.000.000	400.000.000	Bapenda	
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah						Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan SISMOP (Include Host to Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Aplikasi			1.800.000.000	1.800.000.000	Bapenda	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Lainnya (Include Host to Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPHTB (Include Host to Host dengan Tempat Pembayaran)	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Website	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Pemeliharaan peta digital Pajak Daerah	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan e-retribusi	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi e-SPPT	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Pemeliharaan aplikasi integrasi Pajak Daerah dan Perijinan	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Pemeliharaan aplikasi Simantap	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Pembuatan Aplikasi Android/IOS Pajak Daerah	1 Aplikasi						
						Terlaksananya restrukturisasi data base NPWPD berbasis single identity number	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Aplikasi Integrasi Dengan BPN	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Aplikasi Integrasi Dengan KPP Pratama	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Belanja Video Profil	1 Aplikasi						
						Terlaksananya Pembuatan Buku Manual Aplikasi	1 Aplikasi						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah			Kota Bogor			Terlaksananya Pelayanan Mobil Keliling Pembayaran Pajak Daerah Terlaksananya Monitoring Penagihan Piutang Pajak Daerah oleh Tim Intensifikasi Pajak Daerah  Tersampainya Surat Pemberitahuan/Surat Teguran/SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK PDLB/SKPDN  Cetak Sticker Lunas PBB P2 Cetak Sticker Pengawasan Pajak Daerah	122 Kali      12 Kali   60 Lembar  200000 Lembar 1000 Lembar			700.000.000	1.000.000.000	Bapenda	
Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Kota Bogor			Verifikasi Lapangan Pengurangan dan Keberatan PBB P2 Sosialisasi Pengelolaan Perpajakan Daerah melalui Mesia Massa  Sosialisasi Pajak Daerah melalui Media Elektronik (Radio)  Himbauan tentang PBB P2 melalui Spanduk  Himbauan melalui Roll Up Banner Pemberitahuan melalui Leaflet Himbauan melalui Brosur Pekan Panutan Gebyar Pajak Daerah Goes To School dan Goes To Campus Sosialisasi Langsung Pameran Perpajakan Daerah	100 Berkas  8 Kali  23 Kali  240 Buah  100 Buah 5000 Buah 900 Rim  2 Hari 1 Hari 6 Hari  100 WP 2 Hari			1.698.000.000	2.000.000.000	Bapenda	
Analisa dan Evaluasi						Terlaksananya Diskusi/Seminar/Workshop/Obsesi Pajak Terlaksananya FGD Terlaksananya Observasi Kewajaran Wajib Pajak Terlaksananya Rakor PAD	2 Kali  1 Kali 100 Telaahan  2 Kali			622.550.000	800.000.000	Bapenda	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Analisa / Telaahan PAD	12 Kali						
						Terlaksananya Kajian PAD	1 Kali						
Penataan Panggung Reklame			Kota Bogor			Penataan Panggung Reklame	5 Buah			40.000.000	75.000.000	Bapenda	
Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah			Kota Bogor			Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	12 Bulan			33.891.000	100.000.000	Bapenda	
						Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajak Daerah dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan (Klarifikasi, Pemeriksaan Sederhana/Lengkap, Penghapusan NPWPD, Restitusi)	105 Wajib Pajak						
						Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	105 LHP						
						Penghapusan NPWPD	100 Wajib Pajak						
						Surat Keputusan Penghapusan NPWPD	100 Wajib Pajak						
						Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	2 Kali						
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah			Bapenda Kota Bogor			Terlaksananya pemeliharaan server, komputer, laptop, mesin antrian dan mesin absensi	108 unit			900.000.000	900.000.000	Bapenda	
						Terlaksananya pemeliharaan high speed printer dan plotter	4 unit						
						Terlaksananya pemeliharaan jaringan dan perimeter	1 paket						
						Terlaksananya sewa collocation	1 rak						
						Tersedianya antivirus	50 user						
						Tersedianya OS	25 user						
						Tersedianya office	25 user						
						Terlaksananya pemeliharaan autogate	1 unit						
						Terlaksananya pemeliharaan AC Presisi Ruang Server	1 paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Berbasis Sistem			Wilayah Kota Bogor			Terlaksananya Pembentukan Basis Data Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Berbasis SIG	2200 Data			500.000.000	-	Bapenda	
Penyebaran SPPT PBB P2			Kota Bogor			Diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak	250000 Lembar			1.000.000.000	1.300.000.000	Bapenda	
Penindakan Pajak Daerah			Kota Bogor			Terlaksananya Penertiban Pajak Operasi Penertiban Reklame Operasi Gabungan Permanen Lembur Operasi Non Permanen  Operasi Gabungan Pemasangan Segel Stiker Pajak Daerah Lainnya Operasi Gabungan Pemasangan Plang PBB P2	6 Jenis Pajak 192 Kali 24 Kali 25 Objek Pajak  24 Kali 24 Kali			1.000.000.000	1.000.000.000	Bapenda	
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah			Wilayah Kota Bogor			Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak  Tersedianya Tenaga Outsourcing Uji Potensi Pajak Daerah	203 WP  10 Orang			650.000.000	750.000.000	Bapenda	
						Terlaksananya Uji Potensi Wajib Pajak Daerah Terlaksananya Akurasi Data Pajak Daerah  Terselenggarannya Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Potensi Pajak Daerah	85 WP  500 OP  1 Aplikasi						
<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>								<b>700.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>		
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah			Bapenda Kota Bogor			Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat  Dipertahankannya Sertifikat ISO 9001 : 2018 Tersedianya tenaga outsoursing pelayanan pajak daerah  Tersedianya Fasilitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak	500 responden 1 Sertifikat 8 orang 1 paket			700.000.000	1.000.000.000	Bapenda	

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR</b>										25.785.054.705	2.725.000.000		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>										25.785.054.705	2.725.000.000		
<b>KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>										25.785.054.705	2.725.000.000		
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>										1.600.000.000	2.000.000.000		
Pengelolaan Rumah Tangga PD			BKPSDA Kota Bogor			Honorarium Pegawai Non PNS	12 Bulan			1.600.000.000	2.000.000.000	BKPSDA	
						Belanja ATK	4 Triwulan						
						Cetakan	4 Triwulan						
						Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 Triwulan						
						Internet	12 Bulan						
						Telepon	12 Bulan						
						Surat Kabar	12 Bulan						
						Air	12 Bulan						
						Belanja Peralatan Rumah Tangga	Paket						
						Belanja Pengisian Tabung Gas	Bulan						
						Belanja BBM	Bulan						
						Belanja makan dan minum harian pegawai	Bulan						
						Perjalanan Luar Daerah	Paket						
						Makan Minum Tamu	Bulan						
						Belanja Jasa Keamanan	Paket						
						Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	Paket						
						Belanja Parfum ruangan	Bulan						
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>										2.600.000.000	-		
Pengadaan Inventaris Kantor			BKPSDA Kota Bogor			APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	4 Unit			1.300.000.000	-	BKPSDA	
						Sumur Bor	1 Paket						
						Kendaraan Dinas Minibus (Roda 4)	2 Unit						
						Kendaraan Dinas Motor (Roda 2)	2 Unit						
						Filing Kabinet	3 Unit						
						Lemari Besi	1 Unit						
						Lemari Buku	1 Unit						
						Lemari Kaca	1 Unit						
						Water Dispenser	1 Unit						
						Karpets Musholla	1 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Personal Computer Notebook Computer (Laptop) Printer Printer Color Portable Printer Scanner Server Memory Server Processor Server Harddisk Server Webcam Portable Touchscreen Portable Harddisk Smart Board Wireless Presentation System USB Type C Hub Presentation Remote Handy Camera Digital Camera Wireless Mic Sound System Standing Mic Mic Portable Mic Sound System Ruang Rapat	8 Unit 1 Unit 10 Unit 1 Unit 1 Unit 9 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket 3 Unit 1 Unit 1 Paket						
Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor						Pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik Pemeliharaan APAR (Pengisian Tabung) Pemeliharaan Musholla Service Berkala Kendaraan Roda 4	1 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket			700.000.000	-	BKPSDA	
						Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Scanner Pemeliharaan Facsimile Pemeliharaan Komputer dan Printer Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Server Pemeliharaan LCD Proyektor Isi Ulang Pengharum Ruangan Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Taman Pemeliharaan Pintu Elektronik Lock Pemeliharaan A/C Pelumas Kendaraan Roda 4	1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Paket						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Gedung Badan Kepegawaian			Jalan Julang I, Tanah Sareal Kota Bogor			Pemeliharaan Toilet	1 Tahun			600.000.000	-	BKPSDA	
<b>PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>										<b>105.000.000</b>	-		
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD						Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja PD	10 Dokumen			105.000.000	-	BKPSDA	
						Dokumen Rencana Strategis	10 dokumen						
						Tersusunnya Dokumen LKIP PD	10 Dokumen						
						Tersusunnya Dokumen LKPJ PD	10 Dokumen						
						Tersusunnya Dokumen LPPD PD	10 Dokumen						
						Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan PD	10 Dokumen						
						Sertifikasi ISO	1 Sertifikat						
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase Penempatan Aparatur Pelaksana sesuai formasi</b>	<b>77</b>			<b>Persentase Penempatan Aparatur Pelaksana sesuai formasi</b>	<b>77</b>	<b>8.895.000.000</b>	-		
				<b>Persentase Penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan syarat jabatan (pangkt dan pendidikan formal)</b>	<b>87</b>			<b>Persentase Penempatan pejabat struktural yang sesuai dengan syarat jabatan (pangkt dan pendidikan formal)</b>	<b>87</b>				
				<b>Persentase Penempatan pejabat fungsiona yang sesuai dengan syarat jabatan (pendidikan formal)</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Penempatan pejabat fungsiona yang sesuai dengan syarat jabatan (pendidikan formal)</b>	<b>100</b>				
				<b>Persentase Penyelesaian sengketa</b>	<b>100</b>			<b>Persentase Penyelesaian sengketa</b>	<b>100</b>				
Diklat Teknis dan Fungsional						Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis (penyelenggaraan)	120 Orang			2.600.000.000	-	BKPSDA	
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	200 Orang						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keeluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional ke lembaga penyelenggara (pengiriman)	100 Orang							
						Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi	1 Laporan							
Pengembangan Kompetensi ASN						Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	200 Orang			1.000.000.000	-	BKPSDA		
						Terlaksananya penyusunan kajian analisa kebutuhan pengembangan kompetensi	1 Dokumen							
						Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam	50 Orang							
						Penyusunan Skripsi	50 Orang							
						Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam	0 Orang							
						Penyusunan Tesis	0 Orang							
						Jumlah aparatur yang diberikan bantuan biaya dalam	2 Orang							
						Penyusunan Disertasi	2 Orang							
						Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S1	1 Orang							
						Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S2	4 Orang							
						Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar S3	100 Orang							
						Jumlah aparatur yang diberi beasiswa tugas belajar pendidikan profesi	165 Orang							
						Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	1 Dokumen							
						Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi	165 Orang							
						Kegiatan Penilaian dan Pemetaan Potensi (Talent Pool) Pegawai ASN	165 Orang							
Diklat Dasar dan Kepemimpinan ASN			Kota Bogor			Jumlah peserta pelatihan dasar cpns	150 Orang			5.295.000.000	-	BKPSDA		
						Jumlah peserta diklat kepemimpinan II, III dan IV	100 Orang							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Terlaksananya penyusunan evaluasi pengembangan kompetensi manajerial	1 Laporan							
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>Penguatan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel</b>		<b>Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)</b>	<b>35</b>			<b>Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)</b>	<b>35</b>	<b>12.585.054.705</b>	<b>725.000.000</b>			
				<b>Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan</b>	<b>82</b>			<b>Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan</b>	<b>82</b>					
				<b>Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional</b>	<b>77</b>			<b>Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional</b>	<b>77</b>					
				<b>Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi</b>	<b>87</b>			<b>Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi</b>	<b>87</b>					
Penyebarluasan dan Publikasi			Kota Bogor			Penyebarluasan informasi tentang regulasi, kebijakan, juklak dan panduan bidang manajemen kepegawaian	80 %			105.000.000	-	BKPSDA		
						Penyebarluasan informasi tentang maturitas SPIP dan RB	80 %							
Pengelolaan Data dan Informasi						Jumlah modul aplikasi simpeg	2 Modul aplikasi			750.000.000	-	BKPSDA		
						Pemeliharaan aplikasi dan basis data kepegawaian	2 Paket							
						Tersusunnya buku manual layanan kepegawaian berbasis aplikasi	2 Buku							
Pengembangan Karir Jabatan			Kota Bogor			Terlaksananya Pelantikan pejabat ASN	6 Kali			420.000.000	725.000.000	BKPSDA		
						Terlaksananya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	3 Kali							
						Terlaksananya Penilaian dan Pemetaan Potensi ASN	0 Kali							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kepala Perangkat Daerah	1 Kali						
Pengembangan Karir Jabatan Fungsional						Terlaksananya Sosialisasi dan Focus Discussion (FGD) Jabatan Fungsional Terlaksananya Pelantikan ASN dalam jabatan fungsional Terlaksananya Penilaian dan Pemetaan Potensi ASN jabatan fungsional	3 Kali 6 Kali 2 Jabatan			175.000.000	-	BKPSDA	
Kepangkatan dan Pensiun						Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Penerbitan SK Pensiun Penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Tabungan Hari Tua Terselenggaranya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat <del>Penyesuaian Izajah</del>	1733 SK 279 SK 1515 SK 279 SK 2 Kali			350.600.000	-	BKPSDA	
						Terselenggaranya Kegiatan FGD Kepegawaian dengan OPD Pemerintah Kota Bogor	1 Kali						
Penatausahaan dan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai serta Pelepasan Purnabakti						Pengajuan Karpeg (Kartu Pegawai) Pengajuan Karis (Kartu Isteri) Pengajuan Karsu (Kartu Suami)	234 Kartu 100 Kartu 100 Kartu			250.000.000	-	BKPSDA	
						Pencetakan ID Card PNS Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Penatausahaan Kepegawaian Usulan Perubahan Tunjangan Keluarga Proses Cuti PNS Usulan Konversi NIP Pemrosesan Perpanjangan/Pemberhentian SK TTK	1500 Kartu 1 kali 350 Orang 1000 Orang 10 Orang 130 SK						

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan	
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
						Pemeriksaan dan Uji Kesehatan ASN yang sakit berkelanjutan/tidak cakap jasmani dan/atau rohani Pelepasan Purna Bhakti ASN Sumpah/Janji PNS  Terlaksananya pembinaan penatausahaan pegawai dan pendataan non pns	10 Orang  360 Orang 234 Orang 38 PD							
Peringatan HUT KORPRI						Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Upacara Puncak HUT KORPRI Jalan Sehat HUT KORPRI	1 kali 1 kali 1 kali			100.000.000	-	BKPSDA		
Penataan Arsip Kepegawaian						Tersedianya Layanan Data Arsip Kepegawaian	85 %			100.000.000	-	BKPSDA		
Pengelolaan Kepegawaian Umum						Terlaksananya Pengelolaan Kepegawaian Secara Umum	12 Bulan			8.942.259.000	-	BKPSDA		
Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN						Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Penyusunan e-Formasi  Jumlah PD yang dilakukan Pendampingan Evaluasi Penyusunan e-Formasi  Tersusunnya Formasi ASN  Jumlah ASN yang melakukan pemberkasan untuk Seleksi Alih Tugas □	37 PD  37 PD  1 Dokumen 90 Orang			857.195.705	-	BKPSDA		
						Jumlah ASN yang mengikuti tes seleksi alih tugas Jumlah pelamar penerimaan CPNS Jumlah pelamar CPNS yang berhak mengikuti Tes CAT Jumlah pelamar penerimaan PPPK Jumlah pelamar PPPK yang berhak mengikuti tes CAT	70 Orang  6000 Orang 4500 Orang  1500 Orang 1000 Orang							

Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
				Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberian Penghargaan dan Hukuman Disiplin ASN						Terlaksananya Pemrosesan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	8 orang			430.000.000	-	BKPSDA	
						Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pembinaan Disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010	38 PD						
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS (Sidak)	38 PD						
						Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian tentang Disiplin dan Kinerja	2 Kali						
						Terlaksananya Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya PNS	400 Orang						
						Terlaksananya Kegiatan Penghargaan ASN Berprestasi	12 orang						
						Terprosesnya izin perkawinan dan perceraian	18 Orang						
						Terlaksananya Kegiatan penyusunan Standar teknis Kegiatan PNS	10 PD						
						Terlaksananya Penyusunan Indikator Kinerja Individu	10 PD						
						Terlaksananya Sosialisasi Izin Perkawinan dan Perceraian	90 orang						
						Terlaksananya Pembinaan Penilaian Prestasi kerja (SKP) ASN	10 PD						
						Sosialisasi Kepatuhan Penyampaian LHKPN	1 Kali						
						Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja ASN	20 PD						
						Jumlah wajib LHKPN	155 Orang						
						Tersusunnya kajian pengembangan sistem penilaian kinerja ASN	1 Dokumen						
Evaluasi di Bidang Manajemen Kepegawaian						Terlaksananya Evaluasi Capaian di Bidang Kepegawaian	85 %			105.000.000	-	BKPSDA	

## **BAB VI**

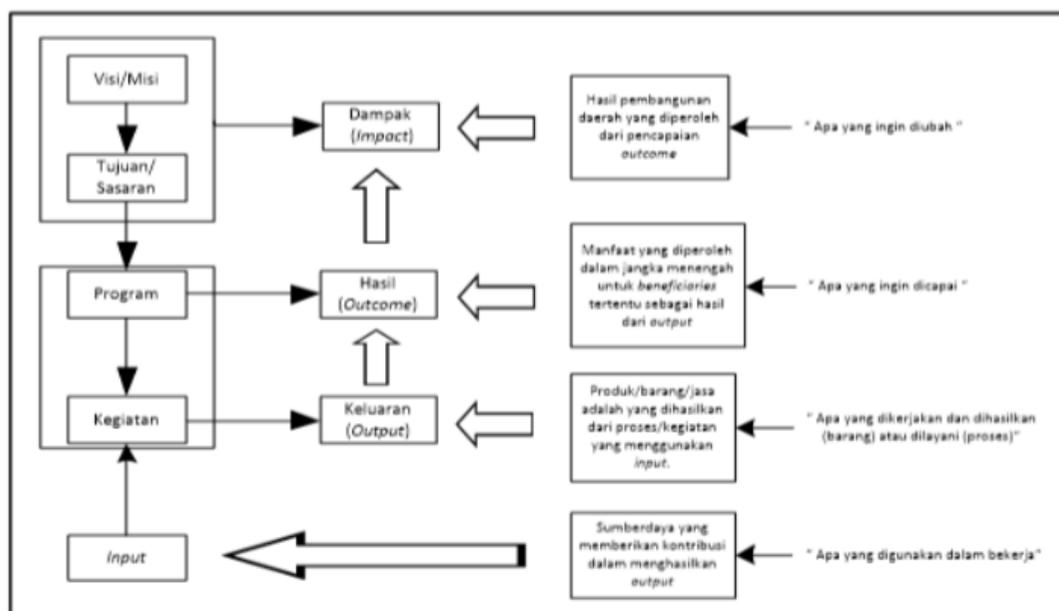
### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 1, mengatur bahwa kinerja adalah keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu ditetapkan tolok ukur/indicator tingkat keberhasilannya. Berikut ini adalah terminology tahapan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Gambar 6.1.  
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Gambar G-B.5

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu :

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) daerah
2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah

## 6.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari sasaran Strategik RPJMD		TARGET KINERJA TAHUN 2020
1	AHH saat lahir (Tahun)	73.69
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	68
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (point)	0.45
4	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman (%)	86.34
6	Persentase Luasan kawasan kumuh (%)	1.37
7	Indeks Kualitas Air (Point)	49.67
8	Persentase Reduksi Sampah (%)	6.4
9	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik (%)	5.91
10	Indeks Kualitas Udara (Point)	85.9
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	10.63
12	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13.6
13	Nilai rata -rata Ujian Nasional Tingkat SD (Point)	68.14
	Nilai rata -rata Ujian Nasional Tingkat SMP (Point)	58.3
14	Indeks Pembangunan Pemuda (Point)	56.31
15	Indeks Inovasi daerah (Point)	600-610
16	Indeks Pemberdayaan Gender (Point)	69.5
17	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	BB
18	Level Kematangan Smart City (Level)	Initiative
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8.47
20	Angka Kemiskinan (%)	5.8

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari sasaran Strategik RPJMD		TARGET KINERJA TAHUN 2020
21	Indeks Ketahanan Keluarga (point)	73-74
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.66
23	PDRB Per Kapita (Dalam Juta Rp)	40.36
24	Pengeluaran Per Kapita (Dalam Ribu Rp.)	11.124
25	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024) (%)	20
26	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024) (%)	20
27	Persentase Jalan Berkondisi Baik (%)	90
28	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum (%)	50

## 6.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 6.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja  
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor

	<b>ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Laju Inflasi	%	3,69	≤ 3.6 %	≤ 3.5 %
2	PDRB per kapita	Juta Rp.	38,5		
3	indeks gini	Point	0,41	0.4	0.39
4	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	%	94.07	94.2	94.22
5	indeks pembangunan manusia (IPM)	Point	75,66	76.67	77.23
6	Jumlah Penduduk	jiwa	1,029,084	1.098.900	1.108.200
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	6.48*	6.66	6.75
8	Indeks Gini	poin	0,41	0.4	0.39
9	angka melek huruf	Persen	99,98	99,98	99,98
10	rata rata lama sekolah	tahun	10,30	10.63	10.97
11	harapan lama sekolah	tahun	13.38	13.6	13.9
12	angka usia harapan hidup	tahun	73.21	73.69	73.96
13	persentase balita sangat Kurus dan Kurus	persen	2.08	1.97	1.86
14	Pesentase balita gizi buruk dan gizi Kurang	persen	4.53	4.42	4.31
17	cakupan desa siaga aktif	persen	100	100	100
18	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62,27	64.30	65.55

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
19	tingkat pengangguran terbuka	opini	9,57	8.47	8.22
20	rasio penduduk yang berkerja	persen	57,1	59.46	61.01
21	rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	persen	90,35	90.62	90.80
23	keluarga pra sejahtera	persen	7.38	7	6.5
24	indeks kepuasan masyarakat	angka	3,39	3.41	3.43
25	persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	39.81	44.49	45.72
26	opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP
27	pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	84,9	86,9	87,9
28	penguatan cadangan pangan	Ton	5,4	30	26,72
30	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,73	0.696	0.681
31	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Konstan	persen	0,81	0.75	0.73
32	produksi Pertanian (Padi)	ton	5.439	5.548	5.602
33	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	18,34	18.22	18.18

	<b>ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
34	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	18,6	18.7	18.8
35	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	21,21	21.07	21.00
36	kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	18,35	18.28	18.26
37	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,212	0.211	0.210
38	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan	persen	0,22	0.218	0.217
39	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	12,04	12.31	12.42
40	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan	persen	22	21.76	21.66
<b>II</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
1	Pengeluaran konsumsi perkapita	Ribu Rp.	10.940	11.396	11.533

	<b>ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2	Angka kriminalitas	Angka	0,00048	0,00047	0,00046
3	Rasio ketergantungan	Persen	42,28	41.54	41.17
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67.37	69.5	70.5
5	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62,27	64.30	65.55
<b>III</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>A</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1</b>	<b>PENDIDIKAN</b>				
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	49,06	50	50.55
2	Angka partisipasi sekolah	Persen	100	100	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	108,05	108,06	108,07
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,14	94,15	94,20
5	Angka Partisipasi Kasar				
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	112,6	113	113.05
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	104,1	104.3	104.8

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
6	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Persen	115.271	115,28	115,29
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	30,93	30,94	30,95
7	Angka Putus Sekolah				
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0	0.06	0,05
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0	0.06	0,05
8	Angka kelulusan				
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100
9	Angka Melanjutkan (AM):				
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	100	100
10	Fasilitas Pendidikan :				
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	93.7	94.5	94.8
	Sekolah pendidikan SMP/MTs	Persen	94.7	94.8	95
11	Rasio ketersediaan sekolah/pendudu	Rasio	33,14	33,15	33,16

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	k usia sekolah pendidikan dasar				
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	31,26	31,25	31,22
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	01:33	1:33	1:33
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP	Rasio	01:23	1:23	1:23
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	99,73	100,73	101,05
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,98	99,98	99,98
17	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	Persen	99,98	98,15	97,80
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	87,87	88	88,1
<b>2</b>	<b>KESEHATAN</b>				
1	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	2.95	2.95	2.94
2	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Angka	3.35	3.35	3.34
3	Rasio Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	0,024	0.024	0.023

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
4	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	60	86	85
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,06	0.08	0.10
6	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,018	0,024	0,026
7	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,32	0.34	0.36
8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,74	0,80	0,84
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	74,1	75	76
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	96	97	98
12	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	98,5	98.7	99
13	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100
14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	96,5	97	97.5
15	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	non polio AFP rate	7 Kasus Negatif	8 Kasus Negatif	8 Kasus Negatif
16	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	Persen	100	100	100

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
17	Persentase kesembuhan TB Paru	Persen	81.22	86	86
18	Prevalensi HIV Aids	Persen	0.42	< 0.5	< 0.5
19	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Persen	66	65	62.5
20	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100
21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	97,2	100	100
22	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	100
23	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100
24	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100
25	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100
<b>3</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>				
	<b>PEKERJAAN UMUM</b>				
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88.59	89	89.25

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,62	0.62	0.63
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	88,59	89	89.25
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	66,44	66.5	66.6
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	Persen	62.21	63.85	66.86
6	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	71,57	75	77.5
7	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	Lokasi	1100	1105	1225
8	Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%)	Persen	57,29	58,75	60,00
9	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)	Persen	90	91,03	92,06
10	persentase penduduk berakses air minum	Persen	93,26	86.34	89.48
11	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan	persen	79,02	86,34	89.48

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	terhadap air minum aman				
12	persentase areal kawasan kumuh	Persen	1.43	1.43	1.37
13	Persentase Reduksi Sampah	Persen	6.26	6.4	6.6
14	Luas TPU Hijau yang terkelola dengan baik (Ha)	Persen	46.2	46.9	47.6
<b>PENATAAN RUANG</b>					
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	20	20	20
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	35	37	39
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	80	82	84
<b>4</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
1	Persentase RTLH	persen	29,4	25,20%	23,21%
2	Persentase Rumah Layak Huni	persen	70,6	74,80%	76,79%
3	Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU	persen	74,03	74,47%	75%
4	Luas pencegahan kawasan kumuh pada permukiman tidak tertata	persen	5.553,18	5.553,18	5.586,98

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
5	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa	persen	76,61	80	85
6	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	77,33	78	78.5
<b>5</b>	<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	75	80	85
2	Persentase Penegakan PERDA	persen	90	90	95
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	70	75	80
4	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana	persen	70	75	80
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	15	≤ 15	≤ 15
<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>				
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	persen	91,45	95,18	99
2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	91,45	95,18	99

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	91.45	95,18	99
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	persen	NA	10	15
5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	NA	10	15
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	persen	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	persen	12.94	15	17.5
<b>B</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>				
<b>1</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				

	<b>ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	persen	100	100	100
2	Tingkat kesempatan kerja	persen	<b>90,38</b>	<b>91,53</b>	91.87
3	Persentase penurunan angka kecelakaan kerja	persen	27.13	10	10
4	besaran kerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Rp.	3.557.146	4.149.797	4.481.780
5	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	109.416	233.578	252.264
6	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Tenaga Kerja	2.198	2.500	2.500
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Tenaga kerja	144	100	100
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tenaga kerja	50	190	240
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Tenaga kerja	26	30	35
<b>2</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2.2	2,3	2,4
2	Proporsi kursi yang diduduki	Persen	17.78	18,18	18,18

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	perempuan di DPRD Kota Bogor				
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	11,72	12,22	12,72
4	Rasio KDRT	Persen	0.05	0,10	0,15
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	26,88	26,98	27,08
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100

	<b>ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	8,9	10	12
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100	100
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	47,16	56,60	66,03
<b>3</b>	<b>PANGAN</b>				
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/tahun	198,36	214,38	222,87
2	Ketersediaan energi perkapita	kkal/kap/hr	2512,8	2400	2400
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hari	89,4	63	63
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	91,53	93	93,5
<b>4</b>	<b>PERTANAHAN</b>				

	<b>ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	50	55	60
<b>5</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>				
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	49.6	49.67	49.7
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	85.86	85.9	86
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	50	50	55
8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	ada	ada	ada
9	Terlaksananya pemberian	ada/tidak	ada	ada	ada

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	penghar gaan lingkungan hidup				
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.	Persen	50	60	70
11	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	75.37	76	76.5
12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	6.26	6.4	6.6
13	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	81.47	80.1	81.5
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	81.47	80.1	81.5
<b>6</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada

	<b>ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	75	80	85
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	75	76	80
8	Kepemilikan KTP	Persen	93.30	99.50	99.80
9	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 PDDK	Buah	25	25	24,5
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	94.07	95	96
11	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	Persen	3.80	25	30
<b>7</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	75	75	75
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	75	75	75
<b>8</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>				
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,53	1,53	1,53
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,04	2,04	2,04

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	Persen	37,83	37,83	37,83
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	2,70	2,70	2,70
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	NA	5	5
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan	Jumlah	NA	-	-
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jumlah	2	2	2
8	Ratio Akseptor KB	Persen	77,41	77,41	77,42
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	77,41	77,41	77,42

	<b>ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	11,42	11,41	11,40
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,16	0,16	0,15
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	11,43	11,42	11,41
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	22,00	22,00	22,07
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	77,41	77,41	77,42
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	66	66,05	66,06
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	52,73	52,74	52,75
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	25,75	25,76	25,77
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	-	-	-
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	Persen	40,68	42,18	43,48

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Remaja/Mahasiswa				
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	persen	39,94	39,94	39,94
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	30	30	30
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	100	100	100
26	Cakupan penyediaan Informasi Data	Persen	-	-	-

	<b>ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Mikro Keluarga di setiap desa				
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	70	77	79
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	35,13	35,30	35,47
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21
<b>9</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	21.182.143	22.442.108	23.140.448
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	0,0026	0,0021	0,0024
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	2.693	2.234	2.620
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit terminal bis	3	3	3
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	1.11	1.36	1.22
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	100	100	100
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	25,64	14,91	15,07

	<b>ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1.31	1.25	1.19
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpang	24.261.237	16.466.814	21.457.800
10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga / bandara/ terminal	penumpang	4.042.141	4.890.991	5.380.090
<b>10</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	57	66	74
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	61	65	67
2	Persentase peningkatan omzet UMKM Per Tahun	Persen	0	25	25
<b>12</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>				
1	Nilai Investasi	trilyun rupiah	2,3	2,50	2,53
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	5	8.6	1.2
<b>13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				
1	Jumlah perolehan medali Pertandingan Olahraga Tk. Internasional	Medali	4	4	3

	<b>ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
2	Jumlah perolehan medali Pertandingan Olahraga Tk. nasional	Medali	14	66	16
3	Jumlah perolehan medali Pertandingan Olahraga Tk. Propinsi Jabar	Medali	162	64	32
4	jumlah wirausahawan muda pemula	orang	25	30	30
5	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persen	20	40	60
6	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	Persen	5	5	5
<b>14</b>	<b>STATISTIK</b>				
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
3	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
4	Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada
<b>15</b>	<b>PERSANDIAN</b>				
1	Level Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	NA	Level 1	Level 1
<b>16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>				

	<b>ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni/budaya	Persen	10	10	10
2	jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pa sanggiri /Lomba/Sayemba ra Karyaseni	Jenis	15	15	17
3	Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	Pelaku Ekonomi	100	150	150
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	Persen	2	2	2
<b>17</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>				
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustaka	25.421	35.000	42.000
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	67.999	77.370	79.870
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustakaa n	6,6	7,5	7,7
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahu n	pemustaka	25.421	35.000	42.000

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	37.017	39.517	42.017
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	7	9
<b>18</b>	<b>KEARSIPAN</b>				
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	NA	25	45
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	NA	100	100
<b>C</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>				
<b>1</b>	<b>PARIWISATA</b>				
1	Kunjungan wisata	Orang	7.965.987	7.004.033	7.704.436
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1-2 hari	2	2-3
<b>2</b>	<b>PERTANIAN</b>				
1	Produktivitas padi per hektar	ton/ha	7	7,14	7,21
2	Cakupan bina kelompok petani	persen	68.97	70,25	71,43
<b>3</b>	<b>PERDAGANGAN</b>				
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	persen	99.283.771,63 USD	2,5	2,75
<b>4</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>				
1	Persentase IKM yang produktif	persen	1000 IKM	2	2.1
<b>5</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
1	Produksi perikanan (Persentase)	%	97,86	98	99

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Produksi Ikan Konsumsi)				
2	Konsumsi ikan (Persentase Konsumsi Ikan)	%	96,46	97	98
3	Produksi Ikan Konsumsi	ton	4980	5129	5179
4	Jumlah Konsumsi Ikan	kg	28.068.674,50	30.939.680	31.553.524
<b>D</b>	<b>FOKUS PENUNJANG URUSAN</b>				
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi	persen	100	100	100

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Program RPJMD kedalam RKPD				
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	-	-
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	-
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	1	1	1
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	-
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	100
13	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	100
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100
<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>				

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	10,89	10.7	10.5
3	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	0	0	0
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	23,49	20	20
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	16,54	10	10
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	rasio (BL/BTL)	54.3% : 45.2%	55 % : 45 %	55.5% : 44.5%
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
<b>3</b>	<b>KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT</b>				
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	1	2	4
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	91.84	95	95
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	72	75	80
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	34	34

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150	150	150
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3690	3700	3705
<b>4</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Penerapan SIDA:	persen	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	73.68	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	100	100	100
<b>5</b>	<b>PENGAWASAN</b>				
1	Persentase pelanggaran pegawai	persen	0.084	0.075	0.060
2	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	100	100	100
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	100	100	100
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	persen	100	100	100
<b>6</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	ada
<b>7</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,31	3,32	3.35
2	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	Persen	18,92	67,56	70.27

	<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
3	Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana	Persen	80	80	83
4	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	Persen	90	95	95
5	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	Persen	100	100	100
6	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	Persen	70	70	75
7	Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	Persen	43	50	55
<b>8</b>	<b>Kecamatan</b>				
1	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	Persen			
2	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	Persen	80	82	85
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	Indeks	3	3.1	3.2

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan daerah tahun 2020 yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2020. Penetapan prioritas rencana pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2020, sinergi dengan tahapan pencapaian target Tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan jangka pendek Tahun 2020 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024. Penetapan prioritas rencana pembangunan daerah tahun 2020 mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD 2020 ini dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan daerah oleh semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Bogor, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Sebagai langkah Awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2020, RKPD 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Bogor.
4. Dalam Rangka Sinkronisasi, Sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber pada APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah, maka setiap perangkat daerah harus menyusun dan membuat RENJA Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan

program/kegiatan tahun 2020 pada masing-masing perangkat daerah.

5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana pembangunan, mekanismenya difasilitasi melalui Forum Perangkat daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2020. Oleh karena itu, implementasi terhadap usulan masyarakat tersebut harus terus dikawal secara lebih seksama, sehingga aspirasi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam pembangunan Kota Bogor Tahun 2020.
6. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap perangkat daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota, melalui Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Bogor.
7. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah setiap triwulan pada Tahun 2020, sesuai dengan amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

